Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2027



Bersama Mewujudkan
Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    b. prioritas pembangunan Daerah;
    c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    d. program strategis nasional.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan
c. penyusunan rancangan APBD tahun 2027.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;

d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII memuat penutup.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Bupati melalui kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kepala Bappelitbangda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 setiap satu kali 3 (tiga) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappelitbangda kepada Bupati.

Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak-sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			**i**
DAFTAR TABEL			**iv**
DAFTAR GRAFIK			**xiii**
DAFTAR GAMBAR			**xvii**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I-1**
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-9
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-12
	1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-14
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**		**II-1**
	2.1	Gambaran Kondisi Umum Daerah	II-1
		2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-65
		2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-65
		2.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-77
		2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-83
		2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adapatif	II-93
		2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-94
		2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif	II-98
	2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-102
		2.3.1 Daya Saing Sumber Daya	II-102
		2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-105
		2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau	II-116
		2.3.4 Transformasi Digital	II-118
		2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-120
		2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-126
		2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-130
	2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-137
		2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-137
		2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh & Demokrasi Substansial	II-144
		2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-147
		2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-148
	2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-212
		2.5.1 Evaluasi RKPD Sampai dengan Akhir Tahun 2025	II-787
		2.5.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	II-805
	2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-878
		2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Daerah	II-878

		2.6.2 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Daerah	II-892
	2.7	Isu Strategis	II-921
		2.7.1 Isu Strategis Nasional	II-921
		2.7.2 Isu Strategis Provinsi	II-921
		2.7.3 Isu Strategis Daerah	II-922
	2.8	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2025	II-924
	2.9	Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2030	II-926
		2.9.1 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-927
		2.9.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar	II-969
		2.9.3 Capaian Indikator Berdasarkan Standar Pelayaan Minimal (SPM)	II-971
		2.9.4 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB/SDGs	II-972
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**		**III-1**
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
		3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	III-1
		3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	III-3
		3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	III-5
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
		3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-11
		3.2.2 Neraca Daerah	III-20
		3.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-23
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**		**IV-1**
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-1
		4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027	IV-1
		4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027	IV-5
		4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-8
	4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2027	IV-34
		4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027	IV-34
		4.2.2 Program Strategis Nasional	IV-43
		4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027	IV-51
		4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	IV-55
		4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupeten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-67
		4.2.6 Lima Puluh Kota The Central of Agro	IV-94
		4.2.7 Prioritas Pembangunan Daerah Lintas	IV-97

Urusan Berbasis Resiliensi Bencana

4.2.8 Pendukungan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga IV-100

4.2.9 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah IV-118

4.2.10 Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak IV-119

4.2.11 Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota IV-126

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2027 V-1

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

6.1 Indikator Kinerja Makro VI-1

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI-3

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2	Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-5
Tabel 2.4	Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai	II-5
Tabel 2.5	Kategori Curah Hujan Menurut BMKG	II-6
Tabel 2.6	Data Klimatologi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2024	II-7
Tabel 2.7	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-8
Tabel 2.8	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-10
Tabel 2.9	Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-11
Tabel 2.10	Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-11
Tabel 2.11	Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-12
Tabel 2.12	Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-13
Tabel 2.13	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-14
Tabel 2.14	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-15
Tabel 2.15	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-16
Tabel 2.16	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-16
Tabel 2.17	Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-17
Tabel 2.18	Indeks Daya Dukung per Kecamatan	II-18
Tabel 2.19	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-20
Tabel 2.20	Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-21
Tabel 2.21	Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-21
Tabel 2.22	Perkembangan Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-22
Tabel 2.23	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-23
Tabel 2.24	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-23
Tabel 2.25	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-24
Tabel 2.26	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-25
Tabel 2.27	Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-30
Tabel 2.28	Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-31
Tabel 2.29	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-32
Tabel 2.30	Data Kerusakan akibat Kekeringan dan Banjir Komoditi Padi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-33
Tabel 2.31	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2030	II-34

Tabel 2.32	Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-36
Tabel 2.33	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-38
Tabel 2.34	Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-39
Tabel 2.35	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-40
Tabel 2.36	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-41
Tabel 2.37	Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-42
Tabel 2.38	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-44
Tabel 2.39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-45
Tabel 2.40	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2025	II-46
Tabel 2.41	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2022 - 2025	II-47
Tabel 2.42	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-48
Tabel 2.43	Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-52
Tabel 2.44	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-59
Tabel 2.45	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-60
Tabel 2.46	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2025	II-62
Tabel 2.47	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-62
Tabel 2.48	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2025	II-64
Tabel 2.49	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2025	II-65
Tabel 2.50	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2021 – 2025 (Rupiah/kapita/bulan)	II-67
Tabel 2.51	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (ribu jiwa)	II-68
Tabel 2.52	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-77
Tabel 2.53	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II-80
Tabel 2.54	Jumlah Kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-80
Tabel 2.55	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-81
Tabel 2.56	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021–2025	II-84
Tabel 2.57	Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-85
Tabel 2.58	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2025	II-86
Tabel 2.59	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-86
Tabel 2.60	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-87
Tabel 2.61	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima	II-89

Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

Tabel 2.62	Jumlah Anak Tidak Sekolah per Kategori di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-90
Tabel 2.63	Status Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-91
Tabel 2.64	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)	II-93
Tabel 2.65	Warisan Budaya Tak Benda (WbtB) Kabupaten Lima Puluh Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	II-96
Tabel 2.66	Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-98
Tabel 2.67	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025	II-99
Tabel 2.68	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2021-2025	II-100
Tabel 2.69	Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2025	II-102
Tabel 2.70	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-103
Tabel 2.71	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran Tahun 2021-2025	II-104
Tabel 2.72	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	II-104
Tabel 2.73	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-107
Tabel 2.74	Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-108
Tabel 2.75	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-109
Tabel 2.76	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-115
Tabel 2.77	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-116
Tabel 2.78	Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2025	II-119
Tabel 2.79	Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota	II-121
Tabel 2.80	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-124
Tabel 2.81	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-125
Tabel 2.82	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-126
Tabel 2.83	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-128
Tabel 2.84	Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-129
Tabel 2.85	Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021– 2025	II-131
Tabel 2.86	Perkembangan Nilai Transaksi Saham Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-133
Tabel 2.87	Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-134
Tabel 2.88	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-139
Tabel 2.89	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 Berdasarkan Penilaian Ombudsman	II-140
Tabel 2.90	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota	II-140

	Tahun 2021 – 2025 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB	
Tabel 2.91	Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-142
Tabel 2.92	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	II-143
Tabel 2.93	Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-144
Tabel 2.94	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-145
Tabel 2.95	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-147
Tabel 2.96	Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-148
Tabel 2.97	Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025	II-152
Tabel 2.98	Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025	II-152
Tabel 2.99	Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025	II-153
Tabel 2.100	Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-153
Tabel 2.101	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-154
Tabel 2.102	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-155
Tabel 2.103	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025	II-155
Tabel 2.104	Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-156
Tabel 2.105	Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-157
Tabel 2.106	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2025 berdasarkan e-PPGBM	II-158
Tabel 2.107	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2025	II-158
Tabel 2.108	Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-160
Tabel 2.109	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-161
Tabel 2.110	Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2021 - 2025	II-163
Tabel 2.111	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021–2025	II-164
Tabel 2.112	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota	II-171
Tabel 2.113	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-172
Tabel 2.114	Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-173
Tabel 2.115	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2025	II-174
Tabel 2.116	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	II-174
Tabel 2.117	Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-175
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-176

Tabel 2.119	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota 2025	II-177
Tabel 2.120	Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-178
Tabel 2.121	Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-180
Tabel 2.122	Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-180
Tabel 2.123	Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-181
Tabel 2.124	Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-181
Tabel 2.125	Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-183
Tabel 2.126	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-184
Tabel 2.127	Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-184
Tabel 2.128	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025	II-186
Tabel 2.129	Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-187
Tabel 2.130	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-188
Tabel 2.131	Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-189
Tabel 2.132	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-190
Tabel 2.133	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-190
Tabel 2.134	Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2025	II-191
Tabel 2.135	Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-191
Tabel 2.136	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-192
Tabel 2.137	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-192
Tabel 2.138	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-194
Tabel 2.139	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-195
Tabel 2.140	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-195
Tabel 2.141	Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-196
Tabel 2.142	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-197
Tabel 2.143	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-198
Tabel 2.144	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2021 – 2025	II-198
Tabel 2.145	Hasil Evaluasi SAKIP	II-199
Tabel 2.146	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-200
Tabel 2.147	Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-200
Tabel 2.148	Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-201

Tabel 2.149	Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2021-2025	II-202
Tabel 2.150	Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2025	II-202
Tabel 2.151	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-203
Tabel 2.152	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-203
Tabel 2.153	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-204
Tabel 2.154	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-205
Tabel 2.155	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-207
Tabel 2.156	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-207
Tabel 2.157	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-208
Tabel 2.158	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-209
Tabel 2.159	Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-209
Tabel 2.160	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	II-214
Tabel 2.161	Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2025	II-788
Tabel 2.162	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Bidang Urusan pada Perubahan RKPD 2025	II-793
Tabel 2.163	Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD	II-797
Tabel 2.164	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-806
Tabel 2.165	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025	II-819
Tabel 2.166	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKK) Tahun 2025	II-830
Tabel 2.167	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan	II-886
Tabel 2.168	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan	II-891
Tabel 2.169	Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)	II-928
Tabel 2.170	Indikator Khusus yang Bukan Menjadi Kewenangan Kabupaten	II-930
Tabel 2.171	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota	II-931
Tabel 2.172	Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-932
Tabel 2.173	Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target	II-945
Tabel 2.174	Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)	II-962
Tabel 2.175	Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data	II-969
Tabel 2.176	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial	II-970
Tabel 2.177	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi	II-970
Tabel 2.178	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan	II-971

Tabel 2.179	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	II-971
Tabel 2.180	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM	II-972
Tabel 2.181	Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs	II-886
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Proyeksi Indikator Tahun 2026 dan 2027	III-5
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	III-10
Tabel 3.3	Efektivitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)	III-15
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021-2025	III-17
Tabel 3.5	Perkembangan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2021-2025 (Rp juta)	III-17
Tabel 3.6	Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021-2025 (Rp juta)	III-18
Tabel 3.7	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025(Rp juta)	III-18
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (Rp. juta)	III-20
Tabel 3.9	Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2021-2025 (Rp juta)	III-21
Tabel 3.10	Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	III-22
Tabel 3.11	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2028	III-26
Tabel 3.12	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2028	III-29
Tabel 3.13	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2024-2028	III-31
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2027	III-32
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-6
Tabel 4.2	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah VISI: Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	IV-9
Tabel 4.3	Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	IV-12
Tabel 4.4	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027	IV-33
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025-2029	IV-35
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027	IV-51
Tabel 4.7	Perbandingan Prioritas Pembangunan Pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-68
Tabel 4.8	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-69
Tabel 4.9	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 1 Pembinaan Agama Dan Adat Serta Kerukunan Antar Umat Beragama	IV-71
Tabel 4.10	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 2 Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan DaerahSasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah	IV-73
Tabel 4.11	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 3	IV-74

	Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	
Tabel 4.12	Prioritas 4 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial	IV-75
Tabel 4.13	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 5 Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil	IV-77
Tabel 4.14	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 6 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	IV-78
Tabel 4.15	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 7 Penguatan Kelembagaan, Redistribusi Lahan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi	IV-79
Tabel 4.16	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 8 Pemerataan infrastruktur Strategis, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	IV-80
Tabel 4.17	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 9 Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	IV-81
Tabel 4.18	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027 Prioritas 10 Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	IV-82
Tabel 4.19	Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju 2028	IV-84
Tabel 4.20	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025	IV-95
Tabel 4.21	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2025	IV-95
Tabel 4.22	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2025	IV-96
Tabel 4.23	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025	IV-96
Tabel 4.24	Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun 2027	IV-99
Tabel 4.25	Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Gerakan PKK pada Perangkat Daerah	IV-103
Tabel 4.26	Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Gerakan PKK pada Kecamatan	IV-111
Tabel 4.27	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penanganan dan Pencegahan ATS	IV-118
Tabel 4.28	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-121
Tabel 4.29	Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-127
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027	V-2
Tabel 5.3	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2027	V-6
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 – 2028	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 – 2028	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028	VI-5

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Km2)	II-2
Grafik 2.2	Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-17
Grafik 2.3	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-40
Grafik 2.4	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025	II-41
Grafik 2.5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025	II-43
Grafik 2.6	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-44
Grafik 2.7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025	II-46
Grafik 2.8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2022 - 2025	II-47
Grafik 2.9	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-48
Grafik 2.10	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2025	II-59
Grafik 2.11	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-60
Grafik 2.12	Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-63
Grafik 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)	II-66
Grafik 2.14	Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025	II-68
Grafik 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2025	II-69
Grafik 2.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025	II-69
Grafik 2.17	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 (%)	II-70
Grafik 2.18	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 (juta rupiah)	II-71
Grafik 2.19	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (juta rupiah)	II-72
Grafik 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)	II-73
Grafik 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 - 2025 (%)	II-73
Grafik 2.22	Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2025	II-75
Grafik 2.23	Gini Rasio Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-75
Grafik 2.24	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (Poin)	II-76
Grafik 2.25	Indek Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2025 (poin	II-77
Grafik 2.26	Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025 (Tahun)	II-78

Grafik 2.27	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-79
Grafik 2.28	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 berdasarkan e-PPGBM (%)	II-79
Grafik 2.29	Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	II-82
Grafik 2.30	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2025 (%)	II-83
Grafik 2.31	Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	II-87
Grafik 2.32	Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2020 - 2025 (Tahun)	II-88
Grafik 2.33	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025	II-94
Grafik 2.34	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2021 - 2025	II-101
Grafik 2.35	Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tahun 2025	II-102
Grafik 2.36	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat	II-105
Grafik 2.37	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-105
Grafik 2.38	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-106
Grafik 2.39	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025	II-110
Grafik 2.40	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-111
Grafik 2.41	Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-112
Grafik 2.42	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-113
Grafik 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2025	II-115
Grafik 2.44	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-117
Grafik 2.45	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-118
Grafik 2.46	Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2025	II-120
Grafik 2.47	Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng	II-122
Grafik 2.48	Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras	II-122
Grafik 2.49	Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting	II-123
Grafik 2.50	Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2025	II-124
Grafik 2.51	Perbandingkan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima	II-125

Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Grafik 2.52 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 II-125
Grafik 2.53 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025 II-128
Grafik 2.54 Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025 II-131
Grafik 2.55 Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025 (%) II-132
Grafik 2.56 Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2025 (%) II-134
Grafik 2.57 Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 II-136
Grafik 2.58 Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2025 (%) II-137
Grafik 2.59 Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2025 II-138
Grafik 2.60 Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 II-139
Grafik 2.61 Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 II-143
Grafik 2.62 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2025 II-144
Grafik 2.63 Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat II-145
Grafik 2.64 APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 II-149
Grafik 2.65 Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 – 2025 II-150
Grafik 2.66 Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 – 2025 II-150
Grafik 2.67 Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 – 2025 II-151
Grafik 2.68 Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025 II-151
Grafik 2.69 Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional II-159
Grafik 2.70 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 II-159
Grafik 2.71 Angka Kematian Balita dari Tahun 2021 - 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota II-160
Grafik 2.72 Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 II-162
Grafik 2.73 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 II-164
Grafik 2.74 Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi II-165
Grafik 2.75 Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2025 II-167
Grafik 2.76 Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2025 II-167
Grafik 2.77 Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2021 – 2025 II-168

Grafik 2.78	Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2021 – 2025	II-169
Grafik 2.79	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2021 – 2025	II-169
Grafik 2.80	Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2025	II-171
Grafik 2.81	Hasil Capaian IP SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	II-925
Grafik 2.82	Persentase Realiasasi Capaian SPM Tahun 2025 Per-Bidang	II-925
Grafik 2.83	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan	II-928
Grafik 2.84	Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-932
Grafik 2.85	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-945
Grafik 2.86	Indikator TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Pilar	II-969
Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)	III-12
Grafik 3.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (Rp Juta)	III-14
Grafik 3.3	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)	III-15
Grafik 3.4	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (Rp juta)	III-20
Grafik 4.1	Hasil Capaian IP SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	IV-55
Grafik 4.2	Persentase Realiasasi Capaian SPM Tahun 2025 Per-Bidang	IV-55

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	I-4
Gambar 1.2	Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2027	I-5
Gambar 1.3	Proses Penyusunan RKPD Tahun 2027	I-6
Gambar 1.4	Keterkaitan Antar Dokumen	I-13
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-4
Gambar 2.3	Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-6
Gambar 2.4	Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro	II-27
Gambar 2.5	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Basic Infrastructure Improvement di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-28
Gambar 2.6	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Complete-Experience Tourism di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-28
Gambar 2.7	Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-31
Gambar 2.8	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-34
Gambar 2.9	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana	II-50
Gambar 2.10	Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-58
Gambar 2.11	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional	II-931
Gambar 4.1	Dukungan Terhadap Tema Pembangunan	IV-4
Gambar 4.2	Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	IV-98

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan menengah, serta merumuskan tahapan, prioritas, dan alokasi sumber daya secara optimal dalam kondisi keterbatasan dan ketidakpastian. Proses ini mencakup pengujian alternatif kebijakan, pengukuran kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta penentuan intervensi yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengedepankan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar level pemerintahan dan sektor.

Sebagai payung hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, tidak adanya konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan pribadi. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, tidak adanya konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap penguatan riset dan inovasi di Indonesia. Pada Tahun 2025, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 48,34 dengan kategori inovatif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi merupakan salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Mengingat cakupan inovasi yang luas, inovasi tidak hanya diterapkan pada tatanan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memungkinkan untuk diterapkan pada tahapan perencanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi daerah menjadi salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan penguatan layanan dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, serta difokuskan pada percepatan pencapaian target kinerja secara terukur dan akuntabel dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berpedoman pada RPJPD Tahun 2025–2045, serta menjaga konsistensi dengan RKP Tahun 2027. Dokumen ini juga mengintegrasikan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun 2025 melalui pengarusutamaan program dan kegiatan dalam kerangka Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) guna mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara berkelanjutan. RKPD Tahun 2027 mengakomodasi arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dihimpun melalui mekanisme resmi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan tetap menjaga konsistensi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Arah perbaikan dilakukan dengan memperkuat konsistensi antara RKPD dan APBD melalui penyelarasan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, dan pagu anggaran sejak tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian dan evaluasi. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan SIPD, serta peningkatan kualitas verifikasi dan sinkronisasi data agar keterpaduan perencanaan dan penganggaran daerah semakin efektif, terarah, dan akuntabel.

RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 pada tahun kedua pelaksanaannya, serta merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 periode pertama. Substansi RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah.Di samping substansi sebagaimana tersebut di atas, RKPD Tahun 2027 juga memuat berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan yang berkembang di masyarakat maupun arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, seperti penurunan prevalensi stunting, pengarusutamaan gender, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penguatan inovasi daerah dan aspek pembangunan lainnya.

Dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2027 harus menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, dan

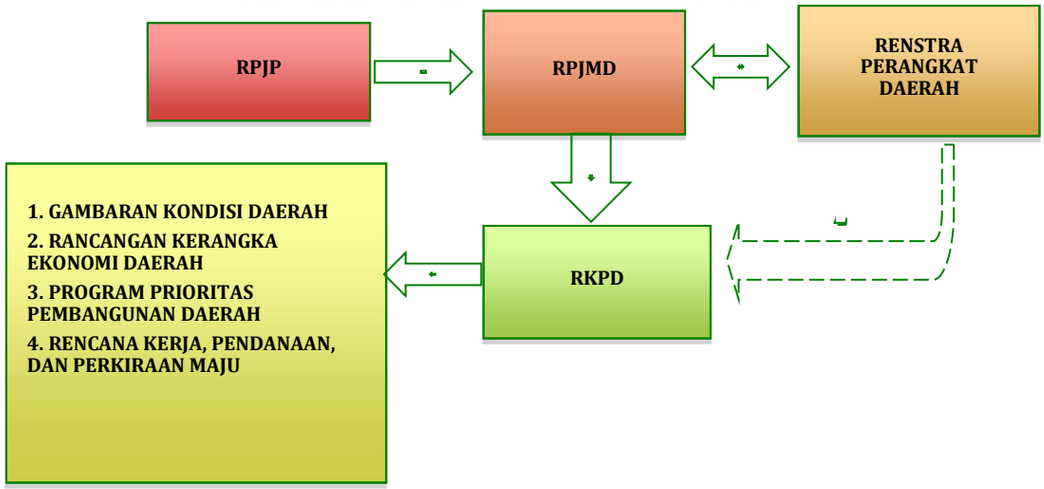
program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Di samping itu, RKPD Tahun 2027 juga harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 (RKPD Provinsi Tahun 2027), Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (RKP Tahun 2027), serta Program Strategis Nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Mempedomani RKPD Provinsi Tahun 2027 bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi. Sementara itu, mempedomani RKP Tahun 2027 dan Program Strategis Nasional bermakna penyelarasan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema pembangunan nasional, agenda pembangunan, dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2027.

Prioritas Pembangunan Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapannya difokuskan pada isu strategis yang mendesak, berdampak luas, dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kinerja pembangunan daerah. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk memenuhi mandat pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui intervensi terukur untuk memperbaiki indikator makro pembangunan, meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud di atas secara sistematis dapat dilihat pada bagan keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bawah ini

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Dokumen RKPD Tahun 2027 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

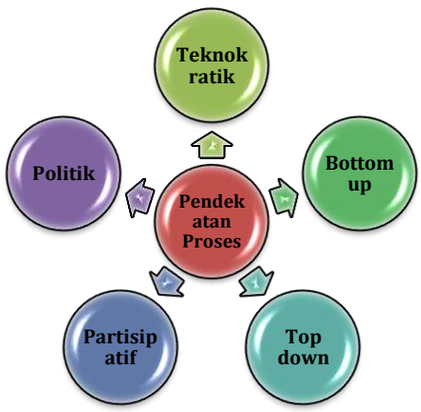
1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD menggunakan pendekatan proses dan pendekatan substansi, yang diuraikan sebagaimana berikut:

a. Pendekatan Proses

Pendekatan proses terdiri atas pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up.* Pendekatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2027



Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam hal menerima masukan dan saran terhadap RKPD. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen RKPD.

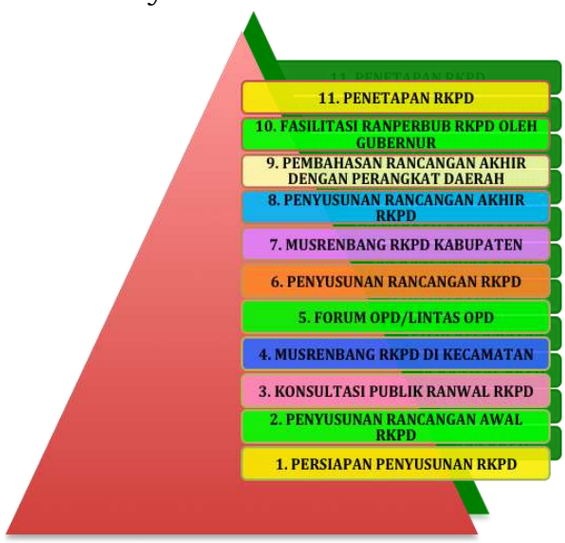
Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 dan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045. Pendekatan *bottom up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nagari dan Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

b. Pendekatan Substansi

Pendekatan substansi ini merupakan pendekatan dengan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan tematik merupakan pendekatan terhadap tema–tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan pendekatan holistik adalah penjabaran tematik dari tema pembangunan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berupa rangkaian kegiatan. Pendekatan integratif merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Pemerintah Daerah dilihat dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya pendekatan spasial adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsi lokasi harus berkaitan satu sama lain dan adanya keterkaitan antara wilayah.

Berkenaan dengan tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2027



Uraian dari rangkaian proses penyusunan RKPD tersebut disampaikan dengan tahapan sebagaimana berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Persiapan penyusunan RKPD terdiri dari Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; Orientasi mengenai RKPD; Penyusunan agenda kerja tim penyusun; Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahapan persiapan penyusunan ini dititikberatkan kepada menyiapkan semua kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen, baik berupa sumber daya manusianya, maupun data dan informasi, bahkan juga terhadap persiapan pengetahuan sumber daya manusianya itu sendiri.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana yaitu pada bulan Desember 2026. Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, RKPD provinsi, RKP, dan program strategis nasional, serta pedoman penyusunan RKPD.

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berisi substansi yang mencakup:

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada rkp dan program strategis nasional;
i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. perumusan program prioritas pembangunan Daerah; dan
k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

Forum ini adalah membahas rancangan awal RKPD bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal.

Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan proses untuk membahas rancangan awal tersebut dengan melibatkan DPRD dan para pemangku kepentingan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada konsultasi publik. Masukan dan saran tersebut menjadi masukan terhadap penyempurnaan rancangan awal RKPD.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan setelah forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2027. Musrenbang RKPD di kecamatan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah berupa forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah tahunan di Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari. Forum ini merupakan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Desa/Nagari dimana nagari menyampaikan prioritas rencana pembangunan masing-masing nagari ke tingkat kecamatan untuk di Musrenbangkan. Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud mencakup : a.) Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari yang tertuang dalam daftar usulan desa/nagari yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan, b.) Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/nagari, c.) Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD. Berita acara kesepakatan tersebut dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tingkat kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.

5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasi kepala Perangkat Daerah. Adapun peserta dari forum ini adalah Perangkat daerah dan unsur stakeholder terkait lainnya. Hasil forum ini sebagai bahan masukan dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah tahun 2027.

6. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD yang didasarkan kepada: a.) Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan b.) Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Rancangan RKPD ini sebagai bahan untuk Musrenbang RKPD Kabupaten.

Rancangan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut : a.) pendahuluan; b.) gambaran umum kondisi daerah; c.) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d.) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e.) rencana kerja dan pendanaan daerah; f.) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan g.) penutup.

Rancangan RKPD tahun 2027 disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda ke Bupati Lima Puluh Kota untuk mendapat persetujuan sebagai bahan Musrenbang RKPD Tahun 2027. Setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, maka dilaksanakanlah Musrenbang RKPD Tahun 2027.

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan peserta antara lain Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten. Pembahasan Rancangan RKPD tersebut, dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan nagari yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili

pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten.

8. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir ini selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

9. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD merupakan rumusan rancangan akhir RKPD yang dijadikan menjadi suatu kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, dan dokumen RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan APBD.

Sebagai upaya memudahkan penyusunan dan pendekatan perencanaan tahun 2027, maka diterapkan sistem informasi melalui *Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).* Sistem ini menerjemahkan proses penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penggunaan aplikasi dimulai dari tingkat nagari, kecamatan, DPRD dan Perangkat Daerah dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai akun masing-masing terhadap penerapan aplikasi SIPD tersebut. Masing-masing dari unsur tersebut mempunyai operator masing-masing yang dilatih dan dibimbing oleh Perangkat Daerah terkait.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 ini di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1493);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

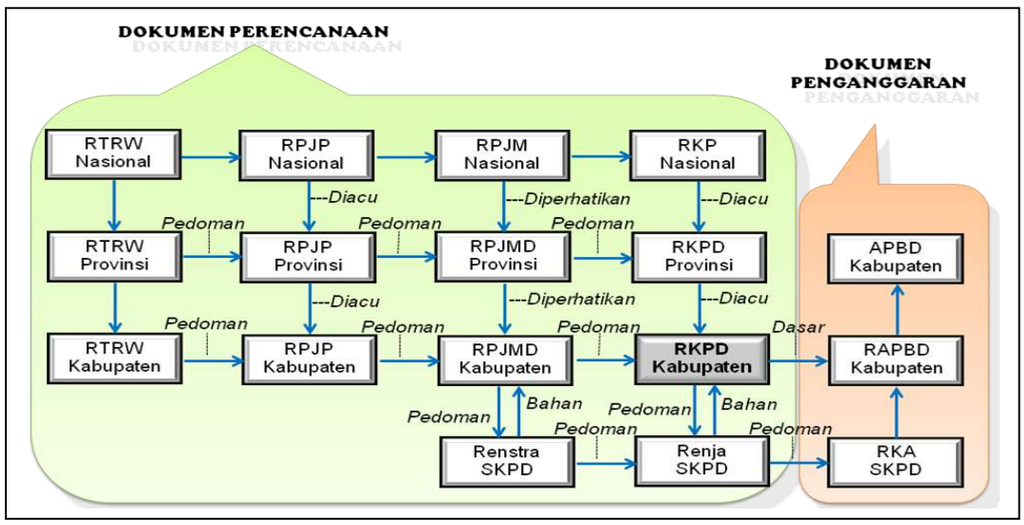
RKPD tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut adalah dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, KUA, PPAS dan APBD.

Keterkaitan dan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud adalah:

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RTRW, RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mengacu kepada RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mengacu juga kepada RKP dan RPJM Nasional.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan masukan dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari Musrenbang RKPD di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Nagari, Kecamatan, Kabupaten).
4. RKPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. RKPD Tahun 2027 yang telah ditetapkan selanjutnya juga menjadi dasar dalam keseluruhan proses penyusunan APBD Tahun 2027, termasuk dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

Gambar di bawah ini menunjukkan alur keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah, tahunan serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Gambar 1.4
Keterkaitan Antar Dokumen



Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dengan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045.
   RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan penjabaran periode kedua RPJPD yakni periode 2025-2045. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.
2. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RKP Nasional Tahun 2027, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027
   Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dijelaskan bahwa SPPN satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan, di antaranya pada penyusunan RKP, dan RKPD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dimana pada penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.
3. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renja PD
   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan PD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra PD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan. RKPD dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Tahun 2027 disusun dengan mengikuti sistematika, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RKPD.
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; (3) Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi perangkat daerah.
Bab III	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun 2027.
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Memuat tujuan dan sasaran pembangunan; dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027.
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
Bab VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada RPJMD.
Bab VII	Penutup Merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Wilayah Administrasi

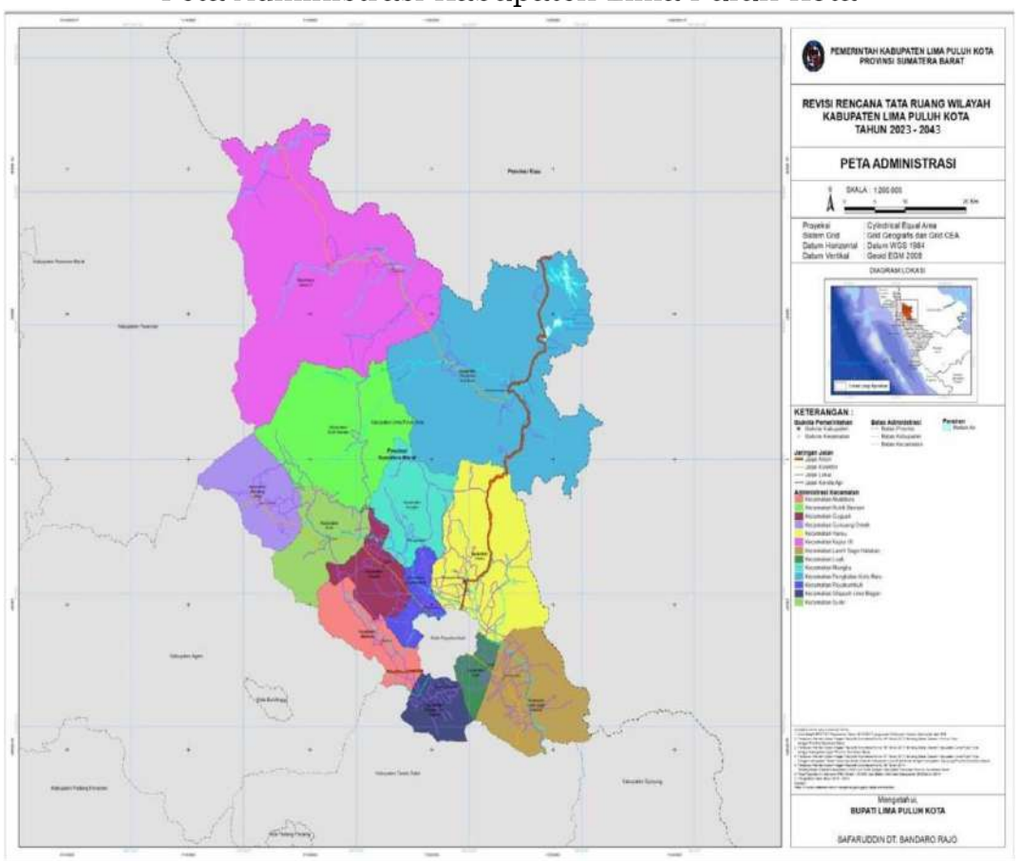
Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara $0^0$25'28,71''LU-$0^0$22'14,52''LS dan antara $100^0$15'44,10"BT-$100^0$50'47,80''BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Dari sektor pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, memiliki akses yang tidak sulit dijangkau sehingga bisa menjadi *supplier* bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong, dimana Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar berikut:

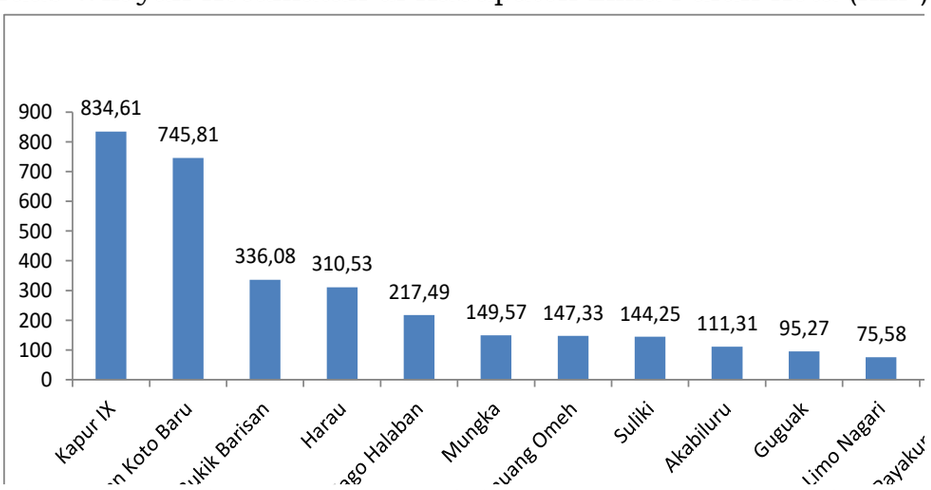
Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km² atau 25,50 % dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Km²)



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

B. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul dan dialiri oleh 17 buah sungai dengan rincian sebagai berikut. Nama gunung beserta lokasi dan tingginya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Nama Gunung	Lokasi	Tinggi
1	Gunuang Sago	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	2.261 m
2	Gunung Bungsu	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka	1.253 m
3	Gunung Sanggul	Kecamatan Harau	1.495 m

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, dimana rincian dari klasifikasi lereng tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2
Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
1	Gunuang Omeh	2.661,18	3.600,42	3.913,50	5.478,90	15.654,00
2	Suliki	3.902,79	0,00	896,00	4.792,90	9.591,69
3	Bukik Barisan	5.001,40	6.767,60	7.355,00	10.297,00	29.421,00
4	Guguak	1.999,00	2.048,00	2.655,00	3.716,49	10.418,49
5	Mungka	2.387,16	0,00	3.082,00	2.931,60	8.400,76
6	Payakumbuh	686,00	0,00	5.228,00	1.690,99	7.604,99
7	Akabiluru	1.508,16	2.262,24	2.356,50	3.299,10	9.426,00
8	Luak	956,00	1.424,00	2.443,00	2.158,80	6.981,80
9	Situjuah Limo Nagari	1.186,00	0,00	5.217,00	1.737,00	8.140,00

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
10	Lareh Sago Halaban	6.317,60	0,00	10.041,00	4.657,00	21.015,60
11	Harau	7.085,60	1.422,00	10.420,00	14.588,00	33.515,60
12	Pangkalan Koto Baru	11.392,96	27.039,00	39.570,00	24.922,10	102.924,06
13	Kapur IX	11.573,77	17.360,64	18.084,00	25.317,60	72.336,01
Jumlah		56.657,62	61.923,90	111.261,00	105.587,48	335.430,00

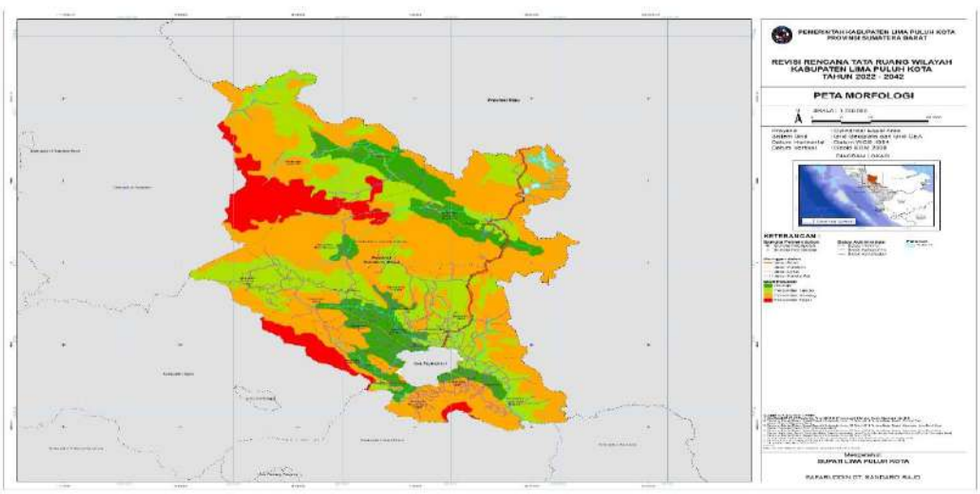
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

C. Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan "Bukit Barisan" dan merupakan bagian dari "*Volcanic Arc*" tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhii oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur *faulating system* (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (*joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*shear joint*) dan kekar Tarik (*tension joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Pleistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 2
Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2042 Kabupaten Lima Puluh Kota

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

D. Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata *hydro* (air) dan *logika* (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (*freatik*). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasiKota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional. WS lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS Masang Kiri. Luas empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa WS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub DAS Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat antara lain terdiri atas: Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenan, adapun Sub DAS Sinamar antara lain terdiri atas: Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2025 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

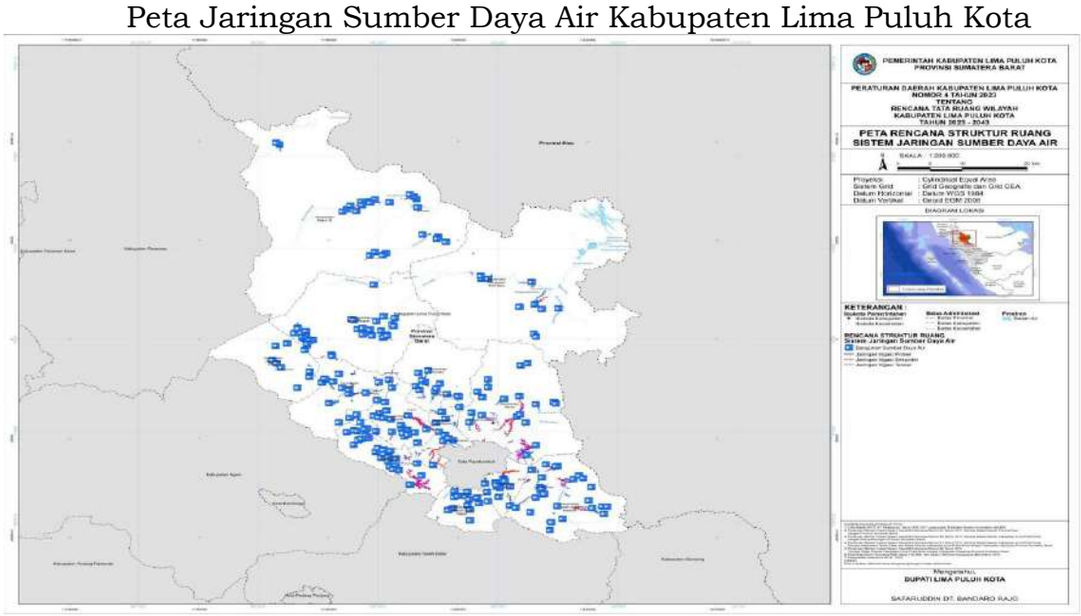
Tabel 2. 4
Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenan	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 3
Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Klimatologi

Curah Hujan (dengan satuan mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5
Kategori Curah Hujan Menurut BMKG

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0 – 100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	> 500	Sangat Tinggi

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2026

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman. Curah hujan rata- rata tahun 2023-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Data Klimatologi Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023-2024

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI		PENJELASAN
			2023	2024	
1	Curah Hujan Rata-Rata	mm	3.040	3.285	Rata-rata pos hujan manual (observatorium)
2	Jumlah Hari Hujan	hari	172	185	
3	Temperature	Celcius	23,7	24,8	Hasil pengkuran alat otomatis AWS Poli Tani Payakumbuh
4	Kelembaban	%	86	83	

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2025

Data curah hujan rata-rata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi BMKG Padang Pariaman adalah 3.040 dengan jumlah hari hujan 172 hari dengan Temperature 23,7° Celcius dan Kelembaban 86% sedangkan untuk Tahun 2024 curah hujan rata-rata Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 3.285 dengan jumlah hari hujan 185 hari dengan Temperature 24,8° Celcius dan Kelembaban 83%.

F. Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang, serta kawasan rawan banjir. Dan kawasan lindung lainnya seperti taman burung, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Kawasan budidaya adalah kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria kawasan sebagaimana di atas, maka untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dikelompokkan penggunaan lahan ke dalam 4 jenis penggunaan lahan, yaitu: (1) hutan lindung; (2) hutan suaka alam dan wisata (3) hutan produksi; (4) areal penggunaan lain. Adapun rincian dari guna lahan berdasarkan 4 jenis kelompok guna lahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	2023	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung*	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata*	20.673	6,16
3	Hutan Produksi*	32.805	9,78
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	7.716	2,30
4	Areal Penggunaan Lain	167.285	49,87
	I. Lahan Basah	25.591	7,63
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	171	0,05
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	141.694	42,24
	a. Perkebunan	40.250	12,00
	b. Permukiman/Pekarangan	9.140	2,72
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.825	16,34
	f. Penggunaan Lain	36.913	11,00
	Jumlah	335.430	100

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah Lahan Terlantar/Semak Belukar 54.825 Ha (32,77%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah Rawa dan Industri dengan luas yang sama 171 Ha (0,10%).

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertanian ini meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan pariwisata tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan tanaman pangan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan budi daya pertanian berlahan basah merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Luas kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan lebih kurang seluas 44.339 ha berada di seluruh kecamatan. Adapun proporsi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 13,5% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Perwilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. Pengembangan kawasan hortikultura akan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima puluh Kota dengan luas kawasan lebih kurang 12.960 Ha. Adapun proporsi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan yang direncanakan memiliki luas 68.773 Ha, kawasan peruntukan perkebunan bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanaman gambir, coklat, kopi, karet, kelapa dan lainnya. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditas perkebunan rakyat cukup bervariasi. Adapun proporsi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 21,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh seluas 212 Ha yang berfungsi sebagai tempat pusat penghasil sapi bibit unggul nasional. Pengelolaan BPTU-HPT menjadi wewenang pemerintah pusat. BPTU-HPT Padang Mangateh terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adapun proporsi Kawasan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,1% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong adanya kerja sama antar nagari yang memiliki potensi unggulan yang sama yang berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan perdesaan.

A. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, timun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk. Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditas yang dipengaruhii oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditas petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditas yang dijadikan sebagai produk unggulan daerah adalah jeruk, satu yang telah diberi label adalah Jesigo (Jeruk Siam Gunuang Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh dan sekitarnya.

Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditas yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditas utama yang merupakan komoditas yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditas pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditas utama. Komoditas utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas subsektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan subsektor hortikultura, yang komoditas utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta subsektor perkebunan dengan komoditas utamanya berupa gambir, kakao dan sawit. Perkembangan luas panen dan produksi komoditas pertanian tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Produksi Komoditas Pertanian
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Jenis data	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60	50.839	228.523	44.915	185.283	44.662,90	183.002,93
2	Jagung	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78	8.614	63.180	7.646,1	56.276,8	6.112,00	44.502,00
3	Jeruk	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332	186,59	9.001,17
4	Cabe Besar	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28	909,95	9.470,07	825,7	9.080	581,65	9.394,78
5	Manggis	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4	188,40	816	179,41	670,6	646,85	13.785,7

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi atas 5 jenis komoditas di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Untuk produksi padi, sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9
Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.061	2.095	7.841,4	3,74
2	Suliki	2.399	2.089	8.676,5	4,15
3	Bukik Barisan	3.334	3.929	13.780	3,51
4	Guguak	4.166	4.625	18.345	3,97
5	Mungka	2.225	2.107	8.775,6	4,16
6	Payakumbuh	4.215	4.516	19.033	4,21
7	Akabiluru	3.843	4.024	16.481	4,10
8	Luak	3.583	3.361	14.091	4,19
9	Situjuah Limo Nagari	3.888	4.288	18.048	4,21
10	Lareh Sago Halaban	6.115	5.280	22.782	4,31
11	Harau	7.687	7.546	32.664	4,33
12	Pangkalan	459	533,5	1.678	3,15
13	Kapur IX	175	269,4	807,43	3,00
Jumlah		44.149	44.662,9	183.002,93	4,10

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari sisi produktivitas komoditas padi tahun 2025, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,10 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk salah satunya akses petani terhadap pupuk serta permodalan.

Untuk sebaran komoditas jagung terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, luas panen paling luas serta produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Guguak, namun produktivitas tertinggi yaitu pada Kecamatan Lareh Sago Halaban (7,93 ton/Ha) dan Payakumbuh (7,86 ton/ha) sedangkan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,28 ton/Ha. Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10
Sebaran Lahan dan Produksi Jagung
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Panen Muda
1	Gunuang Omeh	64,00	102,70	489,19	4,76	-
2	Suliki	95,00	102,00	769,41	7,54	-
3	Bukik Barisan	41,80	101,20	557,58	5,51	-
4	Guguak	1.254,00	1.361,00	10.375,00	7,62	12,00
5	Mungka	658,20	697,70	4830,4	6,92	-
6	Payakumbuh	778,50	581,50	4.573,4	7,86	217,00
7	Akabiluru	95,40	93,40	627,51	6,72	39,50
8	Luak	575,00	730,20	5.123,90	7,02	-

No	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Panen Muda
9	Situjuah Limo Nagari	306,80	453,30	3367,5	7,43	-
10	Lareh Sago Halaban	919,80	778,80	6176,8	7,93	-
11	Harau	971,60	1.070,00	7.531,00	7,04	66,00
12	Pangkalan Koto Baru	1,4	5,5	16,00	2,91	0 ,20
13	Kapur IX	13,2	34,70	64,66	1,86	3,4
Kab. Lima Puluh Kota 2025		5.774,7	6.112	44.502,35	7,28	338,10

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dengan begitu beragamnya tingkat produktivitas komoditas ini, kiranya peluang untuk meningkatkan produksi jagung ini dapat dilakukan tidak hanya dari sisi perluasan lahan tapi juga bisa dari sisi optimalisasi produktivitas. Peningkatan produksi jagung adalah hal mesti untuk dilakukan, mengingat saat ini kebutuhan jagung untuk peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota saja masih belum terpenuhi. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian.

Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian.

B. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditas perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut. Pada tahun 2025, produksi perkebunan gambir adalah sebesar 30.296,02 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia. Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.936,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 474,50 Ha, produktif seluas 17.439,50 Ha serta rusak seluas 22,5 Ha. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11
Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	-	374,00	-	374,00	658,24
2	Akabiluru	-	-	-	-	-
3	Luak	-	-	-	-	-
4	Lareh Sago Halaban	12,00	124,00	1,00	137,00	29,67
5	Situjuah Limo Nagari	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
6	Harau	104,00	718,00	5,00	827,00	416,40
7	Guguak	-	-	-	-	-
8	Mungka	-	887,00	-	887,00	1.518,25
9	Suliki	10,00	147,00	-	157,00	448,91
10	Bukik Barisan	45,00	2.630,50	-	2.675,50	6.470,08
11	Gunuang Omeh	-	-	-	-	-
12	Kapur IX	270,50	7.636,00	16,50	7.923,00	13.742,55
13	Pangkalan Koto Baru	33,00	4.923,00	-	4.956,00	7.011,92
Jumlah	2025	474,50	17.439,50	22,50	17.936,50	30.296,02
	2024	579,00	16.815,50	16,00	17.410,50	19.321,33
	2023	558,50	16.708	72	17.338,50	16.780,94
	2022	615,5	16.692	228	17.535,5	7.776,42
	2021	624,5	16.623	300	17.547,5	7.836,14

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katekin dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Untuk produksi perkebunan kakao, pada Tahun 2025 adalah sebesar 1.884,12 ton, naik dibandingkan tahun 2024 dengan produksi sebesar 1.016,62 ton. Luas perkebunan kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.981,60 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 458,30 Ha, produktif seluas 2.539,80 Ha serta rusak seluas 983,50 Ha. Luas dan produksi Kakao pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12
Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	10,00	392,00	40,50	442,50	586,80
2	Akabiluru	0,00	500,00	590,00	1.090,00	166,75
3	Luak	15,75	35,75	0,00	51,50	19,24
4	Lareh Sago Halaban	83,00	51,00	7,00	141,00	1,59
5	Situjuah Limo Nagari	33,00	156,00	49,00	238,00	222,90
6	Harau	22,50	80,00	10,00	112,50	45,50
7	Guguak	47,00	362,00	2,00	411,00	289,50
8	Mungka	38,00	80,00	0,00	118,00	77,98
9	Suliki	107,00	196,00	25,00	328,00	326,00
10	Bukik Barisan	26,00	532,00	0,00	558,00	89,90
11	Gunuang Omeh	24,00	23,00	0,00	47,00	1,62
12	Kapur IX	52,00	46,00	40,00	138,00	10,98

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
13	Pangkalan Koto Baru	0,00	86,00	220,00	306,00	45,36
Jumlah	2025	458,30	2.539,80	983,50	3.981,60	1.884,12
	2024	528,25	2.692,75	847,50	4.068,50	1.016,62
	2023	565,75	3.144,00	400,00	4.109,75	844,95
	2022	630	3.292	605	4.527	1.590,41
	2021	738	3.099	2.272	6.109	1.774

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Komoditas perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 3.640,25 Ha bertambah menjadi 3.901,10 Ha di tahun 2025. Dari segi produksi, terjadi peningkatan dari 7.501,73 ton di tahun 2024 menjadi 11.490,72 ton di tahun 2025. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13
Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	0	0	0	0
2	Akabiluru	1,00	5,25	0	6,25	22,20
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	13,00	15	0	28	5,70
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	0	52	0	52	167,00
7	Guguak	5	7	0	12	33,30
8	Mungka	0	0	0	0	0
9	Suliki	0	0	0	0	0
10	Bukik Barisan	0	0	0	6	0
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	264,30	583,00	4,50	851,80	1.843,34
13	Pangkalan Koto Baru	97	2.648,00	200,00	2.945,00	9.416,52
Jumlah	2025	380,30	3.316,30	204,50	3.901,10	11.490,72
	2024	476	3.119	45,25	3.640,25	7.501,73
	2023	612	2.760	50	3.422	6.354,12
	2022	541	2.759	47	3.347	9.375,37
	2021	198	2.738	76	3.012	8.725,86

Sumber: Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

C. Sektor Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/ RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan

parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan.

Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekositem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 14
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Sapi Simental	Kec. Luak
		Kec. Guguak
		Kec. Situjuah Limo Nagari
		Kec. Gunung Omeh
		Kec. Lareh Sago Halaban
2.	Ayam Ras	Kec. Gunung Omeh
		Kec. Situajuh Limo Nagari
3.	Itik	Kec. Payakumbuh
		Kec. Harau
		Kec. Akabiluru
4.	Kerbau	Kec. Akabiluru
		Kec. Pangkalan Koto Baru
		Kec. Kapur IX

Sumber: Disnakeswan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2026

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komiditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras pedaging, telur ayam ras petelur, telur burung puyuh dan susu kerbau. Komoditas yang mengalami penurunan adalah daging sapi potong, daging ayam ras petelur, daging itik, daging burung puyuh, telur itik dan susu sapi perah. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2021-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15
Jumlah Produksi Komoditas Peternakan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

No.	Komoditas	Jumlah Produksi (Kg)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Daging Sapi Potong	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12	1.871.408,32
2	Daging Kerbau	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76	174.044,86
3	Daging Kambing	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25	37.862,50
4	Daging Ayam Buras	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00	537.230
5	Daging Ayam Ras Petelur	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00	7.300.629
6	Daging Ayam Ras Pedaging	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00	12.418.257
7	Daging Itik	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00	113.907
8	Daging Burung Puyuh	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00	145.211
9	Telur Ayam Buras	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30	279.298,35
10	Telur Ayam Ras Petelur	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30	90.635.548,41
11	Telur Itik	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60	1.063.517,31
12	Telur Burung Puyuh	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70	1.144.526,70
13	Susu Sapi Perah	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,00	3.314,7
14	Susu Kerbau	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040,00	93.970,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Terhadap produksi ternak pada tahun 2025, semua komoditas mengalami penambahan populasi adalah sapi, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan burung puyuh. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 16
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

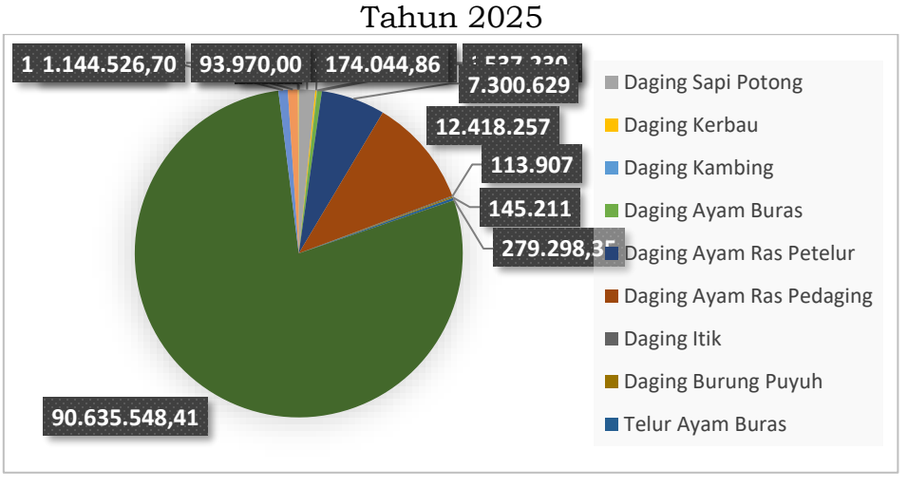
No	Komoditas	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sapi	48.451	51.030	52.561	54.681	56.324
2	Kerbau	8.843	9.040	9.042	9.304	9.397
3	Kuda	117	106	106	108	108
4	Kambing	30.342	31.752	33.592	34.900	36.296

No	Komoditas	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
5	Ayam Buras	405.016	413.643	427.139	436.063	436.063
6	Ayam Ras Petelur	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014	9.812.674
7	Ayam Ras Pedaging	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705	10.942.160
8	Itik	142.959	139.950	189.895	192.719	193.719
9	Burung Puyuh	623.810	635.018	635.018	663.050	660.050

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Produksi komoditas peternakan pada tahun 2025 didominasi oleh peternakan ayam. Produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 2
Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data produksi komoditas peternakan tahun 2025, komoditas dengan produksi terbesar didominasi oleh telur ayam ras petelur sebesar 90.635.548,41, jauh melampaui komoditas lainnya. Produksi daging terbesar berasal dari daging ayam ras pedaging sebanyak 12.418.257, diikuti daging ayam ras petelur sebesar 7.300.629, dan daging sapi potong sebesar 1.871.408,32. Sementara itu, produksi telur burung puyuh mencapai 1.144.526,70, telur itik sebesar 1.063.517,31, dan telur ayam buras sebanyak 279.298,35. Untuk komoditas susu, produksi susu kerbau tercatat 93.970,00, lebih tinggi dibandingkan susu sapi perah yang mencapai 3.314,70. Secara umum, produksi peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 didominasi oleh komoditas unggas, terutama telur ayam ras dan daging ayam ras, yang menunjukkan peran penting subsektor perunggasan dalam mendukung penyediaan pangan asal ternak di daerah.

Penyakit hewan menular strategis merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengendalian dan penanggulangan PHMS yang menjadi prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penyakit Rabies dan Avian Influenza. Tindakan pengendalian dan PHMS yang dilaksanakan berupa komunikasi Informasi dan Edukasi ke peternak, vaksinasi, pengendalian vektor dan pengawasan lalu lintas. Salah satu kasus yang perlu menjadi perhatian yaitu kasus rabies dimana kasus rabies

di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sebesar 366 kasus. Adapun kasus PHMS di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17
Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Jenis PHMS	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rabies	95 Kasus, Positif rabies 14 Ekor	98 Kasus, positif rabies 5 ekor	152 kasus, 26 pemeriksaan laboratorium dan 24 positif lab	305 Kasus Gigitan, 19 Pemeriksaan Laboratorium, 18 Positif Laboratorium	366 Kasus, 26 Pemeriksaan Laboratorium,18 Positif Laboratorium
2.	Septicemia Epizootica	-	-	1 kasus positif	-	-
3.	Jembrana	-	-	-	-	-
4.	Avian Influenza	-	3 Kasus	5 kasus	-	-

Sumber: Disnakeswan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2026

Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak dan limbah dari hasil peternakan tersebut. Adapun daya dukung wilayah terhadap kawasan peternakan tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan Indek Daya Dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahar dkk, 1991) sedangkan daya dukung potensial adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 18
Indeks Daya Dukung per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	1,48	13.037,03	8.823,01	-177	4.104	3.927
2	Akabiluru	1,30	12.015,83	9.234,63	-676	4.295	3.619
3	Luak	0,89	21.824,72	24.453,19	-4.800	11.374	6.574
4	Lareh Sago Halaban	0,36	11.289,46	31.690,30	-11.339	14.740	3.400
6	Harau	1,15	20.911,59	18.233,88	-2.182	8.481	6.299
5	Situjuah Limo Nagari	0,95	13.426,45	14.180,06	-2.551	6.595	4.044

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
7	Guguak	1,31	16.427,92	12.558,31	-893	5.841	4.948
8	Mungka	2,44	10,749,81	4.396,91	1.193	2.045	3.238
9	Suliki	3,08	10.361,83	3.366,52	1.555	1.566	3.121
10	Bukik Barisan	4,61	40.816,91	8.850,48	8.178	4.117	12.294
11	Gunuang Omeh	7,52	8633,78	1.148,37	2.066	534	2.601
12	Kapur IX	60,48	165.750,27	2.740,71	48.650	1.275	49.925
13	Pangkalan Koto Baru	28,78	82.336,29	2.860,52	23.470	1.330	24.800
Total			42.581,88	142.536,88	62.493	66.296	128.790

Sumber: Disnakeswan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2026

Pada data di atas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 62.493 ST. Secara keseluruhan Kabupaten Lima Puluh Kota masih mampu menambah kapasitas sebesar 128.790 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 7 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Payakumbuh (1,48), Akabiluru (1,48), Luak (0,89), Lareh Sago Halaban (0,36), Harau (1,15), Situjuah Limo Nagari (0,95) dan Kecamatan Guguak (1,31).

D. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 642 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
   1) Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2025 tercatat produksi budidaya pembesaran yang terdiri dari :
      - ✓ Pada tahun 2025, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 38.878,12 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 39.611,15 ton, maka terjadi penurunan yang sebesar 733,03 ton.
      - ✓ Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2025 adalah sebesar 11,2 ton dengan produksi rata-rata adalah 19,07 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu 11,00 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 8,30 ton.

b. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, serta BBI Tarantang. Pada

tahun 2023 tercatat sebanyak 78.790.850 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (5.567.300), Gurami (19.902.000), Nila (17.444.950), Lele (35.784.600) dan Nilem (92.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.545,96 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (381,47 ton), Kapiek (353,75 ton), Baung (581,64 ton) dan lainnya (2.229,10 ton).

Berdasarkan data produksi komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021–2025, total produksi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Produksi mencapai 44.507,53 ton pada tahun 2021, kemudian menurun hingga 35.889,23 ton pada tahun 2023, meningkat menjadi 37.536,30 ton pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 39.611,15 ton pada tahun 2025. Pada tahun 2025, produksi budidaya didominasi oleh ikan nila sebesar 14.554,83 ton dan ikan gurame sebesar 11.835,10 ton, diikuti ikan lele sebesar 5.333,91 ton. Sementara itu, produksi ikan mas mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021, sedangkan ikan patin, ikan nilem, dan komoditas ikan lainnya memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap total produksi. Secara umum, peningkatan produksi pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor perikanan budidaya, dengan komoditas ikan nila dan ikan gurame sebagai penyumbang utama produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 19
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No	Jenis Produksi Komoditas Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Ikan mas	10.582,59	7.905,11	7.905,11	5.105,10	2.287,24
2	Ikan nila	12.847,67	7.878,07	7.878,07	12.679,65	14.554,83
3	Ikan gurame	7.880,60	3.556,73	3.556,73	7.590,60	11.835,10
4	Ikan lele	8.239,31	4.320,71	4.320,71	8.627,50	5.333,91
5	Ikan patin	2.765,41	7.551,87	7.551,87	1.252	2.462,59
6	Ikan nilem	953,39	1.017,22	1.017,22	2.469,60	408,4
7	Ikan lainnya	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1.886,70	1996,05
Jumlah		44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	39.611,15

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data produksi perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021–2025, produksi perikanan budidaya kolam merupakan kontributor terbesar terhadap total produksi perikanan, meskipun berfluktuasi dari 44.610,25 ton pada tahun 2021 menjadi 38.866,92 ton pada tahun 2025. Sementara itu, produksi penangkapan ikan di perairan umum menunjukkan tren peningkatan

yang konsisten, dari 2.829,12 ton pada tahun 2021 menjadi 4.305,64 ton pada tahun 2025. Sebaliknya, perikanan budidaya sawah mengalami penurunan yang cukup tajam, dari 168,95 ton pada tahun 2021 menjadi hanya 11,20 ton pada tahun 2025.

Tabel 2. 20
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No	Produksi Perikanan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perikanan budidaya sawah (ton)	168,95	127,50	70,15	28,60	11,2
2	Perikanan Budidaya kolam (ton)	44.610,25	35.897,40	37.536,30	38.331,75	38.866,92
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	2.829,12	3.296,24	3.545,95	4.141,75	4.305,64

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Data kelembagaan perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, terdapat 770 kelembagaan perikanan yang terdiri atas 642 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), 32 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), 15 koperasi unit (KU), dan 81 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Jumlah kelembagaan terbanyak terdapat di Kecamatan Harau sebanyak 111 kelembagaan, diikuti Lareh Sago Halaban, Kapur IX, dan Luak masing-masing sebanyak 70 kelembagaan, serta Guguak sebanyak 69 kelembagaan. Sementara itu, jumlah kelembagaan paling sedikit terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh sebanyak 26 kelembagaan dan Situjuah Limo Nagari sebanyak 31 kelembagaan. Secara umum, kelembagaan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh Pokdakan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perikanan daerah masih berfokus pada pengembangan usaha budidaya ikan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Tabel 2. 21
Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Kelembagaan				Jumlah Total
		Pokdakan	Poklahsar	KUB	Pokmaswas	
1	Harau	88	7	0	16	111
2	Akabiluru	55	1	0	6	62
3	Luak	55	2	0	0	57
4	Lareh Sago Halaban	66	0	0	4	70
5	Payakumbuh	55	4	0	3	62
6	Pangkalan Koto Baru	37	8	12	5	62
7	Kapur IX	54	0	3	13	70
8	Situjuah Limo Nagari	25	2	0	4	31
9	Bukik Barisan	37	0	0	9	46
10	Guguak	62	5	0	2	69
11	Suliki	30	1	0	8	39
12	Gunuang Omeh	22	1	0	3	26
13	Mungka	56	1	0	8	65
	Jumlah	642	32	15	81	770

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

E. Sektor Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2021-2025, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan aktivitas produksi dan pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang bergeser ke sektor industri. Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel di bawahini. Dari sisi jumlah industri formal, unit usaha dan nilai produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada di bawah ini.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spinner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2. 22
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,49	6,47	6,56	6,64	6,85

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 2. 23
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Pangan	1.270	267	917	238	47
2	Industri Sandang dan Kulit	281	80	39	11	6
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	6.010	38	52	12	14
4	Industri Logam dan Elektronika	77	36	38	36	5
5	Industri Kerajinan	223	15	11	7	3
Jumlah		7.616	7.180	7.861	436	75

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 2. 24
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Pangan	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338	45.752.233	1.046.050.000
2	Industri Sandang dan Kulit	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400	4.838	123.850.000
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800	5.384.011	5.663.200.000
4	Industri Logam dan Elektronika	11.545,515	1.899.500	1.829.800	1.818.650	5.663.200.000
5	Industri Kerajinan	1.378.246,307	61.824.000	614.500	2.220	156.500.000
Jumlah		371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838	7.264.000.000

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

F. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda. Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah.

Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan *geopark*, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru.

Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX , Gunuang Omeh dan Situjuah Limo Nagari. Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.26. Peningkatan kunjungan wisatawan masih didominasi

oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk dibenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah :

1. Menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark;
2. Menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari;
3. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah;
4. Mengoptimalkan promosi pariwisata;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi;
6. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal; dan
7. Melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

Tabel 2. 26
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No	Destinasi Wisata	2021		2022		2023		2024		2025	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	-	237.241	105	270.737	-	281.366	388	208.727	1.523	163.189
2.	Kapalo Banda	-	279.981	-	233.196	42	266.748	56	200.440	-	161.792
3.	Batang Tabik	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378	-	125.342
4.	Rumah Gadang S.Beringin	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133	-	22.076
	Jumlah	-	778.701	105	749.579	42	630.226	444	500.678	1.523	472.399

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

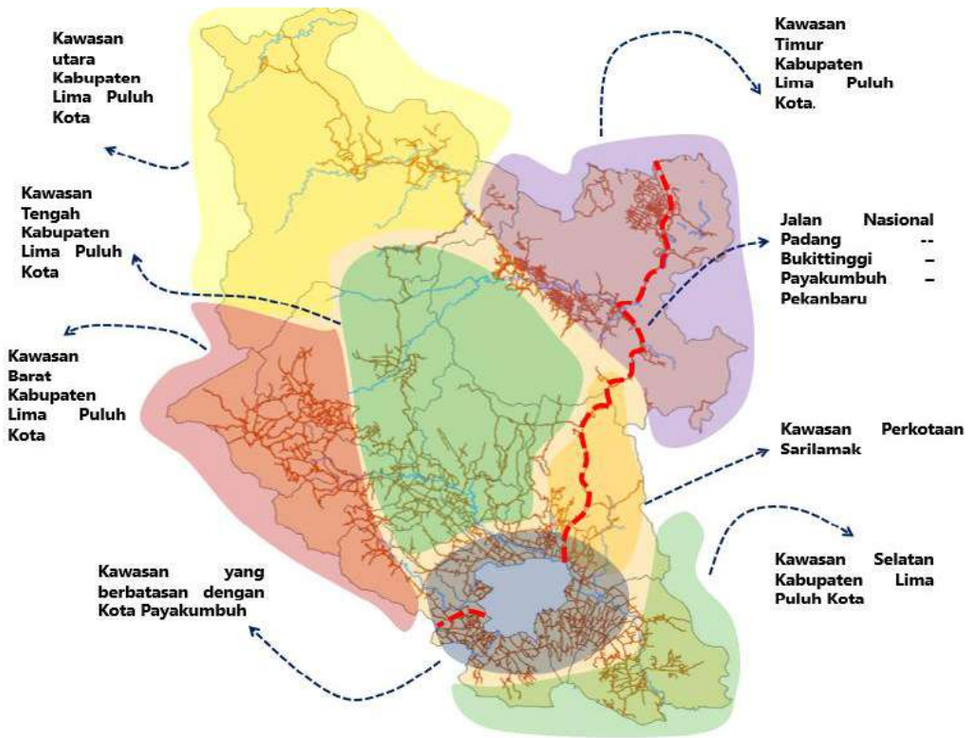
G. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif makro dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis – dipreservasi sebagai kawasan lindung.
2. Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi.

3. Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
4. Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh.
5. Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
6. Kawasan Perkotaan Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agroindustri.
7. Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan *livestock farming*.

Gambar 2. 4
Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro



H. Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif: *Basic Infrastructure Improvement* dan *Complete Experience Tourism* di Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikasi proyek infrastruktur transformatif dalam kerangka *basic infrastructure improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Peningkatan *multi infrastructure backbone* di Kabupaten Lima Puluh Kota:
   i. Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan.
   ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi.
   iii. Reaktivasi jalur kereta api Padang panjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:
   i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
   ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
   iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai *center of excellence* yang berfokus pada sektor agroindustri.
3. Pengembangan Daerah Irigasi:
   i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrikultur dan agroindustri.
4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan.
5. Normalisasi Sungai Batang Agam.

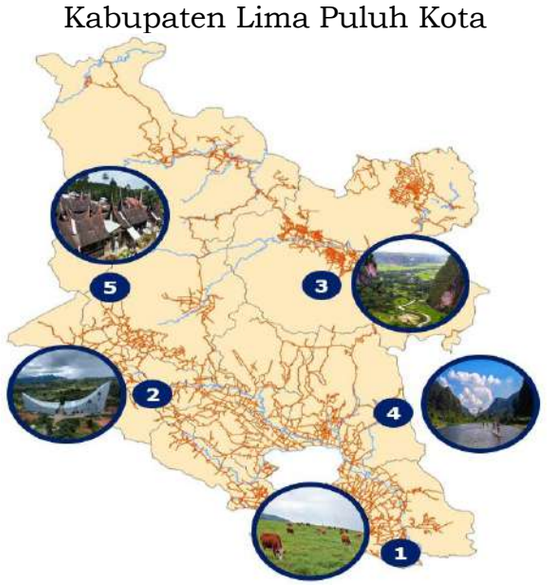
Gambar 2. 5
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Basic Infrastructure Improvement di Kabupaten Lima Puluh Kota



Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang komplit (*complete-experience tourism*). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary,* Aktivitas, dan *Available Package.* Keenam aspek ini merupakan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh.
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau.
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram.
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

Gambar 2. 6
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Complete-Experience Tourism di Kabupaten Lima Puluh Kota



Rancangan membagi pengembangan wilayah berdasarkan potensi geografis dan ekonomi, seperti pengembangan agroindustri di kawasan tengah, pariwisata di kawasan barat, dan pertanian di kawasan timur. Pengelompokan ini baik karena mempertimbangkan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah, serta potensi alam yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan pariwisata, khususnya *complete-experience tourism*, yang mencakup atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas, adalah langkah positif. Namun, pengembangan pariwisata massal bisa berisiko terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan jalan tol, preservasi jaringan jalan nasional, dan reaktivasi jalur kereta api merupakan langkah penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, masih perlu kajian bagaimana proyek-proyek ini dapat terealisasi secara efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi serta mobilitas penduduk.Pusat pertumbuhan harus memiliki konektivitas yang baik dengan wilayah Perdesaan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi juga dapat dirasakan oleh desa-desa di sekitar. Pengembangan jalan penghubung antara pusat pertumbuhan dan desa perlu diperhatikan agar perekonomian di desa bisa terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi.

Pengembangan agroindustri dan pertanian berpotensi mendongkrak perekonomian daerah. Namun, perlu dipastikan bahwa pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta teknologi modern agar hasilnya lebih efisien dan produktif. Dokumen rancangan juga memperhatikan kawasan rawan bencana di bagian utara, terutama risiko tanah longsor. Penekanan pada pelestarian lahan kritis dan pencegahan bencana sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas lingkungan dan keselamatan penduduk. Namun, masih dibutuhkan detail lebih lanjut mengenai strategi mitigasi bencana yang akan diterapkan di daerah-daerah berisiko. Meskipun dokumen sudah mengidentifikasi kawasan rawan bencana, disarankan untuk membuat rencana mitigasi bencana yang lebih spesifik, terutama untuk daerah yang rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Ini termasuk pembuatan early warning system, pelatihan mitigasi bagi masyarakat, serta perencanaan evakuasi yang baik.

Pengembangan *Center of Excellence* seperti Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi dalam bidang agroindustri adalah langkah yang sangat strategis. Ini bisa menjadi penggerak utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah bagi produk lokal. Selain infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur digital juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan seperti Center of Excellence memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang handal untuk mempercepat inovasi dan pendidikan berbasis teknologi. Ini juga bisa mendukung pengembangan pariwisata melalui promosi digital dan sistem reservasi online.

Meskipun fokus pada pembangunan wilayah secara makro sudah baik, perlu ada lebih banyak keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah. Partisipasi ini bisa mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, serta mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat perubahan yang cepat.

2.1.1.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

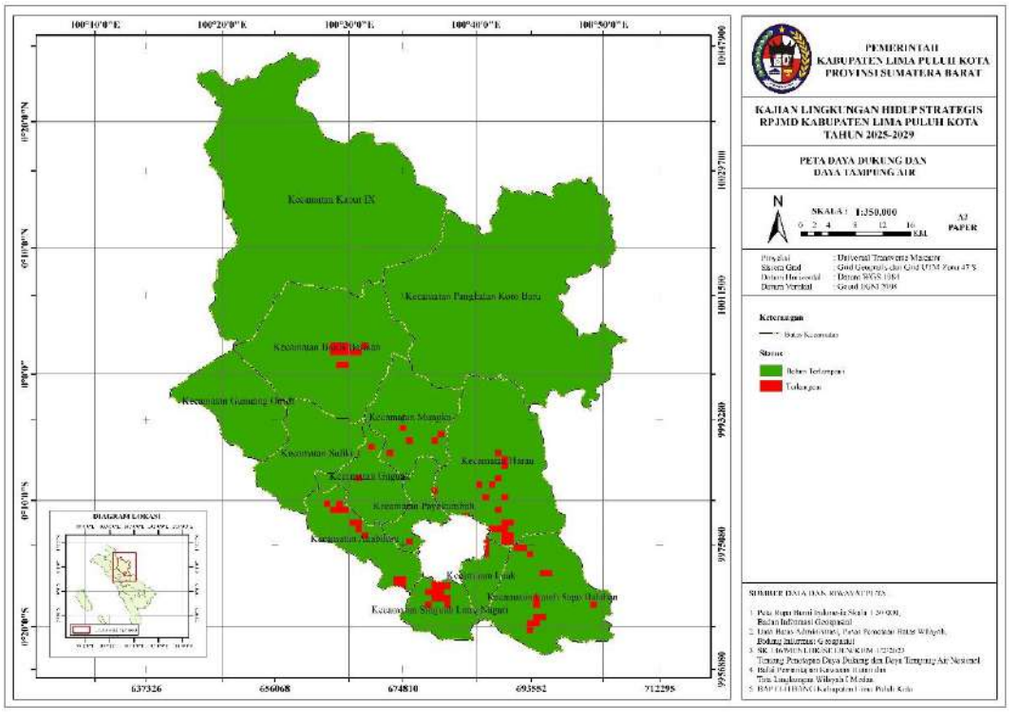
Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status belum terlampaui lebih kurang 97,9% atau sekitar 320.741 Ha dan sisanya sudah terlampaui sekitar 6.600 Ha.

Tabel 2. 27
Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
1	Kecamatan Akabiluru	10.062	1.067	11.130
2	Kecamatan Bukik Barisan	32.663	940	33.604
3	Kecamatan Guguak	9.357	171	9.528
4	Kecamatan Gunuang Omeh	14.729		14.729
5	Kecamatan Harau	29.423	1.636	31.058
6	Kecamatan Kapur IX	83.448		83.448
7	Kecamatan Lareh Sago Halaban	20.649	1.111	21.760
8	Kecamatan Luak	4.430	168	4.598
9	Kecamatan Mungka	14.530	427	14.957
10	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	74.588		74.588
11	Kecamatan Payakumbuh	5.851	108	5.959
12	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	6.587	971	7.558
13	Kecamatan Suliki	14.423		14.422
	Kabupaten Lima Puluh Kota	320.741	6.600	327.340

Sumber : SK/ 146 Tahun 2023

Gambar 2. 7
Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : SK/ 146 Tahun 2023

Tabel 2. 28
Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	2026		
			Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air
1	Akabiluru	170.620.837,82	30.087,20	48.139.520,71	3,54
2	Bukik Barisan	374.131.013,13	23.091,67	36.946.665,94	10,13
3	Guguak	159.760.339,55	36.467,35	58.347.753,08	2,74
4	Gunuang Omeh	172.981.817,00	14.737,25	23.579.594,07	7,34
5	Harau	395.278.421,49	60.318,80	96.510.078,83	4,10
6	Kapur IX	964.571.795,46	28.162,26	45.059.619,34	21,41
7	Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	40.252,78	64.404.453,38	4,48
8	Luak	96.381.858,02	29.358,16	46.973.055,83	2,05
9	Mungka	206.184.620,22	27.818,33	44.509.330,50	4,63
10	Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.545,89	47.273.421,90	19,52
11	Payakumbuh	121.494.254,32	39.975,55	63.960.874,25	1,90

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	2026		
			Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air
12	Situjuah Limo Nagari	121.658.563,08	24.799,42	39.679.073,33	3,07
13	Suliki	169.775.768,33	15.022,72	24.036.354,92	7,06
	Lima Puluh Kota	3.994.273.610,02	399.522,87	639.236.599,85	6,25

Sumber : Analisis Tim Pembuat,2026

Berdasarkan tabel di atas daya dukung air Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 berdasarkan kecamatan masih dalam status surplus, namun terus mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam menjaga ketersediaan air di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti pada Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Luak. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota daya dukung air masih belum terlampaui, sedangkan disisi lain ada beberapa daerah yang sudah terlampaui yang dihitung berdasarkan kebutuhan air, lahan dan domestik yang dibandingkan dengan ketersediaan air. Proyeksi ini dihitung hanya membandingkan kebutuhan air domestik dengan ketersediaan air. Hal ini karena kebutuhan air lahan pada tahun 2030 tidak dapat diprediksikan.

B. Daya Dukung Pangan

Luas panen padi pada tahun 2025 mengalami penurunan Jika dibandingkan dengan luas panen Tahun 2024 yaitu 30.598,33 ha menjadi 24.508,33 ha. Produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengalami penurunan, yakni dari 133.347,38 ton Tahun 2024 menjadi 112.844,25 ton tahun 2025. Produktivitas Padi per hektar pada Tahun 2025 naik dibandingkan dengan tahun 2024, yakni dari 43,58 kuintal/ha menjadi 46,04 kuintal/ha.

Tabel 2. 29
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
2021	28.119,14	123.703,37	43,99
2022	27.572,68	124.134,56	45,02
2023	28.198,69	132.075.54	46,48
2024	30.598,33	133.347,38	43,58
2025	24.508,33	112.844,25	46,04

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Penurunan luas panen padi dan produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 disebabkan oleh bencana alam kekeringan dan banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berdasarkan laporan bencana yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2025 sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota rusak karena

kekeringan seluas 43,74 Ha dan luas sawah yang rusak terkena banjir seluas 0,25 Ha. Berikut terlampir data kerusakan akibat kekeringan dan banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 :

Tabel 2. 30
Data Kerusakan akibat Kekeringan dan Banjir Komoditi Padi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Periode	Kecamatan	Bencana Alam			
			Kekeringan (Ha)		Banjir (Ha)	
			Terkena	Puso	Terkena	Puso
1	2	3	3	5	6	7
	2025	**Kab. Lima Puluh Kota**	**655,9**	**35,74**	**69,5**	**0,25**
1	Juni		267,37	11,75	0	0
		Pangkalan	55,62	3		
		Lareh Sago Halaban	178,25	4,5		
		Luak	10,25	,25		
		Guguak	23,25			
2	Juli		162,35	17,24	0	0
		Guguak	94,51	3,5		
		Pangkalan	23,88			
		Situjuah Limo Nagari	36,96	13,74		
		Harau	7			
		Mungka	25			
		Bukik Barisan	20,79			
		Lareh Sago Halaban	183,75	8		
		Suliki	16,5			
3	Agustus		226,28	6,75	0	0
		Akabiluru	11,5	0,25		
		Pangkalan	147,68	0		
		Guguak	67	6,5		
4	November		0	0	20	0
		Gunuang Omeh			5	
		Lareh Sago Halaban			1,5	
		Luak			13,5	
5	Desember		0	0	49,5	0,25
		Harau			0,25	0,25
		Pangkalan			49,25	

Sumber : Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota, 2026

Tabel 2. 31
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di
Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2030

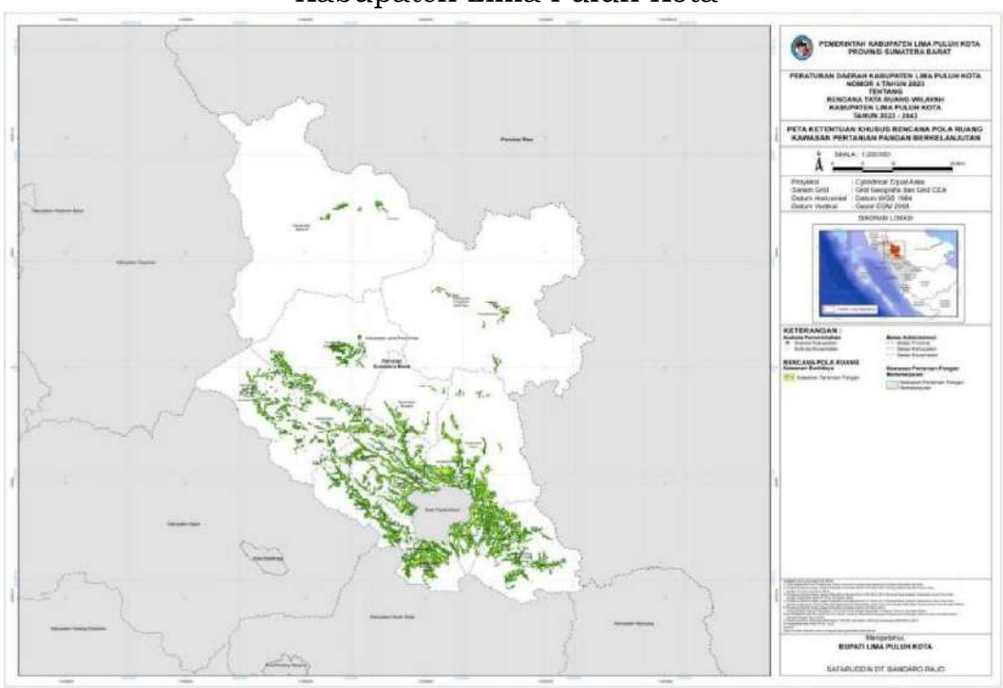
				persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal				0.92	46.46	1.60	1.33
Perubahan Asumsi				0.82%	50.00	1.20	2.00
Estimasi	**Tahun**	**BAU (luas sawah menurun)**	**LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)**	**LSD + LPP Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik**
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	19,863.90	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2030	19,070.28	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72
	2025	30,837.28	30,837.28	30,682.33	30,682.33	30,682.33	30,682.33
	2030	32,284.73	32,284.73	31,961.11	31,961.11	31,961.11	31,961.11
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,905.60	19,362.17	19,517.11	23,342.04	31,012.62	57,928.05
	2030	17,390.87	17,914.71	18,238.34	22,063.26	30,053.54	56,968.96

Sumber : Analisis,2023

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh estimasi luas lahan sawah hingga tahun 2030 semakin berkurang dengan angka 19.070,28 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahunnya meningkat. Dapat disimpulkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 masih surplus, namun tetap diperlukan upaya tambahan dalam mempertahankan sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2023-2043, kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 44.339 Ha berada di seluruh kecamatan, kawasan tanaman pangan yang dimaksud ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 18.259 Ha berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2. 8
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Jasa Lingkungan

Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung. Berdasarkan jasa penyediaan, kategori sangat tinggi berada pada jasa penyediaan serat, bahan bakar, SD Genetik. Sedangkan jasa pengaturan kategori sangat tinggi terdapat pada jasa pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Perlindungan Bencana, Pemurnian Air, Kualitas Udara, Penyerbukan Alami, Pengendalian Hama.

Jasa Budaya, kategori sangat tinggi berada pada jasa budaya rekreasi dan estetika. Selanjutnya jasa pendukung kategori sangat tinggi berada pada jasa pendukung Pembentukan Tanah, Siklus Hara, Produksi Primer, Biodiversitas.

Tabel 2. 32
Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pangan	P1	3,73%	5,29%	8,78%	55,78%	26,43%	100,00%
2	Air Bersih	P2	1,21%	46,93%	9,44%	40,04%	2,39%	100,00%
3	Serat	P3	53,39%	7,89%	20,15%	6,10%	12,46%	100,00%
4	Bahan Bakar	P4	51,74%	10,86%	21,18%	8,64%	7,57%	100,00%
5	SD Genetik	P5	41,94%	24,67%	25,75%	5,66%	1,98%	100,00%
No	Jasa Pengaturan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Iklim	R1	41,91%	17,52%	23,13%	13,64%	3,80%	100,00%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	41,78%	7,70%	9,41%	27,51%	13,61%	100,00%
3	Perlindungan Bencana	R3	41,91%	15,46%	29,07%	13,00%	0,56%	100,00%
4	Pemurnian Air	R4	40,94%	6,82%	31,13%	16,44%	4,68%	100,00%
5	Penguraian Limbah	R5	4,75%	5,47%	43,74%	13,21%	32,84%	100,00%
6	Kualitas Udara	R6	67,94%	0,00%	16,12%	12,19%	3,76%	100,00%
7	Penyerbukan Alami	R7	42,83%	14,39%	32,82%	3,96%	5,99%	100,00%
8	Pengendaliaan Hama	R8	44,63%	30,40%	5,98%	15,69%	3,30%	100,00%
No	Jasa Budaya	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Tempat Tinggal	C1	5,19%	7,09%	3,77%	25,46%	58,49%	100,00%
2	Rekreasi	C2	45,68%	6,33%	13,13%	4,07%	30,79%	100,00%

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
3	Estetika (Alam)	C3	45,68%	2,96%	9,43%	0,98%	40,95%	100,00%
No	Jasa Pendukung	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pembentukan Tanah	S1	46,98%	11,84%	3,82%	17,83%	19,53%	100,00%
2	Siklus Hara	S2	42,22%	8,05%	12,73%	15,36%	21,64%	100,00%
3	Produksi Primer	S3	55,02%	0,00%	23,17%	13,04%	8,77%	100,00%
4	Biodiversitas	S4	44,38%	13,46%	15,83%	25,19%	1,14%	100,00%

Sumber : DDDTLH, 2021

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketersediaan energi, air dan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini cukup memadai dan belum pernah terjadi kelangkaan, kekurangan atau kehabisan tiga jenis kebutuhan masyarakat ini. Untuk air bersih dan pangan bahkan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kelebihan dan menyumbang untuk daerah sekitarnya. Untuk melihat kondisi berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dianalisa beberapa indikator berikut:

A. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Berikut disajikan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2. 33
Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Wilayah	Jumlah Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	178	250	245	275	274,06

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Pada tahun 2021, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 178 kWh. Angka ini menandai baseline awal dalam periode yang dianalisis, mencerminkan kondisi awal konsumsi listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahun 2022 menandai lonjakan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang mencapai 250 kWh. Kenaikan ini sebesar 72 kWh dari tahun sebelumnya bisa distribusikan pada beberapa faktor utama, seperti peningkatan jumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik, peningkatan penggunaan peralatan listrik, dan mungkin adanya program pemerintah yang berhasil meningkatkan akses dan konsumsi energi listrik.

Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita sedikit menurun menjadi 245 kWh. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilitas pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi pasca peningkatan drastis di tahun 2022. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapita sebesar 30 kWh, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi di tengah masyarakat. Pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 27,06. Secara keseluruhan, tren konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020-2025 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi.

Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, termasuk peningkatan standar hidup dan aksesibilitas energi bagi masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumsi energi berkembang dan memberikan wawasan bagi perencanaan energi di masa mendatang.

B. Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan komponen penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan berbagai tantangan geografis dan demografis, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan air baku yang memadai untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 14 sumber air baku utama dengan total potensi mencapai 8,1955m^3/detik. Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Berikut ini tabel Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 (lihat tabel 2.34).

Tabel 2. 34
Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Nama Air Baku	Kecamatan	Nagari	Potensi Air Baku (m^3/dt)
1.	Batu Malanca	Harau	Harau	0,28
2.	Ulu Sungan	Harau	Solok Bio-bio	0,23
3.	Batang Kawek	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,49
4.	Batang Agam	Akabiluru	Batu Hampa	1,4875
5.	Batang Simonok	Kapur IX	Muaro Paiti	0,235
6.	Batang Sopan	Kapur IX	Sialang	0,48
7.	Batang Gosan	Suliki	Suliki	2,495
8.	Sungai Kunali	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,5
9.	Lubuak Sati	Harau	Harau	0,198
10.	Batang Harau	Harau	Sarilamak	0,5
11.	Maek Kuning	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,2
12.	Batang Manggilang	Pangkalan Koto Baru	-	0,2
13.	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Guguak, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Harau	-	0,5
14.	Ampalu	Lareh Sago Halaban	-	0,4

Sumber: Bappelitbangda, PUPR, PDAM, Data Diolah Tahun 2025

C. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

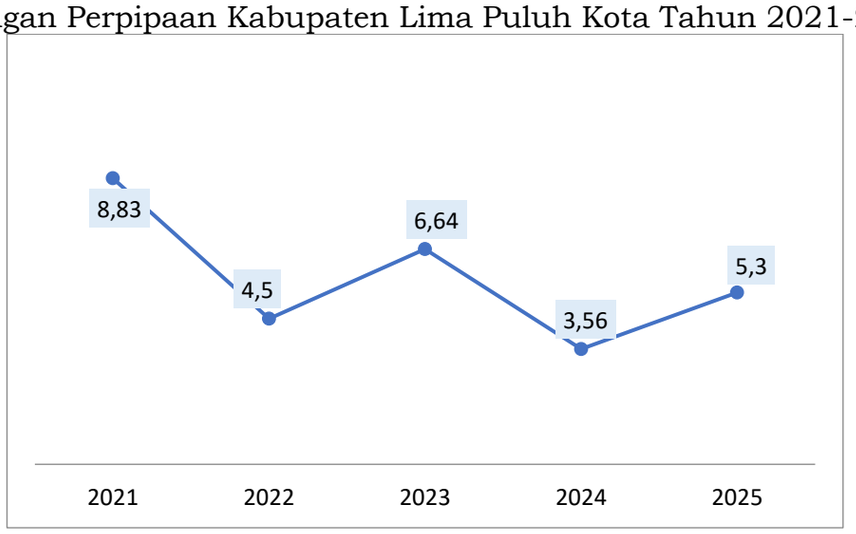
Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola oleh BUMD dimana untuk cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat sedikit, belum mencakup 50% wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan capaian indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Berikut ini tabel data capaian akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 2. 35
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum
Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Wilayah	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Lima Puluh Kota	8,83	4,50	6,64	3,56	5,43

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Grafik 2.3
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum
Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Pada tahun 2021 capaian air minum perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 8,83%, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,50%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,64%, tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 3,56%, dan pada tahun 2025 naik menjadi 5,3%

Kondisi capaian yang tidak stabil ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.

D. Indeks Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya angka prevalensi stunting. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat.

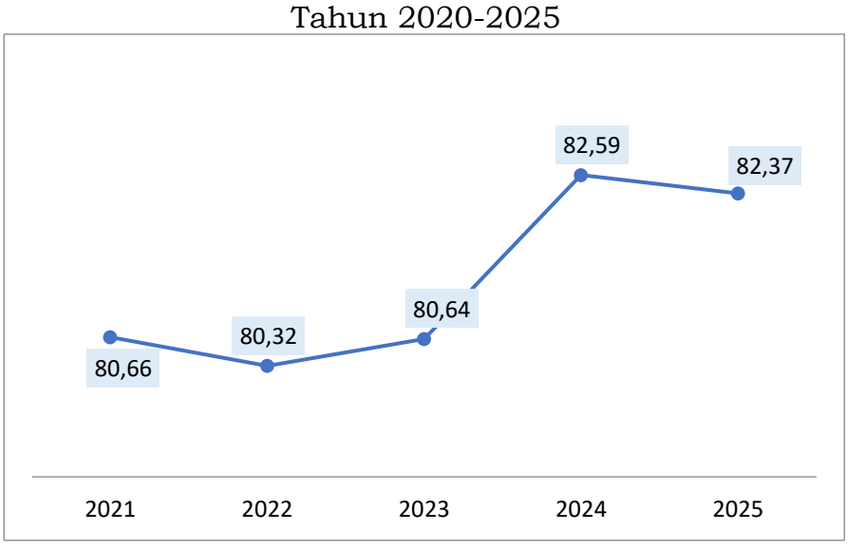
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Wilayah	Indeks Ketahanan Pangan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	80,66	80,32	80,64	82,59	82,37

Sumber: Dinas Pangan, Tahun 2026

Grafik 2.4
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Pangan, Tahun 2026

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa Indeks ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 80,66 menjadi 80,32 tahun 2023 meningkat dari 80,32 menjadi 80,64 namun kembali mengalami penurunan sampai tahun 2025.

Hal ini disebabkan oleh aspek pemanfaatan yang masih kurang seperti pola konsumsi pangan kurang beragam dan masalah keamanan pangan.

E. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (*PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

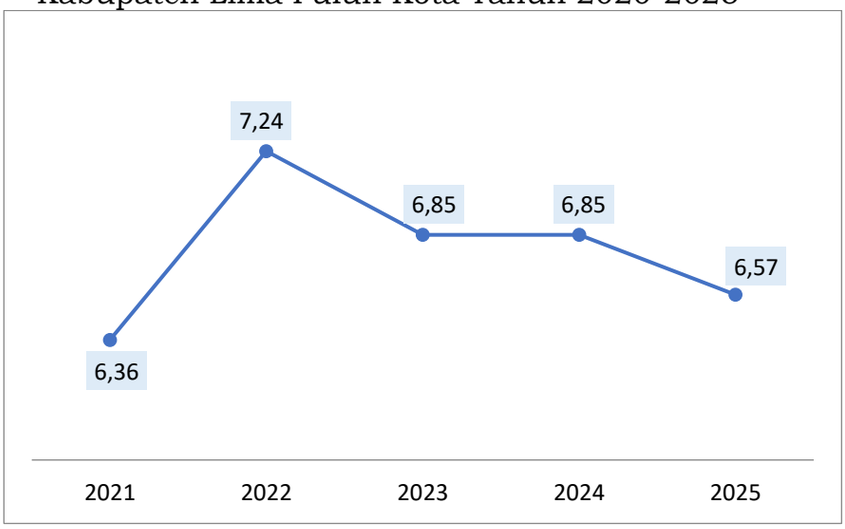
Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah. Capaian PoU konsumsi pangan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2. 37
Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Wilayah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	6,36	7,24	6,85	6,85	6,57

Sumber : Dinas Pangan Tahun 2026

Grafik 2. 5
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Pangan, Tahun 2026

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 berada pada angka 6,36. Kejadian Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh pada perekonomian masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 ke tahun 2022 naik cukup signifikan menjadi 7,24. Pada tahun 2023 sampai dengan 2025 perekonomian masyarakat kembali membaik sehingga Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota kembali turun

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup sangat ditentukan oleh perilaku dan aktivitas kegiatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga akan menjamin kesehatan penduduk dan aktivitas sehari-hari. Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya:

A. Indeks Tutupan Lahan

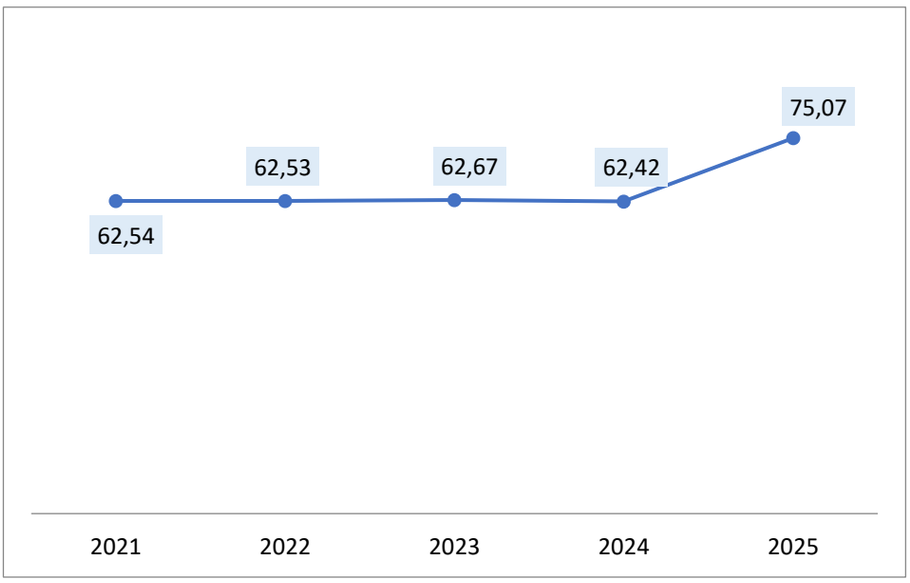
Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas lahan dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan terkait lingkungan hidup. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk pengelolaan risiko bencana. Untuk melihat indeks tutupan lahan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2. 38
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	62,54	62,53	62,67	62,42	75,07

Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Grafik 2. 6
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025



Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Tabel dan grafik diatas menunjukkan perkembangan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 yang cenderung relatif stabil pada kisaran 62 pada tahun 2021 hingga 2024, yaitu masing-masing sebesar 62,54; 62,53; 62,67; dan 62,42. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 75,07. Lonjakan ini mengindikasikan adanya perbaikan yang cukup besar dalam kondisi tutupan lahan, yang dapat mencerminkan keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan, atau kebijakan terkait tata ruang dan konservasi.

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas AIR (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2025 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Penurunan IKLH pada tahun 2023 ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2022 nilai IKA Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 55,63 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 50,92.

Penurunan nilai IKA ini disebabkan oleh pencemaran air oleh kegiatan tambang, limbah industri dibuang ke sungai tanpa proses disterilkan lebih dahulu, sehingga mencemari aliran sungai. Demikian juga halnya dengan nilai IKU Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2022 berada pada angka 92,00 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 90,24. Penurunan nilai IKU ini disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter–parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Kinerja IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota dan komponen IKLH selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,51	71,87	71,63	74,88	78,91
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	53,33	56,52	61,92	76,55
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,53	92,63	90,24	93,65	83,17
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,54	62,53	62,47	62,42	75,07

Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

C. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Akses aman adalah ketika rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting

dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi yang aman mencakup fasilitas kebersihan yang memadai dan layak, serta pengolahan limbah yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Tabel 2. 40
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2025

No	Indikator	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	2,31%	2,31%	0,39	0,46%

Sumber: DPUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Grafik 2. 7
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025



Sumber: DPUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2022 dan 2023, data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 2,31%. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan kondisi yang statis, di mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi aman belum memberikan hasil yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi sehingga peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan mencoba untuk mendata akses sanitasi di Kabupaten Lima

Puluh Kota yang mana akses sanitasi aman mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,39 % dari tahun 2023. Penyebab penurunan akses sanitasi aman ini adalah sampai saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

D. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

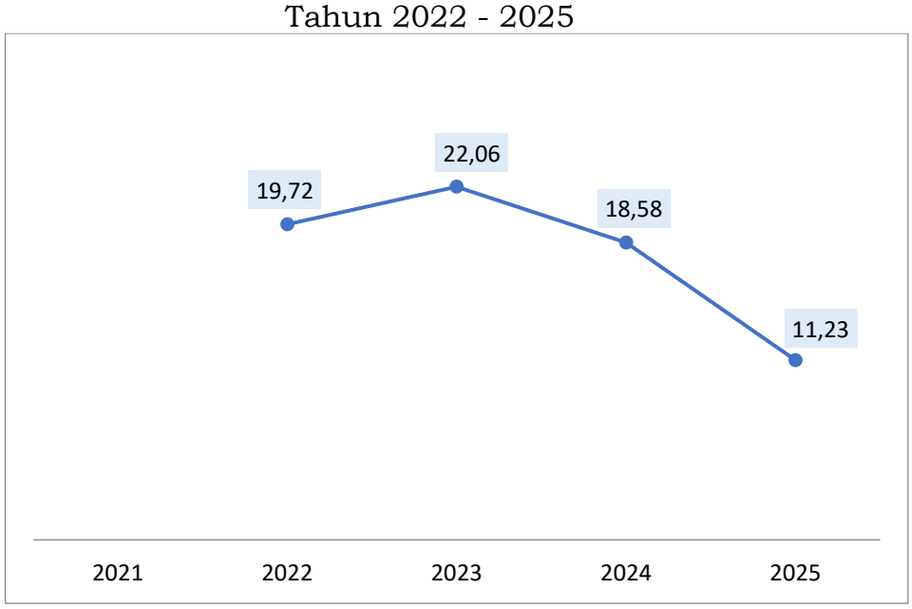
Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bagian penting dari pengelolaan sampah ini adalah seberapa banyak timbulan sampah yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah.

Tabel 2. 41
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tahun 2022 - 2025

No	Indikator	2022	2023	2024	2025
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	19,72%	22,06%	18,58%	11,23%

Sumber: SIPSN Tahun 2026

Grafik 2. 8
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tahun 2022 - 2025



Sumber: SIPSN Tahun 2026

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel di atas, data menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat dari 19,72% pada tahun 2022 menjadi 22,06% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,34% dalam pengolahan sampah dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengolah sampah

memberikan hasil yang nyata. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18,58% disebabkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh berhenti beroperasi sehingga sampah-sampah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terolah secara optimal, pada tahun 2025 turun menjadi 11,23% hal ini disebabkan oleh fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang belum maksimal. Dalam upaya pengelolaan sampah ini diperlukan strategi-strategi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target pengolahan sampah yang lebih tinggi di masa mendatang.

E. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

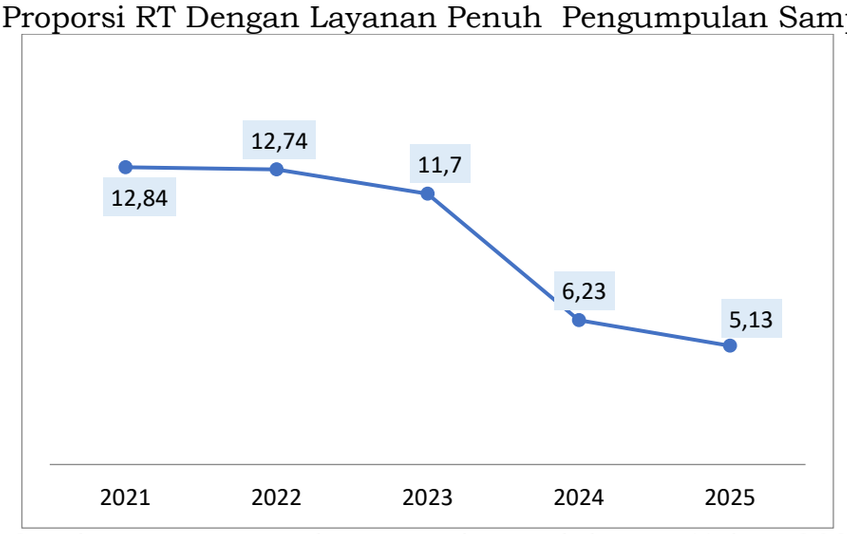
Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2. 42
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,84%	12,74%	11,70%	6,23%	5,13%

Sumber: DLHPKP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Grafik 2. 9
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah



Sumber: DLHPKP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 12,84%, sedikit menurun menjadi 12,74% pada tahun 2022, dan terus menurun pada tahun 2023 sebesar 11,70% hingga mencapai 5,13% pada tahun 2025.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan layanan pengumpulan sampah di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal, serta tantangan dalam memastikan akses layanan pengumpulan sampah yang merata bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengatasi penurunan ini dan meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, perlu adanya langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan efisiensi operasional layanan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

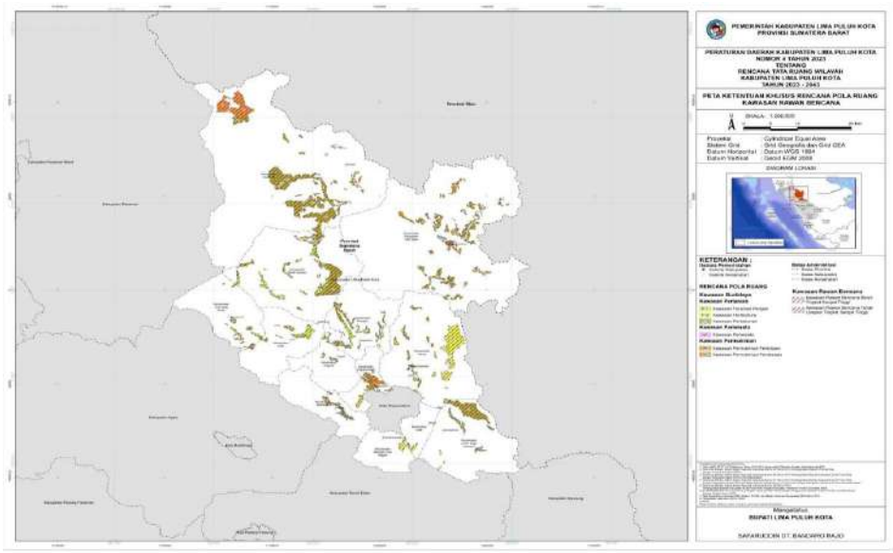
Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan program berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat di masa mendatang, mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tujuan menetapkan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Sehingga perlu dilakukan hal berikut ini: (1)Penetapan kawasan rawan bencana banjir; (2) Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana; dan (3)Pengaturan lahan daerah hulu.

Arahan penetapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam; (2) Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana; dan (3) Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung. Berikut disajikan peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana (lihat Gambar) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 2.9
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Rawan Bencana



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Ada beberapa bencana alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah "*The Sumatra fault system*, Indonesia" Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau dan Bukik Barisan. Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain: 1) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

B. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing Basin Batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Provinsi Jambi dan Basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Provinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan permukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsoran, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor di antaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan, yang biasanya terjadi pada jalan yang pada sisi kiri dan kanannya terdapat areal perkebunan rakyat.

Di jalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi, daerah rawan longsor adalah di Jorong Ikan banyak dan Jorong Sungai Mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat Nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang, jalur jalan yang rawan longsor adalah di Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Maek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka. Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX, longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru serta Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur di Kecamatan Kapur IX.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor terdapat lebih kurang pada 50 titik. Setiap tahunnya longsor terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsoran sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsoran yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada.

C. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

D. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Lesus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan "Angin Limbubu". Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kerawanan. Kawasan yang dikatakan sebagai kawasan yang tidak rawan bahaya adalah kawasan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut, dalam hal ini ada di Kecamatan Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh dan Mungka. Kawasan yang rawan bahaya adalah kawasan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir.

E. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah *(ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat. Data bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.43 di bawah ini:

Tabel 2. 43
Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
1.	Nagari Sialang Kec. Kapur IX	Tanah Longsor
2.	Nagari Tungkar Kec. Situjuah Limo Nagari	Tanah Longsor
3.	Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX	Tanah Longsor
4.	Nagari Mungo Kec. Luak	Banjir Genangan

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
5.	Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	Banjir Genangan
6.	Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	Cuaca Ekstrim
7.	Nagari Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban	Tanah Longsor
8.	Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	Cuaca Ekstrim
9.	Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban	Tanah Longsor
10.	Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX	Banjir Genangan
11.	Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX	Tanah Longsor
12.	Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru	Tanah Longsor
13.	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX	Banjir Genangan
14.	Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX	Banjir Genangan
15.	Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX	Banjir Genangan
16.	Nagari Galugua Kec. Kapur IX	Banjir Genangan
17.	Nagari Guguak VIII Koto, Kec. Guguak	Cuaca Ekstrim
18.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Banjir Genangan
19.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Banjir Genangan
20.	Nagari Taram, Kec. Harau	Banjir Genangan
21.	Nagari Taram, Kec. Harau	Banjir Genangan
22.	Nagari Labuah Gunuang , Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
23.	Nagari Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd.Panjang , Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
24.	Nagari Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	Cuaca Ekstrim
25.	Nagari Sei. Antuan Kec. Mungka	Cuaca Ekstrim
26.	Nagari Koto Tangah, Kec. Bukik Barisan	Tanah Longsor
27.	Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh	Tanah Longsor
28.	Nagari Suliki, Kecamatan Suliki	Kebakaran Hutan dan Lahan
29.	Nagari Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
30.	Nagari Kurai, Kec. Suliki	Cuaca Ekstrim
31.	Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kec. Luak	Tanah Longsor
32.	Nagari Koto Tuo, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
33.	Nagari Andaleh, Kec. Luak	Kebakaran Hutan dan Lahan
34.	Nagari Taram, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
35.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
36.	Nagari Andaleh, Kec. Luak	Kebakaran Hutan dan Lahan
37.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
38.	Nagari Taram, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
39.	Nagari Batu Balang, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
40.	Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu, Kec. ;uak	Kebakaran Hutan dan Lahan
41.	Nagari Taram, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
42.	Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
43.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
44.	Nagari Taram, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
45.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
46.	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX	Cuaca Ekstrim
47.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
48.	Nagari Balai Panjang, Kec. Lareh Sago Halaban	Kebakaran Hutan dan Lahan
49.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
50.	Nagari Solok Bio-bio Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
51.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
52.	Nagari Limbanang, Kec. Suliki	Cuaca Ekstrim
53.	Nagari Guguak VIII Koto , Kec. Guguak	Cuaca Ekstrim
54.	Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru	Kebakaran Hutan dan Lahan
55.	Nagari Andaleh Kec. Luak	Kebakaran Hutan dan Lahan
56.	Nagari Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari	Kebakaran Hutan dan Lahan
57.	Nagari Sungai Balantiak Kec.Akabiluru	Kebakaran Hutan dan Lahan
58.	Nagari Gurun, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
59.	Nagari Taram, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
60.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
61.	Nagari Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari	Cuaca Ekstrim
62.	Nagari Gurun, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
63.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
64.	Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka	Kebakaran Hutan dan Lahan
65.	Nagari Sungai Rimbang, Kec. Suliki	Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
66.	Nagari Maek, Kec. Bukik Barisan	Kebakaran Hutan dan Lahan
67.	Nagari Limbanang, Kec. Suliki	Kebakaran Hutan dan Lahan
68.	Nagari Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Kebakaran Hutan dan Lahan
69.	Nagari Sungai Talang, Kec. Guguak	Kebakaran Hutan dan Lahan
70.	Nagari Bukik Limbuku, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
71.	Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak	Kebakaran Hutan dan Lahan
72.	Nagari Tanjuang Balik, Kec. Pangkalan Koto Baru	Kebakaran Hutan dan Lahan
73.	Nagari Manggilang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Kebakaran Hutan dan Lahan
74.	Nagari Galugua, Kec. Kapur IX	Kebakaran Hutan dan Lahan
75.	Nagari Piobang, Kec. Payakumbuh	Kebakaran Hutan dan Lahan
76.	Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban	Tanah Longsor
77.	Nagari Tanjuang Pauh, Kec. Pangkalan Koto Baru	Kebakaran Hutan dan Lahan
78.	Nagari Batu Payuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
79.	Nagari Bukik Sikumpa, Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
80.	Nagari Mungo, Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
81.	Nagari Rogeh, Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
82.	Nagari Taeh Bukik, Kec. Payakumbuh	Kebakaran Hutan dan Lahan
83.	Nagari Balai Panjang, Kec. Lareh sago Halaban	Kebakaran Hutan dan Lahan
84.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
85.	Nagari Solok Bio-bio, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
86.	Nagari Taeh Bukik, Kec. Payakumbuh	Kebakaran Hutan dan Lahan
87.	Nagari Sungai Talang, Kec. Guguak	Kebakaran Hutan dan Lahan
88.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
89.	Nagari Gurun, Kec. Harau	Kebakaran Hutan dan Lahan
90.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
91.	Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kec. Akabiluru	Cuaca Ekstrim
92.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
93.	Nagari Talang Maur, Kec. Mungka	Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
94.	Nagari Sungai Antuan, Kec. Mungka	Cuaca Ekstrim
95.	Nagari Mungka, Kec. Mungka	Cuaca Ekstrim
96.	Nagari Haraua, Kec. Harau	Tanah Longsor
97.	Nagari Koto Alam, Kec. Pangkalan Koto Baru	Cuaca Ekstrim
98.	Nagari Bukik Limbuku, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
99.	Nagari Batu Balang, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
100.	Nagari Sungai Antuan, Kec. Mungka	Cuaca Ekstrim
101.	Nagari Andaleh, Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
102.	Nagari Batu Payuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
103.	Nagari Batu Payuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Cuaca Ekstrim
104.	Nagari Koto Baru Simalanggan, Kec. Payakumbuh	Cuaca Ekstrim
105.	Nagari Sungai Antuan, Kec. Mungka	Kebakaran Hutan dan Lahan
106.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Cuaca Ekstrim
107.	Nagari Talang Maur, Kec. Mungka	Kebakaran Hutan dan Lahan
108.	Nagari Taram, Kec. Mungka	Kebakaran Hutan dan Lahan
109.	Nagari Guguak VIII Koto, Kec. Guguak	Cuaca Ekstrim
110.	Nagari Mungo, Kec. Luak	Cuaca Ekstrim
111.	Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh	Cuaca Ekstrim
112.	Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh	Tanah Longsor
113.	Nagari Taram Kec. Harau	Banjir
114.	Nagari Tarantang Kec. Harau	Banjir
115.	Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban	Banjir
116.	Nagari Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan	Tanah Longsor
117.	Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	Banjir
118.	Nagari Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan	Tanah Longsor
119.	Nagari Banjaloweh, Kec. Bukik Barisan	Tanah Longsor
120.	Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki	Banjir
121.	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Banjir
122.	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Tanah Longsor
123.	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Tanah Longsor
124.	Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
125.	Nagari Gunung Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
126.	Nagari Muaro Paiti Kec.Kapur IX	Banjir
127.	Nagari Galugua Kec.Kapur IX	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026

Berdasarkan tabel di atas bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh banjir dan longsor, dalam menghitung potensi dampak negatif suatu bencana menggunakan pendekatan indeks risiko bencana dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat dilihat dari indikator Indeks Resiko Bencana.

F. Bahaya Hidrometeorologi

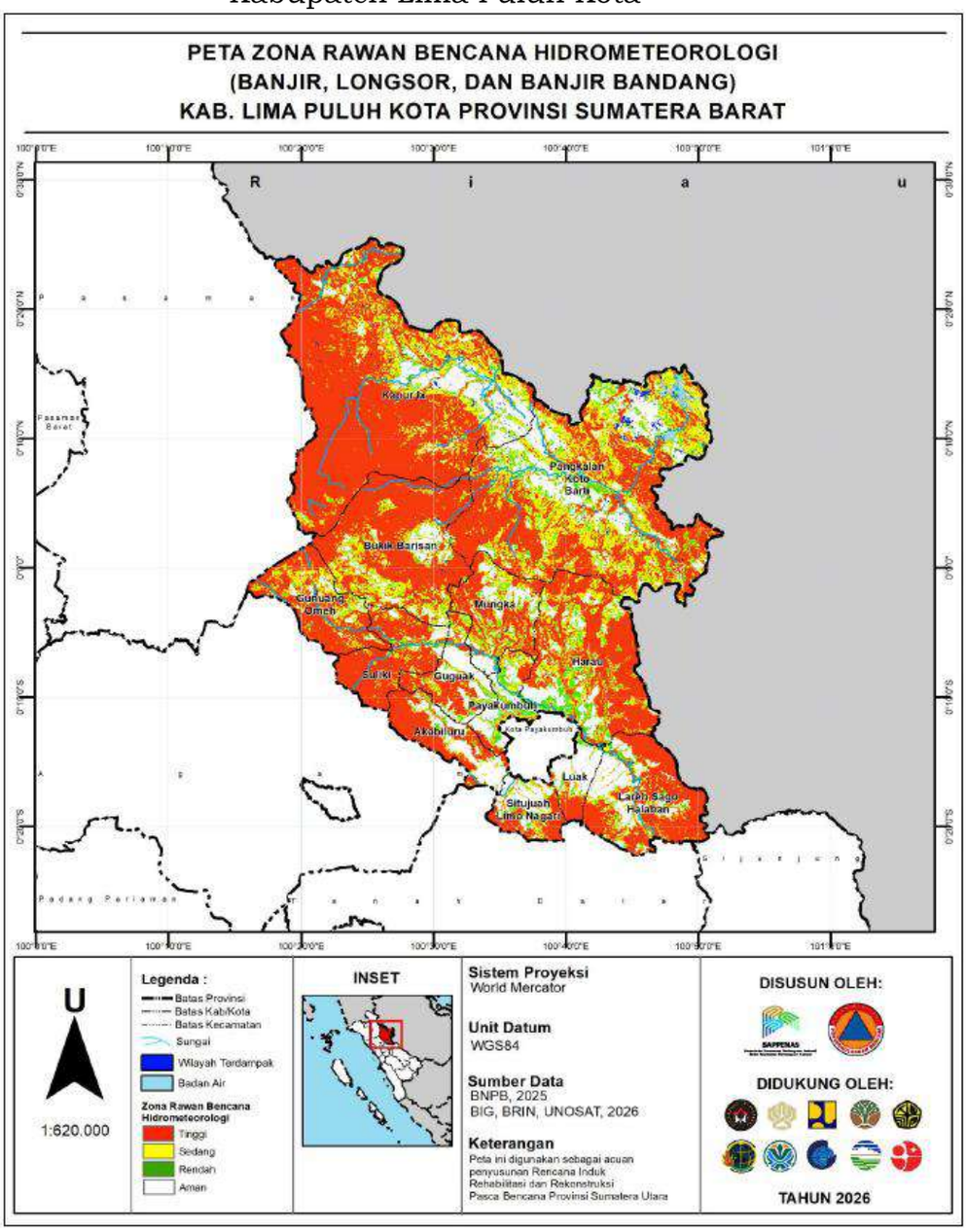
Pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 terjadi hujan lebat yang disusul dengan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cuaca ekstrem terus berlanjut hingga 25 November 2025 yang kemudian menyebabkan longsor dan likuefaksi tanah pada beberapa Kabupaten. Bencana alam ini kemudian menyebabkan ribuan orang mengungsi, ratusan rumah terdampak, ratusan hektar lahan pertanian terdampak, dan kerugian pada berbagai sektor lainnya. Kejadian bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem telah berdampak pada berbagai Nagari yang meliputi Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 1.450 Jiwa terdampak dan lebih dari 228 Kepala Keluarga mengungsi. Rusaknya 453 rumah warga, 20 jalan lingkungan, 34 jalan Kabupaten, 2 jalan Provinsi, 19 jembatan Kabupaten, 27 jembatan Gantung, 3 jembatan Provinsi, dan 5 fasilitas keselamatan jalan. Rubuhnya 2 tebing sungai, rusaknya 8 saluran irigasi, 2 drainase, 5 bendung, dan 5 sarana air bersih. Bencana ini juga berdampak pada 30 titik lahan persawahan, 8 titik lahan non sawah, 13 jembatan sarana pertanian, 3 Hektar komoditi tanaman holtikultura, 1 rumah bibit, 3 POKDAKAN ikan nila, 35 dapur produksi IKM, 1 spot foto wisata ikan banyak dan 1 dam irigasi taman bermain anak lembah harau. 5 titik kawasan hutan seluas 0,26 Hektar, 4 titik sarana kesehatan, 9 sekolah, dan 2 gedung Pemerintahan.

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengakibatkan ratusan rumah rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana dan berdampak pada sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Untuk mengetahui akibat dan dampak bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem tersebut telah dilakukan penilaian kerusakan dan kerugian serta kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan SKPD terkait dengan difasilitasi oleh BNPB.

Bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.967,408,148,237,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor Infrastruktur Sebesar Rp.903,741,687,029,- (Sembilan Ratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua

Puluh Sembilan Rupiah) disusul Sektor Perumahan Rp.38,990,305,315,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah), Sektor Sosial Rp.17,221,012,400,- (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), Sektor Ekonomi Rp.6,752,481,493,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), dan Lintas Sektor sebesar Rp.702,662,000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Gambar 2. 10
Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi
Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Renduk PRRP Provinsi Sumatera Barat, 2026

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul

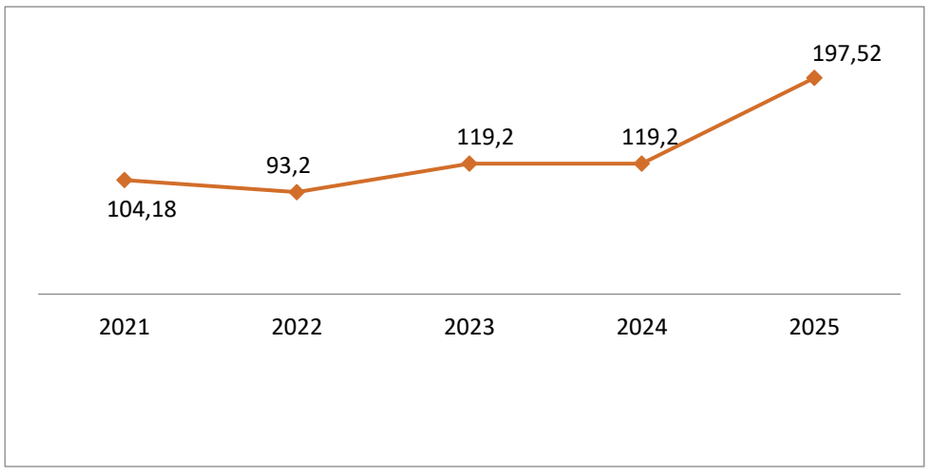
dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai indeks risiko bencana, diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan (lihat tabel 2.44 dan Grafik 2.7).

Tabel 2. 44
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2025

Wilayah	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	104,18	93,20	119,20	119,20	197,52

Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, 2026

Grafik 2. 10
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2025



Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, 2026

Data di Kabupaten Lima Puluh kota menunjukkan fluktuasi dalam nilai IRB dari tahun 2021 hingga 2025. Penurunan dan kenaikan indeks ini mencerminkan dinamika dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon terhadap bencana di daerah tersebut. Pada tahun 2021, IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 104,18. Nilai ini mencerminkan tingginya tingkat risiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, infrastruktur yang rentan dan kesiapsiagaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam IRB menjadi 93,20. Penurunan ini mencerminkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, dan pelatihan kebencanaan untuk masyarakat.

Namun, pada tahun 2023 dan tahun 2024, IRB kembali meningkat menjadi 119,20. Bahkan tahun 2025 meningkat menjadi 197,52. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya bencana besar, perubahan kondisi lingkungan, atau kurangnya keberlanjutan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

b. Indeks Ketahanan Daerah

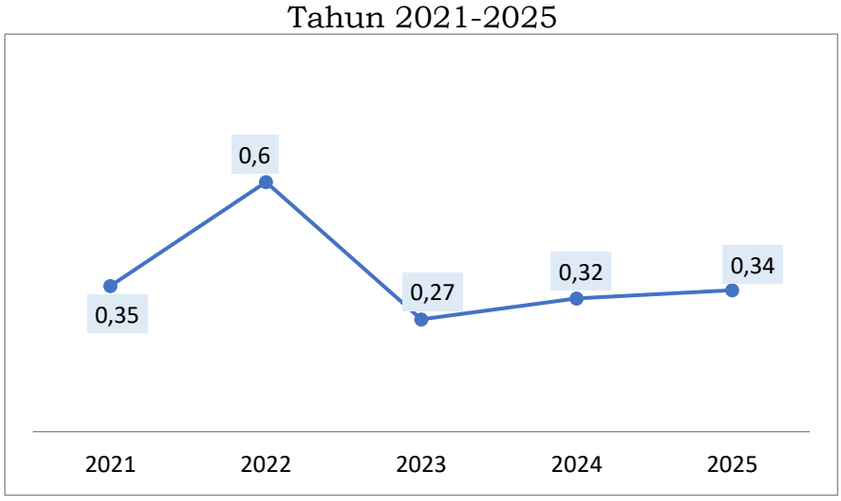
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 45
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Wilayah	Indeks Ketahanan Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	0,35	0,60	0,27	0,32	0,34

Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, 2026

Grafik 2.11
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025



Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025

2.1.1.7 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Pengetahuan mengenai hal ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola permukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Selain itu, pengetahuan mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sebanyak 406.228 ribu jiwa, dengan rincian 202.793 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 203.435 ribu jiwa penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin sebesar 99,68 persen.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa sensus penduduk dilaksanakan paling sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka

berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terkendali diperlukan agar tercipta keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Sejak tahun 2021-2025 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berfluktuasi hingga mencapai angka 1,15 di tahun 2025.

Tabel 2. 46
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,55	0,71	1,21	0,93	1,15

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2026

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

C. Rasio Penduduk

Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karakteristik demografi, sosial, ekonomi dan budaya. Struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2. 47
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

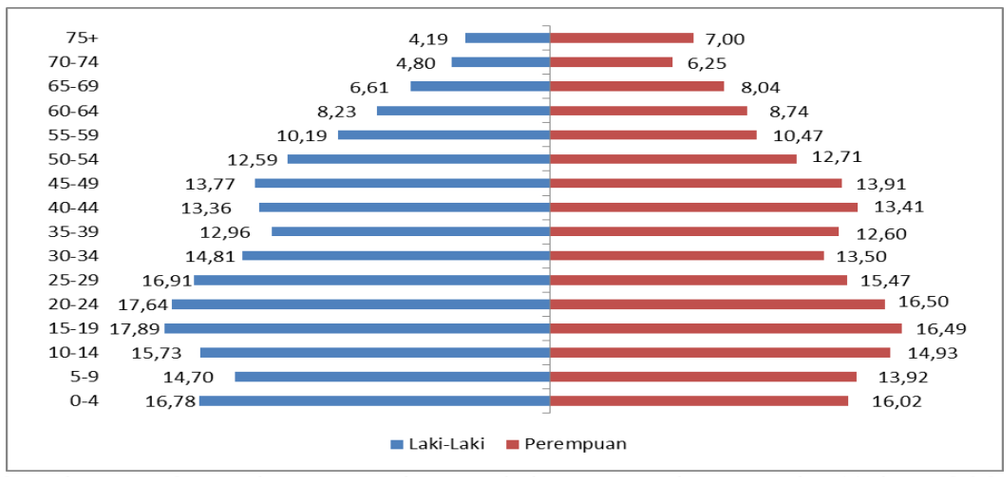
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)
0-4	17,2	16,5	33,7
5-9	14,8	14,0	28,9
10-14	15,3	14,6	29,9
15-19	17,7	16,3	34,1
20-24	17,7	16,6	34,3
25-29	17,2	15,8	33,0

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)
30-34	15,3	13,9	29,2
35-39	13,1	12,6	25,8
40-44	13,2	13,2	26,5
45-49	13,8	13,9	27,7
50-54	12,59	13,0	25,9
55-59	10,6	10,9	21,4
60-64	8,5	8,9	17,3
65-69	6,7	8,1	14,8
70-74	5,0	6,5	11,5
75+	4,5	7,3	11,8
Jumlah	202,7	203,4	406.228

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sebanyak 405,7 ribu jiwa, dengan rincian 203,6 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 202,2 ribu jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,68 persen. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 digambarkan dengan piramida penduduk di bawah ini.

Grafik 2. 12
Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk di atas. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan piramida penduduk muda, dimana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun yaitu 34,37 ribu jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu 11,05 ribu jiwa. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah.

D. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 yang bersumber dari BPS adalah 124 jiwa per km2. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 48
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km^2)	Kepadaran per Km^2
1	Payakumbuh	39.571	59,59	664,05
2	Akabiluru	30.665	111,31	275,49
3	Luak	30.174	45,98	656,24
4	Lareh Sago Halaban	41.329	217,49	190,03
5	Situjuah Limo Nagari	24.425	75,58	323,17
6	Harau	58.961	310,53	189,87
7	Guguak	37.476	95,27	393,37
8	Mungka	28.671	149,57	191,69
9	Suliki	15.557	144,25	107,85
10	Bukik Barisan	24.252	336,08	72,16
11	Gunuang Omeh	14.694	147,33	99,74
12	Kapur IX	29.624	834,61	35,49
13	Pangkalan Koto Baru	30.829	745,81	41,34
Jumlah / Rata-rata		**406.228**	**3.273,40**	**124,10**

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luak, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suiki. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah. Karakteristik penduduk yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.49 di bawah ini:

Tabel 2. 49
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut
Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	39.571	5.653
2	Akabiluru	7	30.665	4.380
3	Luak	4	30.174	7.543
4	Lareh Sago Halaban	8	41.329	5.166
5	Situjuah Limo Nagari	5	24.425	4.885
6	Harau	11	58.961	5.360
7	Guguak	5	37.476	7.381
8	Mungka	5	28.671	5.734
9	Suliki	6	15.557	2.592
10	Bukik Barisan	5	24.252	4.850
11	Gunuang Omeh	3	14.694	4.898
12	Kapur IX	7	29.624	4.232
13	Pangkalan Koto Baru	6	30.829	5.138
	Jumlah	79	406.228	5.143

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2025 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (58.961 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.694 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Luak (7.543 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.592 jiwa). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhii oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Analisis terhadap kesejahteraan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita, indeks gini rasio, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia selama lima tahun terakhir.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

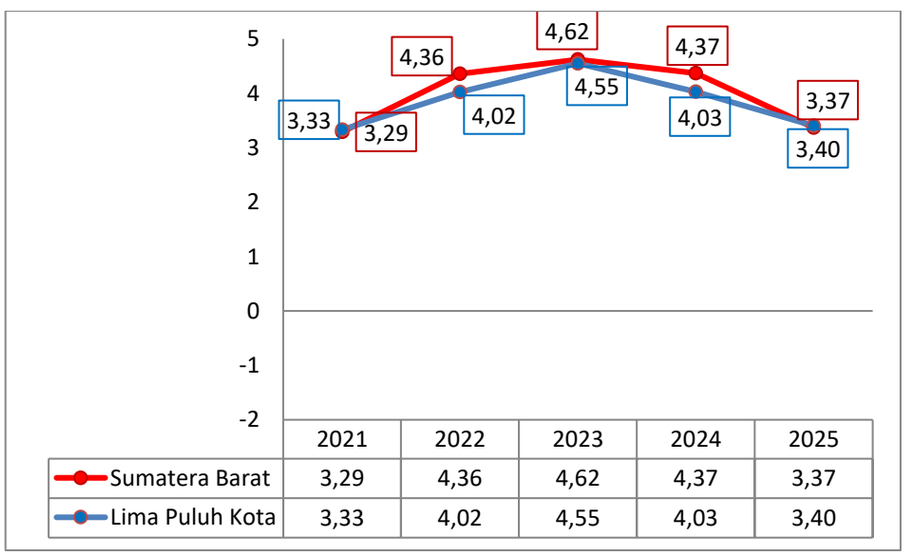
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi

salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2025 yang cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota berada relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 3,33 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,29 persen. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,02 persen, meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,36 persen.

Tahun 2023 menjadi periode dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun terakhir, dimana Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 4,55 persen, sementara Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 4,03 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,37 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota turun menjadi 3,40 persen, namun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki daya tahan yang cukup baik dan mampu tumbuh kompetitif dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

Grafik 2. 13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Sumatera Barat	3,29	4,36	4,62	4,37	3,37
Lima Puluh Kota	3,33	4,02	4,55	4,03	3,40

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, maupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di Perdesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2021 – 2025 (Rupiah/kapita/bulan)

Wilayah	Garis Kemiskinan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	475.123	504.670	553.068	582.794	593.402
Sumatera Barat	568.703	610.941	667.925	708.416	729.806

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Semenjak tahun 2021-2025, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhii oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Meningkatnya garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

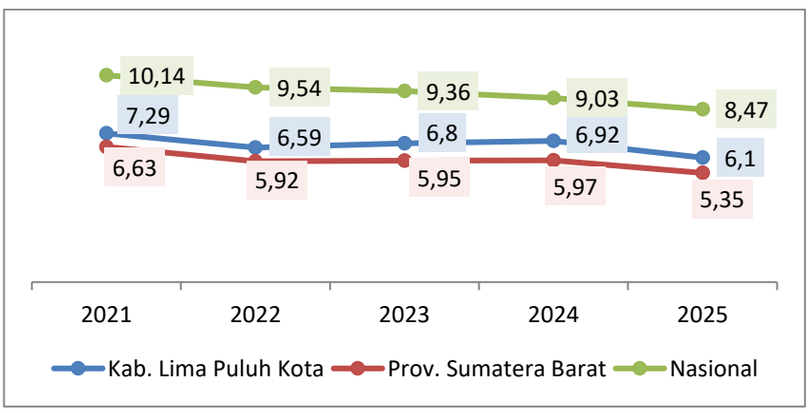
Tabel 2. 51
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (ribu jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	28,51	26,00	27,02	27,72	24,61
Sumatera Barat	370,67	335,21	340,37	345,73	312,35
Nasional	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20	23.359,71

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat;
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari tabel di atas jumlah Penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah sebanyak 24.610 jiwa, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 28.510 jiwa. Angka kemiskinan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 7,29% sebagai salah satu dampak kejadian covid-19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,59 namun kembali naik ditahn berikutnya hingga tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 – 2025. Angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota juga berada diatas angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang berpihak pada masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.14
Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025

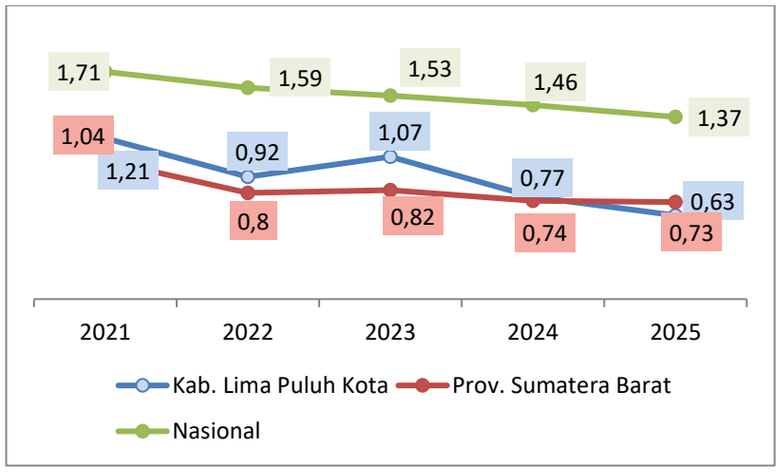


Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat;
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Selain pengendalian jumlah atau persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1,21 lebih tinggi dari Provinsi yang

P1 nya 1,04 dan lebih rendah dari Nasional yang P1 nya adalah 1,71. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi dan lebih pendek dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih optimal agar masyarakat miskin dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

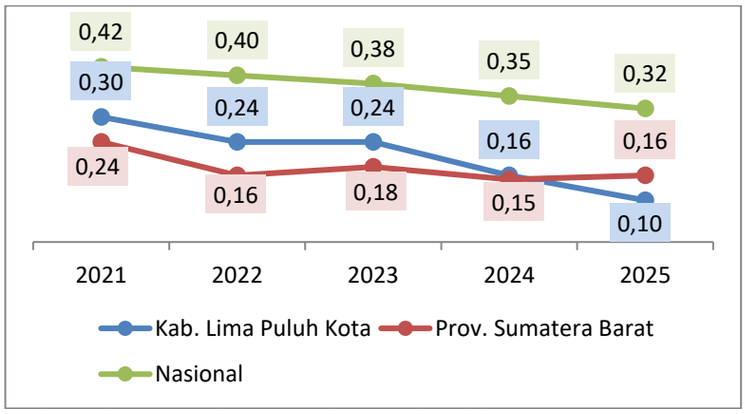
Grafik 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2025



Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,10, lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,32 dan Provinsi sebesar 0,16. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik daripada Nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025



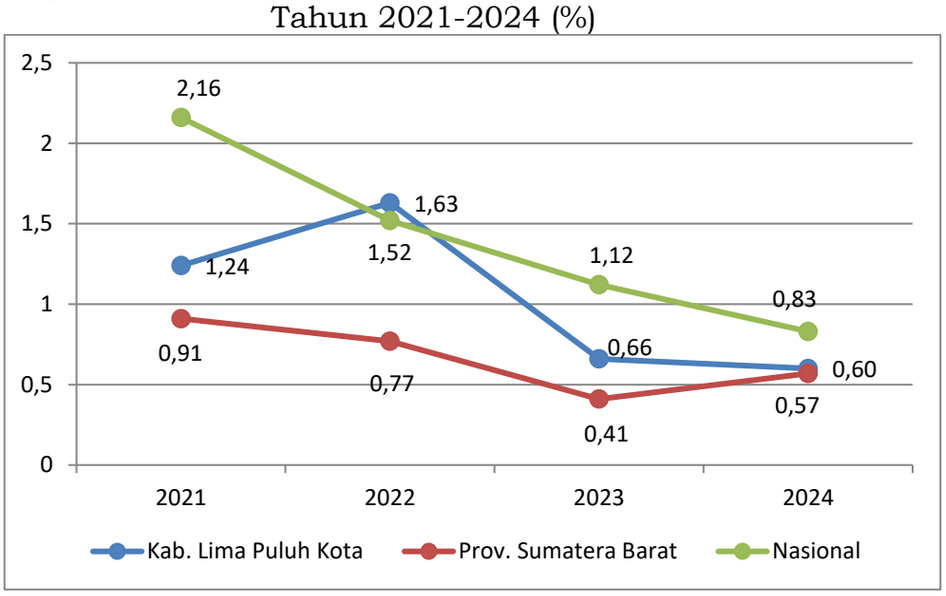
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

B. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,99 PPP (*Purchasing Power Parity*).

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Edaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2024 (%)



(Sumber : Satuan Tugas Pengelola Data P3KE)

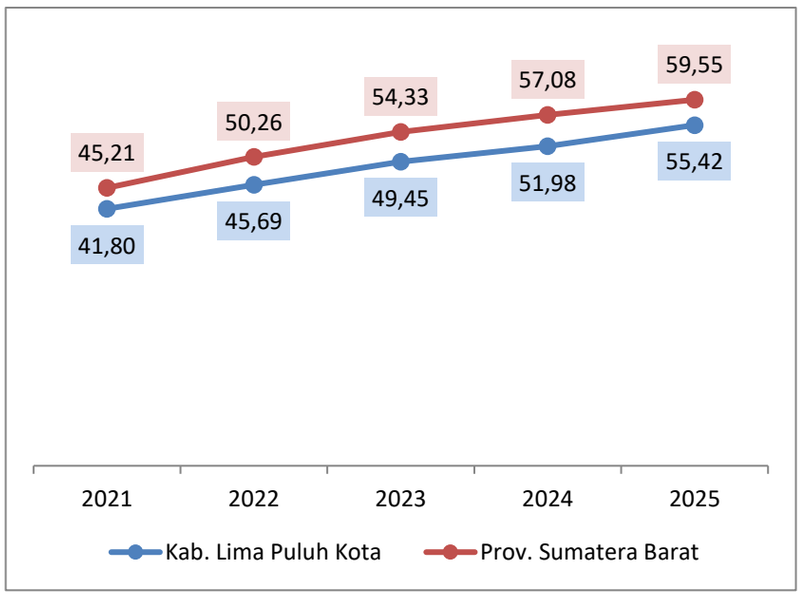
Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 1,24%. Namun, setelah dilakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami penurunan ke angka 0,60% pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2024 lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat tapi berada diposisi lebih rendah dari kemiskinan ekstrem nasional kecuali pada tahun 2022.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor–faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2021-2025 terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

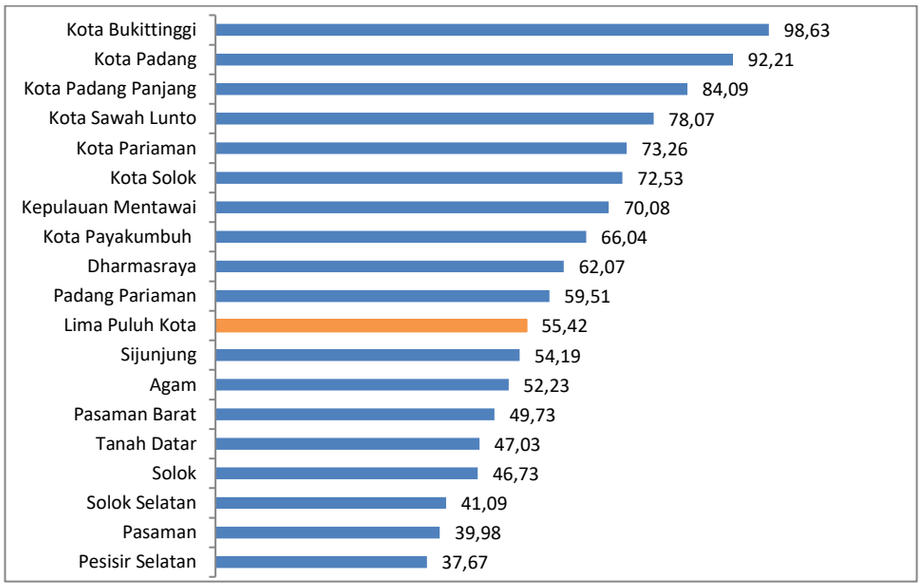
Grafik 2.18
PDRB per Kapita (ADHB)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 (juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Sedangkan dilihat dari perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat maka PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 berada pada posisi ke 11 (sebelas) dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provisi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.19
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 (juta rupiah)

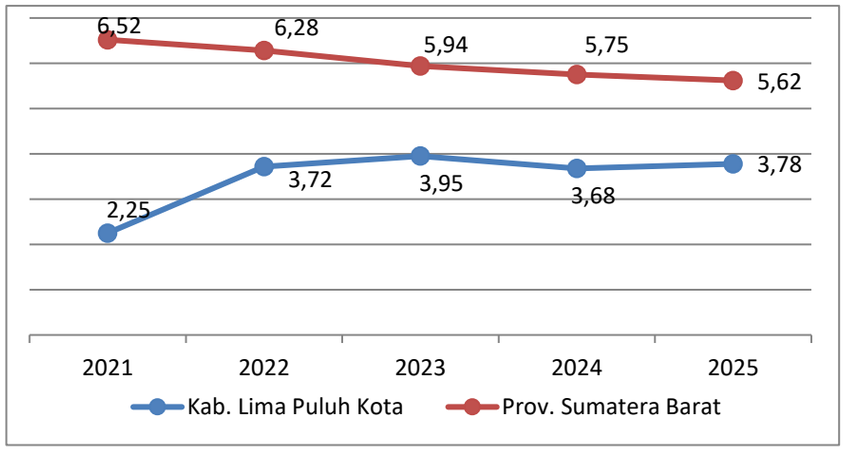


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 2,25% yang dimungkinkan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 hingga 2023 TPT naik menjadi 3.72% dan 3,95% tapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,68% yang kemudian kembali naik menjadi 3,78% pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, selama lima tahun terakhir TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada pada posisi di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat, seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

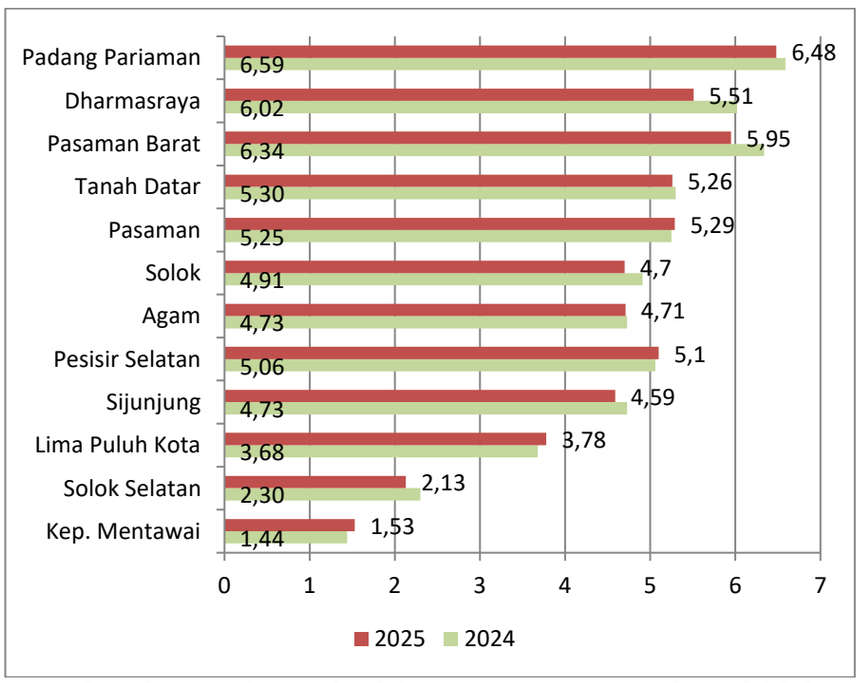
Grafik 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat;
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berada pada posisi 3 terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja termanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah:

Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 - 2025 (%)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.2.1.5 Gini Ratio

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarannya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika G< 0,3 berarti memiliki ketimpangan yang rendah, 0,3<G<0,5 berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika G>0,5 berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat kemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

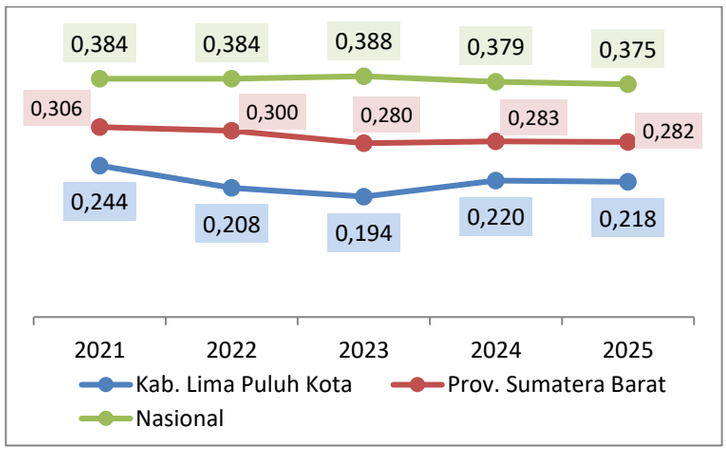
1. 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
2. 40 % Menengah : kelompok menengah
3. 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dalam rentang tahun 2021-2025, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,002. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir (2021-2025) berada pada posisi rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tersebut adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 tercatat sebesar 0,218. Dengan nilai 0,218 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Nasional, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih kecil. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

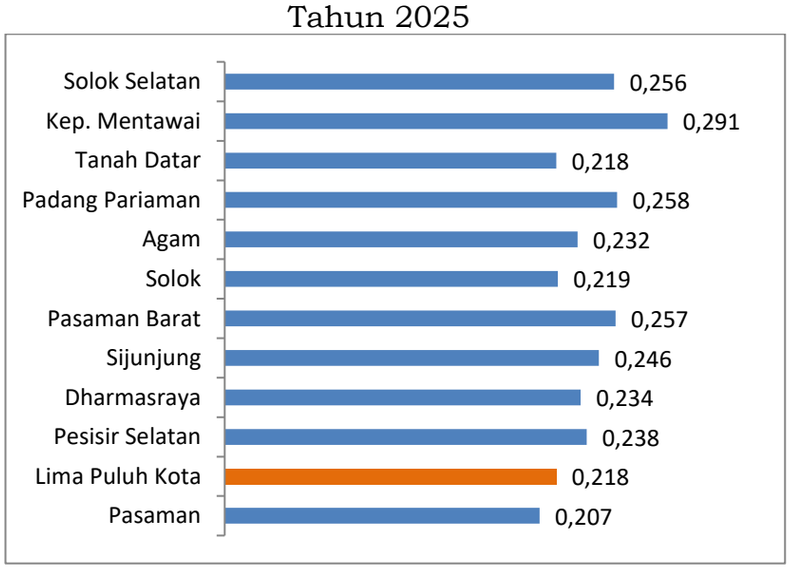
Grafik 2. 22
Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat,
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Kondisi Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2025 dimana gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup rendah seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 23
Gini Rasio Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



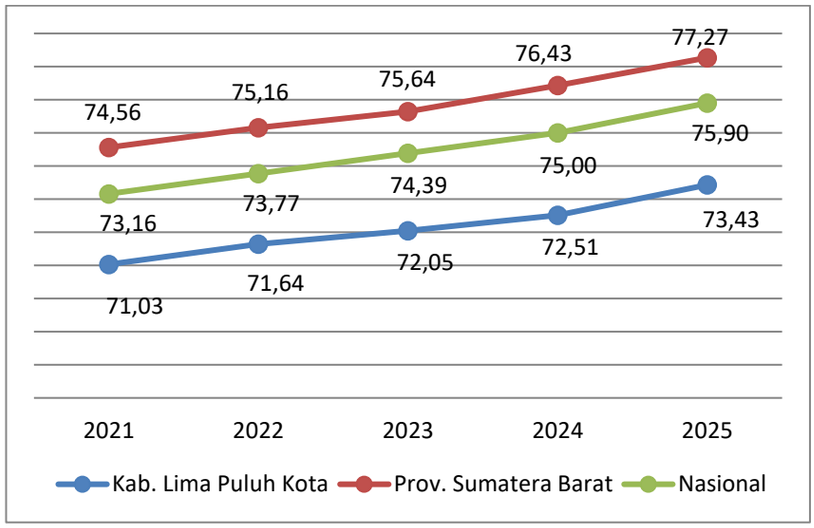
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2026

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2025 masih berada pada posisi sedang (60-79), yaitu berada pada angka 71,03 sampai dengan 73,43. Untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar 73,43 naik 0,92 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2024. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2021 ketika IPM

mengalami perlambatan. Adapun perbandingan nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

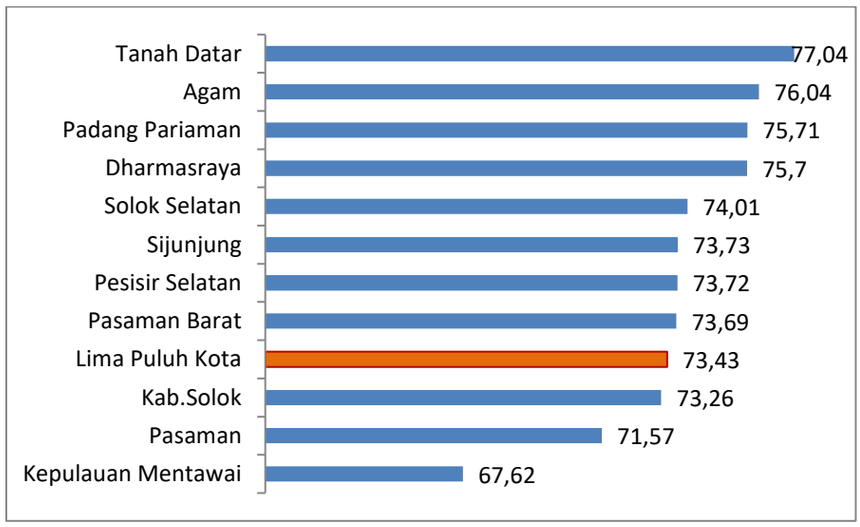
Grafik 2. 24
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2025
(Poin)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 selalu berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menjadi perhatian bagi daerah agar bisa meningkatkan nilai IPM. Untuk tahun 2025, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah 72,69. Bila dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2025 sebesar 73,43 maka target tersebut sudah tercapai. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi ke 4 terendah yaitu 73,43 poin. Rendahnya capaian nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan kedepan.

Grafik 2. 25
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2025 (poin)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari; 1) usia harapan hidup, 2) prevalensi stunting, 3) cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis 4) angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dan 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi. Perkembangan Angka Harapan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

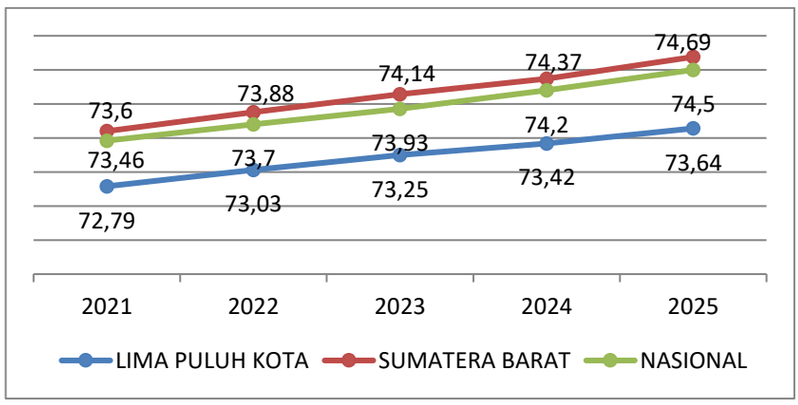
Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	72,79	73,03	73,25	73,42	73,64

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat;
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Pada komponen usia angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir (2020-2024) secara umum

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Angka Harapan Hidup Provinsi dan nasional disajikan pada grafik di bawah:

Grafik 2. 26
Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025 (Tahun)



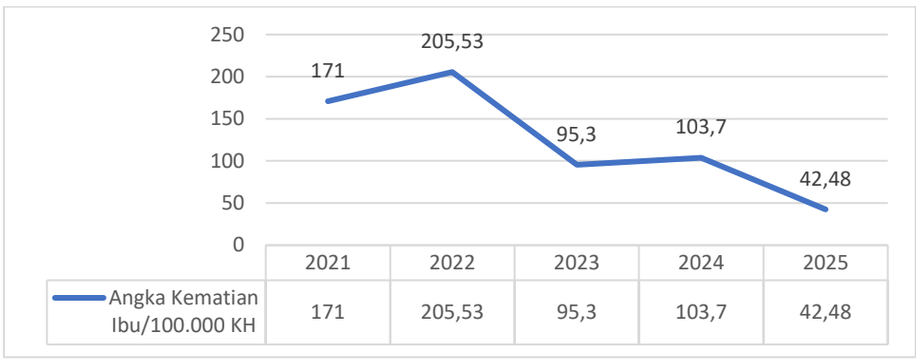
Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dari grafik di atas, tidak ada peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota secara signifikan. Hal ini dipengaruhii oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. AKI meningkat dari 171 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 205,53 pada tahun 2022. Selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 95,3, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 103,7. Pada tahun 2025, AKI kembali menurun secara tajam menjadi 42,48 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 42 kematian ibu dalam setiap 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, mulai dari pelayanan antenatal, persalinan, hingga penanganan komplikasi kebidanan. Angka kematian ibu dalam lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 27
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

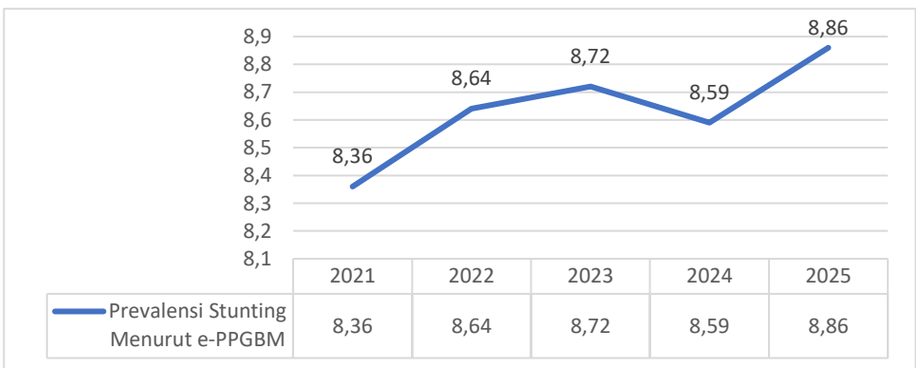


Sumber: Profil kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 berdasarkan e-PPGBM seperti tabel dan grafik dibawah ini:

Grafik 2. 28
Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025 berdasarkan e-PPGBM (%)



Sumber: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), angka stunting menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,36 persen. Angka ini meningkat menjadi 8,64 persen pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 8,72 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan tipis menjadi 8,59 persen. Namun, pada tahun 2025 prevalensi stunting kembali meningkat hingga mencapai 8,86 persen, yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, tren prevalensi stunting dalam periode tersebut cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2024.

Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 53
Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025 (%)

Wilayah	Persentase Balita *Stunting*				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	28,2	24,3	28,6	26,6	-

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2024

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, persentase balita stunting tercatat sebesar 28,2 persen, kemudian menurun menjadi 24,3 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 angka stunting kembali meningkat menjadi 28,6 persen, sebelum kembali menurun menjadi 26,6 persen pada tahun 2024. Data tahun 2025 belum tersedia. Artinya, berdasarkan hasil survei tahun 2024, terdapat sekitar 27 balita stunting pada setiap 100 balita di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023, prevalensi stunting masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan.

2.2.2.4 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Detection Rate* (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=*Success Rate*) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. *Success Rate* dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Tabel 2. 54
Jumlah Kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Wilayah	Jumlah kasus TB				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	333	451	553	589	586

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 333 kasus, meningkat menjadi 451 kasus pada tahun 2022, kemudian bertambah menjadi 553 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kasus yang ditemukan

mencapai 589 kasus dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 586 kasus, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan jumlah kasus yang ditemukan mencerminkan semakin optimalnya kegiatan penemuan kasus aktif, pelacakan kontak, dan penguatan sistem surveilans TB di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, tingginya jumlah kasus yang masih ditemukan menunjukkan bahwa Tuberkulosis tetap menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan promosi kesehatan, deteksi dini, perluasan cakupan skrining pada kelompok berisiko, peningkatan keberhasilan pengobatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.2.2.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Pengukuran keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=Success Rate) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Success Rate dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberculosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Adapun angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 55
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Lima Puluh Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Success Rate TB	90,3%	86,5%	87,7%	84,8%	80,2
Jumlah kasus TB	280 kasus	288 kasus	355 kasus	471 kasus	470 kasus

Sumber: Buku Profil Dinkes Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

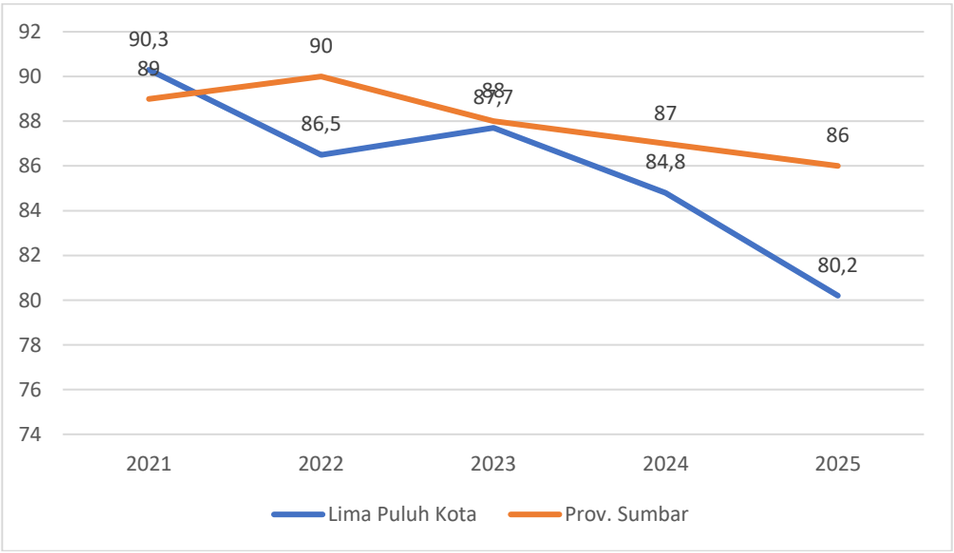
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan TB mencapai 90,3 persen dari 280 kasus yang diobati. Selanjutnya, angka tersebut menurun menjadi 86,5 persen pada tahun 2022 dengan 288 kasus, meningkat sedikit menjadi 87,7 persen pada tahun 2023 dengan 355 kasus, kemudian kembali menurun menjadi 84,8 persen pada tahun 2024 dengan 471 kasus, dan mencapai 80,2 persen pada tahun 2025 dengan 470 kasus.

Penurunan angka keberhasilan pengobatan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penemuan kasus TB terus meningkat, masih terdapat tantangan dalam memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga tuntas sesuai standar. Kondisi tersebut dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, efek samping obat, mobilitas pasien, serta efektivitas pemantauan dan pendampingan selama masa terapi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis, diperlukan penguatan layanan TB yang berpusat pada pasien, peningkatan peran Pengawas Menelan Obat (PMO), optimalisasi pelacakan dan pemantauan pasien, serta penguatan kolaborasi lintas program dan lintas sektor guna meningkatkan keberhasilan pengobatan dan mencegah terjadinya resistensi obat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan pengobatan TB di tingkat Provinsi Sumatera Barat, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 masih lebih tinggi (90,3% dibanding 89%). Namun sejak tahun 2022 hingga 2025, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2025, Success Rate TB Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencapai 80,2%, sedangkan Provinsi Sumatera Barat mencapai 86%. Selisih capaian yang semakin besar ini mengindikasikan perlunya penguatan program penanggulangan TB, terutama dalam peningkatan kepatuhan minum obat, pemantauan pasien selama masa pengobatan, pelacakan pasien putus berobat, serta penguatan peran keluarga dan kader kesehatan dalam pendampingan pasien TB. Selain itu, capaian tahun 2025 juga masih berada di bawah target nasional keberhasilan pengobatan TB sebesar 90%, sehingga diperlukan intervensi yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan terapi TB di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2. 29
Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



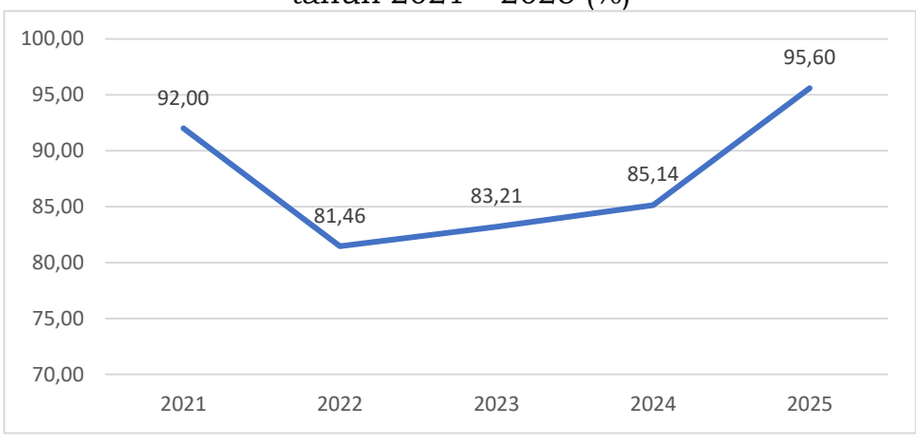
Sumber: Buku Profil Dinkes Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.2.2.6 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Grafik 2. 30
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota
tahun 2021 – 2025 (%)



Sumber: Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan JKN mencapai 92,00 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 81,46 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, cakupan kepesertaan kembali meningkat secara bertahap menjadi 83,21 persen pada tahun 2023 dan 85,14 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 95,60 persen. Capaian tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa sekitar 96 dari setiap 100 penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota telah terdaftar sebagai peserta JKN, sehingga hanya sekitar 4 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan dan mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC). Peningkatan cakupan kepesertaan JKN juga mencerminkan upaya pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan

memanipulasi angka. Dengan kemampuan literasi dan numerasi yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu, siswa akan dapat berpikir secara rasional, sistematis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan literasi dan numerasi pada satuan pendidikan setidaknya memiliki angka minimum 75%, dimana diukur dengan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus; (2) Dasar; (3) Cakap; dan (4) Mahir.

Satuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kemampuan literasi lebih tinggi daripada kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang diukur pada melalui Asesmen Nasional tahun 2021 dan hasilnya disajikan dalam Rapor Pendidikan tahun 2022, begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada bidang literasi dan numerasi menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran serta berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh belum meratanya kualitas pembelajaran antar satuan pendidikan, masih adanya kesenjangan kemampuan dasar peserta didik, serta perlunya penguatan implementasi pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi literasi dan numerasi tahun 2021-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021–2025

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Literasi
2021	33,62%
2022	39,05%
2023	54,32%
2024	57,73%
2025	46,46%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 3101/MDM.A/PR.07.05/2026

Kemampuan literasi tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2025 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 57
Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata Rata Kemampuan Literasi SD	53,01%	54,43%	59,94%	63,13%	58,24%
2	Rata Rata Literasi SMP Kemampuan	63,09%	64,26%	70,12%	70,04%	71,79%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2026

Peningkatan capaian kemampuan literasi pada jenjang SD selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, seperti penguatan budaya baca, peningkatan kualitas pembelajaran, pendampingan kepada guru, serta pemanfaatan hasil evaluasi pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, turut mendorong peningkatan capaian literasi peserta didik. Namun demikian, pada tahun 2025 capaian literasi SD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya budaya literasi peserta didik, terbatasnya intensitas kegiatan pembiasaan membaca di sebagian satuan pendidikan, serta masih adanya kesenjangan kualitas proses pembelajaran antar sekolah. Selain itu, pemanfaatan sumber belajar dan bahan bacaan yang mendukung peningkatan kemampuan literasi juga belum merata pada seluruh satuan pendidikan.

Pada jenjang SMP, capaian kemampuan literasi menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat selama periode 2021–2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya kemampuan peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, capaian literasi SMP kembali meningkat pada tahun 2025 dan mencapai nilai tertinggi selama periode pengamatan.

2.2.3.2 Persentase satuan pendidikan yang mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Membaca

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi numerasi tahun 2021-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2025

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Numerasi
2021	2,14%
2022	10,95%
2023	33,69%
2024	52,23%
2025	31,78%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 3101/MDM.A/PR.07.05/2026

Tabel 2. 59
Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan Asesmen Nasional
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD	35,78%	39,62%	45,48%	55,56%	49,21%
2	Rata Rata Kemampuan Numerasi SMP	53,92%	53,82%	61,49%	61,88%	62,49%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2026

Peningkatan capaian kemampuan numerasi pada jenjang SD selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pendampingan kepada guru, serta pemanfaatan hasil evaluasi pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, turut mendorong peningkatan capaian numerasi peserta didik. Namun demikian, pada tahun 2025 capaian numerasi SD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan numerasi peserta didik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemerataan kualitas pembelajaran antar satuan pendidikan dan penguatan kompetensi dasar numerasi peserta didik.

Pada jenjang SMP, capaian kemampuan numerasi cenderung menunjukkan tren yang lebih stabil dan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan mulai memberikan hasil yang positif terhadap penguatan kemampuan numerasi peserta didik. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi dalam dua tahun terakhir relatif tidak terlalu besar sehingga masih diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan capaian numerasi pada jenjang ini.

2.2.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 8,13 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,13 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Selama 5 tahun terakhir, RLS Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2021-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

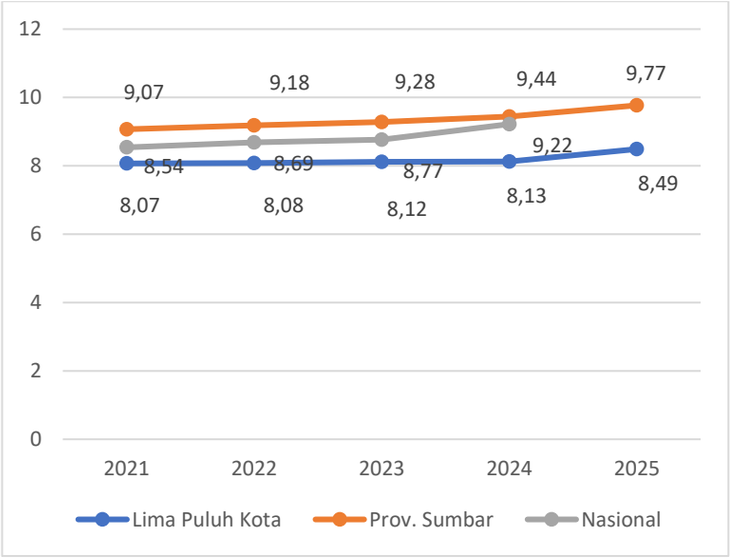
Tabel 2. 60
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	8,07	8,08	8,12	8,13	8,49

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021-2025 mengalami tren yang positif, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan yang dialami tidak begitu signifikan, rata-rata kenaikannya hanya 0,035 setiap tahunnya. Adapun perbandingan angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 31
Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

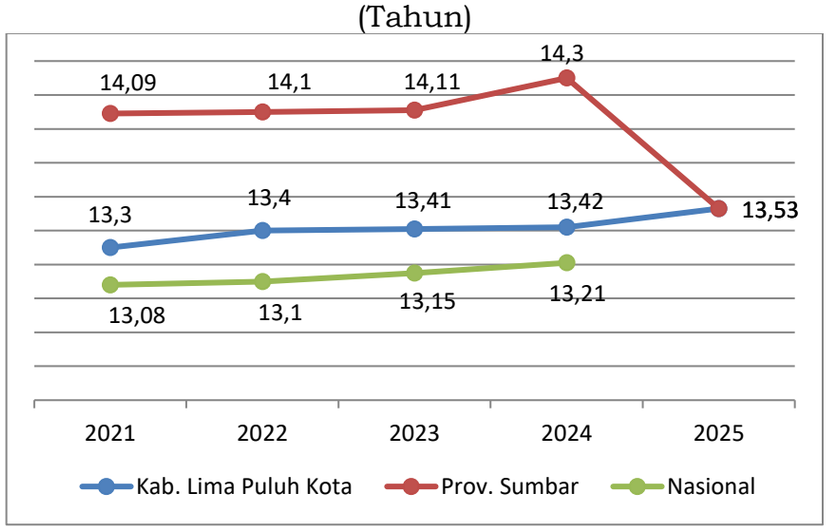
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka RLS dimana setidaknya mencapai 9 (sembilan) tahun.

2.2.3.4 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur–umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2024 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,42 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2.

Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,35 tahun, sedangkan realisasi capaian nya adalah 13,42 sehingga sudah tercapai. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 memiliki angka sebesar 13,29 dan di tahun 2024 sebesar 13,42. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun perbandingan nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 32
Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2021 - 2025
(Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun selalu berada di atas angka nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah

Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka HLS dimana setidaknya angka harapan lama sekolah mencapai 14 (empat belas) tahun.

2.2.3.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi merupakan penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, yaitu Diploma I-IV, S1, S2 dan S3. Penduduk lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki trend yang positif, dimana pada tahun 2020-2025 terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2023, penduduk lulusan pendidikan tinggi naik sebanyak 1.359 orang, yaitu dari 26.845 orang menjadi 28.204 orang Bahkan di tahun 2025, penduduk lulusan pendidikan tinggi naik sebanyak 4.316 orang, yaitu dari 28.204 orang menjadi 32.520 orang.

Namun, jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang banyak ini bisa menjadi tantangan jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor yang sesuai dengan minat para pencari kerja yang berpendidikan tinggi. Jika data penduduk lulusan pendidikan tinggi disandingkan dengan data jumlah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, maka akan diperoleh data proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan tinggi. Jumlah dan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi tahun 2021-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Penduduk yang lulus/berijazah Pendidikan Tinggi	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
2021	23.414	294.339	7,95
2022	25.456	297.879	8,55
2023	26.845	304.534	8,82
2024	28.204	309.020	9,13
2025	32.520	313.000	10,37

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data Diolah

2.2.3.6 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah (SMA sederajat) atau pendidikan tinggi (Diploma I-IV, S1, S2, S3). Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan

dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Sedangkan bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka 69,02% di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong rendah. Sehingga target di tahun 2045 setidaknya mendapatkan angka 75% pada indikator ini.

2.2.3.7 Anak Tidak Sekolah (ATS)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan definisi ini, Anak Tidak Sekolah dikategorikan menjadi 3 yaitu *Drop Out* (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernah Bersekolah (BPB).

Sistem manajemen data Anak Tidak Sekolah dikelola pada dasbor Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan data pada dasbor Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per Mei 2026, terdapat sebanyak 4.395 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 4.395 Anak Tidak Sekolah ini, 699 anak dikategorikan Belum Pernah Bersekolah, 2.568 anak dikategorikan *Drop Out* dan 1.128 anak dikategorikan sebagai Lulus Tidak Melanjutkan. Data Anak Tidak Sekolah per wilayah kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dirincikan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 62
Jumlah Anak Tidak Sekolah per Kategori di
Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Belum Pernah Bersekolah (BPB)	*Drop Out* (DO)	Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
1.	Kec. Payakumbuh	49	273	99	421

No.	Kecamatan	Belum Pernah Bersekolah (BPB)	*Drop Out* (DO)	Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
2.	Kec. Luak	38	111	57	206
3.	Kec. Harau	95	337	149	581
4.	Kec. Guguak	45	227	72	344
5.	Kec. Suliki	15	87	42	144
6.	Kec. Gunuang Omeh	36	148	47	231
7.	Kec. Kapur IX	80	207	97	384
8.	Kec. Pangkalan Koto Baru	76	212	107	395
9.	Kec. Bukik Barisan	22	125	57	204
10.	Kec. Mungka	53	219	100	372
11.	Kec. Akabiluru	49	210	73	332
12.	Kec. Situjuah Limo Nagari	60	153	92	305
13.	Kec. Lareh Sago Halaban	81	259	136	476
Total		699	2.568	1.128	4.395

Sumber: Dasbor ATS - Pusdatin Kemendikdasmen (Dat Cut Off per 12 Mei 2026)

Data Anak Tidak Sekolah tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah nagari, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kesesuaian kondisi riil di lapangan. Proses verifikasi dan validasi dilakukan guna memperoleh data ATS yang akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun *progress* verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 63
Status Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Total
1.	Kec. Payakumbuh	296	125	421
2.	Kec. Luak	123	83	206
3.	Kec. Harau	341	240	581
4.	Kec. Guguak	239	105	344
5.	Kec. Suliki	111	33	144
6.	Kec. Gunuang Omeh	94	137	231
7.	Kec. Kapur IX	289	95	384
8.	Kec. Pangkalan Koto Baru	297	98	395
9.	Kec. Bukik Barisan	154	50	204

No.	Kecamatan	Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Total
10.	Kec. Mungka	309	63	372
11.	Kec. Akabiluru	237	95	332
12.	Kec. Situjuah Limo Nagari	149	156	305
13.	Kec. Lareh Sago Halaban	274	202	476
Total		2.913	1.482	4.395

Sumber: Dasbor ATS - Pusdatin Kemendikdasmen (Dat Cut Off per 12 Mei 2026)

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari total 4.395 ATS terdapat sebanyak 2.913 anak yang telah diverifikasi dan 1.482 anak yang belum diverifikasi. Secara kewilayahan, jumlah ATS terbanyak terdapat di Kecamatan Harau sebanyak 581 anak, diikuti Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 476 anak dan Kecamatan Payakumbuh sebanyak 421 anak. Sementara itu, jumlah ATS paling sedikit terdapat di Kecamatan Suliki sebanyak 144 anak. Adapun dari sisi capaian verifikasi, beberapa kecamatan masih memiliki jumlah data yang belum diverifikasi cukup tinggi, antara lain Kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, dan Situjuah Limo Nagari, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan penjangkauan lapangan untuk memastikan validitas data ATS.

Hasil verifikasi dan validasi data ini menjadi langkah lanjutan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui pengembalian anak ke layanan pendidikan formal maupun nonformal sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Hal ini sejalan dengan Rencana Tindak Lanjut yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Tindak Lanjut tersebut menjadi cikal bakal penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanganan ATS secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan RAD ATS ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan strategi, program, dan kegiatan pencegahan serta penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota.Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah juga sejalan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dimana pencegahan dan penanganan ATS menjadi salah satu kegiatan prioritas pada Program Prioritas Daerah (PPD) 3 yaitu Penguatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, penyusunan RAD ATS Kabupaten Lima Puluh Kota juga sejalan dengan strategi nasional pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan

Anak Tidak Sekolah, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan data, perluasan akses layanan pendidikan, serta pendampingan berkelanjutan bagi anak usia sekolah.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dilihat dari jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diiringi dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 64
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)

Tahun	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (usia 15-65 Tahun)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
2021	5.343	200.853	2,66%
2022	5.964	208.815	2,86%
2023	6.928	212.991	3,25%
2024	21,416	221,277	9,68%
2025	-	224.091	5,9%

Sumber: Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

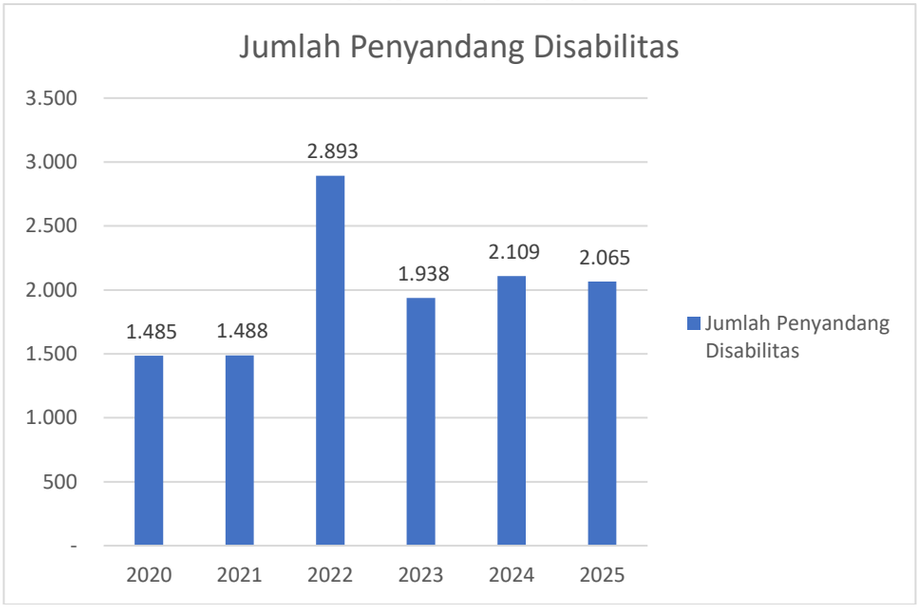
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2024 selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2024, persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 9,68% dari total peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 21,416 orang dan semesta penduduk bekerja sebanyak 221,227 orang. Namun tahun 2025 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan menjadi 5,9%.

2.2.4.2 Persentase Disabilitas di Sektor Formal

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Lima

Puluh kota dalam lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:

Grafik 2. 33
Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun 2020–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 1.485 jiwa dan meningkat sedikit menjadi 1.488 jiwa pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga mencapai 2.893 jiwa, yang merupakan jumlah tertinggi selama periode tersebut. Pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas menurun menjadi 1.938 jiwa, kemudian kembali meningkat menjadi 2.109 jiwa pada tahun 2024. Pada tahun 2025 jumlah penyandang disabilitas kembali mengalami penurunan menjadi 2.065 jiwa.

Secara keseluruhan, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Fluktuasi jumlah penyandang disabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pembaruan data, peningkatan cakupan pendataan, maupun perubahan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pendataan serta memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan, aksesibilitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Salah satu

indikator *proxy* dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada. Pada tahun 2023 jumlah cagar budaya yang ada sebanyak 79, dimana cagar budaya inilah yang akan dilestarikan setelah adanya regulasi terkait cagar budaya tersebut. Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada, namun pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada, sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Cagar Budaya yang ditetapkan secara resmi, langkah awal pelestarian telah dilakukan melalui kegiatan pendataan dan identifikasi terhadap objek-objek yang berpotensi ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Proses pelestarian ini mencakup inventarisasi, kajian teknis, dan pengusulan penetapan melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelaraskan pembangunan kebudayaan dengan kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan adanya regulasi dan perencanaan yang jelas, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera menetapkan Cagar Budaya yang sah dan terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, sehingga indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat diukur secara lebih akurat dan mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.2 Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Selain persentase cagar budaya yang dilestarikan, *proxy* indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 warisan budaya tak benda di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia (WBTbI) sebagai berikut.

Tabel 2. 65
Warisan Budaya Takbenda (Wbtb) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

No.	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Domain
1.	Tenun Kubang	2021	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
2.	Bakajang	2022	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
3.	Sijobang	2022	Seni Pertunjukan
4.	Anyaman Mansiang	2023	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5.	Sampelong	2023	Seni Pertunjukan
6.	Nolam Talang Maua	2025	Sastra lisan
7.	Pongek Limbonang	2025	Makanan tradisional

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Keberhasilan penetapan lima unsur Warisan Budaya Takbenda dari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai WBTb Indonesia menunjukkan adanya komitmen pelestarian budaya oleh pemerintah daerah. Kelima warisan budaya tersebut mencakup berbagai domain seperti seni pertunjukan, kemahiran kerajinan tradisional, serta adat istiadat masyarakat. Penetapan ini merupakan bagian dari proses pelestarian yang mencakup inventarisasi, dokumentasi, pengakuan formal, dan pewarisan melalui berbagai bentuk kegiatan budaya di masyarakat. Dengan telah ditetapkannya ketujuh WBTb tersebut, maka persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan untuk tahun 2025 dapat dihitung berdasarkan jumlah objek budaya tak benda yang telah ditetapkan dibandingkan total potensi WBTb yang teridentifikasi di daerah. Pelestarian WBTb tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelindungan budaya lokal, namun juga menjadi indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, khususnya pada dimensi ekspresi budaya.

2.2.5.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Indeks ABS-SBK terdiri dari Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan, Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan, Indeks Keuangan Sosial, Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya, serta Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya.Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan terdiri dari Kriteria Indeks pendidikan Al-Qur'an, Indeks peran satuan pendidikan (formal/nonformal), indeks pembinaan keagamaan masyarakat, indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA didikan subuh dan Pembinaan remaja masjid, serta indeks perguruan tinggi keagamaan.

Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan ini dihitung dari Peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an, adanya MTQ Nagari, adanya PKBM di Nagari, Peningkatan aktivitas kegiatan remaja masjid, adanya kegiatan didikan subuh, adanya peringatan hari

besar islam, Jumlah guru tetap TPQ/MDA/TPA, jumlah TPQ/MDA/TPA yang punya kurikulum standar kemenag, jumlah guru TPQ/MDA/TPA terlatih, adanya perguruan tinggi keagamaan, peningkatan jumlah kurban, jumlah calon jemaah haji, adanya wirid pengajian, adanya majelis taklim dan adanya kelompok pengajian.

Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan terdiri dari kriteria Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ, Indeks digitalisasi manajemen masjid dan indeks sarana dan prasarana keagamaan. Indeks ini dihitung dari persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap, jumlah masjid nagari yang memiliki data secara digital, adanya lembaga pendidikan agama, diantaranya rumah tahfidz, jumlah masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid dan adanya pustaka masjid. Indeks Keuangan sosial terdiri dari kriteria Indeks penghimpunan dana sosial keagamaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dan indeks perlindungan sosial ekonomi terhadap wanita, anak-anak dan keluarga miskin. Indeks Keuangan sosial dihitung dari jumlah ZIS, Jumlah pemberdayaan sosial ekonomi di masjid nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah, BMT, jumlah perceraian di nagari, jumlah KDRT dan kekerasan pada anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di masjid nagari serta jumlah keluarga miskin di nagari.

Indeks Sumber Daya Manusia Adat Dan Budaya terdiri dari kriteria indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan nagari, Indeks semangat musyawarah masyarakat nagari, indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan ABS-SBK, Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih, indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat, indeks penyakit masyarakat di Nagari dan indeks pelanggaran terhadap peraturan nagari. Indeks ini dihitung dari jumlah forum perantau yang dilaksanakan, jumlah perantau yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosbud, pelestarian adat dan pendidikan nagari, jumlah pelaksanaan musyawarah masyarakat nagari, persentase kelengkapan niniak mamak semua suku, jumlah program peningkatan kapasitas ninik mamak, jumlah peningkatan kapasitas imam khatib, jumlah pembinaan atas seni budaya yang sesuai ABS-SBK, jumlah gotong royong masyarakat dalam nagari yang dilaksanakan untuk mencapai lingkungan yang bersih, adanya pembinaan terhadap adat dan budaya di masyarakat, jumlah kasus narkoba nagari, minuman keras nagari, kasus asusila, judi dan kriminalitas nagari dan jumlah pelanggaran terhadap peraturan nagari.

Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya terdiri dari kriteria indeks peran dan fungsi kerapatan adat nagari dan bundo kanduang, indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan nagari, indeks fungsi organisasi pemuda dan indeks penguatan regulasi. Indeks kelembagaan adat dan budaya ini dihitung dari indikator jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi KAN dan bundo Kanduang, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi ormas keagamaan nagari, jumlah program dan

pelatihan peningkatan peran fungsi organisasi pemuda dan adanya perda/pernag. Berikut ditampilkan capaian indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 66
Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Tahun	Indeks ABS-ABK
2021	NA
2022	1,76
2023	1,84
2024	1,95
2025	2,31

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Perhitungan Indeks ABS-SBK baru dimulai pada Tahun 2022. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00-1,00), sedang (>1,00-2,00) dan tinggi (>2,00-3,00). Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 Nilai Indeks ABS-SBK sudah mencapai nilai 1,95 artinya Indeks Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori sedang. Pada tahun 2025, Nilai Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 2,31. Berdasarkan kategori penilaian, capaian ini telah masuk dalam kategori tinggi (>2,00–3,00). Hal ini menunjukkan adanya penguatan peran kelembagaan adat, budaya, organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga memiliki 11 indikator yang terdiri atas:

a. Dimensi Ketentraman
   - Kegiatan Ibadah
   - Legalitas Keluarga
   - Jaminan Kesehatan
   - Keharmonisan Keluarga

b. Dimensi Kemandirian
   - Pemenuhan Kebutuhan Dasar
   - Jaminan Keuangan
   - Keberlangsungan Pendidikan
   - Kesehatan Keluarga
   - Akses Media Online
c. Dimensi Kebahagiaan
   - Interaksi Keluarga
   - Interaksi Sosial

iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan
b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang
c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh

Tabel 2. 67
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025

Wilayah	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	55,08	61,58	59,50	66,4

Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2026

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Karena keterbatasan ketersediaan data dan indikator ini bersifat imperatif, data Indeks Pembangunan Keluarga hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas, iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2025 secara umum mengalami fluktuasi, pada tahun 2025 nilai iBangga Kabupaten Lima Puluh naik dari tahun sebelumnya yaitu 59,50 (2024) menjadi 66,4 (2025), artinya secara umum keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori keluarga berkembang.

2.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Berdasarkan data tahun 2021–2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang terus menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender serta semakin berkurangnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Penurunan IKG tersebut mencerminkan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam

meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara lebih setara. Ke depan, upaya pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat agar capaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 68
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2021-2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	0,549	0,496	0,492	0,453	0,401

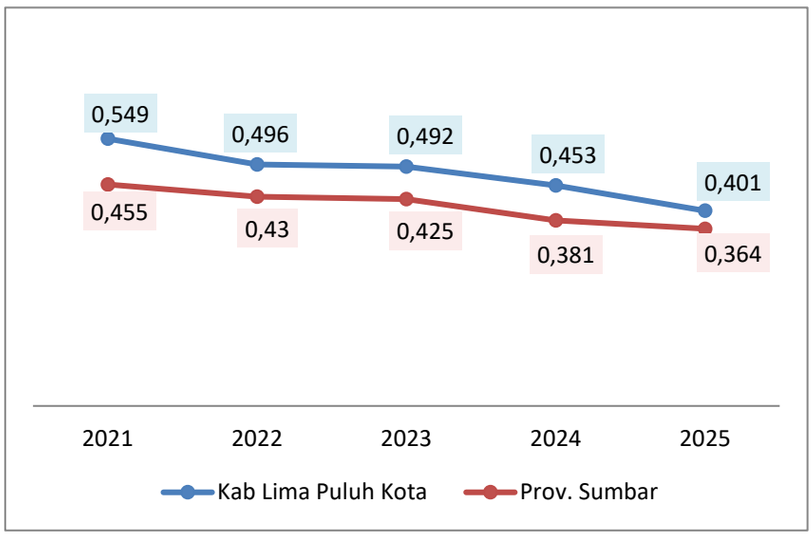
Sumber: DP2KBP3A, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada tahun 2021, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 0,549, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,455. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Selanjutnya, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menjadi 0,401. Penurunan ini mengindikasikan semakin berkurangnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Meskipun nilai IKG Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,364, selisih antara keduanya cenderung semakin mengecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara lebih setara. Ke depan, upaya pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat untuk mempercepat penurunan ketimpangan gender dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan..

Perkembangan IKG Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berada diatas IKG Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan gender dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah:

Grafik 2. 34
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.2.6.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut adalah: (1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; (2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; (3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas); (4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.

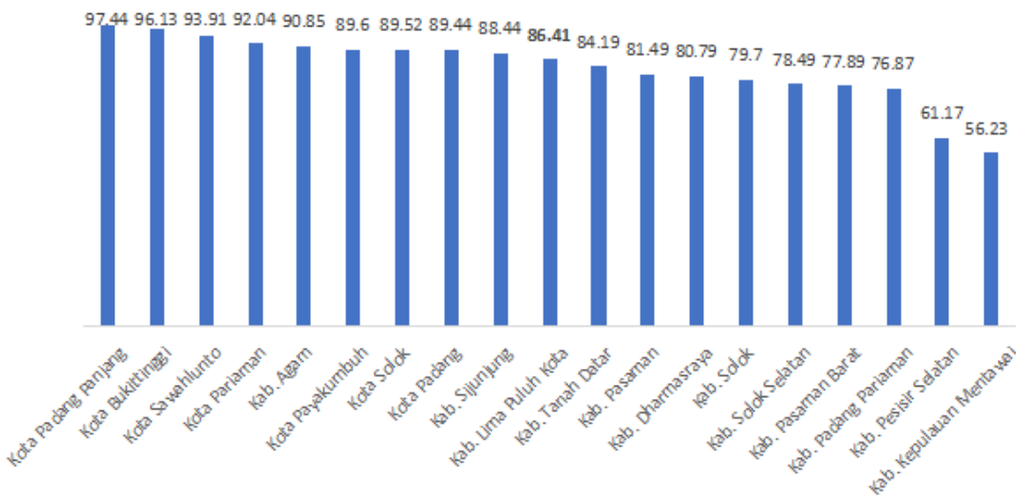
Tabel 2. 69
Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2025

Kab	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Lima Puluh Kota	70,39	67,88	54,19	71,90	86,41	69,39	65,68	86,41

Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2025 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 86,41%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke–10 tertinggi dalam pencapaian IPKA dan capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat (80,31):

Grafik 2. 35
Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tahun 2025



Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 70
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

No.	Kelompok Umur	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	91.295	90.496	91.893	92.090	92.500
2.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	260.893	262.824	268.894	272.120	275.200
3.	Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	33.446	35.055	35.640	36.900	38.100
4.	% ABT	47,81	47,77	47,43	47,40	47,46

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Angka Beban Tanggungan (ABT) di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren penurunan dalam empat tahun terakhir., tetapi meningkat pada tahun 2025. Pada tahun 2021, ABT tercatat sebesar 47,81, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk usia non-produktif. Angka ini terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 47,40 pada tahun 2024. Akan tetapi, pada tahun 2025 ABT meningkat sebesar 0,06 dari tahun sebelumya yaitu 47,46. Penurunan ABT mengindikasikan adanya perbaikan struktur demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan penduduk usia non-produktif, begitupun sebaliknya.

Nilai 47,46% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 47-48 orang usia non-produktif, baik anak-anak maupun lansia. Angka ini mencerminkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup ideal, karena beban ketergantungan berada di bawah 50%. Dengan demikian, daerah ini memiliki peluang demografis yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif diberikan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.

2.3.1.2 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pergeseran pola pengeluaran masyarakat dari lebih banyak pengeluaran untuk makanan ke arah pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk makanan relatif stabil setiap bulannya, sehingga peningkatan pendapatan cenderung untuk meningkatkan pengeluaran untuk bukan makanan atau ditabung. Sehingga pola pengeluaran dapat dilihat sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Namun demikian, peningkatan pola pengeluaran untuk bukan makanan tidak selalu dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk, karena hal tersebut hanya dilihat secara nilai nominalnya saja, tanpa melihat adanya kenaikan harga (inflasi). Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pola pengeluaran untuk makanan lebih besar dari bukan makanan, artinya uang yang dicari/didapat/diperoleh oleh penduduk sebagian besar masih

dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yaitu membeli kebutuhan pokok makanan.

Tabel 2. 71
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran
Tahun 2021-2025

Golongan Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Makanan	660.544	762.244	760.234	823.601	837.861
Bukan Makanan	508.419	463.533	557.469	563.613	582.378
Total	1.168.963	1.225.777	1.317.702	1.387.214	1.420.239

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari tabel di atas terlihat pengeluaran rata-rata untuk makanan pada tahun 2025 sebesar Rp837.861 Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp823.601. Sedangkan pengeluaran bukan makanan pada tahun 2025 sebesar Rp582.378, hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp563.613. Secara total, rata-rata pengeluaran makanan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita per bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mengalami kenaikan.

2.3.1.3 Produktivitas Total Daerah (Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja)

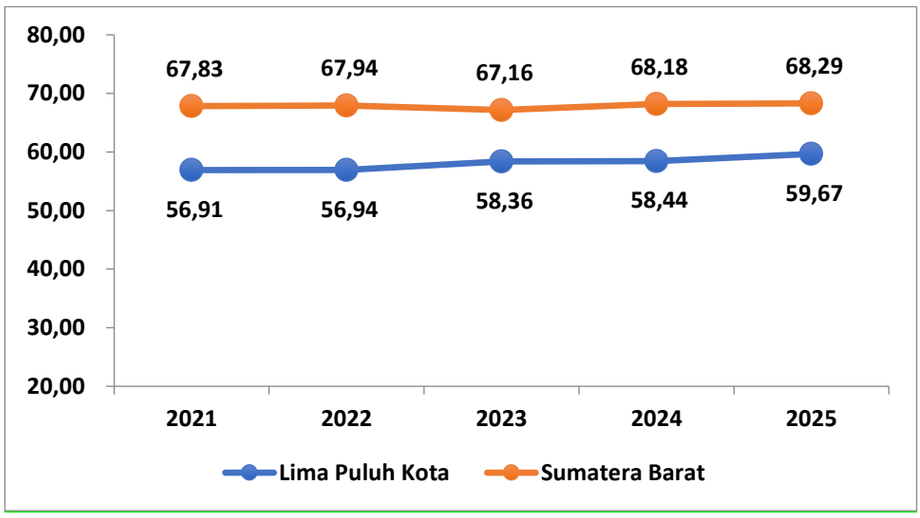
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.72
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Jumlah Orang yang Bekerja	Produktivitas Tenaga Kerja
2021	200.853	Rp56.911.315
2022	208.815	Rp56.940.984
2023	212.991	Rp58.363.161
2024	221.277	Rp58.442.586
2025	224.091	Rp59.671.964

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data Diolah

Grafik 2. 36
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Tahun 2026, Data Diolah

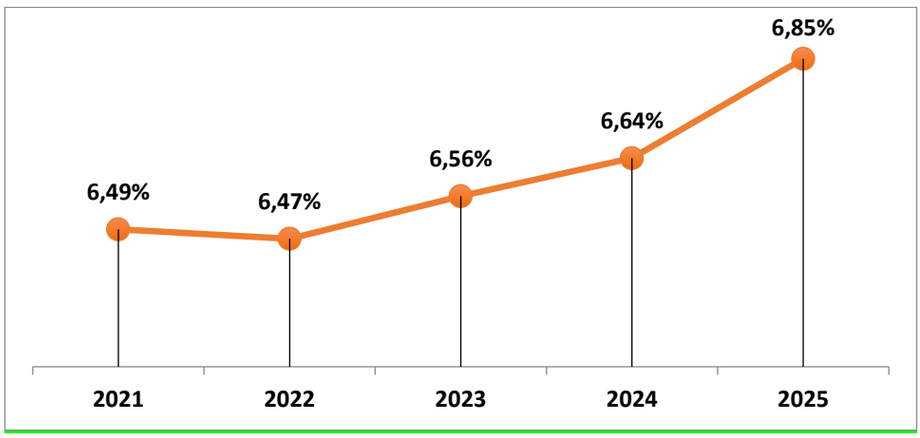
Dari grafik di atas, terlihat tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan tetapi masih lebih rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat.

2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Industri pengolahan merupakan salah satu penunjang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun bukan merupakan pembentuk terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar dibanding beberapa sektor lain. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 37
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025



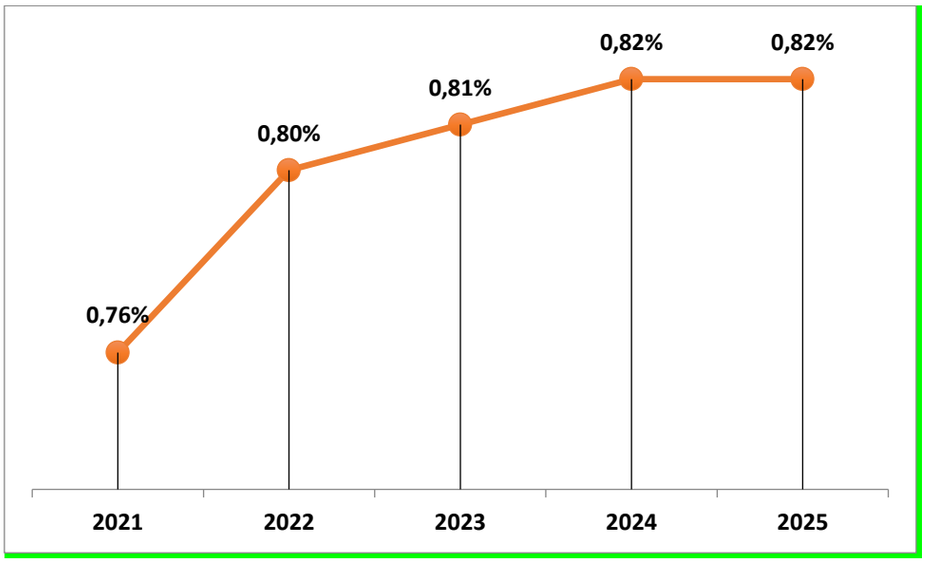
Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi terbesar sektor industri pengolahan mencapai puncak pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 6,85% dari total PDRB ADHB atau sekitar Rp1.540.390.000.000 dari total PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar Rp22.472.270.000.000. Kontribusi sektor industri pengolahan yang sempat menurun pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.Perkembangan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 38
Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki tren positif pada kurun tahun 2021-2024. Akan tetapi pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

2.3.2.3 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)

Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya menginap di homestay yang ada di sekitar objek wisata. Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 444 wisatawan mancanegara dan pada tahun 2025 sebanyak 1.523 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat bahwa kunjungan tersebut terpusat pada objek wisata Lembah Harau. Berdasarkan total wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya atau belum adanya fasilitas pendukung bagi wisatawan mancanegara tersebut dalam hal ini dimaksud fasilitas akomodasi yang representatif bagi tamu asing tersebut sebagai salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi guna menarik wisatawan mancanegara tersebut dapat berkunjung ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat banyak objek wisata yang dapat di eksplor dan dipromosikan Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih kurang dalam pemenuhan fasilitas akomodasi yang nampak sudah mulai tumbuh dan diakomodir di beberapa kawasan wisata unggul di daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini diharapkan dalam beberapa tahun mendatang pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi perizinan dan permodalan yang mempermudah pembangunan fasilitas akomodasi tamu asing, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Data kunjungan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 73
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

Destinasi Wisata	2021		2022		2023		2024		2025	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Lembah Harau	-	237.241	105	270.737	42	-	237.241	105	270.737	42
Kapalo Banda	-	279.981	-	233.196	-	-	279.981	-	233.196	-
Batang Tabik	-	252.032	-	218.335	-	-	252.032	-	218.335	-
Rumah Gadang S.Beringin	-	9.447	-	27.311	-	-	9.447	-	27.311	-
Home Stay Echo	-	778.701	105	749.579	42	-	778.701	105	749.579	42

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026,

2.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor termasuk: (1) Fesyen; (2) Kuliner; (3) Kriya; (4) Film, Animasi dan Video; (5) Pengembang Permainan; (6) Aplikasi; (7) Musik; (8) Seni Pertunjukan; (9) Fotografi; (10) Desain Komunikasi Visual; (11) Televisi dan Radio; (12) Seni Rupa; (13) Desain Produk; (14) Periklanan; (15) Penerbitan; (16) Arsitektur; dan (17) Desain Interior. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional.

Indonesia merupakan pangsa yang sangat besar untuk konten-konten industri kreatif digital, di mana menurut data We Are Social jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari populasi dan 98,5% dari jumlah tersebut menonton video online. Saat ini terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat. Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019 subsektor ekonomi kreatif menyumbangkan Rp1.153,4 Triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB Nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor.

2.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Perkembangan jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 74
Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah				
	2021	2022	2023	2024	2025
UKM Non Pertanian	8.121	8.165	8.292	8.527	8.654
Jumlah UKM	8.271	8.315	8.444	8.650	8.777
Proporsi	98,186%	98,196%	98,200%	98,578%	98,599%

Sumber: Dinas Perdakop dan UKM, Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.74, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Total UKM bertambah dari 8.271 unit pada tahun 2021 menjadi 8.777 unit pada tahun 2025, atau meningkat sebanyak 506 unit. Sejalan dengan itu, jumlah UKM non pertanian juga meningkat dari 8.121 unit menjadi 8.654 unit pada periode yang sama.

Meskipun jumlah UKM terus bertambah setiap tahun, proporsi UKM non pertanian terhadap total UKM relatif stabil pada kisaran 98 persen, yaitu meningkat dari 98,186 persen pada tahun 2021 menjadi 98,599 persen pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh sektor non pertanian, sementara kontribusi

UKM sektor pertanian relatif kecil dan belum mengalami perubahan yang signifikan.

Dominasi UKM non pertanian mengindikasikan bahwa aktivitas kewirausahaan masyarakat lebih banyak berkembang pada sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa, dan sektor non pertanian lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor non pertanian masih menjadi penggerak utama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Kedepannya diperlukan upaya untuk menjaga pertumbuhan jumlah UKM sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya melalui penguatan kapasitas pelaku usaha, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar. Di sisi lain, pengembangan UKM sektor pertanian juga perlu terus didorong agar tercipta struktur usaha yang lebih seimbang serta mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

2.3.2.6 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 75
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Unit IKM	5.021	5.903	7.842	8.146	8.221

Sumber: Dinas Perdakop dan UKM Tahun 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 5.021 IKM kemudian terus meningkat hingga akhirnya menjadi 8.221 IKM pada tahun 2025.

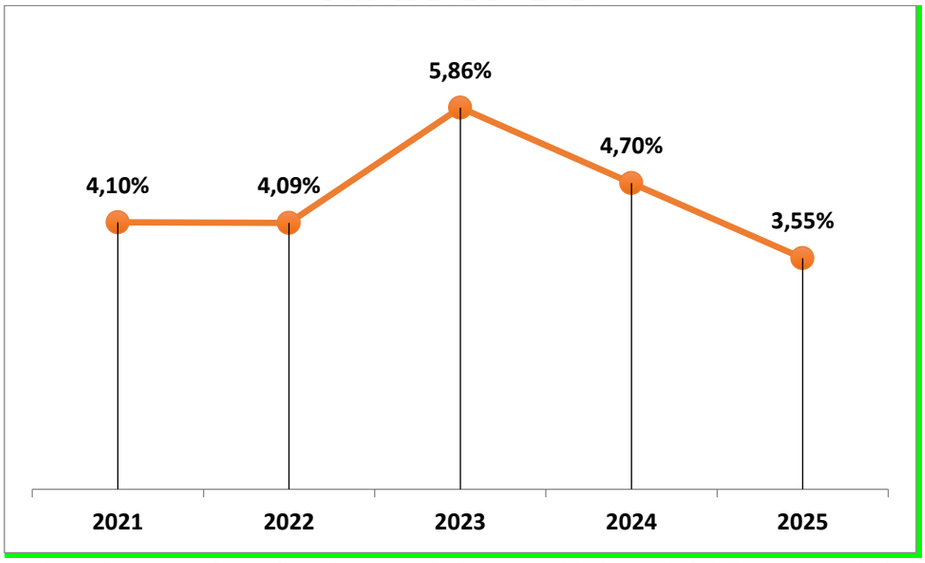
Berdasarkan data diatas, setiap tahunnya terjadi peningkatan unit IKM, namun pada tahun 2023 jumlah IKM bertambah secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong industrialisasi skala kecil dan menengah melalui berbagai program strategis. Perkembangan IKM ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor informal ke sektor industri produktif yang berorientasi pada nilai tambah. Kabupaten Lima Puluh Kota secara bertahap telah mengoptimalkan potensi unggulan. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan dan daya saing IKM melalui inovasi

produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, dan perluasan akses pasar baik domestik maupun ekspor.

2.3.2.7 Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah. Perkembangan rasio kewiraushaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 39
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,86%. Hal ini berarti pengusaha yang dibantu buruh tetap pada tahun 2023 meningkat seiring dengan perkembangan jumlah angkatan kerja. Peningkatan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Akan tetapi pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 3,55%.

2.3.2.8 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 40
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi
terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data diolah

Selama periode 2021 hingga 2025, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi serta proses pemulihan ekonomi koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2021, rasio mencapai titik sebesar 0.83112%, mencerminkan masih kuatnya peran koperasi dalam ekonomi lokal. Namun, dampak pandemi yang semakin meluas di tahun-tahun berikutnya menyebabkan penurunan tajam, hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,64568%. Penurunan ini disebabkan oleh terganggunya aktivitas ekonomi koperasi, lemahnya adaptasi terhadap digitalisasi, terbatasnya akses pembiayaan, serta meningkatnya persaingan dari sektor usaha lain yang lebih adaptif.

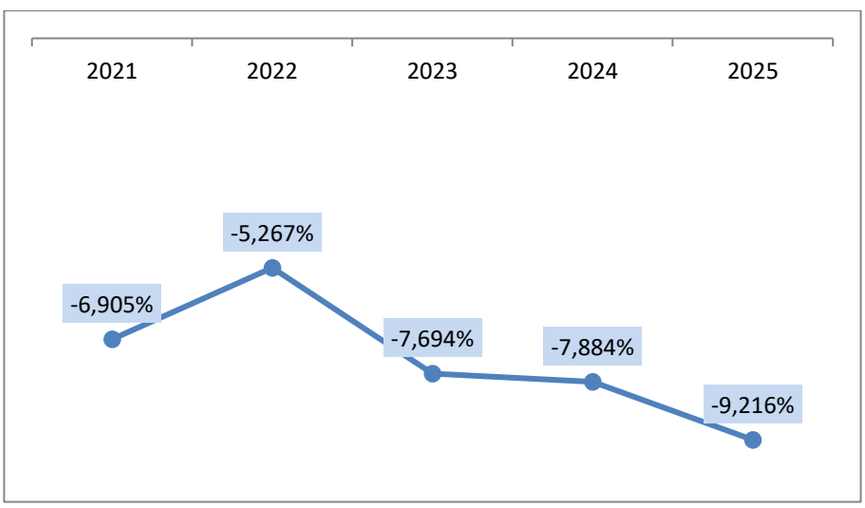
Memasuki tahun 2023 dan 2024, rasio menunjukkan tren pemulihan, masing-masing naik menjadi 0,67453% dan 0,92009%. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas koperasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, serta adopsi teknologi digital. Selain itu, peningkatan partisipasi anggota, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi koperasi dengan UMKM dan sektor pertanian turut mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi yang lebih berkelanjutan. Tren ini mengindikasikan kebangkitan koperasi sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi daerah. Akan tetapi, pada tahun 2025 rasio mengalami titik tertingginya selama 5 tahun terakhir yaitu mencapai 2.04424%.

Sebagai kesimpulan, fluktuasi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB selama 2021–2025 mencerminkan ketahanan, tantangan, serta upaya transformasi koperasi dalam menghadapi krisis dan perubahan ekonomi. Meskipun sempat melemah, tren peningkatan di dua tahun terakhir menandakan potensi besar koperasi untuk kembali berperan sebagai pilar ekonomi rakyat, selama didukung oleh kebijakan yang tepat, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri.

2.3.2.9 *Return on Assets* (ROA) BUMD (%)

Return of Assets (ROA) merupakan instrumen dalam melihat seberapa besar manfaat kepemilikan terhadap suatu aset terhadap pendapatan suatu unit usaha. Nilai ROA didapatkan dari formula hasil persentase keuntungan bersih dibagi dengan rata-rata total aset yang dimiliki. Dengan kata lain persentase RoA bisa menggambarkan seberapa sehat suatu Perusahaan sehingga para investor bisa menilai apakah perusahaan tersebut bisa dikembangkan atau menerima investasi dalam pengembangan usaha atau tidak. Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 41
Perkembangan Return On Assets (RoA)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025



Sumber: PDAM Tirta Luak Nan Bungsu Tahun 2025

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang konsisten dalam beroperasi adalah Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu. BUMD ini masih menunjukkan kinerja profitabilitas yang belum optimal. Hal tersebut tercermin dari nilai Return on Assets (ROA) selama periode 2021–2025 yang seluruhnya berada pada kondisi negatif. Nilai ROA negatif menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan belum mampu menghasilkan laba sehingga pengelolaan aset belum memberikan pengembalian yang optimal.

Berdasarkan Grafik di atas, nilai ROA mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebesar -6,905%, kemudian membaik menjadi -5,267% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi -7,694%, kemudian relatif stagnan pada tahun 2024 sebesar

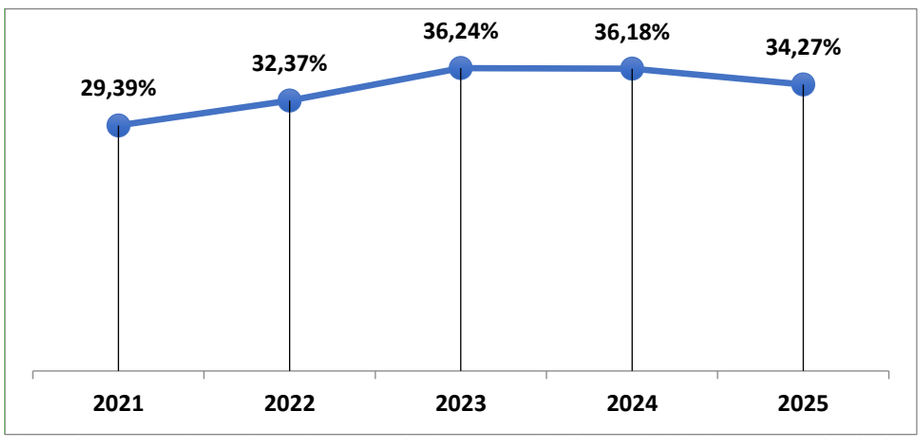
-7,884%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 hingga mencapai -9,216%, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan.

Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi perbaikan pada tahun 2022, secara keseluruhan kinerja profitabilitas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan pendapatan melalui perluasan pelayanan dan penyesuaian tarif sesuai ketentuan yang berlaku, serta penguatan tata kelola perusahaan agar kinerja keuangan dapat membaik secara berkelanjutan.

2.3.2.10 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. Secara sederhana, proporsi penciptaan lapangan kerja formal adalah perbandingan jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur perekonomian suatu daerah, proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan seberapa dominan pekerja yang memiliki status pekerjaan utama sebagai pekerja formal. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal. Perkembangan proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 42
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2023, dari 29,39% pada tahun 2021 menjadi 36,24% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor formal serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga memperluas kapasitas serapan tenaga kerja di sektor formal.

Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan proporsi menjadi 34,27%, yang meskipun kecil, menandakan adanya stagnasi dalam pertumbuhan sektor formal. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan investasi sektor padat karya, meningkatnya preferensi pelaku usaha terhadap tenaga kerja fleksibel/informal, serta kendala dalam keberlanjutan program pelatihan kerja. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi di beberapa sektor usaha juga berpotensi menekan penciptaan kerja formal baru, karena perusahaan lebih memilih efisiensi teknologi dibanding menambah jumlah pekerja tetap. Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penciptaan kerja layak yang berkelanjutan serta memperluas skema insentif bagi sektor formal.

Grafik di atas menunjukkan bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2023, dari 29,39% pada tahun 2021 menjadi 36,24% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor formal serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga memperluas kapasitas serapan tenaga kerja di sektor formal.

2.3.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan adalah perbandingan antara angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

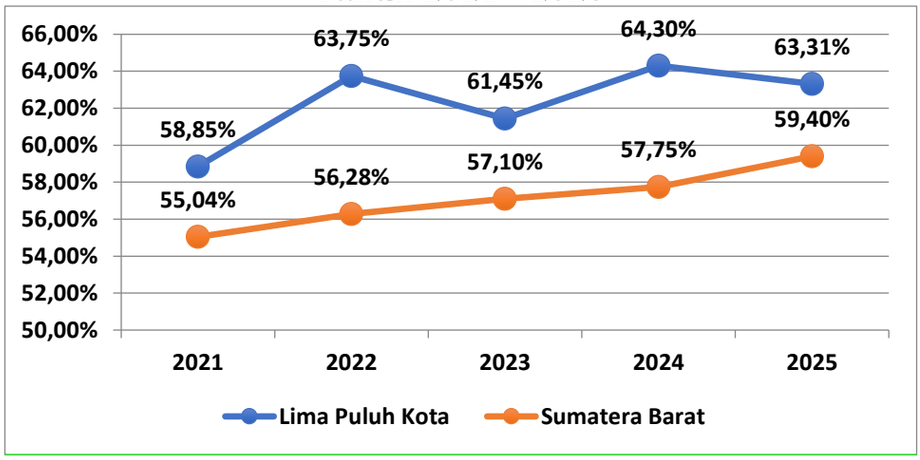
Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami naik turun tetapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2021	58,85
2022	63,75
2023	61,45
2024	64,30
2025	63,31

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Grafik 2. 43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota;
BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dari grafik di atas, terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota lebih berada di atas angka partisipasi angkatan kerja perempuan Provinsi Sumatera Barat.

2.3.2.12 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaran Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Perwujudan komitmen inovasi ini telah diwujudkan melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Lima Inovasi” yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan hal tersebut masih dilanjutkan sampai saat ini. Dalam kurun waktu 6 tahun (2019 – 2024) sejak pencanangan gerakan tersebut telah membuat peningkatan jumlah

inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membaiknya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana untuk tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah masuk sebagai daerah Inovatif (dengan nilai 45,72) setelah tahun-tahun sebelumnya berada pada kategori daerah kurang inovatif. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bappelitbangda walaupun berada pada kondisi keterbatasan khususnya untuk unit kelitbangan yang terbatas baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan yang belum mumpuni, sementara tantangan kelitbangan ke depan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan ke depan yaitu melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada (lihat tabel).

Tabel 2. 77
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Keterangan
2021	28,81	Kurang Inovatif
2022	47,47	Inovatif
2023	37,84	Inovatif
2024	45,72	Inovatif
2025	48,34	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026

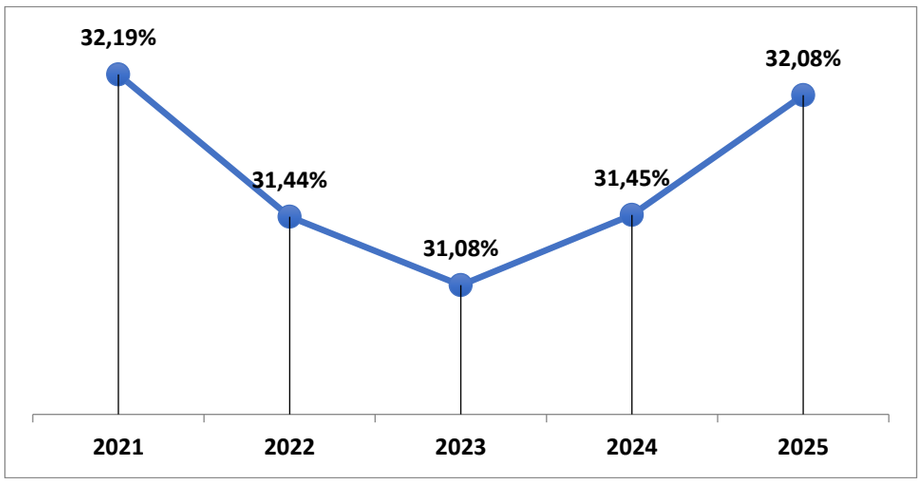
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025. Setelah berada pada kategori Kurang Inovatif pada tahun 2021 dengan nilai 28,81, kinerja inovasi meningkat menjadi kategori Inovatif sejak tahun 2022 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 48,34 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

2.3.3.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisadianggap tidak penting dalam perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk Perdesaan dan lain-lain. Perkembangan rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik 2.43 berikut.

Grafik 2.44
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan Grafik di atas, rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, kontribusi sektor ini terhadap PDRB tercatat sebesar 32,19 persen, kemudian menurun menjadi 31,44 persen pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 31,08 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 31,45 persen pada tahun 2024 dan 32,08 persen pada tahun 2025.

Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kontribusi yang relatif stabil di kisaran 31–32 persen terhadap total PDRB. Penurunan kontribusi pada periode 2021–2023 mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga proporsi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB sedikit berkurang. Namun demikian, peningkatan kembali pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mulai menguat dan tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah.

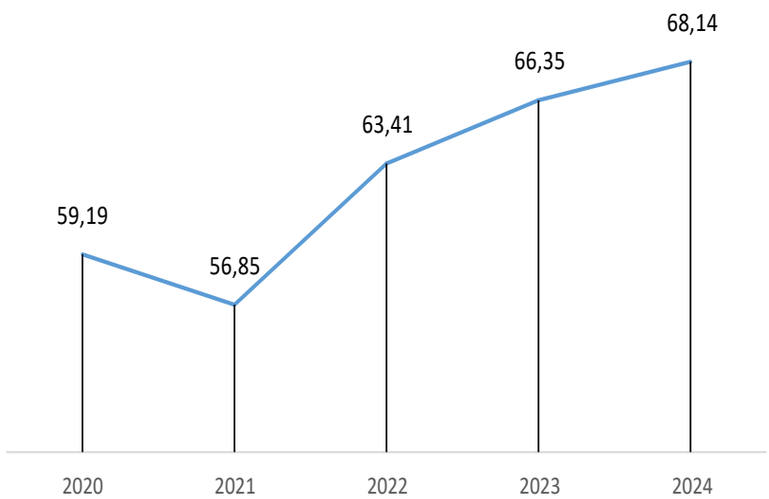
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, penguatan hilirisasi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi agar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

2.3.3.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan

besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 45
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025, Data diolah

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan dari 59,19 juta/orang pada tahun 2020 menjadi 56,85 juta/orang di tahun 2021, produktivitas kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 68,14 juta/orang pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2021 kemungkinan dipengaruhii oleh gangguan aktivitas produksi akibat pandemi COVID-19 serta keterbatasan akses petani terhadap input produksi. Namun pemulihan cepat di tahun-tahun berikutnya mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dan lembaga teknis dalam meningkatkan efisiensi usaha tani dan perikanan.

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Indeks Digital Masyarakat Indonesia atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Survei IMDI

ini dimulai dari tahun 2022, dimana memiliki 4 pilar, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Dari mulai pertama kali dilakukan survei IMDI, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka yang relatif baik dan meningkat dari tahun sebelumya. Nilai IMDI tahun 2022-2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

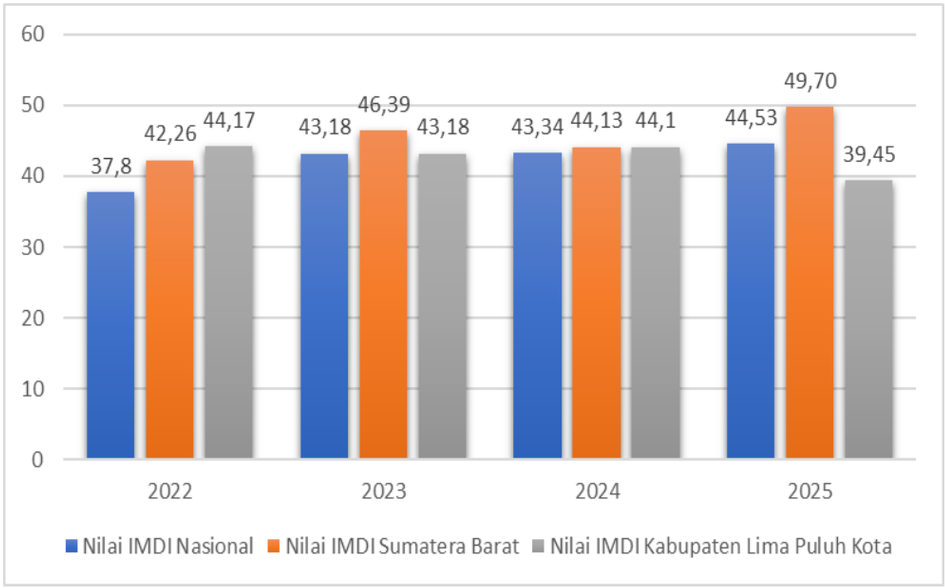
Tabel 2. 78
Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2025

Tahun	Nilai IMDI
2022	44,17
2023	44,75
2024	44,10
2025	39,45

Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 44,17, meningkat menjadi 44,75 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 44,10 dan kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 39,45. Penurunan sebesar 4,65 poin dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam pembangunan masyarakat digital di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama dalam aspek infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akses dan kualitas layanan digital guna mendukung transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan. Nilai IMDI Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami peningkatan. Adapun perbandingan nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 46
Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2025



Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada periode awal, capaian daerah masih berada pada posisi yang relatif kompetitif dibandingkan tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada periode akhir terlihat adanya penurunan, di tengah tren peningkatan pada tingkat nasional dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan penguatan digital daerah agar mampu menjaga daya saing dan mendukung transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten meningkat menjadi 44,75, meskipun terjadi peningkatan yang lebih tinggi pada provinsi (46,39) dan nasional (43,18), sehingga posisi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi Sumatera Barat namun masih di atas nasional. Pada tahun 2024, nilai IMDI Kabupaten sedikit menurun menjadi 44,1, sementara provinsi juga mengalami penurunan menjadi 44,13 dan nasional meningkat menjadi 43,34. Meskipun mengalami penurunan tipis.

Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota tetap berada di atas rata-rata nasional, dan hampir setara dengan provinsi, menunjukkan daya saing digital masyarakat yang relatif kuat di tingkat regional. Secara keseluruhan, nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota konsisten lebih tinggi dari nasional dalam tiga tahun terakhir dan bersaing ketat dengan nilai provinsi, mencerminkan kemajuan dalam aspek literasi digital, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan definisinya, koefisien variasi harga antar wilayah merupakan perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Dalam menjaga aktivitas perdagangan tetap terjadi maka titik temu antara kemampuan daya beli masyarakat dan harga jual komoditas yang stabil merupakan persyaratan utama. Sehingga koefisien ini sangat berguna untuk menjadi dasar intervensi kebijakan dalam mengendalikan harga barang di suatu daerah.

Namun tidak semua daerah kabupaten/kota memiliki sumber daya dalam mengumpulkan dan mengolah data koefisien tersebut sehingga untuk provinsi Sumatera Barat, koefisien variasi harga antar wilayah diganti dengan persentase dan stabilitas serta jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok. Setidaknya indicator ini bisa menjadi proxi untuk melihat sejauh mana kestabilan tingkat harga suatu komoditas yang beredar di suatu daerah. Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

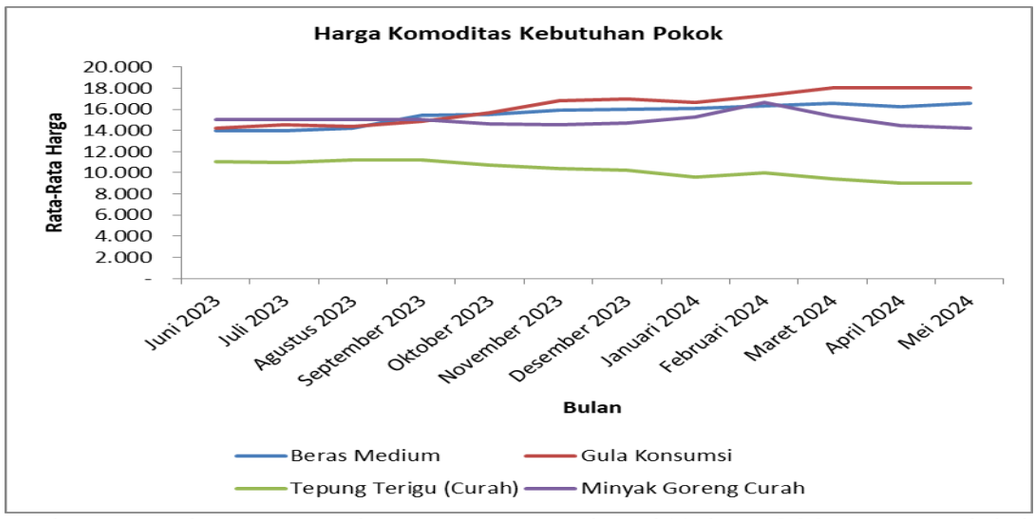
Tabel 2. 79
Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok
Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 s/d Mei 2024

Komoditas	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
Beras Medium	14.000	14.000	14.224	15.417	15.550	15.967	16.000	16.073	16.310	16.573	16.268	16.613
Gula Konsumsi	14.259	14.536	14.379	14.867	15.645	16.783	16.952	16.694	17.345	18.000	18.000	18.000
Tepung Terigu (Curah)	11.093	11.000	11.207	11.233	10.758	10.433	10.258	9.565	10.017	9.435	9.036	9.000
Minyak Goreng Curah	15.000	15.000	15.000	15.000	14.613	14.517	14.726	15.306	16.621	15.338	14.495	14.186
Daging Sapi Murni	140.385	140.714	140.000	140.667	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	144.833	146.000	141.379
Daging Ayam Ras	31.074	31.071	26.724	26.433	25.419	24.233	25.381	26.790	29.655	36.877	40.054	40.173
Ikan Tongkol								26.522	27.679	27.963	30.000	28.103
Telur Ayam Ras	29.519	30.429	29.828	28.273	25.210	26.053	25.865	26.052	26.538	29.350	27.691	28.727
Bawang Merah	31.185	34.786	25.448	18.400	19.806	28.600	36.581	34.323	30.621	34.968	45.786	46.903
Cabai Merah Keriting	27.852	37.536	43.034	44.667	43.613	66.867	59.871	42.129	68.276	71.806	53.298	58.839

Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Ada 10 komoditas yang menjadi acuan dalam mengamati stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana komoditas-komoditas ini adalah bahan pokok yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Terjaganya kestabilan harga komoditas ini akan memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok ini, dapat diamati pada grafik (2.47), grafik (2.48), dan grafik (2.49) berikut ini:

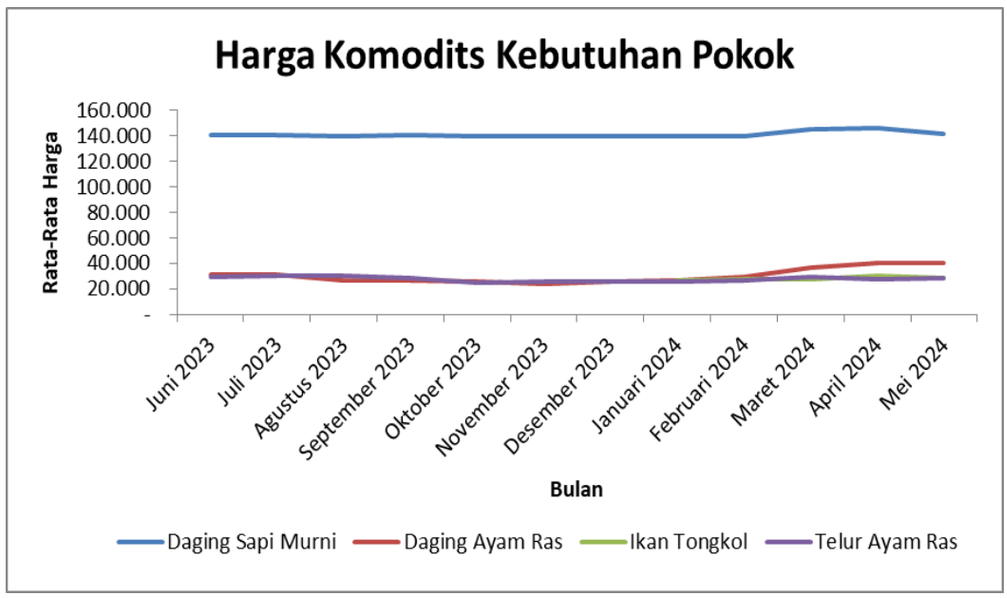
Grafik 2. 47
Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Pada grafik di atas terlihat harga beras medium, tepung terigu curah, gula konsumsi dan minyak goreng curah berfluktuasi tiap bulannya. Untuk harga tepung terigu curah dan minyak goreng curah menunjukkan penurunan dalam 4 bulan terakhir. Akan tetapi, harga beras medium dan gula relatif mengalami kenaikan.

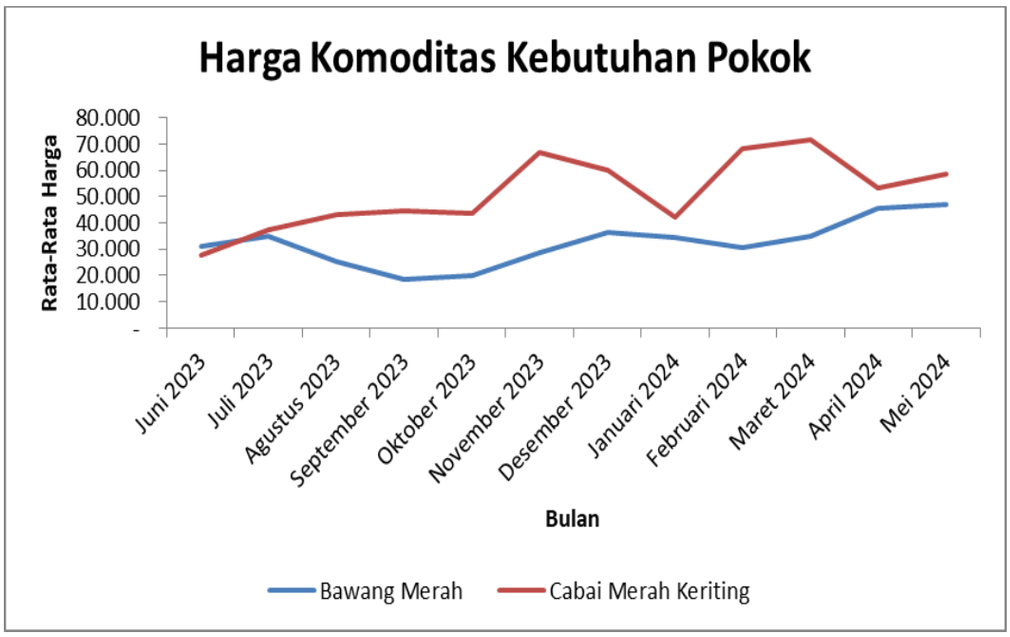
Grafik 2. 48
Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan dalam rentang waktu 12 bulan terakhir, sedangkan untuk telur ayam ras mengalami penurunan. Selain itu, mulai dari bulan Januri 2024 juga sudah ada pencatatan harga ikan tongkol, dimana dalam rentang 5 bulan harganya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari.

Grafik 2. 49
Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga komoditas bawang putih dan cabai merah keriting, dalam 12 bulan terakhir mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan Januari, dimana harga cabai merah keriting hampir selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.

2.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran yang menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB adalah investasi fisik yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Adapun yang termasuk dalam investasi ini yaitu pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Penghitungan / estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui dua metode yaitu langsung dan tidak langsung.

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan). PMTB dihitung dengan metode tidak langsung atau yang juga disebut sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

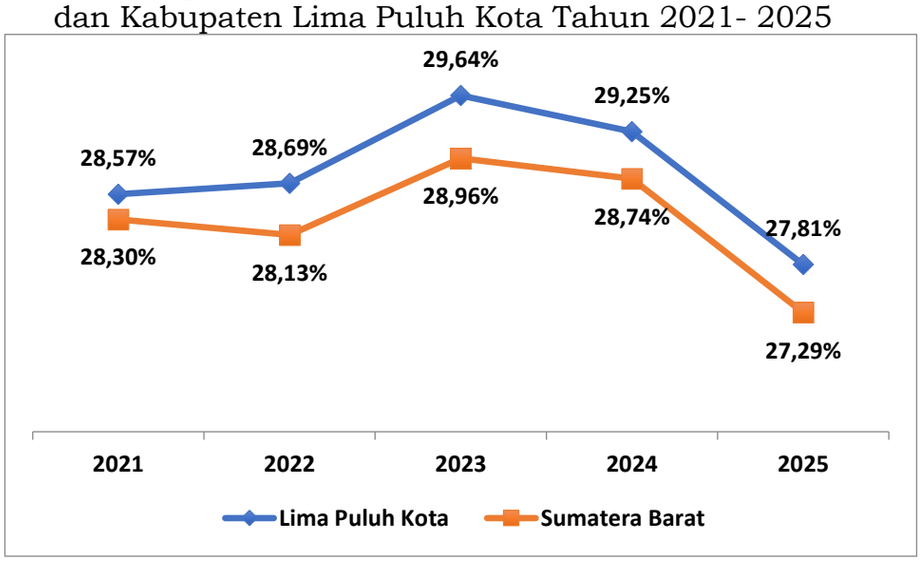
Nilai PMTB di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat di tahun 2022-2023. Akan tetapi menurun di tahun 2024 dan 2025. Namun penurunan dan kenaikan persentase PMTB terhadap PDRB ini tidak terlalu signifikan atau perubahan nilainya tidak begitu besar. Data PMTB dan kontribusinya terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 80
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

Tahun	PMTB (RpMiliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	PMTB (%PDRB)
2021	3.265,73	11.430,81	28,57
2022	3.411,02	11.890,13	28,69
2023	3.684,93	12.430,83	29,64
2024	3.769,79	12.932,00	29,15
2025	3.719,56	13.372,95	27,81

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Grafik 2. 50
Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota;
BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi PMTB terhadap PDRB mengalami peningkatan di tahun 2022-2023, dan kembali turun di tahun 2024 dan 2025, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik dimana garis PMTB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

2.3.5.3 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor adalah kegiatan alih kepemilikan (ekonomi) atau menjual barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain. Net ekspor merupakan nilai bersih dari ekspor suatu wilayah. Penghitungan net ekspor yaitu dengan cara mengurangi nilai ekspor dengan nilai impor (ekspor dikurang impor). Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah, begitu pula dengan kondisi pada Kabupaten Lima Puluh Kota.

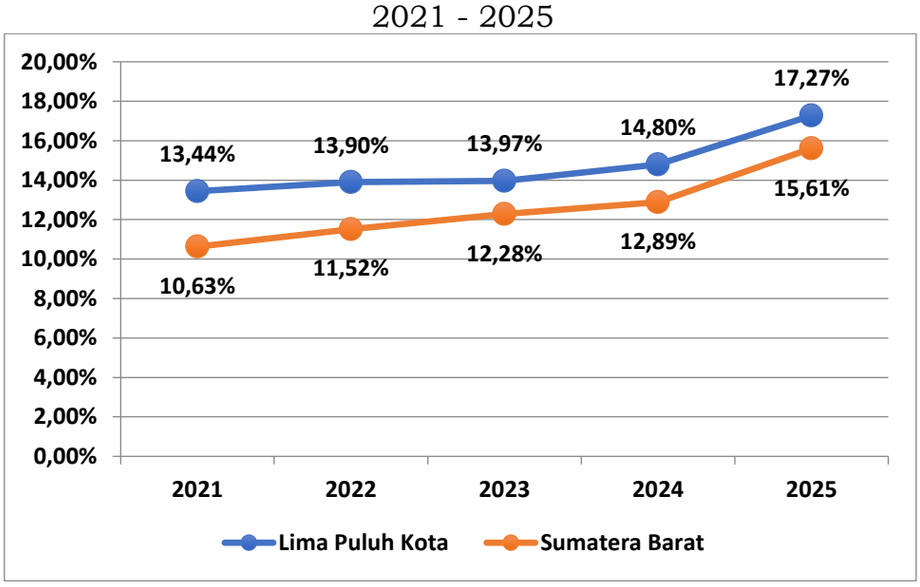
Tabel 2. 81
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Miliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	Net Ekspor (%PDRB)
2021	1.535,94	11.430,81	13,44
2022	1.652,89	11.890,13	13,90
2023	1,737,20	12.430,83	13,97
2024	1.914,43	12.932,00	14,80
2025	2.310,14	13.372,95	17,27

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan PDRB yang cenderung meningkat. Sesuai dengan data yang tersedia pada tahun 2021 nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi sebesar 13,44% terhadap PDRB dan terus meningkat hingga menjadi 17,27% pada tahun 2025. Kontribusi ekspor Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus mengalami peningkatan ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Sumatera Barat yang mana share ekspor terhadap PDRB Sumatera Barat meningkat setiap tahun 2021-2025. Perbandingan kondisi Ekspor (% PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 51
Perbandingkan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 - 2025



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota;
BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

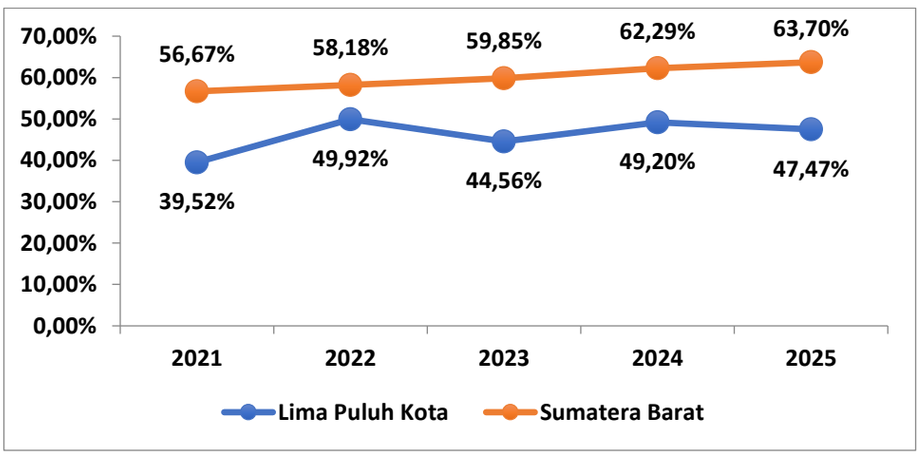
Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memenuhi hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Tabel dan Grafik menunjukkan data rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana berikut:

Tabel 2. 82
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

Wilayah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Lima Puluh Kota	39,52	49,92	44,56	49,20	47,47
Sumatera Barat	56,67	58,18	59,85	62,29	63,70

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Grafik 2.52
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Pada periode 2021 hingga 2025, terdapat perbedaan signifikan dalam capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk kondisi tahun 2021, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 39,52%, jauh di bawah capaian

Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 56,67%. Pada tahun 2022 nilai capaian indikator Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 49.92% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 58.18%. Namun pada tahun 2024, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat kembali menjadi 49,20%, sementara Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan mencapai 62,29%. Pada tahun 2025, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 47,47%, sementara Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan mencapai 63,70%. Secara keseluruhan, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, tetapi capaian akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat selama periode 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan kondisi hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota agar meningkat atau bahkan menyamai capaian di tingkat provinsi.

2.3.6.2 Persentase Desa Mandiri

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bawah telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah: (1) Layanan Dasar; (2) Sosial (3) Ekonomi; (4) Lingkungan (5) Aksesibilitas (6) Tata kelola pemerintahan desa

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2021-2025 digambarkan sebagai berikut:

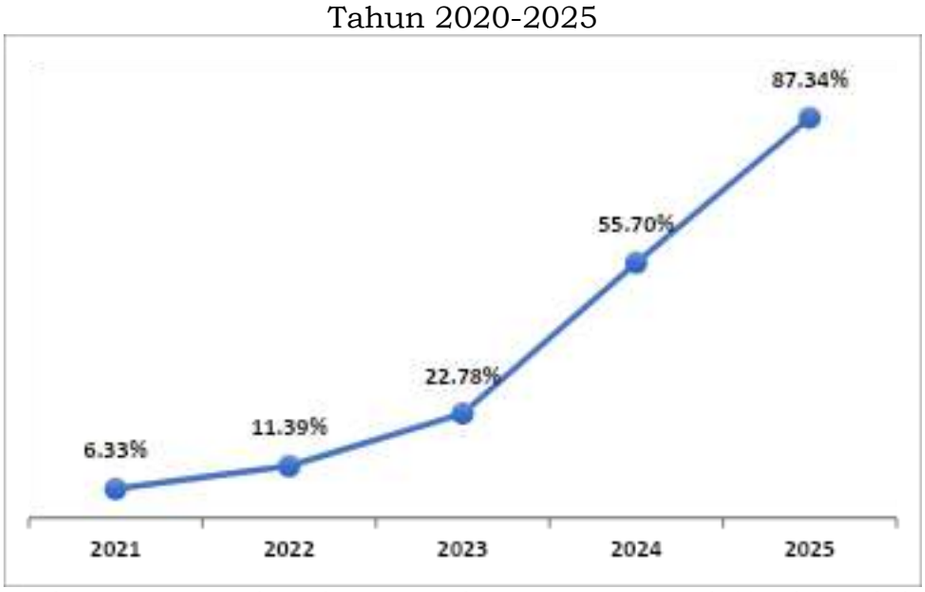
Tabel 2. 83
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79
2025	0	0	2	8	69	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2025 sudah 87,34% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status berkembang yaitu Nagari Galugua dan Nagari Koto Lamo. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2. 53
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2025



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 6.33% pada tahun 2021 menjadi 87.34% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan desa, terutama dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Peningkatan bertahap pada 2021–2022 menandakan fondasi awal penguatan pada 3 aspek, yang kemudian diakselerasi mulai tahun 2023. Peran strategis dari program Dana Desa, integrasi data IDM (Indeks Desa Membangun), serta pendampingan intensif oleh pemerintah pusat dan daerah turut mendukung lompatan kemajuan ini.

Kenaikan tajam pada tahun 2023 hingga 2024, dari 22,78% menjadi 55,70%, serta tahun 2024 hingga 2025, dari 55,70% menjadi 87,34%, mencerminkan adanya percepatan pembangunan berbasis indikator IDM. Dukungan program nasional seperti SDGs Desa, revitalisasi BUMDes, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi faktor pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil mendorong transformasi desa secara inklusif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan klasifikasi desa secara progresif menuju kategori mandiri. Berikut disajikan daftar 69 nagari berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025:

Tabel 2. 84
Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
1.	Akabiluru	1. Koto Tangah Batu Ampa 2. Sungai Balantiak 3. Durian Gadang 4. Pauh Sangik 5. Batuhampar 6. Sariak Laweh 7. Suayan
2.	Bukik Barisan	8. Baruah Gunuang 9. Banja Loweh 10. Sungai Naniang 11. Koto Tangah 12. Maek
3.	Guguak	13. Guguak VIII Koto 14. VII Koto Talago 15. Kubang 16. Sungai Talang
4.	Gunuang Omeh	17. Pandam Gadang 18. Koto Tinggi
5.	Harau	19. Sarilamak 20. Taram 21. Batu Balang 22. Harau 23. Lubuak Batingkok 24. Solok Bio Bio 25. Gurun 26. Tarantang 27. Pilubang 28. Bukik Limbuku 29. Koto Tuo
6.	Kapur IX	30. Muaro Paiti 31. Durian Tinggi 32. Sialang 33. Koto Bangun
7.	Lareh Sago Halaban	34. Batu Payuang 35. Tanjuang Gadang 36. Labuah Gunuang

No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
		37. Balai Panjang 38. Sitanang 39. Bukik Sikumpa 40. Halaban 41. Ampalu
8.	Luak	42. Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang 43. Mungo 44. Sungai Kamuyang 45. Andaleh
9.	Mungka	46. Jopang Manganti 47. Simpang Kapuak 48. Mungka 49. Talang Maur 50. Sungai Antuan
10.	Pangkalan Koto Baru	51. Manggilang 52. Tanjuang Balik 53. Gunuang Malintang 54. Pangkalan 55. Koto Alam
11.	Payakumbuh	56. Taeh Baruah 57. Taeh Bukik 58. Simalanggang 59. Koto Baru Simalanggang 60. Koto Tangah Simalanggang 61. Sungai Beringin 62. Piobang
12.	Situjuah Limo Nagari	63. Situjuah Batua 64. Situjuah Banda Dalam 65. Tungka
13.	Suliki	66. Suliki 67. Limbanang 68. Tanjuang Bungo 69. Andiang

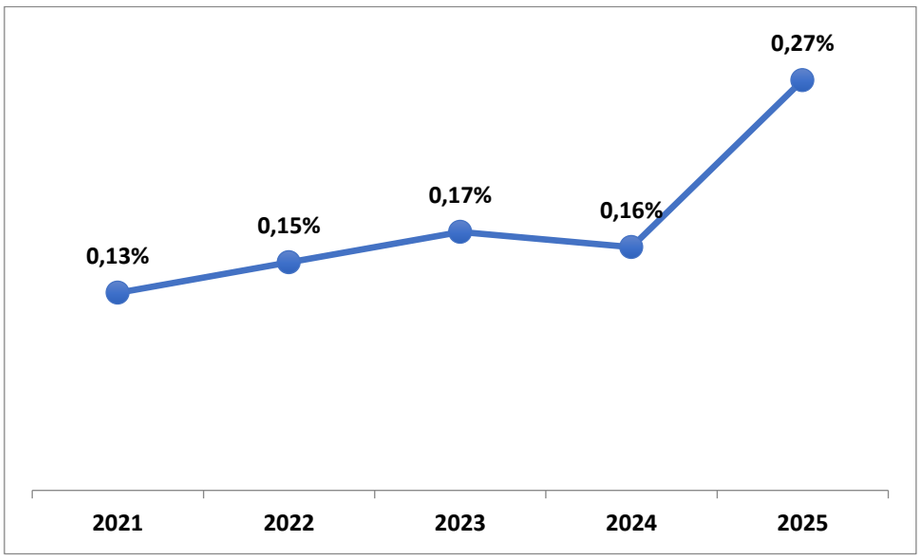
Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2026

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 54
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami tren positif meskipun sempat menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2025, rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai titik tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan nilai 0,27%. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah.Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

2.3.7.2 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Dana pihak ke tiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Total dana pihak ke tiga dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana pihak ketiga setiap tahunnya. Pertumbuhan total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

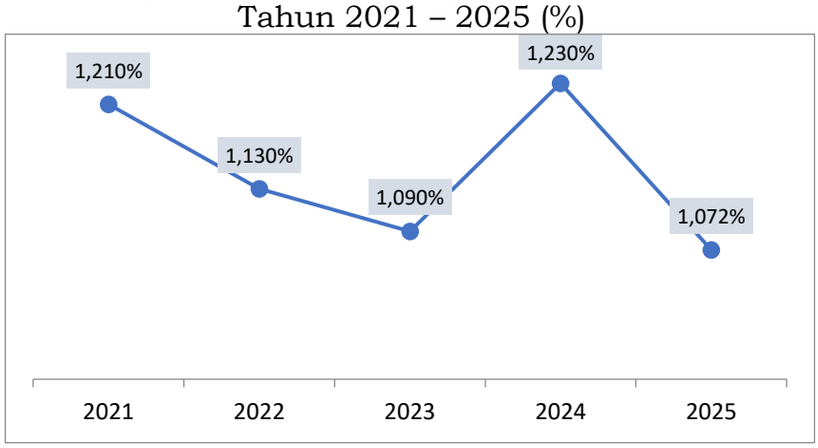
Tabel 2. 85
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020– 2025

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah)
2020	181
2021	196
2022	203
2023	214
2024	256
2025	241

Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 55
Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2026, Data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, total DPK tercatat sebesar Rp196 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp203 miliar pada tahun 2022 dan Rp214 miliar pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2024 sehingga mencapai Rp243 miliar, sedangkan pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp241 miliar.

Apabila ditinjau dari persentasenya terhadap PDRB ADHB sebagaimana disajikan pada Grafik 2.54, rasio DPK menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Rasio DPK terhadap PDRB ADHB menurun dari 1,210 persen pada tahun 2021 menjadi 1,130 persen pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 1,090 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio tersebut meningkat menjadi 1,230 persen pada tahun 2024 sebelum kembali menurun menjadi 1,072 persen pada tahun 2025.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun nominal Dana Pihak Ketiga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhannya tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Peningkatan rasio pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB pada tahun tersebut. Sebaliknya, penurunan rasio pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sehingga proporsi DPK terhadap PDRB mengalami penurunan.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kemampuan sektor perbankan dalam menghimpun dana masyarakat masih cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan agar dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat

penghimpunan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.7.3 Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikalidengan harga saham.Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakanberbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yangbaik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan. Pertumbuhan nilai transaksi saham Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 86
Perkembangan Nilai Transaksi Saham
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai Transaksi Saham Tahunan (Miliar Rupiah)	Jumlah Penduduk	Jumlah Investor	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah/Penduduk)
2021	339	383.525	1977	879.072
2022	187	385.634	2577	481.493
2023	109	388.375	3173	275.611
2024	186	396.427	4010	463.766
2025	343	401.086	4806	855.278

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan nilai transaksi saham di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp. 339 miliar, kemudian menurun menjadi Rp. 187 miliar pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi Rp. 109 miliar pada tahun 2023. Selanjutnya, nilai transaksi saham meningkat menjadi Rp. 186 miliar pada tahun 2024 dan kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp. 343 miliar pada tahun 2025.

Di sisi lain, jumlah investor menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun, yaitu dari 1.977 investor pada tahun 2021 menjadi 2.577 investor pada tahun 2022, 3.173 investor pada tahun 2023, 4.010 investor pada tahun 2024, dan mencapai 4.806 investor pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berpartisipasi di pasar modal terus mengalami peningkatan.

Apabila ditinjau berdasarkan nilai transaksi saham per kapita, indikator tersebut mengalami penurunan dari Rp. 879.072 per penduduk pada tahun 2021 menjadi Rp. 481.493 pada tahun 2022 dan Rp. 275.611 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai transaksi saham per kapita kembali meningkat menjadi Rp. 463.766, dan pada

tahun 2025 meningkat cukup signifikan menjadi Rp. 855.278 per penduduk. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya nilai transaksi saham pada tahun yang sama.

Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jumlah investor di Kabupaten Lima Puluh Kota terus bertambah, namun nilai transaksi saham masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah investor belum selalu diikuti oleh peningkatan aktivitas transaksi secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, memperkuat kapasitas investor, serta mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang sehingga pertumbuhan jumlah investor dapat diikuti dengan peningkatan nilai transaksi dan pendalaman pasar modal di daerah.

2.3.7.4 Total Kredit terhadap PDRB

Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan olehperbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan BankPerekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. Pertumbuhan total kredit Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

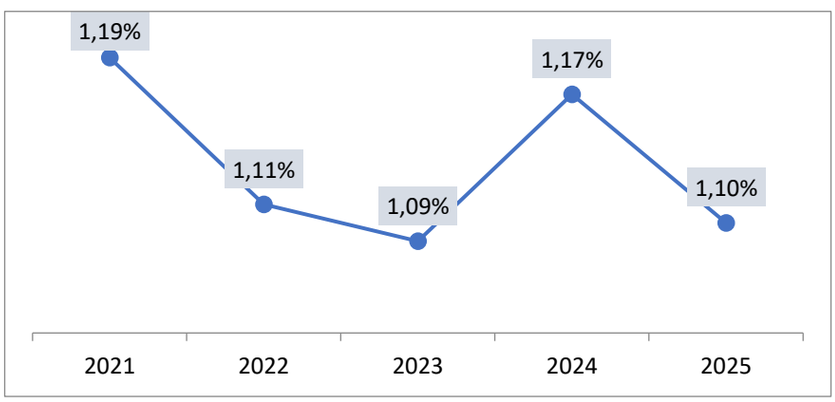
Tabel 2. 87
Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Total Kredit (Miliar Rupiah)
2021	192
2022	198
2023	216
2024	256
2025	246

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu. Perkembangan persentase total kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2. 56
Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap
PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2025 (%)



Sumber: OJK Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan data pada grafik di atas, total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Total kredit tercatat sebesar Rp192 miliar pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi Rp198 miliar pada tahun 2022 dan Rp. 216 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, total kredit kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 256 miliar, namun pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi Rp. 246 miliar.

Apabila ditinjau berdasarkan persentase total kredit terhadap PDRB ADHB sebagaimana disajikan pada Grafik di atas, rasio kredit menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 rasio kredit terhadap PDRB ADHB sebesar 1,19 persen, kemudian menurun menjadi 1,11 persen pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 1,09 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio tersebut meningkat menjadi 1,17 persen pada tahun 2024 sebelum kembali menurun menjadi 1,10 persen pada tahun 2025.

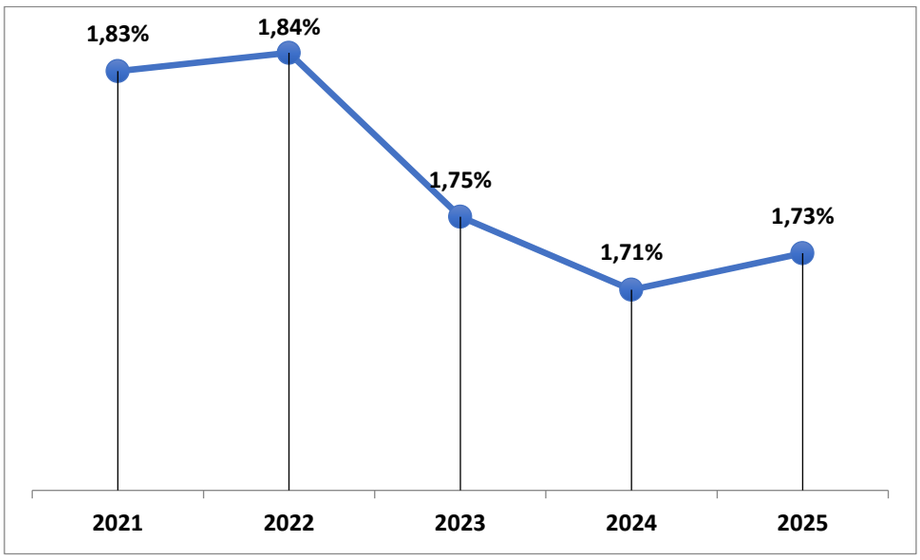
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyaluran kredit cenderung meningkat selama periode 2021–2025, laju pertumbuhannya tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Peningkatan rasio pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB pada tahun tersebut. Sebaliknya, penurunan rasio pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit sehingga proporsi kredit terhadap PDRB mengalami penurunan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit yang produktif guna mendukung aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama sektor-sektor produktif, sehingga penyaluran kredit dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.7.5 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektorpenting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Perkembangan Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 57
Perkembangan Rasio PDRB Sektor
Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor Jasa Keuangan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Dalam kurung tahun 2021-2022, rasio PDRB sektor Jasa Keuangan mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan rasio. Pada tahun 2025 rasio sektor ini meningkat kembali. Hal ini berarti Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektorjasa keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan kata lain, masih banyak penduduk Lima Puluh Kota yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

2.3.7.6 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Undang-Undang No.59 tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat visi Indonesia Emas 2045, yang dicapai melalui 8 misi pembangunan, 17 arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan, yang secara imperatif diamanatkan untuk diselaraskan pada dokumen RPJP Daerah 2025-2045. Adapun salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersebut adalah indikator inklusi keuangan, sebagaimana telah diselaraskan hingga level provinsi pada periode penyusunan RPJPD 2025-2045. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai turunan indikator Inklusi Keuangan level provinsi, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dibangun sebagai proksi indikator level Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai

kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. IKAD mulai diukur realiasinya sejak tahun 2022. Capaian IKAD Kabupaten Lima Puluh Kota 4 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 58
Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2025 (%)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2026

Berdasarkan data tersebut, Indeks Akses Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,43 poin dari 3,29 pada tahun 2022 menjadi 3,72 pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 13,1% selama tiga tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada periode 2024–2025, yaitu sebesar 0,26 poin, setelah pada tahun 2024 sempat mengalami penurunan tipis sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mengindikasikan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, yang didukung oleh penguatan inklusi keuangan, perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan, serta meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

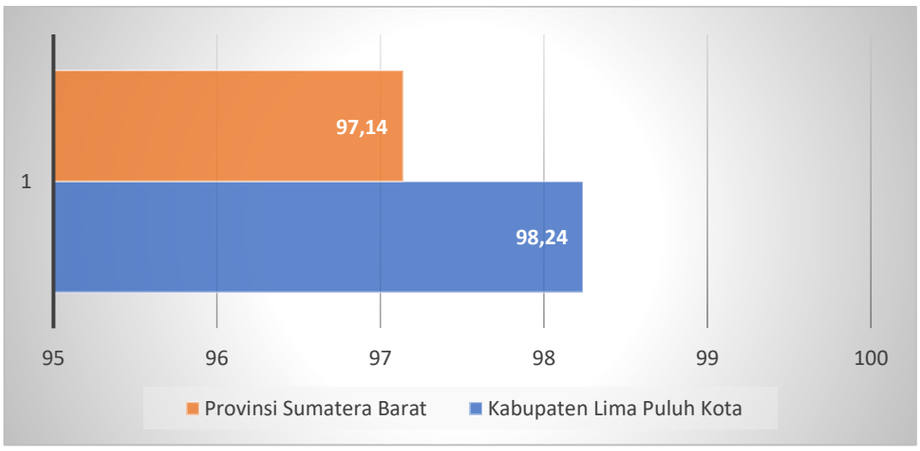
Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan, dan

penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan Indeks reformasi hukum baru dimulai tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, nilai indeks reformasi hukum di tahun 2025 adalah 98,24 dengan predikat istimewa. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota berada diatas nilai Provinsi Sumatera barat seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 59
Perbandingan Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2025



Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada

masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota di dasarkan atas beberapa hal: (1) Tata Kelola; (2) Layanan SPBE (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan (4) Sumber Daya Manusia SPBE.

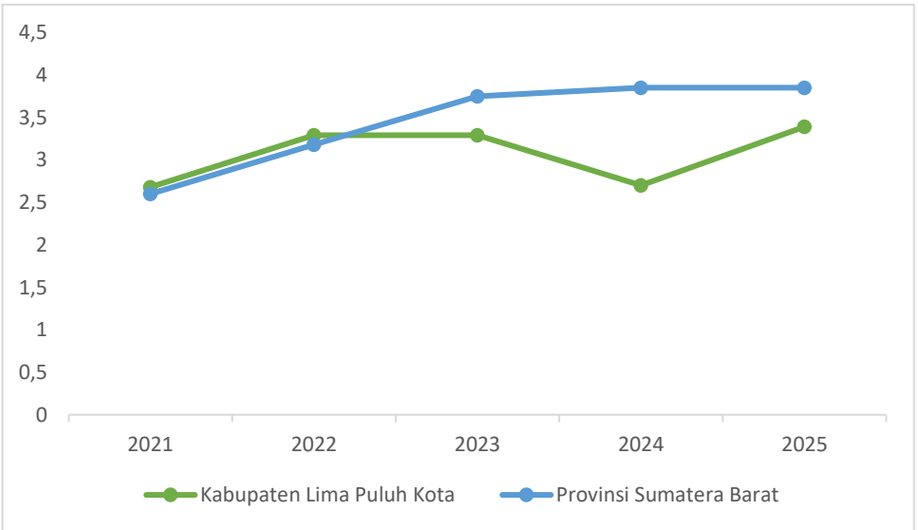
Tabel 2. 88
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	SPBE
1	2021	2,68
2	2022	3,29
3	2023	3,29
4	2024	2,70
5	2025	3,39

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Capaian Indeks SPBE untuk kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai tahun 2025 berada pada rentang nilai indeks antara 2,6 - < 3,5, yang artinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Kategori BAIK. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 capaian Indeks SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2022 capaian indeks Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibanding dengan capaian Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, pada tahun 2023 dan 2024 kembali berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2025 capaian indeks SPBE tertinggi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 60
Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang holistic dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik antara lain: (1) Keadilan (*Fairness*); (2) Partisipasi (*Participation*); (3) Akuntabilitas (*Accountability*); (4) Transparansi (*transparency*); (5) Berdayaguna (*useful*); dan (6) Aksesibilitas (*accessibility*).

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menghitung Indeks Pelayanan Publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikut ditampilkan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Ombudsman.

Tabel 2. 89
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025 Berdasarkan Penilaian Ombudsman

Tahun	Indeks Pelayanan Publik
2021	46,93
2022	80,87
2023	85,59
2024	86,02
2025	84,00

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026

Berdasarkan Tabel diatas, capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 46,93 pada tahun 2021 menjadi 86,02 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 84,00. Meskipun terjadi penurunan sebesar 2,02 dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 masih berada di kategori baik dan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap terjaga pada level yang relatif tinggi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik agar capaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Tabel 2. 90
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 – 2025 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB

No.	Tahun	Indeks Pelayanan Publik	Skor
1.	2021	2,38	C-

No.	Tahun	Indeks Pelayanan Publik	Skor
2.	2022	3,39	B-
3.	2023	4,16	A-
4.	2024	4,52	A-
5.	2025	4,21	A-

Sumber: KemenpanRB Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai indeks sebesar 2,38 dengan predikat C-, meningkat menjadi 3,39 pada tahun 2022 dengan predikat B-, dan mencapai 4,16 pada tahun 2023 dengan predikat A-. Pada tahun 2024 nilai indeks kembali meningkat menjadi 4,52 dan tetap memperoleh predikat A-. Sementara itu, pada tahun 2025 nilai indeks tercatat sebesar 4,21, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada pada predikat A-. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berada pada kategori sangat baik dan perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.4.1.4 Survei penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam penilaian integrasi pemerintah sebagai berikut:

1. Korupsi : Praktik korupsi bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan.
2. Nepotisme dan Kolusi: Praktik nepotisme (pemberian keuntungan kepada keluarga) dan kolusi (kerjasama ilegal antara individu atau kelompok) dapat merugikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.
3. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau penyaluran anggaran dapat menciptakan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelanggaran Etika: Pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah atau pegawai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
5. Tidak Efektifnya Sistem Pengawasan: Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak efektif, risiko terjadinya tindakan korupsi atau pelanggaran etika dapat meningkat.
6. Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi: Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi indikasi lemahnya budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan pemerintahan.

7. Keterbatasan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kurang akuntabel.
8. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan keterampilan, integritas, atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menciptakan celah untuk pelanggaran etika.
9. Lemahnya Sistem Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower: Jika tidak ada sistem yang baik untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi para pengadu atau *whistleblower*, potensi pelanggaran integritas mungkin tidak terungkap.
10. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan integritas.
11. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

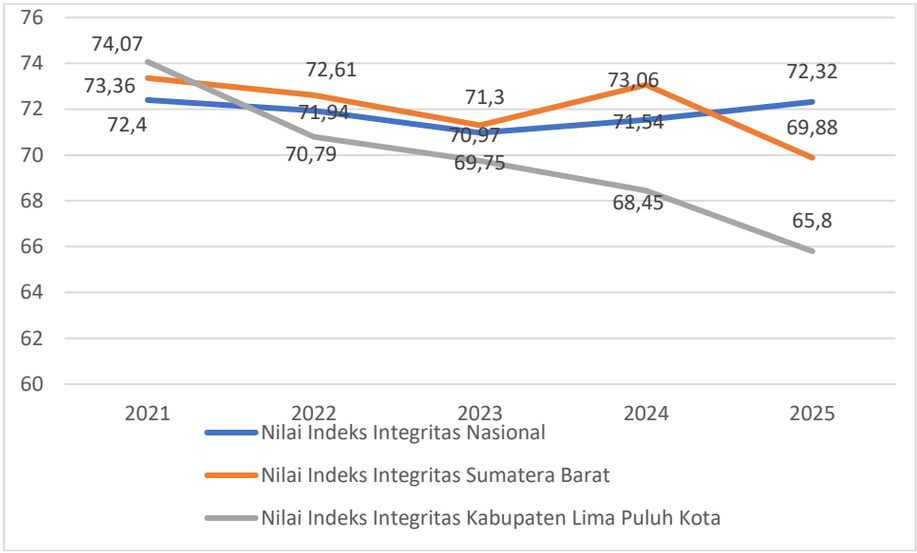
Tabel 2. 91
Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025

Tahun	Indeks Integritas Kabupaten
2021	74,07
2022	70,80
2023	69,76
2024	68,45
2025	65,80

Sumber: KPK RI Tahun 2026

Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dilaksanakan tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang di tampilkan pada tabel diatas. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel 2.89, Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan selama periode 2021–2025. Nilai indeks pada tahun 2021 tercatat sebesar 74,07, kemudian menurun menjadi 70,80 pada tahun 2022, 69,76 pada tahun 2023, dan 68,45 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 65,80. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penurunan indeks integritas tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi, meningkatkan pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Grafik 2. 61
Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: KPK RI Tahun 2026

2.4.1.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai perilaku anti korupsi pada pelayanan data dan informasi statistik yang diberikan oleh BPS berdasarkan persepsi responden. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

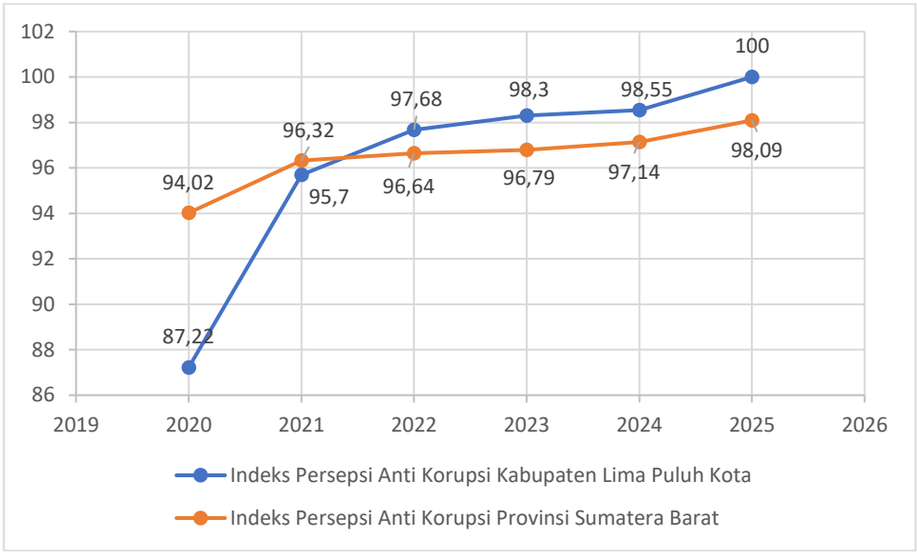
Tabel 2. 92
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Indeks Persepsi Anti Korupsi
1.	2020	87,22
2.	2021	95,70
3.	2022	97,68
4.	2023	98,30
5.	2025	98,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dari empat tahun terakhir nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan, artinya korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin rendah setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2022 nilai indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 62
Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh & Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan

Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah, untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga diperlukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Sehingga untuk itu diperlukan pengukuran kinerja yakni Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional Indikator ini yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Kabupaten Lima Puluh Kota :

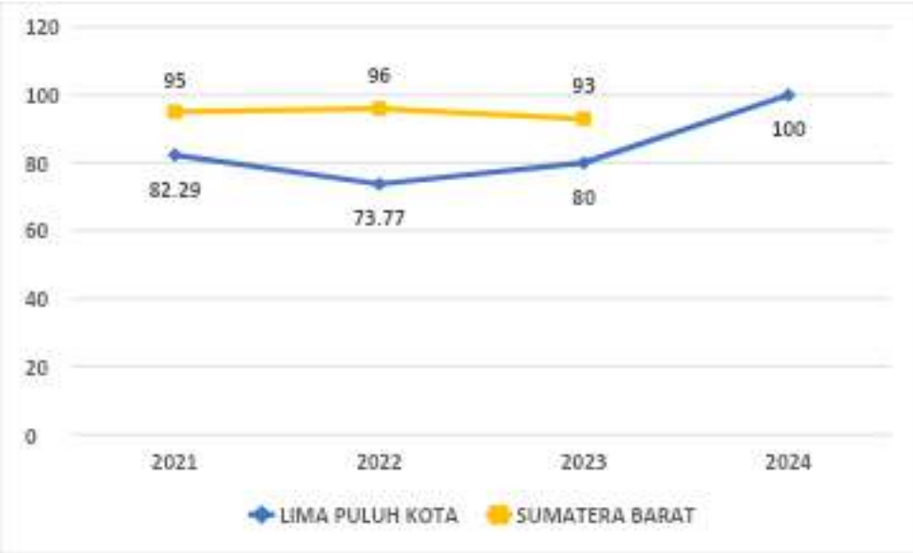
Tabel 2. 93
Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

No.	Tahun	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)
1	2021	350	288	82,29
2	2022	61	45	73,77
3	2023	15	12	80
4	2024	51	51	100
5	2025	-	-	122

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2021-2025 persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat. Pada tahun 2025, Persentase Penanganan Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah 122%, artinya penanganan Perda diselesaikan melebihi target. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dari persentase Provinsi Sumatera Barat yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 63
Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.4.2.2 Angka Kriminalitas (per 100.000)

Angka Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Kriminalitas ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah kriminalitas konvensional, kriminalitas transnasional, kriminalitas siber dan kriminalitas ekonomi. Adapun dampak kriminalitas yang ditimbulkan dalam masyarakat di antaranya adalah : (1) ketidakamanan yang timbul dan adanya rasa takut, (2) gangguan ketertiban sosial, (3) hilangnya kepercayaan, (4) timbulnya biaya sosial dan ekonomi yang besar, (5) stigma dan diskriminasi.

Berdasarkan paparan di atas, tentu hal ini berpengaruh kepada iklim daya saing investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin banyak tindak kejahatan dalam masyarakat, yang bisa menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat tidak aman dan sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, tinggi rendahnya angka kriminalitas juga menunjukan kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan

lingkungan yang sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
2021	385.634	60	129
2022	388.375	78	48
2023	396.427	122	76
2024	401.086	187	76
2025	406.228	121	72

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2025, angka kriminalitas tercatat sebesar 121, yang mengindikasikan bahwa setiap 121 orang dari 100.000 penduduk berisiko terkena tindak kejahatan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta efektivitas upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, persentase penyelesaian gangguan kamtibmas juga mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2.4.2.3 Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat

Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari *organizational performance index* yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat. Indeks Kinerja Organisasi (IKO) diadopsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dari pendekatan Program USAID MADANI untuk menjadi sebuah alat mandiri yang akan membantu menilai organisasi masyarakat berdasarkan kualitas kerja dan pada saat bersamaan mengeksplorasi kapasitas organisasi berdasarkan penilaian kapasitas organisasi. Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektivitas Organisasi, Efisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sensus ke 42 organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdata di dalam SIORMAS Kemendagri yaitu suatu sistem informasi sebagai Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil sensus tersebut, maka pada tahun 2023 indeks kinerja organisasi masyarakat adalah kurang (<50) masih di bawah

target yang ditetapkan yaitu cukup (>50). Permasalahan masih kurangnya indeks kinerja organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain organisasi masyarakat belum secara aktif berperan dalam pembangunan daerah, sumber daya terbatas, keuangan belum mandiri, program kerja tidak jelas, manfaat organisasi masyarakat di daerah belum dirasakan masyarakat. Masalah lain adalah kaderisasi organisasi masyarakat belum maksimal, sumber pendapatan organisasi masyarakat masih mengandalkan pihak lain, pembinaan dari pemerintah belum maksimal, dan kontrol masyarakat terhadap kiprah organisasi masyarakat masih terbatas.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga atau pemerintah di luar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Berikut ini data persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan:

Tabel 2. 95
Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

No.	Tahun	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
1.	2021	80 %
2.	2022	100 %
3.	2023	100 %
4.	2024	-
5.	2025	100 %

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2026

Kerjasama wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan luar Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana pada tahun 2021-2025, dari jumlah kerjasama yang ditargetkan semuanya dapat terealisasi atau mencapai 100%, sedangkan untuk capaian tahun 2024 belum ada.

2.4.3.2 Penyelesaian gangguan Kamtibmas

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah

ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 96
Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan	
2021	232	300	28	129
2022	302	144	158	48
2023	482	365	123	76
2024	752	578	112	76
2025	1.053	761	213	72

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2025, dari 1.053 laporan gangguan kamtibmas yang tercatat, sebanyak 761 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan 213 kasus masih menjadi tunggakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan gangguan kamtibmas telah berjalan, namun efektivitas penyelesaian kasus masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan

i. Angka Partisipasi Kasar

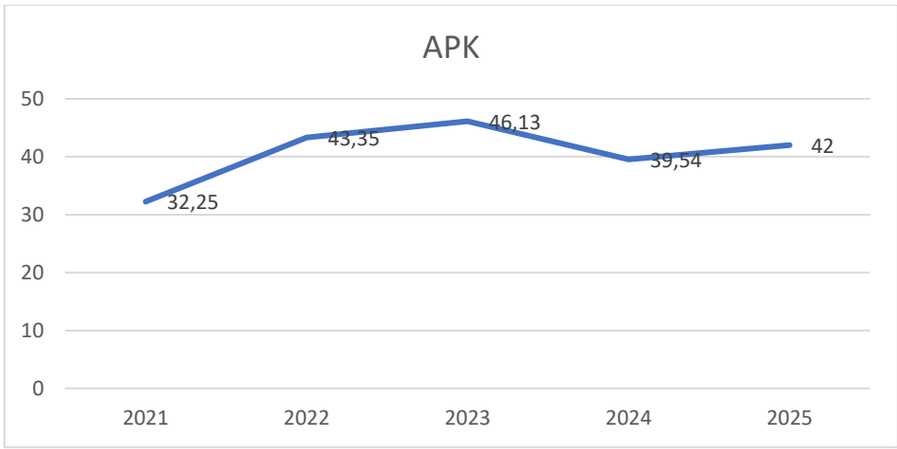
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Untuk APK PAUD, maka kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sehingga untuk APK PAUD ini sendiri merupakan rasio jumlah siswa PAUD terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun, berdasarkan data yang ada, maka berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021–2025.

Grafik 2. 34
APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

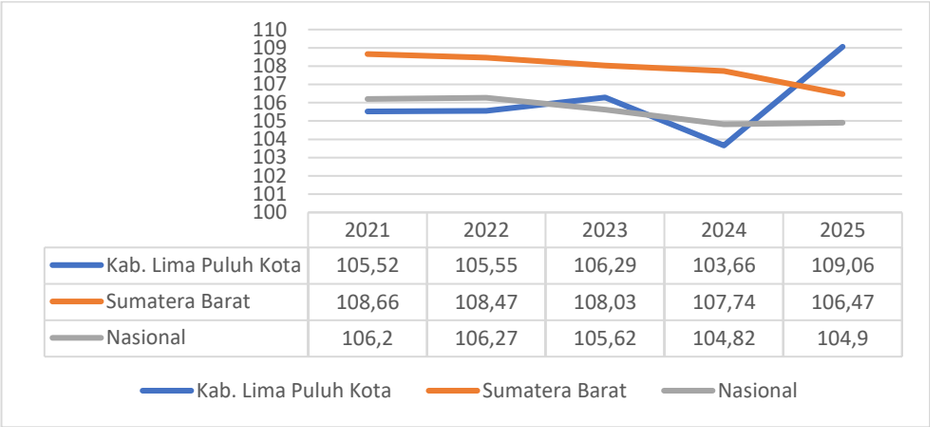


Sumber: Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan terjadi penurunan di tahun 2024. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 42 pada tahun 2025 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai tergolong masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota baru memiliki 1 buah TK negeri dan berlokasi di Kecamatan Harau sementara sisanya merupakan TK yang dikelola oleh yayasan atau berstatus swasta.

Hal ini menjadi salah satu pemicu rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK swasta yang biayanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan TK Negeri. Di samping itu tidak semua TK swasta ini mudah diakses oleh masyarakat mengingat jumlah TK swasta ini pun belum seimbang dengan jumlah anak usia sekolah PAUD. Faktor lain yang memicu masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak di usia PAUD adalah tidak adanya kebijakan yang tegas terkait pentingnya pendidikan PAUD. Untuk itu ke depan beberapa upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang kewajiban pendidikan 1 tahun Pra Sekolah Dasar, aturan 1 jorong 1 PAUD serta aturan yang mendorong perubahan status TK Yayasan menjadi TK Negeri.

Grafik 2. 65
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 – 2025

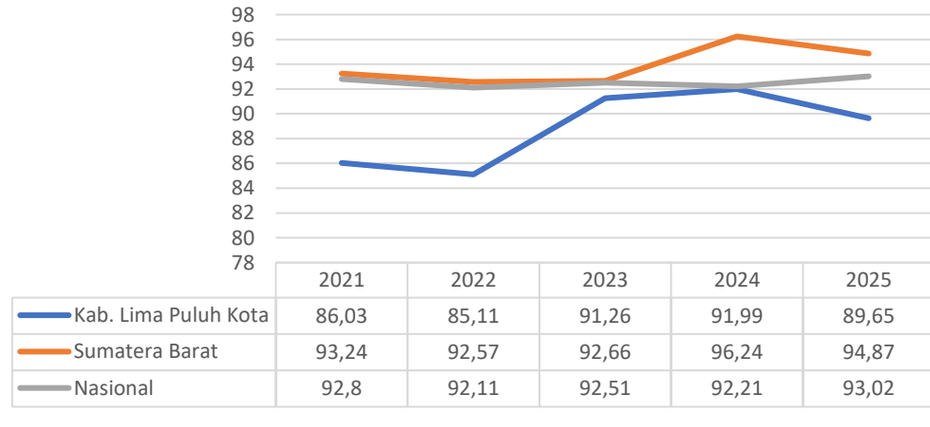


	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	105,52	105,55	106,29	103,66	109,06
Sumatera Barat	108,66	108,47	108,03	107,74	106,47
Nasional	106,2	106,27	105,62	104,82	104,9

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami tren menurun, dari 105,52 persen pada tahun 2021 menjadi 103,66 persen pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 109,06 angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7-12 sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Akan tetapi, Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sudah di atas angka nasional.

Grafik 2. 66
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15
Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	86,03	85,11	91,26	91,99	89,65
Sumatera Barat	93,24	92,57	92,66	96,24	94,87
Nasional	92,8	92,11	92,51	92,21	93,02

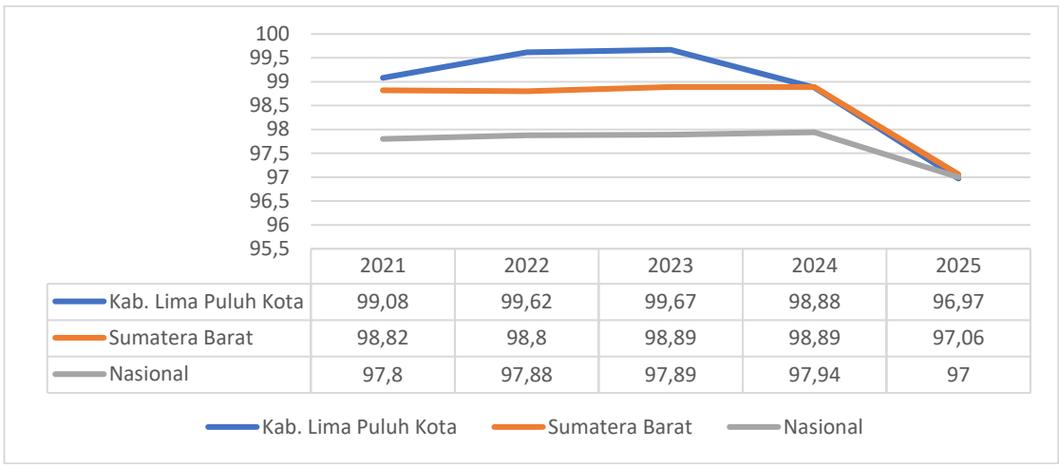
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai tahun 2025 berada di bawah Provinsi dan Nasional, artinya belum semua penduduk berusia 13-15 tahun tertampung semuanya di sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

ii. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 2. 67
Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Tahun
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 – 2025

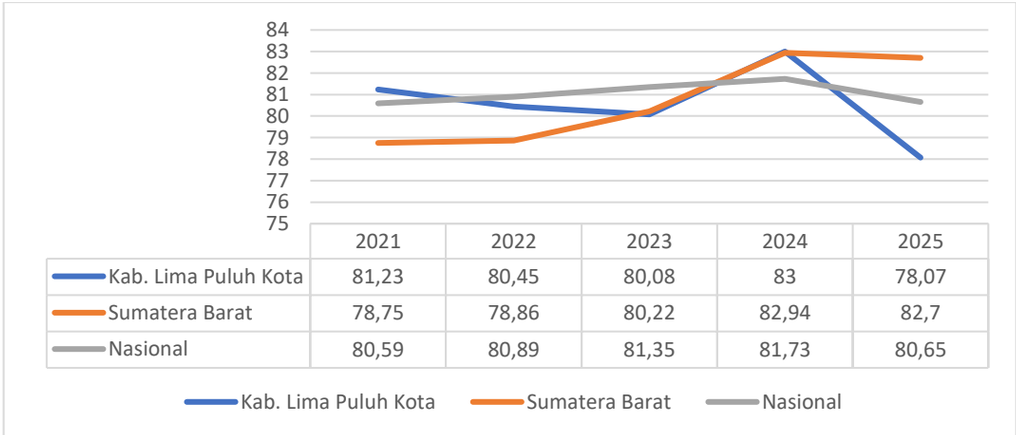


	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	99,08	99,62	99,67	98,88	96,97
Sumatera Barat	98,82	98,8	98,89	98,89	97,06
Nasional	97,8	97,88	97,89	97,94	97

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi dan nasional. APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 menunjukkan angka 96,97 persen, artinya sekitar 96,97 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/sederajat.

Grafik 2. 68
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Lima Puluh Kota	81,23	80,45	80,08	83	78,07
Sumatera Barat	78,75	78,86	80,22	82,94	82,7
Nasional	80,59	80,89	81,35	81,73	80,65

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai tahun 2025 berfluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024.

iii. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan indikator SPM urusan pendidikan, Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu APS 5-6 tahun, APS 7-15 tahun dan APS 7-18 tahun kesetaraan.

1) APS 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan. Capaian APS 5-6 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 97
Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2025

Tahun	Capaian Aps
2022	80,25
2023	49,32
2024	69,28
2025	74,57

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 5-6 tahun dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. APS 5-6 tahun pada tahun 2023 sebesar 49,32 , di tahun 2024 sebesar 69,28 dan tahun 2025 74,57. Artinya, 3 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,25 dimana di tahun 2025 jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di PAUD/TK jauh berkurang dibandingkan tahun 2023.

2) APS 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan. Capaian APS 7-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 98
Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2025

Tahun	Capaian Aps
2022	99,32
2023	99,56
2024	99,36
2025	98,77

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-15 tahun dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. APS 7-15 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,56, di tahun 2024 sebesar 99,36 dan di tahun 2025 sebesar 98,77. Artinya, 3 tahun terakhir tersebut mengalami penurunan sebesar 0,79 dimana hampir semua anak usia 7-15 tahun sedang belajar di pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) APS 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan diperoleh jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian APS 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 99
Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022-2025

Tahun	Capaian Aps
2022	28,55
2023	30,52
2024	36,85
2025	47,60

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-18 tahun kesetaraan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. APS 7-18 tahun kesetaraan pada tahun 2023 sebesar 30,52, di tahun 2024 sebesar 36,85 dan di tahun 2025 47,60. Artinya, 3 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,08 dimana masih banyak warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

iv. Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah

Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik di usia pendidikan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menengah dalam 10.000 penduduk. Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2021-2025 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 100
Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

Jenis Sekolah	2021	2022	2023	2024	2025
TK	247	259	265	262	265
SD/ Sederajat	381	382	382	385	387
SMP/ Sederajat	84	87	88	89	90

Jenis Sekolah	2021	2022	2023	2024	2025
SMA/ Sederajat	33	33	38	39	40
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

v. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun ke atas.

Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun 2025, sekitar 12,89 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 5,21 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 6,15 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 6,15 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 72,26 persen.

Tabel 2. 101
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	3,40	3,58	3,50
2	Masih sekolah SD	13,84	11,96	12,89
3	Masih sekolah SMP	4,72	5,69	5,21
4	Masih sekolah ≥ SMA	6,03	6,26	6,15
5	Tidak sekolah lagi	72,00	72,51	72,26
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, apabila dikelompokkan lebih fokus kepada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka terdapat sebanyak 64.903 jiwa telah menamatkan SD/sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 102
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tamat SD/sederajat	33.902	31.001	64.903
SLTP/sederajat	24.436	25.367	49.803
SMA/sederajat	37.414	37.785	75.289
Diploma I/II	344	999	1.343
Akademi/Diploma III/S. Muda	2.273	3.846	6.119
Diploma IV/Strata I	7.095	13.863	20.958
Strata II	390	487	877
Strata III	16	14	30
Jumlah	105.870	113.452	219.322

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Jika dilihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota semaki meningkat. Sementara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/sederajat dan jenjang SMP/sederajat mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 103
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
Tahun 2021-2025

Tingkat Pendidikan	Tahun														
	2021			2022			2023			2024			2025		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Tidak Punya Ijazah SD	15,71	21,12	18,48	15,65	18,27	16,99	14,91	20,89	17,94	16,07	20,07	18,12	14,01	12,61	13,30
SD/sederajat	27,20	19,56	23,29	26,40	23,13	24,73	26,36	27,74	24,53	21,70	20,30	20,98	22,45	22,88	22,67
SMP/sederajat	25,32	20,50	22,85	24,80	20,47	22,59	22,30	19,12	20,69	26,84	21,58	24,14	22,66	21,56	22,10
SMA/sederajat	23,64	25,73	24,71	33,14	38,12	35,69	36,44	37,24	36,84	35,40	38,04	36,75	40,88	42,95	41,93
Diploma I/II/III	1,69	2,44	2,07												
Diploma IV/S1/S2/S3	6,44	10,67	8,61												
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Inkesra Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

vi. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di

luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 2. 104
Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan
dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKBM	36
2.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.226
3.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi	1.068
4.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata	725

Sumber: Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata sebanyak 725 orang. Jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Di samping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah.

vii. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar merupakan persentase atas jumlah anak usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, pada tahun 2025 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 88,52%, artinya anak usia 7-12 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SD sederajat baru sebesar 88,52%.

viii. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama merupakan persentase atas jumlah anak usia 13-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten bersangkutan. Berdasarkan

penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, pada tahun 2025 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 75%, artinya anak usia 13-15 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SMP sederajat baru sebesar 75%.

B. Urusan Wajib Kesehatan

i. Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Dan BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi di atas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Perkembangan persentase *Balita Kurus* dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren meningkat.

Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Sedangkan tren persentase Balita Pendek menurun dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah balita gizi kurang, pendek dan kurus dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. Perkembangan balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 105
Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
2020	1.865	7,84%	1.973	8,30%	1.161	4,88%
2021	2.029	8,58%	1.975	8,36%	1.030	4,36%
2022	2.263	9,53%	2.050	8,63%	1.074	4,52%
2023	1.050	4,57%	2.004	8,72%	1.050	4,57%
2024	2.628	11,0%	2.045	8,6%	1.145	4,81%

Sumber: KDA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data Diolah

ii. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010,

berikut disampaikan persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025 berdasarkan e-PPGBM.

Tabel 2. 106
Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2025 berdasarkan e-PPGBM

Wilayah	Persentase Balita *Stunting*					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	8,29	8,36	8,63	8,72	8,59	8,86

Sumber e-PPGBM, Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2020 persentase balita stunting di kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2025 angka e-PPGBM nya sebesar 8,86% dengan jumlah anak sebanyak 2.046 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini.

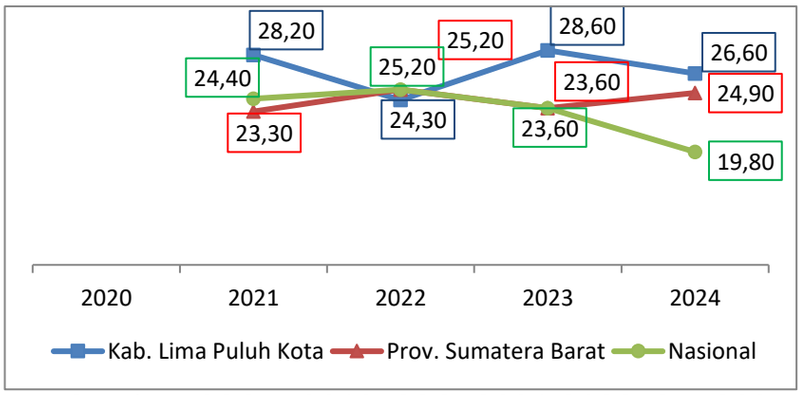
Tabel 2. 107
Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2025

Wilayah	Persentase Balita *Stunting*				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	28,2	24,3	28,6	26,6	-

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2024

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, persentase balita stunting tercatat sebesar 28,2 persen, kemudian menurun menjadi 24,3 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 angka stunting kembali meningkat menjadi 28,6 persen, sebelum kembali menurun menjadi 26,6 persen pada tahun 2024. Data tahun 2025 belum tersedia. Artinya, berdasarkan hasil survei tahun 2024, terdapat sekitar 27 balita stunting pada setiap 100 balita di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023, prevalensi stunting masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan

Grafik 2. 69
Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2024 berdasarkan Hasil Survei



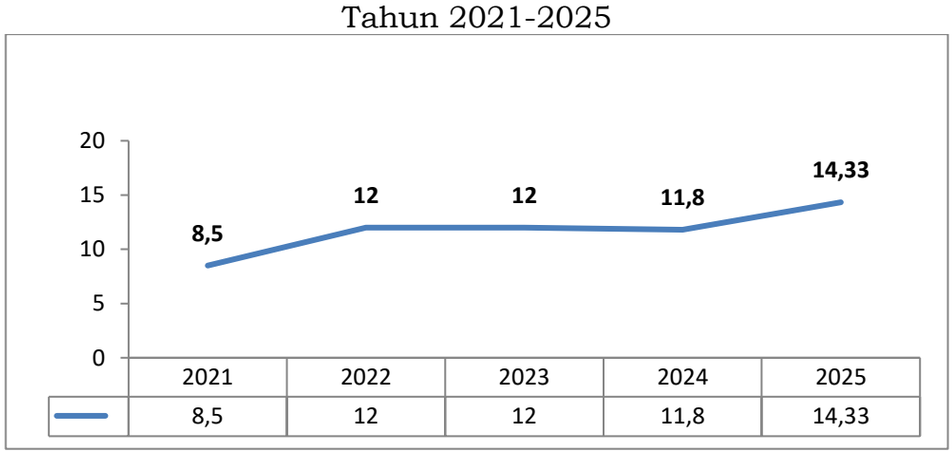
Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2024

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2024 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota turun menjadi 26,6% dimana pada tahun sebelumnya 28,6%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.

iii. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 70
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Walaupun terjadi fluktuasi Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 ke 2025, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk baik dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2025 sebesar 14,33 sudah berada di bawah target nasional tahun 2025 sebesar 14 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah

(BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya. Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 108
Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berat Badan Lahir Rendah	16	15	16	16	28
Asfiksia	11	5	9	8	3
Kelainan Bawaan	3	3	5	8	2
Pneumonia	2	1	5	3	2
Diare	1	2	1	0	0
Lain-lain	27	24	28	28	22
Total	60	50	64	63	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

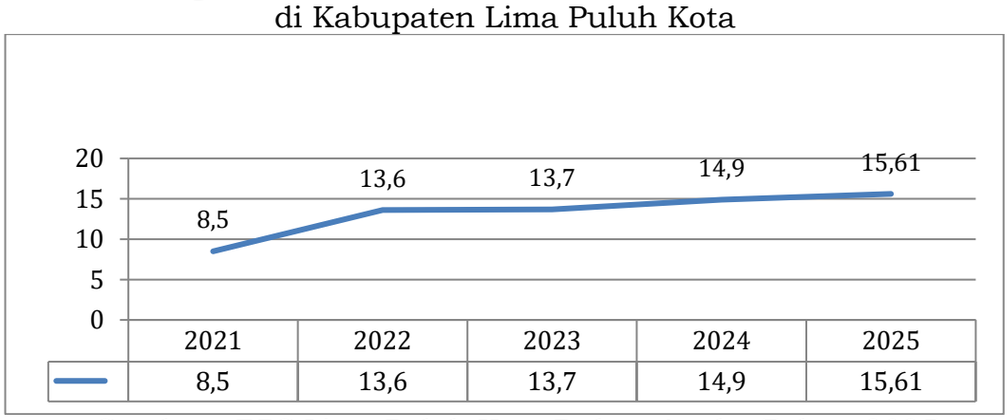
Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir mencapai angka terendah pada tahun 2021 sebesar 50. Pada tahun 2024, kematian bayi tercatat sebanyak 57 dengan kategori penyebab terbanyak Lain-lain diikuti oleh kategori Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

iv. Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 71
Angka Kematian Balita dari Tahun 2021 - 2025
di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan tren yang meningkat, dari 8,5 di tahun 2021 menjadi 15,61 di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk penurunan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan.

v. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa Memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

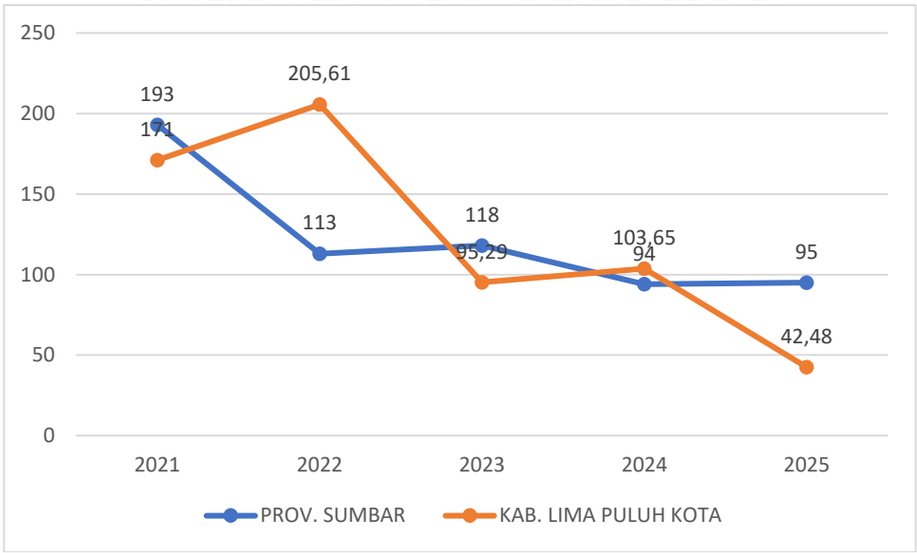
Tabel 2. 109
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Wilayah	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	171	205,61	95,29	103,65	42,48

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. AKI meningkat dari 171 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 205,53 pada tahun 2022. Selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 95,3, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 103,7. Pada tahun 2025, AKI kembali menurun secara tajam menjadi 42,48 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 42 kematian ibu dalam setiap 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 72
Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2021–2025, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan perbaikan yang signifikan meskipun sempat berfluktuasi. AKI meningkat dari 174 pada tahun 2021 menjadi 205,61 pada tahun 2022, kemudian berhasil ditekan secara konsisten menjadi 95,29 pada tahun 2023, 103,65 pada tahun 2024, dan turun tajam menjadi 42,48 pada tahun 2025. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan AKI Provinsi Sumatera Barat yang tercatat 95 pada tahun 2025, sehingga menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, penguatan layanan kesehatan dasar, serta penanganan risiko kehamilan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan hasil yang positif.

vi. Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Perkembangan persentase bayi yang diimunisasi per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

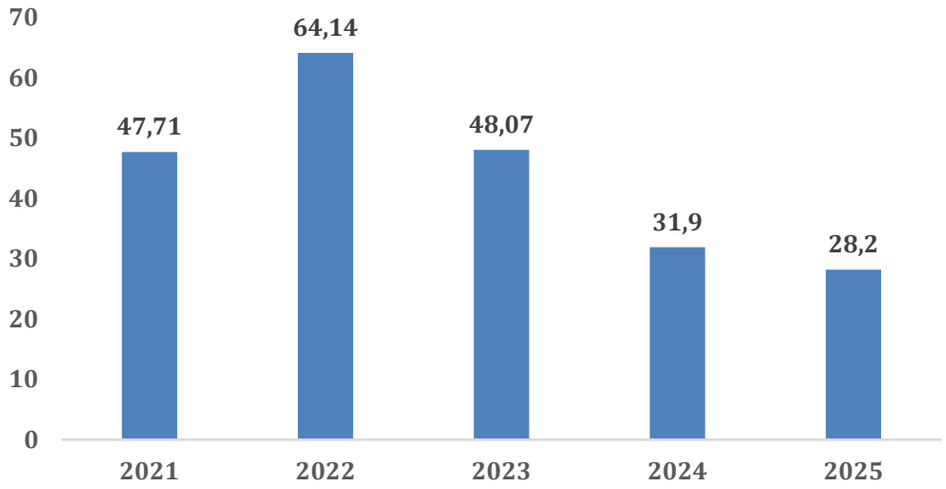
Tabel 2.110
Persentase Bayi Yang Diimunisasi
Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2021 - 2025

Kecamatan	Puskesmas	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	45,32	46,17	55,30	16,00	4,6
Akabiluru	Batuhampar	88,99	53,06	40,49	19,90	18,6
Akabiluru	Piladang	39,59	86,74	83,80	47,50	46,1
Luak	Mungo	35,59	40,79	37,63	24,20	22,8
Lareh Sago Halaban	Halaban	38,77	86,22	45,82	28,40	32,5
Lareh Sago Halaban	Pakan Raba'a	20,41	77,36	61,56	26,70	38,8
Situjuah Limo Nagari	Situjuah	16,22	50,66	47,87	38,00	31,9
Harau	Taram	79,94	74,60	63,02	53,60	43,1
Harau	Tanjung Pati	46,77	90,02	52,41	60,20	42,5
Guguak	Dangung-Dangung	48,61	92,93	33,26	25,50	16,5
Guguak	Padang Kandis	17,74	55,23	37,28	32,30	33,9
Mungka	Mungka	31,18	47,03	47,54	20,20	13,5
Suliki	Suliki	24,83	34,83	30,30	19,10	23,5
Bukik Barisan	Maek	27,07	30,18	25,75	22,30	19,7
Bukik Barisan	Baruah Gunuang	48,94	48,85	39,06	30,80	18,0
Bukik Barisan	Banja Laweh	81,03	82,24	31,13	29,20	40,0
Gunuang Omeh	Koto Tinggi	6,30	10,30	37,23	20,30	29,7
Kapur IX	Muaro Paiti	33,33	81,91	59,79	44,80	37,1
Kapur IX	Sialang	32,92	87,61	54,71	43,00	45,6
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	44,23	84,27	45,21	32,90	27,9
Pangkalan Koto Baru	Rimbo Data	86,08	73,61	65,28	31,70	47,4
Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	97,74	52,42	63,41	35,50	47,3

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 73
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025



Sumber: Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan cakupan tertinggi pada tahun 2022. Pada tahun 2020 cakupan imunisasi dasar sebesar 41.26. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan kembali. Data terakhir menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2025 sebesar 28,2%.

vii. Cakupan kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 111
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021–2025

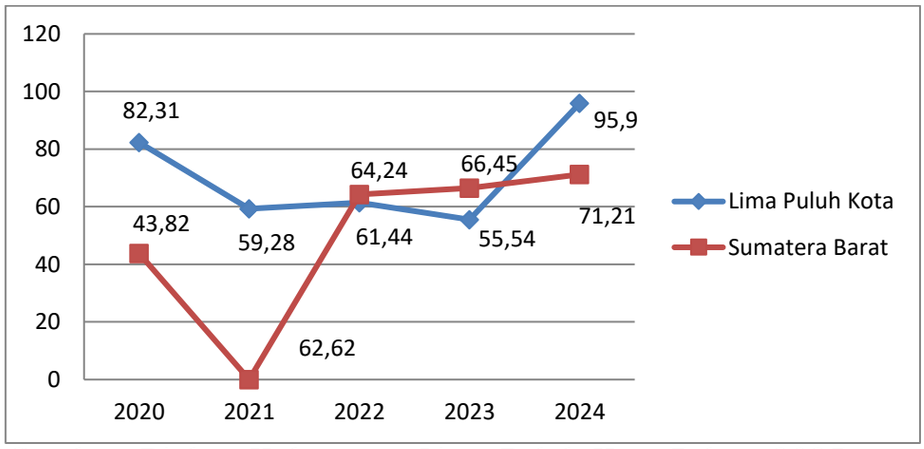
Wilayah	Kepesertaan JKN (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lima Puluh Kota	59,28	61,44	55,54	95,9	95,6

Sumber Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta

aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2024 sebanyak 386.371 orang.

Grafik 2. 74
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

viii. Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2025, untuk tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,25. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 401.086 jiwa, yang mampu ditampung di RS Rujukan hanya sebanyak 101 orang.

ix. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten Sampai dengan Tahun 2025, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

x. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar atas jumlah orang yang berumur 15-59 tahun di kabupaten. Merujuk

kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2025 di kabupaten lima Puluh Kota baru berada pada angka 29 %, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15-59 tahun, baru 29 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xi. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar terhadap jumlah warga negara usia 60 tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 100 %, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 100 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xii. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah penderita DM di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2025 di kabupaten lima Puluh Kota berada pada angka 101,01 %, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah lebih dari 100 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xiii. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

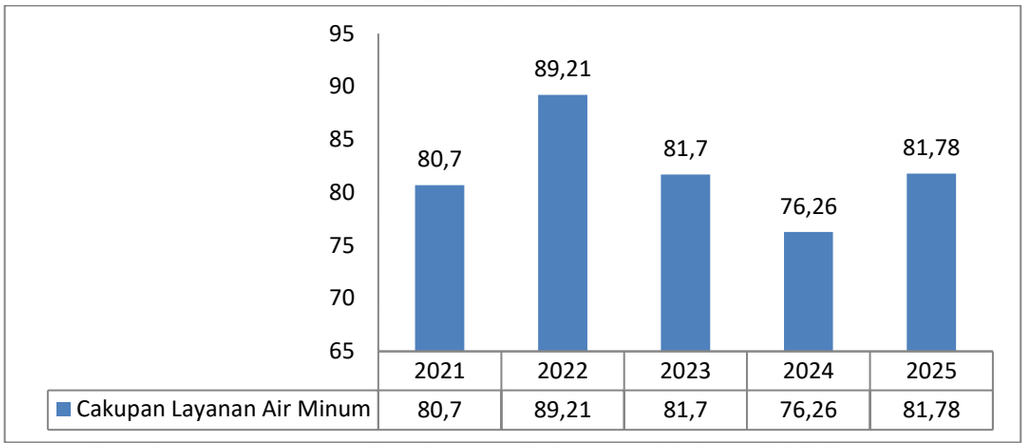
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar terhadap jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 100%, artinya dari 100 orang dengan risiko terinfeksi HIV, baru 100 orang yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

i. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 75
Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota
2021 – 2025



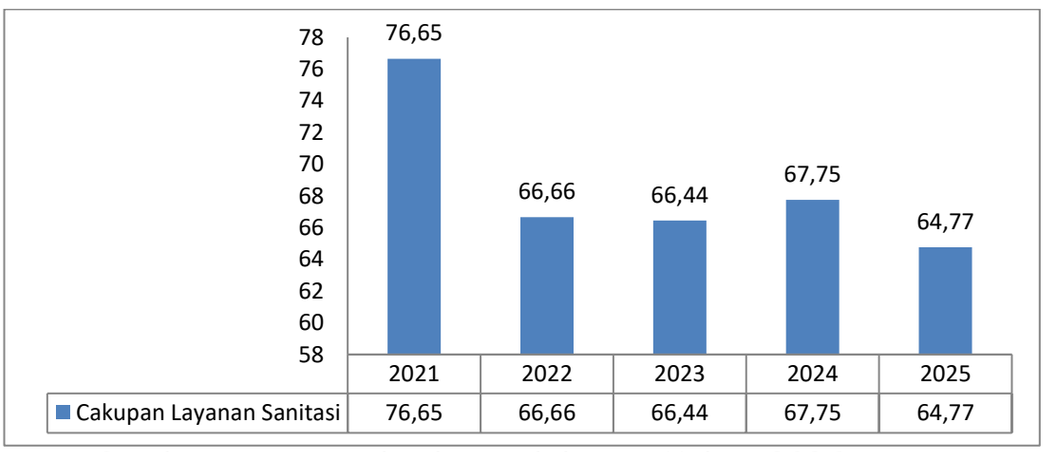
Sumber: DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi pada kurun tahun 2021-2025.

ii. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 76
Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2025



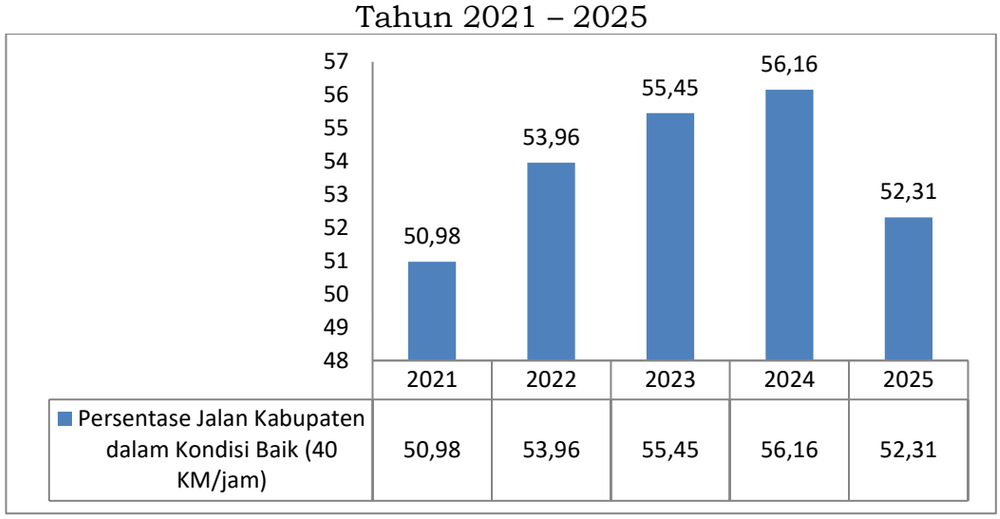
Sumber: DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Sama dengan air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah 64,77%. Hal ini berarti terjadi penurunan dari tahun 2024 yang memiliki capaian sebesar 64,77%.

iii. Kondisi Jalan Kabupaten

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten kondisi baik dan tingkat kemantapan Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 2. 77
Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik
Tahun 2021 – 2025

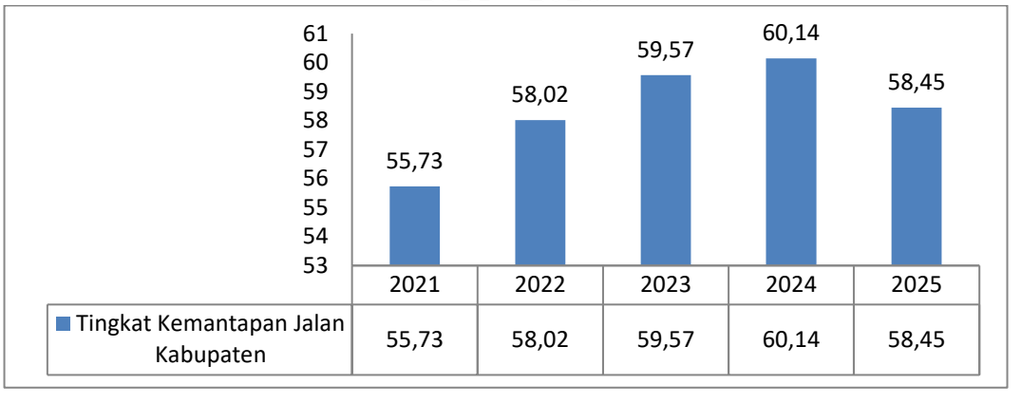


Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 52,31 % dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.101,20 km. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara di daerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk. Di samping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah–tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.

Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 78
Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik
2021 – 2025



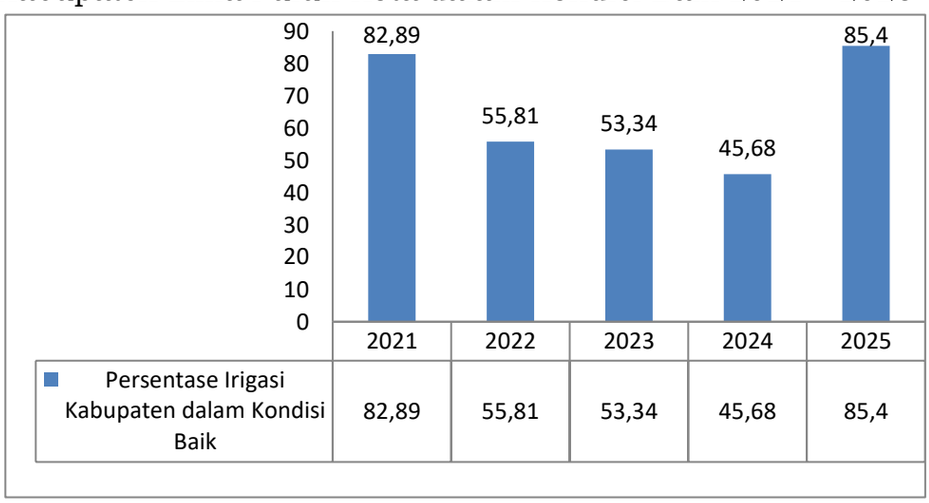
Sumber: DPUPR Tahun 2026

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2024 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 55,73 % pada tahun 2020 meningkat menjadi 60.14% pada tahun 2024 tetapi menurun pada tahun 2025 menjadi 58,45%.

iv. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2. 79
Persentase Daerah Irigasi
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2021 – 2025



Sumber: DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Grafik di atas bahwa persentase ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

v. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai niai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2025, baru 76,09% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal.

vi. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten merupakan persentase luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten terhadap luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten. Merujuk kepada maksud dari indikator ini, maka untuk tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini baru mencapai angka 41,36 %, artinya dari semua Kawasan permukiman yang rawan terkena banjir, baru 41,36% nya yang sudah memiliki infrastruktur pengendalian banjir.

vii. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi merupakan persentase atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya. Indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi untuk tahun 2025 memiliki nilai capaian 99,32 %.

D. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pusat Pelayan Lingkungan (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2024-2029. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta

dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut. Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut:

Tabel 2. 112
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota

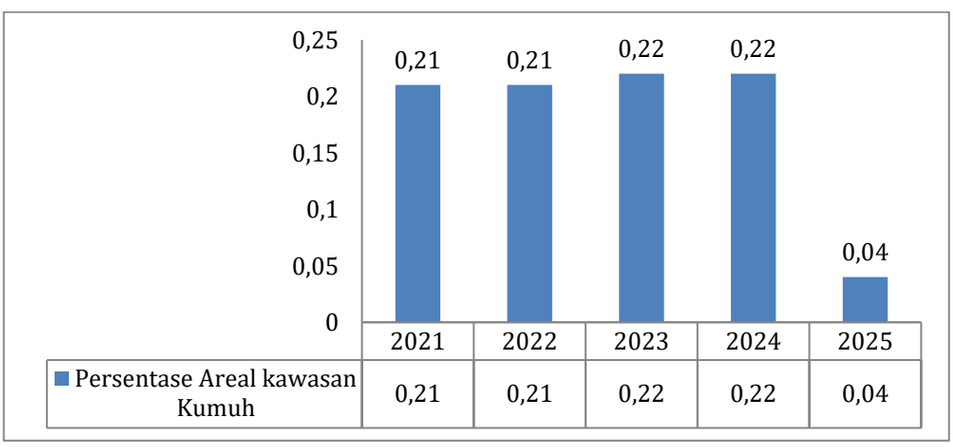
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Rumah Layak Huni	0,173	0,202	0,197	0,177	0,123

Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,042 dari tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2025 karena adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin banyak rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah ke depannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik. Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya migrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar. Di samping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga memperhatikan kondisi lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 80
Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021- 2025



Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan.

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 113
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
1. Penertiban PSK/Tunasusila	2
2. Penertiban Minuman beralkohol/tuak	3
3. Penertiban Cafe	9
4. Penertiban pelajar	3
5. Penertiban izin usaha	3
6. Penertiban pedagang kaki lima	1
7. Sosialisasi tertib izin usaha, lingkungan, dan pelajar	4
Total Kasus Penegakan Perda	14

Sumber: SatpolPP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Adapun selama tahun 2024 ada satu Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat Selama tahun 2024, terjadi 14 kasus pelanggaran perda yang ditertibkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di atas. Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), walaupun tidak merupakan kewenangan langsung Daerah, perlu juga ditampilkan datanya untuk menggambarkan kondisi di Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun berdasarkan data Polres, yang melapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 114
Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pembunuhan	1	-	-	1	1
2.	Curas	5	1	2	6	11
3.	Pemerkosaan dan pembunuhan	-	-	-	-	2
4.	Curat	30	51	61	48	135
5.	Pencurian Bias	20	40	37	135	135
6.	Penganiayaan Berat	9	16	31	42	42
7.	Penganiayaan	26	40	85	147	147
8.	Pengrusakan	5	11	11	21	21
9	Penghinaan Ringan	1	-	1	3	3
10.	Penipuan	5	21	15	18	18
11.	Curanmor	27	18	29	26	26
12.	Setubuhan-perbuaatan cabul	5	4	9	0	0
13.	Perjudian	5	12	2	6	6
14.	Asusila-bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	12	-	12	11	11
15.	Penggelapan	16	15	21	68	68
16.	Pengancaman	1	4	13	9	9
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	-	-	6	3	3
18.	Pemerkosaan	-	-	-	3	3
19.	Kawin Liar	-	-	-	1	1
20.	Pengeroyokan	6	17	34	16	16
21.	Narkotika	34	-	49	113	113
22.	Pemalsuan	-	-	2	2	2
23.	Perampasan tanah	2	3	6	6	6
24.	Pencemaran Nama Baik	1	2	3	3	3
25.	Bunuh Diri	-	1	5	1	1
Jumlah		905	852	211	434	697

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dimana laporan tertinggi untuk gangguan kamtibmas adalah pencurian biasa sedangkan pada tahun 2025 untuk pemerkosaan dan pembunuhan 2 ada laporan.

i. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah dengan risiko sedang (197,52) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 0,34 (rendah). Kinerja dan realisasi penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 115
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Bencana Tahun 2025

No.	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Penurunan Indeks risiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	119,2	197,52
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	0,27	0,34

Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

ii. Sub Bidang kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tahun 2024 adalah 100%. Target dan Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 116
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Kebakaran

No.	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	100%	70%

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2026

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama). Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya 1 (satu) kecamatan mempunyai 1 (satu) Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 117
Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama Posko	Wilayah Kerja
1.	Induk	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru
2.	Harau	Kecamatan Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak
4.	Mungka	Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka
5.	Suliki	Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan
6.	Pangkalan	Kecamatan Pangkalan
7.	Kapur IX	Kecamatan Kapur IX

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2026

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari laporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran. Untuk tahun 2025, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 9 menit 38 detik.

F. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan pada peningkatan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, maupun perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak seperti bencana. Target dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib sosial tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 8 indikator yang diukur, sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama pada indikator penanganan PMKS, pemenuhan kebutuhan dasar, serta bantuan sosial bagi korban bencana. Namun demikian, masih terdapat 1 indikator dengan capaian 0%, yaitu evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Secara umum, capaian penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 118
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025	Catatan Analisis
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	95,10	90,94	-
2	Persentase PMKS yang tertangani	95,10	96,2	-
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95,10	95,85	-
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	-
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0	-
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	97,2	97,2	-
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	17	15,07	-
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100	100	-

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025	Catatan Analisis
	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.4.4.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian bersama, kepesertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Perkembangan dari informasi ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 119
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

No.	Uraian	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3	3
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	37	33
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	13482	41.827
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48	346
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	32	0

Sumber: Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2025, hanya 3 indikator yang mencapai target yaitu angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasus yang diselasaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Dilihat dari pencari kerja yang ditempatkan, capaian tahun 2024 masih belum memenuhi target kinerja yang diharapkan. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan, masih belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 120
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,76	70
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5,71	5.71
3	Rasio KDRT	0,002	0.00002929952169
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,267	94,267
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	Tidak terdapat data di UPTD PPA/DP2KBP3A (Data Rehabilitasi Sosial Berada Di DINSOS
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	100	100

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
	mendapatkan layanan bantuan hukum		
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	Tidak ada data (tidak ada layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan tahun ini)
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0013	34,4
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	-	22,22%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari 12 indikator urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencapai target ada 8 indikator. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT tahun 2025 adalah 0,002 artinya ada 2 KDRT yang dilaporkan per 1.000 rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator yang belum mencapai target adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, Partisipasi angkatan kerja perempuan dan persentase ARG (Anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD). Hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang lebih sehingga Lima Puluh Kota yang madani bisa dicapai. Terkait dengan kinerja perlindungan anak, maka indikator yang biasa digunakan adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan diciptakannya Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya antara lain untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten atau kota. Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan di daerah termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk itulah, maka sejak tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen dan ikut mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

C. Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ada 4 indikator. Terdapat 1 dari 4 indikator yang mencapai target pada tahun 2025. 1 indikator yang mencapai target tersebut adalah persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) yang tercapai 109,1%. Target dan capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 121
Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/ka/thn)	423,55	263,73
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (Kg/ka/thn)	5.951,64	5.600,35
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	87	63,64
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	109,1	109,1

Sumber: Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

D. Urusan Wajib Pertanahan

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Capaian indikator Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 122
Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan.

E. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib non pelayanan dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 123
Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,51	71,87	71,63	74,88	78,91
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,50	55,63	50,92	61,92	76,55
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,53	92,00	90,24	93,65	83,17
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,54	62,53	62,67	62,42	75,07

Sumber: DLHPKP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Untuk urusan wajib lingkungan hidup, terdapat 4 indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2025 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi.Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 124
Capaian pengurangan dan penanganan sampah
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah (ton/tahun)	56.295,41	55.954,79	56.964,67	58.558,56
2	Pengurangan (ton/tahun)	10.142,58	11.697, 77	12.564,01	10,878,90

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
3	Penanganan (ton/tahun)	6.898	7.665,00	6.851,05	3,650
4	Sampah yang tertangani	17040,58	19362,77	19415,06	10.979,90
5	Persentase sampah yang tertangani	30,27%	34,60%	34,08%	18,58%

Sumber: SIPSN Tahun 2024

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan tabel diatas, persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan di tahun 2024 pasca ditutupnya TPA Regional Payakumbuh.

F. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 125
Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,87	98,41
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	96,24	96,93
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,87	98,41
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	50.72	52,20
7	Perekaman KTP Elektronik	98,99	98,61
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	47,33	69,58
9	Kepemilikan akta kelahiran	8420	7671

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari sembilan indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, enam indikator sudah mencapai target. Keenam indikator tersebut adalah Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun), Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan akta kelahiran, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran.

G. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bawah telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah: (1) Layanan Dasar; (2) Sosial; (3) Ekonomi; (4) Lingkungan; (4) Aksesibilitas; (5) Tata kelola pemerintahan desa.

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2021-2025 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 126
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79
2025	0	0	2	8	69	79

Sumber: KemendesPDTT Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2025 sudah 87,34% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status berkembang yaitu Nagari Galugua dan Nagari Koto Lamo. Walaupun Indeks Desa

Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

H. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target dan capaian kinerja indikator urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 127
Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Laju pertumbuhan penduduk	0.93	1.19
2	Total Fertility Rate (TFR)	2.37	2,38
3	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	47%	100%
4	Rasio Akseptor KB	1:4	1:1,54
5	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	59,6	64,7
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	15,1	14,03
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,4	0,34
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,88	15,3%
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32,78	27,8%
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	82	100%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84	83%
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84	79%
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	13	13%
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	78	100%
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	66	70%
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	1:1	1:1

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100%
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100%
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100%
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	70	90%
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	70	70%
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	74,6	61,4%

Sumber: BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

I. Urusan Wajib Perhubungan

Pada pencapaian target dan kinerja urusan penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2024, dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target. Indikator-indikator yang mencapai target tersebut antara lain Rasio ijin trayek, Jumlah uji KIR Angkutan Umum, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Untuk indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum, Persentase layanan angkutan darat dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, ketiganya tidak terealisasi karena tidak terlaksananya survei untuk memperoleh data terkait, dan indikator pemasangan rambu tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak terealisasi dikarenakan operasional terminal telah dihentikan berdasarkan Pemberitahuan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 551.2/003/Pras/I/2022 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 538/SK/Pras.IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 128
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-
2	Rasio ijin trayek	3,53	5.66
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	7147	6867
4	Persentase layanan angkutan darat	-	0.01%
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	92,25 %	99,82%
6	Pemasangan Rambu-rambu	-	-
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	-
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2026

J. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Target dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib komunikasi dan informatika tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 4 indikator yang diukur, 3 indikator telah mencapai bahkan target, yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 87,74 dari target 81, Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 3,39 dari melebihi target 3,50 yang menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, serta persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang tetap terjaga pada angka 100%. Sementara itu, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target, yaitu cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan yang pada tahun 2025 belum terealisasi (0%) dari target 20%.

Belum tercapainya target SPBE tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain manajemen risiko SPBE yang masih berada pada level 2 dan evidence yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tata kelola sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE, penerapan kompetensi SDM SPBE yang masih pada level 2 dan belum didukung pendanaan yang memadai serta belum menjadi prioritas dalam peningkatan keterampilan TIK dan digitalisasi, serta audit TIK yang masih berada pada level 2, dimana pelaksanaannya belum memenuhi standar dan petunjuk teknis audit TIK, baik audit aplikasi, infrastruktur, maupun keamanan sistem. Selain itu, indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan pada tahun 2025 belum terealisasi (0%) dari target 20%. Secara umum, capaian urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota, meskipun masih

diperlukan penguatan pada aspek tata kelola SPBE dan pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Secara umum, capaian urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari 4 indikator pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, 3 diantaranya sudah mencapai target. Satu indikator yang belum mencapai target adalah Cakupan pegembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan yang masih tercapai 15 dari target sebanyak 18. Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan *blank spot* di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni.

Tabel 2. 129
Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur
Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
1.	Aia Angek disamping monumen Bela Negara	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
2.	Jorong Landai	Harau	Harau
3.	Jorong Sungai Data	Harau	Harau
4.	Jorong Baliak	Simpang Sugiran	Guguak
5.	Jorong Mudiak Liki	Kurai	Suliki
6.	Jorong Nenan	Maek	Bukit Barisan
7.	Jorong Galugua	Galugua	Kapur IX
8.	Jorong Koto Tangah	Galugua	Kapur IX
9.	Jorong Tanjung Jajaran	Galugua	Kapur IX
10.	Jorong Monga	Galugua	Kapur IX

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah *blank spot* adalah :

1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo.
2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubung seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga di sepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi.

Terkait dengan ketersediaan akses internet di perangkat daerah, diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dimana pada tahun 2023 telah mencapai angka 100%, sedangkan terkait indikator Persentase masyarakat yang menjadi

sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota, untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencapai angka 166%.

K. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan. Selama lima tahun terakhir, jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, jumlah koperasi tercatat sebanyak 348 koperasi. Dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah koperasi sebanyak 131 koperasi dalam kurun tahun 2021-2025. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 130
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi	217	219	220	254	348
2	Koperasi Aktif	132	134	134	122	216
3	Koperasi Tidak Aktif	85	85	86	132	132

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Jika dilihat dari Persentase koperasi aktif per tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, maka tidak terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif sebesar 58,96 dan pada akhir tahun 2025 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 62,06% Penyebab dari naikknya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut memiliki *business plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di atas.

Tabel 2. 131
Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1.	2021	8.258
2.	2022	8.302
3.	2023	8.431
4.	2024	8.650
5.	2025	8.777

Sumber: Dinas Perdakop dan UKM Tahun 2026

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8.258 usaha, sementara pada akhir tahun 2025 menjadi 8.777 unit. Jika ditinjau jumlah usaha mikro selama rentang waktu 5 tahun terakhir, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omset usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omset dan aset dipengaruhii oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak.

Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan Dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya. Di samping permasalahan di atas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru.

L. Urusan Wajib Penanaman Modal

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi. Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2025 adalah 5.802 investor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 132
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan
Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	5.274	5.802
2	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA)	3.211.247.219.777	649.001.231.189
3	Nilai Realisasi PMDN	545.605.223.435	455.785.540.521
4	Nilai realisasi PMA	1.293.754.918	1.316.297.400

Sumber: DPMPTSP Tahun 2025

M. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan wajib kepemudaan dan olahraga tahun 2025, jika dilihat dari 6 indikator urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2025 realisasi keenam indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 133
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	61	65
2	Persentase wirausaha muda	0,10	0.12
3	Cakupan pembinaan olahraga	9	11
4	Cakupan pembinaan atlet muda	243	250
5	Jumlah atlet berprestasi	155	127
6	Jumlah prestasi olahraga	54	127

Sumber: Disparpora Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

N. Urusan Wajib Statistik

Capaian indikator penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sudah mencapai 100 persen. Hal ini berarti keseluruhan OPD, yaitu sebanyak 42 yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2. 134
Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

O. Urusan Wajib Persandian

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Persandian yaitu Persentase penyelenggaraan Persandian. Capaian indikator Persentase penyelenggaraan Persandian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 135
Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Indikator	Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	0	35.91%	38.29%	37,98%	45,63%

Sumber: Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian indikator menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian masih 0%, kemudian meningkat menjadi 35,91% pada tahun 2022 dan 38,29% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 37,98%, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 45,63%.

Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kenaikan capaian pada tahun 2025 menjadi indikator bahwa upaya penguatan sistem keamanan informasi, pengelolaan persandian, serta penerapan standar keamanan informasi telah memberikan hasil yang positif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan berkelanjutan agar tingkat keamanan informasi dapat mencapai kondisi yang lebih optimal sesuai target pembangunan daerah.

P. Urusan Wajib Kebudayaan

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 3 kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian penyelenggaraan urusan kebudayaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 136
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	5
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	70	4
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	25
5	Terlestarikannya cagar budaya	85	90

Sumber: Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Q. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 137
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi Capaian	
		2024	2025
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	9,136	7.572
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	25,975	27.341
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,09	0,09

No	Indikator	Realisasi Capaian	
		2024	2025
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	2,30	1,89
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10,906	11.734
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	9	11
7	Nilai tingkat kegemaran membaca	79,67	58,29
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	89,72	19,87

Sumber: Dispusip Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, sebagian indikator kinerja urusan perpustakaan telah menunjukkan capaian yang baik. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2025 tercatat sebanyak 7.572 pengunjung, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.548 pengunjung. Demikian pula jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, serta nilai tingkat kegemaran membaca telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, rasio perpustakaan per satuan penduduk, dan jumlah koleksi judul buku perpustakaan masih belum mencapai target RPJMD. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Secara umum, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan cukup baik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia perpustakaan yang memadai. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan pemerataan layanan perpustakaan, memperkaya koleksi bahan bacaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber literasi. Ke depan, diperlukan berbagai inovasi dalam pengembangan layanan perpustakaan dan literasi masyarakat, termasuk penguatan perpustakaan berbasis komunitas, optimalisasi perpustakaan sekolah dan desa, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan budaya baca dan kualitas literasi masyarakat secara berkelanjutan.

R. Urusan Wajib Kearsipan

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 138
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	36,07	37,70
2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	128	0
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	54,06	76,55
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	23,97	16,67

Sumber: Dispusip Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan, yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku, Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan, Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional, serta Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2025, dua indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku dan Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan

Akuntabilitas Kinerja. Sementara itu, indikator Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip masih belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan kearsipan telah menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek, namun masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam pengembangan kapasitas SDM kearsipan serta penguatan pengelolaan dan pelestarian arsip untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tertib arsip.

2.4.4.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Perikanan

Capaian konsumsi ikan untuk tahun 2025 adalah 42,03 KG/Kapita/Tahun. Hal ini berarti bahwa capaian hampir mencapai target. Realisasi capaian konsumi ikan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 139
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	40,24	42,03

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

B. Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannnya kepada dua indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 473.922 orang, yang terdiri atas 472.399 wisatawan nusantara (Wisnu) dan 1.523 wisatawan mancanegara (Wisman). Kunjungan wisata didominasi oleh wisatawan nusantara dengan kontribusi lebih dari 99 persen dari total kunjungan. Jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada Januari sebanyak 93.526 wisatawan, diikuti April sebanyak 82.861 wisatawan, sedangkan kunjungan terendah tercatat pada Maret sebanyak 4.902 wisatawan. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada Desember sebanyak 394 orang. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat bergantung pada pasar wisatawan domestik, dengan pola kunjungan yang berfluktuasi sepanjang tahun. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 140
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Bulan	Wisnu	Wisman	Jumlah
Januari	93.472	54	93.526
Februari	53.911	33	53.944

Bulan	Wisnu	Wisman	Jumlah
Maret	4.852	50	4.902
April	82.782	79	82.861
Mei	44.873	105	44.978
Juni	48.168	89	48.257
Juli	41.418	150	41.568
Agustus	17.138	215	17.353
September	18.750	115	18.865
Oktober	18.919	74	18.993
November	22.098	165	22.263
Desember	26.018	394	26.412
Jumlah	**472.399**	**1.523**	**473.922**

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

C. Urusan Pilihan Pertanian

Terhadap komoditas padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada tahun 2025, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 7.546 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan luas panen 269,4 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 141
Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.061	2.095	7.841,4	3,74
2	Suliki	2.399	2.089	8.676,5	4,15
3	Bukik Barisan	3.334	3.929	13.780	3,51
4	Guguak	4.166	4.625	18.345	3,97
5	Mungka	2.225	2.107	8.775,6	4,16
6	Payakumbuh	4.215	4.516	19.033	4,21
7	Akabiluru	3.843	4.024	16.481	4,10
8	Luak	3.583	3.361	14.091	4,19
9	Situjuah Limo Nagari	3.888	4.288	18.048	4,21
10	Lareh Sago Halaban	6.115	5.280	22.782	4,31
11	Harau	7.687	7.546	32.664	4,33
12	Pangkalan	459	533,5	1.678	3,15
13	Kapur IX	175	269,4	807,43	3,00
Jumlah		44.149	44.662,9	183.002,93	4,10

Sumber: Distanhotbun Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari sisi produktivitas komoditas padi tahun 2025, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,10 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk, serta permodalan.

D. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sekitar 15,76 % terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan tumbuh sekitar 5,33%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 15,76% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan. Berbicara mengenai perdagangan tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Capaian persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku untuk tahun 2024 adalah 9,6%. Capaian ini belum mencapai target sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 142
Capaian Penyelenggaraan Urusan
Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2025
1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	9,77%

Sumber: Dinas PerdaKop dan UKM Tahun 2026

Pada tahun 2025, tidak ada data mengenai pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

E. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2021-2025, kontribusi sektor industri terhadap PDRB

cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel, kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2025 sebesar 6,85%.

Tabel 2. 143
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,49	6,47	6,51	6,65	6,85

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spinner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Kemudian memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2. 144
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2021 – 2025

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Pangan	1.270	267	917	238	47
2	Industri Sandang dan Kulit	281	80	39	11	6

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	6.010	38	52	12	14
4	Industri Logam dan Elektronika	77	36	38	36	5
5	Industri Kerajinan	223	15	11	7	3
Jumlah		7.861	436	1.057	304	75

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

i. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 145
Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,37
2.	Pengukuran Kinerja	30%	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,26
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,24
	Nilai Hasil Evaluasi	**100%**	**62,09**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Sumber: Bappelitbangda, Inspektorat Setda, LHE, 2025

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,09 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama,

namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 146
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Peringkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2021 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendapat predikat "B" sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, yang berarti selama empat tahun terakhir akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun masih perlu perbaikan, baik terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun terkait evaluasi internal dan capaian kinerja daerah.

ii. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 147
Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,09	86,55	87,26	86,40	87,01

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Tabel, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 83,99 dan meningkat menjadi 84,09 pada tahun 2021. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 86,55, kemudian kembali meningkat menjadi 87,26 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai IKM mengalami sedikit penurunan menjadi 86,40, namun masih berada pada kategori pelayanan yang baik. Selanjutnya pada tahun 2025 nilai IKM kembali meningkat menjadi 87,01.

Secara keseluruhan, nilai IKM tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian tersebut masih relatif tinggi dan mampu kembali ditingkatkan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya

peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

iii. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah 72,89 dengan kategori "BB". Dari nilai ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks dari tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai 75,00 predikat "BB" pada tahun 2026. Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 148
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	51,81 (CC)	58,5 (CC)	70.81 (BB)	71,23 (BB)	72,89 (BB)

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2026

iv. Potensi Zakat

Berkaitan dengan potensi zakat, realisasi penerimaan selama 5 tahun terakhir jika ditinjau dari jumlah orang mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, penerimaan zakat ditargetkan sebanyak 7.426 orang dan terealisasi sebanyak 70.472 orang dengan rincian sebesar Rp.10.793.229.835. Jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.156.829.500 kepada sebanyak 21.190 orang. Untuk potensi penerimaan Zakat dari ASN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.12.053.760.000,-. Sedangkan untuk *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum dikumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 149
Data Target dan Penerimaan Zakat
Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2021-2025

No	Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Jumlah Dana Yang Disalurkan		Potensi Penerimaan Zakat ASN	
		Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1	2020	4.500	4.640.000.000	1.692	3.978.733.270	8.084	3.924.103.900	6.241	10.241.550.000
2	2021	3.842	4.645.000.000	4.014	4.377.238.897	7.125	4.734.792.837	6.241	10.241.550.000
3	2022	4.779	7.008.000.000	4.028	4.358.000.632	7.311	4.283.003.079	6.241	10.241.550.000
4	2023	9.430	8.000.000.000	15.955	6.022.017.170	7.461	4.586.991.434	6.241	10.241.550.000
5	2024	7.426	7.000.000.000	70.472	10.793.229.835	21.190	9.156.829.500	6.278	12.053.760.000

Sumber: Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun, belumlah disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini.

v. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan Surau. Dari data tahun 2025, jumlah anak yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 47.999 murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 38.113 murid, pada MDTA sebanyak 8.178 murid dan pada surau 1.708 murid. Jumlah dan jumlah murid secara rinci pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 150
Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2025

No	KECAMATAN	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
1	Guguak	127	2.193	81	1.252	4	80
2	Akabiluru	134	2.413	53	1.058	-	-
3	Harau	286	5.948	10	185	76	1.435
4	Kapur IX	180	3.106	-	-	-	-
5	Lareh Sago Halaban	282	4.850	24	389	7	170
6	Luak	155	2.907	5	91	-	-
7	Situjuah Limo Nagari	159	2.775	3	110	-	-
8	Suliki	107	1.870	68	1.064	-	-
9	Mungka	124	2.165	29	512	-	-
10	Bukik Barisan	111	2.153	87	1.907	-	-
11	Gunuang Omeh	75	1.274	41	737	1	23
12	Pangkalan Koto Baru	116	2.934	6	202	-	-
13	Payakumbuh	197	3.525	40	671	-	-
	JUMLAH	2.053	38.113	447	8.178	88	1.708

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru mengaji dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak dari guru dan murid ada pada TPQ, dimana jumlah gurunya sebanyak 2.053 orang dengan jumlah murid sebanyak 38.113 orang. Jumlah guru dan murid terbanyak selanjutnya terdapat pada MDTA dengan jumlah guru sebanyak 447 orang dan jumlah murid sebanyak 8.178 murid. Sedangkan untuk surau sebanyak 88 orang guru dengan jumlah murid 1.708 orang. Jika dilihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut. Adapun perkembangan jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151
Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2025

No.	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid	2021	2022	2023	2024	2025*
1.	TPQ	805	870	880	879	879
2.	MDTA	136	141	126	137	137
3.	Surau	24	25	42	44	44
4.	Masjid	419	429	430	435	435

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Tahun 2025
**data sementara*

Untuk data tahun 2025 untuk jumlah TPQ/MDTA/Surau/ Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota digunakan data sementara, Jika dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai 2025 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 152
APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025*
1.	APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun	67,94	76,39	72,69	77,52	77,52

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Tahun 2025
**data sementara*

Pada tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 77,52. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih rendah, masih ada sekitar 23 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka

peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya tetap memberikan insentif berupa honor kepada guru-guru TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin, agar mereka lebih bersemangat dan bergairah untuk tetap mengajar di lembaga tersebut, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah pada pendidikan agama khususnya pendidikan Al Qur'an.

Di samping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Didikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten. Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya Aktivitas Masjid/ Musholla/ Surau/MDA/TPQ" juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan mencapai target di tahun 2025 baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga sudah terintegrasi pada tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 153
Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi	ada	ada

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
	pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dipenuhi untuk tahun 2025. Setiap dokumen perencanaan yang ada selalu ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Sedangkan untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tersedia di Dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 2. 154
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian	
		2024	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Walaupun semua target di tahun 2025 tercapai, bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan. Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

B. Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel 2.127.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar *(adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2. 155
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68	95.771.634.112,99	**140.241.668.028**
Pendapatan	1.260.792.546.305,96	1.142.618.819.349,64	1.262.125.884.491,68	1.292.646.891.093,99	**1.320.593.986.932**
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	6,33	7,26	8,08	7,36	10,61

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2026

C. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 156
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN	52,66	52,72	59,51	77,55	75,72

Sumber: BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 nilainya adalah 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 59,51 dan meningkat tajam pada tahun 2025 menjadi 75,72.

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penunjang pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu sub bidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini.

Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017.

Tabel 2. 157
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2021	28,81	Kurang Inovatif
2.	2022	47,47	Inovatif
3.	2023	37,84	Inovatif
4.	2024	45,72	Inovatif
5.	2025	48,35	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meskipun terdapat perbedaan interval penilaian pada beberapa tahun, capaian kinerja inovasi daerah dapat dilihat dari predikat yang diperoleh. Pada tahun 2021, Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh predikat Kurang Inovatif. Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten memperoleh predikat Inovatif, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan inovasi daerah.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengembangan inovasi daerah telah berjalan dengan baik. Namun demikian, peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi perlu terus dilakukan melalui penguatan fungsi penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan hasil kajian dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan inovasi juga perlu terus ditingkatkan agar inovasi yang dihasilkan dapat

memberikan manfaat yang lebih luas dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 158
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan
Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	66,67	0
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	50	33,33
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	55,88	26,53

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari 4 indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan (penelitian dan pengembangan), seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu melakukan upaya yang lebih baik dalam hal implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

i. Pengawasan

Terdapat 3 indikator capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Persentase tindak lanjut temuan ekstern dan intern masing-masing memiliki capaian sebesar 82,09% dan 78%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 159
Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	
		2024	2025
1	Persentase tindak lanjut temuan		
	- Ekstern	83,3	85,09
	- Intern	77	72,71
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berada pada level 3, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (*governance, risk Manajement, and control*), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

i. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah yaitu :

a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

2.4.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 100%. Hal ini karena adanya adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong
2. Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena:
    - Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela

Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

3. Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada tercapai 97% hal ini disebabkan kerja sama yang FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh karena :dan capaiannya yang terendah adalah persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyuluhan narkoba dan minuman keras.
    - Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
    - Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
    - Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
    - Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.

Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi: 1) Penyusunan perencanaan, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunanDaerah.; (2) Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; (3) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; (4) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan (5) Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunanDaerah; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi dan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah merupakan hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2026, dilakukan terhadap evaluasi hasil rencana pembangunan daerah tahun 2026 sampai dengan Triwulan I yang dihubungkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2026, dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 (RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029). Evaluasi dan pengendalian ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya yaitu perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah Tahun 2026 sampai Triwulan I adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2026 sampai Triwulan I dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilihat dari capaian pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.160 berikut:

Tabel 2.160

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**3.340.051.157.300**		**558.400.987.049**		**535.523.122.649**		**84.387.154.022**	**0,00**	**15,76**		**84.387.154.022**	**0,00**	**2,53**		
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.646.950.185.085**		**466.173.894.679**		**464.712.141.899**		**84.387.154.022**	**0,00**	**18,16**		**84.387.154.022**	**0,00**	**5,12**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		98,96		100		18,32		18,32		18,32		18,32			
2.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			918.514.669		14.253.000		15.020.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			213.967.796		5.280.000		5.660.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
4.	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			103.211.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
5.	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			103.211.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
6.	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			103.211.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
7.	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			103.211.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
8.	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			172.421.871		2.875.000		3.350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
9.	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			119.279.002		6.098.000		6.010.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
10.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.617.712.617.276		465.946.528.012		464.244.981.799		84.381.925.022	0,00	18,18		84.381.925.022	0,00	5,22		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
11.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.617.403.353.499		465.941.994.012		464.238.985.799		84.381.925.022	0,00	18,18		84.381.925.022	0,00	5,22		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4400		4.300		4300		0		0,00		0		0,00			
12.	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			190.765.856		4.534.000		5.996.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
13.	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			118.497.921		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
14.	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			886.635.232		4.843.000		16.350.000		5.229.000	0,00	31,98		5.229.000	0,00	0,59		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
15.	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			886.635.232		4.843.000		16.350.000		5.229.000	0,00	31,98		5.229.000	0,00	0,59		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
16.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.741.152.881		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
17.	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.830.697.141		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
18.	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.191.268.141		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45		0		0		0		0,00		0		0,00			
19.	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1.719.187.599		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
20.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.371.685.224		30.941.000		118.935.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
21.	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			535.968.761		6.901.000		8.205.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
22.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.982.233.054		24.040.000		62.601.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
23.	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.901.053.899		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
24.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		-		1.167.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
25.	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			1.728.694.069		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
26.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.223.735.441		-		46.961.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
27.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.222.848.029		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
28.	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.824.051.316		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
29.	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			928.021.339		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
30.	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			344.985.903		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
31.	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			619.848.208		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
32.	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			508.398.985		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
33.	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			691.985.903		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
34.	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.305.556.375		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
35.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.960.256.627		161.168.667		191.905.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
36.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			87.535.724		2.480.000		2.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
37.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			437.977.013		122.688.667		147.240.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
38.	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			219.848.208		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
39.	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.214.895.682		36.000.000		42.165.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
40.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.136.475.147		16.161.000		124.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)																
41.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			587.588.945		16.161.000		45.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
42.	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.360.496.238		-		60.650.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
43.	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.783.775.269		-		9.350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
44.	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			468.753.984		-		9.900.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
45.	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.150.216.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
46.	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			426.493.339		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
47.	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			359.150.472		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
48.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**1.688.699.528.315**		**92.208.995.370**		**70.748.761.750**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (%)	90,94		86		89,33		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	89,53		49,01		70,82		0		0,00		0		0,00			
			Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	82,98		75		80,67		0		0,00		0		0,00			
			Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100		81,54		97,5		0		0,00		0		0,00			
49.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			822.886.677.081		54.965.862.537		39.907.835.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)																
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)																
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)																
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)																
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)																
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)																
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)																
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)																
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)																
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)																
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
50.	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			26.743.875.362		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
51.	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			32.603.334.162		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
52.	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			57.342.026.093		3.558.607.400		750.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	39		39		3		0		0,00		0		0,00			
53.	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			20.533.689.966		209.774.276		500.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
54.	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			19.821.833.788		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
55.	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			22.682.333.913		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
56.	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			52.905.873.117		2.155.799.595		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	5		5		5		0		0,00		0		0,00			
57.	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			16.818.297.392		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
58.	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			8.615.003.114		243.689.949		298.210.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	380		270		373		0		0,00		0		0,00			
59.	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.138.123.335		180.003.403		226.449.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	13		1		1		0		0,00		0		0,00			
60.	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			4.655.040.954		721.694.910		262.828.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	450		428		450		0		0,00		0		0,00			
61.	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			9.292.133.259		355.840.200		299.293.900		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	380		336		373		0		0,00		0		0,00			
62.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			195.416.875.488		36.470.546.111		34.504.350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	380		370		373		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
63.	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			2.550.730.614		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	380		0		0		0		0,00		0		0,00			
64.	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			53.746.155.472		1.170.227.940		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	7		7		7		0		0,00		0		0,00			
65.	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			35.770.188.207		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
66.	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			3.225.332.376		53.485.000		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	380		364		373		0		0,00		0		0,00			
67.	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			2.977.959.419		9.836.000		31.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
68.	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			2.915.332.376		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	380		0		0		0		0,00		0		0,00			
69.	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			9.200.552.369		213.930.800		198.305.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
70.	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.990.697.102		8.178.000		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
71.	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.460.632.579		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
72.	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			16.752.992.385		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
73.	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1.490.714.517		47.356.000		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		3		3		0		0,00		0		0,00			
74.	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			3.140.642.852		61.982.400		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
75.	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			54.509.659.516		2.208.632.995		150.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	8		8		1		0		0,00		0		0,00			
76.	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			47.746.974.519		-		500.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
77.	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			4.698.861.706		-		36.900.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	380		0		373		0		0,00		0		0,00			
78.	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			75.843.245.024		5.295.247.741		1.999.999.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35		32		35		0		0,00		0		0,00			
79.	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			4.026.943.108		9.325.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	500		75		100		0		0,00		0		0,00			
80.	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			30.270.622.997		1.991.704.817		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	25		25		25		0		0,00		0		0,00			
81.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			496.385.288.103		22.849.875.458		19.099.467.250		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)																
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)																
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)																
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)																
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)																
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)																
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)																
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)																
82.	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			22.641.334.597		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
83.	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			24.340.476.732		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
84.	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			32.640.476.732		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
85.	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			32.536.689.366		809.941.948		300.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	14		14		14		0		0,00		0		0,00			
86.	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			22.039.335.182		1.386.440.122		1.000.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	14		14		14		0		0,00		0		0,00			
87.	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			12.400.819.828		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
88.	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			16.005.145.924		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
89.	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			15.160.692.101		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
90.	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			41.600.783.371		866.886.360		200.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7		7		7		0		0,00		0		0,00			
91.	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			48.870.020.656		1.988.500.087		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	6		6		6		0		0,00		0		0,00			
92.	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			2.718.740.157		43.145.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		360		500		0		0,00		0		0,00			
93.	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			9.779.576.922		347.163.813		179.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	67		76		100		0		0,00		0		0,00			
94.	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.974.723.772		9.900.000		40.014.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	10		4		10		0		0,00		0		0,00			
95.	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3.351.323.613		222.259.480		131.744.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	250		239		250		0		0,00		0		0,00			
96.	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			4.658.693.937		128.878.000		260.845.250		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	66		39		61		0		0,00		0		0,00			
97.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			89.381.521.502		16.870.418.716		16.691.170.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	66		61		61		0		0,00		0		0,00			
98.	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			1.261.632.579		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	66		0		0		0		0,00		0		0,00			
99.	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			3.255.199.424		21.342.000		30.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	66		30		51		0		0,00		0		0,00			
100.	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			1.387.732.662		9.916.000		35.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
101.	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			2.979.336.870		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	66		0		0		0		0,00		0		0,00			
102.	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			7.438.215.329		118.468.932		161.880.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
103.	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.763.028.601		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
104.	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.001.632.579		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
105.	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1.439.732.126		26.615.000		32.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		3		3		0		0,00		0		0,00			
106.	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			4.661.524.687		-		36.814.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	66		0		61		0		0,00		0		0,00			
107.	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			29.991.764.720		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
108.	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.911.152.068		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
109.	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			24.193.359.627		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
110.	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			24.847.630.054		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
111.	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			9.152.992.385		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
112.	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			195.407.194.484		8.831.979.519		6.530.480.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)																
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)																
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)																
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)																
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)																
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)																
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)																
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
113.	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			18.821.664.301		102.920.879		197.484.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
114.	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			16.575.997.132		147.630.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
115.	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			12.543.246.876		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
116.	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			1.767.862.587		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	500		0		0		0		0,00		0		0,00			
117.	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			1.261.632.579		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
118.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			3.941.041.201		124.803.339		144.039.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	90		86		90		0		0,00		0		0,00			
119.	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			2.782.041.991		52.778.939		50.945.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	301		86		90		0		0,00		0		0,00			
120.	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			28.870.018.707		5.412.230.058		5.133.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	301		295		296		0		0,00		0		0,00			
121.	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.123.486.004		32.114.000		85.045.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	301		63		65		0		0,00		0		0,00			
122.	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			2.800.647.431		30.832.000		18.107.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	301		100		100		0		0,00		0		0,00			
123.	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			1.544.465.271		9.785.000		16.222.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
124.	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			2.303.808.234		21.102.705		44.662.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
125.	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.857.162.753		9.765.000		28.732.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
126.	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			19.171.176.308		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
127.	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			28.800.821.984		381.576.515		217.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
128.	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			1.271.514.877		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
129.	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1.949.756.121		24.980.000		43.235.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		1		1		0		0,00		0		0,00			
130.	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			5.026.263.033		-		235.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
131.	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.787.216.078		116.184.934		54.590.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		1		1		0		0,00		0		0,00			
132.	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			18.182.561.681		1.567.020.140		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
133.	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			3.733.625.639		334.122.699		261.317.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	301		280		296		0		0,00		0		0,00			
134.	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			8.847.920.440		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
135.	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.443.263.256		464.133.311		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6		6		6		0		0,00		0		0,00			
136.	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			174.020.368.647		5.561.277.856		5.210.978.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)																
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)																
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)																
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)																
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)																
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)																
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)																
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)																
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)																
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)																
137.	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			2.191.939.236		15.300.000		9.360.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	500		900		900		0		0,00		0		0,00			
138.	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.445.100.477		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
139.	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.589.171.040		22.195.000		32.707.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	30		17		30		0		0,00		0		0,00			
140.	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			3.291.819.317		115.233.757		270.236.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	42		26		38		0		0,00		0		0,00			
141.	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			27.000.674.588		5.013.665.099		4.633.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	42		38		38		0		0,00		0		0,00			
142.	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.159.988.435		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	42		0		0		0		0,00		0		0,00			
143.	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			2.875.332.376		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	42		0		0		0		0,00		0		0,00			
144.	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			2.906.459.419		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
145.	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			2.100.471.547		40.369.000		22.750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
146.	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.289.384.580		9.330.000		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
147.	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			918.645.299		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
148.	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			875.780.655		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
149.	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.603.567.304		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
150.	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			27.410.341.417		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
151.	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			14.134.166.925		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
152.	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			15.386.379.392		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
153.	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			3.292.610.647		107.201.000		167.625.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	120		115		120		0		0,00		0		0,00			
154.	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			3.817.906.117		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	38		0		50		0		0,00		0		0,00			
155.	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			14.620.070.864		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
156.	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			5.247.317.028		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
157.	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			16.967.701.574		237.984.000		65.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
158.	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			22.895.540.410		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
159.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**1.684.202.726**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
160.	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.436.836.843		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)																
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)																
161.	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			822.101.366		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	446		0		0		0		0,00		0		0,00			
162.	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			614.735.477		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
163.	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			247.365.883		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)																
164.	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			247.365.883		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
165.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**1.033.038.448**		**18.097.000**		**62.219.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,77		0,7		0,66		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	82,17		57,2		62,75		0		0,00		0		0,00			
166.	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.033.038.448		18.097.000		62.219.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)																
167.	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			732.061.513		18.097.000		62.219.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
168.	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			300.976.935		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
169.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**1.684.202.726**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
170.	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.061.047.722		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
171.	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			555.786.904		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
172.	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			505.260.818		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
173.	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			623.155.004		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)																
174.	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			286.314.462		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
175.	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			176.841.285		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
176.	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			159.999.257		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.435.010.186.427**		**268.516.730.297**		**241.119.170.728**		**26.404.577.497**	**2,12**	**10,95**		**26.404.577.497**	**0,07**	**1,84**		
177.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**341.106.182.757**		**68.374.365.596**		**63.527.336.905**		**12.933.005.263**	**0,00**	**20,36**		**12.933.005.263**	**0,00**	**3,79**	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		99,99		100		20,36		20,36		20,36		20,36			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
178.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			130.662.658.257		26.143.603.914		27.925.827.905		6.906.744.518	0,00	24,73		6.906.744.518	0,00	5,29		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
179.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			130.662.658.257		26.143.603.914		27.925.827.905		6.906.744.518	0,00	24,73		6.906.744.518	0,00	5,29		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	395		300		360		0		0,00		0		0,00			
180.	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.860.654.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
181.	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2.860.654.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1740		0		0		0		0,00		0		0,00			
182.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.468.956.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
183.	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.653.365.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
184.	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.192.468.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	96		0		0		0		0,00		0		0,00			
185.	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20.850.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
186.	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			161.518.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	650		0		0		0		0,00		0		0,00			
187.	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.440.755.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	700		0		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
188.	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
189.	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
190.	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.408.564.000		599.353.105		601.509.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
191.	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			32.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
192.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.258.590.000		599.353.105		601.509.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156		12		36		0		0,00		0		0,00			
193.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			117.974.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	275		0		0		0		0,00		0		0,00			
194.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			955.350.000		103.510.075		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
195.	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			955.350.000		103.510.075		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		3		0		0		0,00		0		0,00			
196.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			197.000.000.000		41.527.898.502		35.000.000.000		6.026.260.745	0,00	17,22		6.026.260.745	0,00	3,06		
		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
197.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			197.000.000.000		41.527.898.502		35.000.000.000		6.026.260.745	0,00	17,22		6.026.260.745	0,00	3,06		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
198.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**105.607.108.920**		**8.827.963.692**		**1.558.118.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	96,67		97,66		94		0		0,00		0		0,00			
199.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			101.882.108.920		8.477.088.692		1.138.118.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)																
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)																
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)																
200.	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			23.229.065.480		4.744.403.108		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	15		3		0		0		0,00		0		0,00			
201.	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			17.434.131.440		2.770.582.585		1.038.118.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	20		4		1		0		0,00		0		0,00			
202.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.000.000.000		962.102.999		100.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	50		2		28		0		0,00		0		0,00			
203.	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.745.826.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1258		0		0		0		0,00		0		0,00			
204.	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			9.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
205.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			34.473.086.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	192		0		0		0		0,00		0		0,00			
206.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.725.000.000		350.875.000		420.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)																
207.	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.725.000.000		350.875.000		420.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
208.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)																
209.	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
210.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.265.540.000**		**382.850.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	95		100		91		0		0,00		0		0,00			
211.	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.265.540.000		382.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)																
212.	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			3.265.540.000		382.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	305		61		1		0		0,00		0		0,00			
213.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**380.212.500.000**		**108.938.016.283**		**116.117.615.976**		**10.514.066.953**	**6,67**	**9,05**		**10.514.066.953**	**0,00**	**2,77**	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		100		100		25		25,00		25		5,00			
214.	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			759.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
215.	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			759.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		5		0		0,00		0		0,00			
216.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			375.158.500.000		84.488.288.132		88.291.470.976		7.727.769.805	0,00	8,75		7.727.769.805	0,00	2,06		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
217.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			374.638.500.000		84.488.288.132		88.226.470.976		7.727.769.805	0,00	8,76		7.727.769.805	0,00	2,06		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	900		900		1000		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
218.	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			310.000.000		-		35.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
219.	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			210.000.000		-		30.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
220.	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
221.	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0,00		0		0,00			
222.	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			235.000.000		57.168.100		88.330.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
223.	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			235.000.000		57.168.100		88.330.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
224.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			505.000.000		42.476.731		43.589.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
225.	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			70.000.000		10.787.834		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		6		12		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
226.	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			435.000.000		31.688.897		33.589.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
227.	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.907.500.000		257.096.266		259.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
228.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			867.500.000		173.636.266		187.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		6		12		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
229.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.040.000.000		83.460.000		72.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		6		12		0		0,00		0		0,00			
230.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.647.500.000		111.538.982		138.426.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		JumlahKendaraanPeroranganDinas atauKendaraanDinasJabatanyang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
231.	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			475.000.000		42.949.933		39.190.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		1		1		0		0,00		0		0,00			
		umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
232.	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			162.500.000		47.817.129		76.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		3		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
233.	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			450.000.000		10.390.000		9.540.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		8		10		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
234.	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			560.000.000		10.381.920		13.596.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
235.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		23.981.448.072		27.271.000.000		2.786.297.148	100,00	10,22		2.786.297.148	0,00	0,00		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
236.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		23.981.448.072		27.271.000.000		2.786.297.148	100,00	10,22		2.786.297.148	0,00	0,00		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0		22		22		22		100,00		22		0,00			
237.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**399.340.378.779**		**44.984.620.202**		**56.880.568.747**		**-**	**1,57**	**0,00**		**-**	**0,30**	**0,00**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	1,4		1,9		1,4		0,86		138,57		0,86		138,57			
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	8		9,25		11,4		5,94		147,89		5,94		125,75			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	75,5		68,1		63,4		68		107,26		68		90,07			
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4		14,45		23,4		1,69		192,78		1,69		192,78			
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	60		46,65		45		9,9		22,00		9,9		16,50			
			Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	74		100		70		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	24,5		21,5		22,5		7,59		33,73		7,59		30,98			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	85,49		83,39		83,81		0		0,00		0		0,00			
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	95		96,6		91		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	92,5		100		90,5		27,23		30,09		27,23		29,44			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	85		9,09		59,1		98,4		166,50		98,4		115,76			
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	85		9,09		59,1		9,09		15,38		9,09		10,69			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	72		0		70,3		0		0,00		0		0,00			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	50,4		53,7		48,5		7,47		15,40		7,47		14,82			
238.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			182.306.870.166		13.836.780.532		8.257.135.437		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi ketersediaan Sarana, Prasarana,dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)																
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)																
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)																
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)																
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)																
239.	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			12.500.000.000		325.826.200		2.542.789.557		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
240.	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			3.050.000.000		3.398.932.619		157.372.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	6		2		2		0		0,00		0		0,00			
241.	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			110.335.910.848		8.436.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
242.	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			1.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
243.	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			3.450.000.000		385.980.660		380.709.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	6		16		2		0		0,00		0		0,00			
244.	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			875.000.000		2.213.098.329		300.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2		3		2		0		0,00		0		0,00			
245.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			9.560.000.000		697.096.249		112.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	12		16		4		0		0,00		0		0,00			
246.	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.225.000.000		191.912.012		755.871.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	23		22		22		0		0,00		0		0,00			
247.	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
248.	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1000		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Terpenuhinya obat, BMHP dan vaksin program tepat waktu dan jumlah tepat	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)																
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)																
249.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			34.286.669.318		6.373.985.407		3.706.749.380		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	24		22		2		0		0,00		0		0,00			
250.	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			1.924.290.000		241.513.056		301.644.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	24		8		22		0		0,00		0		0,00			
251.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			214.113.508.613		30.672.068.270		48.193.019.310		-	2,11	0,00		-	0,40	0,00		
		tercapainya standa pelayanan minimal bidang kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)																
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)																
252.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.350.000.000		169.416.850		1.062.580.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	629		615		1230		0		0,00		0		0,00			
253.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			900.000.000		73.267.000		64.450.000		-	2,78	0,00		-	0,55	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3101		612		612		17		2,78		17		0,55			
254.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			955.000.000		12.335.000		969.604.800		-	2,97	0,00		-	0,54	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3170		573		573		17		2,97		17		0,54			
255.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			1.020.000.000		81.215.300		95.000.000		-	11,14	0,00		-	2,05	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14601		2.694		2694		300		11,14		300		2,05			
256.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			915.000.000		124.600.730		810.830.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7532		7.883		15766		0		0,00		0		0,00			
257.	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			2.350.000.000		123.913.200		350.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	108080		20.978		20978		0		0,00		0		0,00			
258.	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			695.000.000		34.160.000		65.000.000		-	23,71	0,00		-	4,36	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10957		2.016		2016		478		23,71		478		4,36			
259.	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			1.500.000.000		35.900.000		150.000.000		-	5,90	0,00		-	1,14	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16080		3.121		3121		184		5,90		184		1,14			
260.	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			2.050.000.000		120.653.818		350.000.000		-	7,66	0,00		-	1,53	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2092		418		418		32		7,66		32		1,53			
261.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.175.000.000		32.130.000		263.600.000		-	13,24	0,00		-	5,29	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	340		68		136		18		13,24		18		5,29			
262.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			8.246.561.200		48.206.000		1.710.597.000		-	0,96	0,00		-	0,38	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5727		1.149		2298		22		0,96		22		0,38			
263.	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			1.100.000.000		84.034.000		275.100.000		-	5,62	0,00		-	1,12	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	3653		730		730		41		5,62		41		1,12			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
264.	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
265.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5.216.414.928		105.558.000		3.728.490.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		3		34		0		0,00		0		0,00			
266.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			650.000.000		27.535.250		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		23		0		0,00		0		0,00			
267.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.130.000.000		73.121.375		749.357.190		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		3		23		0		0,00		0		0,00			
268.	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.325.000.000		379.314.250		115.104.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
269.	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			375.000.000		2.860.000		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
270.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			792.500.000		48.490.000		258.855.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		23		0		0,00		0		0,00			
271.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			400.000.000		15.130.500		169.726.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	200		932		3877		0		0,00		0		0,00			
272.	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2.010.000.000		16.400.000		142.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	55		7		102391		0		0,00		0		0,00			
273.	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			695.000.000		4.765.000		95.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
274.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			7.959.065.600		320.718.000		876.379.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		23		0		0,00		0		0,00			
275.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			147.626.466.885		27.002.770.225		30.940.845.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
276.	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			1.550.000.000		7.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	89942		215		0		0		0,00		0		0,00			
277.	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			1.615.000.000		8.595.000		319.520.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	100		10		10		0		0,00		0		0,00			
278.	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			670.000.000		148.394.195		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
279.	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
280.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.550.000.000		345.155.957		2.429.960.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		23		0		0,00		0		0,00			
281.	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			840.000.000		-		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2		0		1		0		0,00		0		0,00			
282.	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			525.000.000		7.866.458		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	22		22		0		0		0,00		0		0,00			
283.	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			475.000.000		31.310.803		134.317.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
284.	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			175.000.000		7.505.000		42.650.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
285.	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			7.700.000.000		903.718.489		916.526.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
286.	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1.650.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	555		0		0		0		0,00		0		0,00			
287.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			132.500.000		-		56.193.620		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	80		0		3772		0		0,00		0		0,00			
288.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			135.000.000		-		35.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		0		23		0		0,00		0		0,00			
289.	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
290.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.845.000.000		275.127.870		131.132.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		23		0		0,00		0		0,00			
291.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		0		22		0		0,00		0		0,00			
292.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			315.000.000		-		740.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		0		22		0		0,00		0		0,00			
293.	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
294.	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.210.000.000		169.664.400		245.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)																
295.	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1.210.000.000		169.664.400		245.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		5		0		0,00		0		0,00			
296.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.710.000.000		306.107.000		185.414.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)																
297.	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			1.020.000.000		301.842.000		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	2		1		1		0		0,00		0		0,00			
298.	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			690.000.000		4.265.000		165.414.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	22		22		22		0		0,00		0		0,00			
299.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**3.687.060.000**		**821.377.813**		**1.450.222.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	100		26,52		90		81,81		90,90		81,81		81,81			
300.	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			730.000.000		15.611.000		28.590.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase puskesmas yang terpenuhi jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)																
301.	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			365.000.000		15.611.000		28.590.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
302.	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			365.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
303.	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.963.500.000		377.999.715		361.588.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase perenanaan kebutuhan named dan nakes di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)																
304.	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			356.000.000		84.986.220		55.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
305.	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			750.000.000		293.013.495		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	425		425		4		0		0,00		0		0,00			
306.	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			857.500.000		-		256.588.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
307.	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			993.560.000		427.767.098		1.060.044.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)																
308.	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			993.560.000		427.767.098		1.060.044.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	40		4		100		0		0,00		0		0,00			
309.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**2.152.392.971**		**416.022.122**		**365.133.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	65		50		55		50		90,91		50		76,92			
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar (%)	70		59,8		64		50		78,13		50		71,43			
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100		85		88		100		113,64		100		100,00			
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	70		96		64		60		93,75		60		85,71			
310.	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			666.278.971		81.695.000		122.036.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)																
311.	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			666.278.971		81.695.000		122.036.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
312.	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			347.100.000		159.836.284		160.392.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)																
313.	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			347.100.000		159.836.284		160.392.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
314.	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			1.139.014.000		174.490.838		82.705.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)																
315.	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			1.139.014.000		174.490.838		82.705.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	35		25		25		0		0,00		0		0,00			
316.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.105.320.000**		**147.875.000**		**1.220.176.100**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100		45		100		2,47		2,47		2,47		2,47			
317.	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			226.655.000		54.635.000		480.148.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)																
318.	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			226.655.000		54.635.000		480.148.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1		1		217		0		0,00		0		0,00			
319.	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			449.295.000		93.240.000		199.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)																
320.	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-		68.765.000		118.015.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0		1		1		0		0,00		0		0,00			
321.	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			449.295.000		24.475.000		81.025.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	50		250		250		0		0,00		0		0,00			
322.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			429.370.000		-		540.988.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
323.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			429.370.000		-		540.988.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		23		0		0,00		0		0,00			
324.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.925.000.000**		**1.119.021.737**		**-**		**128.929.845**	**0,00**	**0,00**		**128.929.845**	**0,00**	**2,18**	Puskesmas Taram	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
325.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5.925.000.000		1.119.021.737		-		128.929.845	0,00	0,00		128.929.845	0,00	2,18		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
326.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			5.925.000.000		1.119.021.737		-		128.929.845	0,00	0,00		128.929.845	0,00	2,18		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
327.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.140.110.000**		**455.060.832**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Taram	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
328.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.140.110.000		455.060.832		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pencapaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
329.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			127.395.000		31.410.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25		17		0		0		0,00		0		0,00			
330.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			123.500.000		32.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1157		242		0		0		0,00		0		0,00			
331.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.400.000		6.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	4		2		0		0		0,00		0		0,00			
332.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			135.000.000		34.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	154		32		0		0		0,00		0		0,00			
333.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		75.510.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
334.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			26.450.000		4.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
335.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			44.965.000		17.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
336.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11.850.000		1.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
337.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			15.250.000		1.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	40		40		0		0		0,00		0		0,00			
338.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000.000		49.931.250		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
339.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			350.000.000		108.909.582		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
340.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	38		20		0		0		0,00		0		0,00			
341.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			40.500.000		7.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
342.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			10.300.000		450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
343.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			141.000.000		34.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
344.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			180.000.000		49.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
345.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**30.500.000**		**10.095.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Taram	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
346.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.500.000		10.095.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
347.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			30.500.000		10.095.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
348.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.000.000.000**		**964.131.492**		**-**		**107.748.285**	**0,00**	**0,00**		**107.748.285**	**0,00**	**1,80**	Puskesmas Suliki	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
349.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.000.000.000		964.131.492		-		107.748.285	0,00	0,00		107.748.285	0,00	1,80		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
350.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.000.000.000		964.131.492		-		107.748.285	0,00	0,00		107.748.285	0,00	1,80		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
351.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.747.350.000**		**561.272.826**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Suliki	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
352.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.747.350.000		561.272.826		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
353.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			325.000.000		90.845.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	155		22		0		0		0,00		0		0,00			
354.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			120.000.000		23.325.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1240		260		0		0		0,00		0		0,00			
355.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			85.050.000		16.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
356.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			29.100.000		5.550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	200		40		0		0		0,00		0		0,00			
357.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			925.000.000		156.004.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
358.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			126.450.000		10.875.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
359.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			59.500.000		11.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
360.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11.850.000		10.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
361.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			13.600.000		900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	287		196		0		0		0,00		0		0,00			
362.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			270.000.000		59.282.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
363.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			490.000.000		104.116.626		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
364.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	32		0		0		0		0,00		0		0,00			
365.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			40.500.000		18.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
366.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			8.000.000		675.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
367.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			61.800.000		10.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
368.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			180.000.000		42.150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
369.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.100.000**		**4.165.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Suliki	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
370.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.100.000		4.165.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
371.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.100.000		4.165.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
372.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.850.000.000**		**1.189.444.592**		**-**		**157.491.120**	**0,00**	**0,00**		**157.491.120**	**0,00**	**2,30**	Puskesmas Situjuh	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
373.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.850.000.000		1.189.444.592		-		157.491.120	0,00	0,00		157.491.120	0,00	2,30		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
374.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.850.000.000		1.189.444.592		-		157.491.120	0,00	0,00		157.491.120	0,00	2,30		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
375.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.797.650.000**		**528.871.000**		**-**		**18.250.000**	**0,00**	**0,00**		**18.250.000**	**0,50**	**0,65**	Puskesmas Situjuh	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,50			
376.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.797.650.000		528.871.000		-		18.250.000	0,00	0,00		18.250.000	0,50	0,65		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
377.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			260.000.000		54.000.000		-		3.600.000	0,00	0,00		3.600.000	1,46	1,38		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	205		35		0		3		0,00		3		1,46			
378.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			199.500.000		54.675.000		-		400.000	0,00	0,00		400.000	0,00	0,20		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2100		434		0		0		0,00		0		0,00			
379.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.400.000		5.850.000		-		200.000	0,00	0,00		200.000	5,00	0,62		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	20		4		0		1		0,00		1		5,00			
380.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			65.000.000		12.600.000		-		800.000	0,00	0,00		800.000	1,59	1,23		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	315		65		0		5		0,00		5		1,59			
381.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		111.920.000		-		400.000	0,00	0,00		400.000	0,00	0,06		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
382.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			135.300.000		14.475.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
383.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			121.850.000		12.150.000		-		1.400.000	0,00	0,00		1.400.000	0,00	1,15		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
384.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.000.000		2.550.000		-		2.200.000	0,00	0,00		2.200.000	0,00	8,80		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
385.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			19.700.000		3.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	406		252		0		0		0,00		0		0,00			
386.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			275.000.000		56.755.000		-		450.000	0,00	0,00		450.000	0,00	0,16		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
387.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			510.000.000		106.771.000		-		2.400.000	0,00	0,00		2.400.000	0,00	0,47		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
388.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	46		0		0		0		0,00		0		0,00			
389.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			90.550.000		17.550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
390.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			11.500.000		1.500.000		-		400.000	0,00	0,00		400.000	0,00	3,48		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
391.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			69.600.000		12.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
392.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			305.000.000		62.175.000		-		6.000.000	0,00	0,00		6.000.000	0,00	1,97		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
393.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**31.500.000**		**4.580.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Situjuh	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
394.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.500.000		4.580.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
395.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			31.500.000		4.580.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
396.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.773.500.000**		**327.218.869**		**-**		**38.151.171**	**0,00**	**0,00**		**38.151.171**	**0,00**	**2,15**	Puskesmas Rimbo Data	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
397.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.773.500.000		327.218.869		-		38.151.171	0,00	0,00		38.151.171	0,00	2,15		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
398.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.773.500.000		327.218.869		-		38.151.171	0,00	0,00		38.151.171	0,00	2,15		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
399.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.467.800.000**		**553.118.376**		**-**		**31.096.535**	**0,00**	**0,00**		**31.096.535**	**0,00**	**1,26**	Puskesmas Rimbo Data	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
400.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.467.800.000		553.118.376		-		31.096.535	0,00	0,00		31.096.535	0,00	1,26		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
401.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			150.000.000		37.800.000		-		31.096.535	0,00	0,00		31.096.535	0,00	20,73		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	18		6		0		0		0,00		0		0,00			
402.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			30.800.000		5.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450		92		0		0		0,00		0		0,00			
403.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			20.600.000		3.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
404.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			73.450.000		13.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		12		0		0		0,00		0		0,00			
405.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			800.000.000		196.330.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
406.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			21.450.000		4.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
407.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			47.500.000		9.150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
408.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.700.000		26.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
409.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.700.000		300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	329		42		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
410.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			265.000.000		50.025.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
411.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			610.000.000		140.493.376		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
412.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			950.000		150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	9		11		0		0		0,00		0		0,00			
413.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			203.000.000		52.870.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
414.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.850.000		150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
415.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			67.600.000		12.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
416.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			128.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
417.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.040.000**		**300.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Rimbo Data	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
418.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.040.000		300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
419.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.040.000		300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
420.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.820.000.000**		**524.689.897**		**-**		**67.282.333**	**0,00**	**0,00**		**67.282.333**	**0,00**	**2,39**	Puskesmas Baruh Gunuang	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
421.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.820.000.000		524.689.897		-		67.282.333	0,00	0,00		67.282.333	0,00	2,39		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
422.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.820.000.000		524.689.897		-		67.282.333	0,00	0,00		67.282.333	0,00	2,39		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
423.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.427.650.000**		**396.747.696**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Baruh Gunuang	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
424.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.427.650.000		396.747.696		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
425.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			166.000.000		29.145.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	75		9		0		0		0,00		0		0,00			
426.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			159.500.000		26.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	496		94		0		0		0,00		0		0,00			
427.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			75.025.000		14.625.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
428.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			42.650.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	368		76		0		0		0,00		0		0,00			
429.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			625.000.000		101.718.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
430.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			25.950.000		4.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
431.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			39.550.000		7.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
432.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			21.050.000		2.250.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
433.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			47.700.000		8.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	584		87		0		0		0,00		0		0,00			
434.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			328.000.000		39.330.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
435.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			575.000.000		116.484.696		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
436.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			7.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
437.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			135.600.000		10.920.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
438.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			8.125.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
439.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			53.000.000		9.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
440.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			118.000.000		18.975.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
441.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**50.719.000**		**9.117.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Baruh Gunuang	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
442.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.719.000		9.117.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
443.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			50.719.000		9.117.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
444.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.734.000.000**		**1.395.305.539**		**-**		**167.789.333**	**0,00**	**0,00**		**167.789.333**	**0,00**	**2,17**	Puskesmas Pangkalan	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
445.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.734.000.000		1.395.305.539		-		167.789.333	0,00	0,00		167.789.333	0,00	2,17		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
446.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.734.000.000		1.395.305.539		-		167.789.333	0,00	0,00		167.789.333	0,00	2,17		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
447.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.710.700.000**		**584.942.935**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Pangkalan	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
448.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.710.700.000		584.942.935		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
449.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			171.000.000		34.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115		17		0		0		0,00		0		0,00			
450.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			138.080.000		28.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2444		498		0		0		0,00		0		0,00			
451.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			114.000.000		17.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25		5		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
452.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			93.450.000		17.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	374		76		0		0		0,00		0		0,00			
453.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		156.236.418		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
454.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			20.500.000		3.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
455.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			26.200.000		4.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
456.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			15.550.000		3.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
457.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			45.100.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	359		223		0		0		0,00		0		0,00			
458.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			375.000.000		91.215.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
459.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			615.000.000		122.691.517		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
460.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
461.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			115.420.000		16.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
462.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			4.200.000		600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
463.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			110.000.000		34.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
464.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			191.000.000		48.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
465.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.700.000**		**6.500.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Pangkalan	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
466.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.700.000		6.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
467.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.700.000		6.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
468.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.135.000.000**		**558.932.837**		**-**		**261.019.006**	**0,00**	**0,00**		**261.019.006**	**0,00**	**8,33**	Puskesmas Banja Loweh	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
469.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			3.135.000.000		558.932.837		-		261.019.006	0,00	0,00		261.019.006	0,00	8,33		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
470.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.135.000.000		558.932.837		-		261.019.006	0,00	0,00		261.019.006	0,00	8,33		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
471.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.513.700.000**		**495.236.160**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Banja Loweh	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
472.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.513.700.000		495.236.160		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
473.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			163.000.000		34.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	128		19		0		0		0,00		0		0,00			
474.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			151.500.000		41.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	209		221		0		0		0,00		0		0,00			
475.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			33.500.000		4.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			
476.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			53.000.000		10.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	169		35		0		0		0,00		0		0,00			
477.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			625.000.000		100.588.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
478.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			44.150.000		7.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
479.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			72.800.000		14.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
480.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			58.600.000		3.525.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
481.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			29.700.000		4.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	114		71		0		0		0,00		0		0,00			
482.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			275.000.000		58.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
483.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			650.000.000		145.598.160		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
484.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
485.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			108.000.000		26.150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
486.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			10.350.000		225.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
487.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			111.600.000		21.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
488.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			126.000.000		23.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
489.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**39.342.000**		**4.342.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Banja Loweh	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
490.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			39.342.000		4.342.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
491.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.342.000		4.342.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
492.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.050.000.000**		**1.862.044.597**		**-**		**214.142.447**	**0,00**	**0,00**		**214.142.447**	**0,00**	**1,94**	Puskesmas Tanjung Pati	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
493.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.050.000.000		1.862.044.597		-		214.142.447	0,00	0,00		214.142.447	0,00	1,94		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
494.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.050.000.000		1.862.044.597		-		214.142.447	0,00	0,00		214.142.447	0,00	1,94		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
495.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.039.016.000**		**615.264.606**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Tanjung Pati	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
496.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.039.016.000		615.264.606		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
497.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			341.000.000		66.420.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	240		42		0		0		0,00		0		0,00			
498.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			250.000.000		60.675.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2855		589		0		0		0,00		0		0,00			
499.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			60.200.000		6.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	27		1		0		0		0,00		0		0,00			
500.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			57.239.000		9.450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	390		78		0		0		0,00		0		0,00			
501.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			745.000.000		167.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
502.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			50.950.000		9.675.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
503.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			68.200.000		12.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
504.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			38.000.000		8.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
505.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			45.600.000		5.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	672		417		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
506.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			425.000.000		95.520.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
507.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			630.000.000		124.199.606		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
508.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.924.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	91		0		0		0		0,00		0		0,00			
509.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			82.928.000		4.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
510.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			18.375.000		1.575.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
511.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			69.600.000		12.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
512.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			154.000.000		30.150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
513.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.030.000**		**5.094.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Tanjung Pati	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
514.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.030.000		5.094.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
515.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.030.000		5.094.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
516.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.215.000.000**		**1.840.255.670**		**-**		**232.521.496**	**0,00**	**0,00**		**232.521.496**	**0,00**	**2,28**	Puskesmas Mungo	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
517.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			10.215.000.000		1.840.255.670		-		232.521.496	0,00	0,00		232.521.496	0,00	2,28		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
518.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			10.215.000.000		1.840.255.670		-		232.521.496	0,00	0,00		232.521.496	0,00	2,28		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
519.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.731.925.000**		**551.520.459**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Mungo	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
520.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.731.925.000		551.520.459		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
521.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			299.000.000		56.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	135		21		0		0		0,00		0		0,00			
522.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			123.500.000		28.575.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1885		389		0		0		0,00		0		0,00			
523.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			38.000.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			
524.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100.000.000		21.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	194		40		0		0		0,00		0		0,00			
525.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			725.000.000		113.352.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
526.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			71.500.000		14.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
527.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			45.500.000		9.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
528.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			73.750.000		17.250.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
529.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			61.000.000		10.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	511		317		0		0		0,00		0		0,00			
530.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000.000		53.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
531.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			575.000.000		122.442.959		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
532.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			4.500.000		900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	58		65		0		0		0,00		0		0,00			
533.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			53.050.000		8.975.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
534.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			8.125.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
535.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			124.000.000		39.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
536.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			205.000.000		50.025.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
537.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**47.985.000**		**8.735.500**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Mungo	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
538.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47.985.000		8.735.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
539.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			47.985.000		8.735.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
540.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.355.000.000**		**1.482.342.899**		**-**		**167.598.198**	**0,00**	**0,00**		**167.598.198**	**0,00**	**2,01**	Puskesmas Pakan Rabaa	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
541.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.355.000.000		1.482.342.899		-		167.598.198	0,00	0,00		167.598.198	0,00	2,01		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
542.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8.355.000.000		1.482.342.899		-		167.598.198	0,00	0,00		167.598.198	0,00	2,01		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
543.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.589.950.000**		**602.047.373**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Pakan Rabaa	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
544.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.589.950.000		602.047.373		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
545.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			173.500.000		40.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	280		50		0		0		0,00		0		0,00			
546.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			181.500.000		63.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3030		624		0		0		0,00		0		0,00			
547.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			47.000.000		9.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25		55		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
548.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100.400.000		18.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	469		95		0		0		0,00		0		0,00			
549.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		178.950.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
550.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			82.550.000		16.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
551.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			80.300.000		15.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
552.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			15.550.000		750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
553.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			25.200.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	430		267		0		0		0,00		0		0,00			
554.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000.000		52.385.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
555.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			555.000.000		109.561.873		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
556.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			3.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
557.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			47.100.000		8.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
558.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			7.900.000		900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
559.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			40.200.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
560.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			330.000.000		75.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
561.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**25.990.000**		**3.640.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Pakan Rabaa	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
562.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.990.000		3.640.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
563.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			25.990.000		3.640.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
564.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.925.000.000**		**651.949.049**		**-**		**77.695.058**	**0,00**	**0,00**		**77.695.058**	**0,00**	**1,31**	Puskesmas Piladang	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
565.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5.925.000.000		651.949.049		-		77.695.058	0,00	0,00		77.695.058	0,00	1,31		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
566.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			5.925.000.000		651.949.049		-		77.695.058	0,00	0,00		77.695.058	0,00	1,31		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
567.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.109.730.000**		**503.899.388**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Piladang	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
568.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.109.730.000		503.899.388		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
569.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			167.395.000		26.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	136		20		0		0		0,00		0		0,00			
570.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			143.500.000		29.550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	850		150		0		0		0,00		0		0,00			
571.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			82.000.000		18.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
572.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			88.500.000		23.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	63		13		0		0		0,00		0		0,00			
573.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			575.000.000		113.429.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
574.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			20.425.000		3.825.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
575.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			23.200.000		4.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
576.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.750.000		4.950.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
577.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			50.150.000		8.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	193		120		0		0		0,00		0		0,00			
578.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			325.000.000		61.946.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
579.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			325.000.000		151.988.588		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
580.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	22		0		0		0		0,00		0		0,00			
581.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			53.960.000		9.960.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
582.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			11.250.000		450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
583.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			68.600.000		12.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
584.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			156.500.000		34.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
585.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.780.000**		**4.530.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Piladang	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
586.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.780.000		4.530.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
587.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			26.780.000		4.530.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
588.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.945.000.000**		**1.157.809.111**		**-**		**111.004.880**	**0,00**	**0,00**		**111.004.880**	**0,00**	**1,60**	Puskesmas Batu Hampar	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
589.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.945.000.000		1.157.809.111		-		111.004.880	0,00	0,00		111.004.880	0,00	1,60		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
590.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.945.000.000		1.157.809.111		-		111.004.880	0,00	0,00		111.004.880	0,00	1,60		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
591.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.463.300.000**		**413.717.999**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Batu Hampar	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
592.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.463.300.000		413.717.999		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
593.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			194.000.000		25.130.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	133		26		0		0		0,00		0		0,00			
594.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			133.000.000		18.375.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1690		348		0		0		0,00		0		0,00			
595.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			72.500.000		13.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	15		3		0		0		0,00		0		0,00			
596.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			50.000.000		8.025.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	240		48		0		0		0,00		0		0,00			
597.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		138.433.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
598.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			44.500.000		5.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
599.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			37.450.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
600.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11.150.000		1.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
601.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			24.100.000		3.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	314		195		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
602.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			400.000.000		37.050.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
603.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			445.000.000		82.154.999		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
604.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	35		0		0		0		0,00		0		0,00			
605.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			53.600.000		7.950.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
606.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			8.300.000		300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
607.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			85.200.000		14.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
608.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			228.000.000		50.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
609.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**36.930.000**		**4.439.600**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Batu Hampar	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
610.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36.930.000		4.439.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
611.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			36.930.000		4.439.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
612.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.850.000.000**		**828.286.307**		**-**		**107.360.094**	**0,00**	**0,00**		**107.360.094**	**0,00**	**2,21**	Puskesmas Halaban	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
613.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.850.000.000		828.286.307		-		107.360.094	0,00	0,00		107.360.094	0,00	2,21		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
614.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			4.850.000.000		828.286.307		-		107.360.094	0,00	0,00		107.360.094	0,00	2,21		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
615.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.567.725.000**		**448.204.913**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Halaban	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
616.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.567.725.000		448.204.913		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
617.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			196.500.000		46.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	150		28		0		0		0,00		0		0,00			
618.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			125.000.000		18.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1665		343		0		0		0,00		0		0,00			
619.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			75.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
620.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			137.000.000		17.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	253		51		0		0		0,00		0		0,00			
621.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			650.000.000		119.237.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
622.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			42.450.000		7.425.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
623.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			90.800.000		14.550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
624.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
625.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			24.100.000		450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	271		168		0		0		0,00		0		0,00			
626.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			325.000.000		48.599.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
627.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			485.000.000		116.718.913		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
628.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	31		0		0		0		0,00		0		0,00			
629.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			53.375.000		5.625.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
630.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			12.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
631.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			118.000.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
632.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			205.000.000		45.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
633.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**34.930.000**		**8.065.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Halaban	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
634.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34.930.000		8.065.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
635.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34.930.000		8.065.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
636.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.990.000.000**		**1.353.085.548**		**-**		**43.374.895**	**0,00**	**0,00**		**43.374.895**	**0,00**	**0,62**	Puskesmas Muaro Paiti	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
637.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.990.000.000		1.353.085.548		-		43.374.895	0,00	0,00		43.374.895	0,00	0,62		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
638.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.990.000.000		1.353.085.548		-		43.374.895	0,00	0,00		43.374.895	0,00	0,62		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
639.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.135.289.000**		**642.699.306**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Muaro Paiti	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
640.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.135.289.000		642.699.306		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
641.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			231.000.000		48.690.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	105		19		0		0		0,00		0		0,00			
642.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			223.000.000		52.875.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1010		208		0		0		0,00		0		0,00			
643.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			63.100.000		8.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
644.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			192.200.000		37.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	171		35		0		0		0,00		0		0,00			
645.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			800.000.000		179.402.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
646.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			118.000.000		21.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
647.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			96.400.000		19.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
648.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.800.000		6.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
649.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			126.000.000		28.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	314		195		0		0		0,00		0		0,00			
650.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			315.000.000		59.925.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
651.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			575.000.000		124.207.306		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
652.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			6.009.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
653.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			58.140.000		11.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
654.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			28.240.000		900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
655.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			82.400.000		14.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
656.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			180.000.000		29.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
657.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**11.510.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Muaro Paiti	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
658.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.510.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
659.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			11.510.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
660.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.600.000.000**		**840.499.132**		**-**		**122.137.590**	**0,00**	**0,00**		**122.137.590**	**0,00**	**2,66**	Puskesmas Sialang	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
661.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.600.000.000		840.499.132		-		122.137.590	0,00	0,00		122.137.590	0,00	2,66		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
662.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			4.600.000.000		840.499.132		-		122.137.590	0,00	0,00		122.137.590	0,00	2,66		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
663.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.162.469.000**		**770.213.930**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Sialang	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
664.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.162.469.000		770.213.930		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
665.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			249.000.000		54.240.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	251		49		0		0		0,00		0		0,00			
666.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			266.000.000		72.225.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2695		555		0		0		0,00		0		0,00			
667.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			60.400.000		11.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25		5		0		0		0,00		0		0,00			
668.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			209.600.000		25.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	453		91		0		0		0,00		0		0,00			
669.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			875.000.000		268.128.400		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
670.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			41.500.000		6.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
671.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			103.960.000		31.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
672.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			36.800.000		4.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
673.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			24.100.000		4.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	240		149		0		0		0,00		0		0,00			
674.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			350.000.000		88.420.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
675.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			610.000.000		147.900.530		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
676.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	27		0		0		0		0,00		0		0,00			
677.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			63.000.000		13.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
678.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			13.209.000		300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
679.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			76.400.000		8.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
680.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			182.000.000		32.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
681.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**15.710.000**		**2.610.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Sialang	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
682.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.710.000		2.610.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
683.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.710.000		2.610.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
684.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.003.000.000**		**2.024.014.956**		**-**		**216.188.037**	**0,00**	**0,00**		**216.188.037**	**0,00**	**1,80**	Puskesmas Koto Baru SMLG	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
685.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.003.000.000		2.024.014.956		-		216.188.037	0,00	0,00		216.188.037	0,00	1,80		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
686.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.003.000.000		2.024.014.956		-		216.188.037	0,00	0,00		216.188.037	0,00	1,80		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
687.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.854.875.000**		**559.879.184**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Koto Baru SMLG	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
688.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.854.875.000		559.879.184		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
689.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			244.000.000		84.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	73		73		0		0		0,00		0		0,00			
690.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			200.000.000		28.125.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3265		921		0		0		0,00		0		0,00			
691.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			37.700.000		5.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	40		8		0		0		0,00		0		0,00			
692.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			43.750.000		4.275.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	675		137		0		0		0,00		0		0,00			
693.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			745.000.000		140.857.885		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
694.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			73.000.000		11.175.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
695.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			83.850.000		16.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
696.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			22.600.000		5.550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
697.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			85.200.000		8.250.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	652		405		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
698.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			365.000.000		82.645.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
699.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			525.000.000		116.926.299		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
700.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	74		0		0		0		0,00		0		0,00			
701.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			118.175.000		8.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
702.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			19.200.000		1.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
703.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			85.800.000		13.950.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
704.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			205.000.000		30.525.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
705.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.300.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Koto Baru SMLG	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
706.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
707.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			20.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
708.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.495.000.000**		**1.566.228.703**		**-**		**162.552.358**	**0,00**	**0,00**		**162.552.358**	**0,00**	**1,71**	Puskesmas Dangung-dangung	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
709.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.495.000.000		1.566.228.703		-		162.552.358	0,00	0,00		162.552.358	0,00	1,71		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
710.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.495.000.000		1.566.228.703		-		162.552.358	0,00	0,00		162.552.358	0,00	1,71		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
711.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.559.080.000**		**469.112.123**		**-**		**26.300.000**	**0,00**	**0,00**		**26.300.000**	**0,00**	**1,03**	Puskesmas Dangung-dangung	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
712.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.559.080.000		469.112.123		-		26.300.000	0,00	0,00		26.300.000	0,00	1,03		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
713.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			173.000.000		37.155.000		-		4.800.000	0,00	0,00		4.800.000	0,00	2,77		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	48		44		0		0		0,00		0		0,00			
714.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			158.000.000		31.050.000		-		800.000	0,00	0,00		800.000	0,00	0,51		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	570		606		0		0		0,00		0		0,00			
715.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			75.700.000		2.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		5		0		0		0,00		0		0,00			
716.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			55.050.000		10.650.000		-		2.000.000	0,00	0,00		2.000.000	0,00	3,63		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	83		83		0		0		0,00		0		0,00			
717.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			725.000.000		155.938.507		-		6.000.000	0,00	0,00		6.000.000	0,00	0,83		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
718.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			50.950.000		9.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
719.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			75.150.000		14.850.000		-		6.000.000	0,00	0,00		6.000.000	0,00	7,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
720.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.400.000		2.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
721.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			39.600.000		7.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	498		309		0		0		0,00		0		0,00			
722.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			350.000.000		59.310.000		-		3.500.000	0,00	0,00		3.500.000	0,00	1,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
723.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			535.000.000		101.108.616		-		3.000.000	0,00	0,00		3.000.000	0,00	0,56		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
724.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			9.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
725.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			65.980.000		9.250.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
726.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			35.150.000		1.350.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
727.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.400.000		5.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
728.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			163.700.000		21.150.000		-		200.000	0,00	0,00		200.000	0,00	0,12		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
729.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**30.500.000**		**3.900.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Dangung-dangung	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
730.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.500.000		3.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
731.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			30.500.000		3.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
732.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.425.000.000**		**1.711.394.715**		**-**		**190.068.694**	**0,00**	**0,00**		**190.068.694**	**0,00**	**2,02**	Puskesmas Mungka	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
733.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.425.000.000		1.711.394.715		-		190.068.694	0,00	0,00		190.068.694	0,00	2,02		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
734.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.425.000.000		1.711.394.715		-		190.068.694	0,00	0,00		190.068.694	0,00	2,02		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
735.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.490.425.000**		**569.434.552**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,02**	**0,00**	Puskesmas Mungka	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,02			
736.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.490.425.000		569.434.552		-		-	0,00	0,00		-	0,02	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
737.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			173.000.000		67.720.000		-		-	0,00	0,00		-	0,37	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	271		51		0		1		0,00		1		0,37			
738.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			194.000.000		37.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3070		632		0		0		0,00		0		0,00			
739.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			50.900.000		6.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25		5		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
740.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			105.000.000		21.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	482		97		0		0		0,00		0		0,00			
741.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			750.000.000		142.112.552		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
742.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			79.525.000		14.625.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
743.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			108.000.000		22.875.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
744.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			30.200.000		5.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
745.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			58.200.000		6.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	504		1		0		0		0,00		0		0,00			
746.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			350.000.000		84.135.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
747.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			525.000.000		113.492.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
748.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	57		0		0		0		0,00		0		0,00			
749.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			53.250.000		7.175.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
750.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			12.850.000		675.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
751.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			97.500.000		14.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
752.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			153.000.000		23.625.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
753.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**39.980.000**		**5.630.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Mungka	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
754.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			39.980.000		5.630.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
755.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.980.000		5.630.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
756.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.950.000.000**		**525.704.655**		**-**		**72.755.368**	**0,00**	**0,00**		**72.755.368**	**0,00**	**2,47**	Puskesmas Padang Kandis	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
757.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.950.000.000		525.704.655		-		72.755.368	0,00	0,00		72.755.368	0,00	2,47		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
758.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.950.000.000		525.704.655		-		72.755.368	0,00	0,00		72.755.368	0,00	2,47		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
759.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.370.250.000**		**391.294.551**		**-**		**22.004.280**	**0,00**	**0,00**		**22.004.280**	**0,60**	**0,93**	Puskesmas Padang Kandis	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,60			
760.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.370.250.000		391.294.551		-		22.004.280	0,00	0,00		22.004.280	0,60	0,93		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
761.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			114.350.000		19.320.000		-		11.002.140	0,00	0,00		11.002.140	4,94	9,62		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	81		15		0		4		0,00		4		4,94			
762.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			342.000.000		41.475.000		-		2.000.000	0,00	0,00		2.000.000	4,74	0,58		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	865		177		0		41		0,00		41		4,74			
763.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			24.100.000		3.600.000		-		600.000	0,00	0,00		600.000	0,00	2,49		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2		2		0		0		0,00		0		0,00			
764.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			140.800.000		15.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	26		28		0		0		0,00		0		0,00			
765.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			625.000.000		103.168.000		-		1.400.000	0,00	0,00		1.400.000	0,00	0,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
766.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			47.900.000		6.450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
767.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			25.325.000		4.575.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
768.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.225.000		2.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
769.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			26.300.000		2.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	184		114		0		0		0,00		0		0,00			
770.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000.000		46.750.000		-		1.500.000	0,00	0,00		1.500.000	0,00	0,67		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
771.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			525.000.000		98.156.551		-		2.902.140	0,00	0,00		2.902.140	0,00	0,55		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
772.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	21		0		0		0		0,00		0		0,00			
773.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			38.200.000		6.150.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
774.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			6.250.000		600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
775.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			65.600.000		12.450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
776.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			153.000.000		27.900.000		-		2.600.000	0,00	0,00		2.600.000	0,00	1,70		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
777.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**38.945.000**		**7.345.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Padang Kandis	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
778.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38.945.000		7.345.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
779.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			38.945.000		7.345.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
780.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.740.000.000**		**855.318.998**		**-**		**92.964.120**	**0,00**	**0,00**		**92.964.120**	**0,00**	**1,96**	Puskesmas Koto Tinggi	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
781.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.740.000.000		855.318.998		-		92.964.120	0,00	0,00		92.964.120	0,00	1,96		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
782.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			4.740.000.000		855.318.998		-		92.964.120	0,00	0,00		92.964.120	0,00	1,96		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
783.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.541.600.000**		**520.715.506**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Koto Tinggi	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
784.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.541.600.000		520.715.506		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
785.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			252.000.000		74.480.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115		21		0		0		0,00		0		0,00			
786.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			163.500.000		33.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1410		290		0		0		0,00		0		0,00			
787.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			47.000.000		9.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			
788.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			40.550.000		7.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	184		38		0		0		0,00		0		0,00			
789.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			675.000.000		105.090.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
790.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			43.050.000		8.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
791.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			75.900.000		15.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
792.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			15.200.000		1.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
793.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			47.700.000		9.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	250		155		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
794.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			252.000.000		46.035.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
795.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			575.000.000		133.195.506		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
796.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			3.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	34		0		0		0		0,00		0		0,00			
797.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			78.200.000		6.665.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
798.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			4.750.000		600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
799.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			63.000.000		12.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
800.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			205.000.000		58.650.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
801.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.145.000**		**2.195.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Koto Tinggi	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
802.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19.145.000		2.195.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
803.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			19.145.000		2.195.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
804.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.348.000.000**		**705.797.589**		**-**		**77.731.452**	**0,00**	**0,00**		**77.731.452**	**0,00**	**1,79**	Puskesmas Maek	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
805.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4.348.000.000		705.797.589		-		77.731.452	0,00	0,00		77.731.452	0,00	1,79		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
806.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			4.348.000.000		705.797.589		-		77.731.452	0,00	0,00		77.731.452	0,00	1,79		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
807.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.620.638.000**		**480.818.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Maek	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
808.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.620.638.000		480.818.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
809.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			162.800.000		28.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30		4		0		0		0,00		0		0,00			
810.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			170.000.000		37.950.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210		44		0		0		0,00		0		0,00			
811.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			109.700.000		21.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
812.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			110.500.000		21.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	40		8		0		0		0,00		0		0,00			
813.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			700.000.000		92.502.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
814.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			29.500.000		4.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
815.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			51.600.000		10.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
816.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
817.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			50.300.000		9.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	752		112		0		0		0,00		0		0,00			
818.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000.000		49.570.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
819.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			650.000.000		129.376.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
820.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
821.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			63.000.000		12.570.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
822.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			16.738.000		1.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
823.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			96.000.000		21.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
824.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			180.500.000		39.450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
825.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**41.350.000**		**4.800.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Maek	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
826.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			41.350.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
827.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			41.350.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
828.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.770.000.000**		**497.971.180**		**-**		**43.348.686**	**0,00**	**0,00**		**43.348.686**	**0,00**	**1,56**	Puskesmas Gunung Malintang	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0,00				0,00			
829.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.770.000.000		497.971.180		-		43.348.686	0,00	0,00		43.348.686	0,00	1,56		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)																
830.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.770.000.000		497.971.180		-		43.348.686	0,00	0,00		43.348.686	0,00	1,56		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
831.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.906.335.000**		**420.186.703**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Gunung Malintang	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat										0,00				0,00			
832.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.906.335.000		420.186.703		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)																
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)																
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																
833.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			141.900.000		26.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	86		16		0		0		0,00		0		0,00			
834.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			200.000.000		33.075.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	995		205		0		0		0,00		0		0,00			
835.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			91.725.000		7.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
836.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			102.000.000		20.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	147		30		0		0		0,00		0		0,00			
837.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			600.300.000		91.843.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
838.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			150.300.000		8.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
839.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			36.600.000		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
840.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
841.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			38.700.000		6.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	550		90		0		0		0,00		0		0,00			
842.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			325.000.000		58.548.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
843.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			575.000.000		104.345.203		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
844.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
845.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			315.000.000		9.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
846.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			13.860.000		225.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
847.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			130.300.000		16.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
848.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			180.800.000		28.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
849.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**40.650.000**		**7.850.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	Puskesmas Gunung Malintang	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										0,00				0,00			
850.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.650.000		7.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																
851.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			40.650.000		7.850.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1.204.216.152.546**		**13.299.302.617**		**31.978.682.218**		**1.073.074.066**	**3,67**	**3,36**		**1.073.074.066**	**0,33**	**0,09**		
852.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**60.632.579.334**		**9.180.840.607**		**13.120.132.153**		**968.461.966**	**7,64**	**7,38**		**968.461.966**	**0,82**	**1,60**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
853.	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			280.000.000		6.629.000		6.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)																
854.	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000		1.860.000		3.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
855.	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000.000		4.769.000		3.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
856.	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
857.	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
858.	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.128.579.334		8.834.725.408		9.630.839.903		871.875.094	0,00	9,05		871.875.094	0,00	1,74		
		Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
859.	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			49.923.579.334		8.834.725.408		9.630.839.903		871.875.094	0,00	9,05		871.875.094	0,00	1,75		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		95		100		0		0,00		0		0,00			
860.	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
861.	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
862.	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
863.	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			130.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
864.	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
865.	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
866.	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			360.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
867.	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			360.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
868.	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.192.000.000		148.373.596		111.000.000		18.103.200	16,67	16,31		18.103.200	2,22	1,52		
		Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)																
869.	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.000.000		2.100.000		2.000.000		390.000	100,00	19,50		390.000	20,00	1,11		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
870.	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.000.000		8.676.028		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		0		0		0,00		0		0,00			
871.	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
872.	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000		24.992.000		20.000.000		3.453.000	0,00	17,27		3.453.000	0,00	1,73		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		2		0		0,00		0		0,00			
873.	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			190.000.000		21.908.900		7.000.000		1.400.000	0,00	20,00		1.400.000	0,00	0,74		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
874.	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			73.000.000		11.040.000		12.000.000		1.840.000	0,00	15,33		1.840.000	0,00	2,52		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4		1		0		0,00		0		0,00			
875.	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000		1.702.000		5.000.000		394.000	0,00	7,88		394.000	0,00	0,53		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
876.	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450.000.000		77.954.668		65.000.000		10.626.200	0,00	16,35		10.626.200	0,00	2,36		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		1		0		0,00		0		0,00			
877.	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
878.	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			810.000.000		-		750.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
879.	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			760.000.000		-		750.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0,00		0		0,00			
880.	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
881.	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.342.000.000		87.840.803		198.000.000		17.080.127	0,00	8,63		17.080.127	0,00	0,32		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
882.	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
883.	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			425.000.000		68.223.803		75.000.000		7.876.523	0,00	10,50		7.876.523	0,00	1,85		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		6		1		0		0,00		0		0,00			
884.	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.000.000		19.617.000		15.000.000		203.604	0,00	1,36		203.604	0,00	0,13		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		3		1		0		0,00		0		0,00			
885.	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.745.000.000		-		108.000.000		9.000.000	0,00	8,33		9.000.000	0,00	0,19		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
886.	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.390.000.000		103.271.800		2.424.292.250		61.403.545	5,56	2,53		61.403.545	0,91	2,57		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
887.	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000.000		56.663.800		104.380.000		11.610.345	0,00	11,12		11.610.345	0,00	2,90		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	125		30		20		0		0,00		0		0,00			
888.	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			975.000.000		43.508.000		2.314.912.250		49.793.200	22,22	2,15		49.793.200	3,64	5,11		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	55		11		9		2		22,22		2		3,64			
889.	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			375.000.000		3.100.000		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		11		11		0		0,00		0		0,00			
890.	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			640.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0,00		0		0,00			
891.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**161.405.474.712**		**853.886.625**		**700.000.000**		**21.950.400**	**0,00**	**3,14**		**21.950.400**	**0,00**	**0,01**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1. Kapasitas Air Baku (m3/detik), 2. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir, 3. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	55		54,54		51		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir (%)	46		54,54		41,36		0		0,00		0		0,00			
892.	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			60.196.474.712		-		400.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase sumber daya air yang terkelola/ terpelihara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)																
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)																
			Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)																
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)																
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)																
893.	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai			31.889.474.712		-		400.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	48.16		0		0.095		0		0,00		0		0,00			
894.	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			8.575.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0.5		0		0		0		0,00		0		0,00			
895.	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan			2.250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
896.	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai			3.921.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0.7		0		0		0		0,00		0		0,00			
897.	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			3.558.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
898.	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			9.603.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	29		0		0		0		0,00		0		0,00			
		kapasitas air baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)																
899.	1.03.02.2.01.0132	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
900.	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			101.209.000.000		853.886.625		300.000.000		21.950.400	0,00	7,32		21.950.400	0,00	0,02		
		Persentase jaringan irigasi yang terkelola	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)																
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)																
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)																
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)																
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)																
901.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			34.091.234.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	5.7		0		0.778		0		0,00		0		0,00			
902.	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			56.253.315.900		668.886.625		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	6.1		0,99		3469		0		0,00		0		0,00			
903.	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			3.732.731.000		185.000.000		300.000.000		21.950.400	0,00	7,32		21.950.400	0,00	0,59		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	2.31		0,25		0.367		0		0,00		0		0,00			
904.	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
905.	1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi			2.100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	9		0		0		0		0,00		0		0,00			
906.	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			2.271.719.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	4		0		2		0		0,00		0		0,00			
907.	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			1.410.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
908.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**81.250.000.000**		**102.352.986**		**2.550.000.000**		**7.325.000**	**0,00**	**0,29**		**7.325.000**	**0,00**	**0,01**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan, 2. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum (%)	71		81,78		65		0		0,00		0		0,00			
909.	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			81.250.000.000		102.352.986		2.550.000.000		7.325.000	0,00	0,29		7.325.000	0,00	0,01		
		Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)																
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)																
910.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
911.	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			29.700.000.000		102.352.986		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	8		5		0		0		0,00		0		0,00			
912.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			50.950.000.000		-		2.550.000.000		7.325.000	0,00	0,29		7.325.000	0,00	0,01		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	12510		0		100		0		0,00		0		0,00			
913.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**118.200.000.000**		**-**		**1.125.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	3,29		1,13		3,29		0		0,00		0		0,00			
914.	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			118.200.000.000		-		1.125.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah sampah yang terkelola	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)																
915.	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			118.200.000.000		-		1.125.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	15		0		10		0		0,00		0		0,00			
916.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**129.000.000.000**		**883.561.798**		**1.725.000.000**		**5.974.200**	**0,00**	**0,35**		**5.974.200**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	76		64,77		68		0		0,00		0		0,00			
917.	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			129.000.000.000		883.561.798		1.725.000.000		5.974.200	0,00	0,35		5.974.200	0,00	0,00		
		Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)																
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)																
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)																
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)																
918.	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			51.000.000.000		883.561.798		1.725.000.000		5.974.200	0,00	0,35		5.974.200	0,00	0,01		
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)	615		3		20		0		0,00		0		0,00			
919.	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			4.750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	3000		0		0		0		0,00		0		0,00			
920.	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			42.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	100		0		1		0		0,00		0		0,00			
921.	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			9.250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
922.	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
923.	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			19.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	85		0		250		0		0,00		0		0,00			
924.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
925.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**50.950.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase cakupan Drainase dalam kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50		0		46		0		0,00		0		0,00			
926.	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.950.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Drainase Yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)																
927.	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			48.950.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	489		0		10		0		0,00		0		0,00			
928.	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
929.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**16.710.200.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik (%)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
930.	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			16.710.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Cakupan Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)																
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)																
931.	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			1.007.180.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
932.	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			15.703.020.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
933.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**147.300.000.000**		**1.779.361.752**		**1.300.000.000**		**32.882.500**	**3,40**	**2,53**		**32.882.500**	**0,42**	**0,02**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	88		76,09		80		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
934.	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			147.300.000.000		1.779.361.752		1.300.000.000		32.882.500	3,40	2,53		32.882.500	0,42	0,02		
		Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)														
935.	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			145.250.000.000		1.599.392.252		1.000.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		1		1		0		0,00		0		0,00			
936.	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			2.050.000.000		179.969.500		300.000.000		32.882.500	6,80	10,96		32.882.500	0,85	1,60		
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	2000		250		250		17		6,80		17		0,85			
937.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**2.011.898.500**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	65		0		0		0		0,00		0		0,00			
938.	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.011.898.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
939.	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
940.	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan			911.898.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
941.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**419.458.500.000**		**-**		**10.808.550.065**		**36.480.000**	**6,00**	**0,34**		**36.480.000**	**0,90**	**0,01**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tingkat Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	63		58,45		59		0		0,00		0		0,00			
942.	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			419.458.500.000		-		10.808.550.065		36.480.000	6,00	0,34		36.480.000	0,90	0,01		
		Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)																
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)																
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)																
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)																
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)																
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)																
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)																
			Panjang jembatan yang dibangun (Meter)																
943.	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.622.000.000		-		500.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	25		0		2		0		0,00		0		0,00			
944.	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			15.000.000.000		-		2.336.470.065		36.480.000	36,00	1,56		36.480.000	7,20	0,24		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	750		0		150		54		36,00		54		7,20			
945.	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			7.500.000.000		-		1.290.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	25		0		5		0		0,00		0		0,00			
946.	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			94.058.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	47		0		7		0		0,00		0		0,00			
947.	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			21.000.000.000		-		1.570.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	130		0		30		0		0,00		0		0,00			
948.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			262.478.000.000		-		5.112.080.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	92		0		5		0		0,00		0		0,00			
949.	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
950.	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			16.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
951.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**2.522.500.000**		**134.788.606**		**200.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	17		48,47		7		0		0,00		0		0,00			
952.	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1.740.462.000		115.023.606		168.449.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)																
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)																
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)																
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)																
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
953.	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			12.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
954.	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			1.104.513.500		112.728.606		132.039.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	515		0		60		0		0,00		0		0,00			
955.	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			148.448.500		2.295.000		36.410.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	186		0		25		0		0,00		0		0,00			
956.	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
957.	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
958.	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			55.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
959.	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
960.	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			280.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	330		0		0		0		0,00		0		0,00			
961.	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)																
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)																
962.	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
963.	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			106.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	15		0		4		0		0,00		0		0,00			
964.	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			57.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
965.	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			15.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
966.	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			557.038.000		19.765.000		31.551.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)																
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)																
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)																
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)																
			Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)																
967.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			320.963.000		19.765.000		31.551.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	210		10		15		0		0,00		0		0,00			
968.	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			72.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	145		0		0		0		0,00		0		0,00			
969.	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	5		0		25		0		0,00		0		0,00			
970.	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			99.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	66		0		15		0		0,00		0		0,00			
971.	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota			54.575.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
972.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**14.775.000.000**		**364.510.243**		**450.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaraan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
973.	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			2.675.000.000		364.510.243		375.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Perbup RDTR Yang ditetapkan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)																
974.	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			-		364.510.243		375.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
975.	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			1.250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
976.	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
977.	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			1.075.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
978.	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			9.450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Ada	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)																
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)																
979.	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			8.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		2		0		0,00		0		0,00			
980.	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
981.	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
982.	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.350.000.000		-		75.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)																
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)																
983.	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			450.000.000		-		75.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	20		0		12		0		0,00		0		0,00			
984.	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			900.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
985.	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)																
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)																
986.	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			850.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	42		0		0		0		0,00		0		0,00			
987.	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**115.521.160.000**		**737.696.792**		**1.820.000.000**		**41.044.800**	**0,00**	**2,26**		**41.044.800**	**0,00**	**0,04**		
988.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**3.853.040.000**		**158.101.192**		**300.000.000**		**18.089.900**	**0,00**	**6,03**		**18.089.900**	**0,00**	**0,47**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni (%) (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
989.	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			368.000.000		-		48.000.000		7.209.900	0,00	15,02		7.209.900	0,00	1,96		
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (dokumen)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)																
990.	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			368.000.000		-		48.000.000		7.209.900	0,00	15,02		7.209.900	0,00	1,96		
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
991.	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			180.000.000		-		22.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi progam pemerintah (orang)	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)																
992.	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			180.000.000		-		22.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	60		0		50		0		0,00		0		0,00			
993.	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			3.255.040.000		158.101.192		230.000.000		10.880.000	0,00	4,73		10.880.000	0,00	0,33		
		Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten (unit rumah)	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
994.	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			3.255.040.000		158.101.192		230.000.000		10.880.000	0,00	4,73		10.880.000	0,00	0,33		
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	3		2		3		0		0,00		0		0,00			
995.	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (laporan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)																
996.	1.04.02.2.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
997.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**61.368.120.000**		**579.595.600**		**56.000.000**		**3.595.000**	**0,00**	**6,42**		**3.595.000**	**0,00**	**0,01**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%) (%)	5		16,3		1,66		0		0,00		0		0,00			
998.	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			236.000.000		-		56.000.000		3.595.000	0,00	6,42		3.595.000	0,00	1,52		
		Luas Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha (hektar)	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)																
999.	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			34.000.000		-		32.000.000		3.595.000	0,00	11,23		3.595.000	0,00	10,57		
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	0		0		2		0		0,00		0		0,00			
1000.	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			202.000.000		-		24.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1001.	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			61.132.120.000		579.595.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha melalui peremajaan kawasan (Hektar)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)																
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)																
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)																
1002.	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			13.448.840.000		579.595.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	174		9		3		0		0,00		0		0,00			
1003.	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	9		0		12		0		0,00		0		0,00			
1004.	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			47.383.280.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	50		0		3		0		0,00		0		0,00			
1005.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**9.801.010.000**		**-**		**1.054.000.000**		**17.359.900**	**0,00**	**1,65**		**17.359.900**	**0,00**	**0,18**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		berkurangnya persentase kekumuhan pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%) (%)	5		0,66		1,66		0		0,00		0		0,00			
1006.	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			9.801.010.000		-		1.054.000.000		17.359.900	0,00	1,65		17.359.900	0,00	0,18		
		Luas Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Hektar)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)																
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)																
1007.	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			301.010.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1		0		3		0		0,00		0		0,00			
1008.	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			9.500.000.000		-		1.054.000.000		17.359.900	0,00	1,65		17.359.900	0,00	0,18		
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	3		0		15		0		0,00		0		0,00			
1009.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**39.788.790.000**		**-**		**410.000.000**		**2.000.000**	**0,00**	**0,49**		**2.000.000**	**0,00**	**0,01**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) (%)	100		9,89		30		9,89		32,97		9,89		9,89			
1010.	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			39.788.790.000		-		410.000.000		2.000.000	0,00	0,49		2.000.000	0,00	0,01		
		Jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU perumahan (lokasi)	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)																
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1011.	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			130.810.000		-		18.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	6		0		6		0		0,00		0		0,00			
1012.	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			39.657.980.000		-		392.000.000		2.000.000	0,00	0,51		2.000.000	0,00	0,01		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1013.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**710.200.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah dan PSU skala kecil (%) (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
1014.	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			710.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil (dokumen)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)																
1015.	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			710.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**569.432.660.773**		**20.707.722.537**		**23.598.173.980**		**4.157.817.995**	**13,93**	**17,62**		**4.157.817.995**	**3,43**	**0,73**		
1016.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**61.436.262.138**		**5.892.451.066**		**8.024.120.274**		**1.987.979.045**	**10,18**	**24,78**		**1.987.979.045**	**4,63**	**3,24**	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		25		100		20		20,00		20		20,00			
1017.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.739.910.525		5.567.424.792		7.707.220.274		1.935.739.924	12,44	25,12		1.935.739.924	8,60	7,82		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1018.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.575.560.525		5.555.429.792		7.686.020.274		1.934.763.924	28,99	25,17		1.934.763.924	5,80	7,87		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	345		69		69		20		28,99		20		5,80			
1019.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			71.200.000		6.997.000		14.100.000		976.000	8,33	6,92		976.000	20,00	1,37		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		12		1		8,33		1		20,00			
1020.	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			93.150.000		4.998.000		7.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		1		3		0		0,00		0		0,00			
1021.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.226.167.670		80.603.245		100.400.001		16.845.200	10,49	16,78		16.845.200	2,81	0,13		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1022.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.152.820.706		20.027.920		22.917.001		4.430.000	22,22	19,33		4.430.000	4,08	0,21		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	49		40		9		2		22,22		2		4,08			
1023.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.161.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	169		0		9		0		0,00		0		0,00			
1024.	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.781.246.964		17.775.000		12.000.000		2.339.000	0,00	19,49		2.339.000	0,00	0,05		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	169		12		9		0		0,00		0		0,00			
1025.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			663.000.000		19.179.000		17.064.000		3.412.700	7,14	20,00		3.412.700	0,57	0,51		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	174		40		14		1		7,14		1		0,57			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1026.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			148.100.000		10.000.000		7.501.000		1.151.700	40,00	15,35		1.151.700	9,52	0,78		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21		12		5		2		40,00		2		9,52			
1027.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		5		0		0,00		0		0,00			
1028.	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			637.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		5		0		0,00		0		0,00			
1029.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			109.000.000		-		4.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	9		0		5		0		0,00		0		0,00			
1030.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.555.000.000		13.621.325		36.918.000		5.511.800	25,00	14,93		5.511.800	11,11	0,35		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9		1		4		1		25,00		1		11,11			
1031.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.326.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1032.	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			3.567.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		2		0		0,00		0		0,00			
1033.	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.365.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	41		0		1		0		0,00		0		0,00			
1034.	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			394.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	21		0		1		0		0,00		0		0,00			
1035.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.649.683.944		156.858.207		113.700.000		22.127.079	19,44	19,46		22.127.079	14,07	1,34		
		terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1036.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			33.500.000		3.100.000		5.000.000		1.000.000	8,33	20,00		1.000.000	20,00	2,99		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		12		1		8,33		1		20,00			
1037.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			845.183.944		58.908.131		69.700.000		9.127.079	25,00	13,09		9.127.079	11,11	1,08		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9		1		4		1		25,00		1		11,11			
1038.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			771.000.000		94.850.076		39.000.000		12.000.000	25,00	30,77		12.000.000	11,11	1,56		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		1		4		1		25,00		1		11,11			
1039.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.493.999.999		87.564.822		102.799.999		13.266.842	7,94	12,91		13.266.842	1,33	0,38		
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1040.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.152.400.000		79.579.822		89.800.000		13.266.842	23,81	14,77		13.266.842	4,00	1,15		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	125		15		21		5		23,81		5		4,00			
1041.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.149.699.999		7.985.000		12.999.999		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		10		20		0		0,00		0		0,00			
1042.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.191.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1043.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**304.627.836.379**		**2.575.411.291**		**877.000.000**		**120.664.236**	**0,63**	**13,76**		**120.664.236**	**1,20**	**0,04**	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kerbakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (%)	100		25		100		21		21,00		21		21,00			
1044.	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			302.164.422.376		833.761.983		785.320.000		112.924.236	0,00	14,38		112.924.236	0,00	0,04		
		Terlaksananya Kegiatan Pencegahan,Pengedalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)																
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)																
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)																
1045.	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			142.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1046.	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.700.000.000		274.100.000		390.000.000		48.100.000	0,00	12,33		48.100.000	0,00	0,38		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1047.	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			1.065.000.000		1.460.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1048.	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			208.000.000		445.000		1.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1049.	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			136.157.012.303		521.144.483		378.700.000		64.824.236	0,00	17,12		64.824.236	0,00	0,05		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1050.	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			423.000.000		36.612.500		15.420.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	15		130		500		0		0,00		0		0,00			
1051.	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			107.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	57		0		13		0		0,00		0		0,00			
1052.	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			150.556.410.073		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	26		0		1		0		0,00		0		0,00			
1053.	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			141.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1054.	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			665.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	245		0		50		0		0,00		0		0,00			
1055.	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			174.500.000		28.265.000		5.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)																
1056.	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			80.000.000		28.265.000		5.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	8		1		1		0		0,00		0		0,00			
1057.	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			94.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1058.	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			129.100.000		4.685.000		2.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)																
1059.	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			129.100.000		4.685.000		2.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	8		1		1		0		0,00		0		0,00			
1060.	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.912.814.003		1.707.154.308		82.530.000		7.740.000	5,00	9,38		7.740.000	7,19	0,40		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)																
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)																
1061.	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			1.587.000.000		1.690.754.308		82.530.000		7.740.000	10,00	9,38		7.740.000	1,56	0,49		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	3200		500		500		50		10,00		50		1,56			
1062.	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			208.314.003		16.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	45		13		13		0		0,00		0		0,00			
1063.	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			117.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	5		0		0		1		0,00		1		20,00			
1064.	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			247.000.000		1.545.000		1.700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaranaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)																
1065.	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			124.500.000		1.545.000		1.700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1066.	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			122.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	7		0		1		0		0,00		0		0,00			
1067.	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**47.409.190.513**		**5.839.031.862**		**7.832.267.589**		**1.822.875.226**	**16,89**	**23,27**		**1.822.875.226**	**2,62**	**3,84**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
1068.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			988.000.000		8.858.000		14.284.000		4.732.000	31,25	33,13		4.732.000	5,21	0,48		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
1069.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			155.000.000		8.858.000		14.284.000		4.732.000	31,25	33,13		4.732.000	41,67	3,05		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		19		16		5		31,25		5		41,67			
1070.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1071.	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			108.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1072.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1073.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1074.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	64		0		0		0		0,00		0		0,00			
1075.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1076.	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			155.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1077.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.386.694.970		5.657.465.783		7.359.825.589		1.756.840.745	50,00	23,87		1.756.840.745	4,00	6,19		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1078.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.922.434.970		5.652.423.783		7.353.760.589		1.750.775.745	0,00	23,81		1.750.775.745	0,00	6,27		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79		14		129		0		0,00		0		0,00			
1079.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
1080.	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			93.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	24		0		0		0		0,00		0		0,00			
1081.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			131.260.000		5.042.000		6.065.000		6.065.000	100,00	100,00		6.065.000	20,00	4,62		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90		18		18		18		100,00		18		20,00			
1082.	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			90.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1083.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.428.003.343		4.991.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
1084.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			860.503.343		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	625		0		136		0		0,00		0		0,00			
1085.	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			83.500.000		4.991.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	240		4		4		0		0,00		0		0,00			
1086.	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			77.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	308		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1087.	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			77.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	308		0		0		0		0,00		0		0,00			
1088.	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			330.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1089.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.130.972.200		52.311.000		116.601.000		15.238.199	15,37	13,07		15.238.199	3,10	0,37		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1090.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			191.804.000		1.500.000		1.995.000		382.000	25,00	19,15		382.000	3,85	0,20		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26		4		4		1		25,00		1		3,85			
1091.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.483.108.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	63		0		3		0		0,00		0		0,00			
1092.	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			460.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14		0		0		0		0,00		0		0,00			
1093.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			503.999.700		14.598.000		15.601.100		3.071.199	25,00	19,69		3.071.199	8,33	0,61		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		4		4		1		25,00		1		8,33			
1094.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			490.558.800		7.277.100		9.006.600		2.215.000	20,00	24,59		2.215.000	7,69	0,45		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13		5		5		1		20,00		1		7,69			
1095.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			109.200.000		3.990.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1096.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			892.301.700		24.945.900		89.998.300		9.570.000	22,22	10,63		9.570.000	1,85	1,07		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	108		60		9		2		22,22		2		1,85			
1097.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersedian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1098.	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1099.	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	24		0		1		0		0,00		0		0,00			
1100.	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	95		0		20		0		0,00		0		0,00			
1101.	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1102.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.402.100.000		9.593.379		11.500.000		1.914.702	8,33	16,65		1.914.702	1,67	0,14		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1103.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			105.600.000		600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1104.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			326.500.000		8.993.379		11.500.000		1.914.702	25,00	16,65		1.914.702	5,00	0,59		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
1105.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			970.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		0		36		0		0,00		0		0,00			
1106.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.473.420.000		105.812.700		330.057.000		44.149.580	27,78	13,38		44.149.580	1,50	1,27		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1107.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.020.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	64		0		0		0		0,00		0		0,00			
1108.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.140.450.000		102.832.700		271.630.000		43.729.580	22,22	16,10		43.729.580	4,88	3,83		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41		9		9		2		22,22		2		4,88			
1109.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			562.970.000		2.980.000		58.427.000		420.000	33,33	0,72		420.000	1,14	0,07		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	176		6		6		2		33,33		2		1,14			
1110.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1111.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**26.898.627.604**		**268.895.800**		**753.055.020**		**139.212.267**	**28,81**	**18,49**		**139.212.267**	**2,62**	**0,52**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
1112.	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.278.473.104		208.970.800		533.001.900		124.942.267	34,94	23,44		124.942.267	2,50	0,59		
		Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)																
1113.	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			307.491.600		23.605.000		53.512.300		2.075.000	100,00	3,88		2.075.000	6,25	0,67		
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	16		1		1		1		100,00		1		6,25			
		Jumlah pemenuhan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas dalam Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)																
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)																
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)																
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)																
1114.	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			2.092.835.359		-		69.101.000		4.500.000	25,00	6,51		4.500.000	15,04	0,22		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	226		0		136		34		25,00		34		15,04			
1115.	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan			250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1116.	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			428.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	1555		0		0		0		0,00		0		0,00			
1117.	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			335.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	64		0		0		0		0,00		0		0,00			
1118.	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			5.225.053.904		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1136		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Standar Sarana Prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)																
1119.	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.719.919.643		15.000.000		18.669.100		13.609.488	30,00	72,90		13.609.488	0,17	0,18		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1724		10		10		3		30,00		3		0,17			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)																
1120.	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			290.155.000		11.675.400		32.664.600		2.450.000	23,33	7,50		2.450.000	3,78	0,84		
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	185		25		30		7		23,33		7		3,78			
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)																
1121.	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			467.398.000		3.908.192		52.427.800		1.000.000	23,33	1,91		1.000.000	3,33	0,21		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	210		30		30		7		23,33		7		3,33			
1122.	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			225.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	39		0		0		0		0,00		0		0,00			
1123.	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			220.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)																
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)																
1124.	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			674.765.000		19.257.208		52.046.000		2.152.779	23,33	4,14		2.152.779	4,49	0,32		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	156		7		30		7		23,33		7		4,49			
1125.	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			680.773.198		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	108		0		0		0		0,00		0		0,00			
1126.	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			1.398.701.100		106.625.000		103.581.100		61.090.000	27,27	58,98		61.090.000	1,04	4,37		
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	577		22		22		6		27,27		6		1,04			
1127.	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			785.195.300		28.900.000		151.000.000		38.065.000	27,27	25,21		38.065.000	5,88	4,85		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	102		31		22		6		27,27		6		5,88			
1128.	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			178.185.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	140		0		0		0		0,00		0		0,00			
1129.	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			4.818.426.600		46.090.000		119.276.060		13.200.000	25,00	11,07		13.200.000	0,83	0,27		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)																
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)																
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)																
1130.	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			2.705.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1131.	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			209.040.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
1132.	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			165.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	31		0		0		0		0,00		0		0,00			
1133.	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1134.	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			460.421.300		16.640.000		39.481.960		3.250.000	25,00	8,23		3.250.000	1,14	0,71		
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	264		12		12		3		25,00		3		1,14			
1135.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			666.665.400		25.060.000		64.364.800		7.705.000	25,00	11,97		7.705.000	3,35	1,16		
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	179		10		24		6		25,00		6		3,35			
1136.	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			472.299.900		4.390.000		15.429.300		2.245.000	25,00	14,55		2.245.000	1,30	0,48		
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	230		12		12		3		25,00		3		1,30			
1137.	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			801.727.900		13.835.000		100.777.060		1.070.000	10,00	1,06		1.070.000	6,25	0,13		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)																
1138.	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1139.	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			175.000.000		5.660.000		16.220.060		1.070.000	20,00	6,60		1.070.000	25,00	0,61		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		2		5		1		20,00		1		25,00			
1140.	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
1141.	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			206.727.900		8.175.000		84.557.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	4		2		2		0		0,00		0		0,00			
1142.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.371.309.585		6.118.482.518		5.626.362.897		68.588.653	13,00	1,22		68.588.653	2,65	0,21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
1143.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			363.379.000		3.786.465.807		3.000.000		3.490.000	14,29	116,33		3.490.000	1,67	0,96		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
1144.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			129.682.000		3.786.465.807		3.000.000		3.490.000	28,57	116,33		3.490.000	6,67	2,69		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		7		2		28,57		2		6,67			
1145.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			133.697.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		0		5		0		0,00		0		0,00			
1146.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1147.	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1148.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.898.368.009		1.963.544.192		5.364.241.897		5.234.000	19,58	0,10		5.234.000	6,56	0,03		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1149.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.620.364.009		1.937.274.192		5.346.124.897		-	33,33	0,00		-	1,23	0,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	325		11		12		4		33,33		4		1,23			
1150.	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			156.520.000		26.270.000		15.120.000		3.780.000	25,00	25,00		3.780.000	5,00	2,42		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		10		12		3		25,00		3		5,00			
1151.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			68.984.000		-		2.997.000		1.454.000	20,00	48,52		1.454.000	20,00	2,11		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		5		1		20,00		1		20,00			
1152.	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			52.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
1153.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.052.590.000		-		3.008.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
1154.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			570.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	380		0		0		0		0,00		0		0,00			
1155.	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			153.476.000		-		3.008.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
1156.	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			235.114.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45		0		2		0		0,00		0		0,00			
1157.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			94.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
1158.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.678.544.388		152.864.600		68.321.500		22.076.200	7,36	32,31		22.076.200	3,96	1,32		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)																
1159.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			76.491.000		-		490.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		12		0		0,00		0		0,00			
1160.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			401.727.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		5		0		0,00		0		0,00			
1161.	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			131.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1162.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			231.040.800		65.821.100		23.475.500		4.160.600	20,00	17,72		4.160.600	20,00	1,80		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		5		1		20,00		1		20,00			
1163.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			171.560.000		-		14.018.000		2.312.400	20,00	16,50		2.312.400	10,00	1,35		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		5		1		20,00		1		10,00			
1164.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			104.150.000		1.323.000		750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		1		5		0		0,00		0		0,00			
1165.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			510.475.588		85.720.500		29.588.000		15.603.200	4,17	52,73		15.603.200	1,67	3,06		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		62		24		1		4,17		1		1,67			
1166.	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			52.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1167.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.568.954.688		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1168.	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1169.	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			3.622.635.688		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1170.	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			264.266.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		10		0		0,00		0		0,00			
1171.	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			212.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1172.	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1173.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			81.153.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		3		0		0,00		0		0,00			
1174.	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			88.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
1175.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.800.000		101.394.047		99.480.000		20.484.993	15,00	20,59		20.484.993	2,22	4,54		
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1176.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.800.000		-		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		1		0		0,00		0		0,00			
1177.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			249.000.000		68.449.047		62.980.000		14.484.993	25,00	23,00		14.484.993	5,00	5,82		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		10		12		3		25,00		3		5,00			
1178.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			194.000.000		32.945.000		36.000.000		6.000.000	20,00	16,67		6.000.000	1,67	3,09		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		5		1		20,00		1		1,67			
1179.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.358.673.500		114.213.872		88.311.500		17.303.460	30,00	19,59		17.303.460	4,33	1,27		
		Meniingkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1180.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			743.657.500		100.473.628		82.017.500		17.228.460	40,00	21,01		17.228.460	5,00	2,32		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		7		5		2		40,00		2		5,00			
1181.	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			170.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1182.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			71.040.000		13.740.244		5.250.000		75.000	50,00	1,43		75.000	16,67	0,11		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		4		2		1		50,00		1		16,67			
1183.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			217.976.000		-		1.044.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
1184.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			156.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1185.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**95.689.434.554**		**13.450.000**		**485.368.200**		**18.498.568**	**17,75**	**3,81**		**18.498.568**	**6,26**	**0,02**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 2. meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap daeurat, 2. meninfkatnya penanganan bencana pada saat pasca benca	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
			Persentase penanganan pasca bencana (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
			Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
1186.	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			5.854.818.800		-		65.763.000		12.420.000	1,00	18,89		12.420.000	0,10	0,21		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)																
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
1187.	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			3.779.818.800		-		65.763.000		12.420.000	1,00	18,89		12.420.000	0,20	0,33		
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	500		0		100		1		1,00		1		0,20			
1188.	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			2.075.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1189.	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			57.270.958.140		-		325.575.000		6.078.568	37,60	1,87		6.078.568	18,75	0,01		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)																
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)																
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)																
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)																
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)																
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)																
1190.	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			7.875.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
1191.	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			3.975.326.500		-		41.534.000		449.528	10,00	1,08		449.528	1,25	0,01		
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	80		0		10		1		10,00		1		1,25			
1192.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			2.105.411.096		-		39.035.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	750		0		150		0		0,00		0		0,00			
1193.	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			1.330.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	250		0		50		0		0,00		0		0,00			
1194.	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			2.387.873.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
1195.	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	200		0		50		0		0,00		0		0,00			
1196.	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			8.950.001.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1197.	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			12.430.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1198.	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			12.123.245.000		-		199.866.000		5.629.040	60,00	2,82		5.629.040	5,00	0,05		
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	60		0		5		3		60,00		3		5,00			
1199.	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1200.	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			2.094.101.544		-		45.140.000		-	230,77	0,00		-	200,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	15		0		13		30		230,77		30		200,00			
1201.	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			14.142.199.614		13.450.000		8.604.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)																
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)																
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)																
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)																
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)																
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)																
1202.	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			2.595.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1203.	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1.800.000.000		-		2.964.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	48		0		5		0		0,00		0		0,00			
1204.	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1.806.407.525		-		5.640.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	40		0		50		0		0,00		0		0,00			
1205.	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			646.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1206.	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota			1.642.479.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	120		0		89		0		0,00		0		0,00			
1207.	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1.640.158.025		13.450.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	200		3		200		0		0,00		0		0,00			
1208.	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			2.537.155.064		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1209.	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1.475.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	20		0		2		0		0,00		0		0,00			
1210.	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			18.421.458.000		-		85.426.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)																
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)																
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)																
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)															
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)																
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)																
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)														
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																
1211.	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			975.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1212.	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			610.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1213.	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			6.274.693.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1214.	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			2.300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1215.	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			757.357.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1216.	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			2.492.550.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	200		0		30		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1217.	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			1.662.882.500		-		85.426.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	4		0		5		0		0,00		0		0,00			
1218.	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			1.687.608.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1219.	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota			782.882.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1220.	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			454.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1221.	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			394.485.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1222.	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**77.924.035.832**		**6.767.321.997**		**5.373.439.929**		**1.008.723.607**	**1,67**	**18,77**		**1.008.723.607**	**0,13**	**1,29**		
1223.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.688.415.500**		**3.921.102.778**		**4.306.639.929**		**986.142.429**	**4,17**	**22,90**		**986.142.429**	**0,25**	**3,21**	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		11,6		11,60		11,6		11,60			
1224.	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			372.700.000		13.946.700		6.925.000		-	50,00	0,00		-	1,43	0,00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
1225.	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			121.700.000		8.211.900		6.925.000		-	50,00	0,00		-	10,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		50,00		1		10,00			
1226.	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			22.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1227.	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			22.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1228.	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			22.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1229.	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			22.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1230.	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			140.000.000		5.734.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	75		15		0		0		0,00		0		0,00			
1231.	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1232.	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.778.267.876		3.734.401.933		4.063.039.929		961.292.435	0,00	23,66		961.292.435	0,00	5,12		
		Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1233.	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.687.767.876		3.734.401.933		4.063.039.929		961.292.435	0,00	23,66		961.292.435	0,00	5,14		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		38		59		0		0,00		0		0,00			
1234.	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			21.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36		0		0		0		0,00		0		0,00			
1235.	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			24.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1236.	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			21.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1237.	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1238.	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			44.479.000		2.246.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
1239.	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			21.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1240.	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			23.479.000		2.246.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			
1241.	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			129.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
1242.	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			77.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	154		0		0		0		0,00		0		0,00			
1243.	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14		0		0		0		0,00		0		0,00			
1244.	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.174.762.600		51.508.039		62.315.000		14.057.490	0,00	22,56		14.057.490	0,00	1,20		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1245.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			107.081.000		1.500.000		2.847.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1246.	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1247.	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			42.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1248.	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			232.984.900		12.476.000		14.657.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1249.	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			116.312.700		8.079.200		8.542.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1250.	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1251.	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000		4.723.430		4.995.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1252.	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			525.384.000		24.729.409		31.273.000		14.057.490	0,00	44,95		14.057.490	0,00	2,68		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1253.	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.106.512.000		3.970.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1254.	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.540.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1255.	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.070.408.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
1256.	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			622.043.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	66		0		0		0		0,00		0		0,00			
1257.	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			727.607.000		3.970.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		2		0		0		0,00		0		0,00			
1258.	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.146.454.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1259.	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			884.634.530		22.549.326		104.700.000		5.205.254	0,00	4,97		5.205.254	0,00	0,59		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1260.	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.750.000		500.000		500.000		100.000	0,00	20,00		100.000	0,00	1,03		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		6		0		0,00		0		0,00			
1261.	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			216.442.000		22.049.326		25.000.000		5.105.254	0,00	20,42		5.105.254	0,00	2,36		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1262.	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1263.	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			634.442.530		-		79.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
1264.	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.198.059.494		92.480.780		69.660.000		5.587.250	0,00	8,02		5.587.250	0,00	0,17		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1265.	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			164.380.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1266.	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.326.209.800		87.690.780		63.650.000		5.587.250	0,00	8,78		5.587.250	0,00	0,42		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		5		15		0		0,00		0		0,00			
1267.	1.06.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1268.	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			22.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1269.	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			128.850.000		4.790.000		6.010.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54		6		9		0		0,00		0		0,00			
1270.	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.226.619.694		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1271.	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1272.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**4.737.502.800**		**-**		**5.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	20		20		20		5		25,00		5		25,00			
			Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	20		20		20		5		25,00		5		25,00			
			Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1273.	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			4.737.502.800		-		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)																
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)																
1274.	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1.322.860.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1275.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.113.000.000		-		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
1276.	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			242.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	71		0		0		0		0,00		0		0,00			
1277.	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.059.642.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	469		0		93		0		0,00		0		0,00			
1278.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**34.135.612.807**		**2.514.649.781**		**518.650.000**		**15.376.174**	**0,00**	**2,96**		**15.376.174**	**0,00**	**0,05**	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25		25		25		4		16,00		4		16,00			
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25		25		25		3		12,00		3		12,00			
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25		25		25		0		0,00		0		0,00			
			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25		25		25		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	20		20		20		0		0,00		0		0,00			
1279.	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			21.911.329.377		685.492.749		496.850.000		15.376.174	0,00	3,09		15.376.174	0,00	0,07		
		Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1280.	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			607.834.000		7.052.000		25.000.000		2.535.000	0,00	10,14		2.535.000	0,00	0,42		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	210		78		15		0		0,00		0		0,00			
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1281.	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			673.302.740		-		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	650		0		50		0		0,00		0		0,00			
1282.	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			859.185.000		68.075.443		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	155		12		4		0		0,00		0		0,00			
1283.	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			411.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	95		0		0		0		0,00		0		0,00			
1284.	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			14.899.497.746		544.236.602		35.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14550		595		30		0		0,00		0		0,00			
1285.	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1286.	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1287.	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			1.739.898.016		11.221.200		290.750.000		12.141.174	0,00	4,18		12.141.174	0,00	0,70		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1375		10		277		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1288.	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.058.611.875		10.300.516		56.100.000		700.000	0,00	1,25		700.000	0,00	0,07		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	665		8		17		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1289.	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			1.382.000.000		44.606.988		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	690		43		40		0		0,00		0		0,00			
1290.	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			12.224.283.430		1.829.157.032		21.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)																
1291.	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			1.438.552.200		449.846.873		21.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	230		99		154		0		0,00		0		0,00			
1292.	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			2.881.229.200		1.264.749.309		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	529		192		100		0		0,00		0		0,00			
1293.	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			7.569.502.030		114.560.850		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	326		79		0		0		0,00		0		0,00			
1294.	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1295.	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1296.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**3.058.315.329**		**-**		**12.278.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	0,67		0,67		0,67		0,1		14,93		0,1		14,93			
			Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100		100		100		30		30,00		30		30,00			
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1,34		1,34		1,34		0		0,00		0		0,00			
1297.	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			247.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1298.	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			83.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	43		0		0		0		0,00		0		0,00			
1299.	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar			82.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	41		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1300.	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			82.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	41		0		0		0		0,00		0		0,00			
1301.	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.811.315.329		-		12.278.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)																
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)																
1302.	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			521.000.000		-		12.278.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1371590		0		279510		0		0,00		0		0,00			
1303.	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			806.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	163		0		0		0		0,00		0		0,00			
1304.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			1.098.315.329		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	87258		0		0		0		0,00		0		0,00			
1305.	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			386.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	3000		0		0		0		0,00		0		0,00			
1306.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**4.678.561.896**		**292.427.028**		**503.150.000**		**7.205.004**	**0,00**	**1,43**		**7.205.004**	**0,00**	**0,15**	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100		100		100		12		12,00		12		12,00			
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1307.	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			3.529.861.896		292.427.028		503.150.000		7.205.004	0,00	1,43		7.205.004	0,00	0,20		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1308.	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			1.309.713.096		213.731.769		270.850.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1173		272		228		0		0,00		0		0,00			
		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1309.	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			949.974.600		73.870.259		157.300.000		7.205.004	0,00	4,58		7.205.004	0,00	0,76		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700		41		100		0		0,00		0		0,00			
1310.	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			145.510.000		4.825.000		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	53		2		9		0		0,00		0		0,00			
1311.	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			324.664.200		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		50		0		0,00		0		0,00			
1312.	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1313.	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.148.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
1314.	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			748.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	180		0		20		0		0,00		0		0,00			
1315.	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	128		0		0		0		0,00		0		0,00			
1316.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**625.627.500**		**39.142.410**		**27.722.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS SOSIAL	
		Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	95		95		95		0		0,00		0		0,00			
1317.	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			625.627.500		39.142.410		27.722.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)																
1318.	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			252.827.500		39.142.410		27.722.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1319.	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1320.	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			172.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**15.889.450.581**		**2.083.973.949**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
1321.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**87.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1322.	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			87.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen RTK Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)																
1323.	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			87.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1324.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**9.863.003.934**		**2.082.784.049**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya (%)	100		90,64		60		0		0,00		0		0,00			
1325.	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			9.422.430.334		2.082.784.049		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)																
1326.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			3.879.166.164		2.082.784.049		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	672		347		32		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)																
1327.	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			207.737.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)																
1328.	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			5.335.526.370		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1329.	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			214.473.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)																
1330.	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			214.473.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
1331.	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			226.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)																
1332.	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			226.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1333.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**3.449.446.647**		**1.189.900**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negri (%)	100		2,5		60		0		0,00		0		0,00			
1334.	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2.449.446.647		1.189.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtrk dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)																
1335.	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Pelayanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)																
1336.	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)																
1337.	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)																
1338.	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			929.446.647		1.189.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	520		28		16		0		0,00		0		0,00			
1339.	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)																
1340.	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
1341.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**2.490.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
1342.	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			930.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Data LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)																
1343.	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			420.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)																
1344.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			310.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)																
1345.	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1346.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			1.560.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)																
1347.	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Terselenggaranya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)																
1348.	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)																
1349.	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			160.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Terlaksananya pengembangan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)																
1350.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)																
1351.	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**11.552.682.385**		**-**		**673.000.000**		**1.400.200**	**0,00**	**0,21**		**1.400.200**	**0,00**	**0,01**		
1352.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**3.580.787.710**		**-**		**140.000.000**		**1.400.200**	**0,00**	**1,00**		**1.400.200**	**0,00**	**0,04**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,98		5,2		4,78		1,01		21,13		1,01		16,89			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	79,3		64,3		69,30		1,01		1,46		1,01		1,27			
1353.	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1.138.036.710		-		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)																
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)																
			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)																
1354.	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			146.691.620		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	202		0		0		0		0,00		0		0,00			
1355.	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			149.078.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	202		0		43		0		0,00		0		0,00			
1356.	2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			148.078.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1357.	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			148.078.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	172		0		0		0		0,00		0		0,00			
1358.	2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			148.078.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1359.	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			262.078.100		-		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	227		0		43		0		0,00		0		0,00			
1360.	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			135.954.590		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	850		0		0		0		0,00		0		0,00			
1361.	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.225.896.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Manajerial/Jabatan Pimpinan pratama dan administrator) pada lembaga pemerintah	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)																
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)																
			jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)																
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)																
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)																
1362.	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			142.649.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	120		0		30		0		0,00		0		0,00			
1363.	2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			142.649.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	124		0		0		0		0,00		0		0,00			
1364.	2.08.02.2.02.0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			142.649.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	124		0		0		0		0,00		0		0,00			
1365.	2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			142.649.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	37		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1366.	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			272.649.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	1300		0		50		0		0,00		0		0,00			
1367.	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			382.647.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	500		0		100		0		0,00		0		0,00			
1368.	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.216.854.900		-		120.000.000		1.400.200	0,00	1,17		1.400.200	0,00	0,12		
		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)																
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)																
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)																
1369.	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			382.680.120		-		120.000.000		1.400.200	0,00	1,17		1.400.200	0,00	0,37		
		terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	168		0		30		0		0,00		0		0,00			
1370.	2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			208.545.120		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	38		0		0		0		0,00		0		0,00			
1371.	2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			208.545.120		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	38		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1372.	2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			208.545.120		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	840		0		0		0		0,00		0		0,00			
1373.	2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.			208.539.420		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	172		0		0		0		0,00		0		0,00			
1374.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1.727.807.687**		**-**		**111.884.300**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		85		85,50		0		0,00		0		0,00			
1375.	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			803.519.878		-		55.044.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)																
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)																
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)																
			Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)																
1376.	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			28.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1377.	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			283.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	23		0		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1378.	2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			28.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	960		0		0		0		0,00		0		0,00			
1379.	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			436.519.878		-		55.044.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	100		0		25		0		0,00		0		0,00			
1380.	2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota			28.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1381.	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			410.700.000		-		36.640.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)																
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)																
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)																
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)																
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)																
1382.	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			85.000.000		-		7.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	13		0		4		0		0,00		0		0,00			
1383.	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			30.000.000		-		3.250.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	101		0		1		0		0,00		0		0,00			
1384.	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			46.250.000		-		4.350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	44		0		15		0		0,00		0		0,00			
1385.	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			123.100.000		-		7.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		4		0		0,00		0		0,00			
1386.	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			22.000.000		-		2.325.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	30		0		10		0		0,00		0		0,00			
1387.	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			47.500.000		-		6.615.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	68		0		15		0		0,00		0		0,00			
1388.	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			56.850.000		-		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	67		0		15		0		0,00		0		0,00			
1389.	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			513.587.809		-		20.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi perempuan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)																
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)																
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)																
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)																
1390.	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1391.	2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
1392.	2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1393.	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			264.000.000		-		20.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	1200		0		200		0		0,00		0		0,00			
1394.	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			177.587.809		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	20		0		12		0		0,00		0		0,00			
1395.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**582.444.418**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR (Unit)	80		20		30		0		0,00		0		0,00			
1396.	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			163.244.418		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Keluarga yang mendapatkan pembelajaran dalam mewujudakan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)																
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)																
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)																
1397.	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			40.811.106		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1398.	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			40.811.104		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1399.	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.			40.811.104		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21		0		0		0		0,00		0		0,00			
1400.	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			40.811.104		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1401.	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			269.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)																
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																
1402.	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1403.	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			149.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	90		0		50		0		0,00		0		0,00			
1404.	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1405.	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1406.	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1407.	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			149.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Keluarga yang mendapat layanan komprehensif dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)																
1408.	2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1409.	2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1410.	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	145		0		0		0		0,00		0		0,00			
1411.	2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1412.	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			29.920.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1413.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**520.764.016**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN,EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN (%)	75		0		75		0		0,00		0		0,00			
1414.	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			520.764.016		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah data gender dan anak yang tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)																
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)																
			Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)																
1415.	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			97.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		0		14		0		0,00		0		0,00			
1416.	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak			223.764.016		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	66		0		14		0		0,00		0		0,00			
1417.	2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1418.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**1.367.949.438**		**-**		**74.728.700**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) (Indeks)	70,2		65,68		60,6		0		0,00		0		0,00			
1419.	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			1.107.949.438		-		74.728.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah PD/Lembaga/Organisasi yang memahami PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																
			jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
1420.	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			862.949.438		-		74.728.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	150		0		25		0		0,00		0		0,00			
1421.	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120		0		0		0		0,00		0		0,00			
1422.	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			205.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	107		0		12		0		0,00		0		0,00			
1423.	2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1424.	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			260.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)																
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
1425.	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	280		0		325		0		0,00		0		0,00			
1426.	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1427.	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			95.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	54		0		14		0		0,00		0		0,00			
1428.	2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1429.	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	23		0		0		0		0,00		0		0,00			
1430.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**3.772.929.116**		**-**		**346.387.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi , penelantaran, perkawinan dan perlakuan lainnya terhadap anak	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) (Indeks)	82,2		86,41		81,7		0		0,00		0		0,00			
			PERSENTASE ANAK MEMRLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%)	100		100		85,50		0		0,00		0		0,00			
1431.	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.135.000.000		-		97.227.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)																
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)																
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)																
			Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)																
1432.	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			23.320.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1433.	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.018.320.000		-		97.227.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	133		0		8		0		0,00		0		0,00			
1434.	2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			23.320.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1435.	2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			23.320.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	23		0		0		0		0,00		0		0,00			
1436.	2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			23.320.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
1437.	2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota			23.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1438.	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.862.929.116		-		200.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)																
1439.	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.854.116		-		62.435.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	410		0		70		0		0,00		0		0,00			
1440.	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			347.875.000		-		35.775.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	354		0		70		0		0,00		0		0,00			
1441.	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			93.375.000		-		18.750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	111		0		90		0		0,00		0		0,00			
1442.	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			30.000.000		-		3.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	125		0		1		0		0,00		0		0,00			
1443.	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			257.900.000		-		14.740.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		10		0		0,00		0		0,00			
1444.	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			507.925.000		-		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	400		0		70		0		0,00		0		0,00			
1445.	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			150.000.000		-		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		8		0		0,00		0		0,00			
1446.	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000		-		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		15		0		0,00		0		0,00			
1447.	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			775.000.000		-		49.160.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi anak yang memerlukan perlindugan khusus	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)																
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)																
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)																
			jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																
1448.	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			162.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	38		0		8		0		0,00		0		0,00			
1449.	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			177.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	41		0		10		0		0,00		0		0,00			
1450.	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	29		0		0		0		0,00		0		0,00			
1451.	2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1452.	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			77.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	28		0		8		0		0,00		0		0,00			
1453.	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai			287.856.000		-		49.160.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	1100		0		100		0		0,00		0		0,00			
1454.	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22.864.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**23.117.268.855**		**2.931.858.330**		**2.955.591.766**		**680.725.635**	**23,70**	**23,03**		**680.725.635**	**4,69**	**2,94**		
1455.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.751.213.155**		**2.796.718.224**		**2.630.591.766**		**648.884.153**	**28,99**	**24,67**		**648.884.153**	**5,88**	**4,40**	DINAS PANGAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		400		100		25		25,00		25		25,00			
1456.	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			237.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	2,86	0,00		
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
1457.	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		1		0,00		1		20,00			
1458.	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1459.	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1460.	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1461.	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1462.	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1463.	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
1464.	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.813.556.993		2.272.557.512		2.444.081.766		607.505.483	0,00	24,86		607.505.483	0,00	6,19		
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1465.	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.527.556.993		2.272.557.512		2.444.081.766		607.505.483	0,00	24,86		607.505.483	0,00	6,38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		27		0		0		0,00		0		0,00			
1466.	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	420		0		40		0		0,00		0		0,00			
1467.	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1468.	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5		0		24		0		0,00		0		0,00			
1469.	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			38.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1470.	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1471.	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			33.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1472.	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			41.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1473.	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			485.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya tingkat Disiplin Aparatur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1474.	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	240		0		25		0		0,00		0		0,00			
1475.	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	213		0		0		0		0,00		0		0,00			
1476.	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			45.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		40		0		0,00		0		0,00			
1477.	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.469.061.360		134.606.600		51.880.000		13.443.400	70,00	25,91		13.443.400	14,29	0,92		
		Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1478.	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			59.033.300		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1479.	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			264.072.000		65.198.000		7.758.000		6.143.400	20,00	79,19		6.143.400	20,00	2,33		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		20		5		1		20,00		1		20,00			
1480.	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1481.	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			104.952.000		16.850.000		12.997.800		4.000.000	100,00	30,77		4.000.000	20,00	3,81		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1482.	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.287.810		9.993.600		7.682.200		300.000	100,00	3,91		300.000	20,00	0,47		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1483.	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			87.528.000		3.840.000		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1484.	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			849.188.250		38.725.000		23.442.000		3.000.000	100,00	12,80		3.000.000	20,00	0,35		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1485.	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			725.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlakasananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
1486.	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			680.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
1487.	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			45.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1488.	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			435.290.000		70.544.504		49.910.000		12.819.508	66,67	25,69		12.819.508	13,33	2,95		
		Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1489.	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			33.870.000		612.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		4		1		0		0,00		0		0,00			
1490.	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.420.000		4.932.504		6.710.000		1.282.044	100,00	19,11		1.282.044	20,00	3,10		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1491.	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			360.000.000		65.000.000		43.200.000		11.537.464	100,00	26,71		11.537.464	20,00	3,20		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
1492.	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.586.304.802		319.009.608		84.720.000		15.115.762	5,93	17,84		15.115.762	10,00	0,95		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1493.	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			341.000.000		134.404.608		79.590.000		9.985.762	11,11	12,55		9.985.762	20,00	2,93		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		36		9		1		11,11		1		20,00			
1494.	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95		0		1		0		0,00		0		0,00			
1495.	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		-		5.130.000		5.130.000	6,67	100,00		5.130.000	20,00	10,26		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		15		1		6,67		1		20,00			
1496.	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			795.304.802		184.605.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		0		0		0,00		0		0,00			
1497.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**740.970.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PANGAN	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	100		0		100		0		0,00		0		0,00			
1498.	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			740.970.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat yang didukung dengan adanya Insfrastruktur dan Sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)																
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)																
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)																
1499.	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1500.	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			140.970.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1501.	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1502.	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**6.373.252.000**		**99.963.106**		**265.295.000**		**30.361.482**	**20,00**	**11,44**		**30.361.482**	**3,10**	**0,48**	DINAS PANGAN	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	93,4		90,9		91,4		0		0,00		0		0,00			
1503.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			5.089.370.000		65.529.800		100.000.200		12.580.000	14,29	12,58		12.580.000	2,27	0,25		
		Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)																
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)																
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)																
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)																
			Informasi Stok Pangan (Dokumen)																
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)																
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)																
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
1504.	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			95.628.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1505.	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			148.474.000		65.529.800		100.000.200		12.580.000	100,00	12,58		12.580.000	25,00	8,47		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	4		3		1		1		100,00		1		25,00			
1506.	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			121.228.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	600		0		0		0		0,00		0		0,00			
1507.	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			85.614.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1508.	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			78.064.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1509.	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			83.868.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1510.	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan			65.614.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1511.	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			68.424.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1512.	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			4.167.614.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1513.	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			65.614.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
1514.	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			109.228.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
1515.	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			626.582.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)																
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)																
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)																
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)																
			Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)																
1516.	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			126.228.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1517.	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			260.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	90		0		48		0		0,00		0		0,00			
1518.	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			117.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	90		0		48		0		0,00		0		0,00			
1519.	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	210		0		48		0		0,00		0		0,00			
1520.	2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)			88.354.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1521.	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			56.164.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)																
1522.	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			56.164.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
1523.	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			601.136.000		34.433.306		165.294.800		17.781.482	50,00	10,76		17.781.482	10,00	2,96		
		Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPh) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)																
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)																
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)																
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)																
1524.	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			190.364.000		1.790.000		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1525.	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			223.928.000		25.978.464		75.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		4		1		0		0,00		0		0,00			
1526.	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			91.230.000		6.664.842		90.294.800		17.781.482	100,00	19,69		17.781.482	20,00	19,49		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		4		1		1		100,00		1		20,00			
1527.	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			95.614.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
1528.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**683.664.000**		**15.617.000**		**50.000.000**		**-**	**25,00**	**0,00**		**-**	**5,56**	**0,00**	DINAS PANGAN	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0		8,86		7,59		0		0,00		0		0,00			
1529.	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			79.000.000		15.617.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Teridentifikasinya wilayah Kecamatan yang rawan pangan dan Tahan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)																
1530.	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			79.000.000		15.617.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		4		1		0		0,00		0		0,00			
1531.	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			604.664.000		-		50.000.000		-	33,33	0,00		-	6,67	0,00		
		Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)																
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)																
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)																
1532.	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			371.500.000		-		50.000.000		-	100,00	0,00		-	33,33	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		1		1		100,00		1		33,33			
1533.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			54.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
1534.	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1535.	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			52.394.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1536.	2.09.04.2.02.0008	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan			76.770.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1537.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**568.169.700**		**19.560.000**		**9.705.000**		**1.480.000**	**25,00**	**15,25**		**1.480.000**	**5,00**	**0,26**	DINAS PANGAN	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100		0		89,30		0		0,00		0		0,00			
1538.	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			568.169.700		19.560.000		9.705.000		1.480.000	25,00	15,25		1.480.000	5,00	0,26		
		Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang Dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)																
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)																
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)																
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)																
1539.	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			109.310.000		1.820.000		9.705.000		1.480.000	100,00	15,25		1.480.000	25,00	1,35		
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		1		1		100,00		1		25,00			
1540.	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			212.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1541.	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			108.000.000		11.571.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		4		1		0		0,00		0		0,00			
1542.	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			64.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1543.	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			73.559.700		6.169.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		4		1		0		0,00		0		0,00			
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**7.114.000.000**		**-**		**50.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
1544.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**1.550.000.000**		**-**		**50.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	10		100		10		0		0,00		0		0,00			
1545.	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.550.000.000		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Berita acara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)																
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
1546.	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota			785.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1547.	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			465.000.000		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1548.	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1549.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**670.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1550.	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			670.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jmlah Berita Acara Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1551.	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			670.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1552.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**670.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (%)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1553.	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			670.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)																
1554.	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			670.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1555.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**			**270.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	90		0		0		0		0,00		0		0,00			
1556.	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Berita Acara Fasilitasi Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen)																
1557.	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1558.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**			**270.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1559.	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah dokumen inventaris tanah kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)																
1560.	2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1561.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**			**270.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya izin membuka tanah yang difasilitasi	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1562.	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Izin Membuka Tanah Yang Difasiltasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)																
1563.	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1564.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**3.414.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya luas lokasi konsolidasi tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
1565.	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			3.414.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
1566.	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			1.235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
1567.	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			2.179.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**53.517.626.670**		**5.163.819.428**		**6.988.973.132**		**1.542.084.387**	**0,00**	**22,06**		**1.542.084.387**	**0,00**	**2,88**		
1568.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.757.579.670**		**4.318.247.329**		**5.271.826.132**		**1.308.281.537**	**0,00**	**24,82**		**1.308.281.537**	**0,00**	**4,89**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1569.	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.950.000		4.333.000		7.390.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perecanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
1570.	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.950.000		4.333.000		7.390.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		6		2		0		0,00		0		0,00			
1571.	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.867.354.670		4.040.112.647		5.031.205.310		1.267.587.144	0,00	25,19		1.267.587.144	0,00	5,31		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
1572.	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.867.354.670		4.040.112.647		5.031.205.310		1.267.587.144	0,00	25,19		1.267.587.144	0,00	5,31		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		46		46		0		0,00		0		0,00			
1573.	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			37.300.000		6.954.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
1574.	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			37.300.000		6.954.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		2		6		0		0,00		0		0,00			
1575.	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)																
1576.	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
1577.	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
1578.	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45		0		44		0		0,00		0		0,00			
1579.	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			692.225.000		129.138.858		94.373.000		6.631.000	0,00	7,03		6.631.000	0,00	0,96		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1580.	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			62.500.000		12.342.000		2.125.000		998.000	0,00	46,96		998.000	0,00	1,60		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		6		0		0,00		0		0,00			
1581.	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000		29.624.100		16.462.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		6		0		0,00		0		0,00			
1582.	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			65.000.000		10.399.000		13.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		6		0		0,00		0		0,00			
1583.	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65.000.000		10.399.800		13.000.000		4.000.000	0,00	30,77		4.000.000	0,00	6,15		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		6		0		0,00		0		0,00			
1584.	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			37.500.000		7.483.000		7.500.000		623.000	0,00	8,31		623.000	0,00	1,66		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		4		12		0		0,00		0		0,00			
1585.	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			412.225.000		58.890.958		42.286.000		1.010.000	0,00	2,39		1.010.000	0,00	0,25		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24		12		24		0		0,00		0		0,00			
1586.	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			137.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
1587.	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			137.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		6		0		0,00		0		0,00			
1588.	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			436.250.000		78.556.749		49.158.822		15.294.839	0,00	31,11		15.294.839	0,00	3,51		
		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1589.	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000		2.000.000		3.000.000		1.500.000	0,00	50,00		1.500.000	0,00	15,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
1590.	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			211.250.000		31.556.749		36.088.822		7.420.439	0,00	20,56		7.420.439	0,00	3,51		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
1591.	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000.000		3.000.000		7.000.000		5.376.000	0,00	76,80		5.376.000	0,00	35,84		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		0		0,00		0		0,00			
1592.	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			200.000.000		42.000.000		3.070.000		998.400	0,00	32,52		998.400	0,00	0,50		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
1593.	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.340.000.000		59.151.175		89.699.000		18.768.554	0,00	20,92		18.768.554	0,00	1,40		
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1594.	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			830.000.000		-		89.699.000		18.768.554	0,00	20,92		18.768.554	0,00	2,26		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
1595.	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			510.000.000		59.151.175		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		2		0		0,00		0		0,00			
1596.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.699.720.000**		**109.919.000**		**116.450.000**		**9.063.900**	**0,00**	**7,78**		**9.063.900**	**0,00**	**0,53**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
1597.	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			776.770.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)																
1598.	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota			776.770.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
1599.	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			922.950.000		109.919.000		116.450.000		9.063.900	0,00	7,78		9.063.900	0,00	0,98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen)	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)																
1600.	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			922.950.000		109.919.000		116.450.000		9.063.900	0,00	7,78		9.063.900	0,00	0,98		
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
1601.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.846.510.000**		**134.617.789**		**179.042.000**		**5.920.000**	**0,00**	**3,31**		**5.920.000**	**0,00**	**0,32**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air (Indeks)	70,01		76,55		64,30		0		0,00		0		0,00			
1602.	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1.526.510.000		134.617.789		179.042.000		5.920.000	0,00	3,31		5.920.000	0,00	0,39		
		Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)																
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)																
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)																
1603.	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			157.155.000		11.067.000		13.047.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	6		6		6		0		0,00		0		0,00			
1604.	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			178.935.000		14.589.000		15.787.000		5.920.000	0,00	37,50		5.920.000	0,00	3,31		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	6		6		6		0		0,00		0		0,00			
1605.	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			94.040.000		-		18.808.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1606.	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			330.780.000		-		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	70		0		36		0		0,00		0		0,00			
1607.	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			765.600.000		108.961.789		116.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	24		24		24		0		0,00		0		0,00			
1608.	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			190.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)																
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)																
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)																
1609.	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0		1		0		0		0,00		0		0,00			
1610.	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
1611.	2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			55.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1612.	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			130.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan)	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)																
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)																
1613.	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1614.	2.11.03.2.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1615.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**1.887.049.000**		**-**		**269.559.000**		**41.300.000**	**0,00**	**15,32**		**41.300.000**	**0,00**	**2,19**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan (%) (%)	0,25		1,84		0,25		0		0,00		0		0,00			
1616.	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.887.049.000		-		269.559.000		41.300.000	0,00	15,32		41.300.000	0,00	2,19		
		Luas RTH Kawasan perkotaan dan kawasan Kehati yang dikelola (Hektar)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)																
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)																
1617.	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			164.500.000		-		32.900.000		800.000	0,00	2,43		800.000	0,00	0,49		
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1618.	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.722.549.000		-		236.659.000		40.500.000	0,00	17,11		40.500.000	0,00	2,35		
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	7.01		22,01		7.01		0		0,00		0		0,00			
1619.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**1.123.400.000**		**-**		**12.400.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya penangananbahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola (%) (%)	100		0		20		0		0,00		0		0,00			
1620.	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			561.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah penyimpanan sementara B3 dan LB3 (ton)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)																
1621.	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			561.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1622.	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			562.000.000		-		12.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pengumpulan B3 dan LB3 (ton)	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1623.	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			562.000.000		-		12.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
1624.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**770.473.000**		**6.874.000**		**24.683.000**		**370.000**	**0,00**	**1,50**		**370.000**	**0,00**	**0,05**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH (%) (%)	100		81,81		89,70		0		0,00		0		0,00			
1625.	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			770.473.000		6.874.000		24.683.000		370.000	0,00	1,50		370.000	0,00	0,05		
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (dokumen berita acara)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)																
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)																
1626.	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			408.433.000		-		12.275.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2		0		6		0		0,00		0		0,00			
1627.	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			362.040.000		6.874.000		12.408.000		370.000	0,00	2,98		370.000	0,00	0,10		
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	12		36		12		0		0,00		0		0,00			
1628.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**644.100.000**		**-**		**12.340.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (%) (%)	100		0		20		0		0,00		0		0,00			
1629.	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			315.345.000		-		12.340.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)																
1630.	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			315.345.000		-		12.340.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1631.	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			328.755.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (dokumen)	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)																
1632.	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			328.755.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1633.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**590.370.000**		**594.161.310**		**36.580.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100		16,67		35,78		0		0,00		0		0,00			
1634.	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			590.370.000		594.161.310		36.580.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)																
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)																
1635.	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			315.370.000		587.938.310		21.580.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		12		1		0		0,00		0		0,00			
1636.	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			155.000.000		6.223.000		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	10		12		60		0		0,00		0		0,00			
1637.	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1638.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**420.302.000**		**-**		**10.102.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%) (%)	50		0		10		0		0,00		0		0,00			
1639.	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			420.302.000		-		10.102.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (penghargaan)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)																
1640.	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			420.302.000		-		10.102.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2		0		12		0		0,00		0		0,00			
1641.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**428.035.000**		**-**		**22.175.000**		**510.000**	**0,00**	**2,30**		**510.000**	**0,00**	**0,12**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan hidup (%) (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
1642.	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			428.035.000		-		22.175.000		510.000	0,00	2,30		510.000	0,00	0,12		
		Jumlah penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (perkara)	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)																
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)																
1643.	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			64.665.000		-		9.545.000		510.000	0,00	5,34		510.000	0,00	0,79		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
1644.	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			363.370.000		-		12.630.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
1645.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**17.350.088.000**		**-**		**1.033.816.000**		**176.638.950**	**0,00**	**17,09**		**176.638.950**	**0,00**	**1,02**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks) (Indeks)	44,53		40,69		31,38		0		0,00		0		0,00			
1646.	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			17.350.088.000		-		1.033.816.000		176.638.950	0,00	17,09		176.638.950	0,00	1,02		
		Jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton/tahun)	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)																
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)																
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)																
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)																
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)																
1647.	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			1.175.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	24		0		24		0		0,00		0		0,00			
1648.	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			5.094.225.000		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1649.	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			1.330.520.000		-		54.435.584		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	3		0		3		0		0,00		0		0,00			
1650.	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			7.340.000.000		-		808.000.000		164.967.350	0,00	20,42		164.967.350	0,00	2,25		
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	7482.5		0		7482.5		0		0,00		0		0,00			
1651.	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			190.000.000		-		77.311.416		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	10.39		0		10.39		0		0,00		0		0,00			
1652.	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			2.220.343.000		-		44.069.000		11.671.600	0,00	26,48		11.671.600	0,00	0,53		
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	1825		4.955		1825		0		0,00		0		0,00			
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**53.527.606.373**		**4.947.510.653**		**4.651.439.563**		**1.104.823.462**	**6,56**	**23,75**		**1.104.823.462**	**1,70**	**2,06**		
1653.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**41.715.580.477**		**4.185.614.677**		**4.441.664.563**		**1.104.823.462**	**15,83**	**24,87**		**1.104.823.462**	**3,53**	**2,65**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1654.	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			681.045.000		5.366.000		-		-	8,33	0,00		-	1,00	0,00		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
1655.	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.045.000		5.366.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
1656.	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			128.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1657.	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			128.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1658.	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			137.000.000		-		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		4		1		25,00		1		5,00			
1659.	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1660.	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.309.795.990		3.672.557.267		4.247.798.563		1.068.477.257	0,00	25,15		1.068.477.257	0,00	5,01		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
1661.	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.123.795.990		3.672.557.267		4.247.798.563		1.068.477.257	0,00	25,15		1.068.477.257	0,00	5,06		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89		141		0		0		0,00		0		0,00			
1662.	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			186.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1663.	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			67.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
1664.	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			67.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	45		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1665.	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.174.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
1666.	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			384.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	84		0		1		0		0,00		0		0,00			
1667.	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			280.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1668.	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			230.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	600		0		0		0		0,00		0		0,00			
1669.	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			280.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1670.	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.189.703.487		248.091.500		70.623.600		11.019.715	20,32	15,60		11.019.715	8,12	0,10		
		Jumlah peningkatan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1671.	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.020.000		3.520.000		2.020.000		397.000	14,29	19,65		397.000	2,86	0,57		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		7		7		1		14,29		1		2,86			
1672.	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.787.701.487		219.967.800		34.081.500		6.189.915	14,29	18,16		6.189.915	2,86	0,06		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		7		7		1		14,29		1		2,86			
1673.	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.000.000		9.002.000		5.000.100		999.800	25,00	20,00		999.800	15,00	1,18		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		12		12		3		25,00		3		15,00			
1674.	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			28.000.000		-		-		-	20,00	0,00		-	1,33	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	150		0		10		2		20,00		2		1,33			
1675.	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			26.440.000		1.626.100		1.500.000		53.000	25,00	3,53		53.000	15,00	0,20		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		12		12		3		25,00		3		15,00			
1676.	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.192.542.000		13.975.600		28.022.000		3.380.000	23,33	12,06		3.380.000	11,67	0,28		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		9		30		7		23,33		7		11,67			
1677.	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1678.	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18		0		2		0		0,00		0		0,00			
1679.	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			880.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	64		0		0		0		0,00		0		0,00			
1680.	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.917.706.000		147.570.799		71.566.000		18.320.690	25,00	25,60		18.320.690	11,67	0,96		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1681.	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.500.000		1.000.000		1.200.000		-	25,00	0,00		-	15,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		12		12		3		25,00		3		15,00			
1682.	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			392.206.000		55.430.799		55.966.000		11.130.690	25,00	19,89		11.130.690	15,00	2,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		12		12		3		25,00		3		15,00			
1683.	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.494.000.000		91.140.000		14.400.000		7.190.000	25,00	49,93		7.190.000	5,00	0,48		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
1684.	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.261.330.000		112.029.111		51.676.400		7.005.800	15,74	13,56		7.005.800	1,01	0,21		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1685.	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		46.341.998		6.285.800	22,22	13,56		6.285.800	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		18		4		22,22		4		0,00			
1686.	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.154.250.000		104.949.111		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	140		18		0		0		0,00		0		0,00			
1687.	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			307.080.000		7.080.000		5.334.402		720.000	25,00	13,50		720.000	3,03	0,23		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	165		20		20		5		25,00		5		3,03			
1688.	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
1689.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**4.519.058.200**		**131.359.000**		**205.275.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya kualitas layanan pendataran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	30		5		10		2		20,00		2		6,67			
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62		50		55		10		18,18		10		16,13			
1690.	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.679.058.200		131.359.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)																
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)																
1691.	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			496.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	400		0		60		0		0,00		0		0,00			
1692.	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			893.058.200		131.359.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	290000		82.843		50000		0		0,00		0		0,00			
1693.	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			190.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	350		0		50		0		0,00		0		0,00			
1694.	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1695.	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			2.060.000.000		-		198.275.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)																
1696.	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			2.060.000.000		-		198.275.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	62300		0		22000		0		0,00		0		0,00			
1697.	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			780.000.000		-		7.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)																
1698.	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk			80.000.000		-		7.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
1699.	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	240		0		48		0		0,00		0		0,00			
1700.	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1701.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**4.080.670.000**		**350.594.500**		**4.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		95		96		24		25,00		24		24,00			
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1702.	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			1.389.470.000		84.070.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)																
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)																
1703.	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			1.132.470.000		84.070.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	39000		10.569		2550		0		0,00		0		0,00			
1704.	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			117.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
1705.	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1706.	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			997.500.000		8.490.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)																
1707.	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			450.000.000		8.490.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	15		6		1		0		0,00		0		0,00			
1708.	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			77.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1709.	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			470.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1710.	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1.693.700.000		258.034.500		4.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)																
1711.	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			118.000.000		-		4.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	109000		0		7600		0		0,00		0		0,00			
1712.	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	20		0		4		0		0,00		0		0,00			
1713.	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			179.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1714.	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			1.196.500.000		258.034.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	14		2		2		0		0,00		0		0,00			
1715.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**2.814.940.000**		**249.017.476**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1716.	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			468.940.000		249.017.476		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)																
1717.	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			468.940.000		249.017.476		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	25		178		180		0		0,00		0		0,00			
1718.	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.135.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)																
1719.	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.135.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1720.	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			811.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)																
1721.	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1722.	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			151.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	125		0		15		0		0,00		0		0,00			
1723.	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			195.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
1724.	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	20		0		2		0		0,00		0		0,00			
1725.	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			310.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	15		0		1		0		0,00		0		0,00			
1726.	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)																
1727.	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1728.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**397.357.696**		**30.925.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
1729.	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			397.357.696		30.925.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)																
1730.	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			213.359.415		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1731.	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			183.998.281		30.925.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		8		0		0		0,00		0		0,00			
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**44.449.351.900**		**6.582.548.093**		**6.248.709.611**		**1.366.560.034**	**8,00**	**21,87**		**1.366.560.034**	**0,74**	**3,07**		
1732.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.253.812.858**		**5.233.082.288**		**5.546.042.271**		**1.336.951.390**	**14,02**	**24,11**		**1.336.951.390**	**0,90**	**4,91**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		27,5		27,50		27,5		27,50			
1733.	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			239.859.460		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
1734.	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.205.050		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		0		0		0		0,00		0		0,00			
1735.	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			33.942.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1736.	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			33.943.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
1737.	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			33.942.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1738.	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			33.942.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1739.	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			33.942.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1740.	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.942.235		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1741.	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.237.325.494		5.028.852.275		5.393.211.012		1.302.825.622	75,00	24,16		1.302.825.622	0,45	5,86		
		Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1742.	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.078.928.402		5.028.852.275		5.393.211.012		1.302.825.622	75,00	24,16		1.302.825.622	3,57	5,90		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420		31		40		30		75,00		15		3,57			
1743.	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1744.	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1745.	2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1746.	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1747.	2.13.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1748.	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1749.	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1750.	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			51.721.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
1751.	2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			12.930.375		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		0		1		0		0,00		0		0,00			
1752.	2.13.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			12.930.375		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1753.	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.930.375		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1754.	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.930.375		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1755.	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			184.303.750		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
1756.	2.13.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1757.	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			45.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90		0		0		0		0,00		0		0,00			
1758.	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1759.	2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1760.	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		0		35		0		0,00		0		0,00			
1761.	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1762.	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1763.	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			21.550.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1764.	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.092.458.060		5.950.500		50.091.800		11.003.700	10,66	21,97		11.003.700	1,91	1,01		
		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)																
1765.	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.915.156		3.248.000		1.396.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	32		12		12		0		0,00		0		0,00			
1766.	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1767.	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1768.	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			48.891.156		-		11.352.500		1.953.700	25,00	17,21		1.953.700	9,38	4,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	32		0		12		3		25,00		3		9,38			
1769.	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			36.717.156		-		5.373.300		1.600.000	25,00	29,78		1.600.000	9,38	4,36		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	32		0		12		3		25,00		3		9,38			
1770.	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.428.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	288		0		240		0		0,00		0		0,00			
1771.	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1772.	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.578.156		2.702.500		1.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		405		12		0		0,00		0		0,00			
1773.	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			810.788.000		-		30.470.000		7.450.000	13,95	24,45		7.450.000	2,28	0,92		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1315		0		215		30		13,95		30		2,28			
1774.	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			22.627.656		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1775.	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			22.628.156		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1776.	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			831.462.000		29.278.125		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1777.	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1778.	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1779.	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			105.000.000		14.962.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		2		2		0		0,00		0		0,00			
1780.	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.462.000		14.315.625		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		1		2		0		0,00		0		0,00			
1781.	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			210.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0,00		0		0,00			
1782.	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1783.	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			921.004.500		12.219.500		26.064.660		3.912.668	25,00	15,01		3.912.668	4,79	0,42		
		Persentase tersedianya jasa penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1784.	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000		-		900.000		180.000	25,00	20,00		180.000	1,65	0,90		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	182		0		12		3		25,00		3		1,65			
1785.	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			82.500.000		12.219.500		11.890.000		2.422.668	25,00	20,38		2.422.668	10,00	2,94		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		24		6		25,00		6		10,00			
1786.	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			265.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		0		0		0		0,00		0		0,00			
1787.	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			553.504.500		-		13.274.660		1.310.000	25,00	9,87		1.310.000	7,50	0,24		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40		0		12		3		25,00		3		7,50			
1788.	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.695.678.094		156.781.888		76.674.799		19.209.400	12,82	25,05		19.209.400	0,80	1,13		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1789.	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			957.765.469		129.465.388		61.674.799		19.209.400	38,46	31,15		19.209.400	5,62	2,01		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	89		19		13		5		38,46		5		5,62			
1790.	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90.512.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1791.	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
1792.	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34		0		14		0		0,00		0		0,00			
1793.	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			206.400.000		27.316.500		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1794.	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			340.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
1795.	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
1796.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**40.000.000**		**-**		**37.549.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
1797.	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			40.000.000		-		37.549.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)																
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)																
1798.	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			10.000.000		-		37.549.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	4		0		2		0		0,00		0		0,00			
1799.	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1800.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**2.500.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
1801.	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			2.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase nagari yang difasilitasi dalam kerjasama antar Nagari/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																
1802.	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
1803.	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			700.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
1804.	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1.350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1805.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**4.694.354.642**		**46.473.000**		**165.260.000**		**10.012.000**	**1,58**	**6,06**		**10.012.000**	**0,29**	**0,21**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		Meingkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100		80		80		25		31,25		25		25,00			
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100		0		100		25		25,00		25		25,00			
1806.	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4.694.354.642		46.473.000		165.260.000		10.012.000	1,58	6,06		10.012.000	0,29	0,21		
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)																
1807.	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			377.000.000		46.473.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	370		79		0		0		0,00		0		0,00			
1808.	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			278.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	460		0		79		0		0,00		0		0,00			
1809.	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			127.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	370		0		79		0		0,00		0		0,00			
1810.	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			914.864.000		-		105.819.000		5.112.000	6,33	4,83		5.112.000	1,10	0,56		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	455		0		79		5		6,33		5		1,10			
1811.	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			73.000.000		-		59.441.000		4.900.000	6,33	8,24		4.900.000	2,06	6,71		
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	243		0		79		5		6,33		5		2,06			
1812.	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			304.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	370		0		79		0		0,00		0		0,00			
1813.	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			687.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	360		0		79		0		0,00		0		0,00			
1814.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			1.001.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	370		0		0		0		0,00		0		0,00			
1815.	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			380.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	190		0		0		0		0,00		0		0,00			
1816.	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			192.632.995		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	199		0		79		0		0,00		0		0,00			
1817.	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			357.807.647		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	316		0		79		0		0,00		0		0,00			
1818.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**9.961.184.400**		**1.302.992.805**		**499.858.340**		**19.596.644**	**1,00**	**3,92**		**19.596.644**	**0,75**	**0,20**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		Meningkatknya kapasitas lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100		100		90		25		27,78		25		25,00			
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100		0		90		25		27,78		25		25,00			
1819.	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.961.184.400		1.302.992.805		499.858.340		19.596.644	1,00	3,92		19.596.644	0,75	0,20		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)																
1820.	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1.031.973.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	83		0		79		0		0,00		0		0,00			
1821.	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1.694.769.400		1.170.617.566		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	103		65		79		0		0,00		0		0,00			
1822.	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			935.192.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	316		0		79		0		0,00		0		0,00			
1823.	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	316		0		79		0		0,00		0		0,00			
1824.	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1.128.067.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	13		0		5		0		0,00		0		0,00			
1825.	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1.053.002.000		84.667.639		99.858.340		530.144	3,80	0,53		530.144	3,61	0,05		
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	83		1		79		3		3,80		3		3,61			
1826.	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			1.080.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	316		0		0		0		0,00		0		0,00			
1827.	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.569.180.000		47.707.600		400.000.000		19.066.500	3,23	4,77		19.066.500	3,09	1,22		
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	97		93		93		3		3,23		3		3,09			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1828.	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			869.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	395		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**59.027.767.424**		**7.955.562.094**		**8.511.862.145**		**1.215.722.393**	**2,71**	**14,28**		**1.215.722.393**	**0,25**	**2,06**		
1829.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.141.597.698**		**4.497.656.923**		**5.782.477.145**		**1.215.722.393**	**5,65**	**21,02**		**1.215.722.393**	**0,81**	**4,03**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		21,02		21,02		21,02		21,02			
1830.	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			346.292.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
1831.	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.292.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1832.	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			13.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1833.	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			97.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1834.	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			13.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1835.	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			13.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
1836.	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		24		0		0,00		0		0,00			
1837.	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
1838.	2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			168.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1839.	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.129.076.073		4.214.024.550		5.527.156.745		1.215.722.393	65,00	22,00		1.215.722.393	3,71	5,26		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1840.	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.617.076.073		4.214.024.550		5.527.156.745		1.215.722.393	130,00	22,00		1.215.722.393	26,00	5,38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	250		49		50		65		130,00		65		26,00			
1841.	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			265.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1842.	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			222.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1843.	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			18.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
1844.	2.14.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
1845.	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
1846.	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1847.	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.882.993.832		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1848.	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			424.993.832		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
1849.	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.458.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
1850.	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.744.665.143		33.782.400		34.010.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1851.	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.000.000		1.800.000		1.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		1		0		0,00		0		0,00			
1852.	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			95.000.000		14.063.000		9.719.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		2		2		0		0,00		0		0,00			
1853.	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			72.000.000		5.349.400		4.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		1		1		0		0,00		0		0,00			
1854.	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.800.000		1.125.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		24		1		0		0,00		0		0,00			
1855.	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			90.865.143		2.550.000		3.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1856.	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.450.000.000		8.895.000		15.491.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1857.	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.472.333.045		6.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1858.	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			946.759.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		1		0		0,00		0		0,00			
1859.	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			232.333.045		6.750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	116		10		20		0		0,00		0		0,00			
1860.	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			293.241.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27		0		10		0		0,00		0		0,00			
1861.	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			544.450.000		151.462.044		128.420.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1862.	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000		1.000.000		1.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10		12		12		0		0,00		0		0,00			
1863.	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			160.250.000		16.998.196		48.220.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
1864.	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			375.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1865.	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		133.463.848		79.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		0		0,00		0		0,00			
1866.	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.021.787.605		91.637.929		92.890.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1867.	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			823.090.000		82.850.629		86.590.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	400		10		15		0		0,00		0		0,00			
1868.	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66.989.605		7.731.300		6.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		25		0		0,00		0		0,00			
1869.	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			131.708.000		1.056.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1870.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**1.070.454.613**		**89.855.000**		**48.600.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,31		2,38		2,34		0		0,00		0		0,00			
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	88,2		61		79,8		0		0,00		0		0,00			
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19) (Angka)	11,3		14,03		13,6		0		0,00		0		0,00			
1871.	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			305.862.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase kebijakan pemerintah daerah provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)																
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)																
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)																
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)																
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)																
			Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)																
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)																
1872.	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			55.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	25		0		13		0		0,00		0		0,00			
1873.	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1874.	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			35.862.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	29		0		13		0		0,00		0		0,00			
1875.	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1876.	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	22		0		13		0		0,00		0		0,00			
1877.	2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1878.	2.14.02.2.01.0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1879.	2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1880.	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1881.	2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1882.	2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1883.	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	120		0		0		0		0,00		0		0,00			
1884.	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			764.592.613		89.855.000		48.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Jumlah Penduduk Sebagai Sasaran Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)																
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)																
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)																
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)																
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)																
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)																
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)																
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)																
1885.	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			176.794.722		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1886.	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1887.	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			176.794.724		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1888.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			68.600.000		44.600.000		48.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	130		26		26		0		0,00		0		0,00			
1889.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			80.000.000		45.255.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	208		156		156		0		0,00		0		0,00			
1890.	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1891.	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana			52.019.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	65		0		13		0		0,00		0		0,00			
1892.	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1893.	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1894.	2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1895.	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1896.	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1897.	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1898.	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			30.384.167		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1899.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**17.890.415.542**		**1.886.250.171**		**1.057.185.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (met need) (%)	85,8		84,86		82,50		0		0,00		0		0,00			
			Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods) (%)	85,8		84,86		82,50		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,5		13,24		13,1		0		0,00		0		0,00			
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	76,3		61,4		65,82		0		0,00		0		0,00			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8		15,3		12		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	92,34		96,2		69,60		0		0,00		0		0,00			
1900.	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			5.764.054.096		743.020.171		238.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)																
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)																
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)																
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)																
1901.	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	52		0		13		0		0,00		0		0,00			
1902.	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
1903.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			2.789.800.000		446.162.671		195.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	676		130		156		0		0,00		0		0,00			
1904.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			1.060.000.000		165.445.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	650		82		130		0		0,00		0		0,00			
1905.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			625.000.000		65.152.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	262		32		12		0		0,00		0		0,00			
1906.	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1907.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			664.254.096		66.260.000		43.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	270		40		40		0		0,00		0		0,00			
1908.	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3.835.820.553		266.100.000		60.750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan untuk mendukung program bangga kencana	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)																
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)																
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)																
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)														
1909.	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			834.036.064		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
1910.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			2.793.168.122		266.100.000		60.750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	3369		697		719		0		0,00		0		0,00			
1911.	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
1912.	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			128.616.367		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	65		0		13		0		0,00		0		0,00			
1913.	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			6.380.120.893		592.635.000		627.335.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)																
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)																
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)																
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)																
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)																
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)																
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)																
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)																
1914.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1.401.772.308		14.315.000		23.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	130		26		26		0		0,00		0		0,00			
1915.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2.122.498.676		471.760.000		603.935.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	11531		1.266		1743		0		0,00		0		0,00			
1916.	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
1917.	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			507.000.000		106.560.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
1918.	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	120		0		0		0		0,00		0		0,00			
1919.	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			64.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	175		0		0		0		0,00		0		0,00			
1920.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1302		0		26		0		0,00		0		0,00			
1921.	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	31		0		0		0		0,00		0		0,00			
1922.	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			20.849.909		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1923.	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1924.	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1925.	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2900		0		0		0		0,00		0		0,00			
1926.	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	35568		0		0		0		0,00		0		0,00			
1927.	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			1.910.420.000		284.495.000		130.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)																
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)																
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)																
1928.	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			229.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1929.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			1.531.920.000		284.495.000		127.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	360		58		58		0		0,00		0		0,00			
1930.	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			149.000.000		-		3.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	64		0		12		0		0,00		0		0,00			
1931.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**9.925.299.571**		**1.481.800.000**		**1.623.600.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatknya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	65,1		69,15		62		0		0,00		0		0,00			
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	89,5		82,1		85,1		0		0,00		0		0,00			
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	90		21		70		0		0,00		0		0,00			
1932.	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.462.000.700		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)																
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)																
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)																
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)																
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)																
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)																
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)																
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)																
			Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)																
1933.	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			170.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	1460		0		60		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1934.	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL			70.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	23		0		0		0		0,00		0		0,00			
1935.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1936.	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			145.000.700		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	65		0		13		0		0,00		0		0,00			
1937.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			292.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	53		0		13		0		0,00		0		0,00			
1938.	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	250		0		0		0		0,00		0		0,00			
1939.	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			86.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	5195		0		4345		0		0,00		0		0,00			
1940.	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1941.	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga			90.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1942.	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2000		0		0		0		0,00		0		0,00			
1943.	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			29.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1944.	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	39		0		0		0		0,00		0		0,00			
1945.	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			70.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	14		0		0		0		0,00		0		0,00			
1946.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	65		0		0		0		0,00		0		0,00			
1947.	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			70.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
1948.	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			8.463.298.871		1.481.800.000		1.623.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten yang Berperan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)																
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)																
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)																
1949.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			3.898.548.835		592.600.000		369.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	650		130		130		0		0,00		0		0,00			
1950.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			4.428.000.000		889.200.000		1.254.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	650		130		130		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1951.	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga			101.550.036		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1952.	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga			35.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**158.959.270.265**		**14.942.086.814**		**15.792.334.625**		**3.494.143.230**	**13,14**	**22,13**		**3.494.143.230**	**0,72**	**2,20**		
1953.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**123.111.197.265**		**13.014.140.966**		**7.868.416.415**		**2.022.157.944**	**20,14**	**25,70**		**2.022.157.944**	**1,08**	**1,64**	DINAS PERHUBUNGAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		98		100		26		26,00		26		26,00			
1954.	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			572.686.570		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
1955.	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			144.984.840		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1956.	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			44.924.880		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1957.	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			54.114.060		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1958.	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			45.436.921		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1959.	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			77.597.520		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1960.	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			158.685.423		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
1961.	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.942.926		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1962.	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.693.493.253		5.450.780.765		7.550.662.415		1.968.340.221	0,00	26,07		1.968.340.221	0,00	7,11		
		Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
1963.	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.348.310.407		5.435.782.765		7.545.334.415		1.968.340.221	0,00	26,09		1.968.340.221	0,00	7,20		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	925		77		163		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1964.	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			101.690.724		14.998.000		5.328.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		1		12		0		0,00		0		0,00			
1965.	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			119.265.639		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1966.	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			32.726.754		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1967.	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.958.217		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
1968.	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.541.511		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1969.	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.812.446.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Peresentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
1970.	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.392.446.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	335		0		0		0		0,00		0		0,00			
1971.	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			420.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45		0		0		0		0,00		0		0,00			
1972.	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.965.386.477		118.638.200		53.402.000		10.817.300	35,00	20,26		10.817.300	3,33	0,36		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
1973.	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			72.946.000		7.000.000		2.200.000		1.112.000	50,00	50,55		1.112.000	5,00	1,52		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		2		1		50,00		1		5,00			
1974.	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			97.656.117		10.000.000		5.000.000		2.439.000	50,00	48,78		2.439.000	5,00	2,50		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		2		1		50,00		1		5,00			
1975.	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			408.283.384		33.428.000		14.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		2		0		0,00		0		0,00			
1976.	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			267.785.976		21.996.000		12.000.000		5.031.000	50,00	41,93		5.031.000	5,00	1,88		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		6		3		50,00		3		5,00			
1977.	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			68.583.000		3.886.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		0		0		0,00		0		0,00			
1978.	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.050.132.000		42.327.400		19.802.000		2.235.300	25,00	11,29		2.235.300	5,00	0,11		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
1979.	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.054.149.789		30.174.649		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1980.	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.445.782.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1981.	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			455.530.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	204		0		0		0		0,00		0		0,00			
1982.	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.152.837.789		30.174.649		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	99		4		0		0		0,00		0		0,00			
1983.	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.252.258.262		7.152.849.118		156.562.000		33.200.423	16,67	21,21		33.200.423	3,33	0,04		
		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
1984.	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.500.000		2.000.000		2.000.000		500.000	25,00	25,00		500.000	5,00	2,86		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		25,00		1		5,00			
1985.	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43.214.744.867		6.077.645.505		117.142.000		26.700.423	25,00	22,79		26.700.423	5,00	0,06		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
1986.	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.754.883		6.943.613		1.420.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		2		0		0,00		0		0,00			
1987.	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			37.939.258.512		1.066.260.000		36.000.000		6.000.000	16,67	16,67		6.000.000	3,33	0,02		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		16,67		2		3,33			
1988.	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.760.776.914		261.698.234		107.790.000		9.800.000	0,00	9,09		9.800.000	0,00	0,17		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
1989.	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.594.276.914		261.698.234		107.790.000		9.800.000	0,00	9,09		9.800.000	0,00	0,27		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	125		19		21		0		0,00		0		0,00			
1990.	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.766.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
1991.	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
1992.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**35.848.073.000**		**1.927.945.848**		**7.923.918.210**		**1.471.985.286**	**7,14**	**18,58**		**1.471.985.286**	**0,36**	**4,11**	DINAS PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	15		1,15		11		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	43		54,5		53		0		0,00		0		0,00			
1993.	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.840.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tercapainya Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)																
1994.	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.040.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
1995.	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
1996.	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			15.034.630.000		1.430.589.968		7.548.297.210		1.394.635.286	0,00	18,48		1.394.635.286	0,00	9,28		
		Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)																
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)																
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)																
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)																
1997.	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
1998.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			4.584.550.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	148		0		0		0		0,00		0		0,00			
1999.	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			1.200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2000.	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			8.500.080.000		1.430.589.968		7.548.297.210		1.394.635.286	0,00	18,48		1.394.635.286	0,00	16,41		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2500		475		600		0		0,00		0		0,00			
2001.	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			1.649.920.000		2.880.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
2002.	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1.249.920.000		2.880.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		8		0		0,00		0		0,00			
2003.	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2004.	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.068.000.000		328.855.980		257.621.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)																
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)																
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2005.	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			511.000.000		258.159.500		121.824.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	29		5		5000		0		0,00		0		0,00			
2006.	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			237.436.000		32.135.700		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		1		2		0		0,00		0		0,00			
2007.	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			667.731.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	116200		0		5000		0		0,00		0		0,00			
2008.	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			408.926.100		38.560.780		135.797.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	45		9		9		0		0,00		0		0,00			
2009.	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			242.906.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	100		0		12		0		0,00		0		0,00			
2010.	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			10.389.442.000		124.344.000		90.000.000		77.350.000	50,00	85,94		77.350.000	1,59	0,74		
		Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)																
			Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)																
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)																
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)																
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)																
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)																
2011.	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			334.644.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2012.	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			2.400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2013.	2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2014.	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2015.	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			4.800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	32		0		0		0		0,00		0		0,00			
2016.	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			363.380.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	240		0		0		0		0,00		0		0,00			
2017.	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.331.418.000		124.344.000		90.000.000		77.350.000	100,00	85,94		77.350.000	11,11	3,32		
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	9		2		1		1		100,00		1		11,11			
2018.	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			847.859.500		7.755.000		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)																
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)																
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)																
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)																
2019.	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			320.581.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	30		0		6		0		0,00		0		0,00			
2020.	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2021.	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			147.278.500		7.755.000		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	45		6		1		0		0,00		0		0,00			
2022.	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin			260.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	26		0		0		0		0,00		0		0,00			
2023.	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			1.072.900.000		19.505.900		6.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)																
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)																
2024.	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			401.950.000		19.505.900		6.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	27		7		1		0		0,00		0		0,00			
2025.	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			150.950.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	15		0		2		0		0,00		0		0,00			
2026.	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			520.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2027.	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)																
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)																
2028.	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2029.	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2030.	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
2031.	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2032.	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			345.321.500		14.015.000		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
2033.	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			345.321.500		14.015.000		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4		1		1		0		0,00		0		0,00			
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**41.825.649.260**		**7.035.359.873**		**7.138.037.665**		**1.291.119.948**	**0,81**	**18,09**		**1.291.119.948**	**0,64**	**3,09**		
2034.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.017.352.260**		**4.854.935.764**		**5.051.101.665**		**1.221.444.524**	**0,00**	**24,18**		**1.221.444.524**	**0,00**	**4,07**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
2035.	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			170.767.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2036.	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			26.602.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKAI SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
2037.	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			32.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
2038.	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
2039.	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			29.883.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
2040.	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31.802.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
2041.	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.280.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
2042.	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.052.238.489		4.445.825.307		4.803.695.851		1.162.921.617	0,00	24,21		1.162.921.617	0,00	5,04		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
2043.	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.280.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
2044.	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.021.958.489		4.445.825.307		4.803.695.851		1.162.921.617	0,00	24,21		1.162.921.617	0,00	5,05		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		51		52		0		0,00		0		0,00			
2045.	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			710.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
2046.	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
2047.	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2048.	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2049.	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.126.802.800		93.642.612		34.937.817		2.277.100	0,00	6,52		2.277.100	0,00	0,20		
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2050.	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			606.532.000		54.095.704		10.100.000		2.100.000	0,00	20,79		2.100.000	0,00	0,35		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		2		2		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
2051.	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.300.000		1.300.000		1.488.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
2052.	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			33.999.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
2053.	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			304.422.000		30.173.000		9.932.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
2054.	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		3		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
2055.	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.550.000		2.391.608		1.500.000		177.100	0,00	11,81		177.100	0,00	0,86		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
2056.	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			89.999.800		5.682.300		11.917.817		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
2057.	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			26.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
2058.	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.540.670.382		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2059.	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			253.670.382		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
2060.	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			672.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2061.	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			380.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
2062.	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
2063.	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.656.923.014		237.609.011		176.751.031		52.420.807	0,00	29,66		52.420.807	0,00	3,16		
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
2064.	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.575.000		1.570.000		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
2065.	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			794.325.014		115.465.188		132.868.399		13.019.575	0,00	9,80		13.019.575	0,00	1,64		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2066.	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			850.023.000		120.573.823		43.382.632		39.401.232	0,00	90,82		39.401.232	0,00	4,64		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		5		5		0		0,00		0		0,00			
2067.	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.759.950.375		77.858.834		35.716.966		3.825.000	0,00	10,71		3.825.000	0,00	0,22		
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2068.	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			424.024.996		15.563.386		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
2069.	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.000.000		21.046.421		2.080.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24		20		20		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2070.	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			588.225.379		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
2071.	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			682.700.000		41.249.027		33.636.966		3.825.000	0,00	11,37		3.825.000	0,00	0,56		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		6		6		0		0,00		0		0,00			
2072.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**2.107.553.000**		**371.423.109**		**260.000.000**		**69.675.424**	**6,25**	**26,80**		**69.675.424**	**6,25**	**3,31**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) (%)	83,2		87		82,8		0		0,00		0		0,00			
2073.	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.107.553.000		371.423.109		260.000.000		69.675.424	6,25	26,80		69.675.424	6,25	3,31		
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)																
2074.	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			1.730.863.000		333.354.509		253.000.000		69.675.424	25,00	27,54		69.675.424	25,00	4,03		
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12		1		12		3		25,00		3		25,00			
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)																
2075.	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			151.000.000		15.558.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	48		0		12		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)																
2076.	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			51.690.000		510.000		7.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	16		0		2		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)																
2077.	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			174.000.000		22.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	48		5		63		0		0,00		0		0,00			
2078.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**9.700.744.000**		**1.809.001.000**		**1.826.936.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks Pemerintah Digital/Indeks Pemdi) (Indeks)	1,7		3,39		1,3		0		0,00		0		0,00			
2079.	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			334.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)																
2080.	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			334.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
2081.	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			9.700.410.000		1.809.001.000		1.826.936.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)																
2082.	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			90.225.000		-		600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)																
2083.	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			107.765.000		-		12.870.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (aplikasi)	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)																
2084.	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			250.000		-		1.765.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah perangkat daerah dipemerintah kab/ kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/ kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)																
2085.	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			9.444.000.000		1.809.001.000		1.809.001.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	43		43		43		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)																
2086.	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			58.170.000		-		2.700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**34.557.575.745**		**4.834.339.558**		**4.970.283.739**		**1.076.136.362**	**0,92**	**21,65**		**1.076.136.362**	**0,12**	**3,11**		
2087.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.050.165.549**		**4.672.099.866**		**4.870.283.739**		**1.076.136.362**	**1,58**	**22,10**		**1.076.136.362**	**0,21**	**3,98**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		22,09		22,09		22,09		22,09			
2088.	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.629.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2089.	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42.969.300		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		0		6		0		0,00		0		0,00			
2090.	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.660.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		3		0		0,00		0		0,00			
2091.	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.180.618.078		4.266.900.429		4.707.477.739		1.056.479.916	0,00	22,44		1.056.479.916	0,00	4,99		
		Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
2092.	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.059.279.578		4.266.900.429		4.707.477.739		1.056.479.916	0,00	22,44		1.056.479.916	0,00	5,02		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		42		44		0		0,00		0		0,00			
2093.	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			52.598.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2094.	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			37.830.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2095.	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.910.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2096.	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49.867.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
2097.	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			20.947.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2098.	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			28.920.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2099.	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			227.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
2100.	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			227.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7		0		1		0		0,00		0		0,00			
2101.	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.233.994.529		62.640.766		30.770.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2102.	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			28.505.000		995.000		1.228.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		0,00		0		0,00			
2103.	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			189.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2104.	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			157.365.729		26.375.000		12.495.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		8		2		0		0,00		0		0,00			
2105.	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			118.671.800		9.860.100		8.997.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		8		2		0		0,00		0		0,00			
2106.	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2107.	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			92.220.000		1.740.000		450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
2108.	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			631.432.000		23.670.666		7.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
2109.	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			761.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2110.	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			724.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
2111.	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		20		0		0,00		0		0,00			
2112.	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
2113.	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.347.000.000		229.567.261		83.230.000		14.245.446	8,33	17,12		14.245.446	1,67	1,06		
		Persentase ketersdiaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2114.	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		500.000		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		12		12		0		0,00		0		0,00			
2115.	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			517.000.000		82.583.800		82.730.000		14.245.446	25,00	17,22		14.245.446	5,00	2,76		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		25,00		3		5,00			
2116.	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			825.000.000		146.483.461		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
2117.	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.168.556.042		112.991.410		48.806.000		5.411.000	1,15	11,09		5.411.000	0,14	0,25		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2118.	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			987.800.000		95.526.410		46.500.000		5.411.000	3,45	11,64		5.411.000	0,58	0,55		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	173		29		29		1		3,45		1		0,58			
2119.	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.756.042		17.465.000		2.306.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	91		20		15		0		0,00		0		0,00			
2120.	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			155.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2121.	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			905.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2122.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**450.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2123.	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)																
2124.	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	102		0		0		0		0,00		0		0,00			
2125.	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya izin penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)																
2126.	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	102		0		0		0		0,00		0		0,00			
2127.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**850.000.000**		**10.771.670**		**45.400.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	15		20,11		5		23,09		461,80		23,09		153,93			
2128.	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			850.000.000		10.771.670		45.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)																
2129.	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			850.000.000		10.771.670		45.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	540		82		79		0		0,00		0		0,00			
2130.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**320.000.000**		**6.139.646**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	65		62,02		50		0		0,00		0		0,00			
2131.	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			320.000.000		6.139.646		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)																
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)																
2132.	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			10.000.000		6.139.646		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	10		71		10		0		0,00		0		0,00			
2133.	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			310.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	64		0		0		0		0,00		0		0,00			
2134.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**1.545.000.000**		**80.948.864**		**54.600.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	10		22,7		1		0		0,00		0		0,00			
2135.	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.545.000.000		80.948.864		54.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)																
2136.	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			1.545.000.000		80.948.864		54.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2570		316		316		0		0,00		0		0,00			
2137.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**645.606.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20		0		16		0		0,00		0		0,00			
2138.	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			645.606.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)																
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)																
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)																
2139.	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			277.406.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	270		0		30		0		0,00		0		0,00			
2140.	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2141.	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			253.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	185		0		0		0		0,00		0		0,00			
2142.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**1.509.591.048**		**45.999.400**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2,5		13,12		2,5		0		0,00		0		0,00			
			Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2,5		13,12		2,5		0		0,00		0		0,00			
2143.	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.509.591.048		45.999.400		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)																
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)																
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)																
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)																
2144.	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			72.094.548		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	340		0		80		0		0,00		0		0,00			
2145.	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			63.000.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	290		0		60		0		0,00		0		0,00			
2146.	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			340.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	240		0		0		0		0,00		0		0,00			
2147.	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			45.499.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	60		0		10		0		0,00		0		0,00			
2148.	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			145.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	55		0		20		0		0,00		0		0,00			
2149.	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			116.998.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	110		0		20		0		0,00		0		0,00			
2150.	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			346.998.800		45.999.400		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	420		230		80		0		0,00		0		0,00			
2151.	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			380.000.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	290		0		60		0		0,00		0		0,00			
2152.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**2.187.213.148**		**18.380.112**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya daya sain UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	3		0,11		1,8		0		0,00		0		0,00			
2153.	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			2.187.213.148		18.380.112		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)																
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)																
2154.	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			156.000.500		18.380.112		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	300		84		60		0		0,00		0		0,00			
2155.	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang			1.229.212.048		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2156.	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro			600.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
2157.	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			202.000.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	23		0		3		0		0,00		0		0,00			
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**28.918.698.364**		**4.005.348.110**		**3.540.116.072**		**807.640.233**	**12,53**	**22,81**		**807.640.233**	**3,03**	**2,79**		
2158.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.599.684.264**		**3.947.610.810**		**3.540.116.072**		**807.640.233**	**19,00**	**22,81**		**807.640.233**	**3,65**	**3,74**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
2159.	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			205.000.000		14.912.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2160.	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			53.900.000		9.952.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		8		8		0		0,00		0		0,00			
2161.	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
2162.	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		2		0		0,00		0		0,00			
2163.	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
2164.	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		2		0		0,00		0		0,00			
2165.	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.100.000		4.960.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		5		0		0,00		0		0,00			
2166.	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		6		0		0,00		0		0,00			
2167.	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.909.812.630		3.311.035.133		3.403.482.071		779.823.977	0,00	22,91		779.823.977	0,00	4,90		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2168.	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.644.639.230		3.300.711.133		3.403.482.071		779.823.977	0,00	22,91		779.823.977	0,00	4,98		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	174		28		30		0		0,00		0		0,00			
2169.	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			110.000.000		4.976.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2170.	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			110.000.000		5.348.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		19		19		0		0,00		0		0,00			
2171.	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			45.173.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2172.	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
2173.	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2174.	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.443.165.951		211.943.577		56.450.001		14.783.900	50,00	26,19		14.783.900	10,00	1,02		
		Jumlah Administrasi aerah yang Tersediat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2175.	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000		3.021.000		5.000.000		1.692.000	100,00	33,84		1.692.000	20,00	6,77		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2176.	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			212.000.000		106.464.100		22.791.749		7.499.700	50,00	32,91		7.499.700	10,00	3,54		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		50,00		1		10,00			
2177.	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			177.000.000		6.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2178.	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			202.720.000		6.000.000		6.000.000		1.992.400	100,00	33,21		1.992.400	20,00	0,98		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2179.	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			323.000.000		8.660.400		12.001.252		3.599.800	100,00	30,00		3.599.800	20,00	1,11		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2180.	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000.000		7.235.000		300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2181.	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			453.445.951		74.563.077		10.357.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2182.	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			845.163.473		129.600.930		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2183.	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			403.263.872		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		0		5		0		0,00		0		0,00			
2184.	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			441.899.601		129.600.930		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		29		8		0		0,00		0		0,00			
2185.	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.667.393.332		134.480.232		23.234.000		5.530.164	33,33	23,80		5.530.164	6,67	0,33		
		Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2186.	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.094.488		280.000		280.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2187.	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			774.810.844		21.522.952		22.954.000		5.530.164	100,00	24,09		5.530.164	20,00	0,71		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2188.	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			888.488.000		112.677.280		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2189.	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.329.148.878		145.638.938		56.950.000		7.502.192	12,50	13,17		7.502.192	2,50	0,56		
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
2190.	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			951.179.990		135.638.938		46.950.000		7.502.192	25,00	15,98		7.502.192	5,00	0,79		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		20		20		5		25,00		5		5,00			
2191.	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			377.968.888		10.000.000		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	454		19		19		0		0,00		0		0,00			
2192.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.577.507.100**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	90		0		90		0		0,00		0		0,00			
2193.	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			733.130.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah kebijakan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)																
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)																
2194.	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			300.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2195.	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			433.130.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2196.	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			844.377.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rancangan Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)																
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)																
2197.	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2198.	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			174.377.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2199.	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2200.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**766.287.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	15		10		15		10		66,67		10		66,67			
2201.	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			766.287.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen promosi dan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)																
2202.	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			356.572.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	13		0		5		0		0,00		0		0,00			
2203.	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			409.715.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	18		0		3		0		0,00		0		0,00			
2204.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**1.902.440.000**		**14.132.000**		**-**		**-**	**4,55**	**0,00**		**-**	**8,77**	**0,00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	96		20		96		25		26,04		25		26,04			
2205.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1.902.440.000		14.132.000		-		-	4,55	0,00		-	8,77	0,00		
		jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)																
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)																
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)																
2206.	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1.054.440.000		14.132.000		-		-	13,64	0,00		-	26,32	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	570		1.100		1100		150		13,64		150		26,32			
2207.	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			480.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	270		0		50		0		0,00		0		0,00			
2208.	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			368.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	250		0		100		0		0,00		0		0,00			
2209.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**1.893.600.000**		**38.475.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Terkendaliya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		20		100		25		25,00		25		25,00			
2210.	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.893.600.000		38.475.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pemantauanpembinaan pengawasan investor	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)																
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)																
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)														
2211.	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			480.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	60		6		10		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2212.	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			798.360.000		4.300.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2831		0		550		0		0,00		0		0,00			
2213.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			615.240.000		34.175.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	701		24		125		0		0,00		0		0,00			
2214.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**1.179.180.000**		**5.130.300**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Menigkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	96		10		96		20		20,83		20		20,83			
2215.	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.179.180.000		5.130.300		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)																
2216.	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.179.180.000		5.130.300		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	112		19		19		0		0,00		0		0,00			
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**51.960.337.414**		**7.915.342.651**		**6.570.241.927**		**1.164.697.061**	**17,72**	**17,73**		**1.164.697.061**	**2,64**	**2,24**		
2217.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**33.380.995.414**		**4.073.796.422**		**5.120.241.927**		**1.164.697.061**	**28,35**	**22,75**		**1.164.697.061**	**4,25**	**3,49**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		0		100		25		25,00		25		25,00			
2218.	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			733.053.046		63.186.001		16.016.000		7.035.000	33,33	43,92		7.035.000	4,90	0,96		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2219.	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			126.603.400		21.202.000		5.000.000		4.976.000	100,00	99,52		4.976.000	14,29	3,93		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		12		3		3		100,00		3		14,29			
2220.	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			142.139.446		15.531.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		1		2		0		0,00		0		0,00			
2221.	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			108.517.200		10.828.000		3.894.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2222.	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			54.258.600		-		2.062.000		2.059.000	100,00	99,85		2.059.000	20,00	3,79		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		1		100,00		1		20,00			
2223.	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			40.000.000		1		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		1		0		0		0,00		0		0,00			
2224.	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			180.146.500		15.625.000		5.060.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		6		4		0		0,00		0		0,00			
2225.	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.387.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		4		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2226.	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.197.678.146		3.701.996.978		4.981.141.927		1.125.371.257	0,00	22,59		1.125.371.257	0,00	4,30		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2227.	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.059.888.146		3.691.860.978		4.981.141.927		1.125.371.257	0,00	22,59		1.125.371.257	0,00	4,32		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	275		420		40		0		0,00		0		0,00			
2228.	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			36.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
2229.	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			45.000.000		10.136.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		1		0		0		0,00		0		0,00			
2230.	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			55.890.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2231.	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			231.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
2232.	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			123.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
2233.	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			48.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			
2234.	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2235.	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			315.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
2236.	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			315.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	390		0		70		0		0,00		0		0,00			
2237.	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			898.992.658		71.005.760		44.433.200		8.018.000	42,86	18,05		8.018.000	5,31	0,89		
		Jumlah administrasi perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2238.	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.500.000		3.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2239.	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		7.520.000		8.000.000		228.000	100,00	2,85		228.000	20,00	0,38		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2240.	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2241.	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.086.858		3.964.000		5.996.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2242.	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.000.000		7.334.000		8.000.000		450.000	100,00	5,63		450.000	16,67	0,75		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		1		1		100,00		1		16,67			
2243.	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			56.405.800		3.900.000		3.990.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50		1		1		0		0,00		0		0,00			
2244.	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			640.000.000		44.887.760		18.447.000		7.340.000	100,00	39,79		7.340.000	0,50	1,15		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		1		1		1		100,00		1		0,50			
2245.	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.744.411.924		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2246.	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9		0		1		0		0,00		0		0,00			
2247.	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			201.204.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0,00		0		0,00			
2248.	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			673.193.864		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		0		2		0		0,00		0		0,00			
2249.	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			520.014.060		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2250.	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.092.586.000		106.281.983		27.800.000		4.029.804	66,67	14,50		4.029.804	20,00	0,37		
		Jumlah laporan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2251.	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000		1.000.000		500.000		500.000	100,00	100,00		500.000	20,00	2,50		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2252.	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			542.586.000		38.281.983		27.300.000		3.529.804	100,00	12,93		3.529.804	40,00	0,65		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		2		2		100,00		2		40,00			
2253.	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			530.000.000		67.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2254.	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.167.823.640		131.325.700		50.850.800		20.243.000	4,42	39,81		20.243.000	0,11	0,93		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2255.	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.175.603.000		126.548.700		-		9.909.000	0,00	0,00		9.909.000	0,00	0,84		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	144		1		0		0		0,00		0		0,00			
2256.	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		48.150.000		9.909.000	3,85	20,58		9.909.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		26		1		3,85		1		0,00			
2257.	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			130.220.640		4.777.000		2.700.800		425.000	5,00	15,74		425.000	0,33	0,33		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	300		1		20		1		5,00		1		0,33			
2258.	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			862.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2259.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**7.415.342.000**		**779.193.200**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	22		0		14		4		28,57		4		18,18			
2260.	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			6.222.572.000		737.533.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)																
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)																
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)																
2261.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			3.731.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	824		0		40		0		0,00		0		0,00			
2262.	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			1.150.000.000		524.739.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	30		0		1		0		0,00		0		0,00			
2263.	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			1.100.000.000		106.431.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	150		1		60		0		0,00		0		0,00			
2264.	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			241.322.000		106.363.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	100		30		30		0		0,00		0		0,00			
2265.	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.192.770.000		41.660.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)																
2266.	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			1.192.770.000		41.660.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2267.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**10.714.000.000**		**3.062.353.029**		**1.450.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	20		0		15		4		26,67		4		20,00			
2268.	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.024.943.000		2.311.981.329		1.400.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah fasilitas/sarana olahraga yang tersedia dan layak digunakan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)																
2269.	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			4.224.943.000		2.311.981.329		1.400.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2270.	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
2271.	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.757.927.000		612.274.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan setiap tahun	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)																
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)																
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)																
2272.	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			2.032.480.000		612.274.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	36		1		6		0		0,00		0		0,00			
2273.	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota			675.447.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	5		0		3		0		0,00		0		0,00			
2274.	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	600		0		0		0		0,00		0		0,00			
2275.	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.343.730.000		53.950.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah keikutsertaan atlet daerah dalam event olahraga tingkat provinsi/nasional	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)																
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)																
2276.	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			743.730.000		53.950.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	5		20		1		0		0,00		0		0,00			
2277.	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	220		0		30		0		0,00		0		0,00			
2278.	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	3		0		1		0		0,00		0		0,00			
2279.	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			587.400.000		50.000.000		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah organisasi olahraga yang dibina atau difasilitasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)																
2280.	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			587.400.000		50.000.000		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2281.	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1.000.000.000		34.147.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah event/festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)																
2282.	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2283.	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	11		0		1		0		0,00		0		0,00			
2284.	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			200.000.000		34.147.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	5		2		1		0		0,00		0		0,00			
2285.	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2286.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**450.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	22		0		14		4		28,57		4		18,18			
2287.	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah kegiatan pembinaan kepramukaan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)																
2288.	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			450.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**208.067.400**		**-**		**5.960.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
2289.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**208.067.400**		**-**		**5.960.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasioal (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,9		2,51		2,66		0		0,00		0		0,00			
2290.	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			208.067.400		-		5.960.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)																
2291.	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			49.897.400		-		5.117.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	90		0		3		0		0,00		0		0,00			
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data satistik untuk perencanaan, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan/ atau penyusunan kebijakan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)																
2292.	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)																
2293.	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			25.000.000		-		843.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	20		0		100		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)																
2294.	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)																
2295.	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			58.170.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**1.456.410.000**		**-**		**220.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
2296.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**1.456.410.000**		**-**		**220.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)	45		35,71		38,5		0		0,00		0		0,00			
2297.	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.456.410.000		-		220.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)																
2298.	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			1.456.410.000		-		220.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	43		0		43		0		0,00		0		0,00			
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**148.828.391.370**		**2.839.371.461**		**1.840.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
2299.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**113.954.135.751**		**1.991.787.831**		**1.426.700.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	89,85		70,15		73,35		0		0,00		0		0,00			
2300.	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.673.047.151		165.310.305		241.640.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)																
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)																
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)																
2301.	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			7.591.883.105		165.310.305		241.640.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
2302.	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			5.567.941.066		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
2303.	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			4.011.684.244		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2304.	2.22.02.2.01.0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan			2.501.538.736		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
2305.	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			46.521.084.464		270.543.078		695.060.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)																
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)																
2306.	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			30.501.270.321		122.000.000		500.358.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
2307.	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			16.019.814.143		148.543.078		194.702.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
2308.	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			47.760.004.136		1.555.934.448		490.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)																
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2309.	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			7.363.951.512		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2310.	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			25.961.057.164		608.758.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	220		210		220		0		0,00		0		0,00			
2311.	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			14.434.995.460		947.176.448		490.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
2312.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**10.987.422.124**		**467.969.440**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenia tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	90,45		72,52		69,59		0		0,00		0		0,00			
2313.	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.987.422.124		467.969.440		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)																
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)																
2314.	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			4.257.748.812		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
2315.	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			6.729.673.312		467.969.440		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	7		7		7		0		0,00		0		0,00			
2316.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**2.315.497.622**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%)	80,65		0		0		0		0,00		0		0,00			
2317.	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.315.497.622		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)																
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)																
2318.	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			1.157.748.812		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
2319.	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			625.184.357		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2320.	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			532.564.453		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2321.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**16.615.601.641**		**304.889.190**		**413.300.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
2322.	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			6.535.673.910		162.922.190		302.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)																
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)																
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)																
2323.	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			508.076.839		27.605.000		115.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5		14		20		0		0,00		0		0,00			
2324.	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			4.551.387.420		135.317.190		187.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	5		11		15		0		0,00		0		0,00			
2325.	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			1.476.209.651		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2326.	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			10.079.927.731		141.967.000		111.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)																
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)																
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)																
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)																
2327.	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			1.050.025.456		26.682.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	26		20		20		0		0,00		0		0,00			
2328.	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			2.822.297.732		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	26		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2329.	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			4.954.808.849		115.285.000		111.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	26		2		2		0		0,00		0		0,00			
2330.	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			1.252.795.694		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	26		0		0		0		0,00		0		0,00			
2331.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**4.955.734.232**		**74.725.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya atta kelola pengelolaan museum	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	88,75		65,15		69,25		0		0,00		0		0,00			
2332.	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			4.955.734.232		74.725.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)																
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)																
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)																
2333.	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			1.379.181.539		74.725.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	40		27		40		0		0,00		0		0,00			
2334.	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			1.065.181.530		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2335.	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			1.155.685.582		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2336.	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			871.512.159		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2337.	2.22.06.2.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum			484.173.422		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**27.607.570.195**		**4.827.866.405**		**4.501.205.259**		**844.332.475**	**25,66**	**18,76**		**844.332.475**	**3,95**	**3,06**		
2338.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.217.820.195**		**3.358.948.196**		**3.678.705.259**		**844.332.475**	**39,48**	**22,95**		**844.332.475**	**5,42**	**4,18**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		32,13		32,13		32,13		32,13			
2339.	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			114.818.000		2.762.400		1.139.000		-	54,17	0,00		-	10,83	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
2340.	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			38.576.000		1.277.000		800.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		1		25,00		1		5,00			
2341.	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			11.900.000		-		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2342.	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2343.	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.830.000		-		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2344.	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2345.	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			38.512.000		1.485.400		339.000		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2346.	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.749.664.195		3.089.964.133		3.422.628.689		844.332.475	53,78	24,67		844.332.475	13,99	5,36		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2347.	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.697.864.195		3.086.466.933		3.421.555.689		844.332.475	28,35	24,68		844.332.475	28,35	5,38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	448		422		448		127		28,35		127		28,35			
2348.	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.700.000		3.497.200		1.073.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2349.	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			4.600.000		-		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	20		4		4		4		100,00		4		20,00			
2350.	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.000.000		-		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2351.	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.800.000		-		-		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2352.	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.200.000		-		-		-	23,08	0,00		-	4,62	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	65		13		13		3		23,08		3		4,62			
2353.	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2354.	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.673.000		-		388.000		-	100,00	0,00		-	22,50	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
2355.	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			4.750.000		-		-		-	100,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		1		1		1		100,00		1		25,00			
2356.	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.923.000		-		388.000		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2357.	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			262.550.000		650.000		454.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2358.	2.23.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			26.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2359.	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			51.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2360.	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			7.650.000		650.000		454.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
2361.	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			68.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		0		0		0		0,00		0		0,00			
2362.	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			108.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14		0		0		0		0,00		0		0,00			
2363.	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			687.000.000		18.421.800		7.813.400		-	10,00	0,00		-	1,11	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
2364.	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2365.	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2366.	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			305.400.000		1.440.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
2367.	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.200.000		10.209.000		6.140.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2368.	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.100.000		2.241.800		1.153.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2369.	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			55.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2370.	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			17.700.000		1.500.000		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2371.	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			113.000.000		2.315.000		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2372.	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			11.100.000		716.000		520.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2373.	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.238.285.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2374.	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			750.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2375.	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2376.	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			159.385.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
2377.	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			163.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2378.	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			125.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2379.	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.300.980.000		233.786.903		236.109.170		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2380.	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000		500.000		160.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2381.	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			414.980.000		71.566.903		73.949.170		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2382.	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			882.000.000		161.720.000		162.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2383.	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			847.850.000		13.362.960		10.173.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2384.	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			162.530.000		11.272.960		9.723.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
2385.	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			17.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2386.	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.320.000		2.090.000		450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42		4		1		0		0,00		0		0,00			
2387.	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			297.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2388.	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2389.	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2390.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**7.051.480.000**		**1.404.903.969**		**777.096.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	81,98		58,29		80,25		0		0,00		0		0,00			
2391.	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.606.664.200		482.542.110		317.682.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)																
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)																
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)																
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)																
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)																
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)																
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)																
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)																
2392.	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			398.250.000		77.098.905		59.108.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	130		26		26		0		0,00		0		0,00			
2393.	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			58.250.000		11.044.896		106.394.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	26		26		26		0		0,00		0		0,00			
2394.	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			200.000.000		16.158.009		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	40		30		40		0		0,00		0		0,00			
2395.	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			48.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2396.	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			152.500.000		27.175.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
2397.	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			189.904.000		37.889.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2398.	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			281.000.000		34.561.000		4.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2325		299		33		0		0,00		0		0,00			
2399.	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			1.194.081.500		261.936.800		148.180.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	25		2		50		0		0,00		0		0,00			
2400.	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			84.678.700		16.678.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2401.	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.444.815.800		922.361.859		459.414.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)																
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)																
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)																
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)																
2402.	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			325.000.000		14.482.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	94		2		15		0		0,00		0		0,00			
2403.	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			450.000.000		65.876.000		62.210.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	13		13		13		0		0,00		0		0,00			
2404.	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			499.034.800		214.495.983		37.270.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2405.	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			1.348.617.000		290.597.576		220.225.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	600		600		600		0		0,00		0		0,00			
2406.	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			1.822.164.000		336.909.800		139.709.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	60		60		50		0		0,00		0		0,00			
2407.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**338.270.000**		**64.014.240**		**45.404.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
2408.	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			338.270.000		64.014.240		45.404.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)																
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)																
2409.	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			250.000.000		49.863.240		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	5		1		15		0		0,00		0		0,00			
2410.	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			88.270.000		14.151.000		44.904.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	10		2		20		0		0,00		0		0,00			
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**393.750.000**		**10.709.000**		**24.999.600**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
2411.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**234.898.000**		**6.775.000**		**19.537.500**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	57,41		76,55		55,41		0		0,00		0		0,00			
2412.	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			96.520.000		5.028.000		4.683.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)																
2413.	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			47.520.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2414.	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			15.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)																
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																
2415.	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			7.150.000		3.884.000		903.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	4800		5.200		4800		0		0,00		0		0,00			
2416.	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	350		0		980		0		0,00		0		0,00			
2417.	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			18.850.000		1.144.000		3.780.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	43		15		50		0		0,00		0		0,00			
2418.	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			60.300.000		-		3.509.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)																
2419.	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			60.300.000		-		3.509.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	200		0		45		0		0,00		0		0,00			
2420.	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			78.078.000		1.747.000		11.344.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)																
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)																
2421.	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			60.078.000		1.190.000		3.528.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	34		10		34		0		0,00		0		0,00			
2422.	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000		557.000		7.816.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	43		15		43		0		0,00		0		0,00			
2423.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**103.362.000**		**3.934.000**		**5.462.100**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	47,3		16,67		23,97		0		0,00		0		0,00			
2424.	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			22.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)																
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)																
2425.	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
2426.	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
2427.	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			47.362.000		3.934.000		5.462.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)																
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)																
2428.	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2429.	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			36.162.000		3.934.000		5.462.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	20		45		35		0		0,00		0		0,00			
2430.	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)																
2431.	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2432.	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			22.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)																
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)																
2433.	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
2434.	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			11.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
2435.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**			**55.490.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
2436.	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			55.490.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)																
2437.	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			55.490.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**43.970.436.560**		**6.296.372.862**		**5.248.230.753**		**1.019.728.357**	**5,95**	**19,43**		**1.019.728.357**	**2,12**	**2,32**		
2438.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.290.507.597**		**4.382.463.623**		**4.892.230.753**		**995.609.096**	**7,14**	**20,35**		**995.609.096**	**2,94**	**4,10**	DINAS PERIKANAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2439.	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.437.000		20.570.000		13.910.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2440.	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			27.798.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		0		0,00		0		0,00			
2441.	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.488.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2442.	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			14.316.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2443.	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.744.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2444.	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			16.136.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2445.	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			169.955.000		20.570.000		13.910.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		0		0		0,00		0		0,00			
2446.	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2447.	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.916.991.025		4.025.374.283		4.632.557.753		972.576.682	0,00	20,99		972.576.682	0,00	4,88		
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusulan Laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2448.	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.808.627.025		4.025.374.283		4.632.557.753		972.576.682	0,00	20,99		972.576.682	0,00	4,91		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41		40		40		0		0,00		0		0,00			
2449.	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.978.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2450.	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			15.950.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2451.	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			36.696.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2452.	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			22.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2453.	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2454.	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.440.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2455.	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			194.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pelaksanaan peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2456.	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			20.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2457.	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			141.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2458.	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
2459.	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			22.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	41		0		0		0		0,00		0		0,00			
2460.	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			642.260.172		49.983.252		46.970.000		320.000	3,57	0,68		320.000	3,13	0,05		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2461.	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.766.000		1.295.000		496.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2462.	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			155.081.800		18.721.564		13.336.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		1		0		0,00		0		0,00			
2463.	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.325.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2464.	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			32.210.400		1.791.300		1.288.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2465.	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.910.200		6.700.100		672.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2466.	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			23.286.000		1.920.000		2.082.000		320.000	25,00	15,37		320.000	25,00	1,37		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
2467.	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			56.080.000		38.500		975.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
2468.	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			263.600.772		19.516.788		28.120.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
2469.	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			410.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
2470.	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			350.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
2471.	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			60.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2472.	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			869.500.000		123.125.644		113.393.000		15.932.814	25,00	14,05		15.932.814	25,00	1,83		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2473.	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.200.000		600.000		600.000		100.000	25,00	16,67		100.000	25,00	0,98		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
2474.	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			244.300.000		32.505.219		40.793.000		4.013.138	25,00	9,84		4.013.138	25,00	1,64		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
2475.	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			615.000.000		90.020.425		72.000.000		11.819.676	25,00	16,42		11.819.676	25,00	1,92		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
2476.	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.967.569.400		163.410.444		85.400.000		6.779.600	0,00	7,94		6.779.600	0,00	0,34		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2477.	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.330.809.400		149.646.444		83.600.000		6.779.600	0,00	8,11		6.779.600	0,00	0,51		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		49		49		0		0,00		0		0,00			
2478.	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2479.	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.960.000		1.270.000		1.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		39		39		0		0,00		0		0,00			
2480.	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			393.800.000		12.494.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
2481.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**3.646.173.051**		**1.847.069.901**		**25.000.000**		**415.000**	**0,00**	**1,66**		**415.000**	**0,00**	**0,01**	DINAS PERIKANAN	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi tangkap (Ton) (Nilai)	4.739,74		4.305,64		4314,57		1.088,29		25,22		1.088,29		22,96			
2482.	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2.455.443.651		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)																
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)																
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)																
2483.	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			657.362.755		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2484.	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			1.043.903.896		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2485.	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			754.177.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	2		0		12		0		0,00		0		0,00			
2486.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.190.729.400		1.847.069.901		25.000.000		415.000	0,00	1,66		415.000	0,00	0,03		
		Cakupan Bina Kelompok	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)																
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)																
2487.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			781.591.000		1.847.069.901		25.000.000		415.000	0,00	1,66		415.000	0,00	0,05		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	114		374		100		0		0,00		0		0,00			
2488.	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			409.138.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
2489.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**12.132.111.912**		**66.839.338**		**271.000.000**		**21.063.773**	**0,00**	**7,77**		**21.063.773**	**0,00**	**0,17**	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi budidaya (Ton) (Ton)	46.362,6		38.878,15		40720,2		9.770,95		24,00		9.770,95		21,08			
2490.	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah izin usaha perikanan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)																
2491.	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2492.	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			4.854.898.280		66.839.338		233.000.000		21.063.773	0,00	9,04		21.063.773	0,00	0,43		
		Cakupan Bina Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)																
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)																
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)																
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)																
2493.	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			1.576.667.211		66.839.338		100.500.000		8.927.367	0,00	8,88		8.927.367	0,00	0,57		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	535		10		95		0		0,00		0		0,00			
2494.	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			1.678.497.670		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	535		0		32		0		0,00		0		0,00			
2495.	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			255.674.653		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	18		0		0		0		0,00		0		0,00			
2496.	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			1.344.058.746		-		132.500.000		12.136.406	0,00	9,16		12.136.406	0,00	0,90		
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	535		0		30		0		0,00		0		0,00			
2497.	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)																
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)																
2498.	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2499.	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2500.	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			7.217.213.632		-		38.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)																
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)																
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)																
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)																
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)																
2501.	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			562.104.546		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2502.	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.747.081.356		-		38.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		7		0		0,00		0		0,00			
2503.	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			164.749.546		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2504.	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.517.657.346		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
2505.	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			142.104.546		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	39		0		0		0		0,00		0		0,00			
2506.	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			284.571.746		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2507.	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			1.798.944.546		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2508.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**210.200.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERIKANAN	
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luas kawasan konservasi (Ha)	4.220,45		0		0		0		0,00		0		0,00			
2509.	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			210.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Luas Kawasan Konservasi	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)																
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)																
2510.	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			105.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	554		0		0		0		0,00		0		0,00			
2511.	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			105.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
2512.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**3.691.444.000**		**-**		**60.000.000**		**2.640.488**	**25,00**	**4,40**		**2.640.488**	**6,25**	**0,07**	DINAS PERIKANAN	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (ton) (Ton)	420		395,92		400		104,01		26,00		104,01		24,76			
			angka konsumsi makan ikan (Kg/KAP/TH)	43,61		42,03		41,24		0		0,00		0		0,00			
2513.	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			1.962.189.000		-		60.000.000		2.640.488	25,00	4,40		2.640.488	25,00	0,13		
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)																
2514.	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			1.962.189.000		-		60.000.000		2.640.488	25,00	4,40		2.640.488	25,00	0,13		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12		0		12		3		25,00		3		25,00			
2515.	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			535.085.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2516.	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			535.085.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2517.	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.194.170.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)																
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)																
2518.	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			797.085.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	46362.6		0		0		0		0,00		0		0,00			
2519.	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			397.085.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**17.235.840.000**		**254.840.900**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
2520.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**9.842.048.000**		**167.889.900**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	95		0		15		4		26,67		4		4,21			
2521.	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			1.309.510.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)																
2522.	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			1.309.510.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2523.	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			8.532.538.000		167.889.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)																
2524.	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.469.000.000		167.889.900		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		3		6		0		0,00		0		0,00			
2525.	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			7.063.538.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2526.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**2.893.792.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya Media Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20		0		20		5		25,00		5		25,00			
2527.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.893.792.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah event pemasaran pariwisata yang diselenggarakan dan diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)																
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)																
2528.	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			360.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2529.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			2.533.792.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	25		0		8		0		0,00		0		0,00			
2530.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**360.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persentase Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2531.	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			360.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan aktif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)																
2532.	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif			360.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2533.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**4.140.000.000**		**86.951.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Meningkatnya Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20		0		16		4		25,00		4		20,00			
2534.	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.352.100.000		25.998.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)																
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)																
2535.	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			1.928.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	150		0		30		0		0,00		0		0,00			
2536.	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			1.424.000.000		25.998.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	180		10		800		0		0,00		0		0,00			
2537.	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			787.900.000		60.953.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan atau pendampingan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)																
2538.	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			787.900.000		60.953.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	225		0		30		0		0,00		0		0,00			
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**182.755.131.395**		**26.576.703.879**		**26.535.207.989**		**3.332.999.230**	**2,10**	**12,56**		**3.332.999.230**	**0,74**	**1,82**		
2539.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**54.953.776.233**		**15.177.431.980**		**15.220.050.544**		**1.446.227.622**	**1,35**	**9,50**		**1.446.227.622**	**0,31**	**2,63**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		12,5		12,50			
2540.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			882.000.000		76.607.700		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2541.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			106.000.000		11.194.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		0		0		0,00		0		0,00			
2542.	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			69.000.000		4.468.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2543.	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			70.000.000		4.481.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2544.	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20.500.000		3.213.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2545.	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			24.000.000		3.585.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2546.	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			172.500.000		21.260.700		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	65		14		0		0		0,00		0		0,00			
2547.	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			420.000.000		28.406.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2548.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.814.650.259		14.104.674.174		14.676.101.044		1.380.973.526	0,00	9,41		1.380.973.526	0,00	3,38		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2549.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40.673.763.897		14.088.482.574		14.676.101.044		1.380.973.526	0,00	9,41		1.380.973.526	0,00	3,40		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	173		170		65		0		0,00		0		0,00			
2550.	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			72.403.962		11.006.600		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2551.	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			15.854.000		1.780.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2552.	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			38.457.700		2.328.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2553.	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			14.170.700		1.077.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2554.	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.617.002		4.304.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
2555.	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.437.952		815.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2556.	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			30.179.050		3.489.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2557.	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			11.062.500		1.070.000		1.482.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)																
2558.	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			11.062.500		1.070.000		1.482.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2559.	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			225.386.000		4.900.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
2560.	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			130.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	216		0		0		0		0,00		0		0,00			
2561.	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			54.750.000		2.340.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2562.	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			40.636.000		2.560.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	825		171		175		0		0,00		0		0,00			
2563.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.607.512.000		309.738.562		324.317.000		15.722.758	5,50	4,85		15.722.758	0,71	0,60		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2564.	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60.390.000		11.505.360		12.078.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2565.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			250.300.000		9.617.369		10.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2566.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.050.010.000		56.088.594		30.060.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
2567.	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			344.812.000		17.691.562		35.991.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2568.	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			35.000.000		3.928.400		1.680.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2569.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			867.000.000		210.907.277		234.207.000		15.722.758	22,00	6,71		15.722.758	4,23	1,81		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260		31		50		11		22,00		11		4,23			
2570.	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.077.000.000		20.146.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2571.	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.993.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2572.	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			900.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
2573.	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.184.000.000		20.146.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	83		3		2		0		0,00		0		0,00			
2574.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.143.949.472		447.890.744		148.050.000		9.271.338	0,00	6,26		9.271.338	0,00	0,29		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2575.	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000		3.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2576.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			730.000.000		70.540.744		83.250.000		9.271.338	0,00	11,14		9.271.338	0,00	1,27		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	19		19		19		0		0,00		0		0,00			
2577.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.388.949.472		374.350.000		64.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	43		47		2		0		0,00		0		0,00			
2578.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.149.599.000		208.100.300		70.100.000		40.260.000	2,14	57,43		40.260.000	1,95	1,28		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2579.	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.432.779.000		169.776.300		70.100.000		40.260.000	6,43	57,43		40.260.000	5,84	2,81		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	154		154		140		9		6,43		9		5,84			
2580.	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			596.820.000		22.437.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	62		60		62		0		0,00		0		0,00			
2581.	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.120.000.000		15.887.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		19		19		0		0,00		0		0,00			
2582.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**9.565.052.782**		**687.927.719**		**785.307.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	2		6,665		2		0		0,00		0		0,00			
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	2		12,625		2		0		0,00		0		0,00			
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2		2,768		2		0		0,00		0		0,00			
2583.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			7.815.052.782		681.557.719		145.307.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Pengawasan dan Pendampingan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)																
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)																
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)																
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)																
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)																
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)																
2584.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			1.952.307.000		677.736.719		120.307.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2585.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			1.138.245.782		3.821.000		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2586.	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			1.369.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	36		0		0		0		0,00		0		0,00			
2587.	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			1.620.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	280000		0		0		0		0,00		0		0,00			
2588.	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			445.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6000		0		0		0		0,00		0		0,00			
2589.	3.27.02.2.01.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			1.290.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
2590.	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.750.000.000		6.370.000		640.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah pengelolaan SDG	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)																
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))																
2591.	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			1.050.000.000		6.370.000		640.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2592.	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			700.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2593.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**19.962.451.300**		**615.574.956**		**180.000.000**		**13.500.000**	**0,00**	**7,50**		**13.500.000**	**0,00**	**0,07**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas (%)	1,2		4,478		1,20		0		0,00		0		0,00			
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	17,585		17.585		17,585		16.455,66		93.577,82		16.455,66		93.577,82			
2594.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			5.332.451.300		377.573.948		180.000.000		13.500.000	0,00	7,50		13.500.000	0,00	0,25		
		Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)																
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)																
			Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)																
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)																
2595.	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1.400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2596.	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			1.000.000.000		38.660.244		120.000.000		13.500.000	0,00	11,25		13.500.000	0,00	1,35		
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
2597.	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			2.932.451.300		338.913.704		60.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2598.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			14.630.000.000		238.001.008		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)																
2599.	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			2.400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	26		0		0		0		0,00		0		0,00			
2600.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			4.100.000.000		238.001.008		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	33		0		0		0		0,00		0		0,00			
2601.	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			1.400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2602.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			3.680.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2603.	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			3.050.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	33		4		0		0		0,00		0		0,00			
2604.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**2.380.000.000**		**107.816.000**		**15.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	98		23,75		95		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	98		23,75		95		0		0,00		0		0,00			
2605.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			2.380.000.000		107.816.000		15.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)																
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)																
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)																
2606.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			1.575.000.000		103.171.000		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	140		2		1		0		0,00		0		0,00			
2607.	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			565.000.000		4.645.000		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	55		1		1		0		0,00		0		0,00			
2608.	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			240.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2609.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**183.500.000**		**4.442.500**		**10.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
2610.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			183.500.000		4.442.500		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten lima puluh kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)																
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)																
2611.	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			78.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
2612.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			105.500.000		4.442.500		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	41		1		1		0		0,00		0		0,00			
2613.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**8.725.824.000**		**738.835.500**		**120.000.000**		**2.305.000**	**0,00**	**1,92**		**2.305.000**	**0,00**	**0,03**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	2		0		2		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	3		0		3		0		0,00		0		0,00			
2614.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			8.725.824.000		738.835.500		120.000.000		2.305.000	0,00	1,92		2.305.000	0,00	0,03		
		Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)																
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)																
2615.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			2.388.824.000		573.686.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13		13		0		0		0,00		0		0,00			
2616.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			907.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
2617.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1.730.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	65		0		0		0		0,00		0		0,00			
2618.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			3.700.000.000		165.149.500		120.000.000		2.305.000	0,00	1,92		2.305.000	0,00	0,06		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	147		7		5		0		0,00		0		0,00			
2619.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**54.681.996.380**		**9.072.358.078**		**9.504.850.445**		**1.870.966.608**	**4,63**	**19,68**		**1.870.966.608**	**2,36**	**3,42**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		25		100		25		25,00		25		25,00			
2620.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			204.036.818		17.648.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
2621.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		0		4		0		0,00		0		0,00			
2622.	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			
2623.	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			
2624.	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.550.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			
2625.	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.875.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2626.	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			150.000.500		17.648.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		3		5		0		0,00		0		0,00			
2627.	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2628.	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.261.318		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2629.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			46.973.862.810		8.701.492.269		9.340.148.345		1.854.374.817	12,50	19,85		1.854.374.817	12,77	3,95		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2630.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			46.942.787.810		8.701.492.269		9.340.148.345		1.854.374.817	100,00	19,85		1.854.374.817	102,13	3,95		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	94		384		96		96		100,00		96		102,13			
2631.	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	15		0		3		0		0,00		0		0,00			
2632.	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.425.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2633.	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.150.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2634.	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
2635.	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
2636.	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2637.	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
2638.	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			19.286.723		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
2639.	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			3.086.723		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2640.	3.27.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			2.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2641.	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			3.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2642.	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2643.	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2644.	3.27.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			3.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2645.	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.850.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2646.	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	300		0		100		0		0,00		0		0,00			
2647.	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2648.	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.125.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2649.	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			26.350.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		4		0		0,00		0		0,00			
2650.	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			12.375.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		12		0		0,00		0		0,00			
2651.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.044.244.473		83.463.200		70.580.000		8.114.478	4,17	11,50		8.114.478	0,56	0,78		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
2652.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			218.871.973		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
2653.	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
2654.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			357.302.500		33.083.000		35.430.600		8.114.478	25,00	22,90		8.114.478	5,00	2,27		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2655.	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.270.000		17.292.200		12.555.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2656.	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.350.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2657.	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
2658.	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.200.000		240.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2659.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			361.000.000		32.848.000		22.594.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2660.	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2661.	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.919.914.126		22.120.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2662.	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			438.914.126		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
2663.	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			900.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	90		0		1		0		0,00		0		0,00			
2664.	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			201.000.000		22.120.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	85		28		0		0		0,00		0		0,00			
2665.	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2666.	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			130.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		0		0		0		0,00		0		0,00			
2667.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			819.010.500		116.030.549		36.902.100		3.711.763	8,33	10,06		3.711.763	1,67	0,45		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2668.	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.500.000		500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2669.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			184.510.500		35.930.549		36.902.100		3.711.763	25,00	10,06		3.711.763	5,00	2,01		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2670.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			630.000.000		79.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2671.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.604.790.930		131.603.260		57.220.000		4.765.550	8,43	8,33		4.765.550	0,67	0,13		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2672.	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			901.995.800		119.488.260		51.900.000		4.765.550	16,85	9,18		4.765.550	3,37	0,53		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	445		58		89		15		16,85		15		3,37			
2673.	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			181.360.000		12.115.000		5.320.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		30		11		0		0,00		0		0,00			
2674.	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.172.685.130		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
2675.	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			196.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2676.	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			152.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
2677.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**12.032.820.800**		**108.175.050**		**540.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas saranan pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	7		2		7		0		0,00		0		0,00			
2678.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan laporan pemanfaatan, kualitas dan pelestarian SDG Hewan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)																
2679.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2680.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2681.	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan laporan pemanfaatan, kualitas dan pelestarian SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)																
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)																
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)																
2682.	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2683.	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			2.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2684.	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			2.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2685.	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.010.000.000		108.175.050		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah laporan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)																
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)																
2686.	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			2.900.000.000		108.175.050		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2687.	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			1.110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	75		0		50		0		0,00		0		0,00			
2688.	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			42.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)																
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)																
2689.	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			22.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2690.	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan			20.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2691.	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			154.680.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)																
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)																
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)																
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)																
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)																
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)																
2692.	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			47.380.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2693.	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			2.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2694.	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			51.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	180		0		36		0		0,00		0		0,00			
2695.	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			1.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2696.	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			1.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2697.	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			51.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2698.	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			7.768.140.800		-		500.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)																
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)																
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)																
2699.	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			515.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2700.	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			4.314.940.000		-		300.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	5		0		1200		0		0,00		0		0,00			
2701.	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			2.938.200.800		-		200.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	500		0		5000		0		0,00		0		0,00			
2702.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**16.026.531.600**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas (%)	2		0		2		0		0,00		0		0,00			
2703.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			15.969.530.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pembangunan Prasarana pertanian sektor peternakan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)																
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)																
			Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)																
2704.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			77.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
2705.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			176.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2706.	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			72.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2707.	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak			1.117.760.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2708.	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			850.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2709.	3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan			813.970.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2710.	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan			933.640.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
2711.	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			11.927.860.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2712.	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			5.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)																
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)																
2713.	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2714.	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			2.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2715.	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			51.500.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah lahan penggembalaan umum yang berkembang	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)																
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)																
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)																
2716.	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum			15.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2717.	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum			34.000.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2718.	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum			2.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2719.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**2.120.037.700**		**18.988.000**		**160.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	2		0		2		0		0,00		0		0,00			
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
2720.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			226.387.800		18.487.500		100.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)																
			Jumlah kader zoonosis (Orang)																
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)																
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)																
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)																
2721.	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			25.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2722.	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis			31.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	395		0		79		0		0,00		0		0,00			
2723.	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			24.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	65		0		13		0		0,00		0		0,00			
2724.	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			22.928.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	150		0		30		0		0,00		0		0,00			
2725.	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis			21.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2726.	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			101.559.800		18.487.500		100.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2727.	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			133.651.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)																
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)																
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)																
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)																
2728.	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			54.149.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2729.	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			26.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2730.	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			26.751.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2731.	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya			26.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2732.	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.007.748.400		-		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)																
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)																
2733.	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			505.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2734.	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			502.748.400		-		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
2735.	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			599.500.000		500.500		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)																
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)																
2736.	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			481.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2737.	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			118.000.000		500.500		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	60		12		10		0		0,00		0		0,00			
2738.	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			152.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)																
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)																
2739.	3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya			145.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2740.	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha			7.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2741.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**376.906.800**		**500.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
2742.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			129.060.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)																
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)																
			Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)																
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)																
2743.	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2744.	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			44.310.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2745.	3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2746.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			3.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2747.	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			182.796.800		500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)																
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)																
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2748.	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			17.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2749.	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan			100.296.800		500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	60		1		12		0		0,00		0		0,00			
2750.	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan			65.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	80		0		20		0		0,00		0		0,00			
2751.	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			65.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)																
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)																
2752.	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			5.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
2753.	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
2754.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**1.746.233.800**		**44.654.096**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
2755.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.746.233.800		44.654.096		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan pada kelembagaan petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)																
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)																
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)																
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)																
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)																
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)																
2756.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			339.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	150		0		30		0		0,00		0		0,00			
2757.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			339.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1250		0		250		0		0,00		0		0,00			
2758.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			336.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2759.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			546.200.000		1.654.096		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5		4		0		0		0,00		0		0,00			
2760.	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			32.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2761.	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota			32.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2762.	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			88.683.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
2763.	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			31.750.000		43.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**35.852.505.350**		**67.194.170**		**122.204.000**		**1.455.000**	**12,33**	**1,19**		**1.455.000**	**1,23**	**0,00**		
2764.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**178.468.300**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	70		0		70		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2765.	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			178.468.300		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)																
2766.	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			178.468.300		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25		0		5		0		0,00		0		0,00			
2767.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**27.679.816.250**		**-**		**50.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kualitas saranan perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100		0		100		0		0,00		0		0,00			
2768.	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			26.647.621.250		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)																
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)																
			Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)																
2769.	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			24.197.621.250		-		50.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	9		0		1		0		0,00		0		0,00			
2770.	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota			1.700.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	17		0		0		0		0,00		0		0,00			
2771.	3.30.03.2.01.0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota			750.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
2772.	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			1.032.195.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)																
2773.	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1.032.195.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
2774.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1.805.467.750**		**54.277.670**		**58.000.000**		**1.455.000**	**25,00**	**2,51**		**1.455.000**	**5,00**	**0,08**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	10,12		9,26		10,21		0		0,00		0		0,00			
2775.	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			910.442.750		19.927.000		29.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2776.	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			910.442.750		19.927.000		29.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	60		238		12		3		25,00		3		5,00			
2777.	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			895.025.000		34.350.670		29.000.000		1.455.000	25,00	5,02		1.455.000	5,00	0,16		
		Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)																
2778.	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			895.025.000		34.350.670		29.000.000		1.455.000	25,00	5,02		1.455.000	5,00	0,16		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	20		2		4		1		25,00		1		5,00			
2779.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**2.412.815.625**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	14,91		0		0		0		0,00		0		0,00			
2780.	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.412.815.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)																
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)																
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)																
2781.	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			881.288.125		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2782.	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			468.402.500		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	8		0		4		0		0,00		0		0,00			
2783.	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			1.063.125.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
2784.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**1.513.121.800**		**12.916.500**		**14.204.000**		**-**	**24,00**	**0,00**		**-**	**4,80**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	14		9,7		10		1,77		17,70		1,77		12,64			
2785.	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			1.513.121.800		12.916.500		14.204.000		-	24,00	0,00		-	4,80	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)																
2786.	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			1.513.121.800		12.916.500		14.204.000		-	24,00	0,00		-	4,80	0,00		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1000		264		200		48		24,00		48		4,80			
2787.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**2.262.815.625**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negri	Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan (%)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
2788.	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			2.262.815.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)																
2789.	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			2.262.815.625		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**32.459.505.423**		**3.971.380.728**		**4.138.928.110**		**981.521.621**	**1,25**	**23,71**		**981.521.621**	**0,24**	**3,02**		
2790.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.434.465.623**		**3.849.570.493**		**4.043.928.110**		**970.244.409**	**1,67**	**23,99**		**970.244.409**	**0,28**	**4,14**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
2791.	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			119.024.900		1.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
2792.	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.499.900		1.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		2		8		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
2793.	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
2794.	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			13.257.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
2795.	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.856.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
2796.	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
2797.	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.312.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2798.	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.350.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)																
2799.	3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2800.	3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2801.	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.997.907.523		3.654.998.902		3.925.364.710		955.558.817	12,50	24,34		955.558.817	2,08	5,97		
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
2802.	3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
2803.	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			43.005.300		987.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
2804.	3.31.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			13.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
2805.	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			17.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2806.	3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
2807.	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.909.902.223		3.654.011.902		3.925.364.710		955.558.817	25,00	24,34		955.558.817	12,50	6,01		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		44		45		11,25		25,00		5,625		12,50			
2808.	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			187.900.000		992.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
2809.	3.31.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			33.216.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
2810.	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
2811.	3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
2812.	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			21.500.000		992.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
2813.	3.31.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			16.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
2814.	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2815.	3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			11.183.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	308		0		0		0		0,00		0		0,00			
2816.	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.764.488.000		31.369.600		9.236.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
2817.	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			140.000.000		3.204.600		1.376.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	49		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
2818.	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	57		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
2819.	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			129.990.000		3.400.000		860.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	49		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2820.	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.030.998.000		14.953.000		3.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	49		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
2821.	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			57.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	17		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
2822.	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			63.000.000		2.480.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
2823.	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan'	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
2824.	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			54.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
2825.	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			197.000.000		7.332.000		3.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	49		1		1		0		0,00		0		0,00			
2826.	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.358.947.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
2827.	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			585.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
2828.	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			160.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2829.	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			459.947.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23		1		5		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2830.	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			800.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2831.	3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			354.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2832.	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.564.200.000		125.612.391		85.213.400		14.685.592	0,00	17,23		14.685.592	0,00	0,94		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
2833.	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
2834.	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			330.500.000		41.672.703		43.063.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2835.	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.208.200.000		83.939.688		42.150.000		14.685.592	0,00	34,84		14.685.592	0,00	1,22		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2836.	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.441.998.200		30.797.600		24.114.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
2837.	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			779.300.000		25.197.600		22.114.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	88		17		20		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
2838.	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			48.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah unit peralatan danm mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
2839.	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			220.000.000		4.850.000		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80		11		10		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2840.	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			206.936.000		750.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2841.	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			187.262.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2842.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**6.465.449.800**		**14.791.292**		**22.310.400**		**1.037.000**	**0,00**	**4,65**		**1.037.000**	**0,00**	**0,02**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	20		29,69		10		0		0,00		0		0,00			
2843.	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			6.465.449.800		14.791.292		22.310.400		1.037.000	0,00	4,65		1.037.000	0,00	0,02		
		Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan sarana dan prasarana peralatan produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)																
2844.	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			4.170.030.000		731.000		2.154.000		430.000	0,00	19,96		430.000	0,00	0,01		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)																
2845.	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			625.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)																
2846.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			865.000.000		6.902.592		15.156.400		527.000	0,00	3,48		527.000	0,00	0,06		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)																
2847.	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			333.419.800		7.157.700		5.000.000		80.000	0,00	1,60		80.000	0,00	0,02		
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah program pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diimplementasikan	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)																
2848.	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			322.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)																
2849.	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
2850.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**2.559.590.000**		**107.018.943**		**72.689.600**		**10.240.212**	**0,00**	**14,09**		**10.240.212**	**0,00**	**0,40**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
2851.	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			2.559.590.000		107.018.943		72.689.600		10.240.212	0,00	14,09		10.240.212	0,00	0,40		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)																
2852.	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1.259.590.000		6.151.000		3.932.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Fasilitasi program/kegiatan terkait promosi dan pemasaran produk IKM	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)																
2853.	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1.300.000.000		100.867.943		68.757.100		10.240.212	0,00	14,89		10.240.212	0,00	0,79		
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	51		1		1		0		0,00		0		0,00			
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.484.492.500**		**968.800**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2854.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**1.336.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	40		0		0		0		0,00		0		0,00			
2855.	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.336.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Tranmigran yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)																
2856.	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			730.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	410		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Jumlah Tranmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)																
2857.	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			606.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
2858.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**148.492.500**		**968.800**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	12		0		8,0		0		0,00		0		0,00			
2859.	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			148.492.500		968.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Tranmigran yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)																
2860.	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			148.492.500		968.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	76		2		10		0		0,00		0		0,00			
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**313.601.631.595**		**37.531.946.331**		**40.252.701.943**		**5.551.224.319**	**10,63**	**13,79**		**5.551.224.319**	**2,07**	**1,77**		
2861.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**257.810.261.895**		**25.993.366.107**		**28.042.331.643**		**5.377.410.354**	**10,87**	**19,18**		**5.377.410.354**	**2,52**	**2,09**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		91,92		100		20,76		20,76		20,76		20,76			
2862.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.783.475.411		235.539.336		54.511.900		6.464.000	45,00	11,86		6.464.000	7,33	0,10		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
2863.	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.695.017.350		162.340.626		16.000.000		-	40,00	0,00		-	8,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		2		40,00		2		8,00			
2864.	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.088.458.061		73.198.710		38.511.900		6.464.000	50,00	16,78		6.464.000	6,67	0,21		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	30		4		4		2		50,00		2		6,67			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2865.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.243.474.913		14.552.378.972		17.934.359.370		4.114.165.778	35,12	22,94		4.114.165.778	6,93	5,19		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2866.	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			76.019.238.233		14.419.985.614		17.703.479.470		4.062.102.202	44,64	22,95		4.062.102.202	6,78	5,34		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	830		147		126		56,25		44,64		56,25		6,78			
2867.	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.531.475.554		72.526.496		180.880.000		39.579.468	13,33	21,88		39.579.468	4,10	2,58		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	390		120		120		16		13,33		16		4,10			
2868.	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			465.688.626		9.727.750		10.007.300		6.655.325	100,00	66,50		6.655.325	20,00	1,43		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2869.	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			866.249.000		47.198.112		39.992.600		5.828.783	17,65	14,57		5.828.783	3,75	0,67		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	80		14		17		3		17,65		3		3,75			
2870.	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			360.823.500		2.941.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2871.	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			762.895.750		19.864.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
2872.	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			239.852.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		0		5		0		0,00		0		0,00			
2873.	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			239.852.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12		0		5		0		0,00		0		0,00			
2874.	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			283.191.750		19.864.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		72,11		6		0		0,00		0		0,00			
2875.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.545.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
2876.	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2.545.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3228		0		0		0		0,00		0		0,00			
2877.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.164.606.818		925.184.674		868.233.200		57.004.162	7,00	6,57		57.004.162	1,40	0,31		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
2878.	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.755.084.568		104.943.740		86.811.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		3		3		0		0,00		0		0,00			
2879.	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			361.797.500		60.208.216		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2880.	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.826.919.000		427.787.928		293.418.200		39.815.600	25,00	13,57		39.815.600	5,00	0,45		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2881.	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.763.808.000		280.398.640		448.004.000		17.188.562	0,00	3,84		17.188.562	0,00	0,25		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2882.	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			456.997.750		51.846.150		-		-	10,00	0,00		-	2,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	50		6		10		1		10,00		1		2,00			
2883.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49.241.268.682		877.590.470		1.087.089.000		31.759.000	0,00	2,92		31.759.000	0,00	0,06		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2884.	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		4		0		0,00		0		0,00			
2885.	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.242.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		4		0		0,00		0		0,00			
2886.	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.844.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	553		0		0		0		0,00		0		0,00			
2887.	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
2888.	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
2889.	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.154.768.682		877.590.470		1.087.089.000		31.759.000	0,00	2,92		31.759.000	0,00	0,62		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	45		3		3		0		0,00		0		0,00			
2890.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.447.014.477		3.125.432.129		2.678.905.200		566.637.178	12,50	21,15		566.637.178	8,75	1,86		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2891.	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.359.250.000		5.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2892.	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.708.000.000		691.610.104		670.500.000		122.133.078	25,00	18,22		122.133.078	5,00	1,82		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2893.	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			775.520.000		96.527.870		105.741.700		47.904.100	25,00	45,30		47.904.100	30,00	6,18		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		3		12		3		25,00		3		30,00			
2894.	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			21.604.244.477		2.332.294.155		1.902.663.500		396.600.000	0,00	20,84		396.600.000	0,00	1,84		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		12		1		0		0,00		0		0,00			
2895.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.329.343.607		2.730.401.884		1.732.412.700		170.832.230	7,29	9,86		170.832.230	0,89	0,46		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2896.	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.689.625.000		229.342.312		251.350.000		37.564.520	16,67	14,95		37.564.520	3,23	1,40		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	31		6		6		1		16,67		1		3,23			
2897.	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			13.053.562.500		1.050.309.623		811.150.000		120.065.900	41,67	14,80		120.065.900	3,92	0,92		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	765		10		72		30		41,67		30		3,92			
2898.	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			320.435.649		17.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		18		18		0		0,00		0		0,00			
2899.	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.773.106.208		69.498.875		143.380.700		975.000	0,00	0,68		975.000	0,00	0,05		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		4		4		0		0,00		0		0,00			
2900.	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.668.441.000		269.534.327		526.532.000		12.226.810	0,00	2,32		12.226.810	0,00	0,10		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		3		3		0		0,00		0		0,00			
2901.	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.600.247.500		251.342.940		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17		3		3		0		0,00		0		0,00			
2902.	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.051.666.000		837.128.607		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		30		30		0		0,00		0		0,00			
2903.	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			172.259.750		5.445.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	31		10		10		0		0,00		0		0,00			
2904.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.465.625.080		832.868.335		989.676.473		190.778.750	13,75	19,28		190.778.750	5,00	4,27		
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)																
2905.	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			880.262.180		209.530.167		176.673.573		49.787.081	25,00	28,18		49.787.081	5,00	5,66		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		2		2		0,5		25,00		0,5		5,00			
2906.	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.135.360.000		178.112.068		163.000.000		750.000	5,00	0,46		750.000	10,00	0,07		
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		20		20		1		5,00		1		10,00			
2907.	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			450.002.900		34.913.100		50.002.900		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	10		4		4		0		0,00		0		0,00			
2908.	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.000.000.000		410.313.000		600.000.000		140.241.669	25,00	23,37		140.241.669	5,00	7,01		
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		2		2		0,5		25,00		0,5		5,00			
2909.	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			14.420.402.808		1.180.454.922		1.266.995.900		101.014.500	0,00	7,97		101.014.500	0,00	0,70		
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)																
2910.	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			5.648.893.000		401.826.776		538.999.350		51.626.800	0,00	9,58		51.626.800	0,00	0,91		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5		3		3		0		0,00		0		0,00			
2911.	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			3.545.552.500		249.280.272		380.997.550		31.132.000	0,00	8,17		31.132.000	0,00	0,88		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
2912.	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			5.225.957.308		529.347.874		346.999.000		18.255.700	0,00	5,26		18.255.700	0,00	0,35		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
2913.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.974.939.649		139.097.680		200.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)																
2914.	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			373.521.361		26.156.940		100.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	20		5		5		0		0,00		0		0,00			
2915.	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			354.534.286		27.309.800		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2916.	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			431.117.820		24.819.500		30.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2917.	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			503.612.508		37.569.640		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2918.	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			312.153.674		23.241.800		25.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2919.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			12.431.714.700		1.374.553.205		1.230.147.900		138.754.756	8,33	11,28		138.754.756	1,67	1,12		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)																
2920.	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			9.924.192.200		1.200.275.759		1.230.147.900		138.754.756	25,00	11,28		138.754.756	5,00	1,40		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1800		360		360		90		25,00		90		5,00			
2921.	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.106.512.500		56.961.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1800		360		360		0		0,00		0		0,00			
2922.	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1.401.010.000		117.315.946		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1800		123		360		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2923.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**51.723.092.700**		**11.055.884.542**		**11.708.712.800**		**142.524.064**	**22,35**	**1,22**		**142.524.064**	**2,33**	**0,28**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100		103,32		100		1,22		1,22		1,22		1,22			
2924.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			986.289.586		118.056.118		151.378.900		7.544.000	13,89	4,98		7.544.000	2,78	0,76		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)																
2925.	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			201.436.648		25.976.200		25.356.800		1.000.000	25,00	3,94		1.000.000	5,00	0,50		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	20		4		4		1		25,00		1		5,00			
2926.	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			269.267.711		10.876.000		37.975.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	20		4		4		0		0,00		0		0,00			
2927.	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			515.585.227		81.203.918		88.046.600		6.544.000	16,67	7,43		6.544.000	3,33	1,27		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		16,67		1		3,33			
2928.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			48.121.993.349		10.617.165.759		11.290.314.800		99.994.900	25,00	0,89		99.994.900	5,00	0,21		
		Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)																
2929.	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			48.121.993.349		10.617.165.759		11.290.314.800		99.994.900	25,00	0,89		99.994.900	5,00	0,21		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2930.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.487.005.872		207.746.988		183.398.000		31.885.164	43,94	17,39		31.885.164	1,66	2,14		
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)																
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)																
2931.	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			588.931.212		118.497.410		80.417.000		20.687.005	131,82	25,72		20.687.005	4,97	3,51		
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1750		334		66		87		131,82		87		4,97			
2932.	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			831.775.566		80.638.684		94.730.000		11.198.159	0,00	11,82		11.198.159	0,00	1,35		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2933.	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			66.299.094		8.610.894		8.251.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	340		123		66		0		0,00		0		0,00			
2934.	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			1.127.803.893		112.915.677		83.621.100		3.100.000	8,33	3,71		3.100.000	1,67	0,27		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)																
2935.	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			561.964.116		94.912.350		66.695.900		2.600.000	25,00	3,90		2.600.000	5,00	0,46		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	80		16		16		4		25,00		4		5,00			
2936.	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			344.375.759		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	20		0		1		0		0,00		0		0,00			
2937.	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			221.464.018		18.003.327		16.925.200		500.000	0,00	2,95		500.000	0,00	0,23		
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	60		2		2		0		0,00		0		0,00			
2938.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**4.068.277.000**		**482.695.682**		**501.657.500**		**31.289.901**	**0,00**	**6,24**		**31.289.901**	**0,00**	**0,77**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian (%)	100		80,97		100		6,24		6,24		6,24		6,24			
2939.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			934.406.188		102.008.000		108.310.500		20.651.601	0,00	19,07		20.651.601	0,00	2,21		
		Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)																
2940.	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			173.981.511		22.925.000		16.838.900		3.444.501	0,00	20,46		3.444.501	0,00	1,98		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2941.	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			487.955.924		52.221.500		48.586.000		5.105.900	0,00	10,51		5.105.900	0,00	1,05		
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	20		1		1		0		0,00		0		0,00			
2942.	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			272.468.753		26.861.500		42.885.600		12.101.200	0,00	28,22		12.101.200	0,00	4,44		
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2943.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1.110.938.937		154.483.805		163.624.900		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)																
2944.	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			307.615.054		39.803.555		46.778.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2945.	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			386.275.530		55.477.600		69.093.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2946.	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			417.048.353		59.202.650		47.753.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2947.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.240.124.148		152.662.426		170.000.000		5.513.300	0,00	3,24		5.513.300	0,00	0,44		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)																
2948.	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			365.832.973		37.312.294		55.904.000		2.225.000	0,00	3,98		2.225.000	0,00	0,61		
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
2949.	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			312.633.425		38.892.267		44.396.300		3.288.300	0,00	7,41		3.288.300	0,00	1,05		
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2950.	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			561.657.750		76.457.865		69.699.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	500		52		100		0		0,00		0		0,00			
2951.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			782.807.727		73.541.451		59.722.100		5.125.000	0,00	8,58		5.125.000	0,00	0,65		
		Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)																
2952.	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			416.660.707		51.664.451		33.675.500		5.125.000	0,00	15,22		5.125.000	0,00	1,23		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	15		1		1		0		0,00		0		0,00			
2953.	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			214.996.642		21.877.000		26.046.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2954.	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			151.150.378		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**302.388.555.592**		**34.569.526.578**		**35.258.556.711**		**7.303.599.333**	**23,38**	**20,71**		**7.303.599.333**	**2,21**	**2,42**		
2955.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**205.962.486.692**		**22.181.600.831**		**20.601.229.111**		**4.906.793.361**	**40,70**	**23,82**		**4.906.793.361**	**3,37**	**2,38**	SEKRETARIAT DPRD	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		84,34		100		21,42		21,42		21,42		21,42			
2956.	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.224.034.000		33.150.000		36.837.100		12.924.000	42,86	35,08		12.924.000	8,57	1,06		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
2957.	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			174.862.000		4.888.000		5.441.200		4.308.000	100,00	79,17		4.308.000	20,00	2,46		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2958.	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			174.862.000		4.888.000		5.251.900		4.308.000	100,00	82,03		4.308.000	20,00	2,46		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2959.	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			174.862.000		4.726.000		5.228.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2960.	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			174.862.000		5.144.000		5.228.800		4.308.000	100,00	82,39		4.308.000	20,00	2,46		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
2961.	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			174.862.000		4.726.000		5.228.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2962.	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			174.862.000		4.888.000		5.228.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2963.	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			174.862.000		3.890.000		5.228.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
2964.	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.919.420.043		3.737.097.959		3.841.086.503		860.239.631	72,74	22,40		860.239.631	3,54	3,32		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
2965.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.498.078.323		2.961.727.389		3.800.730.903		855.931.631	400,00	22,52		855.931.631	2,95	4,89		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4200		432		31		124		400,00		124		2,95			
2966.	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			6.605.437.620		716.057.670		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2967.	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			808.528.000		40.509.900		18.754.900		-	9,21	0,00		-	1,84	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24000		17.776		4800		442		9,21		442		1,84			
2968.	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			311.916.000		4.679.000		5.278.300		4.308.000	100,00	81,62		4.308.000	20,00	1,38		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		1		100,00		1		20,00			
2969.	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			231.574.000		4.888.000		5.045.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
2970.	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			232.219.500		5.587.000		6.452.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	65		13		13		0		0,00		0		0,00			
2971.	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			231.666.600		3.649.000		4.823.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2972.	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.579.266.800		11.805.480		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
2973.	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.190.680.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
2974.	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.845.750.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40		0		8		0		0,00		0		0,00			
2975.	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1.542.836.000		11.805.480		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90		1		18		0		0,00		0		0,00			
2976.	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.010.249.819		1.188.436.034		504.839.448		38.067.617	50,00	7,54		38.067.617	3,90	0,13		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
2977.	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.385.355.719		843.224.950		82.867.048		6.183.500	100,00	7,46		6.183.500	2,86	0,03		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		1		1		1		100,00		1		2,86			
2978.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.976.271.600		32.466.700		32.939.400		4.539.400	100,00	13,78		4.539.400	6,67	0,15		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		1		1		1		100,00		1		6,67			
2979.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.145.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1500		0		30		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2980.	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.590.611.000		257.074.076		332.592.000		3.944.000	25,00	1,19		3.944.000	5,00	0,15		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2981.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.912.311.500		55.670.308		56.441.000		23.400.717	25,00	41,46		23.400.717	5,00	0,80		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
2982.	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.838.519.218		2.351.310.000		101.751.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
2983.	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.691.352.275		2.261.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7		3		3		0		0,00		0		0,00			
2984.	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.388.341.448		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
2985.	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.758.825.495		89.810.000		101.751.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2986.	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.703.429.000		614.318.550		617.800.000		85.525.990	16,67	13,84		85.525.990	3,33	1,11		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
2987.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			805.100.000		-		1.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
2988.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.787.199.000		170.348.551		120.000.000		2.725.990	25,00	2,27		2.725.990	5,00	0,15		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		24		24		6		25,00		6		5,00			
2989.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.111.130.000		443.969.999		496.800.000		82.800.000	25,00	16,67		82.800.000	5,00	1,62		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2990.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.297.592.690		763.586.346		443.942.000		32.715.359	3,13	7,37		32.715.359	1,56	0,08		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
2991.	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.265.222.200		296.495.717		288.410.000		32.715.359	12,50	11,34		32.715.359	6,25	0,62		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	32		8		16		2		12,50		2		6,25			
2992.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.284.795.000		100.816.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		14		14		0		0,00		0		0,00			
2993.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.911.375.490		356.408.629		145.616.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2994.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.836.200.000		9.865.500		9.916.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
2995.	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			69.056.958.364		13.233.755.462		14.929.972.560		3.861.820.764	133,33	25,87		3.861.820.764	1,90	5,59		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)																
2996.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			66.964.458.364		12.910.753.462		14.827.292.560		3.861.820.764	400,00	26,05		3.861.820.764	5,71	5,77		
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	2450		490		35		140		400,00		140		5,71			
2997.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.830.000.000		278.152.000		50.180.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	25		4		3		0		0,00		0		0,00			
2998.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			262.500.000		44.850.000		52.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	175		35		35		0		0,00		0		0,00			
2999.	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			6.333.016.758		248.141.000		125.000.500		15.500.000	6,25	12,40		15.500.000	1,25	0,24		
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)																
3000.	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			1.129.708.000		4.464.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	5		1		12		0		0,00		0		0,00			
3001.	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			443.206.000		4.796.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3002.	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.338.178.000		238.881.000		125.000.500		15.500.000	25,00	12,40		15.500.000	5,00	0,66		
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3003.	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			2.421.924.758		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0		0,00		0		0,00			
3004.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**96.426.068.900**		**12.387.925.747**		**14.657.327.600**		**2.396.805.972**	**5,09**	**16,35**		**2.396.805.972**	**0,99**	**2,49**	SEKRETARIAT DPRD	
		1. Meningkatnya kualitas persidangan kajian peraturan perundang-undangan, 2. meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100		91,77		100		11,99		11,99		11,99		11,99			
3005.	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			23.596.113.200		1.484.782.190		1.815.011.900		49.846.860	20,00	2,75		49.846.860	4,00	0,21		
		Persentase terselenggaranya kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3006.	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			67.496.000		467.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3007.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			22.682.983.200		1.448.195.290		1.800.008.900		48.896.860	0,00	2,72		48.896.860	0,00	0,22		
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	45		3		9		0		0,00		0		0,00			
3008.	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			332.759.000		346.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	25		5		12		0		0,00		0		0,00			
3009.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			318.825.000		26.942.800		15.003.000		950.000	100,00	6,33		950.000	20,00	0,30		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	15		4		3		3		100,00		3		20,00			
3010.	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			194.050.000		8.831.100		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3011.	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			866.115.300		59.493.500		89.300.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)																
3012.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			131.250.000		16.700.000		16.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
3013.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			147.000.000		11.200.000		16.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
3014.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			142.500.000		6.975.000		16.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3015.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			140.000.000		6.975.000		16.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3016.	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			123.500.000		3.425.000		3.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3017.	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			181.865.300		14.218.500		18.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3018.	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			594.283.600		28.482.716		1.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan penyelenggara pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)																
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)																
3019.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			289.153.000		24.831.716		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3020.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			30.168.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3021.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			42.776.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3022.	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			43.303.600		595.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3023.	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			42.848.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3024.	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			45.210.000		1.962.000		1.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3025.	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			51.792.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3026.	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			49.033.000		1.094.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3027.	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			8.901.972.600		1.171.458.349		1.314.491.400		7.016.978	5,56	0,53		7.016.978	0,95	0,08		
		Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)																
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)																
3028.	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			343.401.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3029.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			4.289.222.600		698.539.749		980.002.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3030.	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			730.914.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	10		0		24		0		0,00		0		0,00			
3031.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.148.750.000		229.080.600		231.709.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	480		96		8		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3032.	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			113.257.600		2.772.000		2.780.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3033.	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			65.494.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3034.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			2.210.933.000		241.066.000		100.000.000		7.016.978	33,33	7,02		7.016.978	6,67	0,32		
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	15		3		3		1		33,33		1		6,67			
3035.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			5.979.089.000		743.922.900		733.089.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terselenggaranya kegiatan penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)																
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)																
3036.	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			253.730.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
3037.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			233.000.000		18.429.100		33.079.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3038.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			5.492.359.000		725.493.800		700.010.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		2		3		0		0,00		0		0,00			
3039.	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			94.487.600		5.012.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terselenggaranya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)																
3040.	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			37.487.600		1.796.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3041.	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			57.000.000		3.216.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3042.	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			194.360.000		13.790.700		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)																
3043.	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			98.060.000		8.716.700		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3044.	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			96.300.000		5.074.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3045.	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			56.199.647.600		8.880.983.392		10.704.335.000		2.339.942.134	12,50	21,86		2.339.942.134	2,50	4,16		
		Persentase terselenggaranya kegiatan fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)																
3046.	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			51.079.916.800		7.383.780.857		9.504.287.000		2.151.534.886	25,00	22,64		2.151.534.886	5,00	4,21		
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3047.	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			54.820.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3048.	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			212.640.800		18.072.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	5		1		12		0		0,00		0		0,00			
3049.	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.852.270.000		1.479.130.535		1.200.048.000		188.407.248	25,00	15,70		188.407.248	5,00	3,88		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
	5.01	**PERENCANAAN**			**44.586.603.994**		**5.726.086.061**		**5.154.080.759**		**1.114.089.527**	**22,13**	**21,62**		**1.114.089.527**	**6,80**	**2,50**		
3050.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.746.111.985**		**5.407.622.320**		**5.032.355.260**		**1.101.732.338**	**21,38**	**21,89**		**1.101.732.338**	**10,08**	**3,17**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		11,64		11,64		11,64		11,64			
3051.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			944.181.000		72.859.478		15.189.000		-	39,29	0,00		-	8,57	0,00		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3052.	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			106.604.000		12.940.000		2.343.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		1		2		0		0,00		0		0,00			
3053.	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			81.702.000		4.510.000		2.343.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3054.	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			84.299.000		5.896.000		1.710.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3055.	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			67.324.000		3.212.000		2.343.000		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
3056.	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			67.581.000		183.000		2.397.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3057.	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			449.942.000		43.258.478		2.343.000		-	75,00	0,00		-	30,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		5		4		3		75,00		3		30,00			
3058.	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86.729.000		2.860.000		1.710.000		-	100,00	0,00		-	10,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		4		1		1		100,00		1		10,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3059.	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.414.819.347		4.312.642.080		4.445.942.709		1.043.639.173	6,25	23,47		1.043.639.173	0,87	4,87		
		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3060.	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.114.597.347		4.286.219.458		4.439.546.709		1.041.435.173	25,00	23,46		1.041.435.173	4,34	4,93		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	242		42		42		10,5		25,00		10,5		4,34			
3061.	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.116.000		9.467.622		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3062.	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			65.702.000		5.608.000		2.343.000		2.204.000	0,00	94,07		2.204.000	0,00	3,35		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3063.	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			65.702.000		5.798.000		2.343.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	80		12		12		0		0,00		0		0,00			
3064.	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			65.702.000		5.549.000		1.710.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3065.	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			102.860.000		12.022.000		1.710.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3066.	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			102.860.000		12.022.000		1.710.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3067.	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.752.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
3068.	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			305.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
3069.	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.447.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	166		0		0		0		0,00		0		0,00			
3070.	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.068.213.788		221.400.324		97.825.551		5.090.000	4,17	5,20		5.090.000	13,33	0,17		
		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)																
3071.	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			102.590.890		10.651.500		3.857.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		6		6		0		0,00		0		0,00			
3072.	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			255.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
3073.	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			106.030.000		10.575.000		3.721.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		2		2		0		0,00		0		0,00			
3074.	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			452.700.400		37.613.750		6.412.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0		0,00		0		0,00			
3075.	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			474.249.134		55.495.884		5.103.451		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3076.	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			80.400.000		4.800.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3077.	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			296.005.000		20.311.250		4.090.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3078.	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.070.508.499		81.952.940		74.641.000		5.090.000	25,00	6,82		5.090.000	120,00	0,48		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		24		24		6		25,00		6		120,00			
3079.	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			230.729.865		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3080.	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.695.465.000		11.456.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3081.	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.096.108.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		0,00		0		0,00			
3082.	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			674.941.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29		0		0		0		0,00		0		0,00			
3083.	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			924.416.000		11.456.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
3084.	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.241.947.000		310.689.683		227.947.000		28.778.565	12,50	12,63		28.778.565	30,00	1,28		
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3085.	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			468.947.000		68.289.683		83.947.000		16.942.565	25,00	20,18		16.942.565	60,00	3,61		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		12		12		3		25,00		3		60,00			
3086.	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.773.000.000		242.400.000		144.000.000		11.836.000	0,00	8,22		11.836.000	0,00	0,67		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3087.	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.526.125.850		466.552.755		243.741.000		24.224.600	47,22	9,94		24.224.600	26,04	0,96		
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3088.	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.461.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	15,63	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16		0		0		5		0,00		2,5		15,63			
3089.	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		225.472.591		236.700.000		23.790.600	41,67	10,05		23.790.600	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		12		12		5		41,67		2,5		0,00			
3090.	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			351.710.000		15.188.110		4.948.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		3		3		0		0,00		0		0,00			
3091.	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			712.715.850		225.892.054		2.093.000		434.000	100,00	20,74		434.000	62,50	0,06		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.8		1		1		1		100,00		0,5		62,50			
3092.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.374.909.731**		**126.892.836**		**40.786.600**		**6.235.000**	**50,00**	**15,29**		**6.235.000**	**3,87**	**0,18**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		25		100		25		25,00		25		25,00			
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		25		100		0		0,00		0		0,00			
3093.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.187.614.785		115.120.902		40.786.600		6.235.000	50,00	15,29		6.235.000	7,74	0,29		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)																
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)																
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)																
3094.	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			357.093.915		5.990.000		8.100.000		3.300.000	100,00	40,74		3.300.000	16,67	0,92		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1		100,00		1		16,67			
3095.	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			356.895.220		15.604.500		8.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	6		2		1		0		0,00		0		0,00			
3096.	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			236.002.200		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	10270		0		0		0		0,00		0		0,00			
3097.	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.237.623.450		93.526.402		24.486.600		2.935.000	50,00	11,99		2.935.000	14,29	0,24		
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	7		3		2		1		50,00		1		14,29			
3098.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			634.144.976		11.771.934		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)																
3099.	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			260.762.976		11.771.934		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3100.	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			373.382.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	377		0		0		0		0,00		0		0,00			
3101.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			553.149.970		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Persentase Target Kinerja Kegiatan PD yang Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)																
3102.	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			266.243.700		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3103.	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			286.906.270		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
3104.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**6.465.582.278**		**191.570.905**		**80.938.899**		**6.122.189**	**0,00**	**7,56**		**6.122.189**	**0,00**	**0,09**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan (%)	100		25		100		0		0,00		0		0,00			
3105.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.938.000.000		84.986.905		35.559.590		3.040.500	0,00	8,55		3.040.500	0,00	0,10		
		Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)																
3106.	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			625.000.000		19.130.347		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3107.	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			653.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3108.	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			545.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3109.	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.115.000.000		65.856.558		35.559.590		3.040.500	0,00	8,55		3.040.500	0,00	0,27		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3110.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1.655.978.000		52.370.716		16.619.215		544.500	0,00	3,28		544.500	0,00	0,03		
		Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)																
3111.	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			427.978.000		29.401.901		16.619.215		544.500	0,00	3,28		544.500	0,00	0,13		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3112.	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			387.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3113.	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			411.000.000		22.968.815		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3114.	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			430.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3115.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.871.604.278		54.213.284		28.760.094		2.537.189	0,00	8,82		2.537.189	0,00	0,14		
		Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)																
3116.	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			433.302.139		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3117.	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			517.500.000		26.725.400		28.760.094		2.537.189	0,00	8,82		2.537.189	0,00	0,49		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3118.	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			413.302.139		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3119.	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			507.500.000		27.487.884		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
	5.02	**KEUANGAN**			**1.008.164.528.246**		**193.661.271.293**		**311.715.472.360**		**1.194.253.154**	**14,86**	**0,38**		**1.194.253.154**	**6,12**	**0,12**		
3120.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**121.019.244.750**		**23.807.354.206**		**19.840.338.787**		**874.685.122**	**19,44**	**4,41**		**874.685.122**	**7,54**	**0,72**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		100		100		25		25,00		25		5,00			
3121.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			952.909.549		95.219.750		56.633.800		11.366.000	21,88	20,07		11.366.000	10,31	1,19		
		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)																
3122.	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			101.692.815		14.062.000		8.235.000		836.000	50,00	10,15		836.000	2,50	0,82		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		4		2		1		50,00		1		2,50			
3123.	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			97.532.958		12.509.250		8.644.000		7.186.000	100,00	83,13		7.186.000	20,00	7,37		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
3124.	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			102.612.200		15.152.000		7.854.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3125.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			95.044.243		12.190.000		8.281.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		3		0		0,00		0		0,00			
3126.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			107.981.449		15.383.500		8.434.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
3127.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			77.129.606		6.436.000		6.460.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		12		12		0		0,00		0		0,00			
3128.	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.051.435		19.487.000		8.725.000		3.344.000	25,00	38,33		3.344.000	60,00	2,96		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		12		12		3		25,00		3		60,00			
3129.	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			257.864.842		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3130.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			101.905.409.972		22.124.870.895		18.661.596.807		720.185.275	62,74	3,86		720.185.275	30,10	0,71		
		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3131.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			101.694.589.048		22.063.214.895		18.621.148.807		699.281.275	0,95	3,76		699.281.275	79,22	0,69		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	77		6.542		6425		61		0,95		61		79,22			
3132.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			77.129.606		18.637.000		13.433.900		9.004.000	100,00	67,02		9.004.000	20,00	11,67		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
3133.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			77.129.606		35.497.000		13.542.900		9.102.000	50,00	67,21		9.102.000	1,18	11,80		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	85		13		2		1		50,00		1		1,18			
3134.	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			56.561.711		7.522.000		13.471.200		2.798.000	100,00	20,77		2.798.000	20,00	4,95		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
3135.	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			466.006.798		29.162.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
3136.	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			325.229.840		22.222.200		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	355		77		100		0		0,00		0		0,00			
3137.	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			71.730.534		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250		0		105		0		0,00		0		0,00			
3138.	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			69.046.424		6.940.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250		95		95		0		0,00		0		0,00			
3139.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.044.782.995		220.827.191		226.873.200		23.068.153	16,25	10,17		23.068.153	3,75	1,13		
		Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3140.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			74.342.657		11.826.000		8.770.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		1		1		0		0,00		0		0,00			
3141.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			51.311.756		1.385.200		3.260.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3142.	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			41.135.790		3.850.000		5.700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3143.	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			267.382.635		51.652.000		25.988.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0		0,00		0		0,00			
3144.	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			149.117.239		19.971.500		12.709.000		1.000.000	100,00	7,87		1.000.000	20,00	0,67		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
3145.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.415.182		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		0		20		0		0,00		0		0,00			
3146.	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			401.073.953		41.026.500		19.500.000		1.185.000	25,00	6,08		1.185.000	5,00	0,30		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3147.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.049.003.783		91.115.991		150.946.000		20.883.153	5,00	13,83		20.883.153	5,00	1,99		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		65		60		3		5,00		3		5,00			
3148.	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.231.954.702		528.233.850		19.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3149.	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.721.786.316		60.578.300		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		3		9		0		0,00		0		0,00			
3150.	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			520.336.893		76.345.800		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		25		30		0		0,00		0		0,00			
3151.	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.447.239.366		391.309.750		19.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		16		7		0		0,00		0		0,00			
3152.	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.542.592.128		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0,00		0		0,00			
3153.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.032.462.766		411.596.331		430.464.980		84.554.300	16,67	19,64		84.554.300	3,33	2,10		
		Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3154.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			41.124.478		3.490.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3155.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			802.147.906		124.004.675		153.999.980		28.770.500	25,00	18,68		28.770.500	5,00	3,59		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3156.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.189.190.382		284.101.656		276.465.000		55.783.800	25,00	20,18		55.783.800	5,00	1,75		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3157.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.385.717.968		397.443.989		445.770.000		35.511.394	11,84	7,97		35.511.394	2,00	0,81		
		Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3158.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.833.613.189		364.711.074		442.750.000		35.211.394	32,65	7,95		35.211.394	5,33	1,24		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	300		37		49		16		32,65		16		5,33			
3159.	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			148.345.943		22.080.220		1.200.000		300.000	2,86	25,00		300.000	0,67	0,20		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		40		35		1		2,86		1		0,67			
3160.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.403.758.836		10.652.695		1.820.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3161.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**874.983.983.496**		**168.509.970.282**		**290.130.001.273**		**207.568.562**	**13,08**	**0,07**		**207.568.562**	**4,51**	**0,02**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	167		47		47		14		29,79		14		8,38			
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	182		22		22		5		22,73		5		2,75			
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1		3,3		2,80		3,2		114,29		3,2		320,00			
			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
			Persentase Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
3162.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			6.327.205.394		1.098.233.500		1.017.175.500		110.989.500	10,83	10,91		110.989.500	4,75	1,75		
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)																
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)																
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)																
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3163.	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			914.242.934		136.803.500		162.310.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		4		4		0		0,00		0		0,00			
3164.	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			939.953.317		136.721.000		165.478.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		4		4		0		0,00		0		0,00			
3165.	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			411.219.067		67.864.000		57.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43		4		43		0		0,00		0		0,00			
3166.	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			641.718.325		110.661.000		127.108.000		47.900.000	25,00	37,68		47.900.000	12,50	7,46		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43		43		43		10,75		25,00		5,375		12,50			
3167.	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			397.988.769		66.881.000		56.240.000		47.900.000	25,00	85,17		47.900.000	12,50	12,04		
		Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43		43		43		10,75		25,00		5,375		12,50			
3168.	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			730.201.409		127.748.000		111.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43		43		43		0		0,00		0		0,00			
3169.	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			874.136.053		191.929.400		137.576.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		6		6		0		0,00		0		0,00			
3170.	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.002.685.397		171.754.800		193.114.100		10.648.000	33,33	5,51		10.648.000	20,00	1,06		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		6		6		2		33,33		2		20,00			
3171.	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			358.498.410		87.870.800		6.448.500		4.541.500	25,00	70,43		4.541.500	2,50	1,27		
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	40		4		4		1		25,00		1		2,50			
3172.	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			56.561.711		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2		0		6		0		0,00		0		0,00			
3173.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2.118.688.583		263.625.100		177.220.900		38.571.471	19,14	21,76		38.571.471	7,24	1,82		
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)																
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)																
3174.	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			323.961.315		52.732.000		23.470.300		13.753.700	25,00	58,60		13.753.700	30,00	4,25		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	10		12		12		3		25,00		3		30,00			
3175.	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			113.112.110		8.643.000		4.461.600		3.047.000	25,00	68,29		3.047.000	5,00	2,69		
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	860		172		172		43		25,00		43		5,00			
3176.	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			215.962.384		39.510.000		37.140.000		7.005.000	25,00	18,86		7.005.000	15,00	3,24		
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	20		12		12		3		25,00		3		15,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3177.	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			144.335.203		7.396.000		11.737.000		7.664.771	25,00	65,30		7.664.771	0,75	5,31		
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	400		12		12		3		25,00		3		0,75			
3178.	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			215.860.058		37.111.000		18.731.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	3		3		2		0		0,00		0		0,00			
3179.	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			107.945.455		12.010.000		13.030.000		5.076.000	22,22	38,96		5.076.000	4,44	4,70		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	90		18		18		4		22,22		4		4,44			
3180.	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			108.007.159		19.570.000		7.431.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	9		9		9		0		0,00		0		0,00			
3181.	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			323.846.649		48.599.200		28.770.000		2.025.000	50,00	7,04		2.025.000	10,00	0,63		
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	430		86		86		43		50,00		43		10,00			
3182.	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			565.658.249		38.053.900		32.450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	4		8		8		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3183.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.581.269.798		204.741.612		119.104.400		23.222.580	14,21	19,50		23.222.580	3,17	0,90		
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)																
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)															
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)																
3184.	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			161.972.173		15.151.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3185.	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			411.356.872		13.259.900		7.711.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		4		0		0,00		0		0,00			
3186.	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			221.104.872		39.301.000		63.610.000		17.498.580	66,15	27,51		17.498.580	20,00	7,91		
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	215		65		65		43		66,15		43		20,00			
3187.	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			403.644.940		48.765.800		25.799.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		2		2		0		0,00		0		0,00			
3188.	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			411.357.901		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	8		0		4		0		0,00		0		0,00			
3189.	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			251.956.714		8.310.000		21.983.000		5.724.000	33,33	26,04		5.724.000	2,20	2,27		
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	910		60		60		20		33,33		20		2,20			
3190.	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			719.876.326		79.953.912		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	172		50		50		0		0,00		0		0,00			
3191.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			862.282.932.434		166.768.871.020		288.809.100.473		34.785.011	8,44	0,01		34.785.011	1,69	0,00		
		Meningkatnya pengelolaan bantuan keuangan dan dana desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)																
3192.	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			823.203.931.870		163.446.958.300		139.933.209.200		34.785.011	25,32	0,02		34.785.011	5,06	0,00		
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	395		316		79		20		25,32		20		5,06			
3193.	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			8.227.158.013		2.014.831.585		141.289.370.950		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3194.	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			30.851.842.551		1.307.081.135		7.586.520.323		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	79		79		79		0		0,00		0		0,00			
3195.	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			1.673.887.285		174.499.050		7.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya pengelolaan data dan implementasi SIPD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)																
3196.	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			969.827.671		107.482.050		7.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3197.	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			704.059.615		67.017.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	86		12		129		0		0,00		0		0,00			
3198.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3.902.483.800**		**375.892.189**		**321.045.000**		**24.661.000**	**11,36**	**7,68**		**24.661.000**	**3,64**	**0,63**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya tata kelola aset milik daerah	Persentase pertambahan Aset Tetap (%)	437,5		87,5		87,5		20		22,86		20		4,57			
3199.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.902.483.800		375.892.189		321.045.000		24.661.000	11,36	7,68		24.661.000	3,64	0,63		
		Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, hukum dan fisik	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)																
3200.	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			370.227.767		59.261.900		21.650.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		55		1		0		0,00		0		0,00			
3201.	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			154.261.270		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		2		0		0,00		0		0,00			
3202.	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			241.672.767		29.245.500		15.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		55		2		0		0,00		0		0,00			
3203.	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			566.182.731		18.355.000		38.707.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3204.	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			128.550.372		-		50.000.000		3.552.000	25,00	7,10		3.552.000	5,00	2,76		
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	60		0		12		3		25,00		3		5,00			
3205.	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.153.513.669		128.643.000		135.013.900		11.485.000	25,00	8,51		11.485.000	5,00	1,00		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	60		45		12		3		25,00		3		5,00			
3206.	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			154.259.213		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
3207.	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			136.262.305		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12		0		12		0		0,00		0		0,00			
3208.	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			102.839.989		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3209.	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			329.096.604		52.923.789		26.124.000		3.552.000	25,00	13,60		3.552.000	10,00	1,08		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	10		20		4		1		25,00		1		10,00			
3210.	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			565.617.113		87.463.000		34.150.100		6.072.000	50,00	17,78		6.072.000	20,00	1,07		
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5		20		2		1		50,00		1		20,00			
3211.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**8.258.816.200**		**968.054.616**		**1.424.087.300**		**87.338.470**	**10,43**	**6,13**		**87.338.470**	**8,30**	**1,06**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1. Meningkatnya upaya ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan, 2. meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase devisiasi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD (%)	1,25		0,19		0,21		0,04		19,05		0,04		3,20			
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	1,25		0,19		0,21		0,04		19,05		0,04		3,20			
			Jumlah potensi pendapatan baru yang berhasil diidentifikasi dan dikembangkan (%)	1,25		0,19		0,21		0,04		19,05		0,04		3,20			
3212.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			8.258.816.200		968.054.616		1.424.087.300		87.338.470	10,43	6,13		87.338.470	8,30	1,06		
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)																
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)																
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)																
3213.	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			215.962.898		22.693.000		38.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2		2		9		0		0,00		0		0,00			
3214.	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			719.876.326		32.171.100		242.638.000		2.750.000	0,00	1,13		2.750.000	0,00	0,38		
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		4		0		0,00		0		0,00			
3215.	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			822.715.801		77.063.565		57.300.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4		4		12		0		0,00		0		0,00			
3216.	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			71.987.633		3.750.400		13.015.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	40		40		40		0		0,00		0		0,00			
3217.	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			462.780.209		132.378.624		50.000.100		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5		5		50		0		0,00		0		0,00			
3218.	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			493.629.481		28.105.303		135.001.000		7.901.965	25,00	5,85		7.901.965	5,00	1,60		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	40		8		8		2		25,00		2		5,00			
3219.	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			185.111.055		16.161.600		74.017.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
		Meningkatnya penerapan Sistem Informasi keuangan berbasis digital	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)																
3220.	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1.799.690.815		220.210.900		349.192.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4		2		12		0		0,00		0		0,00			
3221.	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			241.673.795		8.356.600		20.000.200		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
3222.	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			381.280.522		30.104.700		134.900.200		35.487.921	20,00	26,31		35.487.921	10,00	9,31		
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	20		12		10		2		20,00		2		10,00			
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)																
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)																
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)																
3223.	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			421.642.362		27.084.000		65.020.000		9.681.584	25,00	14,89		9.681.584	0,40	2,30		
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	750		45		12		3		25,00		3		0,40			
3224.	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			848.432.869		128.149.264		50.000.000		15.874.000	27,27	31,75		15.874.000	0,60	1,87		
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	500		100		11		3		27,27		3		0,60			
3225.	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			617.036.851		30.912.000		24.992.000		8.198.000	25,00	32,80		8.198.000	0,24	1,33		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1250		250		12		3		25,00		3		0,24			
3226.	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			976.995.582		210.913.560		170.010.000		7.445.000	13,33	4,38		7.445.000	100,00	0,76		
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	20		3		150		20		13,33		20		100,00			
	5.03	**KEPEGAWAIAN**			**40.372.440.179**		**5.532.823.912**		**5.580.815.429**		**428.917.928**	**15,57**	**7,69**		**428.917.928**	**2,62**	**1,06**		
3227.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**35.262.440.179**		**5.217.348.691**		**5.441.398.429**		**428.917.928**	**12,50**	**7,88**		**428.917.928**	**1,82**	**1,22**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		100		100		25		25,00		25		5,00			
3228.	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			235.000.000		-		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
3229.	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3230.	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			45.000.000		-		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	40		8		8		0		0,00		0		0,00			
3231.	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3232.	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.262.383.863		4.870.160.635		5.183.838.129		428.917.928	0,00	8,27		428.917.928	0,00	1,84		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																
3233.	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.142.383.863		4.870.160.635		5.183.838.129		428.917.928	0,00	8,27		428.917.928	0,00	1,85		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		100		60		0		0,00		0		0,00			
3234.	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3235.	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3236.	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3237.	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
3238.	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3239.	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.915.800.179		119.126.973		116.020.300		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3240.	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			85.000.000		7.884.500		6.005.300		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		20		12		3		25,00		3		5,00			
3241.	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			315.000.000		21.200.010		25.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		50		12		3		25,00		3		5,00			
3242.	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			315.000.000		26.954.826		25.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		10		12		3		25,00		3		5,00			
3243.	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			65.000.000		-		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		3		25,00		3		5,00			
3244.	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			210.000.000		18.881.625		15.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		4.000		12		3		25,00		3		5,00			
3245.	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			925.800.179		44.206.012		45.015.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1000		200		200		50		25,00		50		5,00			
3246.	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.534.256.137		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3247.	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
3248.	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.046.651.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0		0,00		0		0,00			
3249.	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.487.605.137		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		15		0		0,00		0		0,00			
3250.	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.500.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3251.	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			825.000.000		136.077.079		33.800.000		-	16,67	0,00		-	3,33	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3252.	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			65.000.000		3.000.000		2.500.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		160		12		3		25,00		3		5,00			
3253.	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			110.000.000		25.877.079		2.500.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3254.	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			650.000.000		107.200.000		28.800.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72		28		72		0		0,00		0		0,00			
3255.	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.355.000.000		91.984.004		97.740.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai AKIP dan IKM BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
3256.	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.200.000.000		91.984.004		87.450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23		23		23		0		0,00		0		0,00			
3257.	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			155.000.000		-		10.290.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		92		50		0		0,00		0		0,00			
3258.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**5.110.000.000**		**315.475.221**		**139.417.000**		**-**	**18,65**	**0,00**		**-**	**3,73**	**0,00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, 2. Meningkatnya pengembangan potensi ASN , 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	85		75,72		78		0		0,00		0		0,00			
			Indeks sistem merit ()	300		234,5		260		0		0,00		0		0,00			
3259.	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.235.000.000		19.744.761		26.867.000		-	16,67	0,00		-	3,33	0,00		
		Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)																
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)																
3260.	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			125.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3261.	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			390.000.000		13.106.800		10.365.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	50000		10.000		10000		2.500		25,00		2.500		5,00			
3262.	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			225.000.000		6.637.961		6.502.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1000		200		200		50		25,00		50		5,00			
3263.	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			215.000.000		-		10.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3264.	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			155.000.000		-		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	35000		6.500		7000		1.750		25,00		1.750		5,00			
3265.	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			125.000.000		-		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	35000		12		7000		1.750		25,00		1.750		5,00			
3266.	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			2.375.000.000		232.335.960		57.501.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)																
3267.	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			1.950.000.000		1.105.000		50.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2500		200		500		125		25,00		125		5,00			
3268.	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			310.000.000		7.606.800		7.501.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	7500		1.500		1500		375		25,00		375		5,00			
3269.	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			115.000.000		223.624.160		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2000		400		400		100		25,00		100		5,00			
3270.	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			680.000.000		53.814.500		45.049.000		-	33,33	0,00		-	6,67	0,00		
		Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)																
3271.	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			680.000.000		53.814.500		45.049.000		-	33,33	0,00		-	6,67	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	750		700		150		50		33,33		50		6,67			
3272.	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			820.000.000		9.580.000		10.000.000		-	15,00	0,00		-	3,00	0,00		
		Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)																
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)																
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)																
3273.	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			135.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			
3274.	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			155.000.000		4.940.000		5.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	35000		6.500		7000		1.750		25,00		1.750		5,00			
3275.	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	300		300		300		0		0,00		0		0,00			
3276.	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			145.000.000		4.640.000		5.000.000		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	35000		24		7000		1.750		25,00		1.750		5,00			
3277.	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			155.000.000		-		-		-	20,00	0,00		-	4,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	250		50		50		10		20,00		10		4,00			
3278.	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			115.000.000		-		-		-	20,00	0,00		-	4,00	0,00		
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	250		50		50		10		20,00		10		4,00			
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**14.050.000.000**		**-**		**1.078.025.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**		
3279.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**14.050.000.000**		**-**		**1.078.025.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar , kader, manajerial, dan fungsional, 2. meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, 3. Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi, 4. meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	43		26,44		32		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3280.	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			14.050.000.000		-		1.078.025.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)																
3281.	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			14.050.000.000		-		1.078.025.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	300		0		272		0		0,00		0		0,00			
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**3.360.485.795**		**23.929.650**		**13.973.050**		**1.551.000**	**0,00**	**11,10**		**1.551.000**	**0,00**	**0,05**		
3282.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**2.851.885.795**		**23.929.650**		**13.973.050**		**1.551.000**	**0,00**	**11,10**		**1.551.000**	**0,00**	**0,05**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	18		13,21		10		0		0,00		0		0,00			
3283.	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			561.299.000		23.929.650		13.973.050		1.551.000	0,00	11,10		1.551.000	0,00	0,28		
		Terpenuhinya Laporan Data Kajian/Penelitian/Kelitbangan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)																
3284.	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			561.299.000		23.929.650		13.973.050		1.551.000	0,00	11,10		1.551.000	0,00	0,28		
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3285.	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			449.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)																
3286.	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			449.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3287.	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			709.686.795		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengambangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)																
3288.	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			709.686.795		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3289.	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.131.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)																
3290.	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			602.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3291.	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			529.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3292.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**508.600.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
3293.	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			508.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)																
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)																
3294.	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			254.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3295.	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi			254.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**97.377.791.885**		**11.862.048.578**		**13.096.320.729**		**2.470.669.532**	**17,53**	**18,87**		**2.470.669.532**	**14,05**	**2,54**		
3296.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**86.181.980.201**		**9.927.326.047**		**10.906.444.104**		**2.196.817.532**	**11,61**	**20,14**		**2.196.817.532**	**7,56**	**2,55**	INSPEKTORAT	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		85		100		20,14		20,14		20,14		20,14			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3297.	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.686.561.000		52.937.600		71.412.000		11.056.000	25,00	15,48		11.056.000	25,00	0,66		
		Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3298.	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			211.014.000		10.817.500		10.996.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3299.	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			166.599.000		602.100		6.599.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3300.	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			206.392.000		6.295.000		6.392.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3301.	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			206.466.000		-		6.466.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3302.	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			196.000.000		8.091.000		6.000.000		2.640.000	25,00	44,00		2.640.000	25,00	1,35		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		5		4		1		25,00		1		25,00			
3303.	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			213.214.000		12.190.000		13.214.000		2.640.000	100,00	19,98		2.640.000	100,00	1,24		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		1		1		100,00		1		100,00			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
3304.	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			486.876.000		14.942.000		21.745.000		5.776.000	50,00	26,56		5.776.000	50,00	1,19		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		1		50,00		1		50,00			
3305.	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			41.013.900.426		8.250.003.717		8.865.749.559		2.133.078.643	0,00	24,06		2.133.078.643	0,00	5,20		
		Terlaksanya Penyerapan Anggaran Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
3306.	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40.826.515.426		8.227.319.717		8.828.272.559		2.118.571.643	0,00	24,00		2.118.571.643	0,00	5,19		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89		86		89		0		0,00		0		0,00			
		Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3307.	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			29.990.000		8.624.000		5.998.000		1.840.000	0,00	30,68		1.840.000	0,00	6,14		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
3308.	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			35.000.000		-		7.000.000		3.000.000	0,00	42,86		3.000.000	0,00	8,57		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3309.	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			39.940.000		2.652.000		7.988.000		7.840.000	0,00	98,15		7.840.000	0,00	19,63		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3310.	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			27.455.000		3.800.000		5.491.000		1.827.000	0,00	33,27		1.827.000	0,00	6,65		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3311.	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000		7.608.000		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		18		18		0		0,00		0		0,00			
3312.	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			30.000.000		-		6.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		2		0		0,00		0		0,00			
3313.	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.726.450.000		378.757.712		846.600.560		4.656.000	0,00	0,55		4.656.000	0,00	0,02		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
3314.	6.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3315.	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			460.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	89		0		0		0		0,00		0		0,00			
3316.	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			426.450.000		-		26.520.000		4.656.000	0,00	17,56		4.656.000	0,00	1,09		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		3		0		0,00		0		0,00			
3317.	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			8.120.000.000		-		119.882.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		100		0		0,00		0		0,00			
		Terpenuhinya APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120 Jam/Tahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
3318.	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.615.000.000		376.857.712		615.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	89		60		61		0		0,00		0		0,00			
3319.	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8.085.000.000		1.900.000		85.198.560		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	89		60		60		0		0,00		0		0,00			
3320.	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.627.868.375		467.712.440		496.632.375		19.805.900	1,04	3,99		19.805.900	1,04	0,43		
		Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3321.	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.640.000		16.202.100		11.128.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		0		0,00		0		0,00			
3322.	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			126.525.000		25.306.850		25.305.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3323.	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			647.704.000		164.998.341		187.704.000		16.861.400	0,00	8,98		16.861.400	0,00	2,60		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
		Meningkatnya Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
3324.	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.690.109.375		192.202.888		190.109.375		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		30		0		0,00		0		0,00			
3325.	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			304.000.000		4.216.000		4.000.000		470.500	0,00	11,76		470.500	0,00	0,15		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25		25		25		0		0,00		0		0,00			
3326.	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			156.890.000		35.984.161		31.386.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35		35		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3327.	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			202.000.000		-		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		5		0		0,00		0		0,00			
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
3328.	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			445.000.000		28.802.100		45.000.000		2.474.000	8,33	5,50		2.474.000	8,33	0,56		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		1		8,33		1		8,33			
3329.	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.240.000.000		195.679.690		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3330.	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3331.	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			800.000.000		154.599.690		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		22		0		0		0,00		0		0,00			
3332.	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3333.	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			440.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3334.	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		41.080.000		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		1		1		0		0,00		0		0,00			
3335.	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.549.520.000		267.361.646		273.348.170		3.000.043	0,00	1,10		3.000.043	0,00	0,19		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3336.	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			201.020.000		1.006.000		1.020.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1.800		1800		0		0,00		0		0,00			
3337.	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			172.500.000		41.813.190		37.128.170		3.000.043	0,00	8,08		3.000.043	0,00	1,74		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3338.	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.176.000.000		224.542.456		235.200.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3339.	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.337.680.400		314.873.242		312.701.440		25.220.946	52,88	8,07		25.220.946	27,88	0,76		
		Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3340.	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.567.850.000		161.866.678		217.850.000		24.815.696	11,54	11,39		24.815.696	11,54	1,58		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	26		26		26		3		11,54		3		11,54			
3341.	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			102.822.000		-		9.531.440		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		0		20		0		0,00		0		0,00			
3342.	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.028.720.000		145.170.200		78.720.000		70.250	100,00	0,09		70.250	100,00	0,01		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		100,00		1		100,00			
3343.	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			638.288.400		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3344.	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		7.836.364		6.600.000		335.000	100,00	5,08		335.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		100,00		1		0,00			
3345.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**8.880.011.684**		**1.710.346.325**		**1.744.032.125**		**228.772.000**	**18,21**	**13,12**		**228.772.000**	**18,21**	**2,58**	INSPEKTORAT	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau proses dan kewenangan	Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%)	86		72,71		85,5		72,71		85,04		72,71		84,55			
			Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	86		85,09		85,5		0		0,00		0		0,00			
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			
3346.	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			7.460.225.744		1.488.781.325		1.539.032.225		203.872.000	21,27	13,25		203.872.000	21,27	2,73		
		Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)																
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)																
3347.	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			805.000.000		63.000.000		300.000.000		6.300.000	25,00	2,10		6.300.000	25,00	0,78		
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4		4		4		1		25,00		1		25,00			
3348.	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.750.000.000		527.550.000		300.000.000		35.850.000	15,00	11,95		35.850.000	15,00	2,05		
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	20		20		20		3		15,00		3		15,00			
3349.	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			1.508.804.144		379.350.000		334.114.225		43.950.000	13,91	13,15		43.950.000	13,91	2,91		
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	115		115		115		16		13,91		16		13,91			
3350.	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			104.080.600		21.600.000		19.950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3351.	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			1.400.000.000		204.450.000		300.000.000		66.900.000	45,00	22,30		66.900.000	45,00	4,78		
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20		20		20		9		45,00		9		45,00			
3352.	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			1.450.000.000		89.922.425		200.000.000		19.050.000	25,00	9,53		19.050.000	25,00	1,31		
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	4		4		4		1		25,00		1		25,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyelesaian TLHP Internal dan Eksternal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)																
3353.	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			442.341.000		202.908.900		84.968.000		31.822.000	25,00	37,45		31.822.000	25,00	7,19		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4		4		4		1		25,00		1		25,00			
3354.	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			1.419.785.940		221.565.000		204.999.900		24.900.000	7,50	12,15		24.900.000	7,50	1,75		
		Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)																
3355.	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			910.706.500		221.565.000		174.999.900		24.900.000	15,00	14,23		24.900.000	15,00	2,73		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	40		40		40		6		15,00		6		15,00			
		Terlaksananya penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)																
3356.	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			509.079.440		-		30.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4		0		4		0		0,00		0		0,00			
3357.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**2.315.800.000**		**224.376.206**		**445.844.500**		**45.080.000**	**50,00**	**10,11**		**45.080.000**	**50,00**	**1,95**	INSPEKTORAT	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	4		2		3		2		66,67		2		50,00			
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	4		3		3		2		66,67		2		50,00			
3358.	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			884.688.100		73.950.000		171.002.500		3.680.000	50,00	2,15		3.680.000	50,00	0,42		
		Meningkatnya Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)																
3359.	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			780.605.500		73.950.000		151.002.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1		2		1		0		0,00		0		0,00			
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)																
3360.	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			104.082.600		-		20.000.000		3.680.000	100,00	18,40		3.680.000	100,00	3,54		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1		0		1		1		100,00		1		100,00			
3361.	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			1.431.111.900		150.426.206		274.842.000		41.400.000	50,00	15,06		41.400.000	50,00	2,89		
		Meningkatnya Nilai MCP KPK	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3362.	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			260.201.400		79.926.206		50.122.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)																
3363.	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			650.505.000		51.150.000		124.950.000		30.900.000	100,00	24,73		30.900.000	100,00	4,75		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	43		43		43		43		100,00		43		100,00			
3364.	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			390.305.500		15.300.000		74.870.000		10.500.000	100,00	14,02		10.500.000	100,00	2,69		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	43		43		43		43		100,00		43		100,00			
		Meningkatnya Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)																
3365.	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			130.100.000		4.050.000		24.900.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
	7.01	**KECAMATAN**			**177.239.463.110**		**21.155.727.979**		**22.975.076.891**		**4.542.835.214**	**9,22**	**19,77**		**4.542.835.214**	**12,96**	**2,56**		
3366.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.402.968.855**		**1.107.675.794**		**1.337.925.668**		**246.217.026**	**37,50**	**18,40**		**246.217.026**	**9,77**	**3,85**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
3367.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.924.800		1.342.000		-		-	50,00	0,00		-	10,00	0,00		
		Persentase Penyusunan Laporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
3368.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.924.800		1.342.000		-		-	50,00	0,00		-	10,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		50,00		1		10,00			
3369.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.314.461.555		969.651.201		1.227.016.268		235.247.380	25,00	19,17		235.247.380	25,00	4,43		
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3370.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.314.461.555		969.651.201		1.227.016.268		235.247.380	25,00	19,17		235.247.380	25,00	4,43		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
3371.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			604.448.000		50.884.684		42.102.400		3.422.500	0,00	8,13		3.422.500	6,60	0,57		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3372.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.211.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		0		1		0,00		1		25,00			
3373.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000.000		11.355.584		-		-	0,00	0,00		-	8,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		0		2		0,00		2		8,00			
3374.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			56.700.000		10.412.000		6.727.900		1.887.500	0,00	28,05		1.887.500	0,00	3,33		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		40		0		0		0,00		0		0,00			
3375.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.862.000		3.712.100		2.309.500		710.000	0,00	30,74		710.000	0,00	3,57		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3376.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			377.675.000		25.405.000		33.065.000		825.000	0,00	2,50		825.000	0,00	0,22		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3377.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.684.500		20.165.009		3.277.000		597.146	0,00	18,22		597.146	5,00	0,57		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3378.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.000.000		1.925.009		2.574.000		597.146	0,00	23,20		597.146	5,00	2,39		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		3		0,00		3		5,00			
3379.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			80.684.500		18.240.000		703.000		-	0,00	0,00		-	5,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		3		0,00		3		5,00			
3380.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365.450.000		65.632.900		65.530.000		6.950.000	0,00	10,61		6.950.000	14,72	1,90		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
3381.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			342.450.000		63.282.900		64.350.000		6.950.000	0,00	10,80		6.950.000	4,44	2,03		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		0		2		0,00		2		4,44			
3382.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.000.000		2.350.000		1.180.000		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		10		0		10		0,00		10		25,00			
3383.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**652.929.744**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	85		85		81		15		18,52		15		17,65			
			Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (Nilai)	68		68		66		15		22,73		15		22,06			
3384.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			652.929.744		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3385.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			652.929.744		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36		0		0		0		0,00		0		0,00			
3386.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**562.082.200**		**13.500.000**		**1.125.000**		**-**	**12,50**	**0,00**		**-**	**1.250,00**	**0,00**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
		Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	78		75		76		16		21,05		16		20,51			
3387.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		-		1.125.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
3388.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-		-		1.125.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3389.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			386.757.200		13.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)																
3390.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			36.657.200		13.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3391.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			350.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3392.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			175.325.000		-		-		-	12,50	0,00		-	2.500,00	0,00		
		Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)																
3393.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			87.000.000		-		-		-	12,50	0,00		-	5.000,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		2000		250		12,50		250		5.000,00			
3394.	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			88.325.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3395.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**567.168.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	77		308		0		17		0,00		17		22,08			
3396.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			567.168.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Peningkatan Koordinasi Trantib	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3397.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			283.584.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3398.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			283.584.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
3399.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**620.248.000**		**27.375.000**		**31.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**11,11**	**0,00**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	80		80		80		15		18,75		15		18,75			
3400.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			620.248.000		27.375.000		31.000.000		-	0,00	0,00		-	11,11	0,00		
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3401.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			242.624.000		-		14.500.000		-	0,00	0,00		-	10,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	400		200		0		40		0,00		40		10,00			
3402.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			242.624.000		-		-		-	0,00	0,00		-	10,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	400		160		0		40		0,00		40		10,00			
3403.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			135.000.000		27.375.000		16.500.000		-	0,00	0,00		-	13,33	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	15		3		0		2		0,00		2		13,33			
3404.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**707.944.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**25,00**	**0,00**	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	78		78		0		18		0,00		18		23,08			
3405.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			707.944.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)																
3406.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3407.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3408.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3409.	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3410.	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3411.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3412.	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3413.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			88.493.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	12		0		0		3		0,00		3		25,00			
3414.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.646.458.071**		**1.412.240.516**		**1.470.199.869**		**308.120.219**	**0,00**	**20,96**		**308.120.219**	**0,00**	**4,03**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		97		100		30		30,00		30		30,00			
3415.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			79.884.000		16.810.000		5.915.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3416.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.314.000		3.512.000		1.634.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3417.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.314.000		-		1.112.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3418.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.314.000		1.180.000		449.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3419.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.314.000		1.970.000		438.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3420.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			12.314.000		1.940.000		1.130.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3421.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.314.000		8.208.000		1.152.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3422.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3423.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.837.699.980		1.301.892.091		1.382.839.869		308.120.219	0,00	22,28		308.120.219	0,00	4,51		
		dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
3424.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.771.535.980		1.295.192.091		1.382.109.869		308.120.219	0,00	22,29		308.120.219	0,00	4,55		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		15		15		0		0,00		0		0,00			
3425.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			49.000.000		6.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		3		12		0		0,00		0		0,00			
3426.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.664.000		-		730.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		3		0		0,00		0		0,00			
3427.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3428.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49.000.000		6.620.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3429.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			49.000.000		6.620.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		2		3		0		0,00		0		0,00			
3430.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
3431.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3432.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			321.900.000		15.394.100		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3433.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.900.000		4.340.100		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
3434.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.000.000		3.180.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0,00		0		0,00			
3435.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			301.000.000		7.874.000		5.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		1		0		0,00		0		0,00			
3436.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
3437.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3438.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.750.000		2.045.825		3.135.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
3439.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.750.000		2.045.825		3.135.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		0		0,00		0		0,00			
3440.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333.224.091		69.478.500		73.310.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		dokumen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3441.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			301.294.091		68.748.500		71.850.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		3		10		0		0,00		0		0,00			
3442.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.930.000		730.000		1.460.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		4		1		0		0,00		0		0,00			
3443.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3444.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**644.591.815**		**36.000.000**		**29.044.000**		**-**	**25,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	93		90,1		91		25		27,47		25		26,88			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68		63		65		15		23,08		15		22,06			
3445.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		29.044.000		-	25,00	0,00		-	0,00	0,00		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3446.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		29.044.000		-	25,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		12		3		25,00		3		0,00			
3447.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			644.591.815		36.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3448.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			644.591.815		36.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		3		0		0		0,00		0		0,00			
3449.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**697.647.800**		**7.736.000**		**2.261.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	70		62		60		15		25,00		15		21,43			
3450.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			672.647.800		7.736.000		1.011.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3451.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			39.330.900		2.216.000		646.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		5		5		0		0,00		0		0,00			
3452.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			633.316.900		5.520.000		365.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		3		1		0		0,00		0		0,00			
3453.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			25.000.000		-		1.250.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)																
3454.	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			25.000.000		-		1.250.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	1		0		5		0		0,00		0		0,00			
3455.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**400.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	90		0		0		0		0,00		0		0,00			
3456.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		dokumen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3457.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	90		0		0		0		0,00		0		0,00			
3458.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	90		0		0		0		0,00		0		0,00			
3459.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**538.000.000**		**27.500.000**		**24.000.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	70		63		60		15		25,00		15		21,43			
3460.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			538.000.000		27.500.000		24.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3461.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			538.000.000		27.500.000		24.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		3		12		0		0,00		0		0,00			
3462.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**510.000.000**		**5.000.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	75		65		0		0		0,00		0		0,00			
3463.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			510.000.000		5.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
3464.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			510.000.000		5.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	75		5		0		0		0,00		0		0,00			
3465.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.273.567.589**		**1.631.303.755**		**1.717.977.438**		**365.376.254**	**5,80**	**21,27**		**365.376.254**	**4,81**	**3,56**	KECAMATAN SULIKI	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3466.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			320.717.275		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen/laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
3467.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
3468.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			43.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
3469.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3470.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			51.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3471.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3472.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			73.717.275		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
3473.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.968.150.314		1.482.568.893		1.637.591.438		354.351.769	0,00	21,64		354.351.769	0,00	5,94		
		dokumen/laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3474.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.786.445.992		1.482.568.893		1.637.591.438		354.351.769	0,00	21,64		354.351.769	0,00	6,12		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		15		15		0		0,00		0		0,00			
3475.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.704.323		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	70		0		0		0		0,00		0		0,00			
3476.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3477.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3478.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			68.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3479.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			68.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3480.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			145.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3481.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			79.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3482.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			66.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3483.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.064.000.000		53.129.500		19.238.400		936.000	0,00	4,87		936.000	10,83	0,09		
		dokumen/laporan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3484.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			90.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3485.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			540.000.000		24.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		1		0		0,00		0		0,00			
3486.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000		7.100.000		5.502.400		500.000	0,00	9,09		500.000	5,00	0,25		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		0		3		0,00		3		5,00			
3487.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			98.000.000		2.074.500		836.000		436.000	0,00	52,15		436.000	60,00	0,44		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		0		3		0,00		3		60,00			
3488.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3489.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			76.000.000		19.455.000		12.900.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		150		1000		0		0,00		0		0,00			
3490.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			939.700.000		36.272.862		3.832.600		419.485	12,50	10,95		419.485	1,25	0,04		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3491.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			85.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3492.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.600.000		2.072.862		3.000.000		419.485	25,00	13,98		419.485	5,00	0,55		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3493.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			279.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3494.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			500.100.000		34.200.000		832.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3495.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.768.000.000		59.332.500		57.315.000		9.669.000	7,14	16,87		9.669.000	15,00	0,55		
		Dokumen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3496.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			495.000.000		57.932.500		57.315.000		9.669.000	21,43	16,87		9.669.000	60,00	1,95		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		44		14		3		21,43		3		60,00			
3497.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			411.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3498.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			181.000.000		1.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		5		20		0		0,00		0		0,00			
3499.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			681.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3500.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**832.000.000**		**-**		**30.174.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SULIKI	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95		0		66		0		0,00		0		0,00			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68		0		83		0		0,00		0		0,00			
3501.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			524.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3502.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			286.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3503.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			238.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3504.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			308.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3505.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			308.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3506.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			-		-		30.174.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
3507.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-		-		30.174.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3508.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**886.500.000**		**1.610.000**		**4.540.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SULIKI	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	67		0		65		0		0,00		0		0,00			
3509.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			646.500.000		890.000		3.490.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3510.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			53.000.000		-		2.080.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		4		0		0,00		0		0,00			
3511.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			593.500.000		890.000		1.410.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		2		4		0		0,00		0		0,00			
3512.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			240.000.000		720.000		1.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)																
3513.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3514.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3515.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			22.000.000		720.000		1.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	12		1		30		0		0,00		0		0,00			
3516.	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			78.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3517.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**655.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SULIKI	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3518.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3519.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			320.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3520.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			335.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3521.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			335.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3522.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**850.800.000**		**38.075.000**		**9.360.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SULIKI	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	67		67		65		0		0,00		0		0,00			
3523.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			850.800.000		38.075.000		9.360.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3524.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			313.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3525.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			413.000.000		5.825.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	12		100		200		0		0,00		0		0,00			
3526.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			124.600.000		32.250.000		9.360.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3527.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.279.500.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SULIKI	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3528.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.279.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
3529.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3530.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			1.074.778.682		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3531.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			104.721.318		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3532.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.205.988.664**		**1.695.294.766**		**1.692.060.854**		**417.400.241**	**0,00**	**24,67**		**417.400.241**	**0,00**	**4,09**	KECAMATAN GUGUAK	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		0		0,00		0		0,00			
3533.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.378.311		1.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen /Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3534.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.216.651		1.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		2		0		0,00		0		0,00			
3535.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			19.001.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3536.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.160.660		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		4		2		0		0,00		0		0,00			
3537.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.465.884.210		1.554.105.271		1.607.530.854		407.670.795	0,00	25,36		407.670.795	0,00	6,30		
		Dokumen/persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3538.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.388.884.210		1.554.105.271		1.607.530.854		407.670.795	0,00	25,36		407.670.795	0,00	6,38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		14		14		0		0,00		0		0,00			
3539.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			37.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		1		0		0,00		0		0,00			
3540.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3541.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3542.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		3		0		0,00		0		0,00			
3543.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
3544.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	24		0		14		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3545.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			711.490.500		38.265.500		19.220.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		bulan/buah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3546.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			62.000.000		2.000.000		2.133.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		4		0		0		0,00		0		0,00			
3547.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.400.000		2.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		5		0		0		0,00		0		0,00			
3548.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			126.996.000		6.996.000		7.423.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		5		0		0		0,00		0		0,00			
3549.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			89.724.500		5.724.500		3.439.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		4		0		0		0,00		0		0,00			
3550.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3551.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			270.370.000		21.145.000		6.225.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		6		0		0		0,00		0		0,00			
3552.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			810.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3553.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3554.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			240.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
3555.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0,00		0		0,00			
3556.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			289.355.343		32.495.195		8.080.000		3.629.446	0,00	44,92		3.629.446	0,00	1,25		
		dokumen/bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3557.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.600.000		600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		0		0		0,00		0		0,00			
3558.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			57.755.343		1.895.195		2.080.000		629.446	0,00	30,26		629.446	0,00	1,09		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		0		0		0,00		0		0,00			
3559.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			225.000.000		30.000.000		6.000.000		3.000.000	0,00	50,00		3.000.000	0,00	1,33		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		0		0		0,00		0		0,00			
3560.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.750.880.300		69.428.800		57.230.000		6.100.000	0,00	10,66		6.100.000	0,00	0,35		
		dokumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3561.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			324.500.000		64.778.800		53.350.000		6.100.000	0,00	11,43		6.100.000	0,00	1,88		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		10		0		0		0,00		0		0,00			
3562.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			184.650.000		4.650.000		3.880.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		0		0		0,00		0		0,00			
3563.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.241.730.300		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3564.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**782.000.000**		**1.355.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUGUAK	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90		90		90		0		0,00		0		0,00			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66		89,8		65		0		0,00		0		0,00			
3565.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			88.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nagari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3566.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			84.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3567.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		5		0		0,00		0		0,00			
3568.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			119.000.000		1.355.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen/laporan/bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3569.	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3570.	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			64.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3571.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20.000.000		1.355.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		1		5		0		0,00		0		0,00			
3572.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			574.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		dokumen/laporan/bulan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)																
3573.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			290.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3574.	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			284.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3575.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.441.020.800**		**6.499.500**		**2.070.000**		**1.590.000**	**0,00**	**76,81**		**1.590.000**	**0,00**	**0,11**	KECAMATAN GUGUAK	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	76		66		66		100		151,52		100		131,58			
3576.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			88.520.800		2.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nagari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3577.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			56.020.800		2.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		0		0		0,00		0		0,00			
3578.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			32.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3579.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-		-		2.070.000		1.590.000	0,00	76,81		1.590.000	0,00	0,00		
		dokumen/laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)																
3580.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-		-		2.070.000		1.590.000	0,00	76,81		1.590.000	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	65		0		5		0		0,00		0		0,00			
3581.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			1.352.500.000		4.399.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3582.	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
3583.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			425.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	80		0		20		0		0,00		0		0,00			
3584.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			200.200.514		4.399.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0		25		0		0		0,00		0		0,00			
3585.	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			180.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0		0		15		0		0,00		0		0,00			
3586.	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			57.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
3587.	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			414.799.486		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3588.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**745.300.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUGUAK	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	70		0		50		0		0,00		0		0,00			
3589.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			687.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Nagari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3590.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			342.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		5		0		0,00		0		0,00			
3591.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			345.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3592.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			58.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nagari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3593.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			58.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3594.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**794.000.000**		**26.000.000**		**8.040.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUGUAK	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	90		90		90		50		55,56		50		55,56			
3595.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			794.000.000		26.000.000		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		peserta/bulan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3596.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			409.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
3597.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			385.000.000		26.000.000		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		0		0		0,00		0		0,00			
3598.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.046.100.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN GUGUAK	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	80		0		50		0		0,00		0		0,00			
3599.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.046.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
3600.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			248.015.857		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		5		0		0,00		0		0,00			
3601.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			478.684.143		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3602.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			319.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3603.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.778.306.972**		**1.285.326.991**		**1.376.305.134**		**335.471.901**	**0,00**	**24,37**		**335.471.901**	**0,00**	**3,43**	KECAMATAN MUNGKA	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		24,37		24,37		24,37		24,37			
3604.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			324.777.274		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
3605.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			52.096.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
3606.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			43.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	60		4		6		0		0,00		0		0,00			
3607.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3608.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			54.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3609.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3610.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			73.681.274		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
3611.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.117.855.398		1.139.848.445		1.290.990.424		322.368.295	0,00	24,97		322.368.295	0,00	6,30		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3612.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.933.173.276		1.139.848.445		1.290.990.424		322.368.295	0,00	24,97		322.368.295	0,00	6,53		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		0		0		0,00		0		0,00			
3613.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.682.122		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
3614.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3615.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3616.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			70.374.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3617.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			70.374.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
3618.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			151.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
3619.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			85.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		15		0		0,00		0		0,00			
3620.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			66.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
3621.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.070.949.700		38.618.000		13.614.710		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3622.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			81.422.000		1.290.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		20		36		0		0,00		0		0,00			
3623.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			548.568.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3624.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			220.756.200		14.265.000		4.476.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		24		56		0		0,00		0		0,00			
3625.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			101.473.500		4.958.000		2.353.410		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		24		36		0		0,00		0		0,00			
3626.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		48		0		0,00		0		0,00			
3627.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58.480.000		18.105.000		6.785.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		64		60		0		0,00		0		0,00			
3628.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			372.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3629.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3630.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3631.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3632.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			973.500.000		39.256.394		11.300.000		2.013.606	0,00	17,82		2.013.606	0,00	0,21		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3633.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			76.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		28		0		0,00		0		0,00			
3634.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			93.000.000		7.670.394		11.300.000		2.013.606	0,00	17,82		2.013.606	0,00	2,17		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		24		12		0		0,00		0		0,00			
3635.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			279.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3636.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			525.000.000		31.586.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		64		60		0		0,00		0		0,00			
3637.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.697.350.000		67.604.152		60.400.000		11.090.000	0,00	18,36		11.090.000	0,00	0,65		
		Dokumen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3638.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			503.350.000		67.604.152		60.400.000		11.090.000	0,00	18,36		11.090.000	0,00	2,20		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		11		8		0		0,00		0		0,00			
3639.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			411.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3640.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			180.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		8		0		0,00		0		0,00			
3641.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			603.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3642.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**864.000.000**		**-**		**8.040.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MUNGKA	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92		85		85		0		0,00		0		0,00			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70		50		50		0		0,00		0		0,00			
3643.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			556.000.000		-		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3644.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			313.000.000		-		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		0		24		0		0,00		0		0,00			
3645.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			243.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	60		0		36		0		0,00		0		0,00			
3646.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			308.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3647.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			308.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3648.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**888.885.000**		**3.472.500**		**2.306.000**		**2.275.000**	**0,00**	**98,66**		**2.275.000**	**0,00**	**0,26**	KECAMATAN MUNGKA	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	75		72		73		98,66		135,15		98,66		131,55			
3649.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			644.035.000		3.472.500		2.306.000		2.275.000	0,00	98,66		2.275.000	0,00	0,35		
		Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3650.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			51.035.000		3.472.500		2.306.000		2.275.000	0,00	98,66		2.275.000	0,00	4,46		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		12		54		0		0,00		0		0,00			
3651.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			593.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		52		0		0,00		0		0,00			
3652.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			244.850.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)																
3653.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			120.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	9350		0		0		0		0,00		0		0,00			
3654.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			23.980.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	9350		0		1658		0		0,00		0		0,00			
3655.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			22.870.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	9350		0		1685		0		0,00		0		0,00			
3656.	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			78.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	9350		0		0		0		0,00		0		0,00			
3657.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**646.900.000**		**20.062.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MUNGKA	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	75		70		73		0		0,00		0		0,00			
3658.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			310.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3659.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			310.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		60		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3660.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			336.900.000		20.062.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3661.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			336.900.000		20.062.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	300		64		0		0		0,00		0		0,00			
3662.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**823.800.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MUNGKA	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	70		0		50		0		0,00		0		0,00			
3663.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			823.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3664.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			314.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60		0		250		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3665.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			413.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1250		0		0		0		0,00		0		0,00			
3666.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			96.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	260		0		24		0		0,00		0		0,00			
3667.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.288.922.600**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MUNGKA	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	75		0		50		0		0,00		0		0,00			
3668.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.288.922.600		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
3669.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			78.808.477		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	300		0		24		0		0,00		0		0,00			
3670.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			1.125.877.804		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	300		0		0		0		0,00		0		0,00			
3671.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			84.236.319		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	300		0		60		0		0,00		0		0,00			
3672.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.891.204.150**		**1.427.058.812**		**1.629.254.780**		**357.500.448**	**3,07**	**21,94**		**357.500.448**	**1,10**	**3,28**	KECAMATAN AKABILURU	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		100		100		25		25,00		25		5,00			
3673.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			166.378.000		3.676.000		2.951.000		-	16,67	0,00		-	4,29	0,00		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3674.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.314.000		2.562.000		1.501.000		-	16,67	0,00		-	3,33	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		7		6		1		16,67		1		3,33			
3675.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3676.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3677.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		1		0,00		1		20,00			
3678.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3679.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			48.264.000		1.114.000		1.450.000		-	0,00	0,00		-	6,67	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		6		0		2		0,00		2		6,67			
3680.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3681.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.185.224.150		1.277.024.612		1.520.832.780		348.694.784	12,50	22,93		348.694.784	0,83	4,85		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3682.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.078.008.150		1.275.168.612		1.520.832.780		348.694.784	0,00	22,93		348.694.784	0,00	4,93		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		14		15		0		0,00		0		0,00			
3683.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.316.000		1.856.000		-		-	25,00	0,00		-	5,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		25,00		3		5,00			
3684.	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			49.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3685.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
3686.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			42.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14		2		0		0		0,00		0		0,00			
3687.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3688.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			137.060.000		562.000		1.045.000		-	16,67	0,00		-	2,22	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3689.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			39.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3690.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			42.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
3691.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			56.060.000		562.000		1.045.000		-	16,67	0,00		-	6,67	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	15		3		6		1		16,67		1		6,67			
3692.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90.986.000		1.130.000		1.150.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
3693.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			36.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		15		0		0,00		0		0,00			
3694.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			29.986.000		1.130.000		1.150.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	90		14		15		0		0,00		0		0,00			
3695.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
3696.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			698.976.000		35.859.000		24.754.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3697.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.780.000		1.280.000		975.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		0		0,00		0		0,00			
3698.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			142.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3699.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			128.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3700.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			87.649.000		6.564.000		6.604.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3701.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			53.500.000		4.635.000		4.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
3702.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3703.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			263.547.000		23.380.000		12.675.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15		3		3		0		0,00		0		0,00			
3704.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.075.000.000		19.116.100		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3705.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			140.000.000		19.116.100		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		1		1		0		0,00		0		0,00			
3706.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			290.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
3707.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			345.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		0		2		0		0,00		0		0,00			
3708.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3709.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3710.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209.350.000		23.582.000		9.262.000		805.664	0,00	8,70		805.664	0,00	0,38		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3711.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.750.000		500.000		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3712.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			40.600.000		5.082.000		6.762.000		805.664	0,00	11,91		805.664	0,00	1,98		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3713.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			159.000.000		18.000.000		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
3714.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.328.230.000		66.109.100		69.260.000		8.000.000	0,00	11,55		8.000.000	0,00	0,60		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3715.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			392.750.000		62.659.100		67.750.000		8.000.000	0,00	11,81		8.000.000	0,00	2,04		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		8		9		0		0,00		0		0,00			
3716.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			85.680.000		3.450.000		1.510.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		15		15		0		0,00		0		0,00			
3717.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			669.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3718.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			180.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
3719.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**479.524.000**		**930.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN AKABILURU	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	361,5		71,89		72,10		0		0,00		0		0,00			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	449		89,37		89,60		0		0,00		0		0,00			
3720.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.564.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3721.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.564.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3722.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			26.960.000		930.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3723.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			26.960.000		930.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3724.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			426.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Dokumen Koordinasi dan Pemeliharaan Prasarana Pelayanan Umum yang Melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
3725.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			426.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3726.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**583.780.000**		**16.502.000**		**5.150.000**		**2.800.000**	**25,00**	**54,37**		**2.800.000**	**20,00**	**0,48**	KECAMATAN AKABILURU	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	300		87,5		50		10		20,00		10		3,33			
3727.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			77.935.000		3.030.000		3.100.000		2.800.000	50,00	90,32		2.800.000	70,00	3,59		
		Tingkat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3728.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			48.640.000		700.000		3.100.000		2.800.000	100,00	90,32		2.800.000	140,00	5,76		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		1		7		7		100,00		7		140,00			
3729.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			29.295.000		2.330.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	28		7		7		0		0,00		0		0,00			
3730.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)																
3731.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3732.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			365.845.000		13.472.000		2.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)																
3733.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			22.513.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	350		0		70		0		0,00		0		0,00			
3734.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			189.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	560		0		0		0		0,00		0		0,00			
3735.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			14.332.000		13.472.000		2.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	350		140		70		0		0,00		0		0,00			
3736.	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			140.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	560		0		0		0		0,00		0		0,00			
3737.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**420.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN AKABILURU	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	250		0		0		0		0,00		0		0,00			
3738.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			420.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat Sinergitas Lintas Sektor dan Harmonisasi Hubungan Sosial Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3739.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			205.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3740.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			215.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3741.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**728.840.000**		**34.850.000**		**8.250.000**		**6.000.000**	**0,00**	**72,73**		**6.000.000**	**0,00**	**0,82**	KECAMATAN AKABILURU	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	300		89,37		50		0		0,00		0		0,00			
3742.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			728.840.000		34.850.000		8.250.000		6.000.000	0,00	72,73		6.000.000	0,00	0,82		
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3743.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			526.660.000		7.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	500		100		1		0		0,00		0		0,00			
3744.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			202.180.000		27.750.000		8.250.000		6.000.000	0,00	72,73		6.000.000	0,00	2,97		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
3745.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**717.728.000**		**2.560.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN AKABILURU	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	300		87,5		50		0		0,00		0		0,00			
3746.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			717.728.000		2.560.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
3747.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			26.910.000		930.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		7		1		0		0,00		0		0,00			
3748.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3749.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			175.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3750.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			42.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
3751.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			133.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3752.	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			138.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3753.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.818.000		1.630.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	14		1		1		0		0,00		0		0,00			
3754.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			176.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3755.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.465.765.376**		**2.124.985.434**		**2.336.429.281**		**531.603.521**	**0,00**	**22,75**		**531.603.521**	**0,00**	**4,26**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
3756.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.080.000		5.000.000		2.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Penyusunan laporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3757.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000		2.500.000		1.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		3		0		0,00		0		0,00			
3758.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
3759.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3760.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
3761.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3762.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.080.000		2.500.000		1.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		2		6		0		0,00		0		0,00			
3763.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
3764.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.935.525.976		1.979.362.783		2.152.442.381		522.008.340	0,00	24,25		522.008.340	0,00	5,25		
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3765.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.881.100.276		1.979.362.783		2.152.442.381		522.008.340	0,00	24,25		522.008.340	0,00	5,28		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		21		0		0		0,00		0		0,00			
3766.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.175.700		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3767.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.650.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7		0		0		0		0,00		0		0,00			
3768.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3769.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			8.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3770.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			24.650.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laporan asset semester dan akhir tahun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3771.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			12.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		12		0		0,00		0		0,00			
3772.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.650.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		12		0		0,00		0		0,00			
3773.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
3774.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	119		0		22		0		0,00		0		0,00			
3775.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			21.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	110		0		0		0		0,00		0		0,00			
3776.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		20		0		0,00		0		0,00			
3777.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			748.712.400		31.752.000		12.746.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan Administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3778.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			32.822.000		1.428.000		6.599.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		5		12		0		0,00		0		0,00			
3779.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		5		0		0,00		0		0,00			
3780.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			48.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	29		0		5		0		0,00		0		0,00			
3781.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			76.016.800		11.728.000		4.551.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
3782.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.498.600		2.451.000		546.300		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	48		3		12		0		0,00		0		0,00			
3783.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.700.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48		0		12		0		0,00		0		0,00			
3784.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			54.850.000		5.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
3785.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			451.075.000		11.145.000		1.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
3786.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			569.563.000		-		10.437.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan Administrasi umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3787.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			85.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
3788.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			283.000.000		-		10.437.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17		0		7		0		0,00		0		0,00			
3789.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			88.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		1		0		0,00		0		0,00			
3790.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			113.063.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
3791.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345.874.000		42.135.451		50.033.600		795.181	0,00	1,59		795.181	0,00	0,23		
		Persentase pelaksanaan Administrasi umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3792.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	900		0		10		0		0,00		0		0,00			
3793.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.500.000		3.615.451		6.662.000		795.181	0,00	11,94		795.181	0,00	1,54		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
3794.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		0		12		0		0,00		0		0,00			
3795.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			205.374.000		38.520.000		43.371.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
3796.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			693.660.000		66.735.200		108.770.000		8.800.000	0,00	8,09		8.800.000	0,00	1,27		
		Persentase pelaksanaan Administrasi umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3797.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			338.750.000		66.735.200		67.750.000		8.800.000	0,00	12,99		8.800.000	0,00	2,60		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		3		9		0		0,00		0		0,00			
3798.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.910.000		-		1.420.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		4		0		0,00		0		0,00			
3799.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			329.000.000		-		39.600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
3800.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**475.506.200**		**5.270.000**		**1.098.900**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	84		86		81		20		24,69		20		23,81			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71		73		70		15		21,43		15		21,13			
3801.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			253.500.000		3.570.000		700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
3802.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			253.500.000		3.570.000		700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	35		4		1		0		0,00		0		0,00			
3803.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			222.006.200		1.700.000		398.900		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3804.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			222.006.200		1.700.000		398.900		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		3		1		0		0,00		0		0,00			
3805.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**905.748.500**		**5.755.000**		**2.483.500**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	83		90		81		20		24,69		20		24,10			
3806.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			448.248.500		2.100.000		1.783.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3807.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			57.250.000		2.100.000		1.400.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	400		0		7		0		0,00		0		0,00			
3808.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			390.998.500		-		383.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
3809.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			457.500.000		3.655.000		700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
3810.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3811.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			257.500.000		3.655.000		700.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	400		50		50		0		0,00		0		0,00			
3812.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**644.900.000**		**-**		**350.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	63		65		61		15		24,59		15		23,81			
3813.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			354.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3814.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			202.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35		0		0		0		0,00		0		0,00			
3815.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			152.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3816.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			290.900.000		-		350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3817.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			290.900.000		-		350.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	28		0		7		0		0,00		0		0,00			
3818.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**842.580.000**		**28.250.000**		**8.040.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	67		65		65		15		23,08		15		22,39			
3819.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			842.580.000		28.250.000		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3820.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			230.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	35		0		0		0		0,00		0		0,00			
3821.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			268.680.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3822.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			343.900.000		28.250.000		8.040.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	35		3		12		0		0,00		0		0,00			
3823.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.281.501.700**		**1.928.000**		**386.700**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	67		65		65		15		23,08		15		22,39			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3824.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.281.501.700		1.928.000		386.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
3825.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			203.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3826.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			105.001.700		1.928.000		386.700		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		7		7		0		0,00		0		0,00			
3827.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			135.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	28		0		7		0		0,00		0		0,00			
3828.	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			206.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	21		0		0		0		0,00		0		0,00			
3829.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			105.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3830.	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			119.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3831.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			313.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
3832.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			94.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	28		0		7		0		0,00		0		0,00			
3833.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.285.341.243**		**1.768.670.402**		**1.884.599.231**		**431.422.677**	**10,12**	**22,89**		**431.422.677**	**16,52**	**4,19**	KECAMATAN LUAK	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		100		100		33		33,00		33		6,60			
3834.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
3835.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3836.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3837.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3838.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3839.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.884.794.818		1.646.995.237		1.800.900.331		419.858.927	28,57	23,31		419.858.927	7,14	5,32		
		Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3840.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.860.794.818		1.646.995.237		1.800.900.331		419.858.927	28,57	23,31		419.858.927	28,57	5,34		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224		15		224		64		28,57		64		28,57			
3841.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3842.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
3843.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3844.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Orang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
3845.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
3846.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			269.510.000		34.182.740		10.418.100		1.137.100	6,25	10,91		1.137.100	50,00	0,42		
		Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3847.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.422.000		1.117.840		462.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		2		0		0,00		0		0,00			
3848.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3849.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			75.000.000		1.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
3850.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			61.978.000		12.614.000		4.841.100		1.137.100	25,00	23,49		1.137.100	300,00	1,83		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		12		3		25,00		3		300,00			
3851.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.500.000		2.550.900		450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		12		0		0,00		0		0,00			
3852.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.610.000		16.400.000		4.665.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3853.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.023.950.157		12.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3854.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			297.313.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9		0		1		0		0,00		0		0,00			
3855.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			138.468.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14		0		1		0		0,00		0		0,00			
3856.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			142.208.000		12.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		1		1		0		0,00		0		0,00			
3857.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			445.961.157		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3858.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.520.000		15.251.842		13.180.800		1.958.662	12,50	14,86		1.958.662	12,50	0,58		
		Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3859.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			80.320.000		11.811.842		12.764.000		1.958.662	25,00	15,35		1.958.662	25,00	2,44		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
3860.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			260.200.000		3.440.000		416.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		15		5		0		0,00		0		0,00			
3861.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			692.566.268		60.140.583		60.100.000		8.467.988	21,43	14,09		8.467.988	14,29	1,22		
		Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3862.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			313.000.000		58.780.583		60.100.000		8.467.988	42,86	14,09		8.467.988	42,86	2,71		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		7		7		3		42,86		3		42,86			
3863.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.745.000		1.360.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		5		4		0		0,00		0		0,00			
3864.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			366.821.268		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3865.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**599.118.500**		**40.188.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LUAK	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90		89,43		85		80		94,12		80		88,89			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69		64,99		65		60		92,31		60		86,96			
3866.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3867.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			40.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3868.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			75.118.500		40.188.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3869.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			75.118.500		40.188.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3870.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			484.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
3871.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			484.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3872.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**456.865.000**		**-**		**2.625.000**		**2.625.000**	**300,00**	**100,00**		**2.625.000**	**16,67**	**0,57**	KECAMATAN LUAK	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	90		85		85		85		100,00		85		94,44			
3873.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.865.000		-		2.625.000		2.625.000	600,00	100,00		2.625.000	50,00	26,61		
		Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3874.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5.865.000		-		2.625.000		2.625.000	600,00	100,00		2.625.000	100,00	44,76		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	24		0		4		24		600,00		24		100,00			
3875.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
3876.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			447.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)																
3877.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			9.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	200		0		0		0		0,00		0		0,00			
3878.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			276.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3879.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			14.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	60		0		20		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3880.	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			148.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	160		0		0		0		0,00		0		0,00			
3881.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**449.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LUAK	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	352		0		0		0		0,00		0		0,00			
3882.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3883.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			16.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3884.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			433.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3885.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			433.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3886.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**562.255.000**		**32.380.000**		**16.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LUAK	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	437		0		85		0		0,00		0		0,00			
3887.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			562.255.000		32.380.000		16.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3888.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			214.975.000		5.100.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	20		4		30		0		0,00		0		0,00			
3889.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			347.280.000		27.280.000		16.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
3890.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**452.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LUAK	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	352		0		0		0		0,00		0		0,00			
3891.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			452.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
3892.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3893.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3894.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3895.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			116.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3896.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			133.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3897.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			179.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	48		0		0		0		0,00		0		0,00			
3898.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.107.476.833**		**1.603.177.352**		**1.705.370.269**		**170.073.024**	**13,73**	**9,97**		**170.073.024**	**14,11**	**1,68**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
3899.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.799.540		6.688.500		3.209.000		1.117.000	20,00	34,81		1.117.000	42,86	1,30		
		Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3900.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.450.000		1.560.000		1.134.000		1.117.000	100,00	98,50		1.117.000	300,00	8,97		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		3		6		6		100,00		6		300,00			
3901.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.899.540		1.124.000		1.037.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		1		1		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3902.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			11.250.000		1.384.000		1.037.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
3903.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			11.500.000		1.601.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
3904.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			14.100.000		1.019.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		1		0		0,00		0		0,00			
3905.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.150.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3906.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.450.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3907.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.514.400.607		1.436.153.145		1.627.221.355		157.816.312	0,00	9,70		157.816.312	0,00	2,10		
		Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3908.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.444.874.907		1.436.153.145		1.627.221.355		157.816.312	0,00	9,70		157.816.312	0,00	2,12		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	196		196		14		0		0,00		0		0,00			
3909.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.175.700		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
3910.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
3911.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			14.200.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
3912.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			14.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3913.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3914.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3915.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
3916.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			87.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25		0		14		0		0,00		0		0,00			
3917.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			21.050.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	18		0		0		0		0,00		0		0,00			
3918.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.170.190.000		65.984.854		25.711.000		4.610.000	12,50	17,93		4.610.000	12,50	0,39		
		Dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
3919.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.750.000		1.000.000		1.280.000		495.000	0,00	38,67		495.000	0,00	3,14		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		10		12		0		0,00		0		0,00			
3920.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			634.500.000		31.806.854		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		4		0		0,00		0		0,00			
3921.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.000.000		2.560.000		1.300.000		685.000	50,00	52,69		685.000	50,00	1,90		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		10		12		6		50,00		6		50,00			
3922.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.140.000		7.138.000		7.926.000		2.015.000	0,00	25,42		2.015.000	0,00	2,68		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		12		0		0,00		0		0,00			
3923.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			61.550.000		7.130.000		5.400.000		1.415.000	25,00	26,20		1.415.000	25,00	2,30		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
3924.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			347.250.000		16.350.000		9.805.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
3925.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			195.386.958		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Dokumen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
3926.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			75.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3927.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			115.886.958		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
3928.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
3929.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			416.720.730		46.723.508		4.528.914		603.376	8,33	13,32		603.376	8,33	0,14		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
3930.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.750.000		500.000		250.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		1		2		0		0,00		0		0,00			
3931.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.758.914		2.223.508		4.278.914		603.376	25,00	14,10		603.376	25,00	1,32		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
3932.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			352.211.816		44.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36		12		12		0		0,00		0		0,00			
3933.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			605.178.998		47.627.345		44.700.000		5.926.336	33,33	13,26		5.926.336	3,03	0,98		
		Dokumen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
3934.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			391.250.000		44.639.345		44.700.000		5.926.336	33,33	13,26		5.926.336	9,09	1,51		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		6		3		1		33,33		1		9,09			
3935.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.000.000		2.988.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18		8		0		0		0,00		0		0,00			
3936.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			185.928.998		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
3937.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**764.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92		0		91		91		100,00		91		98,91			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67		0		65		65		100,00		65		97,01			
3938.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			336.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
3939.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			166.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0		0		12		0		0,00		0		0,00			
3940.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			170.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3941.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			229.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)																
3942.	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			106.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
		Fasilitasi Tim Data Terpadu Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
3943.	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			123.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
3944.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			198.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Prasarana dan Sarana Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
3945.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			198.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	100		0		0		0		0,00		0		0,00			
3946.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**801.000.000**		**10.440.000**		**4.790.000**		**4.790.000**	**25,00**	**100,00**		**4.790.000**	**133,33**	**0,60**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	67		67		65		65		100,00		65		97,01			
3947.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			206.000.000		2.440.000		4.790.000		4.790.000	100,00	100,00		4.790.000	800,00	2,33		
		Rata rata nilai swadaya masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
3948.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			206.000.000		2.440.000		4.790.000		4.790.000	100,00	100,00		4.790.000	800,00	2,33		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		8		8		8		100,00		8		800,00			
3949.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			595.000.000		8.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
3950.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			92.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			
3951.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			87.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)																
3952.	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	67		0		50		0		0,00		0		0,00			
3953.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			94.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	67		0		50		0		0,00		0		0,00			
3954.	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			101.000.000		8.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	67		50		0		0		0,00		0		0,00			
3955.	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			115.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3956.	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			101.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	67		0		50		0		0,00		0		0,00			
3957.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**641.900.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	67		67		0		0		0,00		0		0,00			
3958.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			490.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran Perda di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
3959.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			245.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
3960.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			245.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0		0		12		0		0,00		0		0,00			
3961.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			151.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman umum di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
3962.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			151.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3963.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**802.300.000**		**38.978.571**		**35.200.000**		**6.000.000**	**12,50**	**17,05**		**6.000.000**	**1,00**	**0,75**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	67		67		65		65		100,00		65		97,01			
3964.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			802.300.000		38.978.571		35.200.000		6.000.000	12,50	17,05		6.000.000	1,00	0,75		
		Terlaksananya urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
3965.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			56.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3966.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			557.800.000		11.978.571		7.900.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1		150		100		0		0,00		0		0,00			
3967.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			188.500.000		27.000.000		27.300.000		6.000.000	25,00	21,98		6.000.000	3,00	3,18		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	100		12		12		3		25,00		3		3,00			
3968.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.279.000.000**		**2.780.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	67		67		0		0		0,00		0		0,00			
3969.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.279.000.000		2.780.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
3970.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			207.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3971.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			222.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3972.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			212.300.000		2.780.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	67		8		12		0		0,00		0		0,00			
3973.	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			212.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3974.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			212.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3975.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			212.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	67		0		0		0		0,00		0		0,00			
3976.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.248.780.347**		**1.334.123.277**		**1.603.924.829**		**384.597.449**	**1,65**	**23,98**		**384.597.449**	**0,16**	**4,66**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		85		100		25		25,00		25		5,00			
3977.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.641.800		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		tersedinnya dokumen perencanaan, pegangagaran dan evaluasi perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
3978.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.992.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
3979.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			8.678.900		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8		1		1		0		0,00		0		0,00			
3980.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		1		0		0,00		0		0,00			
3981.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		1		1		0		0,00		0		0,00			
3982.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.370.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		2		0		0		0,00		0		0,00			
3983.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
3984.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.532.121.921		1.257.644.677		1.527.628.729		384.597.449	10,71	25,18		384.597.449	0,83	5,11		
		tersedianhya gaji dan tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
3985.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.478.121.921		1.257.644.677		1.527.628.729		384.597.449	21,43	25,18		384.597.449	5,00	5,14		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		3		14		3		21,43		3		5,00			
3986.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		3		0		0		0,00		0		0,00			
3987.	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			7.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60		3		0		0		0,00		0		0,00			
3988.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3989.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			15.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	120		0		1		0		0,00		0		0,00			
3990.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			12.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3991.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			85.710.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Keluaran :Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
3992.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			54.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
3993.	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			9.010.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3994.	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			7.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	20		1		0		0		0,00		0		0,00			
3995.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0,00		0		0,00			
3996.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.900.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
3997.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		tersedianya Pakaian Dinas harian untuk ASN dan Non ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
3998.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
3999.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164.834.000		17.379.000		7.341.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
4000.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.400.000		500.000		525.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0,00		0		0,00			
4001.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.684.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
4002.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
4003.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.000.000		14.881.000		5.277.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
4004.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			27.000.000		1.998.000		1.539.500		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		0		1		0		0,00		0		0,00			
4005.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			10.750.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1075		0		0		0		0,00		0		0,00			
4006.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
4007.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			219.892.426		-		7.034.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
4008.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1075		0		0		0		0,00		0		0,00			
4009.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			49.942.426		-		6.531.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48		0		12		0		0,00		0		0,00			
4010.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	55		0		0		0		0,00		0		0,00			
4011.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			117.600.000		-		503.600		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
4012.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			182.180.200		59.099.600		61.920.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
4013.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			182.180.200		59.099.600		60.050.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	58		0		10		0		0,00		0		0,00			
4014.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		1.870.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		10		0		0,00		0		0,00			
4015.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**610.516.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	400		82		80		0		0,00		0		0,00			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75		88,5		75		0		0,00		0		0,00			
4016.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			410.260.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)																
4017.	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			410.260.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
4018.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			200.256.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)																
4019.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			200.256.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4020.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.002.673.000**		**-**		**5.455.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	380		82,24		60		0		0,00		0		0,00			
4021.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			76.000.000		-		5.455.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah tahapan forum musrenbang di anagari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4022.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			39.000.000		-		3.015.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		0		12		0		0,00		0		0,00			
4023.	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			37.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4024.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-		2.440.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		1		0		0,00		0		0,00			
4025.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			335.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)																
4026.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			335.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		0		0		0		0,00		0		0,00			
4027.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			69.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terfasilitasinya lembaga lembaga dikecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)																
4028.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			69.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	70		0		0		0		0,00		0		0,00			
4029.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			522.673.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)																
4030.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			154.233.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	225		0		0		0		0,00		0		0,00			
4031.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			107.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	155		0		0		0		0,00		0		0,00			
4032.	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			110.260.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	160		0		0		0		0,00		0		0,00			
4033.	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			151.180.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	217		0		0		0		0,00		0		0,00			
4034.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**550.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	320		0		0		0		0,00		0		0,00			
4035.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			463.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
4036.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			231.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
4037.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			231.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10		0		0		0		0,00		0		0,00			
4038.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			87.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
4039.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			87.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	16		0		0		0		0,00		0		0,00			
4040.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**617.100.000**		**-**		**14.740.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	400		0		80		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4041.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			617.100.000		-		14.740.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		terlaksananya urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)																
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
4042.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			160.325.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	1250		0		0		0		0,00		0		0,00			
4043.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			132.225.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	625		0		0		0		0,00		0		0,00			
4044.	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			141.225.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
4045.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			183.325.000		-		14.740.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		1		0		0,00		0		0,00			
4046.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**751.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	400		0		0		0		0,00		0		0,00			
4047.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			751.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		persentase pemerintahan nagari yang terbina	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4048.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			78.875.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4049.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			152.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
4050.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			91.875.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
4051.	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			67.875.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4052.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			25.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4053.	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			94.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4054.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			111.375.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4055.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			86.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4056.	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			44.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25		0		0		0		0,00		0		0,00			
4057.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.733.029.571**		**1.837.083.446**		**1.884.697.845**		**171.667.376**	**0,00**	**9,11**		**171.667.376**	**0,00**	**1,46**	KECAMATAN HARAU	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
4058.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			326.588.872		8.055.000		9.415.800		1.186.000	0,00	12,60		1.186.000	0,00	0,36		
		Persentase Penyusunan Laporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
4059.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.496.585		3.114.000		1.453.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4060.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			36.599.287		1.112.000		1.423.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		1		0		0,00		0		0,00			
4061.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			40.207.000		-		1.207.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		2		1		0		0,00		0		0,00			
4062.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			40.996.000		1.576.000		1.596.000		1.186.000	0,00	74,31		1.186.000	0,00	2,89		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		1		0		0,00		0		0,00			
4063.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			42.209.000		1.194.000		1.209.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		1		0		0,00		0		0,00			
4064.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			66.281.000		1.059.000		2.527.800		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		6		2		0		0,00		0		0,00			
4065.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.800.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4066.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.249.345.313		1.660.731.609		1.777.921.845		155.406.803	0,00	8,74		155.406.803	0,00	1,88		
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
4067.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.043.342.713		1.656.724.109		1.775.657.845		155.406.803	0,00	8,75		155.406.803	0,00	1,93		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		19		19		0		0,00		0		0,00			
4068.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			32.389.600		957.500		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4069.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.788.000		1.181.000		1.188.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
4070.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			66.349.000		942.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15		24		12		0		0,00		0		0,00			
4071.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			56.476.000		927.000		1.076.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
4072.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			64.104.000		1.103.000		660.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laporan Asset semester dan akhir tahun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
4073.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			64.104.000		1.103.000		660.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7		6		4		0		0,00		0		0,00			
4074.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.044.000		1.014.000		1.202.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Pelaksanaan Disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
4075.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			102.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4076.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.544.000		1.014.000		1.202.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16		12		12		0		0,00		0		0,00			
4077.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			683.954.800		64.861.000		23.796.800		2.822.700	0,00	11,86		2.822.700	0,00	0,41		
		Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
4078.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.633.000		2.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		20		12		0		0,00		0		0,00			
4079.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			298.942.000		20.400.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		3		0		0,00		0		0,00			
4080.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			149.361.200		10.729.000		9.561.200		1.990.200	0,00	20,82		1.990.200	0,00	1,33		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		12		0		0,00		0		0,00			
4081.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			84.377.600		8.224.500		4.580.600		832.500	0,00	18,17		832.500	0,00	0,99		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		12		0		0,00		0		0,00			
4082.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			29.256.000		6.105.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4083.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.385.000		16.902.500		9.655.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4084.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			723.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
4085.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			313.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4086.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			190.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0,00		0		0,00			
4087.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			220.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4088.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			544.271.400		38.171.995		9.471.400		1.185.458	0,00	12,52		1.185.458	0,00	0,22		
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
4089.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.300.000		500.000		500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		1		50		0		0,00		0		0,00			
4090.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			71.840.000		5.211.995		5.340.000		1.185.458	0,00	22,20		1.185.458	0,00	1,65		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4091.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			468.131.400		32.460.000		3.631.400		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4092.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.013.321.186		63.146.842		62.230.000		11.066.415	0,00	17,78		11.066.415	0,00	1,09		
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
4093.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			342.550.000		61.006.842		61.050.000		11.066.415	0,00	18,13		11.066.415	0,00	3,23		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		8		8		0		0,00		0		0,00			
4094.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.800.000		2.140.000		1.180.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		6		4		0		0,00		0		0,00			
4095.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			341.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4096.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			291.471.186		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0,00		0		0,00			
4097.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**834.106.400**		**1.861.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN HARAU	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96		90,95		95		90,95		95,74		90,95		94,74			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73		64,56		70		70		100,00		70		95,89			
4098.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			64.691.400		621.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
4099.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			64.691.400		621.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	13		13		11		0		0,00		0		0,00			
4100.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.415.000		1.240.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4101.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.415.000		1.240.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		12		12		0		0,00		0		0,00			
4102.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			768.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
4103.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			768.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
4104.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**512.376.700**		**9.882.000**		**3.860.000**		**3.860.000**	**0,00**	**100,00**		**3.860.000**	**0,00**	**0,75**	KECAMATAN HARAU	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	77		70		75		75		100,00		75		97,40			
4105.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			70.236.700		5.440.000		3.860.000		3.860.000	0,00	100,00		3.860.000	0,00	5,50		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4106.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			41.160.000		3.750.000		3.860.000		3.860.000	0,00	100,00		3.860.000	0,00	9,38		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4		1		11		0		0,00		0		0,00			
4107.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			29.076.700		1.690.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13		3		11		0		0,00		0		0,00			
4108.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			442.140.000		4.442.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya keluarga yang menerapkan prilaku hidup sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)																
4109.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			308.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	150		0		0		0		0,00		0		0,00			
4110.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			3.740.000		4.442.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	13		30		12		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4111.	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			130.300.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	130		0		0		0		0,00		0		0,00			
4112.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**473.227.000**		**2.062.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN HARAU	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	77		77		75		0		0,00		0		0,00			
4113.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			236.405.000		965.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
4114.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			236.405.000		965.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		2		11		0		0,00		0		0,00			
4115.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			236.822.000		1.097.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintahan Nagari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
4116.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			236.822.000		1.097.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3		12		11		0		0,00		0		0,00			
4117.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**664.270.000**		**30.375.000**		**32.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN HARAU	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	77		70		75		0		0,00		0		0,00			
4118.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			664.270.000		30.375.000		32.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
4119.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			288.020.000		2.195.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	55		50		33		0		0,00		0		0,00			
4120.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			376.250.000		28.180.000		32.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		12		0		0,00		0		0,00			
4121.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.365.876.500**		**6.930.000**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN HARAU	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	77		70		75		0		0,00		0		0,00			
4122.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.365.876.500		6.930.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Produk Hukum Nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4123.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			1.580.000		965.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0		11		11		0		0,00		0		0,00			
4124.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			97.350.000		1.115.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11		3		11		0		0,00		0		0,00			
4125.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			1.762.500		1.237.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0		6		11		0		0,00		0		0,00			
4126.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
4127.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			270.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
4128.	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			402.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	11		0		0		0		0,00		0		0,00			
4129.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			389.269.000		1.237.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	11		11		11		0		0,00		0		0,00			
4130.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1.791.000		1.279.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0		6		11		0		0,00		0		0,00			
4131.	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1.624.000		1.097.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		11		11		0		0,00		0		0,00			
4132.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.171.299.295**		**1.545.187.606**		**1.723.100.562**		**338.424.225**	**18,33**	**19,64**		**338.424.225**	**14,11**	**3,03**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		25,00		25		25,00			
4133.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			299.353.000		6.155.000		3.519.000		1.123.000	27,78	31,91		1.123.000	10,71	0,38		
		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
4134.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			76.586.000		3.416.000		1.126.000		903.000	50,00	80,20		903.000	50,00	1,18		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		3		2		1		50,00		1		50,00			
4135.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			37.801.000		575.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
4136.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4137.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4138.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			35.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4139.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			79.966.000		2.164.000		2.393.000		220.000	33,33	9,19		220.000	14,29	0,28		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14		5		6		2		33,33		2		14,29			
4140.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.374.795.623		1.403.567.665		1.618.890.562		321.337.025	41,67	19,85		321.337.025	41,67	4,36		
		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
4141.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.278.557.623		1.397.829.665		1.616.610.562		320.637.025	0,00	19,83		320.637.025	0,00	4,41		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		14		16		0		0,00		0		0,00			
4142.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58.644.000		3.564.000		1.850.000		270.000	25,00	14,59		270.000	25,00	0,46		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4143.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			37.594.000		2.174.000		430.000		430.000	100,00	100,00		430.000	100,00	1,14		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		1		100,00		1		100,00			
4144.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			47.515.000		1.210.000		1.150.000		200.000	8,33	17,39		200.000	50,00	0,42		
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
4145.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			47.515.000		1.210.000		1.150.000		200.000	8,33	17,39		200.000	50,00	0,42		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		2		12		1		8,33		1		50,00			
4146.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			235.700.000		1.315.000		1.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
4147.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			118.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20		0		16		0		0,00		0		0,00			
4148.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			47.700.000		1.315.000		1.100.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	15		15		16		0		0,00		0		0,00			
4149.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			70.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0		0,00		0		0,00			
4150.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			830.941.000		47.063.800		27.620.400		1.820.800	15,00	6,59		1.820.800	15,00	0,22		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
4151.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.300.000		550.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		0		0,00		0		0,00			
4152.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			194.585.000		9.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,00		0		0,00			
4153.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			86.760.000		6.212.000		5.206.200		870.800	25,00	16,73		870.800	25,00	1,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4154.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.430.000		4.331.800		3.379.200		300.000	25,00	8,88		300.000	25,00	0,48		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4155.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			459.866.000		26.970.000		19.035.000		650.000	25,00	3,41		650.000	25,00	0,14		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4156.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			734.681.000		3.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
4157.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			495.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4158.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			239.681.000		3.600.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		2		1		0		0,00		0		0,00			
4159.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344.677.672		21.959.779		9.083.600		2.031.400	25,00	22,36		2.031.400	17,50	0,59		
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
4160.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.200.000		200.000		150.000		50.000	25,00	33,33		50.000	2,50	0,96		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	200		20		20		5		25,00		5		2,50			
4161.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			78.200.000		6.622.563		7.300.000		1.661.400	25,00	22,76		1.661.400	25,00	2,12		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4162.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			261.277.672		15.137.216		1.633.600		320.000	25,00	19,59		320.000	25,00	0,12		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		25,00		3		25,00			
4163.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.303.636.000		60.316.362		61.737.000		11.912.000	0,00	19,29		11.912.000	0,00	0,91		
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
4164.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			402.550.000		58.942.900		60.050.000		11.912.000	0,00	19,84		11.912.000	0,00	2,96		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		7		7		0		0,00		0		0,00			
4165.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.086.000		1.373.462		1.687.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		4		6		0		0,00		0		0,00			
4166.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			850.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4167.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**504.750.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92		90,87		91,3		22		24,10		22		23,91			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70		65,75		67		67		100,00		67		95,71			
4168.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			250.350.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Laporan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																
4169.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			127.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		0		4		0		0,00		0		0,00			
4170.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			123.100.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4171.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			125.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4172.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			125.400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4173.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			129.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)																
4174.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			129.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4175.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**737.134.700**		**6.740.000**		**5.170.000**		**2.125.000**	**6,94**	**41,10**		**2.125.000**	**5,00**	**0,29**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	85		80		81		20		24,69		20		23,53			
4176.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			402.024.700		3.590.000		3.590.000		2.035.000	0,00	56,69		2.035.000	0,00	0,51		
		Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4177.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			103.374.700		3.590.000		3.590.000		2.035.000	0,00	56,69		2.035.000	0,00	1,97		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6		6		6		0		0,00		0		0,00			
4178.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			298.650.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		2		0		0,00		0		0,00			
4179.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)																
4180.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4181.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			225.110.000		3.150.000		1.580.000		90.000	20,83	5,70		90.000	12,50	0,04		
		Partisipasi keluarga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
4182.	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	150		0		0		0		0,00		0		0,00			
4183.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			115.110.000		3.150.000		1.580.000		90.000	20,83	5,70		90.000	25,00	0,08		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	200		200		240		50		20,83		50		25,00			
4184.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**470.000.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	85		0		60		0		0,00		0		0,00			
4185.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Laporan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
4186.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4187.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terciptanya sinergitas dengan kepolisian dan tentara nasional indonesia di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
4188.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			235.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4189.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**604.050.000**		**32.250.000**		**10.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	85		50		60		0		0,00		0		0,00			
4190.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			604.050.000		32.250.000		10.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
4191.	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			325.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4192.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			279.050.000		32.250.000		10.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		0		0,00		0		0,00			
4193.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**736.150.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	80		0		0		0		0,00		0		0,00			
4194.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			736.150.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Laporan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4195.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			111.150.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	6		0		0		0		0,00		0		0,00			
4196.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			132.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4197.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
4198.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			110.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4199.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			110.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4200.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			111.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12		0		0		0		0,00		0		0,00			
4201.	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			110.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24		0		0		0		0,00		0		0,00			
4202.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.368.658.985**		**1.812.328.257**		**2.268.565.031**		**448.679.853**	**46,16**	**19,78**		**448.679.853**	**3,18**	**3,95**	KECAMATAN KAPUR IX	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	500		78,09		100		13,67		13,67		13,67		2,73			
4203.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		4.574.000		4.093.000		-	25,00	0,00		-	6,43	0,00		
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																
4204.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			32.000.000		2.057.000		1.274.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0,00		0		0,00			
4205.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	25,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		1		0		1		0,00		1		25,00			
4206.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
4207.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.000.000		740.000		999.000		-	100,00	0,00		-	20,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
4208.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			11.000.000		1.037.000		870.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4209.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.000.000		740.000		950.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4210.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
4211.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.243.399.985		1.689.775.305		2.153.608.032		426.665.663	166,67	19,81		426.665.663	4,89	5,18		
		Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
4212.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.205.899.985		1.689.775.305		2.151.958.032		426.665.663	100,00	19,83		426.665.663	20,00	5,20		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85		16		17		17		100,00		17		20,00			
4213.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4214.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.000.000		-		550.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4215.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			16.000.000		-		1.100.000		-	400,00	0,00		-	4,44	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90		18		1		4		400,00		4		4,44			
4216.	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
4217.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			31.000.000		-		860.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
4218.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		1		0		0		0,00		0		0,00			
4219.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8		1		0		0		0,00		0		0,00			
4220.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000		-		860.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4221.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			209.672.000		520.000		704.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
4222.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			34.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4223.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.500.000		520.000		704.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4224.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4225.	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			72.672.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	128		0		0		0		0,00		0		0,00			
4226.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			95.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	128		0		0		0		0,00		0		0,00			
4227.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			396.500.000		40.842.575		41.479.431		8.193.000	40,00	19,75		8.193.000	6,67	2,07		
		Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																
4228.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.000.000		1.091.000		636.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		0		0,00		0		0,00			
4229.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78.000.000		8.356.875		5.805.400		2.163.000	100,00	37,26		2.163.000	20,00	2,77		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
4230.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			28.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4231.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.000.000		2.725.200		2.988.031		650.000	100,00	21,75		650.000	20,00	2,83		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		100,00		1		20,00			
4232.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.500.000		382.000		450.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4233.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			256.000.000		28.287.500		31.600.000		5.380.000	0,00	17,03		5.380.000	0,00	2,10		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4234.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.336.265.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
4235.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			530.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4236.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			150.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4237.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			430.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		0		0		0		0,00		0		0,00			
4238.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			226.265.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4239.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.300.000		31.170.527		22.380.568		4.160.590	0,00	18,59		4.160.590	0,00	1,91		
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
4240.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70.500.000		5.586.743		10.240.000		1.160.590	0,00	11,33		1.160.590	0,00	1,65		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4241.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			146.800.000		25.583.784		12.140.568		3.000.000	0,00	24,71		3.000.000	0,00	2,04		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4242.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			834.522.000		45.445.850		45.440.000		9.660.600	15,48	21,26		9.660.600	1,25	1,16		
		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
4243.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			292.400.000		43.196.850		40.650.000		9.360.600	14,29	23,03		9.360.600	2,50	3,20		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		7		1		14,29		1		2,50			
4244.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.000.000		2.249.000		4.790.000		300.000	16,67	6,26		300.000	2,50	0,46		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		7		6		1		16,67		1		2,50			
4245.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			425.122.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4246.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4247.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**550.000.000**		**13.370.000**		**1.692.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN KAPUR IX	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92,5		91,52		90,50		0		0,00		0		0,00			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72		55,35		60		0		0,00		0		0,00			
4248.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13.000.000		1.000.000		842.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4249.	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			9.000.000		1.000.000		842.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4250.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4251.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			27.000.000		12.370.000		850.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4252.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			27.000.000		12.370.000		850.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4253.	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			510.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang efektif	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)																
4254.	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			510.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**989.000.000**		**2.805.000**		**5.415.000**		**2.216.000**	**50,00**	**40,92**		**2.216.000**	**2,50**	**0,22**	KECAMATAN KAPUR IX	
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	62		60		53		0		0,00		0		0,00			
4256.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			107.000.000		2.805.000		5.415.000		2.216.000	50,00	40,92		2.216.000	10,00	2,07		
		Terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																
4257.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			37.000.000		1.805.000		2.750.000		2.216.000	100,00	80,58		2.216.000	20,00	5,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	35		7		7		7		100,00		7		20,00			
4258.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			70.000.000		1.000.000		2.665.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4259.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			400.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Persentase terlaksannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang efektif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)																
4260.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
4261.	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	28		0		0		0		0,00		0		0,00			
4262.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			482.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan yang efektif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)																
4263.	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			220.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	128		0		0		0		0,00		0		0,00			
4264.	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
4265.	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			20.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30		0		0		0		0,00		0		0,00			
4266.	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			222.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	120		0		0		0		0,00		0		0,00			
4267.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.500.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN KAPUR IX	
		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
4268.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)																
4269.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			3.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4270.	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)																
4271.	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
4272.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**178.000.000**		**27.000.000**		**27.000.000**		**2.000.000**	**0,00**	**7,41**		**2.000.000**	**0,00**	**1,12**	KECAMATAN KAPUR IX	
		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	62		60		53		0		0,00		0		0,00			
4273.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			178.000.000		27.000.000		27.000.000		2.000.000	0,00	7,41		2.000.000	0,00	1,12		
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)																
4274.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			30.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150		0		0		0		0,00		0		0,00			
4275.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			148.000.000		27.000.000		27.000.000		2.000.000	0,00	7,41		2.000.000	0,00	1,35		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4276.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**891.000.000**		**3.000.000**		**1.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN KAPUR IX	
		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	62		60		53		0		0,00		0		0,00			
4277.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			891.000.000		3.000.000		1.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pembentukan Kawasan Perdesaan (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)																
4278.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			9.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0,00		0		0,00			
4279.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			13.000.000		1.000.000		750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4280.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			13.000.000		2.000.000		750.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5		1		1		0		0,00		0		0,00			
4281.	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			206.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4282.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			4.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4283.	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			212.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4284.	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			212.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4285.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			214.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4286.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		0		0		0		0,00		0		0,00			
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**31.365.741.206**		**3.091.968.686**		**5.095.028.026**		**379.689.641**	**8,78**	**7,45**		**379.689.641**	**0,86**	**1,21**		
4287.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.248.621.982**		**733.541.676**		**3.284.877.432**		**309.877.905**	**13,55**	**9,43**		**309.877.905**	**1,42**	**1,46**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100		95		100		100		100,00		100		100,00			
4288.	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			466.640.950		28.669.000		10.000.001		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)																
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)																
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)																
4289.	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			108.420.950		28.669.000		10.000.001		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		2		6		0		0,00		0		0,00			
4290.	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4291.	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			47.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4292.	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			46.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4293.	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			46.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4294.	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			61.220.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	90		0		18		0		0,00		0		0,00			
4295.	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			109.600.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4296.	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4297.	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4298.	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			400.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4299.	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.340.325.673		281.593.852		3.099.466.931		291.975.245	37,93	9,42		291.975.245	2,86	1,79		
		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)																
4300.	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.109.284.673		281.593.852		3.099.466.931		291.975.245	113,79	9,42		291.975.245	20,00	1,81		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	165		28		29		33		113,79		33		20,00			
4301.	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4302.	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			49.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4303.	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			68.691.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		4		0		0,00		0		0,00			
4304.	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4305.	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			61.850.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		16		0		0,00		0		0,00			
4306.	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		0		0		0		0,00		0		0,00			
4307.	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			86.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)																
4308.	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			86.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0,00		0		0,00			
4309.	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			76.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)																
4310.	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			76.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	132		0		0		0		0,00		0		0,00			
4311.	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.183.238.509		154.679.329		81.200.000		5.999.100	7,64	7,39		5.999.100	1,94	0,51		
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4312.	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			54.066.000		6.090.000		1.228.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		0		0,00		0		0,00			
4313.	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			115.366.000		16.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		2		0		0,00		0		0,00			
4314.	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			187.742.100		27.769.500		12.666.000		2.499.500	16,67	19,73		2.499.500	3,33	1,33		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		2		16,67		2		3,33			
4315.	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			72.853.409		6.852.600		6.000.000		1.000.000	16,67	16,67		1.000.000	3,33	1,37		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		12		2		16,67		2		3,33			
4316.	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			39.010.000		2.010.000		2.306.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		25		12		0		0,00		0		0,00			
4317.	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			714.201.000		95.957.229		59.000.000		2.499.600	12,50	4,24		2.499.600	5,00	0,35		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		6		24		3		12,50		3		5,00			
4318.	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			820.603.350		26.700.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
4319.	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			200.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4320.	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			273.518.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0,00		0		0,00			
4321.	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			149.151.350		7.200.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	19		3		3		0		0,00		0		0,00			
4322.	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			196.934.000		19.500.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		0		4		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4323.	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4324.	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.025.010.500		120.534.820		13.110.500		3.497.959	8,33	26,68		3.497.959	1,25	0,34		
		Jumlah laporan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																
4325.	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.500.000		750.000		600.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		6		12		0		0,00		0		0,00			
4326.	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			81.510.500		11.784.820		12.510.500		3.497.959	25,00	27,96		3.497.959	5,00	4,29		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		25,00		3		5,00			
4327.	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0,00		0		0,00			
4328.	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			936.000.000		108.000.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30		6		6		0		0,00		0		0,00			
4329.	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.250.803.000		121.364.675		81.100.000		8.405.601	33,33	10,36		8.405.601	4,29	0,67		
		Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
4330.	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			214.750.000		114.386.675		81.100.000		8.405.601	100,00	10,36		8.405.601	17,14	3,91		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		24		12		12		100,00		12		17,14			
4331.	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			700.840.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		0		0		0		0,00		0		0,00			
4332.	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			54.225.000		6.978.000		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		4		4		0		0,00		0		0,00			
4333.	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			280.988.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		0		1		0		0,00		0		0,00			
4334.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**4.283.191.824**		**802.882.417**		**460.000.400**		**55.236.736**	**6,15**	**12,01**		**55.236.736**	**0,62**	**1,29**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90		80		90		90		100,00		90		100,00			
4335.	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			4.283.191.824		802.882.417		460.000.400		55.236.736	6,15	12,01		55.236.736	0,62	1,29		
		Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)																

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)																
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)																
			Jumlah Paskibraka (Orang)																
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)																
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)																
4336.	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			3.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4337.	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			3.640.124		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4338.	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			132.560.496		-		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	750		0		150		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4339.	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			909.936.400		174.099.196		100.000.000		40.420.000	30,77	40,42		40.420.000	6,15	4,44		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	3250		2		650		200		30,77		200		6,15			
4340.	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			5.234.100		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4341.	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			116.915.880		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	600		0		120		0		0,00		0		0,00			
4342.	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			138.540.000		-		40.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	270		0		28		0		0,00		0		0,00			
4343.	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			2.960.364.824		628.783.221		300.000.400		14.816.736	0,00	4,94		14.816.736	0,00	0,50		
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	270		28		28		0		0,00		0		0,00			
4344.	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			6.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	113		0		0		0		0,00		0		0,00			
4345.	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila			7.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	113		0		0		0		0,00		0		0,00			
4346.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**862.935.400**		**1.428.044.593**		**1.138.257.194**		**2.325.000**	**0,00**	**0,20**		**2.325.000**	**0,00**	**0,27**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	95		75		90		90		100,00		90		94,74			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
4347.	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			862.935.400		1.428.044.593		1.138.257.194		2.325.000	0,00	0,20		2.325.000	0,00	0,27		
		Jumlah terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)															
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)																
4348.	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4349.	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4350.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			315.452.000		998.677.313		20.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1970		0		390		0		0,00		0		0,00			
4351.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			335.452.000		429.367.280		1.038.257.194		2.325.000	0,00	0,22		2.325.000	0,00	0,69		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	950		10		150		0		0,00		0		0,00			
4352.	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			46.500.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	53		0		12		0		0,00		0		0,00			
4353.	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka			161.531.400		-		80.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	270		0		54		0		0,00		0		0,00			
4354.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**77.659.000**		**-**		**25.893.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90		0		90		0		0,00		0		0,00			
4355.	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			77.659.000		-		25.893.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)																
4356.	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			250.000		-		25.893.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		10		0		0,00		0		0,00			
4357.	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			73.659.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0,00		0		0,00			
4358.	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4359.	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4360.	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1.250.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0,00		0		0,00			
4361.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**1.654.998.000**		**19.050.000**		**68.500.000**		**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi , sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	85		75		85		0		0,00		0		0,00			
4362.	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.654.998.000		19.050.000		68.500.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)															
4363.	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4364.	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4365.	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			762.998.000		19.050.000		24.775.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	300		6		60		0		0,00		0		0,00			
4366.	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			665.000.000		-		43.725.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1800		0		360		0		0,00		0		0,00			
4367.	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			225.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	52		0		0		0		0,00		0		0,00			
4368.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**3.238.335.000**		**108.450.000**		**117.500.000**		**12.250.000**	**0,28**	**10,43**		**12.250.000**	**0,03**	**0,38**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	90		75		90		90		100,00		90		100,00			
4369.	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.238.335.000		108.450.000		117.500.000		12.250.000	0,28	10,43		12.250.000	0,03	0,38		
		Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)																
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)														

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)																
4370.	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4371.	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4372.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			615.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	60		0		142		0		0,00		0		0,00			
4373.	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			962.775.000		58.625.000		80.500.000		12.250.000	0,83	15,22		12.250.000	0,17	1,27		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1800		3		360		3		0,83		3		0,17			
4374.	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.000.000		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0,00		0		0,00			
4375.	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1.657.560.000		49.825.000		37.000.000		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	70		5		14		0		0,00		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	JUMLAH				9.851.331.979.909		1.294.828.248.115		1.390.359.966.358		159.984.311.263				159.984.311.263				
	Rata-rata capaian kinerja (%)											9,40	11,51			3,77	1,62		
	Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

2.5.1 Evaluasi RKPD Sampai dengan Akhir Tahun 2025

Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2025 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2025 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2025-2029. Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2025 ini dilakukan terhadap 43 Perangkat Daerah yang menjalankan urusan/bidang urusan pemerintahan daerah yang didukung dengan program dan kegiatan.

Selain itu, evaluasi terhadap dokumen perencanaan ini juga dilihat dari tingkat konsistensi antara jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKPD tahun 2025 dan APBD tahun 2025 seperti yang terlihat pada tabel di 2.161 berikut:

Tabel 2.161
Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2025

No	OPD	RKPD 2025				APBD 2025				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	19	86	547.598.189.173	7	19	86	569.132.295.064	100%	100%	100%	104%
2	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	3	10	18	0	3	10	18	81.356.997.128	100%	100%	100%	0%
3	DINAS KESEHATAN	5	21	81	195.551.117.853	5	19	72	136.507.800.638	100%	90%	89%	70%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	24	64	70.282.341.302	12	24	64	28.826.300.204	100%	100%	100%	41%
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	10	35	8.386.383.279	2	10	35	8.589.485.997	100%	100%	100%	102%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	10	31	7.752.598.722	2	10	31	7.333.657.330	100%	100%	100%	95%
7	DINAS SOSIAL	6	15	52	7.078.401.437	6	15	52	6.958.325.001	100%	100%	100%	98%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9	15	43	4.605.209.740	6	12	23	6.425.934.113	67%	80%	53%	140%
9	DINAS PANGAN	5	14	46	3.441.755.676	5	14	46	3.060.552.729	100%	100%	100%	89%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	12	23	41	11.218.280.145	12	23	41	7.532.024.857	100%	100%	100%	67%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14	25	4.500.000.000	5	11	20	5.229.762.031	100%	79%	80%	116%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	4	8	25	5.285.849.751	4	8	25	6.749.349.762	100%	100%	100%	128%

No	OPD	RKPD 2025				APBD 2025				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	29	72	10.610.634.140	10	29	72	13.516.736.280	100%	100%	100%	127%
14	DINAS PERHUBUNGAN	2	22	92	13.372.257.468	2	22	91	15.786.462.349	100%	100%	99%	118%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	11	39	8.300.290.350	5	10	33	7.710.245.017	100%	91%	85%	93%
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12	16	25	4.606.323.371	12	16	25	5.023.233.195	100%	100%	100%	109%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	13	45	4.796.287.242	6	13	45	4.053.802.030	100%	100%	100%	85%
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	7	20	45	9.493.774.929	6	17	33	10.901.781.138	86%	85%	73%	115%
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	19	71	4.169.728.853	6	19	71	5.082.094.405	100%	100%	100%	122%
20	DINAS PERIKANAN	4	14	53	5.355.432.898	4	14	53	6.505.734.496	100%	100%	100%	121%
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	6	16	44	18.211.989.426	6	16	44	18.104.996.301	100%	100%	100%	99%

No	OPD	RKPD 2025				APBD 2025				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6	22	79	10.301.743.426	6	22	79	9.714.182.748	100%	100%	100%	94%
23	SEKRETARIAT DAERAH	3	21	69	39.854.395.000	3	20	69	40.971.527.809	100%	95%	100%	103%
24	SEKRETARIAT DPRD	2	17	74	33.196.599.185	2	17	74	36.012.344.245	100%	100%	100%	108%
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	18	60	8.406.793.960	4	18	60	6.034.175.131	100%	100%	100%	72%
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	14	86	204.444.602.623	4	14	86	208.522.833.284	100%	100%	100%	102%
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	39	6.084.753.483	3	13	39	5.673.741.464	100%	100%	100%	93%
28	INSPEKTORAT	3	11	53	11.320.739.724	3	11	53	12.696.311.155	100%	100%	100%	112%
29	KECAMATAN GUNUANG OMEH	4	9	20	1.620.849.468	4	9	20	1.357.328.222	100%	100%	100%	84%
30	KECAMATAN BUKIK BARISAN	5	12	24	1.473.670.905	5	12	23	1.580.461.739	100%	100%	96%	107%
31	KECAMATAN SULIKI	3	8	15	1.909.632.038	3	8	15	1.760.368.606	100%	100%	100%	92%
32	KECAMATAN GUGUAK	6	14	50	1.764.325.067	6	14	48	1.772.509.061	100%	100%	96%	100%
33	KECAMATAN MUNGKA	6	15	32	1.434.058.354	6	15	32	1.377.836.872	100%	100%	100%	96%
34	KECAMATAN AKABILURU	6	16	50	1.928.031.419	6	16	50	1.658.442.147	100%	100%	100%	86%

No	OPD	RKPD 2025				APBD 2025				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
35	KECAMATAN PAYAKUMBUH	6	16	48	2.134.710.943	6	16	47	2.295.525.335	100%	100%	98%	108%
36	KECAMATAN LUAK	4	11	26	1.690.897.137	4	11	26	1.913.110.357	100%	100%	100%	113%
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	6	16	42	1.586.580.542	6	16	42	1.741.544.437	100%	100%	100%	110%
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	6	16	47	1.634.472.076	6	16	46	1.672.449.369	100%	100%	98%	102%
39	KECAMATAN HARAU	6	16	41	2.090.025.511	6	16	41	1.934.794.774	100%	100%	100%	93%
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	3	11	26	1.681.321.007	3	11	26	1.635.146.049	100%	100%	100%	97%
41	KECAMATAN KAPUR IX	6	16	52	1.928.933.715	6	15	42	1.946.465.395	100%	94%	81%	101%
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	38	9.000.000.000	6	11	27	6.986.653.325	100%	85%	71%	78%
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	12	33	5.059.810.420	2	9	26	6.711.004.290	50%	75%	79%	133%
		232	660	2037	1.295.163.791.758	226	641	1951	1.310.356.325.879	97,41%	97,12%	95,78%	98,22%

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2025 yaitu sebanyak 232 program, 660 kegiatan dan 2.037 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.295.163.791.758. Dan rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun 2025 yaitu sebanyak 226 program, 641 kegiatan dan 1.951 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.310.356.325.879. Dilihat dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025, maka terdapat perbedaan atau terjadi *inkonsistensi* jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD tahun 2025.

Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2025 dan APBD tahun 2025 dilihat dari jumlah program yaitu sebesar 97,41%, dilihat dari jumlah kegiatan sebesar 97,12%, dilihat dari jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 95,78% dan dilihat dari pagu anggaran yaitu sebesar 98,22%. Terdapat perbedaan terhadap jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran dengan selisih sebanyak 6 untuk program, 19 untuk kegiatan, dan 86 untuk sub kegiatan. Adanya *inkonsistensi* ini perlu dilakukan penyesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2027. Rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dilihat dari tingkat konsistensinya yaitu:

a. Tingkat konsistensi program antara RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 yang paling rendah yaitu sebesar 50% terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program yang sudah konsisten 100% antara RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 terdapat sebanyak 40 Perangkat Daerah.
b. Tingkat konsistensi kegiatan antara RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 yang paling rendah yaitu sebesar 75% terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang sudah konsisten 100% antara RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 terdapat sebanyak 34 Perangkat Daerah.
c. Tingkat konsistensi sub kegiatan antara RKPD tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 yang paling rendah sebesar 53% terdapat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sub kegiatan yang sudah konsisten 100% antara RKPD tahun 2025 dan APBD tahun 2025 terdapat sebanyak 30 Perangkat Daerah.

Untuk rekap capaian per masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan rincian evaluasi RKPD sampai akhir tahun 2025 sesuai Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.60 dapat dilihat pada lampiran dibawah ini.

Tabel 2.162
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
Bidang Urusan pada Perubahan RKPD 2025

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3	11	70	565.431.828.664,00	61,83%	349.628.558.765,00	Disdikbud
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	19	72	329.933.469.290,00	82,77%	273.101.030.284,58	- Dinkes - RSUD Achmad Darwis
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	14	31	29.664.825.204,00	82,08%	24.349.501.841,00	DPUPR
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2	2	2	765.353.200,00	96,39%	737.696.792,00	DLHPKP
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	18	68	22.634.147.617,00	96,00%	21.728.989.489,00	- Satpol PP - Damkar - BPBD
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4	11	27	6.958.325.001,00	97,26%	6.767.321.997,00	Dinsos
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	2	2	2.381.098.068,00	87,52%	2.083.973.949,00	Disperinaker
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	5	9	12	3.761.816.958,00	82,33%	3.097.256.818,00	DP2KBP3A

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
	Perempuan Dan Perlindungan Anak							
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	9	20	3.060.552.729,00	95,87%	2.934.073.330,00	Dinas Pangan
10	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	7	12	24	7.216.671.657,00	91,77%	6.622.915.872,00	DLHPKP
11	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	11	18	5.229.762.031,00	94,60%	4.947.510.653,00	Disdukcapil
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3	7	13	6.749.349.762,00	97,61%	6.588.062.593,00	DPMDN
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	12	28	9.754.919.322,00	81,55%	7.955.562.094,00	DP2KBP3A
14	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	12	23	15.822.962.349,00	94,64%	14.974.844.814,00	Dishub
15	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	6	20	7.486.513.417,00	94,10%	7.044.986.308,00	Diskominfo
16	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	6	9	16	5.015.446.795,00	97,92%	4.911.071.558,00	Disperdagkop UKM
17	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4	9	22	4.053.802.030,00	98,80%	4.005.348.110,00	DPMPTSP

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	13	27	13.558.711.788,00	64,60%	8.759.332.651,00	Disparpora
19	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	2	13.811.600,00	87,29%	12.055.862,00	Diskominfo
20	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	209.920.000,00	99,95%	209.820.001,00	Diskominfo
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	7	11	3.700.466.400,00	76,73%	2.839.371.461,00	Disdikbud
22	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	9	31	5.069.836.405,00	95,23%	4.827.866.405,00	Dispusip
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	3	5	12.258.000,00	87,36%	10.709.000,00	Dispusip
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	7	17	6.580.734.496,00	96,15%	6.327.332.862,00	Diskan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2	4	4	591.569.350,00	99,44%	588.241.391,00	Disparpora
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	20	49	27.848.829.049,00	95,53%	26.605.293.879,00	Distanhortbun; Disnakkeswan
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2	3	3	67.786.400,00	99,13%	67.194.170,00	Disperdagkop UKM
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	9	20	4.457.987.089,00	96,31%	4.293.527.772,00	Disperinaker
29	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	1	968.800,00	100,00 %	968.800,00	Disperinaker
30	Sekretariat Daerah	3	19	61	41.171.527.809,00	91,58%	37.705.463.331,00	Sekretariat Daerah
31	Sekretariat DPRD	2	17	70	36.012.344.245,00	95,99%	34.569.526.578,00	Sekretariat DPRD
32	Perencanaan	3	12	36	6.003.892.131,00	95,37%	5.726.086.061,00	Bappelitbangda

NO	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
33	Keuangan	4	14	78	1.462.040.720.535,00	99,08%	1.448.630.763.627,22	BPKPD
34	Kepegawaian	2	8	18	5.640.241.464,00	98,10%	5.532.823.912,00	BKPSDM
35	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	33.500.000,00	99,73%	33.410.000,00	BKPSDM
36	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	30.283.000,00	79,02%	23.929.650,00	Bappelitbangda
37	Inspektorat Daerah	3	11	44	12.696.311.155,00	93,43%	11.862.048.578,00	Inspektorat Daerah
38	Kecamatan	6	17	52	22.645.982.363,00	94,81%	21.471.402.181,00	13 Kecamatan
39	Kesatuan Bangsa Dan Politik	5	10	22	6.986.653.325,00	97,59%	6.818.212.802,00	Badan Kesbangpol
JUMLAH		135	361	1022	2.681.295.179.498,00	88,33%	2.368.394.086.241,80	

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD untuk seluruh Perangkat Daerah dengan 39 urusan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar 88,33% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.368.394.086.241,80-. Hasil realisasi tersebut termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan kriteria penilaian dan interval nilai realisasi kinerja evaluasi hasil RKPD. Metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini, yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.163
Kriteria Penilaian dan Interval Nilai
Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1.	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2.	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3.	Sedang	S	66% ≤ 75%
4.	Rendah	R	51% ≤ 65%
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

Untuk evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana pada Perubahan RKPD tahun 2025 terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp565.431.828.664. Realisasi kinerja untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar 61,83% dan realisasi keuangan sebesar Rp349.628.558.765 hingga triwulan IV.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Achmad Darwis dimana pada perubahan RKPD tahun 2025 terdapat 5 program, 19 kegiatan dan 72 sub kegiatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp329.933.469.290. Realisasi fisik sebesar 82,77% dan realisasi keuangan Rp273.101.030.285 hingga triwulan IV.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana pada Perubahan RKPD tahun 2025 terdapat 9 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp29.664.825.204. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 82,08% dan realisasi keuangan sebesar Rp24.349.501.841 hingga triwulan IV.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dimana pada Perubahan RKPD tahun 2025 terdapat 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp765.353.200. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 96,39% dan realisasi keuangan sebesar Rp737.696.792-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2025 pada urusan ini terdapat 4 program, 18 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp22.634.147.617. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 96,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp21.728.989.489.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dimana berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2025 dimana terdapat 4 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.958.325.001. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 97,26% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.767.321.997.

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.381.098.068. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 87,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.083.973.949,.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana terdapat 5 program, 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.761.816.958. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 82,33% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.097.256.818,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan dimana terdapat 4 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.060.552.729. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 95,87% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.934.073.330-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana terdapat 7 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.216.671.657. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 91,77% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.622.915.872.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.229.762.031. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 94,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.947.510.653-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari dimana terdapat 3 program, 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.749.349.762. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 97,61% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.588.062.593.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dimana terdapat sebanyak 4 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp9.754.919.322. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 81,55% dan realisasi keuangan sebesar Rp7.955.562.094,-.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dimana terdapat 2 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp15.822.962.349. Realisasi hingga Triwulan IV sebesar 94,64% dan realisasi keuangan sebesar Rp14.974.844.814-.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimana terdapat sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.486.513.417. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 94,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp7.044.986.308,-.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimana terdapat program sebanyak 6 kegiatan, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.015.446.795. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 97,92% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.911.071.558-.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana terdapat sebanyak

4 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.053.802.030. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 98,80% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.005.348.110-.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga dimana terdapat sebanyak 4 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp13.558.711.788. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 64,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp8.759.332.651-.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika dimana terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp13.811.600. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 87,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp12.055.862-.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika dimana terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp209.920.000. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 99,95% dan realisasi keuangan sebesar Rp209.820.001-.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana terdapat sebanyak 4 program, 7 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.700.466.400. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 76,73% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.839.371.461-.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dimana terdapat 3 program, 9 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.069.836.405. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 95,23% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.827.866.405-.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dimana terdapat sebanyak 2 program, 3 kegiatan

dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.258.000. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 87,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp10.709.000-.

III. URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dimana terdapat 3 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.580.734.496. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 96,15% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.327.332.862-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga dimana terdapat 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp591.569.350. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 99,44% dan realisasi keuangan sebesar Rp588.241.391-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana terdapat 7 program, 20 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp27.848.829.049. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 95,53% dan realisasi keuangan sebesar Rp26.605.293.879,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimana terdapat 2 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp67.786.400. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 99,13% dan realisasi keuangan sebesar Rp67.194.170,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat 3 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.457.987.089. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 96,31% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.293.527.772-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dimana terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub

kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp968.800. Realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan hingga Triwulan IV sebesar Rp968.800-.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dimana terdapat 3 program, 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp41.171.527.809. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 91,58% dan realisasi keuangan sebesar Rp37.705.463.331,-.

B. SEKRETARIAT DPRD

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dimana terdapat sebanyak 2 program, 17 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp36.012.344.245. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 95,99% dan realisasi keuangan sebesarRp34.569.526.578-.

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. PERENCANAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dimana terdapat 3 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp6.003.892.131. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 95,37% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.726.086.061-.

B. KEUANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimana terdapat 4 program, 14 kegiatan dan 78 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.462.040.720.535. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 99,08% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.448.630.763.627,-.

C. KEPEGAWAIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.640.241.464. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 98,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.532.823.912,-.

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp33.500.000. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 99,73% dan realisasi keuangan hingga Triwulan IV sebesar Rp33.410.000-.

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dimana terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp30.283.000. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 79,02% dan realisasi keuangan sebesar Rp23.929.650,-.

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. INSPEKTORAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat dimana terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.696.311.155. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 93,43% dan realisasi keuangan sebesar Rp11.862.048.578,-.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

A. KECAMATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh 13 Kecamatan dimana terdapat sebanyak 6 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp22.645.982.363. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 94,81% dan realisasi keuangan sebesar Rp21.471.402.181,-.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dimana terdapat 5 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.986.653.325. Realisasi fisik hingga Triwulan IV sebesar 97,59% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.818.212.802-.

2.5.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target-target pada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang sudah ditetapkan untuk melihat kendala yang dihadapi, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 terdapat 40 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

Tabel 2.164
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"	Tujuan 1:								
		Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah	Indeks ABS-SBK	1.95	2.1	2,31	Tercapai	Bertambahnya Partisipasi Nagari dalam melakukan pengisian Kuesioner untuk penilaian Indeks ABS-SBK Tahun 2025		
		Sasaran :								
		1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	1.95	2.1	2,31	Tercapai	Bertambahnya Partisipasi Nagari dalam melakukan pengisian Kuesioner untuk penilaian Indeks ABS-SBK Tahun 2025		
		Tujuan 2:								
		Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	100	Tercapai			
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	0%	100%	100	Tercapai			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
		Sasaran :								
		2.1 Optimalnya pelestarian warisan budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	100	Tercapai			
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	0%	100%	100	Tercapai			
		Tujuan 3:								
		Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	59.50	60,9	66,4	Tercapai	1. Kondisi Ekonomi Sosial Keluarga yang baik (pendapatan, pendidikan, pekerjaan) 2. Fungsi keluarga berjalan dengan baik		
		Sasaran :								
		3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	59.50	60,9	66,4	Tercapai	1. Kondisi Ekonomi Sosial Keluarga yang baik (pendapatan, pendidikan, pekerjaan) 2. Fungsi keluarga berjalan dengan baik		
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 1:								
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	*Data tidak tersedia*	3.1	1,6001*	Tidak Tercapai			Nilai EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
	"SAKATO BERINTEGRITAS"	Sasaran :								
		1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	71.23	71.66	71,23*	Tidak Tercapai			Tahun 2024
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	86,02	4,28	4,21	Tidak Tercapai			
		1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	Indeks Reformasi Hukum	55.56	70	98,24	Tercapai	Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan ketertiban administasi dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah	Pengelolaan JDIH belum sesuai dengan Permen Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	
		Tujuan 2:								
		Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	122%	Tercapai			
		Sasaran :								
		2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	122%	Tercapai			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Tujuan 1:								
		Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	72,69	72,69	73,43	Tercapai	1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun dan beasiswa. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan, gizi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. 3.Meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.		
		Sasaran :								
		1.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,13	8,21	8,49	Tercapai			
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42	13,46	13,53	Tercapai			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
		1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,42	73,6	73,64	Tercapai			
		1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Rasio Gini	0,22	0,219	0,218	Tercapai			
		Tujuan 2:								
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp58.442.586	Rp61.369.049	59.671.964	Tidak Tercapai			
		Sasaran :								
		2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp58.442.586	Rp61.369.049	59.671.964	Tidak Tercapai			
4.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	Tujuan 1:								
		1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.68	3,73	3,77	Tidak Tercapai			
			Pertumbuhan ekonomi	4.03	4,14	3,40	Tidak Tercapai		Terbatasnya daya dorong sektor unggulan, investasi yang belum optimal, serta melemahnya daya beli masyarakat.	
		Sasaran :								
		1.1 Penguatan UKM dan	Proporsi jumlah IKM	*Data tidak tersedia*	3,43%	99,95%	Tercapai			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
		Kewirausahaan Lokal	Rasio Kewirausahaan	4.70%	6,92	3,55	Tidak Tercapai			
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.92009	0.862	3.4354	Tercapai		Meningkatnya volume usaha koperasi	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3.68	3,73	3,77	Tidak Tercapai			
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	36.18	38,64	47,13	Tercapai			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64.30	64.30	63,31	Tidak tercapai			
		Sasaran :								
		1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	*Data tidak tersedia*	10.23	9,26	Tercapai	Stabilnya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok		
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	14.81	13.57%	10,63	Tidak Tercapai		Ekspor merupakan kewenangan Provinsi	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.16	0.19	0,27	Tercapai	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah		
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	6.66	4,45	6,85	Tercapai			
		Tujuan 2:								

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
		2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,83	0,91	0,82	Tidak Tercapai			
		Sasaran :								
		2.1 Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	0.44	1	2	Tercapai	- Keunikan alam Kab Lima Puluh Kota		
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi	*Data tidak tersedia*	1,611	2,49	Tercapai			
5.	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	Tujuan 1:								
		1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	31.45	32.52	32,08	Tidak Tercapai		Penurunan produksi padi, jagung dan jeruk disebabkan antara lain adalah bencana alam berupa kekeringan dan banjir, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Sarana	

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
									Produksi yang mahal.	
		Sasaran :								
		1.1.Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	31.45	32.52	32,08	Tidak Tercapai		Penurunan produksi padi, jagung dan jeruk disebabkan antara lain adalah bencana alam berupa kekeringan dan banjir, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Sarana Produksi yang mahal.	
6.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"	Tujuan 1:								
		Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	RT dengan Akses Sanitasi Aman	0.39	7,25	0,46	Tidak Tercapai			
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	3.56	14	17,37	Tercapai			
			Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	18.58	35.52	11,23	Tidak Tercapai		Fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas dengan partisipasi masyarakat dalam	

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
									pengelolaan sampah yang belum maksimal	
		Sasaran :								
		1.1 Membangun infrastruktur strategis	Indeks Risiko Bencana Daerah	119.20	117,92	197,52	Tidak Tercapai		Tingginya paparan wilayah terhadap bencana, kerentanan masyarakat yang masih tinggi, kapasitas penanganan dan kesiapsiagaan yang terbatas, serta minimnya sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan.	
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	49.20	51,15	58,66	Tercapai	Penyediaan rumah yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas, akses air bersih dan sanitasi layak telah meningkat dengan melibatkan		

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
								para pemangku kepentingan		
		Sasaran :								
		1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks tutupan lahan	62.42	75.39	75,07	Tidak Tercapai		Belum tersedianya RTH Publik dan RTH Privat dengan luasan sesuai ketentuan (30% luas kawasan perkotaan)	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,88	75,8	78,91	Tercapai	peningkatan sarana, SDM dan kelembagaan (Lab Lingkungan) sehingga pemantauan kualitas air dan udara dapat dilakukan lebih intensif		
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	6.23	30.69	58,66	Tidak Tercapai		Sarana prasarana layanan pengumpulan sampah belum tersedia secara ideal	

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	2024	2025		Tercapai/Tidak Tercapai	Faktor Pendorong Ketercapaian	Faktor Penghambat Ketercapaian	Keterangan
				(Baseline)	Target	Realisasi				
7.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	Tujuan 1:								
		Meningkatkan status nagari	Indeks Desa	Maju	Mandiri	Mandiri	Tercapai	Meningkatnya kombinasi partisipasi aktif masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan kompeten, pengelolaan BUMDes secara profesional, serta pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur dasar dan potensi ekonomi lokal		
		Sasaran :								
		1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	55.70%	87,34%	88,60%	Tercapai			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 40 IKU yang ada, terdapat 26 indikator yang sudah mencapai target dan 14 indikator yang belum mencapai target.

Misi I : Terdapat sebanyak 4 indikator yang mendukung misi I Kepala Daerah. Dari 4 indikator tersebut, semuanya sudah tersedia data capaian tahun 2025 yaitu indikator Indeks ABS-SBK, Persentase cagar budaya yang dilestarikan, Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan dan Indeks Pembangunan Keluarga. Pada tahun 2025, semua indikator tersebut sudah mencapai target.

Misi II : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi II yaitu sebesar 40%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu Indeks Reformasi Hukum dan Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA yang Diselesaikan. Indikator yang belum mencapai target adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik.

Misi III : Terdapat 6 indikator yang mendukung misi III Kepala Daerah. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target pada Tahun 2025 yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Rasio Gini. Sedangkan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja belum tercapai.

Misi IV : Terdapat 15 indikator yang mendukung misi IV Kepala Daerah. Dari 15 indikator tersebut, terdapat 8 indikator sudah mencapai target, yaitu indikator Proporsi jumlah IKM, Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%),Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) dan Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi. Sedangkan 7 diantaranya belum mencapai target, yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan ekonomi, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%),Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) dan Rasio PDRB Akomodasi Mamin.

Misi V : Terdapat 1 indikator yang mendukung misi V kepala daerah yaitu Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), namun indikator tersebut belum memenuhi target.

Misi VI : Terdapat 8 indikator yang mendukung Misi VI Kepala Daerah. Dari 8 indikator tersebut terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target tahun 2025 yaitu RT dengan Akses Sanitasi Aman, Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan, Persentase

Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan 4 indikator lainnya belum mencapai target yaitu Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%), Indeks Risiko Bencana Daerah, Indeks Tutupan Lahan, dan Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT).

Misi VII : Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama yang mendukung misi VII Kepala Daerah adalah 100%, dimana 2 indikator yang mendukung misi ini sudah mencapai target yaitu Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri.

Selain adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah juga terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mendukung ketercapaian atau keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan amanat kepemimpinan. Terdapat sebanyak 84 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 358 indikator. Ketercapaian IKD dan IKK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.165
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,09	82,37	Tidak Tercapai	Dinas Pangan	
2	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,11	6,57	Tidak Tercapai	Dinas Pangan	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	339	337,91	Tidak Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	77,56	81,78	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik	30	0.14808	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,8	78,91	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,25	0.46	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	75,39	75,07	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	35,52	11,23	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	30,69	5,13	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,92	197,52	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,34	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
13	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	405,71	406,228	Tercapai	Badan Pusat Statistik	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,12%	1,15	Tercapai	Badan Pusat Statistik	
15	Rasio Penduduk	%	100,70%	99,68%	Tidak Tercapai	Badan Pusat Statistik	
16	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	121,88	124,10	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	14	17,37	Tercapai		
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,14	3.40	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp, Juta	57,07	55,42	Tidak Tercapai	Badan Pusat Statistik	
3	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,27	6.10	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Rasio Gini	Rasio	219	0,218	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,69	73,43	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,77	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,6	73,64	Tercapai	Dinas Kesehatan	
8	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	83	42,79	Tercapai	Dinas Kesehatan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	23,9	9,13	Tercapai	Dinas Kesehatan	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	45	46,65	Tercapai	Dinas Kesehatan	
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89	80,3	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
12	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	%	98%	95,08%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
13	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,21	8,49	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,46	13,53	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	12	10,37	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
16	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	69,93	-	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L: 54,50%; N: 47,00%	L : 54,29 N:37,74	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,71	5,9	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
19	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	1,03	1,1	Tercapai	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
20	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,1	2.31	Tercapai	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
21	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
22	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,9	66,4	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	438	0.401	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Data Belum Tersedia

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Indeks perlindungan khusus anak	Indeks	81,6	86,41	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
25	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,55	3,72	Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	
26	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab	Unit Layanan	-	-	Tercapai	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
27	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	9	-	Tidak Tercapai	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	61.369.049	59.671.964	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/orang	68.788.021	45.250.643	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,45	6,85	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
4	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,91	0.82	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota	%	1,611	2.49	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
6	Rasio Kewirausahaan	%	6,92	3,55	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	38,64	47,13	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	64,3	63,31	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
9	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	98,21%	98.21	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
10	Rasio PDRB sektor jasa keuangan	%	1,95	1,73	Tidak Tercapai	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Keuangan, Badan Pusat Statistik	
11	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	32,52%	32,08	Tidak Tercapai	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Ribu orang	1	2	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
13	Indeks digital masyarakat Indonesia	Indeks	49,75	39,45	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	31,20%	29,47%	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik	
15	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,57%	10,63	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Persentase Desa Mandiri (%)	%	87,34%	88,61%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
17	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	51,15	58,66	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
18	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	14	17.37	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,27	Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
20	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	862	34.354	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
21	ROA BUMD	%	1	-7,88	Tidak tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	
22	Proporsi jumlah IKM	%	3,43	99,95	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
23	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,91	48.34	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
24	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10,23	9,26	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	7	1,07	Tidak Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik	
26	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	Rupiah	789.608	844.442	Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
27	Total Kredit/PDRB	%	10,63	11,5	Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
28	Persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	2.082	0	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	98,24	Tercapai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)*	Indeks	2,7	3,39	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	98,41			Inspektorat	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Ket.
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,1	1,6001*	Tidak Tercapai	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Nilai EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,28	4,21	Tidak Tercapai	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
6	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	70%	43%	Tidak Tercapai	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	3 kerja sama
7	Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Nilai	71,25 (rentan)	65,8 (Rentan)	Tidak Tercapai	Inspektorat	
8	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	122	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja	
9	Angka Kriminalitas (per 100,000)	per 100.000	112	121	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja	
10	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	Indeks	45	-	Tidak Tercapai	Badan Pusat Statistik, Inspektorat	
11	Penyelesaian gangguan Kamtibmas	%	76,73%	72,27%	Tidak Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja	
12	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,73	0,63	Tidak Tercapai	BAZNAS	

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut dapat dilihat, jumlah IKD sebanyak 84 indikator yang terbagi menjadi 4 aspek bagian yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Dari 84 indikator tersebut terdapat 42 indikator yang sudah mencapai target, dan 37 indikator yang belum mencapai target, sedangkan data capaian untuk 5 indikator lainnya belum tersedia.

A. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi terdapat 17 indikator yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dari 17 indikator tersebut, terdapat 16 indikator yang sudah tersedia data capaiannya, dimana 6 indikator sudah mencapai target, sedangkan 10 indikator lainnya belum mencapai target. Dan data capaian untuk indikator Kepadatan Penduduk pada aspek geografi dan demografi belum tersedia.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat terdapat sebanyak 27 indikator yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dari 27 indikator tersebut, terdapat 26 indikator yang sudah tersedia data capaiannya, dimana 18 indikator sudah mencapai target, sedangkan 8 indikator lainnya belum mencapai target. Dan data capaian untuk indikator Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) pada aspek kesejahteraan masyarakat belum tersedia.

C. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah terdapat sebanyak 28 indikator yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dari 28 indikator tersebut, terdapat 27 indikator yang sudah tersedia data capaiannya, dimana 14 indikator sudah mencapai target, sedangkan 13 indikator lainnya belum mencapai target. Dan data capaian untuk indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) pada aspek daya saing rendah belum tersedia.

D. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat sebanyak 12 indikator yang mendukung Indeks Kinerja Daerah (IKD). Dari 12 indikator tersebut, terdapat 10 indikator yang sudah tersedia data capaiannya, dimana 4 indikator sudah mencapai target, sedangkan 6 indikator lainnya belum mencapai target. Dan data capaian untuk indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat pada aspek pelayanan umum belum tersedia.

Tabel 2.166
Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
A.	**PENDIDIKAN**						
1	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	%	88,92	86	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	80,09	75	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66,14	49,01	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	97	81,54	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,64	0,7	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	57,9	57,2	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
10	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,21	8,49	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,53	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
B.	**KESEHATAN**						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,60	73.64	Tercapai	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah kematian ibu	Orang	6	2	Tercapai	Dinas Kesehatan	
3	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	80	28.2	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,90	9,13	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	data sesuai eppgm

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan	data sesuai realisasi SPM 2025
6	Cakupan kepesertaan aktif jkn	%	79,5	74,3	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
7	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	85	80,3	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
8	Jumlah kematian balita	Orang	72	73	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
9	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36	25.89	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
10	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	64,3	45	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
11	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	%	1,4	1,9	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan	
12	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	%	22	21,50%	tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
13	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	%	23,4	14.45	tercapai	Dinas Kesehatan	
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52,6	9,09	tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
15	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	83,39	83.6	tercapai	Dinas Kesehatan	
16	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	47,99	53,7	tercapai	Dinas Kesehatan	
17	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	tercapai	Dinas Kesehatan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	59,1	68.1	Tercapai	Dinas Kesehatan	
19	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	52,65	9,09	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
20	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	90	96,6	Tercapai	Dinas Kesehatan	
21	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12,4	9,25	Tercapai	Dinas Kesehatan	
22	Cakupan penemuan kasus TB	%	40	46,65	Tercapai	Dinas Kesehatan	
23	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	97	26,52	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	per 1000 penduduk
24	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	99	81	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
25	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan	
26	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	62	59.8	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
27	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	62	96	Tercapai	Dinas Kesehatan	
28	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	52	50	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
29	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan	%	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	85	85	Tercapai	Dinas Kesehatan	
31	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	100%	45	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan	
C.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1	Indeks Pembangunan IKK	%	0	0	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	52,85	60.65	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
D.	**PERUMAHAN RAKYAT**						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota kabupaten/kota	%	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	0,83	0,66	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	19,02	16,3	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	17,5	9,89	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
E.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	%	100	122	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	95	95	Tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
7	Waktu Tanggap (Respone Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15 menit	13 menit. 16 detik	Tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
F.	**SOSIAL**						
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	50,50	50.05	Tidak Tercapai	Dinas Sosial	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	78	78	Tercapai	Dinas Sosial	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
4	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	95	95	Tercapai	Dinas Sosial	
5	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
6	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
7	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
8	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	20	Tercapai	Dinas Sosial	
9	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	20	20	Tercapai	Dinas Sosial	
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	Tercapai	Dinas Sosial	
11	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	30.92	Tercapai	Dinas Sosial	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	18.84	Tidak Tercapai	Dinas Sosial	
13	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	Tercapai	Dinas Sosial	
14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	20	22.9	Tercapai	Dinas Sosial	
15	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
16	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,67	0,67	Tercapai	Dinas Sosial	
17	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
18	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,34	1.39	Tercapai	Dinas Sosial	
19	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
21	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	%	100	100	Tercapai	Dinas Sosial	
22	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	95	95	Tercapai	Dinas Sosial	
G.	**TENAGA KERJA**						
1	Proporsi Jumlah IKM	%	3,43	99,95	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2	Rasio Kewirausahaan	%	6,92	3,55	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,77	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,30	63,31	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	39,06	47,13	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
6	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp	61.369.049	59.671.964	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
7	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	0	0	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen RTKD belum tersedia
8	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktifitasnya.	%	55	0,95	Tidak tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	%	5,5	2,5	Tidak tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	0	0	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada target pada tahun 2025
H.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,9	66,4	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	0,401	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,87	94,87	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,6	69,39	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	4,48%	22,22%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	64,30%	64.30%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	85	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
8	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	25			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
9	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,2	65,68	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
11	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	100	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
12	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	81,6	86,41	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PANGAN**						
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,09	82,37	Tidak tercapai	Dinas Pangan	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	109,11	109,11	Tercapai	Dinas Pangan	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,9	92,9	Tercapai	Dinas Pangan	
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,86	1,26	Tercapai	Dinas Pangan	
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	87	63,64	Tidak Tercapai	Dinas Pangan	
J.	**PERTANAHAN**						
1	Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	%	80	100	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
K.	**LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	75,8	78,91	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	28,09	19,18	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	93,75	81,81	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
L.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	93,96	93,96	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.	%	5%	6,88%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	50%	69,58%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	95%	96,93%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100%	100%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100%	100%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100%	100%	tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
M.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Desa Mandiri	%	87,34%	88,61%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0%	0%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0%	0%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkaatkan Kapasitasnya	%	80%	100%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	0%	0%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100%	100%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0%	0%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
N.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,35	2,38	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	14,4	14,03	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	74,2	61	tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	%	63,81%	61,40%	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
5	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13%	15,30%	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
6	Prpoporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern	%	81,60%	84,86%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	63,20%	96,20%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
8	Persentase Kahamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14,10%	13,24%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
9	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65%	21%	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Indeks Lansia Berdaya	%	61,1	69,15	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
11	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	83,7	82,1	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
O.	**PERHUBUNGAN**						
1	Rasio konektivitas	Rasio	49	100	Tercapai	Dinas Perhubungan	
P.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	Indeks SPBE (Indeks Pemdi)*	Indeks	3,29 (Indeks SPBE)	3,39	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	82,70	87	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Q.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAN**						
1	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862	34.354	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
2	Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	%	10,23	9,26	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	%	13,57	10,63	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,57	10,63	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,4	13.12	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
6	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,8	0.11	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
7	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0	143,85	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
8	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	1	20,11	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
9	Presentase Koperasi Aktif	%	50	62,02	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
10	Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	1	22,7	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
11	Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0	6,48	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
12	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,4	13.12	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
R.	**PENANAMAN MODAL**						
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	12	89,6	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	87	86,91	Tidak Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	96	185,6	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
4	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	96	185,6	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
5	Realisasi Total Terhadap Target Investasi PMDN/PMA	%	90	83	Tidak Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	100	100	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
7	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	15	95,6	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu	
S.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,11	0,07	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	27,32	31,44	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	orang	43	57	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
4	Rasio Wira Usaha Pemuda	%	0,12	0,07	Tidak tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
5	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	12	0	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	12	23,8	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
T.	**STATISTIK**						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,60	2,51	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024, Pemerintah Daerah yang memiliki capaian kinerja pada 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024. Jadi Nilai Indeks yang digunakan merupakan penilaian tahun sebelumnya (2024)
U.	**PERSANDIAN**						
1	Indeks KAMI	Indeks	14,5	15,33	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	38,00	35,71	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
V.	**KEBUDAYAAN**						
1	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	70,15	70,15	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	65,35	72,52	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	0	0	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	%	65,15	65,15	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
W.	**PERPUSTAKAAN**						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	79,67	58,29	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat dari Perpusnas RI Nomor : B.844/4/APB.00.02/II. 2026, Tanggal 20 Februari 2026 Hal: Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	89,72	19,87	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat dari Perpusnas RI Nomor : B.844/4/APB.00.02/II. 2026, Tanggal 20 Februari 2026 Hal: Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025
X.	**KEARSIPAN**						
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	54,06	76,55	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	23,97	16,67	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	0	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
4	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	47,26	56,6	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	23,97	16,67	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Y.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	32,08	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan	
2	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	43.735,75	43.183,36	Tidak tercapai	Dinas Perikanan	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.224,59	4.305,19	Tercapai	Dinas Perikanan	
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39.511,16	38.878,17	Tidak tercapai	Dinas Perikanan	
5	Luas Kawasan Konservasi	Ha	0	0	Tercapai	Dinas Perikanan	
6	Angka Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita / Tahun	40,73	42,03	Tercapai	Dinas Perikanan	
7	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	395	395,93	Tercapai	Dinas Perikanan	
Z.	**PARIWISATA**						
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	1	1.5	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1.611	2.49	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	0,91	0,82	Tidak tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
4	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	13	2,9	Tidak tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
5	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	0	1	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	4	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalisasi	%	15	16	Tercapai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
AA.	**PERTANIAN**						
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	32,08	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	-11,07	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2	-33,425	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	2	70,42	Tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	Tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
6	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	%	1,2	NA	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	95,00	95	Tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	95,00	95	Tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
9	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	100	NA	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	2	NA	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	3	NA	Tidak tercapai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	32,08	Tidak tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2	7,91	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	%	0	0	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	2	4,2	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
5	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	0	0	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
6	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	2	97,6	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	2	71,43	Tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
8	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	2	0	tidak tercapai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
AB.	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	Tercapai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	
AC.	**PERDAGANGAN**						
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0	100	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	0	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tidak tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana perdagangan
3	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10,23	9,26	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
4	Nilai Ekspor Barang	%	0	0	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Ekspor merupakan kewenangan Provinsi
5	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	10	9,7	tidak tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	%	0	0	Tercapai	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tidak tersedianya anggaran untuk fasilitasi produk lokal
AD.	**PERINDUSTRIAN**						
1	Rasio PDRB Industri Pengelohan	%	6,63	6,85	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,63	6,85	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	8	29,69	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
AE.	**PERENCANAAN**						
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	%	100	100	tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80	90.69	tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
AE.	**KEUANGAN**						
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,27	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	%	47	48,25	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	22	26,34	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,7	96,83	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	3,3	0,41	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
7	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	100	100	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
8	Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap	%	5,45	5,65	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10,15	10,62	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
10	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Nagari	79	79	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	25	25	tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
AF.	**PENGADAAN**						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	tercapai	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	Tercapai	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	17,80	9,67	Tidak Tercapai	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
AG.	**KEPEGAWAIAN**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	75,72	Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Indeks Sistem Merit	Indeks	250	234,5	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
AH.	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	98,89	98,9	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah	%	71,21	91,66	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	
AI.	**TRANSMIGRASI**						
1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang.	%	0	0	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan.	%	7,8	0	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
AJ.	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62,98	62.09	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Nilai	90	87,01	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah	
3	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	Nilai	95	95	Tercapai	Sekretariat Daerah	
4	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	%	80	85	Tercapai	Sekretariat Daerah	
5	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	%	100	100	Tercapai	Sekretariat Daerah	
6	Indeks Tata Kelola pengadaan	Nilai	78,6	78,02	Tercapai	Sekretariat Daerah	
7	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	Tercapai	Sekretariat Daerah	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	%	100	100	Tercapai	Sekretariat Daerah	
AK.	**SEKRETARIAT DPRD**						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	94,11	Tercapai	Sekretariat DPRD	
2	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N	Nilai	9	9	Tercapai	Sekretariat DPRD	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	29,41	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD	Rencana 17 Ranperda : terealisasi 5 Ranperda (Ranperda KTR, RPJMD, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD 2025, APBD 2026)
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	Tercapai	Sekretariat DPRD	
5	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	Tercapai	Sekretariat DPRD	
AL.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	30	26,44	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
AM.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	0	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terhadap indikator ini tidak ditetapkan target kinerja, mengingat tidak tersedia alokasi anggaran pada program yang bersangkutan. Kondisi tersebut terjadi sebagai dampak kebijakan refocusing anggaran Tahun 2025 yang mengakibatkan penyesuaian prioritas belanja daerah
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	8	13.21	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	8	13.21	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,91	48.34	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
AN.	**PEMERINTAHAN UMUM**						
1	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani	%	92	87	tidak tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	90	tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	%	65,3	65,3	tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	100	tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	%	90	100	tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	0	70	tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	85	75	Tidak Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
AO.	**PENGAWASAN**						
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefenisi	Terdefenisi	Tercapai	Inspektorat	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	%	85	79.9	Tidak Tercapai	Inspektorat	
3	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	%	85	72.71	Tidak Tercapai	Inspektorat	
4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tercapai	Inspektorat	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Tercapai	Inspektorat	
AP.	**KECAMATAN BUKIK BARISAN**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	60	62,4	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	90,04	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	55	70	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	100	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	100	Tercapai	KECAMATAN BUKIK BARISAN	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
AQ.	**KECAMATAN SULIKI**						
1	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	80	63,52	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	65	85	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
3	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	65	70	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	98,06	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN SULIKI	
AR.	**KECAMATAN GUGUAK**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	64,25	tidak tercapai	KECAMATAN GUGUAK	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	89.8	tidak tercapai	KECAMATAN GUGUAK	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	66	87	Tercapai	KECAMATAN GUGUAK	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN GUGUAK	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	90	100	Tercapai	KECAMATAN GUGUAK	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN GUGUAK	
AS.	**KECAMATAN MUNGKA**						
1	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	50	60,4	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	87	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
3	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	72	100	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	70	72,79	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	0	0	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	0	0	Tercapai	KECAMATAN MUNGKA	
AT.	**KECAMATAN AKABILURU**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72	71,89	Tidak tercapai	KECAMATAN AKABILURU	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,5	89,37	Tidak tercapai	KECAMATAN AKABILURU	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	80	87,5	Tercapai	KECAMATAN AKABILURU	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN AKABILURU	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	89,5	100	Tercapai	KECAMATAN AKABILURU	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	80	100	Tercapai	KECAMATAN AKABILURU	
AU.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH**						
1	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	73,08	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	86,84	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
3	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	80	90	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	85	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	86	Tercapai	KECAMATAN PAYAKUMBUH	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
AV.	**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	63,31	63,31	Tidak tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	92,14	Tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	65	87,5	Tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	100	Tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	100	Tercapai	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
AW.	**KECAMATAN HARAU**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	64,56	Tidak tercapai	KECAMATAN HARAU	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	90,95	Tidak tercapai	KECAMATAN HARAU	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	70	100	tercapai	KECAMATAN HARAU	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	70	100	tercapai	KECAMATAN HARAU	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	70	98,38	tercapai	KECAMATAN HARAU	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	70	100	tercapai	KECAMATAN HARAU	
AX.	**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65,75	65,75	Tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,89	90,87	Tidak tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Angka	80	100	Tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	50	100	Tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	50	100	Tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	50	100	Tercapai	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
AY.	**KECAMATAN KAPUR IX**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	55	55,35	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	91,52	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	50	60	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	50	60	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	50	60	Tercapai	KECAMATAN KAPUR IX	
AZ.	**KECAMATAN LUAK**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	62,07	Tidak Tercapai	KECAMATAN LUAK	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	89,43	Tercapai	KECAMATAN LUAK	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	85	100	tercapai	KECAMATAN LUAK	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN LUAK	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	85	100	Tercapai	KECAMATAN LUAK	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN LUAK	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
BA.	**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75	66.22	Tidak Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	88.5	Tidak Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	100	100	Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
4	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
BB.	**KECAMATAN GUNUANG OMEH**						
1	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	89,77%	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	65	71,45%	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	75	100%	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	

No	Indikator	Satuan	2025		Tercapai/ Tidak Tercapai	OPD Pelaksana	Keterangan
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	80	100%	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	0	Tercapai	KECAMATAN GUNUANG OMEH	

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat sebanyak 360 Indikator Kinerja Kunci semua Perangkat Daerah. Secara keseluruhan sebanyak 268 indikator sudah mencapai target, sedangkan sebanyak 90 indikator belum mencapai target. Data capaian tahun 2025 untuk 2 indikator lainnya belum tersedia. Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:

1. Pendidikan
   Pada urusan pendidikan terdapat sebanyak 14 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 14 indikator tersebut, terdapat 10 indikator yang sudah mencapai target dan 4 indikator lainnya belum mencapai target pada Tahun 2025.

2. Kesehatan
   Pada urusan Kesehatan terdapat sebanyak 31 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Dari 31 indikator tersebut, terdapat sebanyak 15 indikator yang sudah mencapai target, dan sebanyak 16 indikator yang belum mencapai target.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 2 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Dan 2 indikator tersebut sudah mencapai target pada Tahun 2025.

4. Perumahan Rakyat
   Pada urusan Perumahan Rakyat terdapat sebanyak 5 indikator kinerja kunci yang dilaksankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari 5 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator yang belum mencapai target.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
   Pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat sebanyak 7 indikator kinerja kunci yang dilaknakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Semua indikator tersebut sudah mencapai target tahun 2025.

6. Sosial
   Pada urusan Sosial terdapat sebanyak 22 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dari 22 indikator tersebut terdapat sebanyak 20 indikator sudah mencapai target dan sebanyak 2 indikator belum mencapai target yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) dan Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya. Tidak tercapainya IKS disebabkan capaian nilai indeks yang masih berada di bawah target nasional yang dipengaruhi oleh berbagai komponen kesejahteraan sosial dan hasil pengukuran dari Kementerian Sosial. Sementara itu, tidak tercapainya indikator pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar disebabkan jumlah lansia terlantar yang membutuhkan layanan lebih besar dibandingkan jumlah yang dapat dilayani, sehingga persentase capaian hanya mencapai 18,84% dari target 25%.

7. Tenaga Kerja
   Pada urusan tenaga kerja terdapat sebanyak 10 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dari 10 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan 5 indikator lainnya belum mencapai target.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
   Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 12 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dari 12 indikator tersebut, 9 indikator sudah mencapai target, sedangkan 1 indikator belum mencapai target. Data capaian untuk 2 indikator lainnya belum tersedia.

9. Pangan
   Pada urusan Pangan terdapat sebanyak 5 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan. Dari 5 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target.

10. Pertanahan
    Pada urusan pertanahan terdapat 1 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan capaian tahun 2025 untuk indikator tersebut sudah mencapai target.

11. Lingkungan Hidup
    Pada urusan Lingkungan hidup terdapat 3 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
    Pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdapat sebanyak 9 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua indikator tersebut sudah mencapai target capaian tahun 2025.

13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
    Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat sebanyak 7 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari 7 indikator tersebut, semua indikator sudah mencapai target pada Tahun 2025.

14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
    Pada urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdapat sebanyak 11 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dari 11 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target dan 6 indikator lainnya belum mencapai target.

15. Perhubungan
    Pada urusan Perhubungan terdapat 1 indikator kinerja kunci yang dilaknakan oleh Dinas Perhubungan, dan indikator tersebut sudah mencapai target tahun 2025.

16. Komunikasi dan Informatika
    Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat sebanyak 2 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan kedua indikator tersebut sudah mencapai target capaian tahun 2025.

17. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
    Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terdapat sebanyak 12 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dari 12 indikator tersebut, 9 indikator sudah mencapai target dan 3 indikator lainnya belum mencapai target.

18. Penanaman Modal
    Pada urusan Penanaman Modal terdapat 7 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 7 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

19. Kemudaan dan Olahraga
    Pada urusan kepemudaan dan olahraga terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator yang belum mencapai target.

20. Statistik
    Pada urusan statistik terdapat 1 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, indikator tersebut belum mencapai target capaian tahun 2025 yang disebabkan karena pada tahun 2025 tidak dilakuan penilaian disebabkan penilaian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan sekali dalam 2 tahun yang didasarkan pada peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 pada point 2, pada point 3 pemerintah daerah yang memiliki target capaian pada tahun 2025 dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun 2024.

21. Persandian
    Pada urusan persandian terdapat 2 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator sudah mencapai target, sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target karena kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan pentingnya persandian.

22. Kebudayaan
    Pada urusan kebudayaan terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan semua indikator tersebut sudah mencapai target.

23. Perpustakaan
    Pada urusan perpustakaan terdapat sebanyak 3 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dari 3 indikator tersebut terdapat 1 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

24. Kearsipan
    Pada urusan kearsipan terdapat 5 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dari 5 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

25. Kelautan dan Perikanan
    Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat 7 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Dari 7 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 3 indikator lainnya belum mencapai target.

26. Pariwisata
    Pada urusan pariwisata terdapat sebanyak 7 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dari 7 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

27. Pertanian
    Pada urusan pertanian terdapat 19 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Distanhorbun terdapat sebanyak 11 indikator, dimana 4 indikator sudah mencapai target, dan 7 indikator lainnya belum mencapai target. Pada Disnakkeswan terdapat sebanyak 8 indikator, dimana 6 indikator sudah mencapai target, dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral
    Pada urusan energi dan sumber daya mineral terdapat 1 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah. Indikator tersebut sudah mencapai target tahun 2025.

29. Perdagangan
    Pada urusan perdagangan terdapat 6 ndikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dari 6 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, namun 1 indikator lainnya belum mencapai target.

30. Perindustrian
    Pada urusan perindustrian terdapat sebanyak 4 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dan semua indikator tersebut telah mencapai target.

31. Perencanaan
    Pada urusan perencanaan terdapat 4 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah. Semua indikator tersebut sudah mencapai target capaian tahun 2025.

32. Keuangan
    Pada urusan keuangan terdapat 11 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Semua indikator tersebut sudah mencapai target capaian tahun 2025.

33. Pengadaan
    Pada urusan pengadaan terdapat 3 indikator yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

34. Kepegawaian
    Pada urusan kepegawaian terdapat 2 indikator yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator telah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target capaian Tahun 2025. Indeks sistem Merit belum tercapai karena belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil dan masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas. Kurangnya dukungan penganggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai.

35. Transparansi dan Partisipasi Publik
    Pada urusan transparansi dan partisipasi publik terdapat 2 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari 2 indikator tersebut, semuanya telah mencapai target capaian Tahun 2025.

36. Transmigrasi
    Pada urusan transmigrasi terdapat 2 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator telah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target capaian Tahun 2025.

37. Sekretariat Daerah
    Pada urusan transmigrasi terdapat 8 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dari 8 indikator tersebut, terdapat 6 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

38. Sekretariat DPRD
    Pada urusan sekretariat DPRD terdapat 5 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Dari 5 indikator tersebut, 4 indikator sudah mencapai target, sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target. Pada Urusan Sekretariat DPRD terdapat 5 indikator kinerja kunci yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Dari jumlah tersebut, 4 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator yaitu Persentase Penetapan Ranperda Tahun 2025 belum mencapai target. Kondisi ini disebabkan tingginya intensitas kegiatan DPRD yang mengakibatkan proses pembahasan dan penetapan beberapa

rancangan peraturan daerah belum dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

39. Pendidikan dan Pelatihan
    Pada urusan pendidikan dan pelatihan terdapat 1 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Dan indikator tersebut belum mencapai target capaian Tahun 2025.

40. Penelitian dan Pengembangan
    Pada urusan penelitian dan pengembangan terdapat 4 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari 4 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

41. Pemerintahan Umum
    Pada urusan pemerintahan umum terdapat 7 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari 7 indikator tersebut, 5 indikator sudah mencapai terget, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani tidak tercapai karena Konflik sosial tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah dan berlanjut ke APH. Sedangkan untuk indikator Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan tidak tercapai karena Realisasi fisik kegiatan FKUB tercapai, indikator ini didukung dengan adanya honor Tim FKUB yang tidak dibayarkan karena anggota tim FKUB tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan.

42. Pengawasan
    Pada urusan pengawasan terdapat 5 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dari 5 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

43. Kecamatan Bukik Barisan
    Pada urusan Kecamatan Bukik Barisan terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukik Barisan. Dari 6 indikator tersebut, semuanya sudah mencapai target capaian Tahun 2025.

44. Kecamatan Suliki
    Pada urusan Kecamatan Suliki terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suliki. Dari 6 indikator tersebut, semuanya sudah mencapai target capaian Tahun 2025.

45. Kecamatan Guguak
    Pada urusan Kecamatan Guguak terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguak. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

46. Kecamatan Mungka

Pada urusan Kecamatan Mungka terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mungka. Dari 6 indikator tersebut, semuanya sudah mencapai target capaian Tahun 2025.

47. Kecamatan Akabiluru
    Pada urusan Kecamatan Akabiluru terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Akabiluru. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

48. Kecamatan Payakumbuh
    Pada urusan Kecamatan Payakumbuh terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh. Dan semua indikator tersebut sudah mencapai target tahun 2025.

49. Kecamatan Lareh Sago Halaban
    Pada urusan Kecamatan Lareh Sago Halaban terdapat 6 Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

50. Kecamatan Harau
    Pada urusan Kecamatan Harau terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Harau. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator lainnya belum mencapai target.

51. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
    Pada urusan Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

52. Kecamatan Kapur IX
    Pada urusan Kecamatan Kapur IX Baru terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kapur IX. Dan semua indikator tersebut sudah mencapai target capaian Tahun 2025.

53. Kecamatan Luak
    Pada urusan Kecamatan Lua terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Luak. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target dan 1 indikator lainnya belum mencapai target.

54. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
    Pada urusan Kecamatan Situjuah Limo Nagari terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Dari 6 indikator tersebut, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target dan 2 indikator yang belum mencapai target capaia Tahun 2025.

55. Kecamatan Gunung Omeh
    Pada urusan Kecamatan Gunung Omeh terdapat 6 indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Omeh. Dan semua indikator tersebut sudah mencapai target capaian Tahun 2025.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Pembinaan Agama dan Adat serta Kerukunan antar Umat Beragama

Penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam mayarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih rendah. Hal ini diukur dengan indeks ABS-SBK yang terdapat permasalahan dalam penerapan ABS-SBK antara lain:

- Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, hal ini tergambar dari masih banyaknya kasus- kasus gangguan kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma agama, hukum dan adat serta belum seimbangnya kapasitas penegak hukum dalam mengatasi masalah kamtibmas, baik dari sisi kuantitas, maupun kualitas.
- Rendahnya pengelolaan kesenian di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilihat dari tidak adanya peningkatan jumlah sanggar seni dan jumlah gedung kesenian dari tahun ke tahun. Belum adanya gedung seni yang representatif menghambat ruang apresiasi masyarakat terhadap seni.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz, TPQ/MDTA/Surau/Masjid. Salah satu ikon pelaksanaan ABS-SBK adalah tumbuhnya rumah tahfidz di setiap nagari, sehingga sampai akhir periode 2026 diaharapkan setiap nagari sudah memiliki rumah tahfidz yang dilengkapi dengan guru tahfidz yang dibiayai honornya oleh pemerintah.
- Belum optimalnya pengumpulan zakat. Sampai tahun 2022, dari potensi zakat yang terdata, tingkat penerimaan zakat belum maksimal, dengan angka capaian 62,19%, sehingga ke depan peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat perlu ditingkatkan.

2. Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

i. Kinerja Pelayanan Publik Yang Belum Responsif, Informatif dan Bernuansa Birokratis

Dalam undang-undang pelayan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyelenggara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan

publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik. Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1) Kurang responsif.
   Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
2) Kurang informatif.
   Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
3) Terlalu Birokratis.
   Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

ii. Perlunya Regulasi yang Efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu *self-regulation*, *regulation* oleh pihak independen, dan *regulation* melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek *entry*

dan *exit*, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat.

Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi di antaranya adalah:

1) Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
2) Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
3) Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
4) Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
5) Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
6) Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu

akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

iii. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti *big data*, analisis data, data terkait terbuka, web semantik mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali tertinggal. Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya.

Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

iv. Perlunya Penguatan Talenta ASN dan Meritokrasi Manajemen ASN di Seluruh Instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan

strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karir, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.

Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujudkan. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada

posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karir yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.

v. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Melalui interaksi yang aktif dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan.

Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti *focus group discussion*, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat. Mengamati hal tersebut di atas,

pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

vi. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber seperti pajak restoran, hotel/penginapan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan retribusi daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1) Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka secara benar dan tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang kewajiban pajak, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
2) Masih lemahnya Sistem administrasi pajak yang tidak efisien atau kurangnya teknologi yang memadai dapat mengakibatkan proses pengumpulan pajak yang lambat dan tidak akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga dapat menghambat upaya pengumpulan pajak.
3) Masih Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Jika sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak diberlakukan dengan tegas, wajib pajak mungkin akan lebih cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya.
4) Perekonomian yang Lemah: Kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti rendahnya tingkat kunjungan wisatawan atau turis (untuk pajak restoran dan hotel/penginapan), dapat berdampak langsung pada pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan: Bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas tanpa mengembangkan sumber pendapatan baru atau alternatif dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan PAD.
5) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi yang kurang tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pajak, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

3. Penguatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i. Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal.

Setelah diidentifikasi dari data capaian di sektor pendidikan, tabel berikut ini memperlihatkan permasalahan pembangunan pada faktor tingkat pendidikan:

Tabel 2. 167
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tingkat Pendidikan	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2025 sebesar 8,49 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun	Disebabkan oleh: • Kemiskinan • Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah • Sulitnya akses ke lokasi sekolah • Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan • Tingkat ketersediaan ruang kelas
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (78,28%, Tahun 2025).	Disebabkan oleh: • Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. • Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	Ditunjukkan oleh: • Jumlah APS SD tahun 2022 adalah 15 orang. • Jumlah APS SMP tahun 2022 adalah 9 orang. Dapat disebabkan oleh: • Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja. • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. • Kondisi ekonomi keluarga.
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Terjadi rendahnya partisipasi sekolah pada rumah tangga miskin, terutama miskin ekstrem disebabkan oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	Disebabkan oleh: • Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah. • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2026, Hasil Analisis

ii. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan yang disebabkan karena faktor derajat kesehatan:

Tabel 2. 168
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Derajat Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2025 sebesar 14,33 masih di atas target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebesar 64.	Disebabkan oleh: • Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. • Kurangnya cakupan tenaga medis.
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	Angka kematian ibu disebabkan: • Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang. • Kapasitas internal ibu dan keluarga. • Pemenuhan gizi yang belum optimal. • Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan. • Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu.	Hal ini dapat disebabkan: • Kurangnya fasilitas posyandu. • Kurang meratanya posyandu yang ada.
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi stunting 14,43% Tahun 2025) masih di atas target yang ditetapkan.	Dapat disebabkan oleh: • Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal. • Pola asuh balita. • Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan	Ditunjukkan oleh: Disebabkan oleh: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	perawat yang belum optimal	
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	Pada tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di urutan kelima dalam kasus TBC se-Provinsi sumatera Barat yaitu 441 kasus.
	Masih tingginya kasus DBD	Disebabkan oleh: • Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD. • Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD. • Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.
	Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai Lokus Stunting Nasional	Berdasarkan surat dari Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020. Dari surat tersebut, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Nagari Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2020. Dari SK tersebut disebutkan Nagari dan Kecamatan Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik, namun masalah stunting belumlah usai di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga penanganan Stunting tetap menjadi Prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2026, Hasil Analisis

4. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

Investasi Usaha Berdasarkan Kategori Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 telah mencapai Rp. 186.790.411.868,- yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro sebesar Rp.

72.706.044.363,-, usaha kecil Rp. 64 521 867 505,-, usaha menengah Rp. 8.600 000.000,-, dan usaha besar Rp. 40.962.500.000,- dengan investasi terbesar di Kecamatan Harau yaitu Rp. 51 016 310 001,- terdiri dari Usaha Mikro Rp. 22.523.710.000,-, Usaha Kecil Rp 11.530.100.001,-, dan usaha besar Rp. 16.962500.000,-. Investasi usaha ini belum merata di setiap Kecamatan, seperti di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Kapur IX baru ada investasi usaha mikro sedangkan investasi usaha kecil, menengah dan besar belum ada. Selain itu investasi usaha menengah hanya ada di Kecamatan Akabiluru dengan nilai Rp. 600 000 000,-. Sementara itu investasi usaha besar hanya ada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan total investasi untuk ke 3 kecamatan tersebut sebesar Rp. 40.962.500.000,- . Meskipun pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 hingga 2021 selalu melebihi target namun pada tahun 2022 invetasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 375.762.954.820,- Melalui investasi usaha diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Namun karena belum optimalnya investasi usaha di kabupaten Lima Puluh Kota tentu dapat menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

5. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi. Selanjutnya terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha.

6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

i. Pariwisata

Wisata dan kuliner di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lima Puluh Kota memiliki berbagai tempat wisata yang indah dan mayoritas kuliner yang beragam. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan maksimal jika tidak dikelola dengan benar. Permasalahan pengembangan Wisata dan kuliner yang dihadapi, antara lain: (1) kurangnya atraksi wisata , (2) kurang terkelolanya destinasi wisata., (4) kurangnya sarana prasaran pendukung pariwisata (4) belum optimalnya tata kelola baik dari segi SDM dan destinasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wisatawan nusantara memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berwisata ke Lima Puluh Kota. Namun, tanpa upaya pengembangan pariwisata terutama dalam hal fasilitas akomodasi, restoran, atraksi, kemudahan akses dan branding wisata yang unik, tentu ini dapat mengurangi daya tarik kunjungan wisatawan ke Lima Puluh Kota.

ii. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

7. Penguatan Kelembagaan, Redistribusi Lahan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing. Selanjutnya ketersediaan air pada jaringan irigasi juga belum mencukupi untuk mengaliri luas areal pertanian dan perikanan. Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi, masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi. Terhadap bidang perikanan dan peternakan masih kurangnya benih dan induk ikan unggul, belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan, belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan, dan masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan serta kurangnya SDM pengelola alsintan.

8. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Pelesarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

i. Infrastruktur Dasar

- Air Minum

Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 81,70. Pada tahun 2024 nilainya menurun menjadi 76,26, Kondisi capaian yang menurun ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.Beberapa tantangan dalam penyediaan air minum ini adalah sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan disamping itu infrastruktur air minum masih kurang, terutama sambungan dari intake ke rumah masyarakat.

- Sanitasi

Cakupan layanan sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 66,64 persen, tahun 2024 sebesar 67,75 persen. Antara tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan capaian sanitasi ini dikarenakan kegiatan pemicuan dari dinas kesehatan, batuan CSR dan pembangunan sanitasi dari PD. Kenaikan capaian sanitasi ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya persentase saluran pembuangan air limbah masyarakat yang tidak sesuai standar, terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat dan rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program sanitasi.

- Perumahan

Rasio rumah layak huni Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 0,197, tahun 2024 adalah 0,177 . Target capaian rasio rumah layak huni tahun 2024 adalah 0,166. Walaupun sudah mencapai target, namun kebutuhan akan rumah layak merupakan sesuatu yang sangat penting. Untuk itu perlu ditingkatkan rasio rumah layak huni untuk kedepannya, adapun akar permasalahan terhadap ketersediaan rumah yang layak huni adalah antara lain: 1) Rendahnya progress penanganan rumah tidak layak huni; 2) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3) Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai; 4) Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai; 5) Sistem proteksi kebakaran belum memadai; 6) Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah; dan 7) Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

- Lingkungan Hidup

Rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 1) Pembukaan lahan pertanian, Perkebunan, dan permukiman yang menyebabkan hilangnya hutan alam serta penebangan liar yang tidak terkendali; 2) Limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan naik mencemari sungai dan sumber air lainnya serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian yang mencemari aliran sungai; 3) Sistem pengolahan sampah yang tidak memadai serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk daur ulang sampah; dan 4) praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penggundulan hutan yang menyebabkan tanah kehilangan lapisan pelindungnya.

- Persampahan

Permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu menjadi tantangan yang signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan belum terpadu dan belum memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 169
Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pengelolaan persampahan	Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas atau tidak sesuai standar, menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan di berbagai lokasi. Hal ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan sampah yang terpadu. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah akan sulit untuk berhasil.

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2026, Hasil Analisis

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu dan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

9. Penataaan Infrastruktur Strategis dan Terpadu

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, serta fasilitas

umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan dan perkantoran. Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan. Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

10. Perwujudan Kemandirian Nagari Berbasis Potensi Nagari

Diukur melalui Indeks Desa Membangun, status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 69 nagari mandiri, 8 nagari maju, dan 1 nagari berkembang. Artinya pengelolaan nagari masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Untuk realisasi indeks desa membangun pada tahun 2025 sebesar 0,8107 sudah melewati dari target yaitu 0,7878. Hal utama yang mempengaruhi belum optimalnya penyusunan profil nagari adalah belum adanya batas nagari di semua nagari, saat ini masih dalam proses pengukuran dan penetapan batas nagari.

2.6.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintah Daerah

2.6.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Pertama, kualitas dan kapasitas layanan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum merata. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan kemampuan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang tercermin dari rendahnya capaian akreditasi A. Akar permasalahan ini seringkali terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, kebutuhan akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan mencukupi masih menjadi isu krusial. Kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif dan melakukan asesmen yang komprehensif, termasuk dalam mengukur dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Kedua, tantangan eksternal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian pendidikan. Masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya minat anak untuk bersekolah, kurangnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, serta pengaruh lingkungan sosial dapat menjadi penghalang bagi tercapainya target wajib belajar. Kondisi ini diperparah oleh masih ditemukannya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar, menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif dan berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa.

Secara keseluruhan, permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara ketersediaan data yang akurat, kapasitas dan kualitas layanan di tingkat sekolah, tantangan implementasi kebijakan dan kurikulum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan mendasar terkait sarana prasarana sekolah yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM pendidik yang belum memenuhi standar, serta jumlah siswa yang belum ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi isu sentral yang memerlukan solusi holistik dan berkelanjutan.

B. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan

Bidang kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Permasalahan ini mencakup aspek ketersediaan layanan, kualitas pelayanan, sumber daya kesehatan, perilaku masyarakat, hingga tantangan kesehatan spesifik.

Pertama, aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi isu krusial. Meskipun upaya perluasan jangkauan layanan telah dilakukan, keterbatasan geografis dan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, masih menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan kecenderungan penumpukan di wilayah perkotaan, menyebabkan kekurangan tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di daerah pelosok.

Kedua, kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Meskipun standar pelayanan minimal telah ditetapkan, variasi kualitas layanan antar fasilitas kesehatan masih ditemukan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, terutama peralatan medis yang canggih dan pemeliharaannya. Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas. Implementasi standar mutu pelayanan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Keempat, perilaku hidup sehat masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan masih perlu ditingkatkan. Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat, sebagian disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit dan deteksi dini masih rendah. Selain itu, perilaku mencari pengobatan yang terlambat juga berkontribusi terhadap tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu.

Secara keseluruhan, bidang kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan respons strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya kesehatan, perubahan perilaku masyarakat ke arah yang

lebih sehat, penanganan masalah kesehatan spesifik, dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang kuat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang sehat dan produktif. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sejumlah kendala signifikan menghambat optimalisasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertama, masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian utama. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait infrastruktur yang layak dan aman. Kedua, terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan jalan, jembatan, cipta karya, serta pengairan secara keseluruhan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Keterbatasan ini membatasi kemampuan daerah dalam mengatasi kekurangan dan pemerataan infrastruktur serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Permasalahan krusial lainnya terkait dengan tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi batas ketentuan. Praktik ini mengakibatkan kerusakan jalan yang prematur, memperpendek umur ekonomis jalan, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu, berkurangnya kapasitas jalan akibat guna lahan yang tidak terkendali maupun pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai peruntukan juga memperparah kondisi lalu lintas dan mengurangi efisiensi transportasi. Dalam aspek perencanaan tata ruang, belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan rencana detail tata ruang yang menghambat kepastian investasi dan pengembangan wilayah yang terarah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Ketiadaan data yang akurat dan terpadu menyulitkan perencanaan pengembangan infrastruktur yang akan mempengaruhi perencanaan. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan, peningkatan alokasi anggaran yang proporsional, penguatan koordinasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menghadapi serangkaian permasalahan kompleks yang saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya mengancam

kesehatan dan keselamatan penghuninya. Permasalahan kawasan kumuh ini bukan hanya sekadar fisik bangunan yang tidak sesuai, namun juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi layak, drainase yang berfungsi, dan pengelolaan sampah yang teratur. Kondisi ini diperparah oleh pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan perumahan yang belum optimal, di mana pembangunan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, memicu munculnya permukiman ilegal dan tidak terencana.

Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan terjangkau semakin terasa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga upaya pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan layak dan menata kawasan permukiman menjadi terbatas. Selain itu, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai wilayah yang rawan bencana, seringkali dihadapkan pada dampak bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor yang merusak perumahan dan infrastruktur permukiman. Kondisi ini menambah beban pemerintah daerah dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali hunian yang aman dan layak.

Efektivitas penanganan permasalahan ini juga terkendala oleh kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk pengembang, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi perumahan, kawasan permukiman, dan kebutuhan masyarakat juga masih menjadi tantangan, menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman belum maksimal, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah terkait isu kepemilikan lahan dan sengketa, yang dapat menghambat proses pembangunan dan penataan. Terakhir, pengawasan terhadap kualitas pembangunan perumahan subsidi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan memenuhi standar yang ditetapkan.

E. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Terdapatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan potensi keterbatasan dalam penanganan yang efektif dan efisien. Selain itu, masih adanya Perangkat Daerah (PD) yang belum berkoordinasi atau kurang bersinergi dengan Satpol PP menghambat efektivitas penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum yang seringkali melibatkan lintas sektor. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Satpol

PP, terutama terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan Perda. Jumlah PPNS yang tidak sebanding dengan banyaknya Perda yang harus ditegakkan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di daerah. Secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, yang mempengaruhi kemampuan operasional dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keterbatasan ini diperparah dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti kendaraan operasional, peralatan pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Terakhir, minimnya anggaran yang tersedia, sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak, menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum secara optimal.

Beberapa permasalahan bersifat lintas tupoksi dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Damkar terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan damkar, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang optimal. Proses penetapan status yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain itu, terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang kebencanaan dapat mengurangi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien saat terjadi bencana. Lebih lanjut, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur evakuasi yang jelas dan memadai, serta selter atau tempat pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan dalam

pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar, menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi. Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi juga menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bantuan yang tepat waktu. Lebih lanjut, validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan.

F. Urusan pemerintahan bidang Sosial

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi kendala struktural dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah di bidang sosial. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk mencapai target 100%. menunjukkan adanya tantangan fiskal yang signifikan dalam mewujudkan target-target pelayanan sosial yang telah ditetapkan. Kedua, Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih jarang diverifikasi dan divalidasi secara berkala. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data penerima bantuan, inefisiensi penyaluran, dan ketidakadilan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, urusan pemerintahan bidang sosial dihadapkan pada permasalahan multidimensi yang memerlukan solusi yang terkoordinasi, terencana, dan melibatkan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, penguatan regulasi, pemanfaatan potensi filantropi, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan pemahaman dan implementasi SPM menjadi langkah-langkah krusial untuk mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.6.2.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Namun, di Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor ini masih dibayangi oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu persoalan mendasar adalah efektivitas tenaga kerja yang belum optimal. Rendahnya pemanfaatan teknologi oleh pencari

kerja mengindikasikan kesenjangan keterampilan yang signifikan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya budaya kerja dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Di sisi kelembagaan, terbatasnya jumlah fungsional pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tantangan serius dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Idealnya, satu orang pengawas menangani maksimal lima perusahaan. Namun, fakta menunjukkan rasio tersebut jauh dari memadai. Akibatnya, banyak pelanggaran yang luput dari pantauan dan sulit dikenai sanksi. Masalah lainnya terletak pada belum optimalnya mekanisme pelaporan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Banyak kabupaten/kota yang belum menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang kontekstual dan terarah.

Dalam sektor usaha kecil (UK), pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun penerapan struktur dan skala upah yang sesuai regulasi. Padahal, perlindungan terhadap tenaga kerja adalah pilar penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi juga masih rendah karena kurangnya kesadaran serta akses yang terbatas, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun birokrasi administratif.

B. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada keterbatasan alokasi anggaran yang menghambat berbagai aspek penanganan, mulai dari pendampingan korban, advokasi kasus, hingga upaya pencegahan. Kurangnya anggaran ini diperparah dengan minimnya koordinasi antar berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional yang kompeten. Akibatnya, implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi tidak optimal, tercermin dari tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang seringkali tidak terdeteksi dan kurang tertangani secara efektif. Akar permasalahan ini lebih dalam dari sekadar keterbatasan sumber daya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat melanggengkan ketidaksetaraan gender dan stigma terhadap korban kekerasan, menyulitkan korban untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada masih rendah, dan kurangnya sosialisasi serta edukasi memperburuk situasi. Dengan demikian, penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan komitmen anggaran yang lebih besar, penguatan koordinasi antarlembaga, penghapusan birokrasi yang menghambat, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, serta upaya berkelanjutan dalam mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

C. Urusan pemerintahan Bidang Pangan

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan.

Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi, perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan

D. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya kompleksitas yang signifikan dalam pengelolaan dan penyelesaian isu-isu terkait lahan. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Keterbatasan sumber daya, inefisiensi sistem perizinan. Di sisi lain, konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan, dan sengketa lahan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya tantangan dalam aspek legal dan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa serta keterbatasan tenaga ahli di BPN daerah semakin memperumit upaya penyelesaian masalah pertanahan secara komprehensif.

Beragam dan saling terkaitnya isu-isu yang dihadapi dalam sektor pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan lahan, hingga

kompleksitas sengketa yang melibatkan banyak pihak. Semua faktor ini berkontribusi pada lambatnya proses penyelesaian masalah dan potensi terhambatnya investasi. Keterlambatan anggaran proyek pengadaan tanah dan inefisiensi sistem perizinan menambah beban administratif dan operasional. Lebih lanjut, konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, ketidakseimbangan infrastruktur yang menyulitkan pengawasan, serta kurangnya sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada masyarakat memperparah kondisi ini. Dengan demikian, penanganan urusan pertanahan memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai solusi yang berkelanjutan

E. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Sektor lingkungan hidup, memiliki banyak tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten, yang melemahkan upaya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan restorasi lingkungan. Praktik pembakaran sampah yang masih umum , kerusakan lahan yang meluas akibat aktivitas ilegal dan kurangnya restorasi, serta biaya pengelolaan limbah yang tinggi, memperparah degradasi lingkungan. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrologi, sementara penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan celah bagi pelanggaran dan pencemaran.

Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola limbah, melindungi lahan, dan menegakkan hukum lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem dan terhambatnya pembangunan. Partisipasi masyarakat yang rendah, baik dalam pengelolaan sampah semakin memperumit situasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerangka regulasi, investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi yang efektif antar semua pemangku kepentingan.

F. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan daerah dan pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Urusan ini bertanggung jawab untuk memberikan identitas resmi kepada setiap penduduk dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran hingga kematian. Fokus utamanya adalah memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan akurat, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Penyelenggaraan urusan ini terus berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti SmartDuk Capil. Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta penegakan hukum. Namun,

terdapat beberapa faktor penghambat dalam urusan ini. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola menjadi kendala. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

G. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daerah-daerah terjauh menghadapi serangkaian permasalahan yang menghambat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya dan Manusia menjadi kendala utama, menghambat pengembangan ekonomi lokal. Keterbatasan Infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, juga memperparah kondisi ini, meskipun ada peningkatan di beberapa daerah. Selain itu, Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan, dengan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, memperlambat percepatan pembangunan daerah. Lembaga kemasyarakatan pun terdampak, dengan keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung, dan akses informasi yang menghambat pengembangan program dan layanan yang efektif. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini menciptakan lingkaran tantangan yang kompleks dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Di daerah pedesaan, tingginya angka usia pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan pada remaja menjadi isu krusial, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya ekonomi masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi (Alkon) masih kurang. Koordinasi pelaksanaan tugas antara berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) belum optimal karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan PPKB. Permasalahan ini berkontribusi pada rendahnya capaian indeks kebahagiaan dan ketentraman keluarga, yang dipengaruhi oleh minimnya interaksi antar anggota keluarga, pola pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya waktu rekreasi keluarga, serta kurangnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Lebih lanjut, pemahaman masyarakat tentang pembangunan kependudukan masih rendah, diperparah oleh terbatasnya analisa dan kajian yang mendalam tentang isu-isu kependudukan. Hal ini mengakibatkan pembangunan kurang berorientasi pada kebutuhan penduduk. Minat dan akses masyarakat terhadap alat atau obat kontrasepsi juga terbatas, disebabkan oleh kekhawatiran akan efek samping, kurangnya informasi yang memadai, penolakan dari keluarga, pertimbangan agama, masalah kesehatan, serta keterbatasan akses layanan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) akibat kurangnya kesadaran pasangan usia subur tentang risiko KTD dan manfaat kontrasepsi. Pernikahan dini juga menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan, yang meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan dan stunting pada anak

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah rendahnya wawasan, pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, angkutan penumpang dan angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan uji layak jalan, Umur kendaraan yang lebih dari 15 tahun Fasilitas perlengkapan jalan yang belum memadai diantaranya Penerangan Jalan Umum, rambu-rambu perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai sehingga masih adanya parkir pada badan jalan yang menyebabkan menurunya kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada pusat-pusat kegiatan Belum tersedianya sarana dan Prasarana angkutan umum/Angkutan Umum Massal yang memadai seperti angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dan Terminal yang teintegrasi dan terpadu dalam kabupaten menyebabkan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi.

J. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah kendala dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan TIK menjadi tantangan utama, mengingat mahalnya biaya pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan optimal. Beberapa Perangkat Daerah (PD) masih kurang memahami atau enggan mematuhi ketentuan yang ada. Transformasi digital dalam pelayanan publik juga belum sepenuhnya terwujud. Belum semua layanan publik diselenggarakan secara daring dan terintegrasi, sehingga masyarakat masih harus berurusan secara manual untuk beberapa layanan.

Kabupaten Lima Puluh Kota masih terdapat wilayah blankspot atau minim infrastruktur hotspot, yang menyulitkan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses informasi dan layanan digital. Perbedaan generasi juga menjadi faktor penghambat, di mana tidak semua kelompok masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Kesenjangan ini menciptakan tantangan dalam menyosialisasikan dan memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara merata. Pengelolaan TIK di Kabupaten Lima Puluh Kota terkendala oleh terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang teknologi informasi. Kekurangan tenaga ahli ini dapat menghambat pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan sistem informasi pemerintah.

K. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangannya. Permasalahan akses internet yang belum merata dan rendahnya kemampuan anggota koperasi dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi kendala signifikan di era digital ini. Keterbatasan ini menghambat adopsi

sistem informasi modern dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk UKM. Lebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan manajerial, turut menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi yang profesional dan berdaya saing.

Pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan usaha. Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, inovasi produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM masih terbatas, sehingga produk-produk tersebut belum mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Akses koperasi dan UKM terhadap pasar dan permodalan juga menjadi permasalahan krusial. Terbatasnya jaringan pemasaran dan kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang terjangkau menghambat pertumbuhan dan ekspansi usaha.

Sebaran UKM yang cukup luas di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjangkau dan memantau keseluruhan unit usaha secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan yang merata. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menghambat upaya pemerintah dalam menata dan memberdayakan sektor koperasi secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang menghambat kemajuan koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurangnya pemahaman SDM koperasi mengenai kelengkapan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola koperasi yang kurang baik dan rentan terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut, kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri menghambat transfer pengetahuan dan adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pada akhirnya, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk-produk UKM, diperparah dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal dan merek secara gratis, menjadi kendala utama dalam menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta pelaku UKM.

L. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah kendala signifikan yang menghambat pertumbuhan investasi. Ketersediaan data yang tidak lengkap terkait potensi dan realisasi investasi menjadi hambatan awal dalam merumuskan strategi dan menarik minat investor. Ketidakpastian regulasi dan aturan yang mengatur investasi, terutama dengan adanya transisi akibat Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya terkait OSS, menciptakan kebingungan dan menunda proses pelaksanaan investasi. Lebih lanjut, status kepemilikan lahan yang didominasi oleh sistem kaum dan tanah ulayat seringkali dianggap sebagai sumber ketidakpastian hukum bagi

investor, menghambat proses pembebasan lahan dan realisasi proyek investasi.

Proses perizinan juga masih menyisakan sejumlah tantangan. Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, masih terdapat beberapa perizinan dan non-perizinan yang diproses secara manual di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, jangka waktu pelayanan PTSP yang terkadang melampaui standar yang ditetapkan, belum seluruhnya jenis perizinan dipetakan, dan adanya jenis perizinan yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu regulasi dari kementerian/lembaga terkait, menunjukkan inefisiensi dalam sistem perizinan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap perizinan elektronik atau berbasis web juga menjadi kendala dalam implementasi sistem OSS secara efektif. Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan turut memperlambat proses pelayanan.

Permasalahan tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penghalang serius bagi realisasi investasi. Ketidaksesuaian antara rencana investasi dengan tata ruang yang berlaku menyebabkan banyak investor mengurungkan niatnya. Sistem OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan juga menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan perizinan di daerah. Perubahan sistem pelaporan investasi ke OSS-RBA juga menjadi tantangan baru, di mana banyak perusahaan belum memahami mekanisme pelaporan yang baru, diperparah dengan keterbatasan SDM perusahaan dan OPD di kabupaten/kota dalam memahami dan memverifikasi laporan.

Faktor penghambat signifikan lainnya adalah minimnya investasi baru yang tumbuh dan tersendatnya proyek-proyek strategis. Tidak adanya investasi baru yang signifikan selama tahun 2025 dan selesainya proyek-proyek sebelumnya pada tahun 2024 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan investasi. Terhambatnya progres proyek jalan tol yang tidak sesuai dengan perencanaan investasi menjadi perhatian serius, mengingat infrastruktur ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi investor. Selain itu, permasalahan RTRW yang belum mengakomodir potensi investasi secara optimal semakin memperburuk iklim investasi. Belum adanya data calon investor baru yang serius juga menjadi indikasi kurangnya upaya proaktif dalam menarik investasi.

M. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga

Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi kendala besar. Keinginan dan daya tarik generasi muda untuk terlibat dalam wadah organisasi masih minim. Situasi ini diperburuk oleh langkanya program pelatihan, pengembangan kemampuan, dan pendidikan tentang esensi organisasi yang dapat diakses oleh pemuda, terutama akibat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengelolaan organisasi kepemudaan yang belum solid serta kurangnya dukungan dana untuk menjalankan operasional dan berbagai aktivitas organisasi menjadi penghalang dalam upaya menarik dan mempertahankan keterlibatan pemuda secara berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya adalah masih minimnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan, dengan kecenderungan yang lebih kuat untuk berorientasi menjadi pegawai atau pekerja. Kurangnya dorongan dan fasilitasi kewirausahaan di kalangan pemuda menghambat potensi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Di era digital ini, semakin banyaknya media sosial dan sumber informasi lainnya tanpa adanya pembatasan yang efektif terhadap arus informasi, baik yang positif maupun negatif (*hoax*), berpotensi menyebabkan pemuda salah langkah dalam mengambil tindakan, seperti terjerumus dalam investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, hingga prostitusi online.

Sebagian besar pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota juga masih menghadapi kendala dalam kesiapan kerja dan memasuki dunia kerja. Minimnya pengalaman praktis, kurangnya penguasaan kemampuan teknis, kesulitan dalam memvisualisasikan usaha, serta keterbatasan dalam mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada menjadi hambatan bagi mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Di bidang olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representatif menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi atlet. Keterbatasan anggaran daerah juga mengakibatkan banyak kejuaraan atau event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan olahraga tidak dapat terselenggara secara rutin.

Pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terhambat oleh minimnya uji coba atlet ke tingkat internasional dan nasional. Tidak adanya kompetisi yang memadai sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama serta tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal menjadi kendala dalam mencapai performa maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran masih kurang. Tingginya pengaruh telepon genggam (HP) dalam kehidupan masyarakat juga mengubah pola hidup menjadi kurang aktif bergerak. Terakhir, partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kepramukaan setelah tamat sekolah juga menurun karena kesibukan perkuliahan, pindah ke luar kota, atau berwirausaha.

N. Urusan pemerintahan bidang Statistik

Penguatan sistem statistik yang handal di Kabupaten Lima Puluh Kota terkendala oleh beberapa faktor mendasar. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan posisi Jabatan Fungsional Statistisi yang memiliki keahlian dan pendidikan yang relevan. Kekurangan personel yang kompeten ini menghambat upaya maksimalisasi proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, serta penyebarluasan data yang bermutu tinggi. Di samping itu, tanggung jawab dan pelaksanaan fungsi pengelolaan data belum secara merata diemban oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten. Kondisi ini mengakibatkan adanya sekat-sekat dalam pengumpulan data dan mempersulit terwujudnya data yang menyeluruh dan terpadu di seluruh jajaran organisasi pemerintah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan berbagai pihak dan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan. Kompleksitas koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan integrasi

data yang efektif. Perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ritme kerja antar pihak dapat memperlambat implementasi SDI secara menyeluruh. Lebih lanjut, penyelenggaraan SDI belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam agenda pelaksanaan pembangunan di beberapa sektor. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa urusan statistik bukan merupakan pekerjaan yang secara langsung terlihat dampaknya atau dianggap kurang menarik dibandingkan dengan program-program pembangunan fisik atau layanan publik lainnya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan yang efektif menghambat alokasi sumber daya dan perhatian yang memadai terhadap penguatan sistem statistik daerah

O. Urusan pemerintahan bidang Persandian

Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal persandian dan keamanan informasi. Permasalahan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta manajemen risiko informasi yang belum tertata secara optimal. Regulasi yang ada belum cukup kompleks dan belum maksimal dalam mengatur pengamanan informasi di tingkat daerah, sehingga memberikan ruang yang cukup besar bagi celah-celah keamanan. Di sisi lain, perangkat daerah dan aparatur sipil negara belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi karena minimnya pemahaman terhadap prinsip dan praktik persandian serta keamanan informasi. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat edukasi dan diseminasi informasi tentang pentingnya pengamanan informasi, yang menyebabkan kebijakan atau instruksi yang ada belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh aparatur di lapangan.

Permasalahan lainnya muncul dari aspek tata kelola dan manajemen risiko. Pengelolaan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum menyentuh aspek strategis seperti kerangka kerja keamanan informasi dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana teknis, termasuk perangkat pendukung untuk keamanan data serta infrastruktur statistik, juga menjadi kendala dalam penerapan pengamanan data yang andal, yang tak kalah penting adalah belum dimilikinya *Security Operation Center* (SOC), yang berfungsi sebagai pusat layanan keamanan siber secara terpusat. Ketiadaan SOC ini menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki sistem yang tanggap dan terintegrasi dalam memantau serta merespons insiden keamanan siber, terutama yang berkaitan dengan perlindungan server dan data pemerintahan.

Secara keseluruhan, tantangan persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan kebutuhan akan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembentukan pusat kendali keamanan siber. Tanpa adanya intervensi strategis, kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran administrasi pemerintahan dan mengancam kerahasiaan serta integritas informasi milik daerah

P. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai luak nan tigo merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya Minangkabau, menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan urusan wajib kebudayaan secara optimal. Salah satu tantangan mendasar adalah keterbatasan jumlah dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.Dari sisi sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan yang menghambat upaya pelestarian budaya, mulai dari terbatasnya fasilitas pendukung hingga minimnya ruang publik untuk ekspresi budaya dan seni. Selain itu, keterbatasan data dan informasi mengenai objek kebudayaan juga menghambat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Di sisi ekonomi, kebudayaan yang ada belum sepenuhnya mendukung sektor ekonomi kreatif. Belum ada keterpaduan dan keberlanjutan program yang menjadikan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Akibatnya, potensi budaya belum tergarap maksimal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya objek kebudayaan yang belum terkelola dengan baik menunjukkan lemahnya tata kelola dan kurangnya komitmen dalam memanfaatkan kebudayaan sebagai aset strategis pembangunan. Penyelenggaraan urusan kebudayaan juga belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga sering kali terpinggirkan dari prioritas pembangunan utama.

Tantangan lainnya adalah minimnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap budaya lokal. Perkembangan teknologi dan arus informasi global membuat generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya luar, sehingga ketertarikan untuk mempelajari dan melestarikan budaya sendiri menjadi rendah. Secara keseluruhan, permasalahan urusan kebudayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan perlunya upaya serius dan terarah, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur budaya, pemutakhiran data budaya, penguatan partisipasi masyarakat, integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi, dan edukasi budaya untuk generasi muda. Tanpa penanganan strategis, warisan budaya Minangkabau terancam mengalami degradasi nilai dan kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman

Q. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akses informasi kini dapat diperoleh secara mudah melalui internet tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan mulai kehilangan daya tarik utamanya di mata masyarakat, terutama generasi muda. Di samping itu, ketersediaan koleksi buku-buku bacaan yang terbatas dan kurang beragam menjadi kendala lain yang

memperburuk daya saing perpustakaan sebagai pusat referensi dan sumber ilmu.

Keterbatasan tenaga pustakawan yang bersertifikasi dan profesional juga menjadi permasalahan mendasar. Masih banyak perpustakaan yang dikelola oleh tenaga non-profesional, sehingga manajemen, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan belum berjalan secara optimal dan sesuai standar. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi peningkatan kapasitas kelembagaan perpustakaan, penyediaan SDM profesional, peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi, serta transformasi digital layanan perpustakaan agar mampu bersaing dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tanpa pembenahan menyeluruh, perpustakaan berisiko semakin terpinggirkan dari peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

R. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip oleh perangkat daerah (PD) sebagai pencipta arsip. Banyak PD belum melaksanakan pengelolaan arsip secara menyeluruh, sehingga arsip yang seharusnya menjadi bukti dan indikator kinerja kelembagaan tidak terdokumentasi dengan baik dan belum sepenuhnya tercatat atau terkelola secara sistematis. Lebih lanjut, minimnya pembinaan langsung dalam bentuk pendampingan teknis kepada PD, termasuk dalam hal penyediaan ruang arsip yang layak serta klinik arsip sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran, menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya pemahaman dan keterampilan memadai mengenai tata kelola arsip sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah rendahnya kesadaran PD dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang mencakup pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Kondisi ini menyebabkan penumpukan arsip yang tidak berguna dan menghambat pengelolaan arsip yang efisien dan efektif. Secara keseluruhan, permasalahan kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, serta penguatan komitmen seluruh PD untuk menjadikan arsip sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

2.6.2.3 Urusan Pilihan

A. Urusan pemerintahan Bidang Perikanan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi perikanan yang sangat besar, dengan memiliki potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan. Selain bibit dan bantuan di Kabupaten

Lima Puluh Kota juga mengalami permasalahan terhadap air, dimana pada musim kemarau kolam-kolam menjadi kering dan dijadikan menjadi lahan perkebunan.

Kurangnya enterprenuership khususnya bidang perikanan karena kekurangan tertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang perikanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana kolam sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

B. Urusan pemerintahan Bidang Pariwisata

Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata. Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan yang dapat mendongkak kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang ada untuk kenyamanan para pengunjung, begitu juga dengan peranan dari Kelompok Sadar wisata juga belum maksimal. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengembangan dan mempromosikan kegiatan pariwisata didaerahnya, sehingga informasi daerah tujuan wisata belum tersampaikan secara maksimal. Permasalahan lain yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah kurangnya keramahan masyarakat dalam melayani wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sehingga mengurangi minat wisatawan dan memberikan image yang buruk terhadap promosi pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan produksi dan produkstifitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pembangunan kawasan perumahan dan industri. Lahan persawahan yang sebelumnya produktif beralih menjadi perumahan sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan di area tanam dan menurunnya produksi pangan. Selanjutnya masalah ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.

Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani belum optimal, kemampuan petani untuk mengakses teknologi, informasi, dan permodalan masih rendah. Hal ini juga mempengaruhi pola, tenaga dan lamanya hasil panen yang dihasilkan. Belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani juga menjadi permasalahan jika terjadinya panen yang melimpah dan turunnya harga.Permasalahan lain yakni adanya bencana alam yang melanda kawasan tanaman pangan sehingga mengurangi pasokan produksi pertanian. Selanjutnya masalah serangan hama dna penyakit tanaman menjadi ancaman yang serius bagi petani seperti hama wereng pada padi dan penyakit busuk akar pada tanaman cabai, hama lalat buah sehinga menurunkan hasil panen.

Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produki ternak sehingga mempengaruhi jumlah penjualan dan peredaran daging di masyarakat pengguna. Terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging yang beredar untuk dikosumsi maupun untuk dijual. Kebutuhan daging saat ini yang cukup tinggi belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak sapi lokal. Selain itu kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan. Adanya perubahan minat petani terhadap komoditi yang di tanam seperti peralihan minat dari petani kakao ke komoditi pertanian lainnya.

D. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan

Adanya keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar membuat banyak pelaku usaha lokal sulit dalam membangun kemitraan dagang yang menguntungkan sehingga memperburuk pengembangan sektor usaha. Tantangan besar dalam meningkatkan produk, yaitu kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. Produk unggulan seperti kopi, gambir, tembakau dan hasil pertanian lainnya masih diproduksi dalam bentuk yang sama tanpa adanya perkembangan yang lebih baik.

Fluktuasi harga komoditas yang tajam sering mengalami ketidakstabilan harga, sehingga pengaruhnya terhadap daya saing produk di pasar. Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan utama, kurang terampilnya dalam mengelola proses produksi dalam memenuhi standar. Kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk berkembang dengan maksimal, kurangnya tenaga ahli di bidang riset dan pengembangan produk membuat tidak dapat berkembang secara maksimal. Salah satu permasalahan lainnya adalah proses perizinan dan regulasi yang rumit serta tidak konsisten menjadi penghambat dalam mendapatkan izin ekspor dan syarat yang tidak terpenuhi untuk memasuki pasar nasional maupun internasional. Hal ini menjadi penghambat bagi pelaku usaha di untuk mengoptimalkan potensi ekspor.

E. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian

Kendala dan hambatan dalam pembangunan perindustrian sering menjadi masalah dalam pencapaian sasaran pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih perlu menjadi perhatian. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai, masih ada beberapa perbaikan seperti pembangunan jalan dan

jembatan. Lokasi industri yang berada didaerah yang jauh dari pusat distribusi sering mengalami kesulitan dalam akses pasar dan bahan baku sehingga memperlambat pencapaian sasaran. Industri yang baru berkembang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan karena terbatasnya akses pembiayaan bagi industri kecil di Kabupaten Lima Puluh Kot. Tenaga kerja yang masih kurang menjadi penghambat, diperlukan tenaga kerja yang terampil di sektor industri yang memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

F. Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini tidak lagi menjadi daerah tujuan untuk proyek Perluasan Transmigrasi. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi penyelewengan saat pengerjaan proyek Transmigrasi di Nagari Galugua ditahun 2010. Akibat dari permasalahan hukum tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lagi menjadi daerah tujuan Transmigrasi dan sampai saat ini lahan yang dulu dibuka untuk proyek tersebut di Nagari Galugua masih terbengkalai Program tidak bisa dijalankan dan kondisi ini juga menyebabkan tidak adanya dukungan maupun bantuan berupa dana dari pemerintah pusat untuk urusan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

2.6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

a) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemmerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, Permasalahan administratif keterlambatan pemrosesan dokumen kerja sama akibat kelengkapan persyaratan yang masih kurang. Selain itu, belum adanya pemetaan kerja sama yang terstruktur menjadi kendala dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), perhatian terhadap aspek ini masih kurang dibandingkan dengan prioritas pembangunan lainnya. Kesulitan dalam menentukan target pencapaian SPM, terutama dalam bentuk prediksi dan proyeksi, semakin memperumit keadaan. Bahkan, banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya memprioritaskan pencapaian SPM dalam implementasi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan mencerminkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan, administrasi, serta pemahaman regulasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan daerah

b) Bagian Kesehjateraan Rakyat

Bagian Kesehjateraan Rakyat, Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal koordinasi dan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan koordinasi antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga non-pemerintah belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya dukungan teknis dari PD terkait dan minimnya sumber daya manusia.

Selain itu, kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah masih sangat bervariasi, sehingga belum mampu menjamin pelayanan keagamaan yang merata dan optimal. Bagian Kesehjateraan juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan rumah ibadah yang kapasitasnya belum seragam dan belum memenuhi standar layanan. Di sisi lain, banyak target pembangunan dan peningkatan kualitas rumah ibadah yang telah difasilitasi namun tidak sebanding dengan besaran anggaran yang tersedia, sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi secara optimal.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal penyusunan dan fasilitasi produk hukum. Proses fasilitasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat juga memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga menunda penyelesaian sejumlah produk hukum. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi produk hukum dan legal drafting. Tidak hanya itu, keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing menyebabkan Bagian Hukum tidak dapat memenuhi seluruh permintaan bantuan hukum yang diajukan oleh perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum dari PD, baik dari sisi prosedur maupun dari aspek substansi atau materi muatan hukum. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan dalam proses penyusunan produk hukum.

d) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengendalian sektor perekonomian dan sumber daya alam. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah. Hal ini disebabkan oleh belum terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, serta belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan secara menyeluruh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan efektivitas penyertaan modal pemerintah daerah juga masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari segi dividen maupun manfaat ekonomi lainnya.

e) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan tugas pengendalian dan monitoring pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari PD terkait proses penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan ke dalam RFK *(excel)*, yang berdampak pada keterlambatan data dan analisis capaian pembangunan. Proses pengumpulan data dari PD juga berjalan lambat karena keterbatasan kapasitas masing-masing PD dalam menyajikan data secara tepat waktu dan akurat, sehingga menghambat analisis yang komprehensif. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur secara teknis mengenai pengendalian administrasi

pembangunan turut memperumit pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Permasalahan lainnya mencakup lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh APBN, menjadi salah satu penyebab ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terakhir, kualitas pengelolaan kegiatan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) juga masih terbatas, terutama dalam proyek konstruksi yang tidak dikerjakan oleh dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini berdampak pada hasil pembangunan yang belum optimal baik dari sisi mutu maupun ketepatan waktu.

f) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, masih menghadapi beberapa tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah belum adanya kebijakan yang secara tegas mengatur kewajiban pemanfaatan proses e-pengadaan langsung. Ketidakjelasan regulasi ini mengakibatkan implementasi e-pengadaan belum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh unit kerja. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Kurangnya SDM berdampak langsung terhadap kelancaran proses pengadaan dan kualitas pelayanan yang diberikan. Permasalahan lainnya adalah tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum mencapai level optimal. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, serta penguatan peran strategis UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan di tingkat daerah.

g) Bagian Umum

Bagian Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa kendala dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan di lingkungan kantor Bupati, Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah. Fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, intensitas aktivitas di Kantor Bupati yang semakin tinggi, baik dari kegiatan yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai. Hal ini menyebabkan beban kerja yang lebih besar bagi tenaga pelayanan, sehingga bisa berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, kualitas SDM Pramu Tamu di Kantor Bupati masih belum optimal dalam memberikan layanan kepada tamu-tamu pimpinan. Kurangnya pelatihan atau standar pelayanan yang efektif berpotensi memengaruhi citra serta profesionalisme layanan di lingkungan pemerintahan. Tak hanya itu, kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya SDM dalam proses pencairan keuangan, yang dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan

pendanaan tepat waktu. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Bagian Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini menuntut adanya peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem manajemen agar pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

h) Bagian Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi masih cukup kompleks. Regulasi serta petunjuk teknis yang ada belum sepenuhnya jelas dan terpadu, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Di samping itu, ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan anggaran turut menghambat pelaksanaan kegiatan, seperti perjalanan dinas dan verifikasi/pembahasan produk hukum terkait penataan kelembagaan. Kurangnya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dalam proses perumusan perencanaan kinerja juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu, dokumen kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya capaian kinerja.

Permasalahan lainnya adalah minimnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah dalam menunjang indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi kurang akurat dan tidak menyeluruh. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan ASN terhadap urgensi manajemen perubahan sebagai bagian dari peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Masih banyak Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang belum mengoptimalkan teknologi digital dalam pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi kurang efisien. Beberapa perangkat daerah juga belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis secara menyeluruh. Di tingkat kabupaten/kota, banyak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum memenuhi persyaratan standar SOP, sehingga usulan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.

i) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah kendala dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan dan dukungan administrasi kepada pimpinan daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya layanan dan koordinasi, baik secara internal maupun dengan stakeholder eksternal. Selain itu, keterbatasan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani. Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada tamu belum dapat dilakukan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pimpinan, khususnya dalam hal pendokumentasian kegiatan, juga masih belum memadai, sehingga menghambat kelancaran tugas-tugas

dokumentatif dan administratif. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkup Sekretariat Daerah yang masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing bagian. Kurangnya integrasi antar bagian mengakibatkan tidak sinkronnya program kerja dan penggunaan anggaran, yang berujung pada kurang efektifnya pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pelayanan untuk anggota DPRD dan masyarakat. Pelayanan terhadap anggota DPRD yang belum optimal terutama mencakup ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan), penyampaian masukan aspirasi dari Perangkat Daerah kepada anggota DPRD serta belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia, sehingga penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD sering terlambat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi tugas serta fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk LSM. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD sebagai jembatan yang menghubungkan anggota DPRD dengan lembaga pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah serta lembaga sosial kemasyarakatan harus lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran DPRD

2.6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas sehingga target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan tercapai dengan maksimal. Permasalahan kualitas perencanaan pembangunan daerah bisa dilihat dari 3 aspek yaitu aspek tahapan perencanaan, aspek kualitas dokumen perencanaan serta aspek pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Saat ini proses tahapan perencanaan belum berjalan dengan maksimal. Salah satu hal yang mempengaruhi proses tahapan perencanaan adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah sehingga menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari

masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang, hal ini menyebabkan kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.

Dari segi aspek kualitas dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, maupun tahunan, rendahnya kualitas dokumen dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan atau isu strategis Pembangunan masih rendah sehingga prioritas pembangunan yang didanai tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan daerah.
- Penjenjangan indikator tujuan dan sasaran belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja pembangunan.
- Dokumen perencanaan belum disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian dan permasalahan daerah pada tahun sebelumnya.
- Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) masih belum maksimal.
- Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya.
- Keterkaitan output dan outcome inovasi dengan permasalahan pembangunan dalam dokumen perencanaan belum tergambar dengan jelas.
- Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diketahui, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah merupakan alat utama untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dari pengendalian dan evaluasi didapatkan umpan balik untuk perbaikan program dan arah kebijakan disetiap periode pembangunan yang dilakukan. Saat ini proses pengendalian dan evaluasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga target pembangunan yang telah direncanakan banyak yang belum tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- Pengendalian dan evaluasi terhadap terhadap capaian indikator kinerja daerah belum sepenuhnya dilakukan;
- Minimnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah;
- hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya belum dimanfaatkan dengan optimal;
- Keterbatasan sumber daya yang kompeten dalam perencanaan dan evaluasi sehingga hasil analisis terhadap capaian kinerja daerah tidak maksimal;
- Minimnya partisipasi publik dan stakeholder terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga perspektif terhadap keberhasilan dan kegagalan program pembangunan berikut permasalahan-

permasalahan mendasar yang terjadi dimasyarakat sangat sedikit diketahui;

- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi.

Disamping ketiga aspek diatas (Proses Perencanaan, Kualitas Dokumen Perencanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah), mandatory spending yang mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit serta dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peningkatan kapasitas perencana daerah agar mampu menganalisis kebutuhan pembangunan daerah dan mampu merancang perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

B. Unsur Keuangan

Dalam menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan tidak terlepas dari ketercapaian kinerja pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar pendapatan asli daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kepatuhan wajib pajak dan mengurangi jumlah kendaraan yang belum daftar ulang perlu diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perubahan kebijakan ekonomi nasional, seperti insentif pajak dan perubahan regulasi fiskal, dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang fleksibel untuk menjaga stabilitas pendapatan Kurangnya Inovasi dalam sumber pendapatan baru menjadi permasalaah bagi daerah karena masih mengandalkan sumber pendapatan tradisional, padahal ada peluang dari ekonomi kreatif, digitalisasi, dan sektor jasa yang bisa digarap lebih jauh.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum optimal merupakan permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengunaan sistem informasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Kurangnya kualitas sumber daya pengelola keuangan dan barang daerah di seluruh PD menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam penyusunan, penatausahaan maupun pelaporan baik keuangan maupun barang milik daerah. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini menuntut BPKPD harus bisa berakselerasi untuk segera melakukan penyesuaian dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengamanan dan pemanfaatan aset belum optimal, karena belum tertibnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah daerah, belum ditetapkannya batok dan batas tanah milik pemerintah provinsi serta kasus tanah negara yang dikuasai pihak lain. Pemanfaatan aset

perlu dioptimalkan dengan pemetaan dan penilaian terhadap aset-aset yang berpotensi mendatangkan pendapatan.

C. Unsur Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terlaksana pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien, dan terwujudnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya serta dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif. Kualitas sumber daya manusia (ASN) yang belum merata, terutama dalam hal kompetensi teknis menjadi permasalahan untuk terwujudnya ASN yang kompeten. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN. Kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki dan tidak terdayagunakan secara optimal.

Sistem rekrutmen, mutasi dan promosi ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Belum optimalnya meritokrasi terutama dipengaruhi oleh distribusi ASN yang belum sesuai kebutuhan dan kompetensi Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki. Transformasi digital yang paripurna juga diperlukan dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur sehingga layanan kepegawaian menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki serta mengoptimalkan pengelolaan kesejahteraan dan perlindungan ASN.

D. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah belum optimalnya kompetensi ASN Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten. Sebagaimana diketahui, pengembangan kompetensi merupakan hak dan kewajiban bagi ASN yang harus dipenuhi agar kualitas pelayanan publik dan profesionalisme birokrasi dapat berjalan, namun hal tersebut masih terkendala disebabkan beberapa hal yaitu masih adanya pimpinan organisasi yang tidak komitmen memberikan dorongan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan; kurangnya perencanaan pengembangan kompetensi SDM pada organisasi; Pelatihan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah ASN yang ada, sehingga banyak ASN yang tidak dapat mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan; serta sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari beberapa perangkat daerah akibat kurangnya kepedulian perangkat daerah dan belum pahamnya perangkat daerah bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN yang juga akan berimbas pada reformasi birokrasi.

Permasalahan yang juga menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih kurangnya program pengembangan kompetensi berkelanjutan, seperti coaching, mentoring, dan pelatihan yang berbasis kinerja bagi ASN; belum berjalannya dengan optimal integrasi pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta, dimana pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta tidak direncanakan dengan baik sebelumnya sehingga program pelatihan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan ASN; belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi; serta Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain pada unsur pendidikan dan pelatihan yang juga perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi kediklatan; Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kualifikasi pejabat pengembannya; dan masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu

E. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya bisa diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1) isu dan tema kelitbangan yang diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah karena kajian kebutuhan riset dan inovasi yang belum dilakukan; 2) belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas dan kapasitas serta masih minimnya sarana dan prasarana kelitbangan juga mempengaruhi hasil penelitian; serta 3) belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah yang bisa memperkuat kualitas dan relevansi hasil riset terhadap kebutuhan daerah.

Disamping belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan juga menjadi salah satu permasalahan sehingga masih terdapat beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan.

2.6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja

pemeriksaan yang semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan akurasi pengawasan. Di samping itu, juga belum terdapat pembaharuan metode pengawasan yang inovatif, komprehensif, dan adaptif yang memanfaatkan sistem informasi dan kerjasama lintas sektor yang semestinya dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Permasalahan lainnya adalah belum opimalnya peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Selain itu, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap perangkat daerah juga belum berjalan optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, ini terlihat pada beberapa hal, seperti masih terbatasnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pelaksanaan pengendalian interal, pelaksanaan pengawasan masih terbatas pada administrasi belum pada budaya kerja dan outcome suatu kegiatan.

2.6.2.7 Urusan Kewilayahan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 Kecamatan, secara umum permasalahan pokok di Kecamatan adalah kurang optimalnya pelayanan publik dan manajemen pelayanan. Kurang optimalnya pelayanan publik dan manajemen publik dikarenakan terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai di kecamatan. Dalam menjalankan tugas urusan pemerintah umum kecamatan memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana sehingga belum optimalnya kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat.

2.6.2.8 Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menemukan tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal, keberadaan Puskomin sangat vital dalam mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan secara cepat, tepat, dan akurat atas dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah ini.

Disamping itu, rasa toleransi ditengah masyarakat pun masih mengalami degradasi yang dipicu oleh perbedaan latar belakang dan keyakinan serta kesenjangan ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila pun juga masih rendah. Hal ini diperparah juga oleh masih rendahnya tingkat pemahaman politik terutama dikalangan generasi muda. Minimnya pengetahuan politik ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi serta meningkatnya kerentanan terhadap isu-isu yang dapat memecah belah kesatuan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi edukasi

politik yang lebih menyentuh dan berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan lain yang juga perlu untuk diatasi adalah belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini turut dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi. Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal dalam penetapan forum-forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di daerah.

Lebih lanjut, masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa PD dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga menjadi persoalan. Akibatnya, kualitas dokumen rencana aksi yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan belum dapat diimplementasikan secara efektif. Permasalahan terakhir yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah belum optimalnya peran Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai dan kualitas IDI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal sebagaimana diketahui IDI merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana demokrasi dijalankan secara substantif dan prosedural di suatu wilayah.

2.7 Isu Strategis

2.7.1 Isu Strategis Nasional

1. Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global;
2. Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah;
3. Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti;
4. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi;
6. Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan
7. Percepatan penanganan stunting
8. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
9. Infrastruktur Pelayanan Dasar
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
11. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
12. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
13. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

2.7.2 Isu Strategis Provinsi

1. Pembangunan Manusia
2. Perlindungan Anak
3. Disabilitas Sektor Formal
4. Pembangunan Kebudayaan
5. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan

6. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda
7. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas
9. Desa Mandiri
10. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.7.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan IPM untuk Menciptakan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 72,05 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan olah masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Peningkatan Penerapan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya dalam Masyarakat

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat. Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

C. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Dengan Penyusunan Profil Nagari dan Penetapan Batas Nagari serta Meningkatkan Status Nagari Mandiri

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum selesainya pengukuran dan penetapan batas nagari. Dengan menata hal ini, kedepannya akan dapat digali dan dikembangkan secara komprehensif potensi yang ada di masing-masing nagari.

D. Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja

pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah dan Indeks Reformasi Birokrasi. Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat dioptimalkan pelayanan publik di daerah.

E. Optimalisasi Tingkat Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 adalah 4,04%, tahun 2023 meningkat menjadi 4,55%. nilai pertumbuhan ekonomi ini sudah meningkat dari tahun 2021. Naiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota perlu terus didukung dan dioptimalkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dari seluruh sektor ekonomi. Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

F. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada 2025 adalah:

i. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
ii. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
iii. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan dan berdampak pada kehidupan biota air. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 2 (dua) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan.

Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, penyempurnaan RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau.

G. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah–Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

i. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan
ii. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan risiko bencana akan mampu nantinya menurunkan risiko bencana daerah.

2.8 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya. Pencapaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan angka capaian yang tertinggi adalah Kota Padang, Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka capaian terendah adalah Kabupaten Pasaman. Bidang dengan Angka Capaian 100% terbanyak adalah bidang Sosial dan Perumahan Rakyat. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, bidang SPM dengan capaian 100% pada tahun 2025 adalah bidang Pekerjaan Umum, dan bidang Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 81
Hasil Capaian IP SPM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025



Sumber: e-SPM Ditjen Bina Bangda

Pada tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh capaian IP IPM 99,93% dengan predikat Tuntas Utama. Lebih rinci terkait capaian SPM di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Triwulan IV, dapat dilhat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 82
Persentase Realiasasi Capaian SPM Tahun 2025
Per-Bidang



Sumber: e-SPM Ditjen Bina Bangda

Dari grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan 99,62%, bidang kesehatan 100% ,bidang pekerjaan umum 100%, bidang perumahan rakyat 100%, bidang trantibumlinmas 99,93%, dan yang terakhir bidang sosial 100%. Dengan capaian total nilai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota semua bidang adalah sebesar 99,93%.

Terkait dengan tingkat ketercapaian penerapan SPM terdapat hambatan dan kendala yang kerap ditemui, antara lain :

1. PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : warga yang benar-benar miskin).
2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan.
3. Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
4. Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk.
5. Kondisi Geografis yang 85% pegunungan mengakibatkan terhambatnya

proses pengumpulan data.
6. Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM yaitu pada tahapan pendataan.
7. Penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
8. Masih terdapat perubahan target pada layanan sekaligus melakukan pemutakhiran data di akhir triwulan.
9. Anggaran dalam kegiatan dan sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM.

2.9 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2030

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);

13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.9.1 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

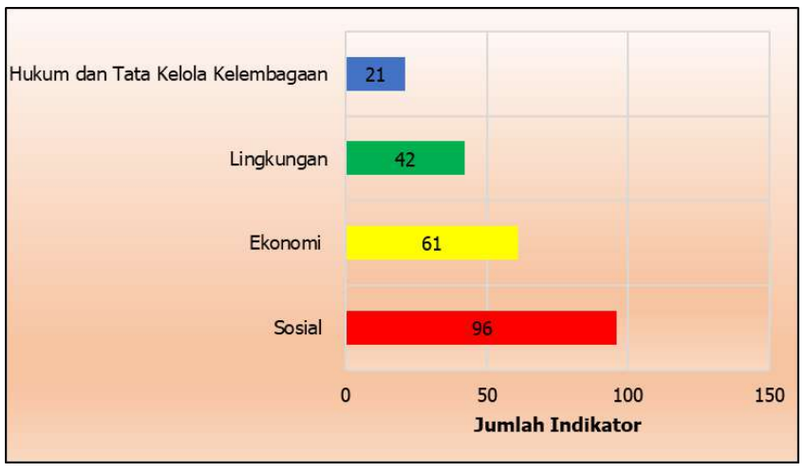
Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB); dan

c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 15 TPB kecuali TPB 7 (Energi bersih dan terjangkau) dan TPB 14 (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 15 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Indikator TPB/SDGs dibedakan dalam 4 (empat) pilar, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah indikator kewenangan kabupaten berdasarkan pilar pembangunan.

Grafik 2. 83
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan



Dari 220 indikator tersebut, terdapat 17 indikator khusus. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 170
Indikator Khusus yang Bukan Menjadi Kewenangan Kabupaten

No	Indikator TPB	Kekhususan	Keterangan	
1	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	khusus untuk 120 kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan berisiko tinggi	Kabupaten Lima Puluh Kota tidak termasuk ke dalam 120 kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan berisiko tinggi	BK
2	6.3.2.(a) Kualitas air danau.	Khusus untuk daerah yang terdapat salah satu dari 15 danau prioritas dan 5 wilayah Sungai	Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki danau	BK
3	7.2.1* Bauran energi terbarukan	Kewenangan provinsi		BK
4	7.3.1*	Kewenangan provinsi		BK

No	Indikator TPB	Kekhususan	Keterangan	
	Intensitas energi primer			
5	9.1.1.(b) Panjang Pembangunan jalan tol	Kewenangan pusat		BK
6	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan		Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki dermaga penyeberangan	BK
7	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.	Khusus daerah yang terdapat 24 pelabuhan tol laut	Tidak terdapat Pelabuhan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
12	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	khusus daerah yang menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
13	11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	khusus kab/kota di luar jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sbg PKN	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
14	11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Khusus untuk kabupaten kota yang menjadi kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil	Tidak ada kawasan cagar budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
15	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.	khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK

No	Indikator TPB	Kekhususan	Keterangan	
16	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK

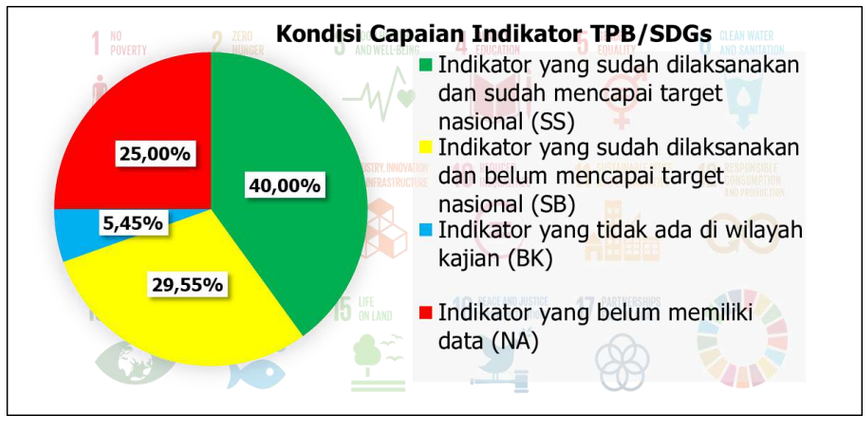
Kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pembiayaan maupun terkait optimalisasi sistem pendokumentasian kegiatan kegiatan terkait yang belum optimal. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksakan dan mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (40,00%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 65 indikator (29,55%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 55 indikator (25,00%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2. 171
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	88	40,00%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	65	29,55%
3.	Indikator yang tidak ada di wilayah kajian (BK)	12	5,45 %
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	55	25,00%
TOTAL		220	100%

Sumber : Analisis, 2024

Gambar 2. 11
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 172
Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs)
Kabupaten Lima Puluh Kota

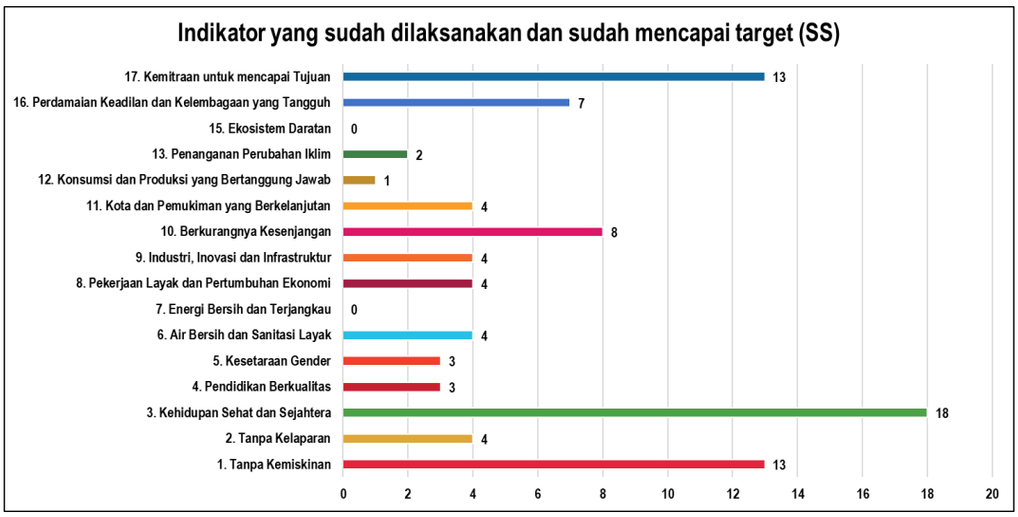
No.	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator	Ketidaktercapaian
1	Tanpa Kemiskinan	13	7	3	1	24	29,17
2	Tanpa Kelaparan	4	3	4	0	11	27,27
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	10	6	0	34	29,41
4	Pendidikan Berkualitas	3	8	2	0	13	61,54
5	Kesetaraan Gender	3	7	4	0	14	50,00
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	11	2	1	18	61,11
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2	0,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	12	0	19	15,79
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	3	3	13	23,08
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11	0,00
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	5	13	15,38
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5	60,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
15	Ekosistem Daratan	0	0	4	0	4	0,00
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	6	8	0	21	28,57
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16	12,50
		88	64	56	12	220	
	Ketercapaian			40			

Sumber : Pengolahan Data Indikator TPB, 2024

2.9.1.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 88 indikator atau dengan persentase 40,00%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat Grafik berikut.

Grafik 2. 84
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 173
Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
1.2.1*	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Dinas Sosial	Menurun Menjadi 6-7%	6,8	7,29	6,86
1.3.1. (B)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkat Menjadi 62,4 Juta Pekerja Formal; 3,5 Juta Pekerja Informal	3%	2%	3%
1.4.1. (A)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 70%	100%	100%	100%

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan.					
1.4.1. (B)	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 63%.	39%	44%	64%
1.4.1. (G)	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat Menjadi 94,78%	99,1	99,1	99,6
1.4.1. (H)	Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat Menjadi 82,2%	80,2	81,2	80,5
1.4.1. (J)	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkat Menjadi 77,4%.	85%	85%	88%
1.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	Bpbd	Menurun	0,01	0,00	0,00
1.5.1. (A)	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah.	Bpbd	Meningkat Menjadi 39 Daerah	69 Nagari (Ksb)	72 Nagari (Ksb)	75 Nagari (Ksb)
1.5.1. (B)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial.	Dinas Sosial	Meningkat Menjadi 151 Ribu	0	0	0
1.5.1. (C)	Pendampingan Psikososial Korban	Dinas Sosial	Meningkat Menjadi 81,5 Ribu	34	42	50

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Bencana Sosial.					
1.5.2. (A)	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	Bpbd	Menurun	4.357.695.000	1.852.850.000	836.000.000
1.5.3*	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.	Bpbd	Ada	0	1	1
2.1.1. (A)	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 17%	11%	9%	10%
2.2.1. (A)	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 28%	5,38	5,44	5,41
2.2.2. (A)	Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 28%	15%	11%	11%
2.2.2. (B)	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 50%	77%	76%	78%
3.1.2*	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 95%	100%	100%	100%

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
3.1.2. (A)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 85 %	100%	100%	100%
3.2.2. (A)	Angka Kematian Bayi (Akb) Per 1000 Kelahiran Hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 24	9,7	8,5	12,0
3.3.1. (A)	Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi <0,5%	0,000%	0,000%	0,002 %
3.3.3*	Kejadian Malaria Per 1000 Orang.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0
3.3.3. (A)	Jumlah Kecamatan/Nagari Yang Mencapai Eliminasi Malaria.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 300	79	79	79
3.3.4. (A)	Persentase Kecamatan/Nagari Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Meningkat	79	79	79
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Menurun	Pf = 0 Pkusta =60	Pf = 0 Pkusta =100	Pf = 0 Pkusta =50
3.3.5. (A)	Jumlah Provinsi Dengan Eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 34 Provinsi	0,13	0,03	0,05
3.3.5. (B)	Jumlah Kecamatan/Nagari Dengan Eliminasi Filariasis	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 35.	Sudah Eliminasi	Sudah Eliminasi	Sudah Eliminasi

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	(Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).					
3.4.1. (B)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 24,3%	3%	5%	4%
3.4.2. (A)	Jumlah Kecamatan/Nagari Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 280	79	79	79
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun Menjadi 38	13,82	15,73	16,18
3.7.2. (A)	Total Fertility Rate (Tfr).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun Menjadi 2,28	0,06	0,06	0,05
3.8.2*	Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk.	Dinas Kesehatan	Meningkat	71%	81%	84%
3.9.3. (A)	Proporsi Kematian Akibat Keracunan.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0
3.B.1. (A)	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Meningkat	100%	100%	100%

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
3.C.1 *	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat	975	1093	1231
4.1.1. (A)	Persentase Sd/Mi Terakreditasi Minimal B.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 84,2%	97%	95%	96%
4.4.1*	Proporsi Remaja Dan Dewasa Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik).	Dinas Kominfo	Meningkat	36,22	52,22	56,15
4.C.1 *	Persentase Guru Tk, Sd, Smp, Sma, Smk, Dan Plb Yang Bersertifikat Pendidik.	Dinas Pendidikan	Meningkat	83	79	81
5.1.1*	Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan.	Dinas Sosial	Bertambah Sebanyak 16	2	6	8
5.2.2. (A)	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Meningkat Menjadi 70%	100	100	100
5.B.1 *	Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.	Dinas Kominfo	Meningkat	75,82	85,15	83,03
6.2.1. (F)	Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.	Dinas Pupr	Meningkat	2%	2%	3%

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
6.3.2. (B)	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.	Dinas Pupr	Meningkat	56	53	56
6.4.1. (B)	Insentif Penghematan Air Pertanian/Perkebunan Dan Industri.	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Ada	1440	2280	2280
6.5.1. (F)	Jumlah Wilayah Sungai Yang Memiliki Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau.	Dinas Pupr	10 Ws (Skala Nasional)	220	360	450
8.1.1*	Laju Pertumbuhan Pdb Per Kapita.	Bappelitbangda	Meningkat	0,995	1,041	1,106
8.5.2. (A)	Tingkat Setengah Pengangguran.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Menurun	43,07	44,03	39,80
8.9.1. (A)	Jumlah Wisatawan Mancanegara.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Meningkat Menjadi 20 Juta (Skala Nasional)	679	0	105
8.9.1. (B)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Meningkat	654334	624155	749034
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkat	12%	11%	17%
9.C.1 *	Proporsi Penduduk	Dinas Kominfo	Meningkat	21	26	29

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Yang Terlayani Mobile Broadband.					
9.C.1. (A)	Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Dinas Kominfo	Meningkat	76	85	83
9.C.1. (B)	Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet	Dinas Kominfo	Meningkat	36,22	52,22	56,15
10.1. 1*	Koefisien Gini.	Bappelitbangda	Menurun Menjadi 0,36	0,222	0,244	0,208
10.1. 1.(A)	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Bappelitbangda	Menurun Menjadi 7-8%	6,8	7,29	6,86
10.1. 1.(B)	Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan.	Dinas Pmdn	80 Kabupaten (Skala Nasional)	0	0	1 Nagari : Koto Lamo
10.1. 1.(C)	Jumlah Desa Tertinggal.	Dinas Pmdn	Berkurang Sebanyak 5.000 Desa (Skala Nasional)	2 Nagari: Galugua Dan Koto Lamo	2 Nagari: Galugua Dan Koto Lamo	1 Nagari : Galugua
10.1. 1.(D)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pmdn	Meningkat Paling Sedikit 2.000 Desa	4 Nagari: Gugua k Viii Koto, Taram, Sarilam ak, Situjua h Batua	5 Nagari: Gugua k Viii Koto, Taram, Sarilam ak, Muaro Paiti, Situjua h Batua	9 Nagari: Situju ah Batua, Pangk alan, Sarila mak, Tujua h Koto Talago, Muaro Paiti, Taram, Gugua k Viii Koto,

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
						Labuah Gunuang, Koto Tuo
10.1.1.(F)	Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal.	Dinas Pmdn	Menurun Menjadi 14%	19	19	14
10.3.1.(D)	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif Dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum Ham Internasional.	Bagian Hukum Setdakab	Ada	0	0	0
10.4.1.(B)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkat Menjadi: Tk Formal 62,4 Juta; Tk Informal 3,5 Juta	2,67%	2,47%	2,86%
11.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	Bpbd	Menurun	0,005214784	0,00077794	0
11.5.1.(C)	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim	Bpbd	Ada	0	0	1

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Serta Kebencanaan.					
11.5.2.(A)	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	Bpbd	Menurun	4357695000	1852850000	836000000
11.B.2*	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah.	Bpbd	Ada	0	1	1
12.5.1.(A)	Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang. (Kg)	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20 Ton Per Hari (Skala Nasional)	Na	6263,55	10629,05
13.1.1*	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.	Bpbd	Ada	0	1	1
13.1.2*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	Bpbd	Menurun	0,005	0,001	0,000
16.2.3.(A)	Proporsi Perempuan Dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun.	Dinas Sosial	Menurun	Pr = 16% Lk=0%	Pr = 11% Lk=3%	Pr = 11% Lk=1%

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
16.6. 1.(A)	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Meningkat Menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	Wtp	Wtp	Wtp
16.9. 1*	Proporsi Anak Umur Di Bawah 5 Tahun Yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkat	91,3	93,2	95
16.9. 1.(A)	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkat Menjadi 77,4%	85	85	88
16.9. 1.(B)	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkat Menjadi 85%	91,3	93,2	95,0
16.B. 1.(A)	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif Dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum Ham Internasional.	Bagian Hukum Setdakab	Ada	0	0	0
17.1. 1*	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan	Meningkat	0,2180 67405	0,2131 99026	0,2262 01229

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.	Pendapatan Daerah				
17.1.1.(A)	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap Pdb.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Di Atas 12%	15%	13%	15%
17.1.2*	Proporsi Anggaran Domestik Yang Didanai Oleh Pajak Domestik.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Meningkat	2%	2%	13%
17.8.1*	Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet.	Dinas Kominfo	Meningkat	36,22	52,22	56,15
17.8.1.(A)	Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet.	Dinas Kominfo	100%	50%	50%	0%
17.17.1.(A)	Jumlah Proyek Yang Ditawarkan Untuk Dilaksanakan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Kpbu).	Bag. Administrasi Pembangunan Setdakab	Ada	Ada	Ada	Ada
17.17.1.(B)	Jumlah Alokasi Pemerintah Untuk Penyiapan Proyek, Transaksi Proyek, Dan Dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah	Bag. Administrasi Pembangunan Setdakab	Ada	Ada	Ada	Ada

No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Dan Badan Usaha (Kpbu).					
17.18 .1.(A)	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (Bps) Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik.	Bps	Meningkat	86%	95%	97%
17.18 .1.(B)	Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik Bps Sebagai Rujukan Utama.	Bps	Meningkat	83%	84%	90%
17.18 .1.(C)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa).	Bps	Meningkat	Na	9	21
17.19 .2.(B)	Tersedianya Data Registrasi Terkait Kelahiran Dan Kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependu dukan Dan Pencatata n Sipil	Ada	Ada	Ada	Ada
17.19 .2.(C)	Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website.	Bps	Meningkat	14031	13701	17713

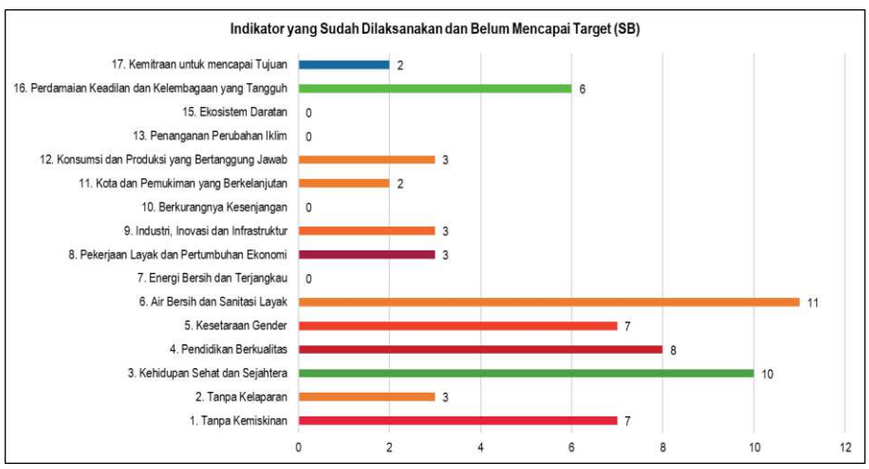
No. Indik-ator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
17.19 .2.(D)	Persentase Konsumen Yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik (Bps).	Bps	Meningkat	-	100	100

Sumber : OPD Kabupaten Lima Puluh Kota , 2023

2.9.1.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 64 indikator atau dengan persentase 29,55%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Grafik 2. 85
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 174
Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
1.3.1. (A)	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui Sjsn	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 95%	20%	13%	11%

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Bidang Kesehatan.					
1.3.1. (C)	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.	Dinas Sosial	Meningkat Menjadi 17,12%	2%	13%	1%
1.3.1. (D)	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Menurun Menjadi 2,8 Juta	22415	25616	39564
1.4.1. (D)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 100%	53,86	55,69	64,19

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
1.4.1. (E)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 100%	74,75	68,93	71,33
1.5.1. (D)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial Yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus. (Smab=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 450	0	0	0
1.A.2 *	Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial) Sebagai Persentase Dari Total Belanja Pemerintah.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Meningkat	20% Pendidikan 10% Kesehatan 5% Perlindungan Sosial	20% Pendidikan 10% Kesehatan 5% Perlindungan Sosial	20% Pendidikan 10% Kesehatan 5% Perlindungan Sosial

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
2.2.1 *	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita.	Dinas Kesehatan	Menurun	12%	8%	9%
2.2.2 *	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Dinas Kesehatan	Menurun	7	4	5
2.2.2. (C)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Mencapai; Dan Tingkat Konsumsi Ikan.	Dinas Tanaman Pangan Holtikutura Dan Perkebunan	Meningkat Menjadi: Skor Pph 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan 54,5 Kg/Kapita/Tahun	Na	85,00	92,00
3.1.1 *	Angka Kematian Ibu (Aki).	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 306	0,10%	0,17%	0,21%
3.2.1 *	Angka Kematian Balita (Akba) Per	Dinas Kesehatan	Menurun	10,7	8,5	13,6

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	1000 Kelahiran Hidup.					
3.2.2 *	Angka Kematian Neonatal (Akn) Per 1000 Kelahiran Hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	6,5	4,8	6,9
3.2.2. (B)	Persentase Kecamatan/Nagari Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 95%	14%	44%	64%
3.3.2. (A)	Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 245	81	86	116
3.4.1. (C)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ⩾18 Tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	Na	Na	0,606278185
3.4.2 *	Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri.	Kesbangpol	Menurun	0,001	0,002	0,006
3.7.1 *	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan	Meningkat Menjadi 66%	62%	74%	64%

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Atau Pasangannya Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern.	Perlindungan Anak				
3.7.1. (B)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Cara Modern.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Meningkat Menjadi 23,5%	19%	22%	18%
3.8.2. (A)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi Minimal 95%	71%	81%	84%
4.1.1. (B)	Persentase Smp/Mts Berakreditasi Minimal B.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 81%	72%	71%	71%
4.1.1. (D)	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Sd/Mi/Sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 114,09%	102,3	105,5	95,8
4.1.1. (E)	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/ Sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 106,94%	108,1	86,0	92,1

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
4.1.1. (G)	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ⩾15 Tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 8,8 Tahun	8	8,07	8,08
4.2.2. (A)	Angka Partisipasi Kasar (Apk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud).	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 77,2%	32,22	32,35	43,35
4.6.1. (A)	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ⩾15 Tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat Menjadi 96,1%	99	99	74
4.6.1. (B)	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun Dan Umur 15-59 Tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat	19,6	19,9	19,7
4.A.1 *	Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Meningkat	Listrik : 370 Internet : 185	Listrik : 370 Internet : 288	Listrik : 372 Internet : 219

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash).					
5.2.1 *	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun	-	-	0,019 %

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Dalam 12 Bulan Terakhir.					
5.2.1. (A)	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun Menjadi Kurang Dari 20,48%	-	-	0,135 %
5.2.2 *	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun	-	-	0,012 %
5.3.1. (A)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Meningkat Menjadi 21 Tahun	Na	Na	2,22
5.5.1 *	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di	Dinas Sosial	Meningkat	6%	6%	6%

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah.					
5.5.2 *	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manageriall.	Bkpsdm	Meningkat	27%	24%	19%
5.6.1. (A)	Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana /Kb Yang Tidak Terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun Menjadi 9,9%	13,64	13,93	22,88
6.1.1. (A)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 100%	79%	80%	83%
6.1.1. (C)	Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 100%	81%	80%	81%

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Berkelanjutan.					
6.2.1. (A)	Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air.	Dinas Kesehatan	Meningkat	-	-	43%
6.2.1. (B)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak.	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 100%	64%	61%	66%
6.2.1. (C)	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm).	Dinas Kesehatan	Meningkat Menjadi 45.000 (Skala Nasional)	238	264	12
6.2.1. (D)	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (Odf)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs).	Dinas Kesehatan	Meningkat	16	3	0

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
6.3.1. (A)	Jumlah Kecamatan/Nagari Yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan Dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Iplt).	Dinas Pupr	Meningkat Menjadi 409 Kabupaten/Kota	0	0	0
6.3.1. (B)	Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.	Dinas Pupr	Meningkat	0	0	0
6.5.1. (A)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Rpdast) Yang Diinternalisasi Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw).	Dinas Pupr	Ada	0	0	0

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
6.5.1. (C)	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk.	Dinas Pupr	8 Ws	2	2	2
6.5.1. (G)	Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air.	Dinas Pupr	Ada	2	2	Na
8.1.1. (A)	Pdb Per Kapita.	Bappelitbangda	Meningkat Menjadi Lebih Dari Rp 50 Juta	40.522.784	41.963.295	46.091.437
8.3.1. (B)	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkat	46,49	45,65	42,50
8.5.2 *	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Menurun	3,028	2,251	3,723
9.1.1. (C)	Panjang Jalur Kereta Api.	Dinas Perhubungan	Bertambah 3.258 Km	0	0	0,00
9.2.1 *	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	Dinas Perdagangan, Koperasi Umkm	Meningkat	6,36	6,49	6,47

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Terhadap Pdb Dan Per Kapita.					
9.2.1.(A)	Laju Pertumbuhan Pdb Industri Manufaktur.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Lebih Tinggi Dari Pertumbuhan Pdb	2	2,97	2,24
11.3.2.(B)	Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.	Dinas Pupr	Ada	0	0	0
11.5.1.(A)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (Irbi).	Bpbd	Menurun Menjadi 30%	119,2	119,2	64,33
12.6.1.(A)	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi Sni Iso 14001.	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat	0	0	0
12.7.1.(A)	Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister.	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat	0	0	0
12.8.1.(A)	Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Dan	Meningkat	0	0	0

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Standar Pelayanan Masyarakat (Spm) Dan Teregister.	Kawasan Permukiman Permukiman				
16.1.3.(A)	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir.	Kesbangpol	Menurun	0,109	0,047	0,057
16.2.1.(B)	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan.	Dinas Sosial	Menurun	Lk=0,00021 Pr = 0,0015	Lk=0,0004 Pr = 0,00117	Lk=0,00048 Pr = 0,0011
16.6.1*	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Meningkat	51,7623606	48,04089706	52,25
16.6.1.(C)	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan.	Pbj Setdakab	Menjadi Menjadi 80%	75	61	62
16.7.1.(A)	Persentase Keterwakil	Dinas Sosial	Meningkat	5,71	5,71	5,71

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	an Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd).					
16.7.1.(B)	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I Dan Ii).	Bkpsdm	Meningkat	26,7	24,1	18,8
16.10.2.(C)	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur	Dinas Kominfo	Meningkat	0	0	0

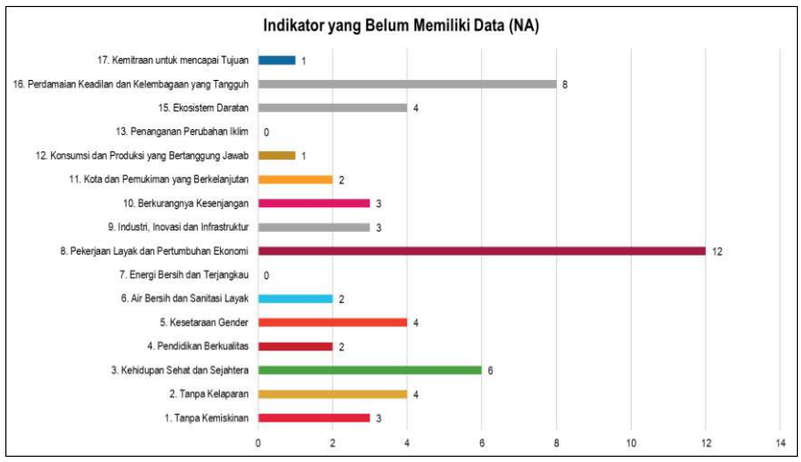
No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2020	2021	2022
	Dalam Peraturan Perundang-Undangan.					
17.6.2.(B)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband) Di Perkotaan Dan Di Perdesaan.	Dinas Kominfo	Meningkat Menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% Rumah Tangga Dan 30% Populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% Rumah Tangga Dan 6% Populasi	20,62	22,43	20,14
17.6.2.(C)	Proporsi Penduduk Terlayani Mobile Broadband	Dinas Kominfo	Meningkat Menjadi: Perkotaan 100% Populasi; Perdesaan 52% Populasi.	21	26	29

Sumber : Analisis Data OPD, 2023

2.9.1.3 Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 56 indikator atau 24,45%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Grafik 2.85.

Grafik 2. 86
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 175
Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
1.4.1.(C)	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Meningkat Menjadi 65%
1.4.1.(K)	Persentase Rumah Tangga Miskin Dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik Dari Pln Dan Bukan Pln.	Dinas Sosial	Meningkat Menjadi 100%
1.A.1*	Proporsi Sumber Daya Yang Dialokasikan Oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Bappelitbangda	Meningkat
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment).	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Menurun

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
2.1.2*	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Menurun
2.1.2.(A)	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.	Dinas Tanaman Pangan Holtikutura Dan Perkebunan	Menurun Menjadi 8,5 %
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (Rupiah Per Tenaga Kerja).	DINAS PERTANIAN	Meningkat
3.4.1.(A)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ⩽18 Tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 5,4%
3.5.1.(E)	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi Angka 0,02%
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ⩾ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.	DINAS KESEHATAN	Menurun
3.7.1.(A)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Meningkat Menjadi 65%
3.8.1.(A)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Menurun Menjadi 9,91%
3.A.1*	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ⩾15 Tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun
4.1.1*	Proporsi Anak-Anak Dan Remaja: (A) Pada Kelas 4, (B) Tingkat Akhir SD/Kelas 6, (C) Tingkat Akhir SMP/Kelas 9 Yang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
	Mencapai Standar Kemampuan Minimum Dalam: (I) Membaca, (Ii) Matematika.		
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/Mts/Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/Sederajat; Dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat
5.3.1*	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun
5.3.1.(B)	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan Perlindungan Anak	Menurun Menjadi 38 Tahun
5.6.1*	Proporsi Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan Reproduksi.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat
5.6.1.(B)	Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kb Dan	Meningkat Menjadi 85%

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
		Perlindungan Anak	
6.1.1.(B)	Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan Dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman	Meningkat Menjadi 118,6 M3/Detik
6.2.1.(E)	Jumlah Kecamatan/Nagari Yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan Dan Komunal.	Dinas Pupr	Meningkat Menjadi 438 Kabupaten/Kota. --> Perlu Ditetapkan Target Lokal
8.2.1*	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun.	BAPPELITBANGDA	Meningkat
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.3.1.(A)	Persentase Tenaga Kerja Formal.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	51%
8.3.1.(C)	Persentase Akses Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Ke Layanan Keuangan.	Dinas Perdagangan, Koperasi Umkm	25%
8.5.1*	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.6.1*	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan (NEET).	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB (PDRB).	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkat Menjadi 8%
8.9.1.(C)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Meningkat
8.9.2*	Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank Dan ATM Per 100.000 Penduduk Dewasa	DINAS PMPTSP	Meningkat
8.10.1.(A)	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum).	Dinas Pmptsp	Menurun (Mendekat)
8.10.1.(B)	Proporsi Kredit Umkm Terhadap Total Kredit.	Dinas Perdagangan, Koperasi Ukm	Meningkat
9.3.1*	Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Meningkat
9.3.2*	Proporsi Industri Kecil Dengan Pinjaman Atau Kredit.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Meningkat
9.5.1*	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB.	BAPPELITBANGDA	Meningkat
10.1.1.(E)	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal.	Dinas Pmn	Meningkat
10.2.1*	Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin Dan Penyandang Difabilitas.	DINAS SOSIAL	Menurun
10.3.1.(A)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kesbangpol	Meningkat Menjadi 87

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
11.1.1.(A)	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,7 Juta Rumah Tangga
11.6.1.(A)	Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani. (Ton)	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 80%
12.4.2.(A)	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri). (Kg)	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat Menjadi 150 Juta Ton (Skala Nasional)
15.1.1.(A)	Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat
15.3.1.(A)	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5,5 Juta Ha (Skala Nasional)
15.6.1*	Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ada
15.9.1.(A)	Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkat
16.1.1.(A)	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir.	Kesbangpol	Menurun

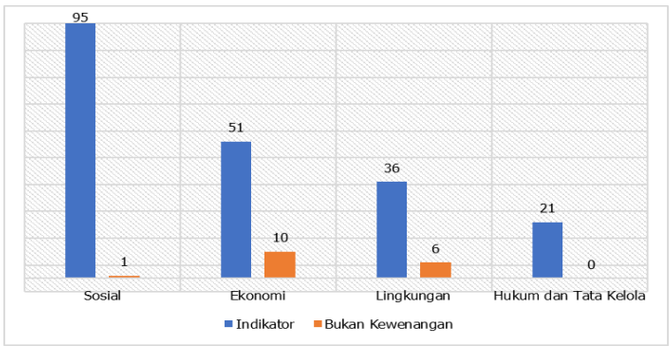
No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
16.1.2.(A)	Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk.	Kesbangpol	Menurun
16.1.4*	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya.	KESBANGPOL	Meningkat
16.2.1.(A)	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.	Dinas Sosial	Menurun
16.5.1.(A)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (Ipak).	Inspektorat Daerah	Meningkat Menjadi 4,0
16.6.1.(B)	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setdakab	Meningkat Menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%
16.6.1.(D)	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setdakab	Meningkatk Menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%
16.6.2.(A)	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Uu Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setdakab	Meningkat Menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%
17.18.1.(D)	Persentase Indikator Sdgs Terpilah Yang	Bappelitbangda	Meningkat

No. Indikator	Indikator TPB	OPD	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan
	Relevan Dengan Target.		

2.9.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar

Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 96 indikator pilar sosial, 61 indikator pilar ekonomi, 42 indikator pilar lingkungan serta 21 indikator termasuk ke dalam pilar hukum dan tata Kelola. Indikator TPB/*SDGs* berdasarkan pilar dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 86
Indikator TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Pilar



2.9.2.1 Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Jumlah indikator pilar sosial yakni 96 indikator dan 1 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 176
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	13	7	3	1	24
2. Tanpa Kelaparan	4	3	4	0	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	10	6	0	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	8	2	0	13
5. Kesetaraan Gender	3	7	4	0	14
Jumlah	41	35	19	1	96

2.9.2.2 Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Jumlah indikator pilar ekonomi yakni 61 indikator dan 10 diantaranya bukan

merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 177
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	12	0	19
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	3	3	13
10. Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16
Jumlah	29	8	19	5	61

2.9.2.3 Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Jumlah indikator pilar sosial yakni 42 indikator dan 6 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 178
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	11	2	1	18
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	5	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
14. Ekosistem Lautan					
15. Ekosistem Daratan	0	0	4	0	4
Jumlah	11	16	9	6	42

2.9.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator yang merupakan pilar hukum dan tata Kelola adalah Tujuan 16, yakni Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian indikator untuk TPB/SDGs 16 ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 179
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	6	8	0	21

2.9.3 Capaian Indikator Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 61 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

1. SPM Pendidikan
   SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,31 % dari indikator SPM.
2. SPM Kesehatan
   SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 42,62 % dari indikator SPM
3. SPM Pekerjaan Umum
   SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,48 % dari indikator SPM
4. SPM Perumahan Rakyat
   SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,64 % dari indikator SPM
5. SPM Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
   SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,39 % dari indikator SPM
6. SPM Sosial
   SPM Sosial sebanyak 4 indikator atau 1,82 % dari seluruh indikator TPB dan 6,56 % dari indikator SPM

Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 180
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM

No	SPM	SS		SB		NA		Total
1	Kesehatan	14	54%	9	35%	3	12%	26
2	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70%	1	10%	1	10%	9
3	Pekerjaan Umum	0	0%	5	71%	2	29%	7
4	Pendidikan	0	0%	8	62%	5	38%	13
5	Perumahan Rakyat	0	0%	0	0%	1	100%	1
6	Sosial	3	75%	1	25%	0	0%	4
		24		24		12		60

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023

2.9.4 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi.

Platform partisipasi tersebut terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181
Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs

No	Organisasi Perangkat Daerah Dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/Sdgs
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Tujuan 1, 16, 17
2	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	Tujuan 17
3	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	Tujuan 10, 16
4	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Tujuan 16
5	BAPPELITBANGDA	Tujuan 1, 8, 9, 10, 17
6	BKPSDM	Tujuan 5, 16
7	BPBD	Tujuan 1, 11, 13
8	BPS	Tujuan 17
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tujuan 1, 16, 17
10	DINAS KESEHATAN	Tujuan 1, 2, 3, 6
11	DINAS KOMINFO	Tujuan 4, 5, 9, 16, 17
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	Tujuan 1, 6, 11, 12, 15
13	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tujuan 8

No	Organisasi Perangkat Daerah Dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/Sdgs
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tujuan 1, 3, 5
15	DINAS PENDIDIKAN	Tujuan 1, 4, 8
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Tujuan 8, 9
17	DINAS PERHUBUNGAN	Tujuan 9
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Tujuan 1, 8, 9, 10
19	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Tujuan 2
20	DINAS PMN	Tujuan 10
21	DINAS PMPTSP	Tujuan 8
22	DINAS PUPR	Tujuan 6, 11
23	DINAS SOSIAL	Tujuan 1, 5, 10, 16
24	DINAS PANGAN	Tujuan 2
25	INSPEKTORAT	Tujuan 16
26	KESBANGPOL	Tujuan 3, 10, 16
27	PBJ SETDAKAB	Tujuan 16

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.

`

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menguraikan kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027. Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang ditelaah meliputi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah ini, selanjutnya diuraikan ke dalam 2 (dua) garis besar yaitu terkait Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan penyelesaian permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan perencanaan lima tahun yang menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKP Tahun 2027 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Sasaran pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Modal Manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator makro tahun 2025 dan target yang ditetapkan untuk tahun 2026 dan tahun 2027.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025, berdasarkan publikasi BPS sebesar 5,11%, sedangakan berdasarkan RKP tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,6%. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada dibawah target dengan gap sebesar 0,19%. Adapun target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 ini, berdasarkan RKP Tahun 2026 berada pada angka sebesar 5,8-6,3%. Untuk tahun 2027, dalam

`

Rancangan Awal target pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Rancangan awal RKP Tahun 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan cukup ambisius mencapai 8%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025, berdasarkan publikasi BPS sampai dengan Bulan Novembet Tahun 2025 berada pada angka 4,74% dan berdasarkan RKP tahun 2025 TPT ditargetkan sebesar 4,5%-5,00%, artinya sampai dengan bulan November tahun 2025 terget TPT telah tercapai. Adapun target TPT tahun 2026 ini, berdasarkan data RKP tahun 2026 adalah sebesar 4,44%-4,96%. Untuk tahun 2027, berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2027 target TPT tahun 2027 adalah sebesar 4,44%-4,96%.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada bulan maret tahun 2025, berdasarkan publikasi BPS berada pada angka 8,47%, turun 0,10% dibandingkan bulan September 2024, dan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2024, mengalami penurunan sebesar 0,56%. Berdasarkan RKP tahun 2025 angka kemiskinan nasional ditargetkan sebesar 7,00%-8,00%, artinya Pemerintah belum berhasil mewujudkan target angka kemiskinan tahun 2025, dimana didapatkan deviasi sebesar 0.47%. Ini berarti angka kemiskinan tetap harus menjadi perhatian penting pemerintah. Adapun untuk tahun 2026 dan 2027 tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,5%-7,5% pada tahun 2026 dan sebesar pada tahun 2027.

Beberapa upaya akan tetap dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi.

d. Gini Rasio

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,363. Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan menurun 0,018

`

poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,381.

Adapun untuk tahun 2026, dalam RKP Tahun 2026 rasio gini tahun 2026 ditargetkan sebesar 0,377-0,380. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antara kelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi empat strategi utama yaitu, (i) mempermudah kepemilikan asset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (ii) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (iii) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (iv) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025, berdasarkan publikasi BPS capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 75,90,mengalami peningkatan dari capaian IPM tahu 2024 yaitu sebesar 75,02. Peningkatan ini deisebabkan karena peningkatan semua indikator penyusun IPM. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mencapai 74,47 tahun atau meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas sebesar 13,30 tahun atau meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya Sedangkan. Pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 12.802.000 rupiah, meningkat 461.000 rupiah dibandingkan tahun 2024.

Untuk tahun 2026, untuk ukuran Kualitas Sumber Daya Manusia, pemerintah menargetkan dalam bentuk indicator Indeks Modal Manusi yaitu sebesar 0,57. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi produktivitas di masa depan. Indeks ini dikembangkan oleh World Bank sebagai bagian dari upaya memahami seberapa siap generasi muda suatu negara untuk berkontribusi pada ekonomi

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Kebijakan ekonomi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Misi 4 : Sumatera Barat Pusat perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat dan kebijakan dan Straetegi Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Usaha Kecil. Program-program unggulan untuk kedua misi

`

terebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat
2. Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB
3. Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian
5. Mendorong, Membina dan Memfasilitasi usaha kecil untuk Ekspor
6. Memfasilitasi Pengembangan usaha kecil dan Sentra ProduksiBerbasis Digital
7. Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur
8. Mendorong IKM Naik Kelas
9. Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi
10. Memperkuat Industri Halal dan usaha kecil Halal
11. Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang bersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)
12. Penguatan Potensi Wisata Halal
13. Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan
14. Sumatera Barat sebagai Pusat Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) Wilayah Barat Indonesia
15. Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi

Perekonomian Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,37%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 adalah sebesar 5,05%, capaian pertumbuhan ekonomi sumatera barat tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan, dengan deviasi sebesar 1,68%. Untuk tahun 2026, dalam RKPD Tahun 2026 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,7%.

Melihat kondisi riil di lapangan, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2026 akan mengalami perlambatan. Faktor cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang merusak sentra produksi pangan menjadi tantangan utama yang harus diwaspadai pemerintah daerah dan pelaku ekonomi. Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memperkirakan target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2026 berada di angka maksimal 4%, dengan rentang bawah mencapai 3,3%. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan target tahun 2025 namun relative stagnan dibanding realisasi tahun 2025. Sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada tahun 2005 dan target Indikator makro tahun 2026 dan 2027 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

`

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
dan Proyeksi Indikator Tahun 2026 dan 2027

	INDIKATOR MAKRO DAN PEMBANGUNAN	Realisasi	Target	
		2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,37	5,7	6,90
2	TPT (%)	5,52	5,39	5,23
3	IPM	77,27	77,48	78,04
4	Kemiskinan (%)	5,35	4,92	4,64
5	Gini Rasio	0,28	0,281	0,280

Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dimana Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tersebut. Adapun visi RPJMD 2025-2029 adalah "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

Untuk mewujudkan visi daerah di atas, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif;
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan;
5. Meningkatkan pertanian yang unggul dan berdaya saing;
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari;

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan sepuluh Program Prioritas Daerah, sebagi berikut :

1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama;
2. Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah;
3. Penguatan kualitas pendidikan, kesehtan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial;
5. Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil;
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi;
8. Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu;
10. Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah.

`

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota termaktub dalam misi ke 4 yaitu membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan dan misi ke 5 yaitu meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing, dengan Program Prioritas Daerah sebagi berikut :

1) Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil;
   Salah satu bentuk kegiatan penguatan koperasi adalah dengan dibentuknya koperasi merah putih di daerah. Hal ini merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk merevitalisasi koperasi tidak aktif, mendorong pendirian koperasi baru, serta memperkuat koperasi melalui pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi.
2) Pengembangan pariwisata dan ekonomi dan kreatif;
   Arah kebijakan dari program prioritas ini adalah
   a. memperkuat peran Usaha kecil Menengah (UKM),
   b. meningkatkan kualitas prodik-produk UMK,
   c. menyusun kebijakan kemudahan dalam berinvestasi
   d. mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif.
3) Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasaran produksi
   Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani serta pelaku usaha kecil sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Bentuk kegiatan prioritas dari program prioritas daerah ini adalah *Central of Agro.*. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan, menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota layak dikembangkan sebagai sentra agro (Central of Agro) di Sumatera Barat.

Arah kebijakan ekonomi daerah juga tergambar dari target indikator makro yang ingin dicapai di Kabupaten Lims Puluh Kota. Berikut akan diuraikan capaian indikator-indikator makro dan target yang ditetapkan pada tahun 2026 dan 2027.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025, berdasarkan sumber BPS dari dokumen Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 3,46%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini belum memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada RKPD tahun 2025, yaitu sebesar 4,72%, artinya ada deviasi sebesar 1,26%. Untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2026, berdasarkan RKPD 2026, ditetapkan sebesar 5,68%.

Adapun untuk tahun 2027, sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87%. Dengan kondisi pertumbuhan sebesar 3,46% di tahun 2025, berarti dibutuhkan upaya serius untuk mencapai kenaikan pertumbuhan sebesar 3,41 % dalam dua tahun.

`

Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2027 akan didasarkan kepada optimalisasi potensi yang ada, dimana sektor pertanian dan pariwisata akan dijadikan basis pertumbuhan dengan didukung penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta infrastruktur pendukung yang memadai. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data dari BPS, untuk tahun 2025, Sektor Pertanian menyumbang 32,06% dari total PDRB. Sementara itu, Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Lima Puluh Kota. Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata ini perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pendukung yang memadai.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025, berdasarkan Data Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 3,78 persen, jika dibandingkan dengan target capaian TPT pada RKPD Tahun 2025 yaitu sebesar 3.73%, deviasi sebesar 0,05%. Sementara itu, untuk target TPT tahun 2026, sebagaimana tertuang pada RKPD tahun 2026 adalah sebesar 3,63%. Target TPT tahun 2026 ini, datanya diambil dari RPJPD 2025-2045, dimana untuk tahun 2030 TPT ditargetkan sebesar 3,31%, artinya dengan proses perataan, didapatkan target TPT tahun 2026 adalah sebesar 3,63%. Sedangkan Target TPT tahun 2027 adalah sebesar 3,57%.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 6,10%. Dibandingkan tahun 2024, dimana angka kemiskinan sebesar 6,92%, artinya angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,82% pada tahun 2025. Untuk Tahun 2026, pada RKPD 2026, Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada angka 5,88%, artinya diperlukan upay-upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar lebih kurang 0,22% agar target 2026 dapat dicapai. Sedangkan untuk tahun 2027 tingkat kemeiskinan diharapakan turun menjadi 5,54%

Disamping jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 0,63, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat yang P1 nya sebesar 0,865. Artinya, bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2025 mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih pendek dibandingkan dengan Provinsi. Namun tetap diperlukan upaya-upaya agar masyarakat miskin bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan.

`

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,10, lebih rendah dari Provinsi, dimana angka P2 nya sebesar 0,221. Artinya, bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat.

d. Rasio Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarannya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Rasio gini mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 0,218. Jika dibandingkan dengan Nilai Gini Ratio tahun 2024, dimana Gini Ratio sebesar 0,22, terjadi penurunan sebesar 0,002 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan.

Untuk Tahun 2026, berdasarkan RKPD 2026, target Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,218. Sedangkan target Gini Rasio tahun 2027 adalah sebesar 0,217.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 73,43, meningkat dibandingkan IPM tahun 2024, sebesar 0,92, dimana IPM tahun 2024 adalah sebesar 72,51. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan dari dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup, serta dimensi ekonomi adalah pengeluaran perkapita.

Untuk Tahun 2026, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan dalam RKPD 2026 adalah sebesar 73,05. Sementara pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 73,41. Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 73,64, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 73,42. Adapun target angka harapan hidup tahun

`

2026, berdasarkan RKPD 2026 ditargetkan sebesar 73,79. Adapun untuk tahun 2027, berdasarkan Target RPJMD 2025-2029, target angka harapan hidup adalah 73,97.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 adalah sebesar 8,49 tahun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 8,13 tahun, mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,36 tahun. Adapun target Tahun 2026, berdasarkan RKPD 2026, rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,26 tahun, Sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2027 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 adalah 8,33 tahun.

3. Harapan Lama sekolah

Pada tahun 2025, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2026 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,53 tahun, angka ini sedikit naik dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah tahun 2024 yaitu sebesar 13,42 tahun. Berdasrakan RPJMD Tahun 2025-2029, harapan lama Sekolah ditargetkan bertururt-turut 13,48 dan 13,51 tahun.

Untuk mewujudkan target-target ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, maka ditetapkanlah tema pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, yaitu *"Pemulihan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Dasar Untuk Medorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Bekelanjutan"* dengan program prioritas sebagai berikut :

1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama.
2. Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah.
3. Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan perlindungan sosial.
5. Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil.
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi dan kreatif.
7. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi.
8. Pemerataan infrastruktur dasar, pelestrarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu.
10. Perwujudan kemandirian nagari berbasis potensi wilayah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2025-2029 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN.

`

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2021-2025, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77
2023	102.021.562.494,68	1.262.130.918.657,68	8.08
2024	103.887.436.990,99	1.311.095.932.506,99	7,92
2025	139.163.745.903,00	1.319.466.064.807,00	10,55

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Dari Tabel 3.2 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 masih di bawah 10 persen. Pada tahun 2025 DOFD meningkat menjadi 10,55 persen. Besaran DOFD ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan fiskal daerah yang terbatas, menuntut pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat mengalokasikan belanja secara cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kebijakan daerah dirumuskan untuk mengatasi keterbatasan fiskal, agar berbagai agenda untuk pembangunan dan kemajuan daerah tetap terlaksana.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1) Reformasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah;
2) Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM;
3) Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan;
4) Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creatif financing untuk :
   a. mendukung konektifitas penurunan kemiskinan
   b. pengadaan infrastruktur keamanan pendidikan
   c. menjaga keberlanjutan kualitas layanan pendidikan
   d. menjaga kualitas layanan kesehatan
   e. pengembangan produktifitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian
   f. pengembangan produktifitas dan nilai tambah produksi sektor perikanan

`

Sesuai amanat UU Nomor 1 tahun 2022, harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2027 harus diwujudkan sebagaimana telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Merujuk pada KEM PPKF 2027 tersebut, dalam rangka mendukung Program kerja Prioritas Nasional, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2027 antara lain difokuskan pada :

a) Pertumbuhan ekonomi;
b) Penurunan kemiskinan;
c) Pendidikan;
d) Kesehatan;
e) Pertanian
f) Perikanan
g) Anggaran untuk mendukung Koperasi mesah putih dan Mendukung efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG).
h) Pengelolaan sampah

Dalam rangka pelaksanaan sterategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan Transfer ke daerah berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif dan inovatif.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

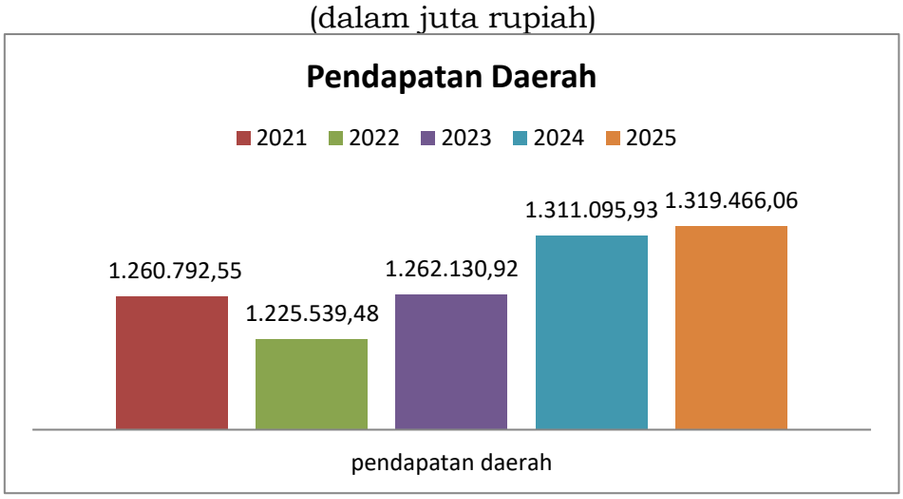
Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; dan
3. Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah.

Untuk kondisi tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, perkembangan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

`

Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025
(dalam juta rupiah)



Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2025 dimana pendapatan daerah sebesar Rp 1.319.466,06 juta. Pada tahun 2022 capaian pendapatan daerah berada di titik terendah sebesar Rp 1.225.539,48 juta. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi pendapatan daerah kembali naik menjadi berturut-turut Rp 1.262.130,92 juta dan Rp 1.311.095,93 juta.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

a. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.

b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

`

d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan jenis PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasill pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan fluktuasi. Pendapatan daerah dari sumber ini sebesar Rp. 21.409,25 juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 61.671,65 pada tahun 2025. Dengan demikian, dalam periode 2021-2025 terjadi pertumbuhan rata-rata 30,28% per tahun.

Sama halnya dengan pajak daerah, pendapatan yang berasal Retribusi Daerah juga berfluktuasi. Retribusi Daerah tahun 2021 berjumlah Rp Rp 2.975,1 juta. Pada tahun 2022 penerimaan retribusi naik menjadi Rp.3.124,55 juta, untuk kemudian turun lagi menjadi Rp.2.653,76 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025 realisasi pendapatan Retribusi Daerah naik menjadi berturut-turut Rp 38.434,14 dan Rp 42.885,59. Kenaikan ini berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dalam kurun waktu 2021-2025 terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 94,85% per tahun.

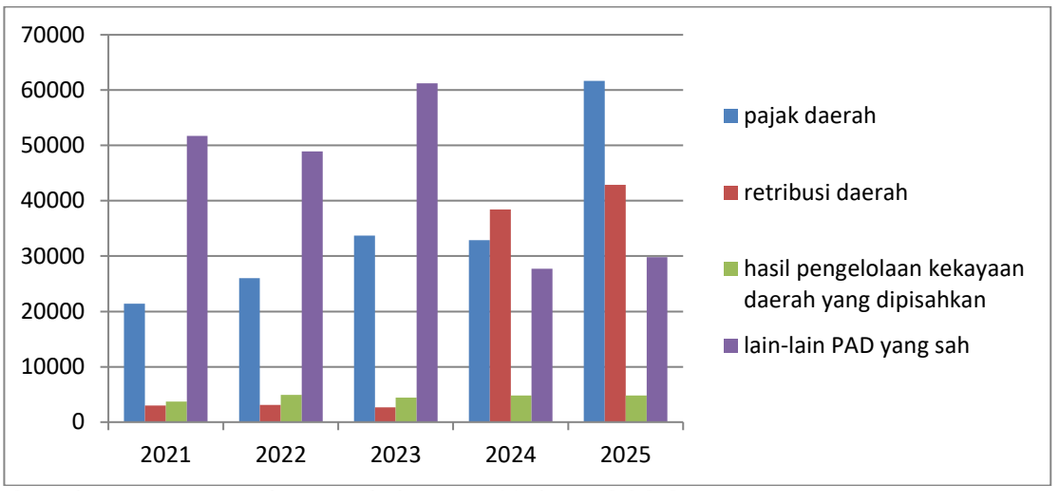
PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PAD dari Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp.3.718,42 juta pada Tahun 2021 menjadi Rp.4.794,40 juta tahun 2025. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,56%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari.

Sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan dengan nominal sebesar Rp 51.748,34 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 29.812,10 juta pada tahun 2025. Dengan demikian lima tahun terakhir Lain-lani Pendapatan Asli Daerah yang sah tumbuh sebesar -12,88%.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

`

Grafik 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (Rp Juta)

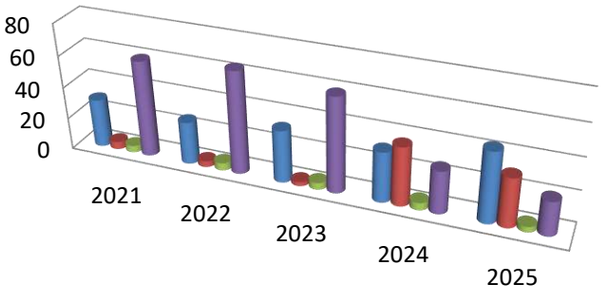


Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Ditinjau dari kontribusi dari masing-masing sumber PAD terhadap PAD, diuraikan sebagai berikut. Kontribusi terbesar dari komponen Pendapatan Asli Daerah sampai tahun 2021-2023 berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dimana sumber penerimaan ini menyumbang lebih dari 60 persen dari total PAD. Namun tahun 2024 terjadi pergeseran dimana konstribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah berasal dari Retribusi Daerah, yaitu sebesar 37%. Kenaikan signifikan penerimaan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan penerimaan yang bersumber dari BLUD RSUD dan Puskesmas. Pada tahun 2025 pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi sebesar 44,32%. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak daerah berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dimana pada tahun seblumnya dibayarkan sebagai Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan bukan merupakan komponen pajak daerah.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
pajak daerah	30,42	26,81	33,06	31,66	44,32
retribusi daerah	4,77	3,73	2,6	37	30,82
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,17	4,66	4,32	4,65	3,45
lain-lain PAD yang sah	60,64	64,81	60,02	26,7	21,42

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektivitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 kurang efektif, karena dalam periode karena persentasenya dibawah 90%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan efektivitas menjadi sebesar 101,74 persen, Artinya, secara total penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 efektivitas sedikit turun menjadi 90,90 persen, namun pada tahun 2025 efektifitas kembali meningkat menjadi 93,13 persen, dengan efektivitas tertinggi pada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 98,97 persen dan efektivitas terendah penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan efektivitas sebesar 86,19 persen. Perkembangan efektivitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Efektivitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71,32	71,80	101,74	90,90	93,13
Pendapatan Pajak Daerah	52,32	56,01	89,27	92,44	97,18
Pendapatan Retribusi Daerah	39,72	40,74	42,91	91,51	86,19
Pendapatan Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93,66	88,20	99,33	99.98	98,97
Lain-lain PAD Yang Sah	86,84	87,57	118,05	87,00	95,05

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

`

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah, dimana masing-masingnya diuraikan sebagaimana berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa, masing-masing diuraikan sebagaimana berikut:

1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Termasuk dalam DTU adalah dana bagi hasill (DBH) pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana alokasi khusus (DAK) yang dibagi atas DAK fisik dan non fisik.

DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasillan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasillan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto dan ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarannya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Perkembangan realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

`

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata pertumbuhan (%)
Dana Perimbangan	942.371,89	980.520,26	1.010.133,59	1.051.489,43	945.923,17	0,09
Dana Transfer Umum	706.681,46	700.950,81	755.215,49	783.238,68	794.989,42	2,99
Bagi hasill	20.012,59	18.194,63	35.066,01	29.065,60	28.819,07	9,55
Dana Alokasi Umum (DAU)	686.668,87	682.756,18	720.149,48	754.173,08	766.170,35	2,78
Dana Transfer Khusus	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	244.972,36	0,84
Dana Alokasi Khusus (DAK)	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	244.972,36	0,84

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

3.4 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dana perimbangan lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -0,09%. Pertumbuhan negatif ini terutama disebabkan karena kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengurangi Transfer ke Daerah pada tahun 2025. Pada tahun 2021-2024 realisasi Dana Perimbangan cendrung meningkat atau mengalami pertumbuhan positif.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID)atau yang sekarang disebut Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Perkembangan DID dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5.

3) Dana Desa

Dana desa merupakan dana diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5
Perkembangan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa
Tahun 2021-2025 (Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata pertumbuhan (%)
DID/Insentif Fiskal	30.442,55		-	-	-	
Dana desa	81.722,35	74.850,45	83.887,36	84.689,97	82.493,70	0,24

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Berdasarkan data sebagaimana Tabel di atas, dana desa menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus dengan angka pertumbuhan rata-rata 0,24 % per tahun.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2027 dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh

`

Kota Tahun 2025–2029, integrasi Dana Desa dilakukan melalui penyelarasan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui Penguatan Ekonomi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dana Desa diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Integrasi tersebut diwujudkan melalui keterpaduan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat desa, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

b) Transfer Antar Daerah

Transfer antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara total Transfer Antar Daerah tumbuh sebesar 9.09 persen per tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dari Rp.45.117,45 juta tahun 2020 menjadi Rp. 63.905,44 juta tahun 2024. Perkembangan realisasi pendapatan yang berasal dari transfer antar daerah tergambar pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun 2021-2025 (Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata pertumbuhan (%)
Transfer antar daerah	56.165,91	72.667,91	57.181,14	63.905,44	51.595,50	-1,91
Pendapatan bagi hasill	56.165,91	64.667,91	55.552,29	63.905,44	51.595,50	-2,10
Bantuan Keuangan		8.000,00	1.628,85		395,00	

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat peda Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2021-2025(Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70.237,69	14.514,51	3.080,01	-	5.856,34
Hibah	13.091,61	14.474,51	3.080,01	-	-
Dana Darurat					4.000,00

`

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
BOS	53.475,19	-	-	-	-
Pendapatan atas pengembalian hibah	3.670,89	40,00	40,00	-	1.856,34

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

Sampai tahun 2021, dana BOS dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sejak tahun 2022 pencatatan BOS pada DAK Non Fisik sehingga masuk kategori Dana Perimbangan, sehingga sejak tahun 2022 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif berkurang. Pada tahun 2024, tidak ada realisasi dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 5.856,34 juta dengan rincian penerimaan Dana Darurat dari presiden sebesar Rp 4.000 juta dan pendapatan atas pengembaliuan hibah sebesar Rp 1.856,34 juta.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan belanja didasarkan kepada klasifikasi tersebut. Untuk memahami kinerja Belanja Daerah dan kontribusinya perlu disajikan perkembangan, pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing jenis Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tersebut.

Realisasi Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp. Rp.918.683,99 juta, naik menjadi Rp.921.225,90 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2023 belanja operasi mengalami penurunan menjadi Rp. 885.101,85. Penurunan belanja operasi ini disebabkan berkurangnya anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa karena kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2024 Belanja operasi naik cukup signifikan menjadi Rp 1.012.245,96 juta, dan pada tahun 2025 realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.049.163,76. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 3,38% per tahun.

Belanja modal menunjukkan besaran yang terus berkurang dengan nilai Rp. 141.199,55 juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 75.123,56 juta pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan -14,59 persen. Belanja Tak Terduga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 27,32 persen dengan nilai Rp.776,54 juta tahun 2021 menjadi Rp.2.040,33 juta pada tahun 2025. Sedangkan Belanja Transfer menunjukkan besaran per tahun yang berfluktuasi. Namun dalam lima tahun terakhir belanja transfer mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,84persen dengan nilai Rp. 161.270,96 juta pada tahun 2021 menjadi Rp.166.743,35 pada tahun 2025 Perkembangan realisasi Belanja Daerah Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 (Rp. juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja						
Belanja Operasi	918.683,99	921.225,90	885.101,85	1.012.245,96	1.049.163,76	3,38
Belanja Pegawai	648.801,43	643.786,70	625.076,11	757.173,81	795.450,93	5,23
Belanja Barang dan Jasa	265.227,16	239.491,48	210.101,44	206.209,54	223.927,36	-4,14
Belanja Hibah	34.067,82	31.416,71	45.239,12	41.486,03	27.520,15	-5,20
Belanja Bantuan Sosial	8.605,10	6.531,01	4.685,18	7.376,58	2.265,32	-28,37
Belanja Modal	141.199,55	149.956,37	124.599,67	116.565,58	75.123,56	-14,59
Belanja Tak Terduga	776,54	708,97	1.697,29	2.402,55	2.040,33	27,32
Belanja Transfer	161.270,96	158.703,49	162.095,52	166.735,51	166.743,35	0,84

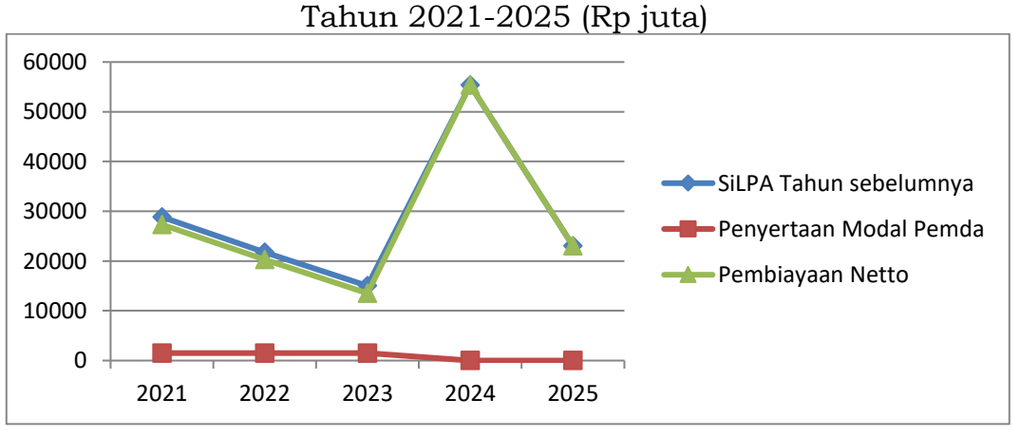
Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dari Rp.32.493,99 juta tahun 2020 menjadi Rp.55.365,91 juta tahun 2024.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal pada BUMD. Pada tahun 2024 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.4
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025 (Rp juta)



Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap.

Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp.1.767.966,76 juta tahun 2021 menjadi Rp.1.904.169,94 juta tahun 2025, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,87%. Kecuali investasi jangka panjang, semua jenis aset menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir.

Dari 4 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah aset lainnya paling tinggi. Pertumbuhan rata-rata per tahun aset lainnya adalah 27,27%, yaitu dari Rp.13.077,08 juta tahun 2021 menjadi Rp.34.311,79 juta tahun 2025. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah aset lancar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14,66%, yaitu dari Rp.58.285,85 juta tahun 2021 menjadi Rp.100.732,72 juta tahun 2025. Aset Tetap tumbuh tidak signifikan sebesar 1,17%, sementara Investasi Jangka Panjang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,79%.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.9
Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata
Pertahun Tahun 2021-2025 (Rp juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	ASET						
a.	ASET LANCAR	58.285,85	48.485,24	105.467,11	71.478,70	100.732,72	14,66
b.	Investasi Jangka Panjang	55.190,86	544964,27	54.088,79	51.989.89	49.282,41	-2,79
c.	ASET TETAP	1.641.412,96	.675.294,44	1.659.564,99	.771.012,98	1.719.843,02	1,17
c.	ASET LAINNYA	13.077,08	11.750,58	11.956,02	9.510,09	34.311,79	27,27
	JUMLAH ASET DAERAH	1.767.966,76	.790.494,54	1.831.076,92	.903.991,66	1.904.169,94	1,87
B	KEWAJIBAN	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,00	19.683,49	11,60
a.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,00	19.683,49	11,60
b	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-					
C	EKUITAS DANA	1.755.275,42	.749.948,11	1.820.712,91	.877.851,66	1.884.486,46	1,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.767.966,76	.790.494,54	1.831.076,92	.903.991,66	1.904.169,94	1,87

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

`

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Ada 2 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancer dan rasio quick. Kedua rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio lancar *(Current Ratio) =Aset lancar/ Hhutang lancar (jk Pendek)*	4,59	1,19	10,42	2,73	5,12
2	Rasio cepat *(Quick Ratio) =(Aset lancar-persediaan)/ hhutang lancar*	3,41	0,86	8.92	2,11	4,34
	RASIO SOLVABILITAS					
3	Rasio total hhutang terhadap total aset	0,007	0,023	0,005	0,013	0,010
4	Rasio hhutang terhadap modal	0,007	0,023	0,005	0.013	0.010

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

`

Tabel 3.10 memperlihatkan beberapa rasio kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (Current Ratio) dan rasio cepat (Quick Ratio) memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar pada tahun 2021 sebesar 4,59 naik menjadi 5,12 pada tahun 2025. Ini berarti pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sebanyak 5,12 kali. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio cepat (Quick ratio). Rasio ini naik dari 3,41 pada tahun 2021 menjadi 4,34 pada tahun 2025. Jika nilai rasio likuiditas lebih dari satu, menunjukkan daerah mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuid. Dapat dilihat pada tahun 2025 rasio likuiditas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik.

Rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio total hhutang terhadap total aset memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan total aset yang dimiliki. Dapat dilihat, rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset sampai tahun 2025 masih aman. Ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang cukup baik dalam melunasi seluruh hutangnya.

3.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasill analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang antara lain terdiri dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2027 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

`

1) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah.
2) Pendapatan Transfer pada tahun 2027 diproyeksi sama dengan tahun 2026 setelah penambahan TKD untuk penanggulangan bencana, dengan pertimbangan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang merupakan panduan pemulihan berbagai sektor terdampak setelah terjadinya bencana berlaku selama 3 tahun yaitu tahun 2026-2028.

Berdasarkan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka rincian atas Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 s/d Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Strategi
1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan meminimalisir kebocoran
2. Peningkatan basis data perpajakan
3. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
4. Melakukan efisiensi pemungutan
5. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan
6. Meningkatkan pengawasan dan sinergisitas dengan instansi terkait
7. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru

Kebijakan
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan system dan prosedur antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online.
2. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
3. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya
4. Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan.
5. Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Provinsi Sumbar dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta optimalisasi penerimaan pajak MBLB
6. Melakukan Pemantauan wajib pajak secara silent operation.
7. Melakukan Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum.
8. Memberikan reward dan pusnishment kepada petugas pajak dan wajib pajak.
9. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.
10. Memberikan insentif berupa penundaan pembayaran pajak daerah bagi pelaku usaha baru.

`

11. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
12. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan

Tabel 3.11
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024-2028

Uraian	Realisasi		Target 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028
	2024	2025			
PENDAPATAN	1.311.095.932.506,99	1.319.466.064.807,00	1.162.703.570.173,00	1.346.447.016.702,00	1.364.346.285.547,00
Pendapatan Asli Daerah	103.887.436.990,99	139.163.745.903,00	150.261.601.018,00	180.261.515.702,00	198.160.784.547,00
a. Pajak Daerah	32.888.914.143,00	61.671.663.207,00	70.134.228.233,00	87.134.186.296,00	93.647.651.056,30,00
b. Retribusi Daerah	38.434.136.973,00	42.885.587.389,00	67.730.234.275,00	80.730.190.896,00	90.876.281.130,00
c. Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	4.828.157.875,00	4.794.398.220,00	5.513.273.477,00	5.513.273.477,00	6.064.600.824,70
d. Lain-lain PAD	27.736.227.999,99	29.812.107.087,00	6.883.865.033,00	6.883.865.033,00	7.572.251.536,30,00
Pendapatan Transfer	1.207.208.495.516,00	1.174.445.981.630,00	1.012.441.969.155,00	1.166.185.501.000,00	1.166.185.501.000,00
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.143.303.052.012,00	1.121.078.686.933,00	968.550.704.000,00	1.104.185.501.000,00	1.104.185.501.000,00
1. Dana Perimbangan	1.051.489.428.012,00	945.923.166.896,00	894.381.197.000,00	1.030.015.994.000,00	1.030.015.994.000,00
a) Dana Transfer Umum	700.950.811.428,00	794.989.420.037,00	659.829.716.000,00	659.829.716.000,00	659.829.716.000,00
1) DBH	29.065.598.000,00	28.819.074.000,00	11.544.117.000,00	11.544.117.000,00	11.544.117.000,00
2) DAU	754.173.082.348,00	766.170.346.037,00	648.285.599.000,00	648.285.599.000,00	648.285.599.000,00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya	625.809.097.000,00	655.777.595.750,00	627.815.193.000,00	627.815.193.000,00	627.815.193.000,00
DAU yang Ditentukan	128.363.985.348,00	110.392.750.287,00	20.470.406.000,00	20.470.406.000,00	20.470.406.000,00

Uraian	Realisasi		Target 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028
	2024	2025			
Penggunaannya					
b) Dana Transfer Khusus	268.250.747.664,00	244.972.355.468,00	234.551.481.000,00	370.186.278.000,00	370.186.278.000,00
1) DAK Fisik	43.139.289.223,00	14.128.857.611,00	1.038.118.000,00	101.672.915.000,00	101.672.915.000,00
2) DAK Non Fisisk	225.111.458.441,00	230.843.497.857,00	233.513.363.000,00	268.513.363.000,00	268.513.363.000,00
2. Dana Desa	84.689.970.000,00	82.493.704.528,00	74.169.507.000,00	74.169.507.000,00	74.169.507.000,00
3. Insentif fiskal	7.123.654.000,		-	-	-
b.Transfer Antar Daerah	63.905.443.504,00	51.990.501.597,00	43.891.265.155,00	62.000.000.000,00	62.000.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasill	63.905.443.504,00	51.595.501.597,00	43.891.265.155,00	62.000.000.000,00	62.000.000.000,00
Bantuan Keuangan	-	395.000.000,00	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat		4.000.000.000,00			
Pendapatan atas pengembalian hibah	-	1.856.337.274,00	-	-	-

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dimana semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, untuk melihat gambaran dari belanja Daerah dari Tahun 2021 sampai dengan proyeksi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan serta dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktifitas dan hilirisasi produk pertanian.
3. Meningkatkan porsi belanja infrastruktur untuk pemenuhan mandatory spending belanja infrastruktur daerah.
4. Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti : (1) peningkatan Early warning System (EWS) untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik terutama daerah 3T.
5. Mengalokasikan belanja untuk dukungan peran Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih dalam mengurangi kemiskinan.
6. Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan.
7. Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbais data sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran utuk meningkatkan capaian SPM.
8. Mengalokasikan dan untuk memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri.
9. Mengalokasikan dana untuk menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap dan penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan.
10. Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan.
11. Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.
12. Prioritas earmarking opsen Pajak Kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan.
13. Mengalokasikan belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan.
14. Mengalokasikan belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan.
15. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.

16. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Mengalokasikan belanja pemenuhan target Standar Pelayanan Minimum.

Tabel 3.12
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024-2028

Uraian	Realisasi		Target 2026	PROYEKSI	PROYEKSI
	2024	2025		2027	2028
BELANJA	1.297.949.602.220,13	1.292.071.011.245,58	1.254.725.169.358,00	1.374.402.392.541,00	1.374.686.715.415,00
a. Belanja Operasi	1.012.245.957.802,13	1.049.163.762,149,58	1.050.073.550.631,00	1.068.018.720.945,00	1.049.791.878.490,00
1. Belanja Pegawai	757.173.806.009,34	795.450.932.865,32	798.672.644.349,00	807.157.081.490,00	807.157.081.490,00
2. Belanja Barang dan Jasa	206.209.541.333,79	223.927.357.697,26	223.743.254.988,00	233.861.639.455,00	215.634.797.000,00
3. Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4. Belanja Hibah	41.486.034.642,00	27.520.146.567,00	25.651.676.294,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	7.376.575.817,00	2.265.325.020,00	2.005.975.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
b. Belanja Modal	116.565.581.127,00	75.123.565.430,00	54.631.889.204,00	154.631.889.204,00	171.977.173.106,00
Belanja Modal Tanah	157.817.558,00	49.553.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.338.591.004,00	26.025.301.758,00	16.785.712.038,00	26.785.712.038,00	34.285.712.038,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	45.086.271.445,00	33.313.632.292,00	10.832.768.000,00	55.832.768.000,00	57.125.358.965,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.019.493.475,00	8.889.335.517,00	16.315.550.065,00	61.315.550.065,00	70.868.243.002,00
Belanja Moda Aset Tetap Lainnya	1.963.407.645,00	6.781.362.863,00	9.697.859.101,00	9.697.859.101,00	9.697.859.101,00
Belanja Moda Aset Lainnya		64.380.000,00			
c. Belanja Tidak Terduga	2.402.553.872,00	2.040.328.994,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Uraian	Realisasi		Target 2026	PROYEKSI	PROYEKSI
	2024	2025		2027	2028
d. Belanja Transfer	166.735.509.419,00	166.743.354.672,00	147.519.729.523,00	149.251.782.392,00	150.417.663.819,00
1. Belanja Bagi Hasill	3.707.411.919,00	6.498.573.844,00	7.586.520.323,00	9.286.511.792,00	10.452.393.219,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	163.028.097.500,00	159.244.780.828,00	139.933.209.200,00	139.965.270.600,00	139.965.270.600,00

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu terdiri dari 2 komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah juga ditinjau dari dua komponen pembiayaan tersebut.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain: kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasill penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan pihutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Untuk melihat realisasi, target, dan proyeksi pembiayaan tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
tahun 2024-2028

No	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
		2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	23.012.815.308,31	50.435.476.115,17	92.021.599.185,00	27.955.375.839,00	10.340.429.868,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasill penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan pihutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.012.815.308,31	50.435.476.115,17	92.021.599.185,00	27.955.375.839,00	10.340.429.868,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok hhutang	-	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
		2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	23.012.815.308,31	50.435.476.115,17	92.021.599.185,00	27.955.375.839,00	10.340.429.868,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2026

Pada Tahun 2027 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memproyeksikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp 27.864.033.899,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nol karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sehingga pembiayaan netto pada tahun 2027 adalah sebesar Rp 27.864.033.899,00. Secara umum gambaran pendapatan, pembiayaan dan belanja pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2027

No	Uraian	2027
1	*2*	*3*
4	PENDAPATAN	1.346.447.016.702,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	180.261.515.792,00
4.1.01	Pajak Daerah	87.134.186.296,00
4.1.02	Retribusi Daerah	80.730.190.896,00
4.1.03	Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.513.273.477,00
4.1.04	Lain-lain PAD	6.883.865.033,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.166.185.501.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.104.185.501.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	74.169.507.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasill	11.544.117.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	3.158.747.000,00
4.2.01.07.02	DBH SDA	6.513.290.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.872.080.000,00
4.2.01.08	DAU	648.285.599.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	627.815.193.000,00
4.2.01.08.02	DAU Ditentukan Penggunaannya	20.470.406.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Dukungan Pendanaan P3K	-
4.2.01.08.02.0002	DAU Ditentukan Bidang Pendidikan	5.321.897.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Ditentukan Bidang Kesehatan	15.148.509.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	370.186.278.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	101.672.915.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	268.513.363.000,00

No	Uraian	2027
1	*2*	*3*
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasill	62.000.000.000,00
5	BELANJA	1.374.402.392.541,00
5.1	Belanja Operasi	1.068.018.720.945,00
5.1.01	Belanja Pegawai	807.157.081.490,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.861.639.455,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000
5.2	Belanja Modal	154.631.889.204,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.785.712.038,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.832.768.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.315.550.065,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.697.859.101,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	149.251.782.392,00
5.4.01	Belanja Bagi hasill	9.286.511.792,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.965.270.600,00
	Surplus(deisit)	(27.955.375.83900)
	PEMBIAYAAN	27.955.375.839,00
	Penerimaan pembiayaan	27.955.375.839,00
	Pengeluaraan pembiayaan	0

Sumber: BPKPD Lima Puluh Kota Tahun 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan serta memperhatikan arahan Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu, penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
2. Permasalahan dan isu strategis Nasional dan Provinsi yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis kabupaten, seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, Layanan infrastruktur dasar yang masih terbatas dan belum menyeluruh. Daya saing, nilai tambah dan produktifitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah dan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relative rendah.
3. Keterkaitan terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang di fokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi makro dan optimalisasi kelembagaan dan tata Kelola pemerintahan.
4. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil, dengan tetap difokuskan pada sektor utama distribusi PDRB di Lima Puluh Kota, yakni sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta pariwisata.
5. Keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Visi Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah terbentuk, guna mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Sebagai penjabaran operasional, visi tersebut diterjemahkan ke dalam Delapan Misi Presiden (Asta Cita) yang menjadi kerangka utama arah kebijakan pembangunan nasional. Asta Cita selanjutnya diimplementasikan melalui 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup berbagai sektor strategis, serta diperkuat dengan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai instrumen percepatan untuk menghasilkan dampak nyata dalam jangka pendek. Keseluruhan kerangka ini dirancang untuk

menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus membangun fondasi struktural yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan tersebut dikonsolidasikan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai pilar utama pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional merupakan bentuk operasionalisasi langsung dari Asta Cita yang berfungsi sebagai kerangka integratif lintas sektor dan lintas wilayah. Setiap Prioritas Nasional dijabarkan lebihlanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki indikator dan target kinerja yang terukur.

Struktur perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha (BUMN dan swasta), dalam menyusun program dan kegiatan secara selaras, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah dapat terjaga, serta mampu mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam mencapai sasaran nasional secara optimal. Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang

berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

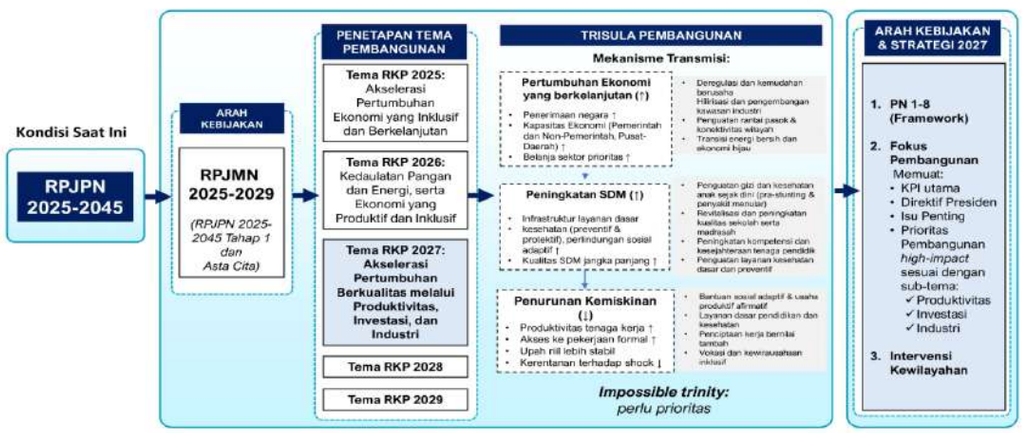
1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
   a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2029
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. RKP 2027 disusun secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja, dengan memastikan konsistensi terhadap arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029, kesinambungan pembangunan antarperiode, serta responsivitas terhadap dinamika pereonomian global dan domestik.

Selain itu, RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural sebagai fondasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan proses perencanaan yang komprehensif dan berbasis evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, ditetapkan tema RKP Tahun 2027, yaitu:

"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi dan Industri"

Gambar 4.1 Dukungan Terhadap Tema Pembangunan



Sumber : Kedeputian PMP, Bappenas 2026

Pelaksanaan RKP Tahun 2027 juga difokuskan pada penguatan implementasi direktif Presiden melalui intervensi prioritas yang strategis dan berdampak langsung sebagai pengungkit pertumbuhan. Pendekatan ini diarahkan pada program berdaya ungkit tinggi (high impact), percepatan realisasi investasi, serta penguatan industri bernilai tambah. Kebijakan yang ditempuh diorientasikan untuk menghasilkan efek berganda (multiplier effect) terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan pembangunan nasional secara berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 difokuskan pada penguatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan percepatan industrialisasi. Ketiga pilar ini dirumuskan sebagai respon strategis terhadap dinamika perekonomian nasional dan daerah, termasuk kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Pertama, peningkatan produktivitas diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan tenaga kerja produktif, serta akselerasi inovasi. Intervensi kebijakan difokuskan pada

penguatan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis, revitalisasi dan penguatan satuan pendidikan, pengembangan sekolah unggul, serta perluasan akses layanan kesehatan. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi, literasi IPTEK, dan inovasi daerah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Dari sisi permintaan agregat, produktivitas didukung melalui penguatan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat, antara. lain melalui optimalisasi Kartu Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial Nasional, serta penguatan koperasi desa/kelurahan dan pembiayaan perumahan rakyat. Transformasi ini diperkuat melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan berbasis data terpadu, pengembangan layanan digital yang terintegrasi lintas sektor, serta penguatan regulasi dan kelembagaan yang adaptif untuk mendukung kepastian berusaha dan stabilitas pembangunan.

Kedua, penguatan investasi diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan, penguatan investasi hijau, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas ekonomi, termasuk pengembangan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan. Selain itu, optimalisasi pembiayaan pembangunan didorong melalui kolaborasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan skema pembiayaan inovatif, baik konvensional maupun syariah. Investasi juga diarahkan secara lebih selektif dan berorientasi ekspor melalui pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta destinasi pariwisata prioritas guna memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis nilai tambah.

Ketiga, percepatan industrialisasi ditempuh melalui penguatan industri nasional dan hilirisasi sumber daya alam strategis. Fokus pembangunan diarahkan pada pengembangan industri strategis nasional, termasuk pengelolaan sampah, industri pertahanan, serta pengembangan industri otomotif nasional. Pada saat yang sama, hilirisasi SDA diperkuat pada sektor kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta mineral kritis untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Arah kebijakan ini juga mendukung pencapaian agenda swasembada pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka integratif dalam RKPD Tahun 2027 yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi struktural, peningkatan daya saing, dan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

"Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan"

Dalam mewujudkan Visi tersebut juga telah ditetapkan Misi, tujuan dan sasaran untuk pelaksanaan masing-masing misi yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan Untuk Mendukung Daya Saing Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Produktivitas
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Keberlanjutan
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan Dengan Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa/Nagari Berbasis Potensi Lokal
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Layanan Dasar Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa/Nagari/Kelurahan
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Perdagangan, Investasi, Industri, Dan Inovasi	Meningkatkan Investasi, Perdagangan, Dan Daya Saing Industri Daerah
		Memperkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Yang Inklusif Dan Berkualitas
		Mendorong Pertumbuhan Umkm Dan Industri Kecil-Menengah Sebagai Pilar Ekonomi Daerah
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan	Terwujudnya Infrastruktur Yang Inklusif, Tangguh	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya Pengelolaan

Visi		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Siap Tanggap Bencana	Bencana, Dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat	Sumber Daya Air Yang Produktif Dan Berkelanjutan
		Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Terwujudnya Masyarakat Beradat Dan Berbudaya Yang Harmonis, Religius, Serta Berbasis Keluarga Berkualitas	Memperkuat Nilai Adat, Budaya, Dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat
		Meningkatnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender
		Terwujudnya Lingkungan Sosial Yang Aman Dan Harmonis Berbasis Keluarga Berkualitas
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Umkm	Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Daerah
		Memperkuat Peran Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Dan Pelayanan Publik Yang Efektif.	Efisiensi Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dan Kinerja Keuangan Daerah

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2027, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yakni: "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan".

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Transformasi Ekonomi
   Diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi desa berbasis badan usaha milik nagari dan koperasi, penguatan industri kecil, usaha kecil, dan sektor kreatif, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
2. Inklusi Sosial
   Inklusi sosial diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, melalui peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja, serta perluasan akses sanitasi, air minum, dan perumahan layak.
3. Ketahanan Pangan
   Ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah dan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan juga memperhatikan upaya pemulihan pascabencana dan penguatan ketangguhan daerah, sejalan dengan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Pemilihan Tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan penetapan fokus prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2027, diuraikan sebagaimana berikut: Tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,90%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,23%, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 78,04, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,64%, dan Gini Rasio ditargetkan sebesar 0,280.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Sebelum melangkah kepada tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027, perlu kiranya disampaikan apa yang menjadi Visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, dimana telah dirumuskan visi daerah dalam RPJMD 2025-2029 adalah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera Berkelanjutan”. Adapun untuk perwujudan visi tersebut, juga telah dirumuskan misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
VISI: Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"	1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah	1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
		2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	2.1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan
		3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif	3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			pemberantasan korupsi
		2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	1.1 Meningkatnya intelektual dan karakter anak usia sekolah
			1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
		2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif
4.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	1.1 Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal
			1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional
		2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2.1 Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota
			2.2 Optimalisasi ekonomi kreatif

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5.	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	1.1. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau
6.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"	1. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	1.1 Membangun infrastruktur stategis
			1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	1. Meningkatkan status nagari	1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional, Sumatera Barat, dan Lima Puluh Kota serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2027, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengusung Tema Pembangunan Tahun 2027 yakni:
“Pemulihan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Dasar Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Substansi hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 memberikan penegasan terhadap pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penajaman prioritas pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027, dan prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengakomodasi berbagai arahan kebijakan, prioritas pembangunan, serta fokus program yang telah disepakati dalam Rakortekrenbang ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun tidak hanya sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan. Hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 menjadi landasan dalam memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Tabel 4.3
Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis
Perencanaan Pembangunan Tahun 2026
Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
				2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				
		3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
				1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
		1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		
				1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai
		1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
				1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
				1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan		
				1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
				1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
				1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	koperasi.				
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		
				2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
				2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan		

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
				3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
		3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		
				2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		
				2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman		
				1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		
				1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial		
				1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
				2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa		
				2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
				2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
				2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
				8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
				8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)		
				2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
				2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata		
				3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	makmur.				
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan		
				2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
		2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		
				2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
				2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan		
				1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
				1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					Kesehatan Sesuai Standar
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan		
				2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
				2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak		
				2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
				2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
				2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
				2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
				2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan		
				2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
		2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
				2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
				1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip		
				2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027

No	Indikator Makro Pembangunan	2027			
		RPJMD	RKP	RKPD Prov	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	5,9–7,5	6,90	6,87
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	70,68	5.900–5.990	77,31	70,68
3.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,66		38,9	36,66
4	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	73,41 73,97 13,51 8,33 11.142		78,04 75,06 14,77 9,69 12.262	73,41 73,97 13,51 8,33 11.142
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,57	4,30–4,87	5,23	3,57
6.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.001		281.838	23.001
7	Tingkat Kemiskinan (%)	5,54	6,0–6,5	4,64	5,54
8	Gini Rasio	0,217	0,362–0,367	0,28	0,217

Sumber: RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Ranwal RKP 2027.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder. RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ke-3 (ketiga) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029. Dalam Penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 dengan tidak melupakan aspek pelayanan dasar dan prioritas unik yang di daerah sendiri.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah. "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian

Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional
Tahun 2025-2029

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		1	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
a	Indeks Demokrasi Indonesia	82,55 – 86,09	2	Penguatan Komunikasi Publik dan Media
b	Indeks HAM	70,00	3	Penguatan Lembaga Demokrasi
			4	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
			4	Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan		1	Pembangunan Postur Pertahanan
a	Asia Power Index (Military Capability)	67,4	2	Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	18	3	Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung
2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)		4	Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi
a	Indeks Ketahanan Pangan	77,5	5	Swasembada Pangan
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,2-5,9%	6	Swasembada Energi

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
3	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau		7	Swasembada Air
a	Indeks Ekonomi Hijau	74,51	8	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik
b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,84	9	Ekonomi Digital
c	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	21,5%	10	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)		11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
a	Asia Indeks Ketahanan Air Nasional	3,595	12	Ekosistem Ekonomi Sirkular
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan		13	Reformasi Pengelolaan Sampah
a	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	44,05	14	Pembangunan Rendah Karbon
b	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	42	15	Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*
6	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)		16	Pengelolaan Hutan Lestari
a	Indeks Ketahanan Energi	7,71		
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		1	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,50	2	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
				Listrik
2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB		3	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	198,8%	4	Pendalaman Sektor Keuangan
b	Aset Perbankan/PDB (%)	65,37%	5	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
c	Tingkat Inklusi Keuangan	92,00	6	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81		
4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,70-4,80		
b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	25,50-28,60		
5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,70-8,10		
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
1	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua		1	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
a	Usia Harapan Hidup (UHH))	9,45	-	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
b	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate)*	2,10	-	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
c	Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	16,3%	-	Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
			-	Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan
			-	Penguatan Pelayanan Kesehatandan Tata Kelola
2	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		2	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
a	Harapan Lama Sekolah	13,44	-	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
b	Rata-Rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional		-	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	- Literasi Membaca	64,89	-	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	- Numerasi	57,38	-	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)*
c	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	11,55		
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat		3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat
a	Capaian Prestasi Pada SEA Games Tahun 2027	Peringkat 2-4	-	Peningkatan Pembinaan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
b	Capaian Prestasi Pada ASEAN Para Games Tahun 2027	Peringkat 1-2		
c	Persentase Penduduk	11,25-		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
	Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Aktif Berolahraga	12,43		
4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja		4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30-4,87	-	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Peringkat Indeks Inovasi Global	50-55	-	Penguatan Budaya Literasi dan Inovasi
			-	Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional
			-	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
5	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		5	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
a	Indeks Pebangunan Kualitas Keluarga	74,53	-	Peningkatan Ketangguhan Keluarga
b	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,381	-	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak
c	Indeks Pembangunan Gender	92,18-92,31	-	Peningkatan Kualitas Pemuda
d	Indeks Perlindungan Anak	73,34	-	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan
e	Indeks Pembangunan Pemuda	68,95	-	Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	95%		
g	Mobilitas Penduduk	70%		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
	Penyandang Disabilitas			
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		1	Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor
a	Rasio PDB Industri Pengolahan Terhadap PDB Nasional	21,50	2	Pengembangan aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		3	Optimalisasi Backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
a	Persentase Biaya Logistik Nasional Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	13,00	4	Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,9%	5	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
c	Ekspor Barang dan Jasa	22, 7-23,1%	6	Optimalisasi Investasi Strategis Danantara
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		1	Penguatan Perencanaan Berbasis Bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
a	Proporsi Penduduk	18,20-	2	Perlindungan Sosial

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
	Kelas Menengah (%)	18,70		Adaptif dan Inklusif
b	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,85	3	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
2	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		4	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,00	5	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif
3	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		6	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	58,16	7	Percepatan Penyediaan Perumahan Permukiman
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,86		
4	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan			
a	Persentase Desa Mandiri (%)	24,51		
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsiona		1	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,71	2	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
b	Indeks Integritas Partai Politik	67,00 - 68,99	3	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan		4	Perlindungan Warga Negara Indonesia di

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
	Melayani			Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	74,26	5	Peningkatan Produktivitas BUMN
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94,50	6	Pemerintah Digital
3	Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba		7	Pencegahan danPemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,65	8	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan		9	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,31	10	Optimalisasi Pendapatan Negara
5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan			
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	11,82-12,40		
6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0		
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan		1	Penguatan kerukunan umat beragama dan

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
	Maju			layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	67,40	2	Pembangunan Berkelanjutan Iklim
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,41	3	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,07	4	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna.
2	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,135		

Sumber : RKP 2027

4.2.2. Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung program strategis nasional diantaranya:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
      Dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota maka beberapa upaya yang dilakukan dengan 3 langkah strategi seperti tabel dibawah ini:

No	Bidang Urusan	Strategi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD - Penyediaan Biaya	Dinas Pendidikan

No	Bidang Urusan	Strategi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama - Pengadaan Mebel PAUD - Pengadaan Perlengkapan PAUD - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengadaan Mebel Sekolah - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang	

No	Bidang Urusan	Strategi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Diselenggarakan oleh Masyarakat - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
2	Kesehatan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Sosial	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	- Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan alat bantu - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinas Sosial
5	Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	- Proses Pelaksanaan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit Kompetensi	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja
6	Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	- Pengembangan kapasitas nelayan kecil - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Dinas Perikanan
7	Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	- Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain - Pengadaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2) Sekolah Rakyat

Bentuk dukungan program Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berupa penyediaan lahan yang telah ada dan berlokasi di Sungai Kamuyang Kec. Luak, bangunan, perizinan sekolah rakyat, serta penyiapan guru dan tenaga pendidik.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung program Sekolah Rakyat adalah seperti yang tertuang pada tabel dibawah ini:

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Sekolah Rakyat	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3) Pembangunan 3 Juta Rumah

Bentuk dukungan program Pembangunan 3 Juta Rumah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang pada sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Program 3 Juta Rumah di daerah dilaksanakan oleh pengembang (developer) dalam bentuk penyediaan rumah bersubsidi, program ini diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum punya rumah dan saat ini mengontrak bisa memiliki rumah dengan cicilan per bulan yang rendah dan sanggup dibayar.

Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pengembang mulai terlaksana pada tahun 2026 pada 5 lokasi perumahan yaitu :

1. Perumahan Palano Padang Harapan
2. Perumahan Ameh Greenland II
3. Perumahan Lamora Land 1
4. Perumahan Pintu Angin
5. Perumahan Nur Anbiya' Hill

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung program 3 juta rumah adalah seperti yang tertuang pada tabel dibawah ini:

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Pembangunan 3 juta rumah	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), - Sertifikat Laik Fungsi (SLF), urat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), - Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukinan

b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan Bulog dalam pendampingan penyaluran (CBP) kepada Masyarakat. Sumber pendanaan untuk penyediaan CBP Adalah dari dana APBN.
Berikut tabel dukungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap ketahanan pangan:

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri dan penyaluran cadangan beras pemerintah	- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pangan

c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
1) Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa <90% pekerja (termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya) dari total penduduk (sesuai target Universal Health Coverage yang ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan) merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjamin Kesehatan untuk semua masyarakat adalah seperti yang tertuang pada rencana aksi dibawah ini:

No	Bidang Urusan	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Kesehatan	- Pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat - Memastikan setiap penduduk yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota (≥ 98%) terdaftar sebagai peserta aktif program	- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (mencapai 90-100% dari daftar Fornas dan Kompendium)		

2) Makan Bergizi Gratis.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis adalah:

No	Bidang Urusan	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Kesehatan	Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, fasilitasi Satgas, dan peningkatan persentase ibu hamil dan menyusui, balita, siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pengelolaan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Dinas Kesehatan

d. Perluasan Akses Pendidikan

No	Bidang Urusan	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Laboratorium - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:

1) Pengendalian Inflasi;

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	- Pendukungan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) - Penganggaran BTT untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat - Pelaksanaan Data dan informasi 9 langkah konkret pengendalian inflasi	- Pengendalian dan distribusi perekonomian - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pada tahun 2025 telah dibentuk Koperasi merah putih di 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2027 untuk mendukung program strategis nasional dalam bidang Koperasi adalah seperti yang tertuang pada matrik dibawah:

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Koperasi Merah putih	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3) Kemudahan perizinan di daerah.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	- Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik - Penyediaan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan	- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - Pengawasan Penanaman Modal - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)		

4.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut :

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN	VOLUME
Prioritas 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Index Pembangunan Manusia	Indeks	78,04
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.61
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,69
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14,55
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,64
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,06
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	98
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	18

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	5,6
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	85,60
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	86.365.206
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	5,99
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,33
	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	29,68
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.615
Prioritas 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan			
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan yang Mandiri dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kota sebagai Pusat Pertumbuhan	Indeks Desa	Indeks	8.97
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39.54
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten	Persen	6,87
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	5,23
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	persen	1.33
	Tingkat Pengangguran Perdesaan	persen	4,42
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan	persen	5,49
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	68,59
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	persen	12,5
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	45,94
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	47,5
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	28,59
Prioritas 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat			
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan,	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.72
	Tingkat Inflasi	Persen	1,75-3,51
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen per PDRB	30,52

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	VOLUME
investasi, industri, dan inovasi			
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	persen	7,98-7,92
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	17,99
	Total Kredit/PDRB	persen	26,78
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	3.477.413
	Aset Dana Pensiun/PDR	persen	0,99
	Konsumsi listrik per kapita	kWh	769,71
	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	134,82
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	77,26
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	41,05
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	persen	18
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	60,02-61,87
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah(%)	persen	2,72
	Inklusi Keuangan	persen	88,49
Prioritas 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana			
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	139,98-138,71
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,37
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	47,27
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	persen	19,76
	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	persen	31,97
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	1,77
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	71,69
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,45
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	(jam/jarak tempuh)	2,75
Prioritas 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama,			

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	VOLUME
Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,10-81,97
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	73,62
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,71-61,87
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	3.068
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,73-72,02
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	persen	75,4
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	71,25
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,09
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	persen	94,6
Prioritas 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa Lainnya(%)	persen	2,65
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	orang	47,43
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	persen	1.46
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan kecil	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	persen	1.09
	Rasio kewirausahaan Provinsi	persen	4,17
Prioritas 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif			
Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74,66
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,01
	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,7
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,75
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persen	43,75
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	1,22
	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	2,172

4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan layanan dasar yang dijadikan sebagai salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana muara keberhasilan pelaksanaannya pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 8 Permendagri 59 tahun 2021). Laporan SPM digunakan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara (Pasal 9 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021). Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi serta penerapan menurut data olahan e-SPM Ditjen Bina Bangda, dengan data capaian sebagaimana berikut:

Grafik 4.1
Hasil Capaian IP SPM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025



Sumber: e-SPM Ditjen Bina Bangda

Pada tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh capaian IP IPM 99,93% dengan predikat Tuntas Utama. Lebih rinci terkait capaian SPM di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Triwulan IV, dapat dilhat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.2
Persentase Realiasasi Capaian SPM Tahun 2025
Per-Bidang



Sumber: e-SPM Ditjen Bina Bangda

Dari grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan 99,62%, bidang kesehatan 100% ,bidang pekerjaan umum 100%, bidang perumahan rakyat 100%, bidang trantibumlinmas 99,93%, dan yang terakhir bidang sosial 100%. Dengan capaian total nilai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota semua bidang adalah sebesar 99,93%.

Terkait dengan tingkat ketercapaian penerapan SPM terdapat hambatan dan kendala yang kerap ditemui, antara lain :

1. PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : warga yang benar-benar miskin).
2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan.
3. Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
4. Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk.
5. Kondisi Geografis yang 85% pegunungan mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.
6. Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM yaitu pada tahapan pendataan.
7. Penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
8. Masih terdapat perubahan target pada layanan sekaligus melakukan pemutakhiran data di akhir triwulan.
9. Anggaran dalam kegiatan dan sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM.

Untuk mewujudkan target-target capaian SPM Tahun 2027, berikut disampaikan program/ kegiatan pendukung pencapaian SPM:

Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan dasar (SD/SMP)	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				6. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 7. Pengembangan konten digital untuk pendidika 8. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 9. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 11. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 12. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 13. Pembangunan Ruang Kelas Baru 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 17. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 18. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4. Penyediaan Biaya

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 9. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 11. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 13. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 15. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 16. Pembangunan Ruang Kelas Baru 17. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 18. Pengadaan Alat

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemereataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 9. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemereataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 8. Pembangunan Ruang Kelas Baru 9. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemereataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan diabetes melitus

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lupur Tinja (IPLT)

Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	kabupaten/kota		Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Sosialisai standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
			Pembangunan dan rehbilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 7. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 8. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 9. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 10. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 11. Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 12. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 2. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Daerah dan Peraturan Kepala daerah 4. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. Pembentukan Sekretariat PPNS 2. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah 3. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Kajian Resiko Bencana kabupaten/Kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten 6. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4. Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten 5. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten 6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daederah Kabupaten/kota 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 9. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar dearah berbatasan

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				,antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 10. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

Bidang Sosial

No	Jenis Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar 8. Pemberian Layanan Rujukan
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial 5. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Prioritas pembangunan tahun 2027 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Strategis. Namun demikian prioritas pembangunan daerah tahun 2027 juga responsif dan tanggap terhadap upaya

peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing- masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Tabel 4.7
Perbandingan Prioritas Pembangunan Pada RPJMD
dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2027 (RKPD)
1	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
2	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
3	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial
5	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
6	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
7	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
8	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
9	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
10	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Dalam rangka perwujudan dari program prioritas dimaksud, berikut disampaikan sasaran dan target indikator sasaran dari setiap prioritas pembangunan tersebut. Penetapan indikator disetiap sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan prioritas daerah tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan secara fokus oleh pemerintah daerah, karena keberhasilan dari prioritas daerah tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan stakeholder serta masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 4.8
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2027	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	2,18	Indeks
2	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	72,40	Indeks
			Indeks Pelayanan Publik	4,30	Indeks
3	Penguatan kualitas pendidikan,kesehatan,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,33	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,51	Tahun
			Usia Harapan Hidup	73,97	Tahun
			Indeks Pembangunan keluarga	63,6	Indeks
4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Meningkatnya daya saing masyarakat secara inklusif	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Rp64.374.937	Rupiah
5	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil	Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.946%	Persen
6	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.95	Rasio
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orag)	2	Ribu orang
7	Penguatan Kelembagaan redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	33,96%	Persen
8	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Membangun infrastruktur strategis	RT dengan Akses Sanitasi Aman	11,46	Persen
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	17	Persen
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	56,93	Persen
9	Penataan infrastruktur strategis	Meningkatnya kualitas	Indeks tutupan lahan	75,53	Indeks
			Proporsi RT Dengan	36,63	Persen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2027	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
	dan terpadu	lingkungan hidup	Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		
10	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	Meningkatnya kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	91,14%	Persen

Sumber : RPJMD 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, dan penjabaran arah kebijakan pembangunan daerah per tahunnya akan dituangkan kedalam dokumen RKPD 2027, begitu juga dalam hal perencanaan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2027.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut:

Prioritas pembangunan 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama

Program ini bertujuan memperkuat nilai-nilai agama dan adat istiadat sebagai landasan moral dan budaya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Melalui pembinaan agama dan adat, diharapkan terwujud kesadaran kolektif dalam menjaga tradisi, norma sosial, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas daerah sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Dalam hal pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama yang merupakan prioritas utama di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka indikator untuk mencapai tujuan Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dengan sasaran Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan tersebut adalah indeks ABS-SBK. Dimana realisasi tahun 2025 untuk nilai Indeks ABS-SBK kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1.95 dari target 1,9 dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2027 ini target yang ingin dicapai untuk Indeks ABS-SBK adalah sebesar 2,18. Dalam hal pencapaian indikator yang terkait dengan program prioritas ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah

fokus pada pengembangan kerukunan antar umat beragama dengan mendorong dialog, kerja sama, dan kegiatan bersama antar komunitas keagamaan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana damai dan toleran yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah secara inklusif.. Anggaran untuk hibah ke mesjid ini telah disediakan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran setiap tahunnya termasuk untuk tahun 2027.

Program ini bertujuan memperkuat nilai-nilai agama dan adat istiadat sebagai landasan moral dan budaya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Melalui pembinaan agama dan adat, diharapkan terwujud kesadaran kolektif dalam menjaga tradisi, norma sosial, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas daerah sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dalam hal pencapaian indikator yang terkait dengan program prioritas ini adalah indeks ABS-SBK, dimana untuk mencapai target di tahun 2027 sebesar 2,18 upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah fokus pada pengembangan kerukunan antar umat beragama dengan mendorong dialog, kerja sama, dan kegiatan bersama antar komunitas keagamaan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana damai dan toleran yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah secara inklusif.

Pelaksanaan program melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, perguruan tinggi, serta lembaga sosial keagamaan sebagai mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkokoh kehidupan sosial yang harmonis, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Adapun bentuk kegiatan dari pelaksanaan dari pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama ini adalah Perawatan Rumah Ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembinaan Agama Dan Adat Serta Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 1 Pembinaan Agama Dan Adat Serta Kerukunan Antar Umat Beragama

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama			
Tujuan : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah			
Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	Indeks	2.18

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan optimalisasi fungsi kelembagaan keagamaan, adat dan budaya serta pengelolaan keuangan sosial
2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap cagar budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten
3. Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat.

Prioritas pembangunan 2 : Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Program ini merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan potensi penerimaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat. Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penguatan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil untuk memastikan setiap unit kerja dan individu aparatur dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengembangan budaya kerja yang profesional, etis, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi prioritas dalam membangun birokrasi yang responsif dan akuntabel.

Sementara itu, optimalisasi pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset, Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan inovasi sumber-sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan. Sinergi antara reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang terkait dengan reformasi birokrasi, terdapat 2 tujuan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian dari kemenPan-Rb Pada Tahun 2024 pencapaian nilai Indeks reformasi birokrasi untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 70,81 kategori BB dari target yang ditetapkan 64,17 dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai yang baik ini sangat memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan

meningkatnya nilai indeks dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2027 ini, target yang ditetapkan untuk Indeks reformasi Birokrasi adalah di angka 72,40 untuk kategori B.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 2 Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,40
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,30

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah
2. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial secara berkelanjutan

Prioritas pembangunan 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan kedua dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari program prioritas daerah ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator yang merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka

harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 masih berada pada posisi sedang (60-79), yaitu berada pada angka 70,82 sampai dengan 72,51. Untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 72,51 naik 0,46 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023.

Peningkatan IPM ini harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan, dan upaya yang dilakukan utuk dapat mendongkrak nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih jauh dari IPM Provinsi, maka dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
2. Gerakan Bersama Peningkatan Pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan (Gebrak);
3. Pencegahan dan Penurunan Stunting (Menuju Lima Puluh Kota Bebas Stunting/MELIPUT STUNTING)
4. Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
5. Universal Health Coverage (UHC)

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan,
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif			
Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Nilai	8,33
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,51
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,97

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,

memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

Prioritas pembangunan 4 : Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja yang belaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktifitas tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp58.363.161 dari jumlah yang bekerja 212.991 mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar Rp58.442.586 dari 221.277 orang yang bekerja.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja di tahun 2027 ini adalah dengan cara melakukan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota. Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran No.17 Tahun 2025 tentang Gerakan Sakato Liko (Sejahterakan Pekerja Kito Lima Puluh Kota) melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal ini tenaga kerja rentan yaitu pekerja yang memiliki kondisi kerja dibawah standar, berisiko tinggi, dan berpenghasilan minim, serta rentan terhadap gejolak ekonomi dan kesejahteraan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Peningkatan Produktifitas tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 4 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 4 : Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial			
Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja			
Sasaran 1 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	Rp64.374.937

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.
2. Meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi.
4. Memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal.
5. Mendorong kemitraan dunia usaha dan industri.
6. memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi.

Prioritas pembangunan 5 : Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kapasitas, dan memperkuat koperasi serta usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan teknis dan pengembangan pemasaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing produk UMK di pasar lokal dan regional. Penguatan koperasi difokuskan sebagai sarana pemberdayaan anggota dan penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif. Dengan sinergi antara pengembangan kapasitas dan akses sumber daya, program ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dalam periode 2020 hingga 2024, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi serta proses pemulihan ekonomi koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2020, rasio mencapai titik tertinggi sebesar 1,33804%, mencerminkan masih kuatnya peran koperasi dalam ekonomi lokal. Berbagai kondisi termasuk pandemi menyebabkan penurunan hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,64568%. Memasuki tahun 2023 dan 2024, rasio menunjukkan tren pemulihan, masing-masing naik menjadi 0,67453% dan 0,92009%. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas koperasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, serta adopsi teknologi digital.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu Langkah strategis, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, begitu pula untuk pembentukan Koperasi Merah Putih pada tingkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Koperasi Merah Putih adalah inisiatif strategis Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa dan

mengentaskan kemiskinan, sekaligus mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, mengelola berbagai sektor seperti distribusi sembako, apotek desa, klinik, unit simpan pinjam, cold storage, hingga logistik, guna mempersingkat rantai pasok dan menekan harga pangan agar lebih terjangkau.

Koperasi Merah Putih memiliki visi untuk menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri, serta misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan yang prima dan profesional. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, terdapat beberapa instruksi yang diberikan kepada bupati/walikota terkait Koperasi Merah Putih yaitu Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Tabel 4.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 5 Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 5 : Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan			
Sasaran 1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Persen	0.946%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal.
2. Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global.
3. Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro.

Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan kreativitas lokal guna meningkatkan daya tarik pariwisata serta mendorong berkembangnya industri kreatif sebagai sektor ekonomi baru yang strategis. Dalam sektor pariwisata, program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya dan ekowisata, serta promosi yang efektif melalui

pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting untuk memastikan partisipasi aktif dan manfaat ekonomi yang merata. Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan kapasitas kreator lokal melalui pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan penguatan ekosistem inovasi. Pendampingan dalam hal pemasaran digital, pengembangan produk, dan kolaborasi antar pelaku usaha kreatif menjadi strategi utama untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Sinergi antara pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, makan minum termasuk salah satu subsektor dengan peran yang cukup penting. Makanan dan minuman, atau kuliner, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, dan dapat menjadi faktor penentu dalam memilih destinasi wisata. Kuliner juga berkontribusi pada ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan melestarikan warisan budaya. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha akomodasi makan minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi makan minum sebesar 0,71 persen dan terus meningkat hingga menjadi 0,83 persen pada tahun 2024.

Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif			
Tujuan : Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sasaran 1 : Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen	0.95

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan.
2. Penguatan potensi wisata halal

Prioritas 7: Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi

Program ini bertujuan memperkuat kelembagaan, mewujudkan pemerataan lahan, dan menjamin ketersediaan sarana serta prasarana produksi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan pembangunan desa dengan menitikberatkan pada

penguatan kelembagaan petani, dan pelaku usaha mikro agar lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

Retribusi lahan dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, memberikan akses yang lebih merata terhadap lahan pertanian dan perikanan yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Kebijakan redistribusi ini diintegrasikan dengan pengelolaan lahan berbasis ekonomi hijau untuk memastikan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi sumber daya. Selain itu, program ini menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, seperti irigasi, alat pertanian, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil, serta akses teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Pengembangan infrastruktur produksi ini diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro secara berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan yang kokoh, distribusi lahan yang adil, dan ketersediaan sarana serta prasarana yang memadai, program ini bertujuan menciptakan ekosistem produksi yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 4.15
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 7. Penguatan Kelembagaan, Redistribusi Lahan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi			
Tujuan : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	33.96%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

4.2.5.1 Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau.

4.2.5.2 Mendorong hilirisasi untuk komoditas pertanian, peternakan dan perikanan sehingga menjamin terlaksananya ketahanan pangan berkelanjutan.

Prioritas 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran infrastruktur yang merata. Disparitas penyebaran infrastruktur di wilayah ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan,serta jaringan telekomunikasi. Disparitas terkait dengan pemerataan infrastruktur terlihat dari belum mampu Pemerintah Daerah untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala. Permasalahan lain adalah terkait dengan sarana dan prasarana umum yang masih belum dalam kondisi layak. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk infrastruktur yang masih rendah, belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh juga menjadi isu strategis daerah terkait infrastruktur. Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah juga menjadi permasalahan yang harus menjadi pemikiran kedepan pemerintah daerah, sehingga penataan ruang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan penataan ruang.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 8. Pemerataan infrastruktur Strategis, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 8: Pemerataan infrastruktur strategis, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana			
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan			
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	37,94
	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	36,63%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak
2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup
3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana

Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

Program ini fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan jaringan jalan serta fasilitas umum yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan publik di seluruh wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan jalan utama, jalan kabupaten, serta fasilitas publik seperti pasar, taman, dan fasilitas kesehatan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip ramah lingkungan dan desain inklusif menjadi prioritas untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya yang efektif diharapkan mempercepat tercapainya pembangunan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Penataan infrastruktur strategis dan terpadu Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.17
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu			
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan			
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan dan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,22

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak
2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup

3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana

Prioritas 10 Perwujudan Kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Program ini bertujuan memperkuat kemandirian nagari dengan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan nagari diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan lokal yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Selain itu, program ini berkomitmen meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh nagari. Upaya ini meliputi peningkatan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi wilayah. Aksesibilitas antar wilayah nagari juga diperkuat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Adapun bentuk kegiatan dari perwujudan kemandirian nagari berbasis potensi wilayah adalah pemenuhan layanan dasar dan aksesibilitas nagari di nagari yang berstatus maju menuju nagari berstatus mandiri.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan tata kelola yang baik dan layanan yang merata, nagari diharapkan menjadi unit pemerintahan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Penataan infrastruktur strategis dan terpadu Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2027
Prioritas 10. Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah			
Tujuan : Meningkatkan status nagari			
Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	91,14%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari

Program prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan setiap tahun selama periode tersebut. Penjabaran program pembangunan daerah pendukung agenda prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.19
Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju 2028

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah								
	Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya								
	Program Prioritas 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama								
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	2.108.350.000	100%	3.745.000.600	100%	10.486.314.695	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)			70%	3.600.000.000	72%	30.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum			67%	1.300.000.000	68%	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			80,75	210.120.000,00	81,15	951.120.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,2	10.000.000	60,9	26.490.300	70	80.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perlindungan Anak
	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik								
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah								
Program Prioritas 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah									
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase devisiasi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD			7,50%	1.108.265.675,00	8%	914.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2%	225.000.000	2%	246.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas			2%	30.000.000	2%	32.000.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air			65,01	174.000.000	66,71	174.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			12	6.970.910.000	13	14.243.160.262	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			17%	250.000.000,00	19%	1.200.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			41.990,67	655.500.000	43.346,97	379.657.274	Dinas Perikanan
	Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif								
	Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah								
	Program Prioritas 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	88,92	70.739.738.650	89,73	39.118.080.500	90,13	177.030.390.523	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja	55%		70%	380.000.000	80%	901.489.056	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	79,67		80,75	210.120.000	81,15	951.120.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	30.807.194.600	94,67 %	883.188.000,00	100	4.350.000.000	Dinas Kesehatan

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	63,81%	460.000.000	68,40%	255.000.000,00	71,00%	255.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	13%		11%		10%		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65%	1.753.600.000	75%	1.553.650.000	80%	1.554.900.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,90%	40.000.000	91,9%	55.000.000	92,4%	45.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	1.064.000.000	70%	3.600.000.000	72%	30.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			67%	1.300.000.000	68%	20.000.000.000,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	39.511,16	150.000.000	41.990,67	655.500.000	43.346,97	379.657.274	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Makan Ikan	40 kg/kapita/tahun	150.000.000	22,60 kg/kapita/tahun	100.000.000	42,57 kg/kapita/tahun	412.392.500	
		Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395		405		410		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	4.930.000	7%	1.117.000.000	7%	576.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	95%	89.683.600		14.700.000		85.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				449.010.000,00		520.000.000,00	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	302.512.678	90%	374.669.700,00	70%	484.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Prioritas 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial								
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	429.364.800	100%	3.745.000.600	100%	10.486.314.695	Sekretariat Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	21.507.785	100%	1.384.000.000	100%	485.000.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%	28.114.752	100%	30.000.000	100%	35.000.000	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja			70%	380.000.000	80%	901.489.056	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (SAKATO SEJAHTERA)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan								
	Sasaran 1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal								

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Prioritas 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil								
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			8%	50.000.000	10%	185.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi			3%	140.000.000	5%	375.000.000	
	Program Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif								
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			44,49 %	250.000.000	19%	1.200.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			20%	81.115.000	20%	200.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi			17%	245.000.000	18%	828.000.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			12	6.970.910.000	13	14.243.160.262	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)			34,66	1.165.000.000	37,96	1.165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan & Kawasan permukiman
	Misi 5 : Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)								
	Tujuan 1 : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota								

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau								
	Program Prioritas 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi								
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			41.990,67	655.500.000	43.346,97	379.657.274	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			7%	1.117.000.000	7%	576.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2 %	406.150.000	2%	431.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi			2 %	125.000.000	3%	150.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan			100%	21.000.000	100%	35.000.000	
	Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan								
	Sasaran 1 : Membangun infrastruktur strategis								
	Program Prioritas 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	1.064.000.000	70%	3.600.000.000	72%	30.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di	0%	100.000.000	2%	400.000.000	5%	30.000.000.000	

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	TPA/TPST							
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	63%	1.600.000.000	67%	1.300.000.000	68%	20.000.000.000,00	
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	1.213.694.000	34,66	1.165.000.000	37,96	1.165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu								
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0%	0	94,67%	883.188.000,00	72%	4.350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0%	0	100%	164.000.000	100%	8.192.500.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	57,72%	0	60%	118.094.797.000	61%	87..200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77%	0	82%	530.000.000	84%	40.450.000.000	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	100%	0	100%	580.000.000	100%	2.550.000.000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	0%	0	47 Persen	6.150.000.000,00	48%	19.000.000.000,00	

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	0%	0	43%	3.325.000.000,00	44%	11.405.000.000,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah			100%	25.423.625.305,00		38.588.400.000,00	Sekretariat Daerah
	Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (SAKATO MANDIRI)								
	Tujuan 1 : Meningkatkan status nagari								
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari								
	Program Prioritas 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah								
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	79	93.958.000	79 Nagari	208.372.000,00	79 Nagari	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	88,92	70.739.738.650	89,73	39.118.080.500	90,13	177.030.390.523	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69%	57.216.807.472	94,67 %	883.188.000,00	100	4.350.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			67%	1.300.000.000	68%	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	57,72%	2.000.000.000	60%	118.094.797.000	61%	87..200.000.000	

	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2027		Tahun 2028		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni			18,46 %	961.000.000,00	3,32%	15.320.440.000,00	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

4.2.6 Lima Puluh Kota-The Central of Agro

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat besar. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan seperti nila, patin dan gurame sago menjadikan daerah ini layak dikembangkan sebagai sentra agro (The Central of Agro) di Sumatera Barat. Namun demikian, potensi ini belum dimaksimalkan secara optimal dalam konteks pemasaran, identitas daerah (branding), dan pengembangan kawasan agro berbasis pariwisata serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi branding yang kuat untuk membentuk identitas “The Central of Agro” sebagai kawasan unggulan yang dikenal secara regional maupun nasional. Hal ini didukung dengan data produksi komoditi tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel 4.20
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025

No	Jenis data	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.791,00	134.375,00	52.351,00	232.018,75	50.577,00	228.015,60	50.839,00	228.523,00	44.915,20	185.283,10
2	Jagung	6.678,00	39.290,00	6.220,00	43.351,01	6.884,00	50.277,78	8.614,00	63.180,00	7.646,10	56.276,82
3	Jeruk	965,27	58.193,00	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332,00
4	Cabe Besar	789,00	19.819,00	1.045,00	8.814,10	1.048,75	10.498,28	909,95	9.469,57	825,70	9.080,00
5	Manggis	974,45	20.981,00	1.210,79	29.815,30	1.239,31	26.818,40	188,40	816,00	179,41	670,60
6	Kopi	455,00	332,57	384,00	363,84	436,00	389,28	394,00	202,27	350,00	161,37
7	Kakao	3.279,00	1.728,42	3.099,00	2.003,97	3.292,00	1.590,41	3.144,00	388,65	2.692,75	1.016,62
8	Gambir	16.605,00	7.826,69	16.623,00	7.845,89	16.692,00	7.776,42	33.631,00	38.642,66	16.815,50	19.321,33

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

Tabel 4.21
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2025

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sapi	45.071	48.451	51.030	52.561	54.681	56.321
2	Kerbau	9.992	8.843	9.040	9.042	9.304	9.397
3	Kuda	98	117	106	106	108	108
4	Kambing	29.379	30.342	31.752	33.592	34.900	36.296
5	Ayam Buras	385.790	405.016	413.643	427.139	436.063	436.063
6	Ayam Ras Petelur	7.748.600	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014	9.812.674
7	Ayam Ras Pedaging	12.848.250	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705	10.942.160
8	Itik	145.232	142.959	139.950	189.895	192.719	270.246
9	Burung Puyuh	680.038	623.810	635.018	635.018	663.050	836.600

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 4.22
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2025

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Daging Sapi Potong	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12	1.871.408,32
2	Daging Kerbau	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76	174.044,85
3	Daging Kambing	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25	37.862,50
4	Daging Ayam Buras	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00	537.228,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00	7.300.629,00
6	Daging Ayam Ras Pedaging	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00	12.418.259,00
7	Daging Itik	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00	113.908,00
8	Daging Burung Puyuh	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00	145.212,00
9	Telur Ayam Buras	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30	279.298,35
10	Telur Ayam Ras Petelur	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30	90.635.548,41
11	Telur Itik	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60	1.063.515,66
12	Telur Burung Puyuh	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70	1.144.526,70
13	Susu Sapi Perah	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,00	3.314,70
14	Susu Kerbau	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040,00	93.970,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 4.23
Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2025

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ikan mas	11.017,95	10.582,59	7.905,11	7.905,11	5.105,10	2.287,24
2	Ikan nila	13.594,77	12.847,67	7.878,07	7.878,07	12.679,65	14.554,83
3	Ikan gurami	6.831,05	7.880,60	3.556,73	3.556,73	7.590,60	11.835,10
4	Ikan lele	6.907,40	8.239,31	4.320,71	4.320,71	8.627,50	5.333,91
5	Ikan patin	2.759,14	2.765,41	7.551,87	7.551,87	1.252	2.462,59
6	Ikan nilem	2.064,10	953,39	1.017,22	1.017,22	2.469,60	404,40
7	Ikan lainnya	1.238,50	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1.886,70	1.467,41
Jumlah		44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	39.611,15	38.878,12

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan produksi komoditi pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka sangat pantaslah Kabupaten Lima Puluh Kota menasbihkan diri menjadi The Central of Agro. Selain data pokok tentang berbagai komoditas/ produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, juga terdapat beberapa faktor pendukung dalam perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai 'The Central Of Agro". Salah satu faktor pendukung tersebut adalah dengan terbitnya Masterplan Integrated Area Development Harau Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD HATTA) atau Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial Terintegrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai gambaran, luas Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 172.304 Ha yang meliputi KSDA sebesar 29.136 Ha, Hutan Lindung seluas 116.629,94 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 20.476 Ha, dan Hutan Produksi Konversi seluas 11.163 Ha. Berdasarkan data PIAPS VII 2022 luas Kawasan Perhutanan Sosial baik yang definitive maupun yang indikatif ada seluas 63.570 Ha. Adanya kawasan perhutanan sosial yang sebagian besar yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). Di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah LPHN ini terdiri dari 38 Kelompok Perijinan/ Persetujuan Perhutanan Sosial yang berada di bawah koordinasi UPTD KPH Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengembangan agroforestri yang merupakan bagian dari branding Kabupaten Lima Puluh Kota dengan "The Central of Agro" sangat layak untuk dikembangkan. Agroforestri ini adalah sistem pengelolaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu (pohon, perdu, bambu, dll.) dengan tanaman pertanian dan/ atau hewan ternak untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Selain agroforestry, dengan branding "The Central of Agro" ini Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat mewujudkan Agroindustri, Agrowisata dan Agroedukasi.

Diharapkan dengan adanya The Central of Agro ini akan terwujudnya:

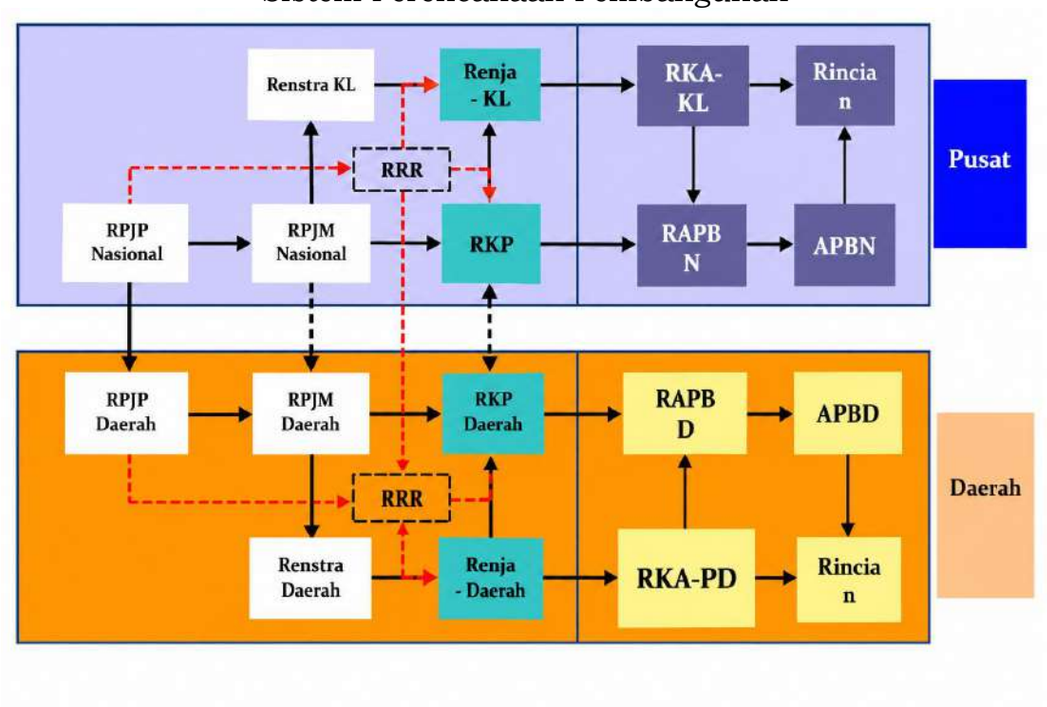
- Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan produk agro lokal.
- Terbangunnya citra positif Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat pertanian, peternakan dan perikanan serta sebagai kawasan agroindustry, agrowisata, agroforestry, agropolitan dan agroedutourism.
- Terdorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agroindustry, pariwisata, agroforestry, agropolitan dan agroedutourism.
- Perkuatan ekosistem UMKM berbasis hasil pertanian, peternakan dan perikanan lokal

4.2.7 Prioritas Pembangunan Daerah Lintas Urusan Berbasis Resiliensi Bencana

Rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait. Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Sumber: Bappenas 2013), sebagai berikut:

Gambar 4.2
Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Tingginya potensi risiko bencana baik bencana alam, nonalam, maupun sosial menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara terencana dan terpadu. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2027, diperlukan penguatan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan penanggulangan bencana Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan ketangguhan daerah melalui penguatan mitigasi bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, penguatan sistem informasi dan peringatan dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu, penanganan darurat bencana diarahkan untuk meningkatkan kecepatan respon, koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, meminimalkan risiko dan

dampak kerugian, serta mendukung terwujudnya perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan saat terjadi bencana, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Usulan program dan kegiatan penanggulangan bencana Tahun 2027 meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, penyusunan kajian risiko bencana, sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, pelaksanaan simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan, pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur, pengadaan peralatan serta logistik kebencanaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah, berikut usulan Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana:

Tabel 4.24
Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahun 2027

PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN/ PENERIMA MANFAAT	PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Masyarakat pengguna jalan	Dinas PUPR
1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Masyarakat pengguna jalan	Dinas PUPR
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Masyarakat pengguna jalan	Dinas PUPR
	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Masyarakat pengguna jalan	Dinas PUPR
	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Masyarakat pengguna jalan	Dinas PUPR

4.2.8 Pendukungan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Penyelenggaraan PKK dilakukan melalui Gerakan PKK secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat Desa. Gerakan PKK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan.

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi:

1. Program penghayatan dan pengamalan Pancasila;
   berupa pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
2. Program gotong royong;
   berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga,warga dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Program pangan;
   berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal
4. Program sandang;
   berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai dengan moral budaya bangsa Indonesia
5. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga;
   berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.
6. Program pendidikan dan keterampilan;
   berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
7. Program kesehatan;
   berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
8. Program pengembangan kehidupan berkoperasi;
   berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
9. Program kelestarian lingkungan hidup; dan
   berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat

10. Program perencanaan sehat.
    berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam ketertiban perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Pada pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2020 disampaikan bahwa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan dukungan dan berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan ·berkoordinasi dengan Menteri. Selain itu pada pasal 62 disampaikan bahwa Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Terkait dengan hal diatas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya seperti mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten dalam bentuk pentaggingan program kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PKK.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana salah satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan serta indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah PKK.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui:

1. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
2. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
3. Mendorong upaya gerakan keluarga indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
4. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman

dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

5. Pemberdayaan kader PKK dan kader dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat;
6. Mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional sekretariat TP-PKK kabupaten, serta kegiatan lainnya;
7. Pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

Mempedomani arah kebijakan diatas, maka untuk tahun 2027 telah dipetakan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PKK yang dilaksanakan oleh 10 PD terkait serta kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.25
Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Gerakan PKK pada Perangkat Daerah

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga Pembinaan keluarga Sadar hukum Pembinaan Kesadaran belanegara Pembinaan Pencegahan penyalahgunaan narkoba pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Pembinaanpencegahan perdagangan manusia Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak	Unsur Pemerintahan Umum/ Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Kesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Pembinaan wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pembinaan wawasan kebangsaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Gotong Royong	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa	Menumbuhkan sikap kesetiawanan sosial, memberdayakan kelompok lanjut usia, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayan Masyarakat dan Desa	DPMDN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat
3	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal	Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman, Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, berigizi, seimbang dan aman, Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4	Sandang	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang	Membudayakan perilaku berusaha sesuai moral budaya Indonesia, Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri
5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna, Pembinaan rumah sehat layak huni, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DLHPP	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
6	Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembinaan kelaurga tentang wajib belajar dua belas tahun, menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan, Menfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar pakat A, B dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait, Meingkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMDN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kab/kota	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Kesehatan	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, Pembinaan keluarga yang sadar gizi, Mendukung Program pencegahan dan deteksi dini kanker dan perempuan, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8	Pengembangan kehidupan berkoperasi	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Disdagkop UMK	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
9	Kelestarian Lingkungan Hidup	penumbuhan kesadaranKeluarga dalam peningkatan kualitaslingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.	Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, Melestarikan lingkungan hidup	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	DLHPP	Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tidak daerah kabupaten / kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	Penanggulangan Bencana	Pencegahan pengendalian dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam
					Damkar	Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
10	Perencanaan Sehat	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas, Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKBP3A	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejaahteraan keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Tabel 4.26
Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Gerakan PKK pada Kecamatan

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga Pembinaan keluarga sadar hukum Pembinaan kesadaran bela negara Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pembinaanpencegahan kekerasan dalam rumah tangga Pembinaan pencegahan perdagangan manusia pembinaanpencegahan kekerasan seksual terhadap anak	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Gotong Royong	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa	Menumbuhkan sikap kesetiawanan sosial, memberdayakan kelompok lanjut usia, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
3	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal	Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman, Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, berigizi, seimbang dan aman, Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4	Sandang	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia	Membudayakan perilaku berusaha sesuai moral budaya Indonesia, Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna, Pembinaan rumah sehat layak huni, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
6	Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembinaan kelaurga tentang wajib belajar dua belas tahun, menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan, Menfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar pakat A, B dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait, Meingkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Kesehatan	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, Pembinaan keluarga yang sadar gizi, Mendukung Program pencegahan dan deteksi dini kanker dan perempuan, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri keluarga	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8	Pengembangan kehidupan berkoperasi	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga, Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK, Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
9	Kelestarian Lingkungan Hidup	penumbuhan kesadaranKeluarga dalam peningkatan kualitaslingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, Melestarikan lingkungan hidup	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
								Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

No	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota)				
	Program	Penjelasan	Uraian	Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
								Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10	Perencanaan Sehat	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas, Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat	Unsur Kewilayahan / Kecamatan	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4.2.9 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Intervensi dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan pendataan dan verifikasi ATS, serta fasilitasi pengembalian anak ke satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Pelaksanaan intervensi ATS melibatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix, meliputi perangkat daerah, satuan pendidikan, pemerintah nagari, organisasi masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan serta mendukung peningkatan indikator pendidikan daerah, khususnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan ATS di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.27
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penanganan dan Pencegahan ATS

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2.	Badan Perenanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Rujukan
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kab/kota
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Sumber: Perangkat Daerah terkait Penanganan dan Pencegahan ATS

4.2.10 Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan kepada seluruh Menteri/ Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan serta mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Kerja PD dan juga tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-PD.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Hasil analisis gender dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari rencana jangka menengah dan tahunan yang tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Renja PD, dokumen penganggaran KUA-PPAS dan RKA PD.

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 -2026 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dukur dengan indikator Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD), dimana pada tahun 2024, target ARG sebesar 6,1%, dimana realisasi capaiannya sebesar 4,48%. Target ARG pada tahun 2027 yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 5%.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Dilihat dari data pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin 0,441, lebih rendah dari poin IKG Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan perkembangan dimensi pemberdayaan. Pada Tahun 2021, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin tertinggi yaitu 0,549 jauh diatas poin IKG Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,455. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin membesar atau dengan kata lain kondisi kesetaraan yang semakin kurang baik. Namun pada tahun 2022 IKG Kabupaten Lima Puluh Kota mulai mengalami penurunan hingga tahun 2024 berada pada poin 0,453. Tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu dimensi kesehatan reproduksi, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi serta dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, bahwasanya IKG yang harus dicapai pada tahun 2027 adalah sebesar 0,408. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PUG tahun 2027 yang telah dipetakan sesuai dengan penyampaian Perangkat Daerah, sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.28
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapil
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Relasi Media	Diskominfo
6	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinsos
7	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kapbupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/KotaPemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMDN
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah
10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
11	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DisdagkopUKM
12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	DisdagkopUKM
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Suliki
14	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Setda
15	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda
16	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disperinaker
17	Penempatann Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Disperinaker
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Disnakeswan
19	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
20	Program pengelolaan Perikan Budaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
21		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
22			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
23	Pembinaan perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispusip

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
24	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dispusip
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Politik
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes
28			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
29			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
30	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Disparpora
31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Disparpora
32	Program Penyuluhan Pertaniaan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Distanhorbun
33	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Nagari	Kecamatan Payakumbuh
34	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DP2KBP3A
35			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	DP2KBP3A

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Kabupaten/Kota	
36			Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
37			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
38			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
39			Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
40			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
41	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD
44	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lareh Sago Halaban
45	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
46	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Harau
47	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Guguak
48	Kepegawaian Daerah	Mutasi Dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM
49	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUPR
51			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUPR
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dinas PUPR
53			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR
54			Penyediaan Unit pengolahan setempat	Dinas PUPR
55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Sumber : Perangkat Daerah

4.2.11 Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 (ayat 4), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak. KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintergrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya.

Indikator KLA terdiri atas indikator kelembagaan dan 24 indikator substansi yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta hak perlindungan khusus.

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 -2029 pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak, dimana pada tahun 2027 target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 81,8.

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun ditingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.
Pada tahun 2024 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 86,41. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke-10 tertinggi dalam pencapaian IPKA dan capaian IPKA Kabupaten Lima

Puluh Kota tahun 2024 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 80,31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan pencapaian IPKA pada tahun 2027 adalah sebesar 81,8. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan KLA tahun 2027 yang telah dipetakan sesuai dengan indikator pada evaluasi KLA, sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.29
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Organisasi Setda
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLHPKP
3	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	DLHPKP
4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Relasi Media	Diskominfo
5	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Disdukcapil
6	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda
8	Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dishub
9		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Dishub

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
10			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dishub
11	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kapbupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispusip
13			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dispusip
14	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMDN
15	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinsos
16			Penyediaan Sandang	Dinsos
17			Penyediaan alat Bantu	Dinsos
18			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Dinsos
19			Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos
20	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes
22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
23			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
24			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes
25			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Dinkes

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Masyarakat	
26			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes
27			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes
28			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinkes
29			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinkes
30			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes
31			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes
33	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35		Pengelolaan Pendidikan NonFormal	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradsional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
40			Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	DP2KBP3A

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Kabupaten/Kota	
41			Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
42			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
43			Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
44			Advokasi dan sosialisasi penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
45			Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
46	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	DP2KBP3A
47			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
48			Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
49			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
50			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
51			Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
52			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
53			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
54			Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
55			Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
56			Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
57			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
58			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
59			Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
60			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	DP2KBP3A
61			Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	DP2KBP3A
62			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi	DP2KBP3A

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
63			Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
64			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP3A
66	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	DP2KBP3A
67	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DP2KBP3A
68	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang asing. Kewaspadaan Perbatasan antara Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
69	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Disparpora
70	Program Pengelolaan dan	Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	(SPAM) Jaringan Perpipaan	
71			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUPR
72	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dinas PUPR
73			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR
74			Penyediaan Unit pengolahan setempat	Dinas PUPR

Sumber : Perangkat Daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun 2027. Kerangka pendanaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi yang berdaya saing, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Uraian	2027
1	*2*	*3*
4	PENDAPATAN	1.346.447.016.702,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	180.261.515.792,00
4.1.01	Pajak Daerah	87.134.186.296,00
4.1.02	Retribusi Daerah	80.730.190.896,00
4.1.03	Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.513.273.477,00
4.1.04	Lain-lain PAD	6.883.865.033,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.166.185.501.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.104.185.501.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	74.169.507.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasill	11.544.117.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	3.158.747.000,00
4.2.01.07.02	DBH SDA	6.513.290.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.872.080.000,00
4.2.01.08	DAU	648.285.599.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	627.815.193.000,00
4.2.01.08.02	DAU Ditentukan Penggunaannya	20.470.406.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Dukungan Pendanaan P3K	-
4.2.01.08.02.0002	DAU Ditentukan Bidang Pendidikan	5.321.897.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Ditentukan Bidang Kesehatan	15.148.509.000,00

No	Uraian	2027
1	*2*	*3*
4.2.01.08.02.0004	DAU Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	370.186.278.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	101.672.915.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	268.513.363.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasill	62.000.000.000,00
5	BELANJA	1.374.402.392.541,00
5.1	Belanja Operasi	1.068.018.720.945,00
5.1.01	Belanja Pegawai	807.157.081.490,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.861.639.455,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000
5.2	Belanja Modal	154.631.889.204,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.785.712.038,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.832.768.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.315.550.065,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.697.859.101,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	149.251.782.392,00
5.4.01	Belanja Bagi hasill	9.286.511.792,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.965.270.600,00
	Surplus(deisit)	(27.955.375.83900)
	PEMBIAYAAN	27.955.375.839,00
	Penerimaan pembiayaan	27.955.375.839,00
	Pengeluaraan pembiayaan	0

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027

Alokasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Sedangkan Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2027 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, dan dana transfer pusat dapat dilihast pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*
A.	Sekretariat Daerah	29,404,625,905
B.	Sekretariat DPRD	28,000,000,000
C.	Inspektorat	13,093,692,559
D.	Dinas Daerah	
1.	Dinas Kesehatan	175,899,195,343
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536,190,000,000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176,584,797,000
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	10,150,000,000
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	9,300,000,000
6.	Dinas Sosial	7,933,100,000
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,600,000,000
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,020,000,000
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,610,000,000
10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6,716,473,000
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5,315,000,000
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,000,000,000
13.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6,512,000,000
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	6,470,000,000
15.	Dinas Perhubungan	15,512,450,000
16.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	10,348,973,132
17.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	15,165,000,000
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12,268,150,000
19.	Dinas Perikanan	6,414,500,000
20.	Dinas Pangan	3,696,918,331

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,000,000,000
E.	Badan Daerah	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,168,053,813
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,500,000,000
3.	Badan Keuangan	152,645,081,669
4.	Badan Kesbangpol	4,500,000,000
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,526,304,897
F.	Kecamatan	
1.	Kecamatan Gunuang Omeh	1,410,050,668
2.	Kecamatan Bukik Barisan	1,588,504,869
3.	Kecamatan Suliki	1,782,051,438
4.	Kecamatan Guguak	1,722,170,854
5.	Kecamatan Mungka	1,472,651,134
6.	Kecamatan Akabiluru	1,772,654,780
7.	Kecamatan Payakumbuh	2,689,788,381
8.	Kecamatan Luak	1,933,724,231
9.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	1,775,360,269
10.	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	1,654,119,829
11.	Kecamatan Harau	1,954,057,845
12.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1,768,770,562
13.	Kecamatan Kapur IX	2,334,172,031
G.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	
1.	RSUD Ahmad Darwis	70,000,000,000
	JUMLAH	1,374,402,392,540

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom up).

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing OPD yang nantinya akan bermuara kepada program dan kegiatan prioritas daerah, juga mempertimbangkan perkembangan

proporsi Belanja pada setiap OPD. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan prioritas daerah sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian visi misi dan berubahnya RPJMD.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka masing-masing OPD menjabarkannya kedalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2027. Dalam matriks ini juga digambarkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana serta catatan penting untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Kebutuhan pendanaan per program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2027 di sajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**536.190.000.000,00**							**683.372.040.562,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**535.344.000.000,00**							**651.755.410.837,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**535.344.000.000,00**							**651.755.410.837,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**464.715.770.400,00**							**295.596.165.838,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	17.071.000,00						-	141.822.149,00	
			-	-		-	-	464.686.699.400,00						-	295.381.435.064,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.071.000,00					-		214.730.774,00	
		-						19.071.000,00					-		214.730.774,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	24.302.875,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.660.000,00						-	50.280.093,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	24.302.875,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00							24.302.875,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.051.000,00						-	24.302.875,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-		3.350.000,00							40.909.027,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		6.010.000,00						-	26.330.154,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.660.000,00							50.280.093,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	5.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.280.093,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.051.000,00							24.302.875,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.051.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.302.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							24.302.875,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.302.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							24.302.875,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.302.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							24.302.875,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.302.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.350.000,00							40.909.027,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	3.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.909.027,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.010.000,00							26.330.154,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	6.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.330.154,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						464.245.981.799,00					-		289.279.154.180,00	
		-						464.245.981.799,00					-		289.279.154.180,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	28.527.945,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.996.000,00							43.694.755,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	464.238.985.799,00						-	289.206.931.480,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						464.238.985.799,00							289.206.931.480,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	4300 Orang/bulan	464.238.985.799,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-		-	289.206.931.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.996.000,00							43.694.755,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.694.755,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							28.527.945,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		-	28.527.945,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.350.000,00					-		212.313.336,00	
		-						10.350.000,00					-		212.313.336,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.350.000,00						-	212.313.336,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.350.000,00							212.313.336,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	212.313.336,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.000.000,00					-		1.149.091.300,00	
		-						4.000.000,00					-		1.149.091.300,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	900.000,00						-	459.608.029,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.000.000,00						-	407.788.028,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	2.100.000,00						-	281.695.243,00	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1.000.000,00					-		407.788.028,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	407.788.028,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.100.000,00							281.695.243,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	2.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	281.695.243,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						900.000,00							459.608.029,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	459.608.029,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110.508.600,00					-		1.438.772.139,00	
		-						110.508.600,00					-		1.438.772.139,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	31.512.000,00						-	215.141.361,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.205.000,00						-	122.846.139,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	69.731.600,00						-	660.470.784,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.060.000,00						-	440.313.855,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.205.000,00							122.846.139,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.205.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	122.846.139,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						69.731.600,00							660.470.784,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	69.731.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	660.470.784,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.060.000,00							440.313.855,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	440.313.855,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						31.512.000,00							215.141.361,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	31.512.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	215.141.361,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					-		1.531.276.081,00	
		-						6.000.000,00					-		1.531.276.081,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	85.315.690,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	122.432.025,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	230.243.202,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	450.897.367,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	152.943.578,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	170.315.690,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	319.128.529,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000,00							450.897.367,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	450.897.367,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000,00							230.243.202,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	230.243.202,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00							85.315.690,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	85.315.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							152.943.578,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	152.943.578,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							122.432.025,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	122.432.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							170.315.690,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	170.315.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							319.128.529,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	319.128.529,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192.905.000,00					-		386.875.303,00	
		-						192.905.000,00					-		386.875.303,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	147.240.000,00						-	87.315.690,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	42.165.000,00						-	231.226.635,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	52.943.578,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.500.000,00						-	15.389.400,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							15.389.400,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	15.389.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						147.240.000,00							87.315.690,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	147.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	87.315.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00							52.943.578,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	52.943.578,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						42.165.000,00							231.226.635,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	42.165.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	231.226.635,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.954.001,00							1.383.952.725,00	
		-						126.954.001,00							1.383.952.725,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.900.000,00						-	108.758.359,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	60.654.001,00						-	259.922.314,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.050.000,00						-	132.432.025,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.350.000,00						-	413.864.155,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.000.000,00						-	277.961.586,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-		1.000.000,00						-	104.796.022,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-		-	-	0,00						-	86.218.264,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.050.000,00							132.432.025,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	45.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	132.432.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.654.001,00							259.922.314,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	60.654.001,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	259.922.314,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.350.000,00							413.864.155,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	9.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	413.864.155,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.900.000,00							108.758.359,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	108.758.359,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							277.961.586,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	277.961.586,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							104.796.022,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	104.796.022,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						0,00							86.218.264,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-		-	1 Ha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	86.218.264,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**70.505.172.900,00**							**355.422.549.897,00**	
			1. Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar 2.Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 3.Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4.Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-		-	89,73 81,24 75,49 98 %%%%	39.118.080.500,00						-	177.030.390.523,00	
			Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-		-	98,00 %	5.585.978.700,00						-	33.938.025.553,00	
			-	-		-	-	24.876.113.700,00						-	144.454.133.821,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						39.493.080.500,00							177.030.390.523,00	
		-						39.493.080.500,00							177.030.390.523,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	6.270.751.162,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	168.305.000,00						-	1.280.991.783,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	50.000.000,00						-	307.788.017,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00						-	407.788.017,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	350.544.193,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	31.500.000,00						-	653.862.811,00	
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	8.375.949.054,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	11.006.548.891,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	84.000.000,00						-	761.687.002,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	180.408.000,00						-	816.857.940,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	-	149.113.800,00						-	715.127.142,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	827.788.017,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	3.882.380.560,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	25.000.000,00						-	7.662.309.412,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	5.363.616.588,00	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	25.000.000,00						-	873.485.777,00	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	25.000.000,00						-	661.687.002,00	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	460.000.000,00						-	5.370.038.306,00	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	50.000.000,00						-	12.912.472.583,00	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.699.999.800,00						-	17.139.090.916,00	
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	-	25.000.000,00						-	12.415.696.917,00	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	25.000.000,00						-	5.767.837.721,00	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	4.214.270.176,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	750.000.000,00						-	13.103.513.165,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	500.000.000,00						-	11.225.042.684,00	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	36.900.000,00						-	997.147.556,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	89.646.950,00						-	2.523.996.714,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	34.504.350.000,00						-	39.049.248.433,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	298.210.000,00						-	1.296.930.615,00	
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	80.646.950,00						-	795.941.369,00	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00							5.767.837.721,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.767.837.721,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							7.662.309.412,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.662.309.412,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						750.000.000,00							13.103.513.165,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	15 Unit	750.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.103.513.165,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						460.000.000,00							5.370.038.306,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	4 Ruang	460.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.370.038.306,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00							4.214.270.176,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.214.270.176,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00							5.363.616.588,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.363.616.588,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						25.000.000,00							11.006.548.891,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.006.548.891,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						25.000.000,00							3.882.380.560,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.882.380.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						298.210.000,00							1.296.930.615,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	377 Peserta Didik	298.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.296.930.615,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						149.113.800,00							715.127.142,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	13 Orang	149.113.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	715.127.142,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						180.408.000,00							816.857.940,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	450 Orang	180.408.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	816.857.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						89.646.950,00							2.523.996.714,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	377 Satuan Pendidikan	89.646.950,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.523.996.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						34.504.350.000,00							39.049.248.433,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	377 Satuan Pendidikan	34.504.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	39.049.248.433,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						80.646.950,00							795.941.369,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	10 Orang	80.646.950,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	795.941.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						25.000.000,00							12.415.696.917,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.415.696.917,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar						25.000.000,00							8.375.949.054,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.375.949.054,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						84.000.000,00							761.687.002,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	377 Orang	84.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	761.687.002,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						31.500.000,00							653.862.811,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	31.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	653.862.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						25.000.000,00							661.687.002,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	10 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	661.687.002,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						168.305.000,00							1.280.991.783,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	168.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.280.991.783,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							407.788.017,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	407.788.017,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						10.000.000,00							350.544.193,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	350.544.193,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						50.000.000,00							307.788.017,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	3 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	307.788.017,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						25.000.000,00							827.788.017,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	827.788.017,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						50.000.000,00							12.912.472.583,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.912.472.583,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000.000,00							11.225.042.684,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Unit	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.225.042.684,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						36.900.000,00							997.147.556,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	377 Satuan Pendidikan	36.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	997.147.556,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.699.999.800,00							17.139.090.916,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	35 Ruang	1.699.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.139.090.916,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						25.000.000,00							873.485.777,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	10 Peserta Didik	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	873.485.777,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						25.000.000,00							6.270.751.162,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.270.751.162,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						19.142.277.400,00					-		104.570.084.342,00	
		-						19.142.277.400,00					-		104.570.084.342,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	5.110.770.865,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	162.302.700,00						-	1.085.046.076,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	32.500.000,00						-	310.062.211,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	10.000.000,00						-	497.026.446,00	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-		10.000.000,00						-	280.544.193,00	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	35.000.000,00						-	393.180.901,00	
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	3.032.066.165,00	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	10.341.662.209,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	30.000.000,00						-	737.012.201,00	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	99.554.000,00						-	815.689.778,00	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	40.014.000,00						-	520.544.193,00	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	857.788.017,00	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	25.000.000,00						-	5.260.119.183,00	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	3.253.970.018,00	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	25.000.000,00						-	646.168.202,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	36.814.000,00						-	987.504.959,00	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	30.000.000,00						-	645.327.186,00	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	5.041.445.375,00	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	25.000.000,00						-	6.790.441.180,00	
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	800.000.000,00						-	4.956.928.705,00	
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	50.000.000,00						-	7.860.119.183,00	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	40.000.000,00						-	4.662.309.412,00	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	25.000.000,00						-	2.946.060.651,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	300.000.000,00						-	7.200.551.381,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	200.000.000,00						-	9.773.353.842,00	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	120.422.700,00						-	1.023.895.769,00	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	16.691.170.000,00						-	17.860.695.140,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	179.500.000,00						-	1.359.256.708,00	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	25.000.000,00						-	320.544.193,00	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					40.000.000,00							4.662.309.412,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	4.662.309.412,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00						5.260.119.183,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	5.260.119.183,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						50.000.000,00						7.860.119.183,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	7.860.119.183,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.000.000,00						7.200.551.381,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	14 Unit	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	7.200.551.381,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						800.000.000,00						4.956.928.705,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Ruang	800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	4.956.928.705,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						25.000.000,00						2.946.060.651,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	2.946.060.651,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						25.000.000,00						3.253.970.018,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	3.253.970.018,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						25.000.000,00						3.032.066.165,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	3.032.066.165,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						200.000.000,00						9.773.353.842,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	7 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	9.773.353.842,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						25.000.000,00						10.341.662.209,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.341.662.209,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						25.000.000,00							646.168.202,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1 Peserta Didik	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	646.168.202,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						179.500.000,00							1.359.256.708,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	63 Peserta Didik	179.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.359.256.708,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						40.014.000,00							520.544.193,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	10 Orang	40.014.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	520.544.193,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						99.554.000,00							815.689.778,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	250 Orang	99.554.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	815.689.778,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						120.422.700,00							1.023.895.769,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	63 Satuan Pendidikan	120.422.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.023.895.769,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						16.691.170.000,00							17.860.695.140,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	63 Satuan Pendidikan	16.691.170.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.860.695.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						25.000.000,00							320.544.193,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	63 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	320.544.193,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						30.000.000,00							737.012.201,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	63 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	737.012.201,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						35.000.000,00							393.180.901,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	393.180.901,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						30.000.000,00							645.327.186,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	10 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	645.327.186,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						162.302.700,00							1.085.046.076,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	162.302.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.085.046.076,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						10.000.000,00							497.026.446,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	497.026.446,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						10.000.000,00							280.544.193,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	280.544.193,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						32.500.000,00							310.062.211,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	3 Kegiatan	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	310.062.211,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						36.814.000,00							987.504.959,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	63 Satuan Pendidikan	36.814.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	987.504.959,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						25.000.000,00							6.790.441.180,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.790.441.180,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						25.000.000,00							857.788.017,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	857.788.017,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						25.000.000,00							5.041.445.375,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.041.445.375,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						25.000.000,00							5.110.770.865,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.110.770.865,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						6.253.836.300,00					-		39.884.049.479,00	
		-						6.253.836.300,00					-		39.884.049.479,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	-	105.000.000,00						-	3.258.721.312,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	44.594.700,00						-	574.928.568,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	43.200.000,00						-	441.091.334,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	28.500.000,00						-	339.336.288,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	16.200.000,00						-	427.162.965,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	-	105.000.000,00						-	3.685.061.007,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	18.300.000,00						-	673.642.079,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	50.870.000,00						-	752.587.673,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	5.183.100.000,00						-	5.768.962.020,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	105.146.500,00						-	907.347.612,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	2.235.811.719,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	54.590.000,00						-	674.609.775,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	5.000.000,00						-	399.287.529,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	81.804.000,00						-	731.629.329,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	75.007.000,00						-	346.504.959,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	5.000.000,00						-	4.160.695.056,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	5.000.000,00						-	1.876.061.949,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	105.000.000,00						-	6.670.033.154,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	5.000.000,00						-	1.652.619.497,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	-	127.484.100,00						-	3.832.453.620,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	-	85.040.000,00						-	475.502.034,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						127.484.100,00							3.832.453.620,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	4 Unit	127.484.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.832.453.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						105.000.000,00							3.685.061.007,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	1 Paket	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.685.061.007,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						5.000.000,00							2.235.811.719,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.235.811.719,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						5.000.000,00							399.287.529,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	100 Peserta Didik	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	399.287.529,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						105.146.500,00							907.347.612,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	90 Orang	105.146.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	907.347.612,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						50.870.000,00							752.587.673,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	298 Satuan Pendidikan	50.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	752.587.673,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						5.183.100.000,00					-		5.768.962.020,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	298 Satuan Pendidikan	5.183.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.768.962.020,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						85.040.000,00							475.502.034,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	65 Orang	85.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	475.502.034,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						18.300.000,00							673.642.079,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	100 Orang	18.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	673.642.079,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						16.200.000,00							427.162.965,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	16.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	427.162.965,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						44.594.700,00							574.928.568,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	44.594.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	574.928.568,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						28.500.000,00							339.336.288,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	339.336.288,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						5.000.000,00							4.160.695.056,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.160.695.056,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						105.000.000,00							6.670.033.154,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.670.033.154,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						75.007.000,00							346.504.959,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	50 Peserta didik	75.007.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	346.504.959,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						43.200.000,00							441.091.334,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	3 Kegiatan	43.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	441.091.334,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						54.590.000,00							674.609.775,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	50 Paket	54.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	674.609.775,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						105.000.000,00							3.258.721.312,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	1 Paket	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.258.721.312,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						81.804.000,00							731.629.329,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	298 Satuan Pendidikan	81.804.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	731.629.329,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						5.000.000,00							1.876.061.949,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.876.061.949,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						5.000.000,00							1.652.619.497,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.652.619.497,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						5.615.978.700,00						-	33.938.025.553,00	
		-						5.615.978.700,00						-	33.938.025.553,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	-		-	-	365.000.000,00						-	3.564.744.510,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	22.750.000,00						-	469.548.433,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	10.000.000,00						-	269.996.145,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	5.000.000,00						-	653.862.811,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	2.345.017.716,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	5.000.000,00						-	661.687.002,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	32.707.000,00						-	345.984.183,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	3.179.860.140,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	147.625.000,00						-	775.348.140,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	9.360.000,00						-	551.700.159,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	5.000.000,00						-	5.724.574.455,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	85.000.000,00						-	5.132.594.849,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	5.000.000,00						-	3.096.594.848,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	5.000.000,00						-	887.830.137,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	275.236.700,00						-	883.262.376,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	4.633.300.000,00						-	5.395.419.649,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						9.360.000,00							551.700.159,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	100 Peserta Didik	9.360.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	551.700.159,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						32.707.000,00							345.984.183,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	30 Orang	32.707.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	345.984.183,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						275.236.700,00							883.262.376,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	39 Satuan Pendidikan	275.236.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	883.262.376,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						4.633.300.000,00							5.395.419.649,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	39 Satuan Pendidikan	4.633.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.395.419.649,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						5.000.000,00							661.687.002,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	661.687.002,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						5.000.000,00							653.862.811,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	653.862.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						22.750.000,00							469.548.433,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	22.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	469.548.433,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						10.000.000,00							269.996.145,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	269.996.145,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						5.000.000,00							5.724.574.455,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.724.574.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						5.000.000,00							3.179.860.140,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.179.860.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.000.000,00							3.096.594.848,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.096.594.848,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						147.625.000,00							775.348.140,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	120 Orang	147.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	775.348.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						5.000.000,00							887.830.137,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	1 Peserta Didik	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	887.830.137,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah						5.000.000,00							2.345.017.716,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.345.017.716,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						365.000.000,00							3.564.744.510,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	-		-	2 Paket	365.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.564.744.510,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						85.000.000,00							5.132.594.849,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.132.594.849,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**30.000.000,00**							**304.799.784,00**	
			1.Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 2.Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 3.Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-		-	100 80 80 %%%	10.000.000,00						-	245.739.855,00	
				-		-	-	10.000.000,00						-	59.059.929,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						20.000.000,00					-		245.739.855,00	
		-						20.000.000,00					-		245.739.855,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	-	10.000.000,00						-	93.339.962,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-		-	-	10.000.000,00						-	152.399.893,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						10.000.000,00							152.399.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-		-	440 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	152.399.893,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						10.000.000,00							93.339.962,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	93.339.962,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						10.000.000,00					-		59.059.929,00	
		-						10.000.000,00					-		59.059.929,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	-	10.000.000,00						-	59.059.929,00	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						10.000.000,00							59.059.929,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	59.059.929,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**43.056.700,00**							**127.095.534,00**	
			1.Indeks Distribusi Guru 2.Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	-		-	0,68 67,61 Indeks %	43.056.700,00						-	127.095.534,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						43.056.700,00					-		127.095.534,00	
		-						43.056.700,00					-		127.095.534,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	43.056.700,00						-	127.095.534,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						43.056.700,00							127.095.534,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Dokumen	43.056.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	127.095.534,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**50.000.000,00**							**304.799.784,00**	
			1.Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui 2.Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui 3.Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	-		-	100 100 100 %%%	10.000.000,00						-	192.023.865,00	
		-		-		-	-	10.000.000,00						-	112.775.919,00	
	1.01.05.2.01	Penerbtan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00					-		192.023.865,00	
		-						20.000.000,00					-		192.023.865,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	91.439.935,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	100.583.930,00	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					-		100.583.930,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	100.583.930,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							91.439.935,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	91.439.935,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						30.000.000,00					-		112.775.919,00	
		-						30.000.000,00					-		112.775.919,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	32.003.977,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	28.955.979,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	10.000.000,00						-	51.815.963,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					-		51.815.963,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	51.815.963,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							32.003.977,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	32.003.977,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							28.955.979,00	
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	28.955.979,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**846.000.000,00**							**31.616.629.725,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**846.000.000,00**							**31.616.629.725,00**	
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**468.000.000,00**							**24.132.835.268,00**	
			-	-		-	-	308.000.000,00						-	19.562.294.577,00	
			Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	-		-	79,55 Indeks	152.000.000,00						-	4.570.540.691,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						156.000.000,00					-		4.570.540.691,00	
		-						156.000.000,00					-		4.570.540.691,00	
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	-		-	-	2.000.000,00						-	595.084.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	150.000.000,00						-	1.696.584.705,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-		2.000.000,00						-	1.324.542.693,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	2.000.000,00						-	954.328.896,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						150.000.000,00							1.696.584.705,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	4 Objek	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.696.584.705,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						2.000.000,00							1.324.542.693,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.324.542.693,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						2.000.000,00							954.328.896,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	954.328.896,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan						2.000.000,00							595.084.397,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	-		-	1 Lembaga	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	595.084.397,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						306.000.000,00					-		9.956.749.523,00	
		-						306.000.000,00					-		9.956.749.523,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	-	150.000.000,00						-	2.631.896.113,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-		156.000.000,00							7.324.853.410,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						156.000.000,00							7.324.853.410,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	2 Objek	156.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	7.324.853.410,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						150.000.000,00					-		2.631.896.113,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	2.631.896.113,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00					-		9.605.545.054,00	
		-						6.000.000,00					-		9.605.545.054,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	2.000.000,00						-	1.751.790.841,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	3.253.325.850,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	-	2.000.000,00						-	4.600.428.363,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						2.000.000,00							1.751.790.841,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	2 Objek	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.751.790.841,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						2.000.000,00							4.600.428.363,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	4.600.428.363,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						2.000.000,00							3.253.325.850,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	3.253.325.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**4.000.000,00**							**1.934.163.805,00**	
			Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	-		-	79,85 %	2.000.000,00						-	1.934.163.805,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.000.000,00					-		1.934.163.805,00	
		-						4.000.000,00					-		1.934.163.805,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.000.000,00						-	1.258.747.104,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (DItingkatkan Kompetensinya)	-		-	-	2.000.000,00						-	675.416.701,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						2.000.000,00							675.416.701,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (DItingkatkan Kompetensinya)	-		-	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	675.416.701,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						2.000.000,00							1.258.747.104,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.258.747.104,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**6.000.000,00**							**550.833.403,00**	
			Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	-		-	65,65 Indeks	2.000.000,00						-	550.833.403,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00					-		550.833.403,00	
		-						6.000.000,00					-		550.833.403,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	126.691.683,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	-		-	-	2.000.000,00						-	148.725.019,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	-	2.000.000,00						-	275.416.701,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						2.000.000,00							275.416.701,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	275.416.701,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						2.000.000,00							148.725.019,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	148.725.019,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						2.000.000,00							126.691.683,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	126.691.683,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**358.000.000,00**							**3.847.045.053,00**	
			1.Persentase cagar budaya yang dilestarikan 2.Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	-		-	100 100 %%	252.000.000,00						-	1.550.232.068,00	
			-	-		-	-	102.000.000,00						-	2.296.812.985,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						252.000.000,00					-		1.550.232.068,00	
		-						252.000.000,00					-		1.550.232.068,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	150.000.000,00						-	1.018.932.236,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	-	100.000.000,00						-	115.116.244,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	2.000.000,00						-	416.183.588,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						100.000.000,00							115.116.244,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	5 Objek	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	115.116.244,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						150.000.000,00							1.018.932.236,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	5 Objek	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.018.932.236,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						2.000.000,00							416.183.588,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	1 Objek	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	416.183.588,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						106.000.000,00					-		2.296.812.985,00	
		-	-					106.000.000,00					-		2.296.812.985,00	
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	-		-	-	2.000.000,00						-	290.540.043,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	2.000.000,00						-	630.574.433,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	2.000.000,00						-	237.906.901,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	100.000.000,00						-	1.137.791.608,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						2.000.000,00							237.906.901,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	1 Objek	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	237.906.901,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						2.000.000,00							630.574.433,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	1 Objek	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	630.574.433,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						100.000.000,00							1.137.791.608,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	11 Objek	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.137.791.608,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						2.000.000,00							290.540.043,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	-		-	1 Objek	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	290.540.043,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**10.000.000,00**							**1.151.752.196,00**	
			Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	-		-	75,35 %	2.000.000,00						-	1.151.752.196,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		1.151.752.196,00	
		-						10.000.000,00					-		1.151.752.196,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	-		-	-	2.000.000,00						-	115.175.219,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-		-	-	2.000.000,00						-	253.385.483,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	-		-	-	2.000.000,00						-	207.315.395,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	272.490.614,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-		-	-	2.000.000,00						-	303.385.485,00	
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						2.000.000,00							303.385.485,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-		-	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	303.385.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						2.000.000,00							253.385.483,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	253.385.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						2.000.000,00							272.490.614,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	272.490.614,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						2.000.000,00							207.315.395,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	207.315.395,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum						2.000.000,00							115.175.219,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	115.175.219,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS						**70.000.000.000,00**							**70.816.809.430,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**70.000.000.000,00**							**70.816.809.430,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**70.000.000.000,00**							**70.816.809.430,00**	
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**69.116.812.000,00**							**66.466.809.430,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	69.116.812.000,00						-	66.466.809.430,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.925.827.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		25.588.669.430,00	
		-						27.925.827.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		25.588.669.430,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	27.925.827.000,00						-	25.588.669.430,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27.925.827.000,00							25.588.669.430,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	360 Orang/bulan	27.925.827.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.588.669.430,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.190.985.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		878.140.000,00	
		-						1.190.985.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		878.140.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.190.985.000,00						-	878.140.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.190.985.000,00							878.140.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	36 Laporan	1.190.985.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	878.140.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						40.000.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000.000,00	
		-						40.000.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	40.000.000.000,00						-	40.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						40.000.000.000,00							40.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**883.188.000,00**							**4.350.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-		-	94,67 %	883.188.000,00						-	4.350.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						483.188.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		4.000.000.000,00	
		-						483.188.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		4.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	483.188.000,00						-	4.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						483.188.000,00							4.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	483.188.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		350.000.000,00	
		-						400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	400.000.000,00						-	350.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						400.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	12 Dokumen	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	350.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	DINAS KESEHATAN							**138.500.343.843,00**							**156.261.136.854,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**138.500.343.843,00**							**156.261.136.854,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**138.500.343.843,00**							**156.261.136.854,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	-		-	100 %	70.561.994.400,00						-	70.525.849.344,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						157.000.000,00					Dinas Kesehatan		184.444.444,00	
		-						157.000.000,00					Dinas Kesehatan		184.444.444,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	157.000.000,00						-	184.444.444,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						157.000.000,00							184.444.444,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	157.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	184.444.444,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						69.584.500.000,00					Dinas Kesehatan		69.527.000.000,00	
		-						69.584.500.000,00					Dinas Kesehatan		69.527.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	69.504.500.000,00						-	69.402.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						69.504.500.000,00							69.402.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	900 Orang/bulan	69.504.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	69.402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas Kesehatan		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Dinas Kesehatan		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.899.000,00					Dinas Kesehatan		110.000.000,00	
		-						89.899.000,00					Dinas Kesehatan		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	74.899.000,00						-	95.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.899.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	74.899.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						449.705.400,00					Dinas Kesehatan		451.904.900,00	
		-						449.705.400,00					Dinas Kesehatan		451.904.900,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	217.800.500,00					-	-	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	231.904.900,00						-	231.904.900,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						217.800.500,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	217.800.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						231.904.900,00							231.904.900,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	231.904.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	231.904.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280.890.000,00					Dinas Kesehatan		347.500.000,00	
		-						280.890.000,00					Dinas Kesehatan		347.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	120.000.000,00					-	-	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.440.000,00						-	32.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	91.650.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	31.800.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.650.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	91.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.440.000,00							32.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	37.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	32.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.800.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	31.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						120.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
14.	1.02.02						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						76.298.000.943,00								96.071.359.000,00	
								Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	63.988.449.443,00							-	81.284.729.000,00	
								Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	170.000.000,00							-	360.000.000,00	
								Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
								Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	64.008.449.443,00							-	81.444.729.000,00	
	1.02.02.2.01						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						18.773.705.400,00						Kabupaten Lima Puluh Kota		38.765.881.541,00	
							-						18.773.705.400,00						Kabupaten Lima Puluh Kota		38.765.881.541,00	
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	538.874.000,00							-	545.000.000,00	
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	1.614.000.000,00							-	2.112.000.000,00	
								Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	355.000.000,00							-	355.661.500,00	
								Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	1.550.050.000,00							-	24.653.220.041,00	
								Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	-	140.643.000,00							-	150.000.000,00	
								Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	5.900.000.000,00							-	6.650.000.000,00	
								Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	2.720.074.300,00							-	750.000.000,00	
								Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	-	4.053.807.100,00							-	2.500.000.000,00	
								Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	895.044.000,00							-	175.000.000,00	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	-	1.006.213.000,00							-	875.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0001						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						4.053.807.100,00								2.500.000.000,00	
							Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	1 Unit	4.053.807.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006						Pengembangan Puskesmas						2.720.074.300,00								750.000.000,00	
							Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	22 Unit	2.720.074.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.550.050.000,00								24.653.220.041,00	
							Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	2 Unit	1.550.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	24.653.220.041,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						1.006.213.000,00							875.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	6 Unit	1.006.213.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						895.044.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	2 Unit	895.044.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.614.000.000,00							2.112.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	9 Unit	1.614.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						538.874.000,00							545.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	22 Unit	538.874.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	545.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5.900.000.000,00							6.650.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	23 Paket	5.900.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			6.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						140.643.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	1000 Keluarga	140.643.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						355.000.000,00							355.661.500,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	23 Paket	355.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	355.661.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00						Masyarakat di kabupaten Lima Puluh Kota		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00						Masyarakat di kabupaten Lima Puluh Kota		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00							-	938.780.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	195.000.000,00							-	225.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	950.000.000,00							-	255.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	-	35.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	35.092.706.361,00							-	30.711.200.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00							-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00							-	407.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-		4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	25.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	180.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-		135.000.000,00							95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-		350.000.000,00							350.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	275.100.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	250.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	350.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	150.000.000,00						-	442.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	320.000.000,00						-	355.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-		385.900.000,00							391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	620 Orang	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	617 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						950.000.000,00							255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	613 Orang	950.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						195.000.000,00							225.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	2841 Orang	195.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						185.000.000,00							185.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	7648 Orang	185.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	185.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						350.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	21400 Orang	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	2130 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3184 Orang	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	418 Orang	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						195.000.000,00							295.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	68 Orang	195.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.523.509.800,00							1.884.014.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	1146 Orang	1.523.509.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.884.014.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						275.100.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	730 Orang	275.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1.510.598.482,00							1.267.618.482,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	12 Dokumen	1.510.598.482,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.267.618.482,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						599.988.100,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	599.988.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						180.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						25.000.000,00							85.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						178.500.000,00							178.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	178.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	178.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						150.000.000,00							442.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	25 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	442.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						35.092.706.361,00							30.711.200.577,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	35.092.706.361,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.711.200.577,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						130.000.000,00							150.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						459.357.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	459.357.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	22 Unit	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						135.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						35.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1.500.000.000,00							1.600.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	555 Orang	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						56.000.000,00							26.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	80 Orang	56.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	26.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						25.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						250.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						320.000.000,00							355.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	40 Paket	320.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	200 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						113.984.300,00							1.584.014.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	113.984.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.584.014.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						250.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1000 Orang	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						175.000.000,00					Dinas Kesehatan		275.000.000,00	
		-						175.000.000,00					Dinas Kesehatan		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	175.000.000,00						-	275.000.000,00	
	1.02.02.2.02.3002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						175.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00					-		360.000.000,00	
		-						170.000.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	-	20.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						20.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	22 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
15.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**610.000.000,00**							**637.120.000,00**	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar	-		-	95 %	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%)	-		-	95 %	175.000.000,00						-	142.120.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi namen dan nakes sesuai standar	-		-	95 %	110.000.000,00						-	85.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						110.000.000,00					Named dan nakes di Kabupaten Lima Pulluh Kota		170.000.000,00	
		-						110.000.000,00					Named dan nakes di Kabupaten Lima Pulluh Kota		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	45.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	65.000.000,00						-	85.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						65.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						45.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	50 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						325.000.000,00					Dinas Kesehatandan puskesmas		325.000.000,00	
		-						325.000.000,00					Dinas Kesehatandan puskesmas		325.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	175.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	75.000.000,00						-	175.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						175.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						75.000.000,00							175.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	425 Orang	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000,00					Dinas Kesehatan dan puskesmas		142.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						175.000.000,00					Dinas Kesehatan dan puskesmas		142.120.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	175.000.000,00						-	142.120.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000,00							142.120.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	30 Orang	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	142.120.000,00	DINAS KESEHATAN
16.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**383.000.000,00**							**466.008.510,00**	
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan (%)	-		-	100 %	383.000.000,00						-	466.008.510,00	
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	-		-	65 %	288.000.000,00						-	330.000.000,00	
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar (%)	-		-	65 %	95.000.000,00						-	136.008.510,00	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	-		-	90 %	383.000.000,00						-	466.008.510,00	
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	-		-	58 %	383.000.000,00						-	466.008.510,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						95.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		136.008.510,00	
		-						95.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		136.008.510,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	95.000.000,00						-	136.008.510,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						95.000.000,00							136.008.510,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	136.008.510,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						60.000.000,00					PIRT di Kabup[aten Lima Puluih Kota		85.000.000,00	
		-						60.000.000,00					PIRT di Kabup[aten Lima Puluih Kota		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	60.000.000,00						-	85.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						60.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						228.000.000,00					Industri rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota		245.000.000,00	
		-						228.000.000,00					Industri rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota		245.000.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	228.000.000,00						-	245.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						228.000.000,00							245.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	35 Unit	228.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
17.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	171.900.000,00						-	176.430.000,00	
			-	-		-	-	220.000.000,00						-	16.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00						-	250.200.000,00	
		-						431.500.000,00						-	250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						220.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						121.900.000,00					Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota		126.430.000,00	
		-						121.900.000,00					Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota		126.430.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	-		-	-	121.900.000,00						-	126.430.000,00	
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						121.900.000,00							126.430.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	-		-	50 Keluarga	121.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	126.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Taram						**1.605.815.000,00**							**1.620.550.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.605.815.000,00**							**1.620.550.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.605.815.000,00**							**1.620.550.000,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.185.000.000,00						-	1.185.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Taram		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Taram		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.185.000.000,00							1.185.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.185.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.185.000.000,00	Puskesmas Taram
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	356.815.000,00						-	423.550.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					Puskesmas Taram		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					Puskesmas Taram		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-		335.400.000,00							407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gisi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-		385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	19 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.500.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	235 Orang	23.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.200.000,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	3 Orang	6.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.400.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02 2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						25.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	31 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	130.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						8.565.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	8.565.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.250.000,00							2.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.350.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	45 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						25.000.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	28.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						4.650.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	4.650.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.850.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	40 Orang	2.850.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Taram
20.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			-	-		-	-	9.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						9.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Taram
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Taram || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Taram
		Puskesmas Suliki						**1.708.550.000,00**							**1.758.950.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.708.550.000,00**							**1.758.950.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.708.550.000,00**							**1.758.950.000,00**	
21.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Suliki		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Suliki		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.200.000.000,00	Puskesmas Suliki
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
		Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	497.550.000,00						-	545.350.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		-					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-		1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					65.000.000,00							62.500.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	28 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	62.500.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					20.000.000,00							25.000.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	252 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					16.650.000,00							17.000.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	16.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					5.500.000,00							5.800.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	40 Orang	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.800.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					175.000.000,00							185.000.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	185.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					11.700.000,00							11.900.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.900.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.250.000,00							2.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.350.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	95.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	39 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.500.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.800.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						25.050.000,00							25.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	25.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.300.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.800.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	215 Orang	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.200.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Suliki
23.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	6.500.000,00						-	6.800.000,00	
			-	-		-	-	4.500.000,00						-	6.800.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						4.500.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.800.000,00	Puskesmas Suliki
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.500.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.800.000,00	Puskesmas Suliki
		Puskesmas Situjuh						**1.837.250.000,00**							**1.894.850.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.837.250.000,00**							**1.894.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.837.250.000,00**							**1.894.850.000,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.350.000.000,00						-	1.350.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Situjuh		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Situjuh		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.350.000.000,00							1.350.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.350.000.000,00	Puskesmas Situjuh
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	413.250.000,00						-	532.850.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00	
		-					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	38 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	52.500.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	427 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	4 Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.400.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.600.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	65 Orang	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	135.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.000.000,00							12.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.400.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	100.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						450.000,00							450.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	55 Orang	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	450.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						17.500.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	18.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						12.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						55.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	60.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						14.700.000,00							15.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	14.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.100.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	305 Orang	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.500.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Situjuh
26.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	6.500.000,00						-	6.000.000,00	
			-	-		-	-	5.500.000,00						-	6.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-	-					431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	5.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Situjuah Limo Nagari || Desa Situjuah Batua || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			6.000.000,00	Puskesmas Situjuh
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-	-					172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Situjuah Limo Nagari || Desa Situjuah Batua || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Situjuh
		Puskesmas Rimbo Data						**736.450.000,00**							**866.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**736.450.000,00**							**866.100.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**736.450.000,00**							**866.100.000,00**	
27.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	354.000.000,00						-	354.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Rimbo Data		27.306.000.000,00	
		-	-					27.270.500.000,00					Puskesmas Rimbo Data		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-		27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						354.000.000,00							354.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	354.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	354.000.000,00	Puskesmas Rimbo Data
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	365.950.000,00						-	494.300.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		-					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					25.000.000,00							32.500.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	9 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		32.500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					5.000.000,00							6.200.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	91 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		6.200.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.600.000,00							4.200.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1 Orang	3.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		4.200.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					14.500.000,00							14.700.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	12 Orang	14.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		14.700.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					115.000.000,00							160.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	160.000.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.000.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.000.000,00							8.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.200.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						65.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	120.000.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						150.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	11 Orang	150.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						40.000.000,00							40.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						12.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						4.000.000,00							4.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.300.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						300.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	59 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						45.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Rimbo Data
29.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	4.500.000,00						-	4.800.000,00	
			-	-		-	-	12.000.000,00						-	12.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.500.000,00	Puskesmas Rimbo Data
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.500.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.800.000,00	Puskesmas Rimbo Data
		Puskesmas Baruh Gunuang						**990.100.000,00**							**1.074.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**990.100.000,00**							**1.074.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**990.100.000,00**							**1.074.000.000,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	565.000.000,00						-	565.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Baruah Gunung		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Baruah Gunung		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						565.000.000,00							565.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	565.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	565.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	368.100.000,00						-	483.300.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan ketanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.000.000,00							34.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	12 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	34.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.000.000,00							32.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	96 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	32.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						14.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1 Orang	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						7.500.000,00							8.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	76 Orang	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.950.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						120.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	125.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.600.000,00							7.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.950.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.000.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.200.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						70.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1 Orang	1.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.500.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	26.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.500.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						9.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						4.500.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Tanjung Pauh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.200.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	105 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.500.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						58.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	58.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
32.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	9.000.000,00						-	10.000.000,00	
			-	-		-	-	14.000.000,00						-	14.200.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-	-					431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.000.000,00							14.200.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.200.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-	-					172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Baruah Gunuang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Baruh Gunuang
		Puskesmas Pangkalan						**2.045.400.000,00**							**2.132.880.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.045.400.000,00**							**2.132.880.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.045.400.000,00**							**2.132.880.000,00**	
33.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.578.000.000,00						-	1.578.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Pangkalan		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Pangkalan		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.578.000.000,00							1.578.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.578.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.578.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
34.	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	442.200.000,00						-	521.880.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan ketanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.000.000,00							35.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	20 Orang	28.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23.000.000,00							27.580.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	431 Orang	23.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.580.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						20.000.000,00							23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	5 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.400.000,00							18.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	76 Orang	18.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	18.700.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	135.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.000.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.200.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.800.000,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.200.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						85.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	125.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						22.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						500.000,00							800.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	800.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0047						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						20.000.000,00							22.000.000,00	
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	22.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0048						Pengelolaan Layanan Imunisasi						35.000.000,00							38.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	38.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0054						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						3.500.000,00							4.100.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.100.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0055						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						8.700.000,00							9.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	270 Orang	8.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.02.2.02.0056						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						65.000.000,00							75.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	Puskesmas Pangkalan
35.	**1.02.05**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
								Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	1.700.000,00						-	6.500.000,00	
									-		-	-	3.500.000,00						-	3.500.000,00	
	1.02.05.2.01						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00						masyarakat		250.200.000,00	
							-	-					431.500.000,00						masyarakat		250.200.000,00	
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						3.500.000,00							3.500.000,00	
							Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.500.000,00	Puskesmas Pangkalan
	1.02.05.2.03						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00						masyarakat		190.500.000,00	
							-	-					172.300.000,00						masyarakat		190.500.000,00	
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.700.000,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.500.000,00	Puskesmas Pangkalan
	Puskesmas Banja Loweh							**1.034.000.000,00**							**1.144.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.034.000.000,00**							**1.144.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.034.000.000,00**							**1.144.600.000,00**	
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	630.000.000,00						-	630.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Banja Loweh		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Banja Loweh	-	27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						630.000.000,00							630.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	630.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	630.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%).	-		-	65,7 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	349.700.000,00						-	473.100.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.000.000,00							34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	22 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	34.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						26.000.000,00							30.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	218 Orang	26.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000,00							6.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	6.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.700.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.000.000,00							10.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	35 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.600.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						110.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	125.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.000.000,00							14.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.600.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.500.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.200.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	130.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	21.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.900.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	21.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						8.000.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.800.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.000.000,00							5.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	86 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.900.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						45.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
38.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	4.300.000,00						-	8.500.000,00	
				-		-		10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.000.000,00	Puskesmas Banja Loweh
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.300.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	4.300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Banja Loweh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.500.000,00	Puskesmas Banja Loweh
		Puskesmas Tanjung Pati						**2.681.900.000,00**							**2.816.900.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.681.900.000,00**							**2.816.900.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.681.900.000,00**							**2.816.900.000,00**	
39.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	2.200.000.000,00						-	2.200.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Tanjung Pati		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Tanjung Pati		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.200.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	2.200.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	461.900.000,00						-	593.900.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					65.000.000,00							68.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	45 Orang	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	68.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					40.000.000,00							45.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	580 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	45.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	5 Orang	11.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	12.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					10.500.000,00							11.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	78 Orang	10.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	11.400.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	150.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					11.700.000,00							13.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	11.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	13.600.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2.250.000,00							7.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	7.600.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					80.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	125.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	91 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	600.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.500.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.500.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.800.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			30.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						15.050.000,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	15.050.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.200.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.800.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	505 Orang	1.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.500.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.02.2.02056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
41.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			-	-		-	-	15.000.000,00						-	17.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-		431.500.000,00							250.200.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS					TARGET	PAGU INDIKATIF	
													LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						15.000.000,00							17.500.000,00	
						Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.500.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
	1.02.05.2.03					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
						-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						5.000.000,00							5.500.000,00	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.500.000,00	Puskesmas Tanjung Pati
						Puskesmas Mungo						**2.503.550.000,00**							**2.611.400.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.503.550.000,00**							**2.611.400.000,00**	
	1.02					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.503.550.000,00**							**2.611.400.000,00**	
42.	**1.02.01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
						-	-	-	-	-	-	2.043.000.000,00						-	2.043.000.000,00	
	1.02.01.2.10					Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Mungo		27.306.000.000,00	
						-						27.270.500.000,00					Puskesmas Mungo		27.306.000.000,00	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.043.000.000,00							2.043.000.000,00	
						Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.043.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.043.000.000,00	Puskesmas Mungo
43.	**1.02.02**					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
							Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
							Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	440.050.000,00						-	554.400.000,00	
	1.02.02.2.02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
						-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						65.000.000,00							60.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	24 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	60.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	383 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.650.000,00							7.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	6.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.600.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						15.500.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	40 Orang	15.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.000.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	145.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.000.000,00							9.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.100.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.100.000,00							14.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	10.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.800.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	69 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	900.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.500.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.800.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	24.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						14.200.000,00							14.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	14.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.300.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.500.000,00							12.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	384 Orang	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.200.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Mungo
44.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	8.500.000,00						-	9.500.000,00	
				-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Luak || Desa Mungo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.500.000,00	Puskesmas Mungo
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.500.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Luak || Desa Mungo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.500.000,00	Puskesmas Mungo
		Puskesmas Pakan Rabaa						**2.121.600.000,00**							**2.231.850.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.121.600.000,00**							**2.231.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.121.600.000,00**							**2.231.850.000,00**	
45.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.665.000.000,00						-	1.665.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Pakan Rabaa		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Pakan Rabaa		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.665.000.000,00							1.665.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.665.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.665.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
46.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	443.800.000,00						-	551.850.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					65.000.000,00							66.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	53 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	66.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					20.000.000,00							36.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	615 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	36.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.650.000,00							9.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	5 Orang	6.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.400.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					15.500.000,00							20.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	95 Orang	15.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.100.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					115.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	135.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					16.000.000,00							16.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.100.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						78.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	58 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	750.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.500.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.500.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.500.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.800.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						15.050.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	15.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.500.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	323 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						55.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
47.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	4.300.000,00						-	5.000.000,00	
				-		-	-	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.300.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Pakan Rabaa
		Puskesmas Piladang						**1.111.100.000,00**							**1.157.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.111.100.000,00**							**1.157.300.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.111.100.000,00**							**1.157.300.000,00**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	699.500.000,00						-	700.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Piladang		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Piladang		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						699.500.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	699.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Durian Gadang || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	700.000.000,00	Puskesmas Piladang
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	361.100.000,00						-	362.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-		335.400.000,00							407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-		1.919.609.800,00							2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-		385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.000.000,00							47.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	47.500.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	165 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						14.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1 Orang	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.500.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						7.500.000,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	13 Orang	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	18.500.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.600.000,00							4.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.600.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						68.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.500.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	26 Orang	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						26.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						9.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						4.500.000,00							4.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.100.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	145 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						58.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	58.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Piladang
50.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	4.500.000,00						-	5.300.000,00	
			-	-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Durian Gadang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Piladang
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.500.000,00							5.300.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Durian Gadang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.300.000,00	Puskesmas Piladang
		Puskesmas Batu Hampar						**1.828.800.000,00**							**1.894.750.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.828.800.000,00**							**1.894.750.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.828.800.000,00**							**1.894.750.000,00**	
51.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.385.000.000,00						-	1.385.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Batu Hampar		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Batu Hampar		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.385.000.000,00							1.385.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.385.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Batuhampar || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.385.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
52.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	418.300.000,00						-	482.850.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						35.000.000,00							39.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	26 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	39.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						22.000.000,00							27.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	343 Orang	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.000.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	3 Orang	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.500.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	48 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						110.000.000,00							135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	135.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.000.000,00							7.450.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.450.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1.500.000,00							2.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.300.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						78.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	90.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	43 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.500.000,00							1.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.600.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						15.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						40.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						8.000.000,00							8.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.900.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.500.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	236 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.800.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	80.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
53.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	6.500.000,00						-	6.900.000,00	
			-	-		-	-	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-	-					431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Batuhampar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			10.000.000,00	Puskesmas Batu Hampar
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-	-					172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.500.000,00							6.900.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Akabiluru || Desa Batuhampar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.900.000,00	Puskesmas Batu Hampar
		Puskesmas Halaban						**1.432.500.000,00**							**1.501.450.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.432.500.000,00**							**1.501.450.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.432.500.000,00**							**1.501.450.000,00**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	970.000.000,00					-	-	970.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Halaban		27.306.000.000,00	
		-	-					27.270.500.000,00					Puskesmas Halaban		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00					-	-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						970.000.000,00							970.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	970.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	970.000.000,00	Puskesmas Halaban
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	430.300.000,00						-	509.550.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						35.000.000,00							39.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	29 Orang	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	39.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						22.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	338 Orang	22.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.000.000,00							15.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	3 Orang	13.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.100.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	51 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.500.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						115.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	130.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.000.000,00							18.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	18.200.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						85.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	95.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							450.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	37 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	450.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						9.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.500.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.500.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						15.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						8.000.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.500.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.500.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	203 Orang	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.800.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						75.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Halaban
56.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	6.700.000,00						-	6.900.000,00	
				-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Halaban
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.700.000,00							6.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	6.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Lareh Sago Halaban || Desa Halaban || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.900.000,00	Puskesmas Halaban
		Puskesmas Muaro Paiti						**1.963.461.500,00**							**2.046.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.963.461.500,00**							**2.046.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.963.461.500,00**							**2.046.000.000,00**	
57.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	1.410.000.000,00						-	1.410.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Muaro Paiti		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Muaro Paiti		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.410.000.000,00							1.410.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.410.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	1.410.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
58.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	544.561.500,00						-	581.600.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						45.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	20 Orang	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						40.000.000,00							45.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	205 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.500.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						37.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	35 Orang	37.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	38.500.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						123.061.500,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	123.061.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	160.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						19.000.000,00							19.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	19.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	19.300.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.500.000,00							8.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.200.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						105.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	105.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.200.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						11.000.000,00							11.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.500.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						5.000.000,00							5.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.600.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						14.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						31.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	31.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						23.500.000,00							23.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	23.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.600.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						25.200.000,00							25.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	236 Orang	25.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.200.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
59.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	1.900.000,00						-	2.200.000,00	
				-		-		7.000.000,00						-	7.200.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						7.000.000,00							7.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.200.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.900.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	1.900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Muaro Paiti || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.200.000,00	Puskesmas Muaro Paiti
		Puskesmas Sialang						**1.417.300.000,00**							**1.568.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.417.300.000,00**							**1.568.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.417.300.000,00**							**1.568.400.000,00**	
60.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	900.000.000,00						-	905.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Sialang		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Sialang		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						900.000.000,00							905.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	900.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	905.000.000,00	Puskesmas Sialang
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	494.800.000,00						-	635.400.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					45.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	49 Orang	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	50.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	547 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					11.000.000,00							12.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	05 Orang	11.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.100.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					41.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	91 Orang	41.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	42.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					100.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	175.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					25.000.000,00							25.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.400.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.500.000,00							7.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.400.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					85.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	120.000.000,00	Puskesmas Sialang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	33 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						12.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.500.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.400.000,00							2.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.600.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						14.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			35.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						8.100.000,00							8.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	8.100.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.300.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.500.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	180 Orang	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.800.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.02.2.02056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	Puskesmas Sialang
62.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			-	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-		431.500.000,00						-	250.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Kapur IX || Desa Sialang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Sialang
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-	-					172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Pangkalan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.000.000,00	Puskesmas Sialang
		Puskesmas Koto Baru SMLG						**2.914.800.000,00**							**2.990.550.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.914.800.000,00**							**2.990.550.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.914.800.000,00**							**2.990.550.000,00**	
63.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	2.400.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Koto Baru Simalanggang		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Koto Baru Simalanggang		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.400.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
64.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persatase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	462.400.000,00						-	532.550.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-	-					57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00							938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						45.000.000,00							49.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	73 Orang	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	49.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	607 Orang	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						7.200.000,00							7.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	8 Orang	7.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.600.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.000.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	136 Orang	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.800.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.000.000,00							16.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.750.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.500.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						85.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	105.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						400.000,00							400.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	89 Orang	400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	400.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						23.000.000,00							23.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	23.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.500.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						3.600.000,00							3.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.800.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						16.200.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	16.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	16.500.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						14.000.000,00							14.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.700.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						16.500.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	490 Orang	16.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						65.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
65.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	3.900.000,00						-	4.000.000,00	
			-	-		-	-	13.500.000,00						-	14.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						13.500.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	13.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						3.900.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	3.900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.000.000,00	Puskesmas Koto Baru SMLG
		Puskesmas Dangung-dangung						**2.379.200.000,00**							**2.428.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.379.200.000,00**							**2.428.700.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.379.200.000,00**							**2.428.700.000,00**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	1.900.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Dangung-Dangung		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Dangung-Dangung		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-		27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.900.000.000,00							1.900.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	1.900.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	469.000.000,00						-	485.700.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	42 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					40.000.000,00							32.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	567 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	32.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					8.000.000,00							23.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	5 Orang	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	23.200.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					37.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	83 Orang	37.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					115.000.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	145.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7.500.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.500.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						75.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	105.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.800.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						11.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						32.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	32.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	32.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.200.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						25.200.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	374 Orang	25.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
68.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	5.700.000,00						-	6.000.000,00	
			-	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			-					431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			-					172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						5.700.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	5.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa Guguak VIII Koto || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Dangung-dangung
		Puskesmas Mungka						**2.389.500.000,00**							**2.599.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.389.500.000,00**							**2.599.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.389.500.000,00**							**2.599.000.000,00**	
69.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	1.885.000.000,00						-	1.885.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Mungka		27.306.000.000,00	
			-					27.270.500.000,00					Puskesmas Mungka		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.885.000.000,00							1.885.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.885.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.885.000.000,00	Puskesmas Mungka
70.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
		Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
		Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	489.500.000,00						-	547.700.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		-					57.179.295.543,00						masyarakat	56.670.477.459,00		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-		335.400.000,00						-	407.500.000,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-		1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00		
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00		
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					30.000.000,00							35.000.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	52 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					40.000.000,00							39.000.000,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	623 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	39.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					8.000.000,00							10.200.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	5 Orang	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.200.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					37.000.000,00							21.000.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	97 Orang	37.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	21.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					115.000.000,00							150.000.000,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					21.000.000,00							22.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	22.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						78.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	78.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	105.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	68 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						11.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.500.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.500.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						14.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	19.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						35.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						15.700.000,00							15.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	15.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.900.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						25.000.000,00							11.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	379 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	11.600.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	Puskesmas Mungka
71.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	9.000.000,00						-	9.800.000,00	
			-	-		-	-	6.000.000,00						-	6.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						6.000.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	6.500.000,00	Puskesmas Mungka
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						9.000.000,00							9.800.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Mungka || Desa Mungka || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.800.000,00	Puskesmas Mungka
		Puskesmas Padang Kandis						**997.125.000,00**							**1.080.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**997.125.000,00**							**1.080.100.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**997.125.000,00**							**1.080.100.000,00**	
72.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	590.000.000,00						-	590.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Padang Kandis		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Padang Kandis		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						590.000.000,00							590.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	590.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	590.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
73.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	390.125.000,00						-	472.300.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.000.000,00							22.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	15 Orang	19.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	22.500.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						65.000.000,00							68.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	175 Orang	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	68.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	4.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.800.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						27.000.000,00							28.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	28 Orang	27.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	28.200.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						95.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	95.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	125.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1.125.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	1.125.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						70.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	105.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	25 Orang	300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						7.200.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.500.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.200.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						12.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						9.000.000,00							9.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.600.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.000.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	138 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.200.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
74.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	7.500.000,00						-	7.800.000,00	
			-	-		-	-	9.500.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-	-					431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						9.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	9.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Padang Kandis
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						7.500.000,00							7.800.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Guguak || Desa VII Koto Talago || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.800.000,00	Puskesmas Padang Kandis
		Puskesmas Koto Tinggi						**1.350.600.000,00**							**1.475.350.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.350.600.000,00**							**1.475.350.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.350.600.000,00**							**1.475.350.000,00**	
75.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
			-	-		-	-	920.000.000,00					-	-	950.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Koto Tinggi		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Koto Tinggi		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00					-		27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						920.000.000,00							950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	920.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	950.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
76.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	387.850.000,00						-	506.550.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						45.000.000,00							51.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	22 Orang	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	51.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						28.000.000,00							32.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	286 Orang	28.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	32.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							9.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.400.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						7.600.000,00							8.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	38 Orang	7.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.200.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						110.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	135.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.000.000,00							15.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.200.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.100.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	2.100.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						65.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	115.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	34 Orang	750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	750.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						15.000.000,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.500.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						750.000,00							900.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	900.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0047						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						12.000.000,00							12.500.000,00	
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.500.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0048						Pengelolaan Layanan Imunisasi						35.000.000,00							40.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0054						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						8.400.000,00							8.600.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.600.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0055						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00							9.500.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	188 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	9.500.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.02.2.02.0056						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							50.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	50.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
77.	**1.02.05**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
								Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	3.500.000,00						-	3.800.000,00	
									-		-	-	14.500.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.01						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
							-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.500.000,00							15.000.000,00	
							Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	14.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	1.02.05.2.03						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
							-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						3.500.000,00							3.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Gunuang Omeh || Desa Koto Tinggi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.800.000,00	Puskesmas Koto Tinggi
	Puskesmas Maek							**1.303.300.000,00**							**1.407.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.303.300.000,00**							**1.407.300.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.303.300.000,00**							**1.407.300.000,00**	
78.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	871.000.000,00						-	871.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Maek		27.306.000.000,00	
		-	-					27.270.500.000,00					Puskesmas Maek		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						871.000.000,00							871.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	871.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	871.000.000,00	Puskesmas Maek
79.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%).	-		-	65,7 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	398.800.000,00						-	523.100.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-	-					57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.000.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5 Orang	28.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	32.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						30.000.000,00							34.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	43 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	34.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1 Orang	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	22.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						21.000.000,00							22.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	8 Orang	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	22.100.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						115.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	140.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.000.000,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.300.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						600.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	800.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						65.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	130.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						200.000,00							200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	24 Orang	200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						12.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	12.500.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.300.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						18.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	19.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						32.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	32.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	36.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						5.000.000,00							5.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.900.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	136 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	10.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	45.000.000,00	Puskesmas Maek
80.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	7.500.000,00						-	8.200.000,00	
				-		-		5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	431.500.000,00						-	250.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.000.000,00	Puskesmas Maek
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						7.500.000,00							8.200.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Bukik Barisan || Desa Maek || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.200.000,00	Puskesmas Maek
		Puskesmas Gunung Malintang						**1.046.550.000,00**							**1.156.350.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.046.550.000,00**							**1.156.350.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.046.550.000,00**							**1.156.350.000,00**	
81.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**97.882.494.400,00**							**97.976.849.344,00**	
		-	-	-		-	-	570.000.000,00						-	570.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27.270.500.000,00					Puskesmas Gunung Malintang		27.306.000.000,00	
		-						27.270.500.000,00					Puskesmas Gunung Malintang		27.306.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	27.270.500.000,00						-	27.306.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						570.000.000,00							570.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	570.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	570.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
82.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**76.298.000.943,00**							**96.071.359.000,00**	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	-		-	50 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%)	-		-	71 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-		-	23 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-		-	100 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,5 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-		-	65,6 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	-		-	65,7 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%)	-		-	70,5 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	-		-	10,4 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%)	-		-	91 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	-		-	48,9 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-		-	92 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	-		-	1,4 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-		-	23,4 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-		-	84,23 %	456.250.000,00						-	564.850.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
		-						57.179.295.543,00					masyarakat		56.670.477.459,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	854.000.000,00						-	938.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	935.000.000,00						-	879.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	335.400.000,00						-	407.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	4.103.659.982,00						-	4.372.618.482,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	857.853.100,00						-	525.850.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	394.200.000,00						-	408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	266.475.000,00						-	280.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	491.450.000,00						-	507.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	2.136.357.000,00						-	2.925.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	1.095.000.000,00						-	1.195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	1.309.984.300,00						-	2.940.014.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.919.609.800,00						-	2.290.464.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	240.350.000,00						-	271.900.000,00	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	65.300.000,00						-	188.250.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	425.950.000,00						-	569.000.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	385.900.000,00						-	391.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					25.000.000,00							28.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	16 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	28.500.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	202 Orang	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	40.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					18.000.000,00							18.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	2 Orang	18.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	18.400.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					20.000.000,00							20.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	30 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	20.400.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					95.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	0 Dokumen	95.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	120.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					7.200.000,00							7.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	7.300.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					500.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	800.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					65.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	115.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						150.000,00							150.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	18 Orang	150.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	65.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						24.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	24.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.000.000,00							35.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			35.500.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						13.000.000,00							14.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	13.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	14.100.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.500.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	99 Orang	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.700.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.02.2.02056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						55.000.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	66.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
83.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**725.700.000,00**							**567.130.000,00**	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	-		-	100 %	7.800.000,00						-	8.000.000,00	
			-	-		-	-	12.500.000,00						-	13.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
		-						431.500.000,00					masyarakat		250.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-		431.500.000,00						-	250.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.500.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	12.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	13.500.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
		-						172.300.000,00					masyarakat		190.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	172.300.000,00						-	190.500.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						7.800.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	7.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Pangkalan Koto Baru || Desa Gunuang Malintang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	8.000.000,00	Puskesmas Gunung Malintang
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**176.584.797.000,00**							**274.822.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**176.234.797.000,00**							**274.622.500.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**176.234.797.000,00**							**274.622.500.000,00**	
84.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.330.000.000,00**							**12.742.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	13.855.000.000,00						-	12.582.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00					Dinas PUPR		60.000.000,00	
		-						80.000.000,00					Dinas PUPR		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.598.000.000,00					Pegawai Dinas PUPR		11.015.000.000,00	
	.	.						10.598.000.000,00					Pegawai Dinas PUPR		11.015.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	10.578.000.000,00						-	11.000.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.578.000.000,00							11.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	131 Orang/bulan	10.578.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						505.000.000,00					Dinas PUPR		247.000.000,00	
	.	.						505.000.000,00					Dinas PUPR		247.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	40.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	200.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	140.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						140.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	140.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							40.000.000,00	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						40.000.000,00							15.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							100.000.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						30.000.000,00							15.000.000,00	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00						Dinas PUPR	0,00	
						-						150.000.000,00						Dinas PUPR	0,00	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	1.03.01.2.07.0002					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							0,00	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	3 Unit	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005					Pengadaan Mebel						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	20 Unit	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						322.000.000,00					Dinas PUPR		1.070.000.000,00	
		-	-					322.000.000,00					Dinas PUPR		1.070.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	192.000.000,00						-	950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						192.000.000,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	192.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.675.000.000,00					Dinas PUPR		350.000.000,00	
		-	-					2.675.000.000,00					Dinas PUPR		350.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	2.250.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	175.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	25 Unit	175.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						2.250.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	8 Unit	2.250.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	11 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**31.000.000.000,00**							**32.395.000.000,00**	
			Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	-		-	52 Persen	27.675.000.000,00						-	20.990.000.000,00	
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik	-		-	52 %	3.325.000.000,00						-	11.405.000.000,00	
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir	-		-	43 %	3.325.000.000,00						-	11.405.000.000,00	
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir	-		-	43 Persen	27.675.000.000,00						-	20.990.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.325.000.000,00					Masyarakat		11.405.000.000,00	
		-						3.325.000.000,00					Masyarakat		11.405.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	-	1.450.000.000,00						-	910.000.000,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	3.200.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	-	1.375.000.000,00						-	7.295.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						1.375.000.000,00							7.295.000.000,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	1 KM	1.375.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	7.295.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						1.450.000.000,00							910.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	2 Dokumen	1.450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						500.000.000,00							3.200.000.000,00	
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-		-	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						27.675.000.000,00					Petani Pemakai Air		20.990.000.000,00	
		-						27.675.000.000,00					Petani Pemakai Air		20.990.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	380.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	26.765.000.000,00						-	12.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-		-	-	530.000.000,00						-	8.190.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						530.000.000,00							8.190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-		-	0,5 KM	530.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	8.190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						26.765.000.000,00							12.000.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	0.583 KM	26.765.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						380.000.000,00							800.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0.25 KM	380.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.300.000.000,00**							**20.000.000.000,00**	
			Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	-		-	67 %	1.300.000.000,00						-	20.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah		20.000.000.000,00	
		-						1.300.000.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah		20.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	-	700.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	-	600.000.000,00						-	20.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						700.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	1 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						600.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	100 SR	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**400.000.000,00**							**30.000.000.000,00**	
			Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	-		-	2 Persen	400.000.000,00						-	30.000.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Masyarakat		30.000.000.000,00	
		-						400.000.000,00					Masyarakat		30.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	-	100.000.000,00						-	30.000.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						300.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						100.000.000,00							30.000.000.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	10 Ton/hari	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.600.000.000,00**							**30.000.000.000,00**	
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	-		-	70 Persen	3.600.000.000,00						-	30.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.600.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah		30.000.000.000,00	
		-						3.600.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah		30.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	3.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	500.000.000,00						-	30.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						100.000.000,00						-	0,00	
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	40 M³/Hari	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						3.000.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						500.000.000,00							30.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	22.5 M³/Hari	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**6.150.000.000,00**							**19.000.000.000,00**	
			Persentase cakupan Drainase dalam kondisi baik (%)	-		-	47 Persen	6.150.000.000,00						-	19.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.150.000.000,00					Masyarakat		19.000.000.000,00	
		-						6.150.000.000,00					Masyarakat		19.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	-	6.150.000.000,00						-	19.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						6.150.000.000,00							19.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	6 Sistem Drainase Perkotaan	6.150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**530.000.000,00**							**40.450.000.000,00**	
			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	-		-	82 Persen	530.000.000,00						-	40.450.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						530.000.000,00					Gedung Pemerintah		40.450.000.000,00	
		-						530.000.000,00					Gedung Pemerintah		40.450.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00						-	40.050.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	330.000.000,00						-	400.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						330.000.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	50 Dokumen	330.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							40.050.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	40.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**118.094.797.000,00**							**87.200.000.000,00**	
			Tingkat Kemantapan Jalan	-		-	60 Persen	118.094.797.000,00						-	87.200.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						118.094.797.000,00					Masyarakat Pengguna Jalan		87.200.000.000,00	
		-						118.094.797.000,00					Masyarakat Pengguna Jalan		87.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	500.000.000,00							422.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	30.100.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	1.430.000.000,00						-	20.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	5.800.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	45.014.797.000,00						-	58.278.000.000,00	
		Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	35.250.000.000,00						-	4.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						500.000.000,00							422.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	422.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						5.800.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	50 KM	5.800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						30.100.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	0,5 KM	30.100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						1.430.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	1 KM	1.430.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						45.014.797.000,00							58.278.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	1,5 KM	45.014.797.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	58.278.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						35.250.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	25 Meter	35.250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**250.000.000,00**							**285.500.000,00**	
		Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	-		-	-	10 Persen	222.000.000,00						-	268.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	28.000.000,00						-	17.500.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						165.000.000,00					Tenaga Kerja Konstruksi		210.500.000,00	
		-						165.000.000,00					Tenaga Kerja Konstruksi		210.500.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disedıakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	40.000.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	120.000.000,00						-	194.500.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						120.000.000,00							194.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	60 Orang	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	194.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						40.000.000,00							16.000.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	30 Lembaga	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						28.000.000,00					Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha Konstruksi		17.500.000,00	
		-						28.000.000,00					Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha Konstruksi		17.500.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-		-		3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	5.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	3.500.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						20.000.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-		-	1 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Payakumbuh || Desa Koto Baru Simalanggang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						5.000.000,00							11.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-		-	1 Layanan Informasi	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						57.000.000,00					Proyek Konstruksi		57.500.000,00	
		-						57.000.000,00					Proyek Konstruksi		57.500.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	57.000.000,00						-	57.500.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						57.000.000,00							57.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	25 Paket Pekerjaan	57.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	57.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93.	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**580.000.000,00**							**2.550.000.000,00**	
			Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	-		-	100 Persen	580.000.000,00						-	2.550.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						77.000.000,00					Dokumen Tata Ruang		0,00	
		-						77.000.000,00					Dokumen Tata Ruang		0,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	77.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						77.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Dokumen Perencanaan Tata Ruang		2.400.000.000,00	
		-						400.000.000,00					Dokumen Perencanaan Tata Ruang		2.400.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	400.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						400.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Penyelesaian Kasus pelanggaran pemamfaatan ruang		0,00	
		-						100.000.000,00					Penyelesaian Kasus pelanggaran pemamfaatan ruang		0,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-		-	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00					Pemamfaatan Tata Ruang		150.000.000,00	
		-						3.000.000,00					Pemamfaatan Tata Ruang		150.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	-	3.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						3.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**350.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**350.000.000,00**							**200.000.000,00**	
94.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**350.000.000,00**							**200.000.000,00**	
			Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	-		-	10 Persen	350.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					Tanah Garapan		200.000.000,00	
		-						350.000.000,00					Tanah Garapan		200.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	270.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota						30.000.000,00							0,00	
		Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						270.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	270.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**9.300.000.000,00**							**11.193.783.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.300.000.000,00**							**11.193.783.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9.300.000.000,00**							**11.193.783.000,00**	
95.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.074.500.000,00**							**8.404.333.000,00**	
			1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. persentase Keselaraan RPJMD dengan renstra	-		-	100 %	8.072.000.000,00						-	8.404 333.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.707.220.274,00					pegawai PD		8.023.100.000,00	
		-						7.707.220.274,00					pegawai PD		8.023.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	7.100.000,00						-	8.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-		14.100.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.686.020.274,00						-	8.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.686.020.274,00							8.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	123 Orang/bulan	7.686.020.274,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	8.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						14.100.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	14.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						7.100.000,00							8.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	8.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.400.001,00					pegawai PD		111 283.000,00	
		-						101.400.001,00					pegawai PD		111.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	36.918.000,00						-	38.918.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.064.000,00						-	17.065.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.501.000,00						-	7.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.917.001,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	12.500.000,00	
	1.05.01.2.06001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.917.001,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.917.001,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	12.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.064.000,00							17.065.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	17.064.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	17.065.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.501.000,00							7.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.501.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	7.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						500.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			3.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						36.918.000,00							38.918.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	36.918.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	38.918.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.500.000,00					pegawai PD		21.000.000,00	
		-						1.500.000,00					pegawai PD		21.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	8.500.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	4.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	8.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161.079.725,00					pegawai PD		135.750.000,00	
		-						161.079.725,00					pegawai PD		135.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	69.700.000,00						-	69.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	86.379.725,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.700.000,00							69.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	69.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	69.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						86.379.725,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	86.379.725,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.300.000,00					pegawai PD		113.200.000,00	
		-						103.300.000,00					pegawai PD		113.200.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	89.800.000,00						-	90.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	13.000.000,00						-	13.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						89.800.000,00							90.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	89.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	90.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
96.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**1.225.500.000,00**							**2.789.450.000,00**	
			1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. persentase Keselarasn RPJMD dengan renstra	-		-	100 %	1.222.500.000,00						-	2.776.450.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.138.820.000,00					masyarakat		2.676.920.000,00	
		-						1.138.820.000,00					masyarakat		2.676.920.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	-	15.420.000,00						-	15.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.200.000,00						-	1.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-		-	-	728.700.000,00						-	550.700.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	-	500.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	390.000.000,00						-	410.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	2.000.000,00						-	1.650.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						500.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						390.000.000,00							410.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	390.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	410.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.200.000,00							1.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	1.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						728.700.000,00							550.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-		-	1 Dokumen	728.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			550.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						15.420.000,00							15.420.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	30 Orang	15.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	15.420.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						2.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	1.650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga						500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	-		-	1 Keluarga	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						5.550.000,00					masyarakat		9.500.000,00	
		-						5.550.000,00					masyarakat		9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	5.050.000,00						-	6.500.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						5.050.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	1 Laporan	5.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	6.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran						2.400.000,00					masyarakat		4.500.000,00	
		-						2.400.000,00					masyarakat		4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	-		-	-	2.400.000,00						-	4.500.000,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						2.400.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	-		-	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	4.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						76.530.000,00					masyarakat		90.530.000,00	
		-	-					76.530.000,00					masyarakat		90.530.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	-	500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	75.530.000,00						-	75.530.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						75.530.000,00							75.530.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	500 Orang	75.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	75.530.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	3 Desa/Kelurahan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						2.200.000,00					masyarakat		8.000.000,00	
		-						2.200.000,00					masyarakat		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-		-	-	1.700.000,00						-	3.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						1.700.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-		-	1 Laporan	1.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**10.150.000.000,00**							**11.666.585.462,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.150.000.000,00**							**11.666.585.462,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.150.000.000,00**							**11.666.585.462,00**	
97.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.739.276.180,00**							**7.288.264.366,00**	
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	685.786.310,00						-	1.215.000.000,00	
			Persentase pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	8.053.489.870,00						-	5.873.264.366,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.480.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
		-						14.480.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.480.000,00						-	30.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.480.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	14.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.871.802.454,00					Perangkat Daerah		5.493.264.366,00	
		-						7.871.802.454,00					Perangkat Daerah		5.493.264.366,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	9.160.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.862.642.454,00						-	5.468.264.366,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.862.642.454,00							5.468.264.366,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	128 Orang/bulan	7.862.642.454,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.468.264.366,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						9.160.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	9.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						167.207.416,00					Perangkat Daerah		350.000.000,00	
		-						167.207.416,00					Perangkat Daerah		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	127.951.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.455.816,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.805.600,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.995.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.995.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.455.816,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	25.455.816,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.805.600,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	11.805.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						127.951.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	127.951.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.516.310,00					Perangkat Daerah		700.000.000,00	
		-						150.516.310,00					Perangkat Daerah		700.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	86.560.310,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	63.956.000,00						-	250.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						86.560.310,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	58 Unit	86.560.310,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						63.956.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	63.956.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.500.000,00					Perangkat Daerah		65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						11.500.000,00					Perangkat Daerah		65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	11.500.000,00						-	65.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.500.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						523.770.000,00					Perangkat Daerah		650.000.000,00	
		-						523.770.000,00					Perangkat Daerah		650.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	159.300.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	347.640.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	16.830.000,00						-	130.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						347.640.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	18 Unit	347.640.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.830.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	27 Unit	16.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						159.300.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	159.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
98.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.410.723.820,00**							**4.378.321.096,00**	
			Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas	-		-	100 %	1.410.723.820,00						-	4.219.946.096,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						790.834.400,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		3.055.081.096,00	
		-						790.834.400,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		3.055.081.096,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	-	12.082.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	72.212.600,00						-	98.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	40.000.000,00						-	175.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	51.625.000,00						-	165.425.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	2.745.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	-	62.644.300,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	27.840.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	150.000.000,00						-	122.600.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	60.000.000,00						-	296.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	-	28.933.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	-	235.074.000,00						-	1.843.626.096,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-		-	-	42.678.500,00						-	98.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						51.625.000,00							165.425.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	30 Dokumen	51.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	165.425.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						27.840.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	24 Dokumen	27.840.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						40.000.000,00							175.200.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	15 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	175.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						62.644.300,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Diimutakhirkan	-		-	1 Dokumen	62.644.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						42.678.500,00							98.375.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-		-	160 Orang	42.678.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	98.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						12.082.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	12 Orang	12.082.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						60.000.000,00							296.480.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	35 laporan	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	296.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						150.000.000,00							122.600.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	18 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	122.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						28.933.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	24 Laporan	28.933.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						235.074.000,00							1.843.626.096,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	76 Unit	235.074.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.843.626.096,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	14 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.745.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	12 Dokumen	2.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						72.212.600,00							98.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	794 Orang	72.212.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	98.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						546.816.600,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		1.143.240.000,00	
		-						546.816.600,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		1.143.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	-		-	-	3.250.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	14.990.500,00						-	93.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	45.432.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	4.987.600,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	49.996.500,00						-	170.240.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-		428.160.000,00						-	685.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)						428.160.000,00							685.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	5 unit	428.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			685.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						4.987.600,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	5 Laporan	4.987.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah						3.250.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	-		-	5 Dokumen	3.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						45.432.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	12 Laporan	45.432.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						49.996.500,00							170.240.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	12 Laporan	49.996.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	170.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						14.990.500,00							93.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	12 Laporan	14.990.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	93.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						73.072.820,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		180.000.000,00	
		-						73.072.820,00					Masyarakat/Perangkat Daerah		180.000.000,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-		-	-	43.073.500,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	14.999.380,00						-	30.000.000,00	
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-		-	-	14.999.940,00						-	0,00	
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS						14.999.940,00							0,00	
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-		-	1 Dokumen	14.999.940,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						14.999.380,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	7 Dokumen	14.999.380,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah						43.073.500,00							150.000.000,00	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-		-	1 Laporan	43.073.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS SOSIAL						**7.933.100.000,00**							**6.714.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.933.100.000,00**							**6.714.700.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**7.933.100.000,00**							**6.714.700.000,00**	
99.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.544.000.000,00**							**4.634.700.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	4.542.501.000,00						-	4.629.700.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.993.400,00					-		27.500.000,00	
		-						21.993.400,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	11.993.400,00						-	15.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							12.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.993.400,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	15 Laporan	11.993.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.069.032.100,00					-		4.105.000.000,00	
		-						4.069.032.100,00					-		4.105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.499.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.499.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.066.034.100,00						-	4.100.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.066.034.100,00							4.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	55 Orang/bulan	4.066.034.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.499.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.499.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.499.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.499.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		2.500.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.446.500,00					-		95.500.000,00	
		-						85.446.500,00					-		95.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.995.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	49.987.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.967.700,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.999.800,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.497.000,00						-	3.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.497.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.497.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.967.700,00							22.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	19.967.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	22.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.999.800,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	7.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.995.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	4.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						49.987.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	49.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.710.000,00					-		115.000.000,00	
		-						78.710.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	24.613.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	54.097.000,00						-	80.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						24.613.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	24.613.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.097.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	9 Unit	54.097.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.700.000,00					-		107.200.000,00	
		-						106.700.000,00					-		107.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.500.000,00						-	26.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	79.200.000,00						-	79.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.500.000,00							26.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	26.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						79.200.000,00							79.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	79.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	79.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.118.000,00					-		182.000.000,00	
		-						180.118.000,00					-		182.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	78.408.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	95.900.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.810.000,00						-	7.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						95.900.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	95.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.810.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	5.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						78.408.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	78.408.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
100.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**170.000.000,00**							**275.000.000,00**	
			1. Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial, 2.Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA 3.Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar, 4.Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 5. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	-		-	100%100%100%20%20%	170.000.000,00						-	275.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		275.000.000,00	
		-						170.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		275.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Tarantang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	93 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
101.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**2.603.100.000,00**							**1.015.000.000,00**	
			1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya4.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya5Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-		-	25%25%25%25%20% undefined	1.384.000.000,00						-	485.000.000,00	
			1.Persentase penyandang disablitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, 5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-		-	25%25%25%25%20% undefined	1.219.100.000,00						-	530.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.219.100.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		530.000.000,00	
		-						1.219.100.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		530.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	114.600.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	950.500.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	45.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	39.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						950.500.000,00							300.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	934 Orang	950.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						114.600.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	76 Orang	114.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						39.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1.384.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
		-						1.384.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	556.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	798.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						556.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	114 Orang	556.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						798.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	143 Orang	798.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	79 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
102.	**1.06.05**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**180.000.000,00**							**235.000.000,00**	
							1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar 2.Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 3.Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin 4.Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	-		-	100%0,67%100%1,34 %	180.000.000,00						-	235.000.000,00	
	1.06.05.2.02					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		235.000.000,00	
						-						180.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		235.000.000,00	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	-	80.000.000,00						-	85.000.000,00	
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							85.000.000,00	
						Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	279271 Orang	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						100.000.000,00							150.000.000,00	
						Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	18225 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
103.	**1.06.06**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**406.000.000,00**							**520.000.000,00**	
							1.Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3.Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	-		-	100%100%100% undefined	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
							1.Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3.Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	-		-	100%100%100%	376.000.000,00						-	485.000.000,00	
	1.06.06.2.01					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						376.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
						-						376.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		485.000.000,00	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	26.000.000,00						-	30.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001					Penyediaan Makanan						200.000.000,00							250.000.000,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	155 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002					Penyediaan Sandang						100.000.000,00							150.000.000,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	70 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						26.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	9 Orang	26.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Kampung	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Suliki || Desa Suliki || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
104.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**30.000.000,00**							**35.000.000,00**	
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	-		-	95 %	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Makam Pahlawan		35.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Makam Pahlawan		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						**5.315.000.000,00**							**6.902.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**417.250.000,00**							**1.051.489.056,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**417.250.000,00**							**1.051.489.056,00**	
105.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**380.000.000,00**							**901.489.056,00**	
			Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	-		-	70 %	380.000.000,00						-	901.489.056,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						380.000.000,00					-		901.489.056,00	
		-						380.000.000,00					-		901.489.056,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	380.000.000,00						-	901.489.056,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						380.000.000,00							901.489.056,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	16 Orang	380.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	901.489.056,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
106.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**37.250.000,00**							**150.000.000,00**	
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negr	-		-	70 %	37.250.000,00						-	150.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						37.250.000,00					-		150.000.000,00	
		-						37.250.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	-	37.250.000,00						-	150.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						37.250.000,00							150.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	16 Orang	37.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.897.750.000,00**							**5.850.510.944,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.872.750.100,00**							**5.829.510.944,00**	
107.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.466.550.100,00**							**4.019.510.944,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	4.454.550.100,00						-	3.810.510.944,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00					-		2.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	2.000.000,00	
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.100.206.440,00							3.103.510.944,00	
		-						4.100.206.440,00							3.103.510.944,00	
		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.096.706.440,00						-	3.098.510.944,00	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.096.706.440,00							3.098.510.944,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	4.096.706.440,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.098.510.944,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00							2.000.000,00	
		-						3.500.000,00							2.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	3.500.000,00						-	2.000.000,00	
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67.994.400,00							252.000.000,00	
		-						67.994.400,00							252.000.000,00	
		-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.995.000,00						-	15.000.000,00	
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	45.000.000,00						-	192.000.000,00	
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.999.400,00						-	22.000.000,00	
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	8.000.000,00	
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.999.400,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.999.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.995.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	4.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						45.000.000,00							192.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	192.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						167.799.900,00							435.000.000,00	
		-						167.799.900,00							435.000.000,00	
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	46.799.900,00						-	243.000.000,00	
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	121.000.000,00						-	192.000.000,00	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.799.900,00							243.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	46.799.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	243.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						121.000.000,00							192.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	121.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	192.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.549.360,00							225.000.000,00	
		-						123.549.360,00							225.000.000,00	
		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.999.360,00						-	25.000.000,00	
		-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	115.550.000,00						-	150.000.000,00	
		-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						115.550.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	18 Unit	115.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.999.360,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.999.360,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
108.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**255.000.000,00**							**1.160.000.000,00**	
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-		-	12 %	235.000.000,00						-	1.160.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						255.000.000,00							1.160.000.000,00	
		-						255.000.000,00							1.160.000.000,00	
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-		-	-	20.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	10.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	-	20.000.000,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	160.000.000,00						-	155.000.000,00	
		- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	-	45.000.000,00						-	65.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					20.000.000,00							800.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						160.000.000,00							155.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						10.000.000,00							105.000.000,00	
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						45.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
109.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**151.200.000,00**							**650.000.000,00**	
			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-		-	100 %	151.200.000,00						-	650.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						151.200.000,00						-	650.000.000,00	
		-						151.200.000,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-		-	-	130.200.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	-	21.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						21.000.000,00							350.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						130.200.000,00							300.000.000,00	
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-		-	1 Dokumen	130.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**24.999.900,00**							**21.000.000,00**	
110.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**24.999.900,00**							**21.000.000,00**	
			Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	-		-	8,5 %	24.999.900,00						-	21.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						24.999.900,00						-	21.000.000,00	
		-						24.999.900,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-		-	-	24.999.900,00						-	21.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						24.999.900,00							21.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-		-	16 Kepala Keluarga	24.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		DINAS PANGAN						**3.696.918.331,00**							**4.829.602.631,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.696.918.331,00**							**4.829.602.631,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3.696.918.331,00**							**4.829.602.631,00**	
111.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.044.918.331,00**							**2.675.242.631,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	3.027.418.331,00						-	2.603.242.631,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		32.000.000,00	
		-						10.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	8.000.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.445.310.136,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		2.047.050.777,00	
		-						2.445.310.136,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		2.047.050.777,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.445.310.136,00						-	2.047.050.777,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.445.310.136,00							2.047.050.777,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	2.445.310.136,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.047.050.777,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
		-						16.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	16.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						16.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	31 Paket	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						180.408.195,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		280.887.052,00	
		-						180.408.195,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		280.887.052,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	98.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.408.195,00						-	13.887.052,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.408.195,00							13.887.052,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.408.195,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.887.052,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						98.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	98.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	
		-						15.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.200.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		90.000.000,00	
		-						52.200.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.200.000,00						-	72.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							72.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	43.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	72.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						326.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		195.304.802,00	
		-						326.000.000,00					ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota		195.304.802,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	141.000.000,00						-	50.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-		5.000.000,00							10.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	180.000.000,00						-	135.304.802,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					141.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	141.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						180.000.000,00							135.304.802,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	135.304.802,00	DINAS PANGAN
112.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**117.000.000,00**							**133.370.000,00**	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-		-	1 unit	117.000.000,00						-	133.370.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						117.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		133.370.000,00	
		-						117.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		133.370.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	42.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	-	75.000.000,00						-	33.370.000,00	
	2.09.02.2.01003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						42.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	1 Unit	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.2.01004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						75.000.000,00							33.370.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.370.000,00	DINAS PANGAN
113.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**455.000.000,00**							**1.904.190.000,00**	
			1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan, 2. Skor Pola Pangan Harapan	-		-	1.100 2. 91,9 1.%, 2. skor	215.000.000,00						-	1.709.190.000,00	
			1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan, 2. Skor Pola Pangan Harapan	-		-	1. 100, 2. 91,9 1. %, 2. skor	165.000.000,00						-	80.000.000,00	
			1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan, 2. Skor Pola Pangan Harapan	-		-	1. 100, 2. 91,9 1. %, 2. Skor	55.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						235.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.779.190.000,00	
		-						235.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.779.190.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00					-	-	40.000.000,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Informasi Stok Pangan	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah keglatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							30.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.190.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	-	15.000.000,00						-	1.594.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	-	100.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.09.03.2.01003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						100.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah keglatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						25.000.000,00							25.190.000,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.190.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01011	Pemantauan Stok Pangan						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	-		-	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						15.000.000,00							1.594.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.594.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						55.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh kota		45.000.000,00	
		-						55.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh kota		45.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah LPM yang terfasilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.09.03.2.02005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	15 Ton	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	-		-	89,908 Ton	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	-		-	3 kelompok	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						165.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	
		-						165.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	-	90.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-		75.000.000,00							60.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						75.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						90.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	DINAS PANGAN
114.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-		-	6,39 %	15.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat Rentan Rawan Pangan		30.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Rentan Rawan Pangan		30.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Masyarakat Rentan Rawan Pangan		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Rentan Rawan Pangan		10.000.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PANGAN
115.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**65.000.000,00**							**76.800.000,00**	
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-		-	92 %	40.000.000,00						-	76.800.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						65.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		76.800.000,00	
		-						65.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		76.800.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.600.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	35.200.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							35.200.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						15.000.000,00							15.600.000,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.600.000,00	DINAS PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						**10.348.973.132,00**							**45.880.543.132,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.886.000.000,00**							**38.359.120.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.886.000.000,00**							**38.359.120.000,00**	
116.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**575.000.000,00**							**1.070.500.000,00**	
			Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni	-		-	100 %	48.000.000,00						-	75.000.000,00	
			-	-		-	-	527.000.000,00						-	995.500.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						48.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		75.000.000,00	
		-						48.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	48.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						48.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						22.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		34.500.000,00	
		-						22.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		34.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	22.000.000,00						-	34.500.000,00	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana					22.000.000,00							34.500.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	34.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						455.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		961.000.000,00	
		-						455.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		961.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	230.000.000,00						-	961.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-		-	-	225.000.000,00						-	0,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						230.000.000,00							961.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	3 Unit Rumah	230.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	961.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota						225.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-		-	10 Rumah Tangga	225.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						50.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		0,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	-		-	-	50.000.000,00					-	-	0,00	
	1.04.02.2.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	-		-	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
117.	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**961.000.000,00**							**15.320.440.000,00**	
			Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	-		-	18,46 %	86.000.000,00						-	40.000.000,00	
			-	-		-	-	875.000.000,00						-	15.280.440.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						86.000.000,00					Rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh		40.000.000,00	
		-						86.000.000,00					Rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-		-	-	24.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						32.000.000,00							0,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-		-	1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						24.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-		-	1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah						30.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-		-	30 Rumah Tangga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						875.000.000,00					Rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh		15.280.440.000,00	
		-						875.000.000,00					Rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh		15.280.440.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	250.000.000,00						-	13.124.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	125.000.000,00						-	2.096.440.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	-		-	-	500.000.000,00						-	60.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						125.000.000,00							2.096.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	5 Unit Rumah	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	2.096.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh						500.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	-		-	1 Ha	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						250.000.000,00							13.124.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	4 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	13.124.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
118.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.125.000.000,00**							**1.760.100.000,00**	
			Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-		-	2,49 Ha	1.125.000.000,00						-	1.760.100.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.125.000.000,00					Kawasan permukiman kumuh		1.760.100.000,00	
		-						1.125.000.000,00					Kawasan permukiman kumuh		1.760.100.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	125.000.000,00						-	60.100.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						125.000.000,00							60.100.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	4 Unit Rumah	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	60.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						1.000.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	18 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
119.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**203.000.000,00**							**20.156.060.000,00**	
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	-		-	45,00 %	203.000.000,00						-	20.156.060.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						203.000.000,00					Penyediaan PSU Perumahan		20.156.060.000,00	
		-						203.000.000,00					Penyediaan PSU Perumahan		20.156.060.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	-	18.000.000,00						-	26.080.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	185.000.000,00						-	20.129.980.000,00	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						18.000.000,00							26.080.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	26.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						185.000.000,00							20.129.980.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	1 Lokasi	185.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	20.129.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
120.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**22.000.000,00**							**52.020.000,00**	
			-	-		-	-	22.000.000,00						-	52.020.000,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						22.000.000,00					Pengembang Perumahan		52.020.000,00	
		-						22.000.000,00					Pengembang Perumahan		52.020.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-		-	-	22.000.000,00						-	52.020.000,00	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						22.000.000,00							52.020.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-		-	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	52.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.462.973.132,00**							**7.521.423.132,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**7.462.973.132,00**							**7.521.423.132,00**	
121.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.583.973.132,00**							**5.583.973.132,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100,00 %	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
				-		-	-	5.510.973.132,00						-	5.510.973.132,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.135.973.132,00					pelaksanaan penunjang urusan		5.135.973.132,00	
		-						5.135.973.132,00					pelaksanaan penunjang urusan		5.135.973.132,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.135.973.132,00						-	5.135.973.132,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.135.973.132,00							5.135.973.132,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	46 Orang/bulan	5.135.973.132,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	5.135.973.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		24.000.000,00	
		-						24.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						152.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		152.000.000,00	
		-						152.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		152.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	88.000.000,00						-	88.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						88.000.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	88.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						18.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		32.000.000,00	
		-						32.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		32.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	32.000.000,00						-	32.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						32.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	6 Unit	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		60.000.000,00	
		-						60.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						140.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		140.000.000,00	
		-						140.000.000,00					pelaksanaan penunjang urusan		140.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	48.000.000,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	92.000.000,00						-	92.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						92.000.000,00							92.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	18 Unit	92.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	92.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48.000.000,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
122.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**58.000.000,00**							**116.450.000,00**	
			Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-		-	100,00 %	58.000.000,00						-	116.450.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						58.000.000,00					Perencanaan Lingkungan		116.450.000,00	
		-						58.000.000,00					Perencanaan Lingkungan		116.450.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	58.000.000,00						-	116.450.000,00	
	2.11.02.2.02.2005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						58.000.000,00							116.450.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	1 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	116.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
123.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**228.000.000,00**							**228.000.000,00**	
			Indeks Kualitas Air	-		-	65,01 Indeks	174.000.000,00						-	174.000.000,00	
			-	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						210.000.000,00					Usaha /kegiatan		210.000.000,00	
		-						210.000.000,00					Usaha /kegiatan		210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	36.000.000,00						-	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						36.000.000,00							36.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						18.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-		-	24 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0015						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						120.000.000,00							120.000.000,00	
							Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	24 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.03						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						18.000.000,00					Usaha /kegiatan		18.000.000,00	
							-						18.000.000,00					Usaha /kegiatan		18.000.000,00	
								luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0009						Pelaksanaan rehabilitasi						18.000.000,00							18.000.000,00	
							kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	10 Ha	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
124.	**2.11.04**						**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
								Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan	-		-	0,25 %	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.11.04.2.01						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						250.000.000,00					ruang terbuka hijau		250.000.000,00	
							-						250.000.000,00					ruang terbuka hijau		250.000.000,00	
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						250.000.000,00							250.000.000,00	
							Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	7,01 Ha	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
125.	**2.11.05**						**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
								Persentase limbah B3 yang terkelola	-		-	40,00 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.05.2.02						Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
							-						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
								jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0004						Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota						15.000.000,00							15.000.000,00	
							terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	-		-	12 Usaha	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
126.	**2.11.06**						**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**36.000.000,00**							**36.000.000,00**	
								Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	-		-	93,20 %	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	2.11.06.2.01						Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						36.000.000,00					Usaha /kegiatan		36.000.000,00	
							-						36.000.000,00					Usaha /kegiatan		36.000.000,00	
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						18.000.000,00							18.000.000,00	
							Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.06.2.01.0009						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						18.000.000,00							18.000.000,00	
							Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	24 Badan Usaha	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
127.	2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	40,00 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
128.	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**67.000.000,00**							**67.000.000,00**	
			Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	20,00 %	67.000.000,00						-	67.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						67.000.000,00					Usaha /kegiatan		67.000.000,00	
		-						67.000.000,00					Usaha /kegiatan		67.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	30 Orang	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	-		-	50 Keluarga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
129.	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-		-	20,00 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Usaha /kegiatan		15.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	6 Entitas	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
130.	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
			Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan hidup	-		-	100,00 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Usaha /kegiatan		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Usaha /kegiatan		30.000.000,00	
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	12 Pengaduan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.10.2.01.0010					Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						15.000.000,00							15.000.000,00	
						Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	12 Sanksi	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
131.	**2.11.11**					**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**1.165.000.000,00**							**1.165.000.000,00**	
							Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-		-	34,66 Indeks	1.165.000.000,00						-	1.165.000.000,00	
	2.11.11.2.01.1					Pengelolaan Sampah						1.165.000.000,00					Usaha /kegiatan		1.165.000.000,00	
						-						1.165.000.000,00					Usaha /kegiatan		1.165.000.000,00	
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	-	36.000.000,00						-	36.000.000,00	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	182.000.000,00						-	182.000.000,00	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	225.000.000,00						-	225.000.000,00	
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	-	72.000.000,00						-	72.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						36.000.000,00							36.000.000,00	
						Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	24 Kelompok	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0007					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						225.000.000,00							225.000.000,00	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	4 Unit	225.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0008					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
						Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0012					Penanganan sampah melalui pengangkutan						600.000.000,00							600.000.000,00	
						Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	7482 Ton	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0016					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						72.000.000,00							72.000.000,00	
						Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	10,39 Persentase	72.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	72.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0017					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						182.000.000,00							182.000.000,00	
						Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	1825 Ton	182.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	182.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.600.000.000,00**							**8.314.482.595,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.600.000.000,00**							**8.314.482.595,00**	
	2.12					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.600.000.000,00**							**8.314.482.595,00**	
132.	**2.12.01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.132.590.000,00**							**7.629.482.595,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		-	undefined undefined	61.245.437,00							2.674.409.735,00	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	4.127.590.000,00							7.629.482.595,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.904.028.563,00					-		4.494.372.860,00	
		-					3.904.028.563,00					-		4.494.372.860,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.904.028.563,00							4.494.372.860,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.904.028.563,00							4.494.372.860,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	65 Orang/bulan	3.904.028.563,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		4.494.372.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					61.245.437,00					-		2.674.409.735,00	
		-					61.245.437,00					-		2.674.409.735,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.500.000,00							5.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	22.725.437,00							285.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							20.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.020.000,00							17.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							2.346.909.735,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.020.000,00					-		17.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	2.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00							2.346.909.735,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2.346.909.735,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.725.437,00							285.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	22.725.437,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		285.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.566.000,00					-		130.700.000,00	
		-					66.566.000,00					-		130.700.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	50.966.000,00							80.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.400.000,00							43.200.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.200.000,00							7.500.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.200.000,00					-		7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50.966.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	50.966.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					14.400.000,00							43.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		43.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.750.000,00					-		330.000.000,00	
		-					100.750.000,00					-		330.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	95.750.000,00							255.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00							75.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					95.750.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	25 Unit	95.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	32 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
133.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**449.010.000,00**						**520.000.000,00**	
				-		-		18.450.000,00					-	20.000.000,00	
			-	-		-	-	430.560.000,00					-	500.000.000,00	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						430.560.000,00						500.000.000,00	
		-						430.560.000,00					-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	-	430.560.000,00							500.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						430.560.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	10000 Dokumen	430.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						18.450.000,00					-		20.000.000,00	
		-						18.450.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	18.450.000,00						-	20.000.000,00	
	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk						18.450.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	12 Dokumen	18.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
134.	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**14.700.000,00**							**85.000.000,00**	
				-		-	-	11.100.000,00						-	40.000.000,00	
			-	-		-	-	3.600.000,00						-	45.000.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						3.600.000,00					-		45.000.000,00	
		-						3.600.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-		-	-	3.600.000,00						-	45.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						3.600.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-		-	3 Laporan	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						11.100.000,00					-		40.000.000,00	
		-						11.100.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	-	11.100.000,00						-	40.000.000,00	
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil						11.100.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	7700 Dokumen	11.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
135.	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**3.600.000,00**							**45.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.600.000,00						-	45.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						3.600.000,00					-		45.000.000,00	
		-						3.600.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	-	3.600.000,00						-	45.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						3.600.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	178 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
136.	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**100.000,00**							**35.000.000,00**	
			-	-		-	-	100.000,00						-	35.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						100.000,00					-		35.000.000,00	
		-						100.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	100.000,00						-	35.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						100.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI						**6.470.000.000,00**							**7.292.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.470.000.000,00**							**7.292.400.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.470.000.000,00**							**7.292.400.000,00**	
137.	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.652.916.000,00**							**5.892.400.000,00**	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	4 Dokumen	22.620.000,00							25.500.000,00	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	8 Dokumen	5.399.820.000,00						-	5.534.600.000,00	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	7 Dokumen	7.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	6 Dokumen	152.078.000,00						-	178.500.000,00	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	11 Dokumen	58.898.000,00						-	117.800.000,00	
			Terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	1 Tahun	4.500.000,00						-	6.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					Pegawai		30.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Pegawai		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.500.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	7.500.000,00								15.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.500.000,00								15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	16 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	24 Laporan	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.399.820.000,00					Pegawai		5.534.600.000,00	
		-						5.399.820.000,00					Pegawai		5.534.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.399.820.000,00						-	5.534.600.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.399.820.000,00							5.534.600.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	5.399.820.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	5.534.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.500.000,00					Aset		6.000.000,00	
		-						4.500.000,00					Aset		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	4.500.000,00						-	6.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.898.000,00					Pegawai		117.800.000,00	
		-						58.898.000,00					Pegawai		117.800.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	3.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	29.178.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.304.800,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.500.000,00						-	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.400.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.015.200,00						-	50.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.400.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"			1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.015.200,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	7.015.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.304.800,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.304.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.500.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.178.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	128 Laporan	29.178.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.620.000,00					Pegawai		25.500.000,00	
		-						22.620.000,00					Pegawai		25.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	13.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.620.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.620.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	7.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.078.000,00					Aset		178.500.000,00	
		-						152.078.000,00					Aset		178.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	92.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	17.578.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.500.000,00						-	3.500.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.578.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	14 Unit	17.578.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						92.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	16 Unit	92.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	18 Unit	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
138.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**95.002.500,00**							**105.000.000,00**	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	-		-	79 Nagari	95.002.500,00						-	65.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						95.002.500,00					Nagari		105.000.000,00	
		-						95.002.500,00					Nagari		105.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	-	15.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	60.002.500,00						-	25.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-		-	20 Desa	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						15.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	79 Desa	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						60.002.500,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	79 Laporan	60.002.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
139.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**39.994.000,00**							**40.000.000,00**	
			Meningkatnya efektifitas kerjasama desa	-		-	79 Nagari	39.994.000,00						-	40.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						39.994.000,00					Nagari		40.000.000,00	
		-						39.994.000,00					Nagari		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	19.994.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	79 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						19.994.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	79 Dokumen	19.994.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
140.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**283.372.000,00**							**540.000.000,00**	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	-		-	79 Nagari	208.372.000,00						-	400.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-					283.372.000,00					Nagari		540.000.000,00	
		-	-					283.372.000,00					Nagari		540.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	25.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	-	67.500.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-		15.000.000,00							25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	15.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	-	17.880.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	-	14.992.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	8.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	25.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	79 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						17.880.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	79 Dokumen	17.880.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	79 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	79 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	160 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-		-	79 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						14.992.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	79 Dokumen	14.992.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						25.000.000,00							40.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	79 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						8.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	79 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	79 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						15.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	79 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						67.500.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	70 Desa	67.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
141.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**398.715.500,00**							**715.000.000,00**	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	-		-	79 Nagari	398.715.500,00						-	715.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						398.715.500,00					Nagari		715.000.000,00	
		-						398.715.500,00					Nagari		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	305.050.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	14.995.100,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	25.100.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	14.633.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	23.939.600,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	14.997.800,00						-	45.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						14.995.100,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	79 Dokumen	14.995.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						23.939.600,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	79 Lembaga	23.939.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						14.997.800,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	79 Unit	14.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						14.633.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	79 Laporan	14.633.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						25.100.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	12 Laporan	25.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						305.050.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	93 Dokumen	305.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**9.020.000.000,00**							**9.910.317.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.020.000.000,00**							**9.910.317.100,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**693.000.000,00**							**1.009.882.100,00**	
142.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**105.000.000,00**							**122.382.100,00**	
			1. Persentase Anggaran responsif Gender (ARG). 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		-	1. 5%, 2. 71,8 %	55.000.000,00						-	67.382.100,00	
			1. Persentase Anggaran responsif Gender (ARG). 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		-	1. 5%, 2.71,8 %	25.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00							39.882.100,00	
		-						30.000.000,00					-		39.882.100,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	39.882.100,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						30.000.000,00							39.882.100,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	43 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	39.882.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	3 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	30 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
143.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**111.840.000,00**							**193.000.000,00**	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	-		-	90 %	101.840.000,00						-	108.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00							90.000.000,00	
		-						55.000.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	8 Kegiatan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0010	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Kebijakan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						36.640.000,00							58.000.000,00	
		-						36.640.000,00					-		58.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	-	3.250.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	7.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	2.325.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	4.350.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	6.615.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	7.600.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	7 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						7.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	2 Orang	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						4.350.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	8 Orang	4.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						3.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	2 Orang	3.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						6.615.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	8 Orang	6.615.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.325.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	6 Orang	2.325.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						7.600.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	3 Orang	7.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.200.000,00						-	45.000.000,00	
		-						20.200.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	3.200.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	7.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota						3.200.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	5 Laporan	3.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	10 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
144.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**55.000.000,00**							**60.000.000,00**	
			Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar	-		-	40 %	55.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00						-	60.000.000,00	
		-						55.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	3 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
145.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**26.490.300,00**							**80.000.000,00**	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-		-	60,9	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah PD/ Lembaga/ Organisasi yang memahami PHA	-		-	60,9 undefined	8.490.300,00						-	15.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						18.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						18.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	7.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	10 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	3 Kebijakan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	60 Orang	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						8.490.300,00					-		30.000.000,00	
		-						8.490.300,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-		3.490.300,00						-	15.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						3.490.300,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	60 Orang	3.490.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	10 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
146.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**394.669.700,00**							**554.500.000,00**	
			1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif , 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-		-	1. 90%, 2. 81,8 %	374.669.700,00						-	484.500.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						145.509.700,00					-		180.000.000,00	
		-						145.509.700,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	125.405.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	10.104.700,00						-	20.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						10.104.700,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	10 Dokumen	10.104.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0013	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Kebijakan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						125.405.000,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	12 Kegiatan	125.405.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"	-	-	140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		274.500.000,00	
		-						200.000.000,00					-		274.500.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	15.000.000,00					-	-	22.500.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3.300.000,00					-	-	7.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	18.750.000,00					-	-	25.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	40.000.000,00					-	-	60.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	62.435.000,00					-	-	75.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	14.740.000,00					-	-	20.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00					-	-	20.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	35.775.000,00					-	-	45.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	40 Orang	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						62.435.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	50 Orang	62.435.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						15.000.000,00							22.500.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	4 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	22.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						18.750.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	22 Orang	18.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3.300.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	3.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						35.775.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	68 Orang	35.775.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						14.740.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	14.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49.160.000,00					-		100.000.000,00	
		-						49.160.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	5.000.000,00					-	-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	4.160.000,00					-	-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	10.000.000,00					-	-	30.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	30.000.000,00					-	-	50.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	15 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	120 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						4.160.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	10 Laporan	4.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**8.327.000.000,00**							**8.900.435.000,00**	
147.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.781.615.000,00**							**6.303.800.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	5.771.615.000,00						-	6.290.000.000,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00					-		7.000.000,00	
		-						4.000.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	2.000.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.527.544.600,00					-		6.002.000.000,00	
		-						5.527.544.600,00					-		6.002.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.526.544.600,00						-	6.000.000.000,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.526.544.600,00					-		6.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	66 Orang/bulan	5.526.544.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.010.000,00					-		50.600.000,00	
		-						32.010.000,00					-		50.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	2.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	15.491.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.719.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.800.000,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.719.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.719.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.491.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	15.491.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.750.000,00					-		24.000.000,00	
		-						8.750.000,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	6.750.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.750.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	6.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.420.400,00					-		120.200.000,00	
		-						116.420.400,00					-		120.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.220.400,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	79.200.000,00						-	79.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.220.400,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	36.220.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						79.200.000,00							79.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	79.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	79.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.890.000,00					-		100.000.000,00	
		-						92.890.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	86.590.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.300.000,00						-	5.000.000,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						86.590.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	86.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.300.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	4.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
148.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**179.400.000,00**							**229.400.000,00**	
			1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR). 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19). 3. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-		-	-2,33, -12,9, - 83,4 undefined	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR). 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19). 3. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-		-	-2,33,-12,9,-83,4	144.400.000,00						-	199.400.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						159.400.000,00					-		209.400.000,00	
		-						159.400.000,00					-		209.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mas PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	-	8.600.000,00						-	48.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	77.500.000,00						-	77.500.000,00	
			Tersedianya laporan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	-		-	-	53.300.000,00						-	53.300.000,00	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						8.600.000,00							48.600.000,00	
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	13 Kegiatan	8.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	48.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	10 Perangkat Daerah	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0038	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	1 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0041	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)						53.300.000,00							53.300.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Tersedianya laporan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	-		-	5000 Anakan	53.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"			53.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						77.500.000,00							77.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	17 Kelompok	77.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	77.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	13 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	10.000.000,00							10.000.000,00	
	2.14.02.2.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.03.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	13 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
149.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**812.335.000,00**							**812.335.000,00**	
			1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(mCPR). 2. Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need). 3. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern. 4.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. 5.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan(KTD)	-		-	68,4 11 83,4 75,9 12 %	255.000.000,00						-	255.000.000,00	
			1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(mCPR). 2. Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need). 3. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern. 4.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. 5.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan(KTD)	-		-	68,4 11 83,4 75,9 12 undefined	557.335.000,00						-	557.335.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						255.000.000,00					-		255.000.000,00	
		-						255.000.000,00					-		255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	195.000.000,00						-	195.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						195.000.000,00							195.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	13 Laporan	195.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	195.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-		-	13 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						557.335.000,00					-		557.335.000,00	
		-						557.335.000,00					-		557.335.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	23.400.000,00						-	23.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	533.935.000,00						-	533.935.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						533.935.000,00							533.935.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	1409 Orang	533.935.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	533.935.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						23.400.000,00							23.400.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	26 Laporan	23.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	23.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150.	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1.553.650.000,00**							**1.554.900.000,00**	
			1. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga. 2.Indeks Lansia Berdaya. 3. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	-		-	75%. 62,8%. 86.3 %	44.050.000,00						-	45.300.000,00	
			1. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga. 2.Indeks Lansia Berdaya. 3. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	-		-	75%, 62,8%. 86,3 %	1.509.600.000,00						-	1.509.600.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						44.050.000,00					-		45.300.000,00	
		-						44.050.000,00					-		45.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	-	750.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	-	43.300.000,00						-	43.300.000,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						750.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	13 Laporan	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0036	Fasilitasi Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting GENTING oleh Tim Pengendali GENTING kabupaten/kota						43.300.000,00							43.300.000,00	
		Terlaksananya pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	13 Laporan / Dokumen	43.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	43.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.509.600.000,00					-		1.509.600.000,00	
		-						1.509.600.000,00					-		1.509.600.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	-	369.000.000,00						-	369.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	1.140.600.000,00					-	-	1.140.600.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						369.000.000,00							369.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	130 laporan	369.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	369.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.140.600.000,00							1.140.600.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	1300 Keluarga	1.140.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	1.140.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERHUBUNGAN						**15.512.450.000,00**							**30.254.379.154,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.512.450.000,00**							**30.254.379.154,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15.512.450.000,00**							**30.254.379.154,00**	
151.	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.541.540.000,00**							**16.011.218.892,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	8.541.540.000,00						-	16.011.218.892,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.815.000.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		13.868.547.846,00	
		-						7.815.000.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		13.868.547.846,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	20.547.252,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.800.000.000,00						-	13.848.000.594,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.800.000.000,00							13.848.000.594,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	170 Orang/bulan	7.800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	13.848.000.594,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.000.000,00							20.547.252,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.547.252,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						127.986.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		626.121.120,00	
		-						127.986.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		626.121.120,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	3.002.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	59.983.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	79.005.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	51.818.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.001.000,00						-	14.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	18.897.120,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.001.000,00							14.400.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	5.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							18.897.120,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.897.120,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							79.005.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	79.005.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							51.818.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	51.818.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.002.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	3.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						59.983.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	59.983.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						156.807.740,00					Pegawai Dinas Perhubungan		411.995.920,00	
		-						156.807.740,00					Pegawai Dinas Perhubungan		411.995.920,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	23.415.740,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	88.914.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	43.392.000,00						-	223.081.920,00	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							88.914.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	88.914.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						23.415.740,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	15 Unit	23.415.740,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.392.000,00							223.081.920,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	43.392.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	223.081.920,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.132.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		336.591.700,00	
		-						176.132.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		336.591.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	117.142.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	42.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.990.000,00						-	15.091.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	3.500.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						117.142.000,00							168.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	117.142.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	168.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.990.000,00							15.091.700,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	14.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.091.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						42.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.614.260,00					Pegawai Dinas Perhubungan		767.962.306,00	
		-						265.614.260,00					Pegawai Dinas Perhubungan		767.962.306,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	265.614.260,00						-	767.962.306,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						265.614.260,00							767.962.306,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	22 Unit	265.614.260,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	767.962.306,00	DINAS PERHUBUNGAN
152.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**6.970.910.000,00**							**14.243.160.262,00**	
			1. Konektifitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondidi Ideal	-		-	12 , 50% Rasio , %	6.880.910.000,00						-	13.593.160.262,00	
			1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	-		-	12 , 50% Rasio , %	20.000.000,00						-	450.000.000,00	
			-	-		-	-	70.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		90.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		90.000.000,00	
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	90.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						30.000.000,00							90.000.000,00	
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						6.505.910.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		12.535.160.262,00	
						-						6.505.910.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		12.535.160.262,00	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	12.450.000,00						-	1.711.600.000,00	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	6.493.460.000,00						-	10.823.560.262,00	
	2.15.02.2.02.0002					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						12.450.000,00							1.711.600.000,00	
						Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	3 Unit	12.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	1.711.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						6.493.460.000,00							10.823.560.262,00	
						Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	600 Unit	6.493.460.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	10.823.560.262,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						20.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		450.000.000,00	
						-						20.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		450.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	20.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0001					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						20.000.000,00							450.000.000,00	
						Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						200.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		305.000.000,00	
						-						200.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		305.000.000,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	-	150.000.000,00						-	205.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						150.000.000,00							205.000.000,00	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	3000 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						50.000.000,00							100.000.000,00	
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	9 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						120.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		633.000.000,00	
						-						120.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		633.000.000,00	
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	-	120.000.000,00						-	633.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0017					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						120.000.000,00							633.000.000,00	
						Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	633.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						25.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		30.000.000,00	
						-						25.000.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		30.000.000,00	
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						25.000.000,00							30.000.000,00	
						Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	
						-						70.000.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	70.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						70.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**7.000.000.000,00**							**7.947.021.510,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.000.000.000,00**							**7.947.021.510,00**	
	2.16					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.837.000.000,00**							**7.635.021.510,00**	
153.	**2.16.01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.898.900.000,00**							**5.344.751.510,00**	
							Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	4.898.900.000,00						-	5.344.751.510,00	
	2.16.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.696.319.035,00							4.796.319.035,00	
						-						4.696.319.035,00					-		4.796.319.035,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.696.319.035,00						-	4.796.319.035,00	
	2.16.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.696.319.035,00							4.796.319.035,00	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	59 Orang/bulan	4.696.319.035,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.796.319.035,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.080.965,00					-		217.000.000,00	
						-						37.080.965,00					-		217.000.000,00	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.500.000,00						-	4.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	130.000.000,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.180.965,00						-	60.000.000,00	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	18.000.000,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.400.000,00						-	5.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001					Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.400.000,00							5.000.000,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.180.965,00							60.000.000,00	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.180.965,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							18.000.000,00	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.500.000,00					-		4.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000,00							130.000.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.500.000,00					-		179.432.475,00	
						-						123.500.000,00					-		179.432.475,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	119.000.000,00						-	170.932.475,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00						-	2.500.000,00	
	2.16.01.2.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							2.500.000,00	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						119.000.000,00							170.932.475,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	119.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	170.932.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000,00							6.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.000.000,00					-		152.000.000,00	
						-						42.000.000,00					-		152.000.000,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	40.000.000,00						-	140.000.000,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	12.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00							140.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
154.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**115.000.000,00**							**351.000.000,00**	
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	-		-	82,9 %	115.000.000,00						-	351.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00					-		351.000.000,00	
		-						115.000.000,00					-		351.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	114.000.000,00						-	346.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						114.000.000,00							346.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	12 Laporan	114.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	346.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	70 %	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
155.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**1.823.100.000,00**							**1.939.270.000,00**	
			Indeks Pemdi	-		-	1.4 Indeks	1.823.100.000,00						-	1.939.270.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.823.100.000,00					-		1.939.270.000,00	
		-						1.823.100.000,00					-		1.939.270.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	1.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	600.000,00						-	10.270.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.811.500.000,00						-	1.900.000.000,00	
	2.16.03.2.02038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						600.000,00							10.270.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						1.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1.811.500.000,00							1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	43 Titik	1.811.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	1 Aplikasi	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**5.000.000,00**							**15.000.000,00**	
156.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**5.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-		-	2.70 Indeks	5.000.000,00					-	-	15.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	4.000.000,00					-	-	10.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	20 %	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	90 %	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**158.000.000,00**							**297.000.000,00**	
157.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**158.000.000,00**							**297.000.000,00**	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-		-	39 %	158.000.000,00						-	297.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						158.000.000,00					-		297.000.000,00	
		-						158.000.000,00					-		297.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	158.000.000,00						-	297.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						158.000.000,00							297.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	158.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	297.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**6.716.473.000,00**							**15.227.856.006,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.082.473.240,00**							**6.108.076.006,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**6.082.473.240,00**							**6.108.076.006,00**	
158.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.546.000.240,00**							**5.185.956.006,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	796.813.600,00						-	1.016.430.942,00	
			-	-		-	-	4.710.686.640,00						-	4.144.525.064,00	
			undefined	-		-	undefined undefined	2.000.000,00						-	11.645.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					ASN		20.000.000,00	
		-						5.000.000,00					ASN		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	10.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.715.686.640,00					ASN		4.154.525.064,00	
		-						4.715.686.640,00					ASN		4.154.525.064,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	10.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.703.686.640,00						-	4.124.200.064,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.703.686.640,00							4.124.200.064,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	58 Orang/bulan	4.703.686.640,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.124.200.064,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							10.325.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.325.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.000.000,00					ASN		11.645.000,00	
		-						4.000.000,00					ASN		11.645.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	6.645.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							6.645.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.645.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125.000.000,00					ASN		65.000.000,00	
		-						125.000.000,00					ASN		65.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	58 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						187.313.600,00					ASN		249.355.942,00	
		-						187.313.600,00					ASN		249.355.942,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	10.000.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	130.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	23.813.600,00						-	33.855.942,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.500.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.813.600,00							33.855.942,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	23.813.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	33.855.942,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	24 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	24.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00					ASN		54.400.000,00	
		-						55.000.000,00					ASN		54.400.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	27.000.000,00						-	54.400.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.000.000,00							54.400.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	54.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96.000.000,00					ASN		121.000.000,00	
		-						96.000.000,00					ASN		121.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.000.000,00					ASN		510.030.000,00	
		-						358.000.000,00					ASN		510.030.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	180.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	170.000.000,00						-	209.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.000.000,00						-	26.030.000,00	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						170.000.000,00							209.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	24 Unit	170.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	209.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00							26.030.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	26.030.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						180.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	275.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
159.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**50.000.000,00**							**185.000.000,00**	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	-		-	8 %	50.000.000,00						-	185.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						50.000.000,00					Koperasi		185.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Koperasi		185.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	-	50.000.000,00						-	185.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							185.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	105 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	185.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
160.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**60.000.000,00**							**70.000.000,00**	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	-		-	55 %	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					Koperasi		70.000.000,00	
		-						60.000.000,00					Koperasi		70.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	-	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	16 Unit Usaha	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
161.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**140.000.000,00**							**375.000.000,00**	
			Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	-		-	3 %	140.000.000,00						-	375.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						140.000.000,00					Pengurus Koperasi		375.000.000,00	
		-						140.000.000,00					Pengurus Koperasi		375.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	140.000.000,00						-	375.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						140.000.000,00							375.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	316 Orang	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	375.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
162.	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**256.473.000,00**							**292.120.000,00**	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	-		-	2,5 %	256.473.000,00						-	292.120.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						256.473.000,00					Pelaku Usaha		292.120.000,00	
		-						256.473.000,00					Pelaku Usaha		292.120.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	25.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	106.473.000,00						-	16.120.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	35.000.000,00						-	82.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	34.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	30.000.000,00						-	31.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	-	10.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	16.000.000,00						-	12.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						106.473.000,00							16.120.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	2 Lembaga	106.473.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	16.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						34.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	60 Orang	34.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0020	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						35.000.000,00							82.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	60 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	82.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						16.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	60 Unit Usaha	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						25.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0026	Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						10.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						30.000.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	10 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	31.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
163.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	-		-	2 %	30.000.000,00						-	0,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						30.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		-						30.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	-	5.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.17.08.2.01.0008	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	1 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0009	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**633.999.760,00**							**9.119.780.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**633.999.760,00**							**9.119.780.000,00**	
164.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**15.000.000,00**							**39.930.000,00**	
			Presentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-		-	70 %	15.000.000,00						-	39.930.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						15.000.000,00					Pelaku Usaha		39.930.000,00	
		-						15.000.000,00					Pelaku Usaha		39.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	-	15.000.000,00						-	39.930.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						15.000.000,00							39.930.000,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	39.930.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
165.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**294.000.000,00**							**8.192.500.000,00**	
			Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-		-	100 %	164.000.000,00						-	8.192.500.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						260.000.000,00					Pasar		7.927.500.000,00	
		-						260.000.000,00					Pasar		7.927.500.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	130.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	130.000.000,00						-	7.927.500.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						130.000.000,00							7.927.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	7.927.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						130.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	2 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						34.000.000,00					Pengelola Pasar		265.000.000,00	
		-						34.000.000,00					Pengelola Pasar		265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	34.000.000,00						-	265.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						34.000.000,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	1 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	265.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
166.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**135.000.000,00**							**420.150.000,00**	
			Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-		-	10,19 %	70.000.000,00						-	210.000.000,00	
			-	-		-	-	65.000.000,00						-	210.150.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						65.000.000,00					Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		210.150.000,00	
		-						65.000.000,00					Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		210.150.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	-	65.000.000,00						-	210.150.000,00	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						65.000.000,00							210.150.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	210.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Masyarakat		210.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Masyarakat		210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	70.000.000,00						-	210.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						70.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
167.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**70.000.000,00**							**101.000.000,00**	
			Nilai Ekspor Barang	-		-	14,11 %	70.000.000,00						-	101.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Pelaku Usaha		101.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Pelaku Usaha		101.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	-	70.000.000,00						-	101.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						70.000.000,00							101.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	2 Pelaku Usaha	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	101.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
168.	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**119.999.760,00**							**366.200.000,00**	
			Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-		-	12 %	119.999.760,00						-	366.200.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						119.999.760,00					Pelaku Usaha		366.200.000,00	
		-						119.999.760,00					Pelaku Usaha		366.200.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	119.999.760,00						-	366.200.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						119.999.760,00							366.200.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	200 Unit	119.999.760,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	366.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**3.610.000.000,00**							**5.590.621.488,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.610.000.000,00**							**5.590.621.488,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.610.000.000,00**							**5.590.621.488,00**	
169.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.534.254.000,00**							**4.200.094.488,00**	
			Persentase Pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	-		-	undefined undefined	3.396.754.000,00						-	3.249.404.049,00	
			Persentase Pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	-		-	100 %	116.000.000,00						-	680.690.439,00	
			Persentasi Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	8.500.000,00						-	15.000.000,00	
		-	-	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.500.000,00					-		45.000.000,00	
		-						10.500.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.367.500.000,00					-		3.123.809.561,00	
		-						3.367.500.000,00					-		3.123.809.561,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.360.000.000,00						-	3.063.809.561,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.360.000.000,00							3.063.809.561,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	29 Orang/bulan	3.360.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.063.809.561,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	15 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		-						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57.000.000,00					-		288.809.561,00	
		-						57.000.000,00					-		288.809.561,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	15.000.000,00					-	-	88.809.561,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000,00							88.809.561,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	88.809.561,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		159.500.000,00	
		-						0,00					-		159.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	89.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	70.500.000,00	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							89.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	89.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							70.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.254.000,00					-		300.594.488,00	
		-						29.254.000,00					-		300.594.488,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	22.954.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	300.000,00						-	594.488,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						300.000,00							594.488,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	594.488,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.954.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	22.954.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.000.000,00					-		232.380.878,00	
		-						70.000.000,00					-		232.380.878,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	60.000.000,00						-	162.380.878,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							162.380.878,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	20 Unit	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	162.380.878,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
170.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						56.746.000,00							509.457.000,00	
			Peraturan Daerah Penanaman Modal	-		-	2 Dokumen	51.000.000,00						-	389.457.000,00	
			Realisasi total terhadap target investasi	-		-	10 %	4.746.000,00						-	120.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						4.746.000,00					-		120.000.000,00	
		-						4.746.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-		3.746.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	-	1.000.000,00					-	-	0,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						1.000.000,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						3.746.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-	2 Dokumen	3.746.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						52.000.000,00					-		389.457.000,00	
		-						52.000.000,00					-		389.457.000,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-		-	-	1.000.000,00					-	-	39.457.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00					-	-	350.000.000,00	
	2.18.02.2.02003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						1.000.000,00							39.457.000,00	
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-		-	1 Daerah	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	39.457.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						1.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
171.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						6.000.000,00							110.570.000,00	
			Persentase Peningkatan Investor yang Berivestasi	-		-	10 %	6.000.000,00						-	110.570.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00					-		110.570.000,00	
		-						6.000.000,00					-		110.570.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00					-	-	60.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00					-	-	50.570.000,00	
	2.18.03.2.01002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							50.570.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.570.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
172.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						5.000.000,00							464.440.000,00	
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	-		-	20 %	4.000.000,00						-	364.440.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						5.000.000,00					-		464.440.000,00	
		-						5.000.000,00					-		464.440.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	1.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	1.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	3.000.000,00					-	-	264.440.000,00	
	2.18.04.2.01006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						3.000.000,00							264.440.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	1300 Pelaku Usaha	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	264.440.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						1.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	60 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	150 Kegiatan Usaha	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
173.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						8.000.000,00							306.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentasi Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	-		-	20 %	8.000.000,00							206.060.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					8.000.000,00					-	-	306.060.000,00	
		-					8.000.000,00						-	306.060.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	2.000.000,00						-	106.060.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	5.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	600 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						2.000.000,00							106.060.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	130 Kegiatan Usaha	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	106.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	20 Kegiatan Usaha	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						**6.512.000.000,00**							**9.054.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.925.885.000,00**							**7.229.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**5.925.885.000,00**							**7.229.000.000,00**	
174.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.273.269.100,00**							**6.119.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	38.963.000,00						-	30.000.000,00	
			Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	5.234.306.100,00						-	6.034.000.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38.963.000,00					-		48.000.000,00	
		-						38.963.000,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	4.989.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-		3.997.000,00							6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.999.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	7.996.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	6.985.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	4.997.000,00						-	6.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.996.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	7.996.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.999.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.999.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.997.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	3.997.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.985.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	5 Laporan	6.985.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	8.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.997.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	4.997.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						4.989.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	2 Dokumen	4.989.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.913.757.420,00					-		5.107.000.000,00	
		-						4.913.757.420,00					-		5.107.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.982.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.908.775.420,00						-	5.100.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.908.775.420,00							5.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	70 Orang/bulan	4.908.775.420,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.982.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.982.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						14.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	14.000.000,00							15.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						14.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	70 Paket	14.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						127.667.000,00					-		179.000.000,00	
		-						127.667.000,00					-		179.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.940.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	94.842.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.890.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.995.000,00						-	5.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.890.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	3.890.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	8.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.995.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.995.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.940.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	4.940.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94.842.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	94.842.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	135.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.565.040,00					-		365.000.000,00	
		-						29.565.040,00					-		365.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	9.567.040,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00					-	-	225.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.208.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.790.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	225.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.567.040,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	9.567.040,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.208.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.208.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.790.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.790.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00					-		276.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	28.000.000,00						-	34.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			34.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						21.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	240.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.316.640,00					-		129.000.000,00	
		-						99.316.640,00					-		129.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	94.986.640,00						-	123.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.330.000,00						-	6.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						94.986.640,00							123.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	26 Unit	94.986.640,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	123.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.330.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	4.330.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
175.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**260.003.100,00**							**240.000.000,00**	
			Rasio Wira Usaha Pemuda	-		-	16 %	200.002.400,00						-	150.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						210.003.100,00					-		220.000.000,00	
		-						210.003.100,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	60.000.700,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	20.001.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	70.000.700,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	60.000.700,00						-	60.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						20.001.000,00					-		20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	5 orang Orang	20.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						60.000.700,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	30 Orang	60.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota						70.000.700,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	30 Orang	70.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						60.000.700,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	30 Orang	60.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
176.	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						382.612.800,00							820.000.000,00	
			Persentase Atlet yang masuk pelatnas	-		-	17 %	332.612.800,00						-	570.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						92.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						92.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	92.000.000,00					-	-	150.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						92.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	92.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sariamak || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						165.009.200,00					-		350.000.000,00	
		-						165.009.200,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	95.004.400,00					-	-	200.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	70.004.800,00					-	-	150.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						70.004.800,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	20 Orang	70.004.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						95.004.400,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kegiatan	95.004.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						50.600.000,00					-		170.000.000,00	
		-						50.600.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	600.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Koto Tuo || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						600.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	20 Orang	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						25.003.600,00					-		50.000.000,00	
		-						25.003.600,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-		25.003.600,00							50.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						25.003.600,00							50.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	1 Dokumen	25.003.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
177.	2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						10.000.000,00							50.000.000,00	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	-		-	16 %	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						10.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						586.115.000,00							1.825.000.000,00	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						586.115.000,00							1.825.000.000,00	
178.	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						250.000.000,00							1.200.000.000,00	
			Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	-		-	44,49 %	250.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						160.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		-						160.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	160.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						160.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	160.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Harau || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						90.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						90.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	-		-	-	90.000.000,00					-	-	200.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0011	Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Taman Bumi (Geopark)						90.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	-		-	1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
179.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**81.115.000,00**							**200.000.000,00**	
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-		-	20 %	81.115.000,00						-	200.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						81.115.000,00					-		200.000.000,00	
		-						81.115.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	81.115.000,00					-	-	200.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						81.115.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	2 Kegiatan	81.115.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
180.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**10.000.000,00**							**100.000.000,00**	
			Persentase Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	-		-	10 %	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Insentif yang Diberikan	-		-	-	10.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	-		-	3 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
181.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**245.000.000,00**							**325.000.000,00**	
			Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	-		-	17 %	70.000.000,00						-	75.000.000,00	
			-	-		-	-	175.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						175.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						175.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	-	85.000.000,00					-	-	150.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						85.000.000,00							150.000.000,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	20 Orang	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-		-	20 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						70.000.000,00					-		75.000.000,00	
		-						70.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	70.000.000,00					-	-	75.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						70.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	20 Orang	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.000.000.000,00**							**5.114.536.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.000.000.000,00**							**5.114.536.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.966.721.000,00**							**5.073.536.000,00**	
182.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.748.301.000,00**							**4.057.416.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	3.740.701.000,00						-	4.044.716.000,00	
			-	-		-	-	3.000.000,00						-	3.200.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.800.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		21.851.000,00	
		-						7.800.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		21.851.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	600.000,00					-	-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	7.851.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.200.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-		500.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	4.500.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000,00							7.851.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	7.851.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.200.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					600.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.425.156.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	3.666.845.000,00		
		-					3.425.156.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	3.666.845.000,00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	4.500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	600.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.421.556.000,00						-	3.660.845.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.421.556.000,00							3.660.845.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	448 Orang/bulan	3.421.556.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	3.660.845.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					600.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	2.000.000,00		
		-					2.000.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	2.000.000,00		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.000.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	1.200.000,00		
		-					1.000.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	1.200.000,00		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.200.000,00	
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.000.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.457.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	47.200.000,00		
		-					29.457.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	47.200.000,00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.800.000,00						-	2.400.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	14.200.000,00						-	25.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.357.000,00						-	12.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.600.000,00						-	4.800.000,00	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.357.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.357.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.600.000,00							4.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	4.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.200.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	14.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.800.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.828.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
		-						16.828.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	16.828.000,00						-	30.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.828.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	16.828.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.350.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		259.380.000,00	
		-						240.350.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		259.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	77.850.000,00					-	-	78.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	162.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.850.000,00							78.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	77.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	78.380.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						162.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	162.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.710.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		28.940.000,00	
		-						25.710.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		28.940.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	22.780.000,00						-	24.340.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.930.000,00						-	4.600.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.780.000,00							24.340.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	22.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-			24.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.930.000,00							4.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	2.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
183.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**211.120.000,00**							**951.120.000,00**	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-		-	80,75	210.120.000,00						-	951.120.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						105.309.000,00					Perpustakaan di Kab. Lima Puluh Kota		419.309.000,00	
		-						105.309.000,00					Perpustakaan di Kab. Lima Puluh Kota		419.309.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	45.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	-	18.265.000,00						-	168.265.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	11.650.000,00						-	79.650.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	16.394.000,00						-	106.394.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						11.650.000,00							79.650.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	26 Perpustakaan	11.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	79.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16.394.000,00							106.394.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	13 Perpustakaan	16.394.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	106.394.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						12.000.000,00							15.000.000,00	
							Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	1 Perpustakaan	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00							0,00	
							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017						Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						1.000.000,00							0,00	
							Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						45.000.000,00							50.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	360 Eksemplar	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019						Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						18.265.000,00							168.265.000,00	
							Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	5 Eksemplar	18.265.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	168.265.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02						Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						105.811.000,00						Masyarakat Kab. Lima Puluh Kota	531.811.000,00	
							-						105.811.000,00						Masyarakat Kab. Lima Puluh Kota	531.811.000,00	
								Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	64.000.000,00						-	80.000.000,00	
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	31.561.000,00						-	231.561.000,00	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	-	10.250.000,00						-	220.250.000,00	
	2.23.02.2.02.0007						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						64.000.000,00							80.000.000,00	
							Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	13 Perpustakaan	64.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						10.250.000,00							220.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	600 Orang	10.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	220.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						31.561.000,00							231.561.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	60 Lokus	31.561.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	231.561.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
184.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**7.300.000,00**							**65.000.000,00**	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki	-		-	100 %	7.300.000,00						-	65.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						7.300.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		65.000.000,00	
		-						7.300.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		65.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	3.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	4.300.000,00						-	50.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						3.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	3 Orang	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						4.300.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	2 Eksemplar	4.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**33.279.000,00**							**41.000.000,00**	
185.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**20.733.000,00**							**23.000.000,00**	
			Tingkat Ketersediaan Arsip	-		-	55,91 %	20.733.000,00						-	21.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						6.500.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		7.000.000,00	
		-						6.500.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	4800 Berkas	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	43 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-		-	16 Lembaga	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						10.233.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		12.000.000,00	
		-						10.233.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		12.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	-	10.233.000,00					-	-	12.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						10.233.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	200 Arsip	10.233.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						4.000.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	4.000.000,00					-	-	4.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	43 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
186.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**12.546.000,00**							**18.000.000,00**	
			Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-		-	23,97 %	12.546.000,00							18.000.000,00	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						12.546.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		18.000.000,00	
		-						12.546.000,00					OPD/ Nagari di Kab. Lima Puluh Kota		18.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	-	12.546.000,00					-	-	18.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						12.546.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	18 Arsip	12.546.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						**6.414.500.000,00**							**6.272.112.499,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.414.500.000,00**							**6.272.112.499,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**6.414.500.000,00**							**6.272.112.499,00**	
187.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.155.000.000,00**							**4.575.529.361,00**	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	21.206.480,00						-	40.000.000,00	
				-		-	-	5.133.043.520,00					-	-	4.535.529.361,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.206.480,00					-		40.000.000,00	
		-						21.206.480,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	21.206.480,00						-	40.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						21.206.480,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	21.206.480,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.751.793.520,00					-		3.879.275.193,00	
		-						4.751.793.520,00					-		3.879.275.193,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.751.793.520,00						-	3.879.275.193,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.751.793.520,00							3.879.275.193,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	51 Orang/bulan	4.751.793.520,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.879.275.193,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.050.000,00					-		130.799.368,00	
		-						56.050.000,00					-		130.799.368,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.100.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.100.000,00						-	12.375.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	36.000.000,00						-	50.922.368,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	7.502.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	750.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	600.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						600.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.500.000,00							7.502.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.502.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						750.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.100.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.100.000,00							12.375.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.375.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						36.000.000,00							50.922.368,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.922.368,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195.350.000,00					-		159.860.000,00	
		-						195.350.000,00					-		159.860.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	41.000.000,00						-	48.860.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	153.600.000,00						-	109.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	750.000,00						-	2.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.000.000,00							48.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	41.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.860.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						153.600.000,00							109.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	153.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	109.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.600.000,00					-		365.594.800,00	
		-						130.600.000,00					-		365.594.800,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	118.600.000,00						-	282.594.800,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	8.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						118.600.000,00							282.594.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	49 Unit	118.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	282.594.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	39 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
188.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**384.000.000,00**							**207.000.000,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		-	4412,94 Ton	384.000.000,00						-	207.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						384.000.000,00					KUB dan Pokmaswas		207.000.000,00	
		-						384.000.000,00					KUB dan Pokmaswas		207.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	384.000.000,00						-	207.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						384.000.000,00							207.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	50 Orang	384.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	207.000.000,00	DINAS PERIKANAN
189.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**755.500.000,00**							**1.025.170.638,00**	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-		-	41990,67 Ton	655.500.000,00						-	379.657.274,00	
				-		-		100.000.000,00						-	645.513.364,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						655.500.000,00					Pelaku Usaha Perikanan		379.657.274,00	
		-						655.500.000,00					Pelaku Usaha Perikanan		379.657.274,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	-	435.000.000,00						-	239.456.360,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-		220.500.000,00							140.200.914,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						435.000.000,00							239.456.360,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	95 Kelompok	435.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	239.456.360,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						220.500.000,00							140.200.914,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-		-	547 Kelompok	220.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	140.200.914,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						100.000.000,00					-		645.513.364,00	
		-						100.000.000,00					-		645.513.364,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	645.513.364,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							645.513.364,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	645.513.364,00	DINAS PERIKANAN
190.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**20.000.000,00**							**52.020.000,00**	
			Luas Kawasan Konservasi	-		-	4220,45 Ha	10.000.000,00						-	26.010.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Pelaku Usaha Perikanan		52.020.000,00	
		-						20.000.000,00					Pelaku Usaha Perikanan		52.020.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	10.000.000,00						-	26.010.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	10.000.000,00						-	26.010.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						10.000.000,00							26.010.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.010.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						10.000.000,00							26.010.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	6 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.010.000,00	DINAS PERIKANAN
191.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**100.000.000,00**							**412.392.500,00**	
			Jumlah produksi hasil olahan perikanan	-		-	405 Ton	100.000.000,00						-	412.392.500,00	
			Konsumsi Ikan Masyarakat	-		-	22,60 kg/kapita/tahun	100.000.000,00						-	412.392.500,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						100.000.000,00					-		412.392.500,00	
		-						100.000.000,00					-		412.392.500,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	100.000.000,00						-	412.392.500,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						100.000.000,00							412.392.500,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	412.392.500,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						**15.165.000.000,00**							**18.624.038.176,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.165.000.000,00**							**18.624.038.176,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**15.165.000.000,00**							**18.624.038.176,00**	
192.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.420.460.176,00**							**9.187.429.575,00**	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	9.402.460.176,00						-	9.143.429.575,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						162.500.000,00					Aparatur Dinas		183.500.000,00	
		-						162.500.000,00					Aparatur Dinas		183.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	37.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	75.000.000,00						-	85.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	6.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	13 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	37.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	85.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.503.467.676,00					Aparatur Dinas		6.588.813.075,00	
		-						6.503.467.676,00					Aparatur Dinas		6.588.813.075,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.479.467.676,00						-	6.559.813.075,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.479.467.676,00							6.559.813.075,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	84 Orang/bulan	6.479.467.676,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	6.559.813.075,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	3.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	8.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	3.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.000.000,00					Aparatur Dinas		8.000.000,00	
		-						8.000.000,00					Aparatur Dinas		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	6.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.212.500,00					Aparatur Dinas		2.212.500,00	
		-						2.212.500,00					Aparatur Dinas		2.212.500,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	2.212.500,00						-	2.212.500,00	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						2.212.500,00							2.212.500,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	1 Dokumen	2.212.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	2.212.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.002.000,00					Aparatur Dinas		25.002.000,00	
		-						25.002.000,00					Aparatur Dinas		25.002.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	14.950.000,00						-	14.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	10.052.000,00						-	10.052.000,00	
	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						14.950.000,00							14.950.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	14.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	14.950.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.052.000,00							10.052.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	165 Dokumen	10.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	10.052.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						524.078.000,00					Aparatur Dinas		549.078.000,00	
		-						524.078.000,00					Aparatur Dinas		549.078.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	125.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	240.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.078.000,00						-	12.078.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.078.000,00							12.078.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.078.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	12.078.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						240.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	240.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	240.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.117.200.000,00					Aparatur Dinas		331.300.000,00	
		-						1.117.200.000,00					Aparatur Dinas		331.300.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	450.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	317.200.000,00						-	191.300.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	350.000.000,00						-	140.000.000,00	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						317.200.000,00							191.300.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	317.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	191.300.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						450.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						350.000.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	140.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						583.000.000,00					Aparatur Dinas		668.524.000,00	
		-						583.000.000,00					Aparatur Dinas		668.524.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	146.000.000,00						-	146.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	432.000.000,00						-	517.524.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						146.000.000,00							146.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	19 Laporan	146.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	146.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						432.000.000,00							517.524.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	43 Laporan	432.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	517.524.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						495.000.000,00					Aparatur Dinas		831.000.000,00	
		-						495.000.000,00					Aparatur Dinas		831.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	150.000.000,00					-	-	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	245.000.000,00						-	346.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	100.000.000,00						-	135.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						245.000.000,00							346.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	154 Unit	245.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	346.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	101 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	135.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	19 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
193.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.390.539.824,00**							**2.451.902.601,00**	
			1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, 2.Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, 3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-		-	2; 2; 2 % % %	950.539.824,00						-	2.001.902.601,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.265.539.824,00					kelompok tani		2.151.902.601,00	
		-						1.265.539.824,00					kelompok tani		2.151.902.601,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	-	440.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	-		-	-	440.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	136.500.000,00						-	380.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-		80.000.000,00						-	371.902.601,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	169.039.824,00						-	500.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						169.039.824,00							500.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	1 Laporan	169.039.824,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						80.000.000,00							371.902.601,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	371.902.601,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						136.500.000,00							380.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	10,5 Ton	136.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	380.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						440.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	80000 Batang	440.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji						440.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	-		-	10000 Gram	440.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						125.000.000,00					Kelompok Tani dan Penangkar		300.000.000,00	
		-						125.000.000,00					Kelompok Tani dan Penangkar		300.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	40.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-		-	-	85.000.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						40.000.000,00							300.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						85.000.000,00							0,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-		-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
194.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**3.100.000.000,00**							**4.850.000.000,00**	
			1. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B; 2. Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian yang berkualitas	-		-	17585; 1,2 Ha; %	3.100.000.000,00						-	4.500.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						1.180.000.000,00					Kelompok Tani		900.000.000,00	
		-						1.180.000.000,00					Kelompok Tani		900.000.000,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	-	750.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	80.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						750.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						1.920.000.000,00					Kelompok Tani		3.950.000.000,00	
		-						1.920.000.000,00					Kelompok Tani		3.950.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	550.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	160.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	260.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	700.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						260.000.000,00							650.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	2 Unit	260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						550.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	6 Unit	550.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	1.400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						160.000.000,00							350.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	2 Unit	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						700.000.000,00							750.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	2 Unit	700.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						250.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	3 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
195.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**445.000.000,00**							**615.000.000,00**	
			1. Persentase penanganan bencana pertanian; 2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	-		-	96; 96 %; %	445.000.000,00						-	615.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						445.000.000,00					Kelompok Tani		615.000.000,00	
		-						445.000.000,00					Kelompok Tani		615.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	-	165.000.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	240.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-		-	-	40.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						240.000.000,00							400.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	20 Ha	240.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"			400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						165.000.000,00							135.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	13 Ha	165.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	135.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
196.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**21.000.000,00**							**35.000.000,00**	
			Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	-		-	100 %	21.000.000,00						-	35.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						21.000.000,00					Kelompok usaha pertanian/pengusaha pertanian		35.000.000,00	
		-						21.000.000,00					Kelompok usaha pertanian/pengusaha pertanian		35.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	-	6.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						6.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"			20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
197.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**788.000.000,00**							**1.484.706.000,00**	
			1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan; 2. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	-		-	2; 3 %; %	788.000.000,00						-	1.484.706.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						788.000.000,00					Kelompok Tani		1.484.706.000,00	
		-						788.000.000,00					Kelompok Tani		1.484.706.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	565.000.000,00						-	584.706.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	158.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	65.000.000,00						-	600.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						565.000.000,00							584.706.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	13 Unit	565.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	584.706.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						158.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	60 Unit	158.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						65.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	13 Unit	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**12.268.150.000,00**							**11.538.700.000,00**	
198.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.215.000.000,00**							**9.921.700.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	10.215.000.000,00							9.921.700.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.100,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.100,00					-	-	32.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.100,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	30.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	32.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
		-						9.342.564.755,00					-		8.990.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.342.564.755,00						-	8.990.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.342.564.755,00							8.990.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	94 Orang/bulan	9.342.564.755,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	8.990.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
		-						204.782.044,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	6.680.744,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	90.000.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.633.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.468.300,00						-	33.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						77.633.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	77.633.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.468.300,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.468.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.680.744,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	6.680.744,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	95.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.800.001,00					-		0,00	
		-						32.800.001,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	32.800.001,00						-	0,00	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32.800.001,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	32.800.001,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.762.100,00					-		82.200.000,00	
		-						80.762.100,00					-		82.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.902.100,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.200.000,00						-	43.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	660.000,00						-	1.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						660.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	1.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.902.100,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	36.902.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	38.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							43.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	43.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	43.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
		-						524.091.000,00					-		602.500.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	314.591.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	184.500.000,00						-	200.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						184.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	74 Unit	184.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	27.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						314.591.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	314.591.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	375.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
199.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.167.000.000,00**							**628.000.000,00**	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-		-	7 %	1.117.000.000,00						-	576.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						110.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0,00	
		-						110.000.000,00					Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pertanian		0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						110.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
		-						982.000.000,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	682.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						682.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	55 Ekor	682.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		-	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	5000 Dosis	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
200.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**30.000.000,00**							**32.000.000,00**	
			Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	-		-	2 %	30.000.000,00						-	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	-	30.000.000,00						-	32.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						30.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	32.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						0,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
201.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**656.150.000,00**							**729.000.000,00**	
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	-		-	2 %	406.150.000,00						-	431.000.000,00	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-		-	2 %	225.000.000,00						-	246.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00					-		246.000.000,00	
		-						225.000.000,00					-		246.000.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-		-	20 Kasus	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000,00							165.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	165.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
	-	-						25.000.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-		-	12 laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
	-	-						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
	-	-						56.150.000,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	-	31.150.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						31.150.000,00							26.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	12 Laporan	31.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	10 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
202.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**75.000.000,00**							**78.000.000,00**	
			Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-		-	2 %	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		78.000.000,00	
	-	-						75.000.000,00					-		78.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	15 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
203.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**125.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	-		-	2 %	125.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						125.000.000,00					-	-	150.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	125.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	13 Unit	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**29.404.625.905,00**							**53.532.234.695,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**29.404.625.905,00**							**53.532.234.695,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**29.404.625.905,00**							**53.532.234.695,00**	
204.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.509.625.305,00**							**42.188.400.000,00**	
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	25.423.625.305,00						-	38.588.400.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					-	-	1.594.694.669,00	
		-						20.000.000,00					-		1.594.694.669,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	740.166.633,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	854.528.036,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							854.528.036,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	854.528.036,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							740.166.633,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	6 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	740.166.633,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.791.602.027,00					-		15.348.400.505,00	
		-						17.791.602.027,00					-		15.348.400.505,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	20.000.050,00						-	252.112.100,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.843.900,00						-	87.250.554,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	17.756.758.077,00						-	14.859.037.851,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.756.758.077,00							14.859.037.851,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	233 Orang/bulan	17.756.758.077,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	14.859.037.851,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.000.050,00							252.112.100,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	78 Dokumen	20.000.050,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	252.112.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.843.900,00							87.250.554,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.843.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	87.250.554,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.965.000,00					-		55.000.000,00	
		-						1.965.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.965.000,00						-	55.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.965.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	1.965.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						654.081.900,00					-		3.162.601.800,00	
		-						654.081.900,00					-		3.162.601.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-		0,00							75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	150.082.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.999.900,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	327.601.800,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00					-		327.601.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	327.601.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.999.900,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.999.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.082.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	150.082.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	10 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						750.625.905,00					-		4.274.484.580,00	
		-						750.625.905,00					-		4.274.484.580,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	744.625.905,00						-	3.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	664.484.580,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	14 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						744.625.905,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	744.625.905,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							664.484.580,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	30 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	664.484.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.318.120.000,00					-		5.473.717.350,00	
		-						2.318.120.000,00					-		5.473.717.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	700.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.616.120.000,00						-	3.848.717.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	275.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						700.000.000,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.616.120.000,00							3.848.717.350,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.616.120.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	3.848.717.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.007.000.000,00					-		6.228.794.140,00	
		-						1.007.000.000,00					-		6.228.794.140,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	750.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	250.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	67.926.735,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	375.867.405,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						750.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	176 Unit	750.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							67.926.735,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	67.926.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00					-		375.867.405,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	375.867.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-		-	5 Ha	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						939.676.473,00					-		926.052.436,00	
		-						939.676.473,00					-		926.052.436,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	711.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	176.673.573,00						-	176.052.436,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	50.002.900,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	250.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						176.673.573,00							176.052.436,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	176.673.573,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	176.052.436,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.002.900,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	50.002.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						711.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	711.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						926.554.000,00					-		2.559.037.800,00	
		-						926.554.000,00					-		2.559.037.800,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	318.840.000,00					-	-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	327.714.000,00						-	909.037.800,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	280.000.000,00						-	650.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						318.840.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	318.840.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						280.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	280.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						327.714.000,00							909.037.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	327.714.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	909.037.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						50.000.000,00					-		365.616.720,00	
		-						50.000.000,00					-		365.616.720,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	57.788.400,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	10.000.000,00						-	93.232.800,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	10.000.000,00						-	69.149.280,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	10.000.000,00						-	79.812.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	10.000.000,00						-	65.634.240,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						10.000.000,00							69.149.280,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	4 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	69.149.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						10.000.000,00							65.634.240,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	65.634.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						10.000.000,00							79.812.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	79.812.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						10.000.000,00							93.232.800,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	93.232.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						10.000.000,00							57.788.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	57.788.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.050.000.000,00					-		2.200.000.000,00	
		-						1.050.000.000,00					-		2.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	1.050.000.000,00						-	1.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.050.000.000,00							1.750.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	360 Laporan	1.050.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	360 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	360 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
205.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.745.000.600,00**							**10.486.314.695,00**	
			Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-		-	100 %	3.745.000.600,00						-	10.486.314.695,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						33.060.000,00					-		203.667.144,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						33.060.000,00							203.667.144,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	21.370.000,00						-	106.141.920,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	5.120.000,00						-	42.234.206,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	6.570.000,00						-	55.291.018,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						5.120.000,00							42.234.206,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	2 Dokumen	5.120.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	42.234.206,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						6.570.000,00							55.291.018,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	2 Dokumen	6.570.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	55.291.018,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						21.370.000,00							106.141.920,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	6 Dokumen	21.370.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	106.141.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.610.000.000,00							9.822.014.203,00	
		-						3.610.000.000,00							9.822.014.203,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	3.609.000.000,00						-	9.722.014.203,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						3.609.000.000,00							9.722.014.203,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	12 Dokumen	3.609.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	9.722.014.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	13 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						50.000.600,00							306.306.245,00	
		-						50.000.600,00							306.306.245,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	20.000.000,00						-	168.328.397,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	20.000.600,00						-	123.712.924,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	10.000.000,00						-	14.264.924,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						20.000.600,00							123.712.924,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	50 Dokumen	20.000.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	123.712.924,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						20.000.000,00							168.328.397,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	1 Kasus	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	168.328.397,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						10.000.000,00							14.264.924,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	50 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.264.924,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						51.940.000,00							154.327.103,00	
		-						51.940.000,00							154.327.103,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	47.145.500,00						-	104.040.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	-	4.794.500,00						-	50.287.103,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						47.145.500,00							104.040.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	16 Dokumen	47.145.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	104.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						4.794.500,00							50.287.103,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	12 Laporan	4.794.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.287.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
206.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**150.000.000,00**							**857.520.000,00**	
			Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	-		-	100 %	85.000.000,00						-	857.520.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						30.000.000,00							196.358.597,00	
		-						30.000.000,00							196.358.597,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	10.000.000,00						-	37.037.914,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	10.000.000,00						-	57.305.336,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	10.000.000,00						-	102.015.347,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						10.000.000,00							37.037.914,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	37.037.914,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						10.000.000,00							102.015.347,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	102.015.347,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						10.000.000,00							57.305.336,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	57.305.336,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						50.000.000,00					-		229.403.518,00	
		-						50.000.000,00					-		229.403.518,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-		15.000.000,00							63.568.440,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	15.000.100,00						-	85.853.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	19.999.900,00						-	79.981.478,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						15.000.000,00							63.568.440,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	63.568.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						19.999.900,00							79.981.478,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	1 Laporan	19.999.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	79.981.478,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						15.000.100,00							85.853.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	1 Laporan	15.000.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	85.853.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00					-		260.766.480,00	
		-						50.000.000,00					-		260.766.480,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara	-		-	-	10.000.000,00						-	66.136.147,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	20.000.000,00						-	76.753.013,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	20.000.000,00						-	117.877.320,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						20.000.000,00							76.753.013,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	76.753.013,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						10.000.000,00							66.136.147,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	66.136.147,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						20.000.000,00							117.877.320,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	50 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	117.877.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						20.000.000,00					-		170.991.405,00	
		-						20.000.000,00					-		170.991.405,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	-	5.000.000,00						-	37.406.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	-	5.000.000,00						-	44.380.343,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	-	10.000.000,00						-	89.204.937,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						10.000.000,00							89.204.937,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	89.204.937,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						5.000.000,00							44.380.343,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	44.380.343,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						5.000.000,00							37.406.125,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		-	37.406.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**28.000.000.000,00**							**61.221.773.815,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.000.000.000,00**							**61.221.773.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						28.000.000.000,00							61.221.773.815,00	
207.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.702.050.300,00							41.221.773.815,00	
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	3.850.491.003,00						-	4.845.657.679,00	
			Persentase pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
				-		-	-	18.788.139.297,00						-	36.120.912.136,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.144.000,00					Sekretariat DPRD		198.492.000,00	
		-						39.144.000,00					Sekretariat DPRD		198.492.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.867.267.003,00					Sekretariat DPRD		4.902.369.679,00	
		-						3.867.267.003,00					Sekretariat DPRD		4.902.369.679,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	1.000.000,00						-	941.950.256,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	43.168.100,00						-	95.216.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	37.808.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.592.000,00						-	28.356.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.800.730.903,00						-	3.742.327.423,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.800.730.903,00							3.742.327.423,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	840 Orang/bulan	3.800.730.903,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.742.327.423,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.000.000,00							941.950.256,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	941.950.256,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						43.168.100,00							95.216.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	4800 Dokumen	43.168.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.592.000,00							37.808.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	37.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	3 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	13 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.592.000,00							28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						101.680.000,00					Sekretariat DPRD		1.098.244.000,00	
		-						101.680.000,00					Sekretariat DPRD		1.098.244.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	360.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	75.680.000,00							280.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	25.000.000,00						-	458.244.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						75.680.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	75.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							458.244.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	8 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	458.244.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	18 Orang	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						740.892.000,00					Sekretariat DPRD		7.076.905.000,00	
		-						740.892.000,00					Sekretariat DPRD		7.076.905.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	332.592.000,00						-	581.679.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	134.000.000,00						-	672.093.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	72.300.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	201.000.000,00						-	4.588.133.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						201.000.000,00								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	201.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.588.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						72.300.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	72.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							535.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	300 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	535.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						332.592.000,00							581.679.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	332.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	581.679.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						134.000.000,00							672.093.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	134.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	672.093.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.400.000,00					Sekretariat DPRD		1.096.100.000,00	
		-						74.400.000,00					Sekretariat DPRD		1.096.100.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	74.400.000,00						-	1.096.100.000,00	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						74.400.000,00							1.096.100.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	74.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			1.096.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						776.900.000,00					Sekretariat DPRD		1.808.000.000,00	
		-						776.900.000,00					Sekretariat DPRD		1.808.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	205.000.000,00						-	384.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	566.400.000,00						-	1.224.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.500.000,00						-	200.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.500.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						205.000.000,00							384.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	205.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						566.400.000,00							1.224.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	566.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.224.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.673.244.737,00					Sekretariat DPRD		8.727.497.300,00	
		-						1.673.244.737,00					Sekretariat DPRD		8.727.497.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.082.404.737,00						-	5.917.590.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	112.320.000,00						-	646.926.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	433.120.000,00						-	1.215.051.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	45.400.000,00						-	947.930.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						433.120.000,00							1.215.051.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	433.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.215.051.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						112.320.000,00							646.926.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	112.320.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	646.926.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.082.404.737,00							5.917.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	1.082.404.737,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.917.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.400.000,00							947.930.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	45.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	947.930.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						15.186.722.560,00					Sekretariat DPRD		15.249.792.560,00	
		-						15.186.722.560,00					Sekretariat DPRD		15.249.792.560,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	14.827.292.560,00						-	14.827.292.560,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	52.500.000,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	306.930.000,00						-	370.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						14.827.292.560,00							14.827.292.560,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	490 Orang/Bulan	14.827.292.560,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.827.292.560,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						306.930.000,00							370.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	5 Paket	306.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	370.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						52.500.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	35 Orang	52.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						241.800.000,00					Sekretariat DPRD		1.064.373.276,00	
		-						241.800.000,00					Sekretariat DPRD		1.064.373.276,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	-	1.000.000,00						-	141.026.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	-	5.500.000,00						-	108.099.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	-	210.000.000,00						-	515.462.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	-	25.300.000,00						-	299.786.276,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						1.000.000,00							141.026.000,00	
		Terlaksananya Penyelengaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	141.026.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						5.500.000,00							108.099.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	108.099.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						210.000.000,00							515.462.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	515.462.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						25.300.000,00							299.786.276,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	2 Paket	25.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	299.786.276,00	SEKRETARIAT DPRD
208.	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**5.297.949.700,00**							**20.000.000.000,00**	
			Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	-		-	100 %	5.250.849.700,00						-	19.917.500.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.264.300.000,00					Sekretariat DPRD		4.003.993.300,00	
		-						1.264.300.000,00					Sekretariat DPRD		4.003.993.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	1.187.000.000,00						-	3.785.745.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	3.999.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	63.100.000,00						-	63.921.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	105.517.500,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	-	12.200.000,00						-	44.810.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.000.000,00							3.999.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.999.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.187.000.000,00							3.785.745.800,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	9 Dokumen	1.187.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.785.745.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						1.000.000,00							105.517.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	105.517.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						63.100.000,00							63.921.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	3 Dokumen	63.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	63.921.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						12.200.000,00							44.810.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	44.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						76.300.000,00					Sekretariat DPRD		162.835.000,00	
		-						76.300.000,00					Sekretariat DPRD		162.835.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	11.200.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	11.200.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	11.200.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	-	10.500.000,00						-	19.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	21.000.000,00						-	33.335.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	11.200.000,00						-	27.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						11.200.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						11.200.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pembahasan APBD						11.200.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Pembahasan APBD Perubahan						11.200.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						10.500.000,00							19.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	19.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						21.000.000,00							33.335.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	33.335.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						10.500.000,00					Sekretariat DPRD		77.694.900,00	
		-						10.500.000,00					Sekretariat DPRD		77.694.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	500.000,00						-	6.573.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	-	2.000.000,00						-	4.623.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	500.000,00						-	3.667.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	2.000.000,00						-	46.443.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	-	2.000.000,00						-	4.176.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	-	700.000,00						-	3.837.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	500.000,00						-	4.569.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	2.300.000,00						-	3.806.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						2.000.000,00							46.443.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	46.443.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						500.000,00							3.667.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	3 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.667.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						500.000,00							4.569.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	3 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.569.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						2.000.000,00							4.176.900,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.176.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						700.000,00							3.837.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	3 Laporan	700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.837.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						2.000.000,00							4.623.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-		-	3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.623.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						500.000,00							6.573.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	3 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.573.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						2.300.000,00							3.806.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.806.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						740.849.700,00					Sekretariat DPRD		1.565.709.200,00	
		-						740.849.700,00					Sekretariat DPRD		1.565.709.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	207.049.700,00						-	743.939.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	-	9.500.000,00						-	17.717.400,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	302.000.000,00						-	436.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	1.000.000,00						-	4.998.600,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	-	500.000,00						-	132.353.500,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	-	220.800.000,00						-	229.750.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						207.049.700,00							743.939.700,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	12 Dokumen	207.049.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	743.939.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						500.000,00							132.353.500,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	2 Orang	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	132.353.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						220.800.000,00							229.750.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	96 Orang	220.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	229.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						9.500.000,00							17.717.400,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	3 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	17.717.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						1.000.000,00							4.998.600,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			4.998.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						302.000.000,00							436.950.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	3 Dokumen	302.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	436.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						743.000.000,00					Sekretariat DPRD		1.191.551.000,00	
		-						743.000.000,00					Sekretariat DPRD		1.191.551.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	735.000.000,00						-	1.088.381.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	7.000.000,00						-	43.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	1.000.000,00						-	59.920.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						1.000.000,00							59.920.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	59.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						7.000.000,00							43.250.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			43.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						735.000.000,00							1.088.381.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	3 Dokumen	735.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.088.381.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						2.000.000,00					Sekretariat DPRD		11.371.900,00	
		-						2.000.000,00					Sekretariat DPRD		11.371.900,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	-	1.000.000,00							4.996.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	1.000.000,00							6.375.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD					1.000.000,00							4.996.900,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.996.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						1.000.000,00							6.375.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						2.000.000,00					Sekretariat DPRD		29.840.000,00	
		-						2.000.000,00					Sekretariat DPRD		29.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-		-	-	1.000.000,00						-	11.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	18.140.000,00	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah						1.000.000,00							18.140.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						1.000.000,00							11.700.000,00	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	11.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.459.000.000,00					Sekretariat DPRD		12.957.004.700,00	
		-						2.459.000.000,00					Sekretariat DPRD		12.957.004.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	8.000.000,00						-	10.030.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	-	650.000.000,00						-	968.148.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	1.800.000.000,00						-	11.973.995.800,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	1.000.000,00						-	4.830.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.800.000.000,00							11.973.995.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	12 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	11.973.995.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						1.000.000,00							4.830.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						8.000.000,00							10.030.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.030.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						650.000.000,00							968.148.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-		-	12 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	968.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**6.168.053.813,00**							**8.835.461.054,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.168.053.813,00**							**8.835.461.054,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.140.953.813,00**							**8.307.461.054,00**	
209.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.680.621.713,00**							**6.449.155.774,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	4.669.369.713,00						-	4.162.408.367,00	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	28.793.000,00						-	121.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	973.720.000,00						-	1.806.747.407,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.189.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		181.000.000,00	
		-						35.189.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		181.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.343.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.343.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.397.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.710.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.343.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	22.343.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.710.000,00						-	15.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.343.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	2.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.343.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.710.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.343.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.397.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.397.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						22.343.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	22.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.710.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.671.712.713,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		4.186.408.367,00	
		-						4.671.712.713,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		4.186.408.367,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	5.130.000,00						-	15.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.710.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.343.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.343.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.660.186.713,00						-	4.135.033.367,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.660.186.713,00							4.135.033.367,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	4.660.186.713,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.135.033.367,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.130.000,00							15.375.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	5.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.343.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.343.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	2.343.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.710.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.710.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		15.000.000,00	
		-						1.710.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.710.000,00						-	15.000.000,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.710.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		382.500.000,00	
		-						80.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		382.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	15.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	65.000.000,00						-	322.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						65.000.000,00							322.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	322.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.095.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		520.729.407,00	
		-						196.095.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		520.729.407,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	15.729.865,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	8.851.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	149.998.000,00						-	183.599.084,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.412.800,00						-	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.103.200,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.857.000,00						-	14.400.458,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.874.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.999.000,00						-	20.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.857.000,00							14.400.458,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	8.857.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.400.458,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.874.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.874.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.999.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.412.800,00							96.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	6.412.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	96.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.103.200,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.103.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.851.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.851.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						149.998.000,00							183.599.084,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	149.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	183.599.084,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							15.729.865,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.729.865,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						113.697.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		273.518.000,00	
		-						113.697.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		273.518.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	2.408.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	12.210.000,00						-	73.518.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	99.079.000,00						-	100.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.210.000,00							73.518.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	12.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	73.518.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.408.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	2.408.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						99.079.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	99.079.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.947.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		455.000.000,00	
		-						227.947.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		455.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	83.947.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	144.000.000,00						-	360.000.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						83.947.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	83.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						144.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	144.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						354.271.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		435.000.000,00	
		-						354.271.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		435.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	99.341.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	238.730.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	16.200.000,00						-	65.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						238.730.000,00							270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	17 Unit	238.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	270.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.200.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	16.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						99.341.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	99.341.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
210.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**203.343.785,00**							**563.305.280,00**	
			1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	-		-	100% 100%	203.343.785,00						-	563.305.280,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						126.677.298,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		360.986.710,00	
		-						126.677.298,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		360.986.710,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	-	28.461.267,00						-	44.611.490,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	32.143.783,00						-	48.475.020,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	53.876.486,00						-	249.000.000,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-		-	-	12.195.762,00						-	18.900.200,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						28.461.267,00							44.611.490,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	1 Berita Acara	28.461.267,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	44.611.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						32.143.783,00							48.475.020,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	32.143.783,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	48.475.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						12.195.762,00							18.900.200,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-		-	2370 Usulan	12.195.762,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.900.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						53.876.486,00							249.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	1 Dokumen	53.876.486,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	249.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						26.666.487,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		123.500.000,00	
		-						26.666.487,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		123.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	-	10.904.110,00						-	50.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	-	15.762.377,00						-	73.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						10.904.110,00							50.500.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	1 Dokumen	10.904.110,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						15.762.377,00							73.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	76 Orang	15.762.377,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	73.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						50.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		78.818.570,00	
		-						50.000.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		78.818.570,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	15.000.000,00						-	28.818.570,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					15.000.000,00							28.818.570,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.818.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
211.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**256.988.315,00**							**1.295.000.000,00**	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	-		-	100 %	246.888.315,00						-	1.040.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					88.375.020,00						Kabupaten Lima Puluh Kota	605.000.000,00	
		-					88.375.020,00						Kabupaten Lima Puluh Kota	605.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	15.000.000,00						-	115.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	19.000.000,00						-	130.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	34.375.020,00						-	225.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	20.000.000,00						-	135.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					19.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					20.000.000,00							135.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					15.000.000,00							115.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					34.375.020,00							225.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	1 Laporan	34.375.020,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					27.782.013,00						Kabupaten Lima Puluh Kota	330.000.000,00	
		-					27.782.013,00						Kabupaten Lima Puluh Kota	330.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	27.482.000,00						-	75.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	100.000,00						-	75.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	100.000,00						-	85.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	-	100.013,00						-	95.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					27.482.000,00							75.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	27.482.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					100.000,00							85.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					100.000,00							75.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						100.013,00							95.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	1 Laporan	100.013,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						140.831.282,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		360.000.000,00	
		-						140.831.282,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		360.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	100.000.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	-	20.831.282,00						-	100.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							85.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							95.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						20.831.282,00							100.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	20.831.282,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**27.100.000,00**							**528.000.000,00**	
212.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**26.900.000,00**							**488.000.000,00**	
			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	-		-	12 %	26.600.000,00						-	488.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						26.500.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		78.000.000,00	
		-						26.500.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		78.000.000,00	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-		-	-	26.500.000,00						-	78.000.000,00	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						26.500.000,00							78.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-		-	1 Laporan	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	78.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						100.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		85.000.000,00	
		-						100.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	-	100.000,00						-	85.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						100.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						100.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		140.000.000,00	
		-						100.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	-	100.000,00						-	140.000.000,00	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						100.000,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						200.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		185.000.000,00	
		-						200.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		185.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-		-	-	100.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	-	100.000,00						-	95.000.000,00	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						100.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-		-	1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						100.000,00							95.000.000,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
213.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**200.000,00**							**40.000.000,00**	
			Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	-		-	15 %	100.000,00						-	20.000.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						200.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	
		-						200.000,00					Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	-	100.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	-		-	-	100.000,00						-	20.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						100.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi						100.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	-		-	1 Laporan	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**152.645.081.669,00**							**35.299.600.100,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**152.645.081.669,00**							**35.299.600.100,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**152.645.081.669,00**							**35.299.600.100,00**	
214.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.285.182.587,00**							**23.384.050.000,00**	
		-	-	-		-	-	21.285.182.587,00						-	23.306.050.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						124.186.800,00					-		152.000.000,00	
		-						124.186.800,00					-		152.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	18.216.500,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.185.600,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	18.379.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	17.777.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	16.637.200,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	16.256.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	18.735.500,00						-	26.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.185.600,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	18.185.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						16.637.200,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	16.637.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						17.777.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	3 Dokumen	17.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						18.216.500,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	18.216.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						18.379.000,00							22.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	18.379.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.256.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	16 Laporan	16.256.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.735.500,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	18.735.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.796.362.407,00					-		21.043.750.000,00	
		-						18.796.362.407,00					-		21.043.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	31.983.200,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	32.123.900,00						-	15.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	32.209.900,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	18.700.045.407,00						-	21.000.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.700.045.407,00							21.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	76 Orang/bulan	18.700.045.407,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	21.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						32.123.900,00					-		15.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	32.123.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						32.209.900,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	32.209.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sariamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						31.983.200,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	31.983.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						74.400.000,00							85.000.000,00	
		-						74.400.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	49.800.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	24.600.000,00						-	30.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						24.600.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	5 Orang	24.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						49.800.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	49.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277.979.400,00					-		274.400.000,00	
		-						277.979.400,00					-		274.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	19.500.000,00					-		20.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	180.934.000,00					-		161.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.571.400,00					-		26.400.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.552.000,00					-		18.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.664.000,00					-		19.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.728.000,00					-		24.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.030.000,00					-		6.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.664.000,00						19.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.664.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.728.000,00						24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.728.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.030.000,00						6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.571.400,00						26.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	28.571.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	26.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.552.000,00						18.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.552.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.500.000,00						20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	19.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.934.000,00						161.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	180.934.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	161.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						863.187.000,00					-	910.500.000,00	
	-	-						863.187.000,00					-	910.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	76.922.000,00					-	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	654.380.000,00					-	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-		131.885.000,00					-	80.500.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						654.380.000,00						750.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	3 Unit	654.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						76.922.000,00						80.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	76.922.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						131.885.000,00					-	80.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	131.885.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	80.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						483.208.980,00					-	431.500.000,00	
	-	-						483.208.980,00					-	431.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	153.999.980,00					-	154.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	329.209.000,00					-	277.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.999.980,00					-	154.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	153.999.980,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	154.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						329.209.000,00						277.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	329.209.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	277.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						665.858.000,00					-	486.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						665.858.000,00							486.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.018.000,00						-	18.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	445.870.000,00						-	443.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	19.970.000,00						-	25.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						445.870.000,00							443.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	49 Unit	445.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	443.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.970.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	19.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.018.000,00							18.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.018.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	18.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
215.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**129.679.133.407,00**							**10.426.550.100,00**	
		-	-	-		-	-	129.679.133.407,00					-	-	9.836.550.100,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.017.702.300,00					-		1.394.810.100,00	
		-						1.017.702.300,00					-		1.394.810.100,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	162.310.000,00						-	172.310.100,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	165.478.200,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	6.448.400,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	56.240.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	137.580.500,00						-	190.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	193.114.200,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	111.507.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	127.108.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	57.916.000,00						-	160.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						162.310.000,00							172.310.100,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	162.310.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	172.310.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						165.478.200,00							160.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	165.478.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						57.916.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	57.916.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						127.108.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	127.108.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						56.240.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	56.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						111.507.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	111.507.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						137.580.500,00							190.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	137.580.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						193.114.200,00							220.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	5 Dokumen	193.114.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						6.448.400,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	4 Dokumen	6.448.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						209.057.500,00					-		220.240.000,00	
		-	-					209.057.500,00					-		220.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	34.997.300,00					-	-	37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	11.575.000,00						-	12.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	-	18.710.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	-	17.415.000,00						-	18.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	-	37.140.200,00						-	40.140.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	15.000.000,00						-	16.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	28.762.000,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	13.030.000,00						-	14.500.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	-	32.428.000,00						-	32.800.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						34.997.300,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	12 Dokumen	34.997.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						15.000.000,00							16.800.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	172 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	16.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						37.140.200,00							40.140.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	12 Dokumen	37.140.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	40.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						11.575.000,00							12.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	12 Dokumen	11.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						18.710.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	2 Dokumen	18.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						13.030.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	18 Laporan	13.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	14.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						17.415.000,00							18.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	9 Dokumen	17.415.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	18.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						28.762.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	86 Dokumen	28.762.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	29.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						32.428.000,00							32.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	8 Dokumen	32.428.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	32.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						313.696.800,00					-		311.500.000,00	
		-	-					313.696.800,00					-		311.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	-	25.002.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	-	52.024.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-	-	31.391.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-	-	24.999.300,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	30.123.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	50.070.500,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.081.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	75.006.000,00						-	77.500.000,00	
	5.02.02.2.03001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						24.999.300,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-	12 Laporan	24.999.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						25.002.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	4 Dokumen	25.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						50.070.500,00					-		55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	12 Laporan	50.070.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						30.123.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	12 Laporan	30.123.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						75.006.000,00							77.500.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	75.006.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	77.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						52.024.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	3 Dokumen	52.024.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						31.391.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	31.391.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						25.081.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	25.081.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						128.058.428.407,00					-		8.400.000.000,00	
		-	-					128.058.428.407,00					-		8.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	119.958.428.407,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	6.600.000.000,00						-	6.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
	5.02.02.2.04008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						119.958.428.407,00							0,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	12 Laporan	119.958.428.407,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1.500.000.000,00							1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						6.600.000.000,00							6.800.000.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	79 Laporan	6.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	6.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						80.248.400,00					-		100.000.000,00	
		-						80.248.400,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	44.805.400,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	35.443.000,00						-	50.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						44.805.400,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	5 Dokumen	44.805.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						35.443.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	83 Orang	35.443.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
216.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**572.500.000,00**							**574.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	572.500.000,00						-	574.500.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						572.500.000,00							574.500.000,00	
		-						572.500.000,00					-		574.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.450.500,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	48.999.300,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	57.265.200,00						-	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	-	59.999.900,00						-	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	203.982.000,00						-	143.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	18.566.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	-	38.386.000,00						-	47.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.523.000,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	-	45.016.000,00						-	54.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	7.546.900,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	24.545.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	23.220.200,00						-	32.500.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						23.220.200,00							32.500.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	1 Dokumen	23.220.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	32.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						24.545.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	24.545.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						7.546.900,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	7.546.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						48.999.300,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	4 Dokumen	48.999.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						45.016.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	1 Dokumen Laporan	45.016.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	54.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						59.999.900,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	59.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						203.982.000,00							143.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	203.982.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						38.386.000,00							47.500.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	4 Laporan	38.386.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	47.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						18.566.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	18.566.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						22.450.500,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	12 Dokumen	22.450.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						22.523.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	2 Laporan	22.523.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						57.265.200,00							68.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	2 Laporan	57.265.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
217.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.108.265.675,00**							**914.500.000,00**	
			-	-		-	-	1.108.265.675,00						-	862.500.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.108.265.675,00						-	914.500.000,00	
			-					1.108.265.675,00						-	914.500.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	-	25.000.500,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	140.020.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	100.000.050,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	19.999.900,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	35.000.025,00						-	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	14.990.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	70.006.100,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	50.000.100,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	25.010.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	-	80.000.000,00						-	82.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	368.239.000,00						-	100.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						35.000.025,00							46.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	35.000.025,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						50.000.100,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	13 Laporan	50.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	52.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						368.239.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	7 Unit	368.239.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						70.006.100,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	70.006.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						75.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						80.000.000,00							82.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	12 Obyek Pajak	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	82.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						25.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						25.010.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	12 Layanan	25.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						25.000.500,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	12 Dokumen	25.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						140.020.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	140.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						19.999.900,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	19.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						100.000.050,00							107.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	100.000.050,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			107.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						14.990.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Laporan	14.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						50.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		-	52.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**7.500.000.000,00**							**10.845.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.500.000.000,00**							**10.845.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.100.000.000,00**							**7.345.000.000,00**	
218.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.545.038.200,00**							**6.290.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.545.038.200,00						-	6.150.000.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.900.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	
		-						44.900.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.900.000,00					-	-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.000,00					-	-	15.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	8 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.900.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	14.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.412.950.800,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		4.532.150.336,00	
		-						5.412.950.800,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		4.532.150.336,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.412.950.800,00						-	4.532.150.336,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.412.950.800,00							4.532.150.336,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	60 Orang/bulan	5.412.950.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.532.150.336,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						309.934.400,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		410.000.000,00	
		-						309.934.400,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.240.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	39.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	149.999.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.749.900,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	49.950.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	14.995.500,00						-	15.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.995.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	14.995.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.749.900,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	49.749.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.950.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	49.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.240.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	6.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						39.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						149.999.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	200 Laporan	149.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						492.593.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		837.849.664,00	
		-						492.593.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		837.849.664,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	149.825.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	342.768.000,00						-	387.849.664,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						149.825.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	30 Unit	149.825.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						342.768.000,00							387.849.664,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	15 Unit	342.768.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	387.849.664,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.950.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		190.000.000,00	
		-						52.950.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.200.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.250.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.250.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	6.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	43.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.710.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		280.000.000,00	
		-						231.710.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		280.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	206.970.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	24.740.000,00						-	30.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						206.970.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	23 Unit	206.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.740.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	24.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
219.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**554.961.800,00**							**1.055.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	464.961.800,00						-	715.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						94.993.800,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		265.000.000,00	
		-						94.993.800,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	19.994.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	15.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	15.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	15.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	-	14.999.800,00						-	50.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						15.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	10.000 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						19.994.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	200 Dokumen	19.994.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						14.999.800,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	1 Lembaga	14.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						15.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	8.000 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	8.000 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						319.997.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		455.000.000,00	
		-						319.997.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		455.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	300.002.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	19.995.000,00						-	75.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						300.002.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	500 Dokumen	300.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						19.995.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	1.500 Dokumen	19.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	400 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						50.000.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	
		-						50.000.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						89.971.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		185.000.000,00	
		-						89.971.000,00					ASN Kabupaten Lima Puluh Kota		185.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	-	15.000.000,00					-	-	25.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	15.003.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	15.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	15.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	-	14.980.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	-	14.988.000,00						-	35.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	8.000 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	300 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						15.003.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
																NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	8.000 Orang	15.003.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						14.988.000,00							35.000.000,00	
							Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	50 Laporan	14.988.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						14.980.000,00							25.000.000,00	
							Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	50 Dokumen	14.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04						**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**400.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
220.	**5.04.02**						**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**400.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
							-	-	-		-	-	400.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	5.04.02.2.02						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						400.000.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		3.500.000.000,00	
							-						400.000.000,00					BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota		3.500.000.000,00	
								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	400.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						400.000.000,00							3.500.000.000,00	
							Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	150 Laporan	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							INSPEKTORAT						**13.093.692.559,00**							**19.273.698.700,00**	
	6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.093.692.559,00**							**19.273.698.700,00**	
	6.01						**INSPEKTORAT DAERAH**						**13.093.692.559,00**							**19.273.698.700,00**	
221.	**6.01.01**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.660.092.559,00**							**16.767.556.186,00**	
								Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	-		-	95 %	10.383.092.559,00						-	13.902.556.186,00	
	6.01.01.2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						155.000.000,00					-		410.000.000,00	
							-						155.000.000,00					-		410.000.000,00	
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	120.000.000,00	
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	50.000.000,00	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							120.000.000,00	
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
							Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						20.000.000,00							40.000.000,00	
							Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
							Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
							Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							50.000.000,00	
							Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.864.612.559,00					-		8.027.355.306,00	
		-	-					8.864.612.559,00					-		8.027.355.306,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	5.998.000,00						-	5.998.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	7.988.000,00						-	7.988.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.832.626.559,00						-	7.995.369.306,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.832.626.559,00					-		7.995.369.306,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	89 Orang/bulan	8.832.626.559,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.995.369.306,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.998.000,00							5.998.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	100 Dokumen	5.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.998.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.988.000,00							7.988.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	7.988.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.988.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						587.000.000,00					-		5.915.000.000,00	
		-	-					587.000.000,00					-		5.915.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	7.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	50.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	50.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	75.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	400.000.000,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						75.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	89 Paket	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						400.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	89 Orang	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317.506.000,00					-		977.811.000,00	
		-	-					317.506.000,00					-		977.811.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00					-	-	50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	30.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	150.000.000,00					-	-	110.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	31.378.000,00					-	-	31.378.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00					-	-	25.305.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.128.000,00					-	-	11.128.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00					-	-	600.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00					-	-	50.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.128.000,00							11.128.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	11.128.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	11.128.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	30 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	25 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.378.000,00							31.378.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	35 Paket	31.378.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	31.378.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							25.305.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	10 Paket	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.305.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						125.000.000,00					-		300.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00					-	-	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						271.700.000,00					-		319.700.000,00	
		-						271.700.000,00					-		319.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	34.500.000,00						-	34.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	235.200.000,00						-	235.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	50.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.500.000,00							34.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	34.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	34.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.200.000,00							235.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	235.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	235.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						339.274.000,00					-		817.689.880,00	
		-						339.274.000,00					-		817.689.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	65.000.000,00						-	200.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	225.000.000,00						-	300.000.000,00	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	14.274.000,00						-	14.274.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	35.000.000,00						-	303.415.880,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					225.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	26 Unit	225.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						14.274.000,00							14.274.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	14.274.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.274.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						65.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00							303.415.880,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	303.415.880,00	INSPEKTORAT
222.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.058.700.000,00**							**2.043.162.514,00**	
			1.Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) 2.Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) 3.Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	-		-	WTP 85,75 85,75 Nilai % %	208.500.000,00						-	333.921.514,00	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	-		-	WTP	1.100.200.000,00						-	1.359.241.000,00	
			Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	-		-	85,75 %	1.100.200.000,00						-	1.359.241.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.850.200.000,00					-		1.709.241.000,00	
		-						1.850.200.000,00					-		1.709.241.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	200.000.000,00						-	88.433.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	450.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	450.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	25.200.000,00						-	20.808.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	125.000.000,00						-	300.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						450.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	20 Laporan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						450.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	20 Laporan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						125.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	45 Laporan	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						25.200.000,00							20.808.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	1 Laporan	25.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.808.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	20 Laporan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	4 Kesepakatan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						200.000.000,00							88.433.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	88.433.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						208.500.000,00					-		333.921.514,00	
		-						208.500.000,00					-		333.921.514,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	178.500.000,00						-	182.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	30.000.000,00						-	151.851.514,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						30.000.000,00							151.851.514,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	151.851.514,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						178.500.000,00							182.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	15 Laporan	178.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	182.070.000,00	INSPEKTORAT
223.	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**374.900.000,00**							**462.980.000,00**	
			1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-		-	Terdefenisi Terinte	304.500.000,00						-	286.110.000,00	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-		-	Terintegrasi	70.400.000,00						-	176.870.000,00	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-		-	Terdefenisi	70.400.000,00						-	176.870.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						70.400.000,00					-		176.870.000,00	
		-						70.400.000,00					-		176.870.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	-	20.400.000,00						-	20.810.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-		50.000.000,00						-	156.060.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						50.000.000,00							156.060.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	1 Rekomendasi	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	156.060.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						20.400.000,00							20.810.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	1 Rekomendasi	20.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.810.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						304.500.000,00					-		286.110.000,00	
		-						304.500.000,00					-		286.110.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	75.000.000,00						-	52.020.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	25.500.000,00						-	26.010.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	76.500.000,00						-	78.030.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	127.500.000,00						-	130.050.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						127.500.000,00							130.050.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	43 perangkat daerah	127.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	130.050.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						76.500.000,00							78.030.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	43 perangkat daerah	76.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	78.030.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						75.000.000,00							52.020.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	2 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	52.020.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						25.500.000,00							26.010.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	2 perangkat daerah	25.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	26.010.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN GUNUANG OMEH						**1.410.050.668,00**							**1.564.820.627,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.410.050.668,00**							**1.564.820.627,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.410.050.668,00**							**1.564.820.627,00**	
224.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.363.050.668,00**							**1.273.348.707,00**	
			Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan umum pemeirntahaan daerah pada perangkat daerah	-		-	100 %	1.000.000,00						-	1.438.800,00	
			-	-		-	-	1.344.050.668,00						-	1.271.909.907,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		1.438.800,00	
		-						1.000.000,00					-		1.438.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	1.438.800,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.438.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.438.800,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.246.789.268,00					-		1.040.766.907,00	
		-						1.246.789.268,00					-		1.040.766.907,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.246.789.268,00					-	-	1.040.766.907,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.246.789.268,00							1.040.766.907,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	14 Orang/bulan	1.246.789.268,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			1.040.766.907,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						27.037.400,00					-		134.943.000,00	
		-						27.037.400,00					-		134.943.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.727.900,00						-	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.309.500,00						-	3.443.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.727.900,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	6.727.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	11.500.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.309.500,00							3.443.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.309.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.443.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	85.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.374.000,00					-		22.000.000,00	
		-						4.374.000,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.574.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-		1.800.000,00						-	17.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.574.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	2.574.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	17.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.850.000,00					-		74.200.000,00	
		-						83.850.000,00					-		74.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	64.350.000,00						-	68.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.500.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						64.350.000,00							68.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	64.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	68.200.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
225.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.000.000,00**							**156.541.920,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		-	82 Indeks	2.000.000,00						-	156.541.920,00	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-		-	66 Nilai	2.000.000,00						-	156.541.920,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.000.000,00					-		156.541.920,00	
		-						2.000.000,00					-		156.541.920,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	156.541.920,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							156.541.920,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	156.541.920,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
226.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.500.000,00**							**49.830.000,00**	
			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-		-	1 Pokmas/Ormas	1.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	-		-	76 angka	1.500.000,00						-	9.830.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.500.000,00					-		9.830.000,00	
		-						1.500.000,00					-		9.830.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	9.830.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.500.000,00							9.830.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.830.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						2.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	1.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	1.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						1.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	0 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	0 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
227.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**41.500.000,00**							**85.100.000,00**	
			Tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	-		-	80 angka	41.500.000,00						-	85.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						41.500.000,00						-	85.100.000,00	
		-						41.500.000,00						-	85.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	27.000.000,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	14.500.000,00						-	58.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						14.500.000,00							58.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	0 Orang	14.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	58.100.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						27.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	3 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.000.000,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
		KECAMATAN BUKIK BARISAN						**1.588.504.869,00**							**1.516.780.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.588.504.869,00**							**1.516.780.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.588.504.869,00**							**1.516.780.000,00**	
228.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.542.504.869,00**							**1.473.780.000,00**	
			-	-		-	-	1.536.519.869,00						-	1.443.780.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.964.000,00						-	30.000.000,00	
		-						9.964.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.995.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.130.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.995.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.995.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	854.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.995.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.130.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	1.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						854.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	854.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.995.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.995.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.995.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.995.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	1.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.382.620.369,00					-		1.405.780.000,00	
		-						1.382.620.369,00					-		1.405.780.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.382.620.369,00					-	-	1.405.780.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.382.620.369,00							1.405.780.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1 Orang/bulan	1.382.620.369,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.405.780.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						8.302.000,00					-		33.000.000,00	
		-						8.302.000,00					-		33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-		5.400.000,00							25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.902.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.902.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.902.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	8.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.400.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.000.000,00					-		0,00	
		-						9.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-		9.000.000,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.135.000,00					-		5.000.000,00	
		-						3.135.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.135.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.135.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	3.135.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.483.500,00					-		0,00	
		-						129.483.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	57.276.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	70.747.500,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.460.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.747.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	70.747.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.460.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	1.460.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						57.276.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	57.276.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
229.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**27.000.000,00**							**40.000.000,00**	
			-	-		-	-	27.000.000,00					-	-	40.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						27.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						27.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	27.000.000,00							40.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						27.000.000,00							40.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
230.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.500.000,00**							**3.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.500.000,00					-	-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.500.000,00					-		0,00	
		-						1.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						2.000.000,00					-		3.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	5 Keluarga	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
231.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.000.000,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	14.000.000,00					-	-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.000.000,00					-		0,00	
		-						14.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	14.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						14.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
232.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.500.000,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	1.500.000,00					-	-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00					-		0,00	
		-						1.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	0 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
		KECAMATAN SULIKI						**1.782.051.438,00**							**1.919.445.677,47**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.782.051.438,00**							**1.919.445.677,47**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.782.051.438,00**							**1.919.445.677,47**	
233.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.761.951.438,00**							**1.600.945.677,47**	
			Optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	99,99 %	72.500.000,00						-	276.000.000,00	
			Persentase pemebuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	-		-	99,99 %	1.670.051.438,00						-	1.230.945.677,47	
			Persentase terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	100 %	19.400.000,00						-	94.000.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.500.000,00					-		21.000.000,00	
		-						8.500.000,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	8.500.000,00						-	21.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						8.500.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	17 Paket	8.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	21.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.400.000,00					-		94.000.000,00	
		-						19.400.000,00					-		94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	13.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.500.000,00						-	56.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	900.000,00						-	26.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.500.000,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	56.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						900.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	26.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	9 Laporan	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.960.000,00					-		171.000.000,00	
		-						3.960.000,00					-		171.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	960.000,00						-	152.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	19.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						960.000,00					-		152.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	152.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72.500.000,00					-		276.000.000,00	
		-						72.500.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	56.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	16.500.000,00						-	156.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						56.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	11 Unit	56.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	120.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						16.500.000,00							156.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	16.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	156.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.657.591.438,00					-		1.038.945.677,47	
		-						1.657.591.438,00					-		1.038.945.677,47	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.657.591.438,00						-	1.038.945.677,47	
	7.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.657.591.438,00							1.038.945.677,47	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	17 Orang/Bulan	1.657.591.438,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.038.945.677,47	KECAMATAN SULIKI
234.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.100.000,00**							**192.000.000,00**	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	-		-	78 indeks	3.600.000,00						-	192.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.600.000,00					-		162.000.000,00	
		-						3.600.000,00					-		162.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.500.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.100.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.100.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.500.000,00					-		30.000.000,00	
		-						1.500.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	1.500.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1.500.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	40 Keluarga	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
235.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15.000.000,00**							**126.500.000,00**	
			Persentase terpenuhinya pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan	-		-	99,99 %	15.000.000,00						-	126.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					-		126.500.000,00	
		-						15.000.000,00					-		126.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	21.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	5.000.000,00						-	105.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						5.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	105.000.000,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.000.000,00							21.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	21.500.000,00	KECAMATAN SULIKI
236.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN SULIKI
		KECAMATAN GUGUAK						**1.722.170.854,00**							**2.021.065.237,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.722.170.854,00**							**2.021.065.237,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.722.170.854,00**							**2.021.065.237,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
237.	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.712.060.854,00**							**1.986.065.237,00**	
		-	-	-		-	-	1.712.060.854,00					-	-	1.986.065.237,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.607.535.854,00					-		1.823.665.237,00	
		-						1.607.535.854,00					-		1.823.665.237,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.607.535.854,00					-	-	1.823.665.237,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.607.535.854,00							1.823.665.237,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	1.607.535.854,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	1.823.665.237,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22.445.000,00					-		54.500.000,00	
		-						22.445.000,00					-		54.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	12.245.000,00					-	-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.549.000,00					-	-	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.518.000,00					-	-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.133.000,00					-	-	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.133.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.133.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.549.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.549.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	13.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.518.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.518.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.245.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	12.245.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.080.000,00					-		38.000.000,00	
		-						20.080.000,00					-		38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.080.000,00					-	-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00					-	-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.080.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						18.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.000.000,00					-		69.900.000,00	
		-						62.000.000,00					-		69.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	58.120.000,00					-	-	64.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	3.880.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.120.000,00							64.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	58.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	64.900.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.880.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	3.880.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
238.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.070.000,00**							**5.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.070.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.070.000,00					-		5.000.000,00	
		-						2.070.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.070.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.070.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Nagari Lembaga Kemasyarakatan	2.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
239.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.040.000,00**							**30.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	8.040.000,00					-	-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						8.040.000,00					-		30.000.000,00	
		-						8.040.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	8.040.000,00					-	-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						8.040.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
240.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	0,00					-	-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	0,00					-	-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	10 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUGUAK
		KECAMATAN MUNGKA						**1.472.651.134,00**							**1.395.645.677,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.472.651.134,00**							**1.395.645.677,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**1.472.651.134,00**							**1.395.645.677,00**	
241.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.427.939.834,00**							**1.348.145.677,00**	
			-	-		-	-	1.427.939.834,00						-	1.337.145.677,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						310.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		1.500.000,00	
		-						310.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	310.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						310.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	35 Dokumen	310.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.304.876.454,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		1.241.645.677,00	
		-						1.304.876.454,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		1.241.645.677,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	682.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	745.100,00							1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.303.449.354,00						-	1.238.645.677,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.303.449.354,00							1.238.645.677,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	14 Orang/bulan	1.303.449.354,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.238.645.677,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						745.100,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	12 Laporan	745.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						682.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	35 Dokumen	682.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.018.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		2.500.000,00	
		-						1.018.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.018.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.018.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	35 Dokumen	1.018.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.555.380,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		26.500.000,00	
		-						28.555.380,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		26.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.800.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	17.230.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.016.980,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.034.200,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	614.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.860.200,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						614.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	40 Paket	614.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.860.200,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	14 Paket	1.860.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.016.980,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.016.980,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.034.200,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	60 Paket	2.034.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.800.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17.230.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	17.230.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		12.000.000,00	
		-						11.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	11.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82.180.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		64.000.000,00	
		-						82.180.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		64.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-		76.930.000,00							61.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.250.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						76.930.000,00							61.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	76.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	61.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.250.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	32 Unit	5.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
242	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.818.300,00**							**10.500.000,00**	
			-	-		-	-	4.818.300,00						-	10.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.060.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		7.000.000,00	
		-						3.060.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.060.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.060.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	25 Lembaga Kemasyarakatan	3.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	60 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	4.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1.758.300,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.758.300,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		3.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	1.758.300,00						-	3.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1.758.300,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	5213 Keluarga	1.758.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
243.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**26.116.000,00**							**28.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	26.116.000,00						-	28.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						26.116.000,00						-	28.000.000,00	
		-						26.116.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	26.116.000,00						-	28.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						26.116.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	60 Laporan	26.116.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	28.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
244.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.025.000,00**							**6.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	8.025.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						8.025.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		6.000.000,00	
		-						8.025.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	8.025.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						8.025.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	5123 Orang	8.025.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
245.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.752.000,00**							**3.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	5.752.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.752.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		3.000.000,00	
		-						5.752.000,00					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	5.752.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.752.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	60 Laporan	5.752.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
		KECAMATAN AKABILURU						**1.772.654.780,00**							**2.118.377.830,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.772.654.780,00**							**2.118.377.830,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.772.654.780,00**							**2.118.377.830,00**	
246.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.686.948.780,00**							**1.987.877.830,00**	
		-	-	-	-	-	-	1.686.948.780,00						-	1.973.877.830,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.964.800,00					-		14.000.000,00	
		-						2.964.800,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.464.800,00						-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.464.800,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	1.464.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.522.032.980,00					-		1.698.140.830,00	
		-						1.522.032.980,00					-		1.698.140.830,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.200.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.520.832.980,00						-	1.686.140.830,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.520.832.980,00							1.686.140.830,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 Orang/bulan	1.520.832.980,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.686.140.830,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.200.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.045.000,00					-		1.500.000,00	
		-						1.045.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.045.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.045.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.045.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.650.000,00					-		12.000.000,00	
		-						8.650.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.150.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	7.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						7.500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	15 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.150.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	15 Dokumen	1.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.127.000,00					-		73.987.000,00	
		-						39.127.000,00					-		73.987.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	23.730.000,00						-	43.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.632.000,00						-	17.987.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.790.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	975.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						975.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.632.000,00							17.987.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.632.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.987.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.790.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.730.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	3 Laporan	23.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.369.000,00					-		15.750.000,00	
		-						10.369.000,00					-		15.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	6.762.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.607.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	1.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.750.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.762.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	6.762.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.607.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	3.607.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.760.000,00					-		172.500.000,00	
		-						102.760.000,00					-		172.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.560.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	83.900.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.300.000,00						-	17.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						83.900.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	9 Unit	83.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.300.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	8.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.560.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
247.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.500.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.500.000,00					-		5.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.500.000,00					-		5.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00							5.000.000,00	
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
248.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						13.205.000,00							22.000.000,00	
			-	-		-	-	11.155.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.105.000,00					-		12.000.000,00	
		-						9.105.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.495.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	5.610.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5.610.000,00							7.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.610.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.495.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.495.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						4.100.000,00					-		10.000.000,00	
		-						4.100.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	2.050.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-		2.050.000,00							5.000.000,00	
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.050.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	70 Keluarga	2.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						2.050.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	70 Keluarga	2.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
249.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.500.000,00							7.000.000,00	
			-	-		-	-	3.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.500.000,00					-		7.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
250.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						55.001.000,00							77.500.000,00	
			-	-		-	-	55.001.000,00						-	77.500.000,00	
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						55.001.000,00					-		77.500.000,00	
		-						55.001.000,00					-		77.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	33.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	22.001.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						22.001.000,00							32.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	100 Orang	22.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						33.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
251.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						7.000.000,00							14.000.000,00	
			-	-		-	-	3.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.000.000,00					-		14.000.000,00	
		-						7.000.000,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-		3.500.000,00							7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.500.000,00					-		7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	7 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.500.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	7 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
		KECAMATAN PAYAKUMBUH						2.689.788.381,00							3.448.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.689.788.381,00							3.448.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.689.788.381,00							3.448.900.000,00	
252.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.611.753.381,00							2.668.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								2.426.873.381,00							2.576.700.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.760.000,00							8.400.000,00	
		-						9.760.000,00					-		8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00					-	-	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.880.000,00					-	-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00					-	-	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	0,00					-	-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00					-	-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.880.000,00					-	-	2.350.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	0,00					-	-	750.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.880.000,00							1.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	4.880.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.800.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.880.000,00							2.350.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	4.880.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.350.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.156.750.981,00					-		1.960.153.900,00	
		-						2.156.750.981,00					-		1.960.153.900,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00					-	-	2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00					-	-	6.400.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00					-	-	2.900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00					-	-	1.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.156.750.981,00					-	-	1.947.353.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.156.750.981,00							1.947.353.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	2.156.750.981,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.947.353.900,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	6.400.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							2.900.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.900.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	5 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.400.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.100.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		6.200.000,00	
		-						0,00					-		6.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00					-	-	3.200.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00					-	-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	3.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		27.600.000,00	
		-						10.000.000,00					-		27.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00					-	-	5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-		10.000.000,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	10.000.000,00						-		12.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					10.000.000,00								12.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	22 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	12.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							5.100.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	21 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	5.100.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.418.800,00					-		201.696.100,00	
		-						160.418.800,00					-		201.696.100,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.800.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	48.300.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.156.800,00						-	21.296.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.812.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	350.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						350.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.156.800,00							21.296.100,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	9.156.800,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	21.296.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.812.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.812.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	2.400.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.800.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	7.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.300.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	48.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						180.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						180.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	92.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	36.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						45.000.000,00							92.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	12 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	92.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	12 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.433.600,00					-		71.900.000,00	
		-						9.433.600,00					-		71.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-		8.000.000,00							11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.233.600,00						-	37.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	200.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						200.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.233.600,00							37.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.233.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	37.900.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.390.000,00					-		192.250.000,00	
		-						85.390.000,00					-		192.250.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	81.650.000,00							67.750.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	3.740.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						81.650.000,00							67.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	81.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	67.750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.740.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	3.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
253.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**13.875.000,00**							**115.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	13.875.000,00						-	115.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.300.000,00					-		60.000.000,00	
		-						6.300.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-		6.300.000,00							60.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.300.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	7 Laporan	6.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	60.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						7.575.000,00					-		55.000.000,00	
		-						7.575.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.575.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.575.000,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	7.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
254.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**14.640.000,00**							**177.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	8.340.000,00						-	177.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8.340.000,00					-		108.500.000,00	
		-						8.340.000,00					-		108.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.040.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	6.300.000,00						-	13.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						6.300.000,00							13.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.040.000,00							95.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	2.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						6.300.000,00					-		68.500.000,00	
		-						6.300.000,00					-		68.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	-	0,00						-	63.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	6.300.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						0,00							63.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	100 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	63.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						6.300.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	100 Keluarga	6.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
255.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.520.000,00**							**163.700.000,00**	
			-	-		-	-	2.520.000,00						-	163.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.520.000,00							88.500.000,00	
		-						2.520.000,00							88.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.520.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	38.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.520.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	7 Laporan	2.520.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	7 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					-		75.200.000,00	
		-						0,00					-		75.200.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	75.200.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							75.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	7 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
256.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**41.160.000,00**							**35.000.000,00**	
		-		-	-	-	-	41.160.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						41.160.000,00					-		35.000.000,00	
		-						41.160.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	41.160.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	0,00					-	-	2.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	7 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	20 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.05.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						41.160.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	41.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
257.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.840.000,00**							**290.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	5.840.000,00					-	-	290.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.840.000,00					-		290.000.000,00	
		-						5.840.000,00					-		290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	0,00						-	37.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	0,00						-	83.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.040.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	33.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	0,00						-	40.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	3.800.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						0,00							40.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.040.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	7 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00					-		33.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						0,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						0,00							37.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	37.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00							83.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	83.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.800.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	7 Laporan	3.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
		KECAMATAN LUAK						**1.933.724.231,00**							**2.085.214.331,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.933.724.231,00**							**2.085.214.331,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.933.724.231,00**							**2.085.214.331,00**	
258.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.914.416.231,00**							**2.048.214.331,00**	
		-	-	-		-	-	1.914.416.231,00						-	2.046.214.331,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.835.962.231,00					-		1.940.900.331,00	
		-						1.835.962.231,00					-		1.940.900.331,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.835.962.231,00					-	-	1.940.900.331,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.835.962.231,00							1.940.900.331,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	224 Orang/bulan	1.835.962.231,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.940.900.331,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						9.118.000,00					-		23.500.000,00	
		-						9.118.000,00					-		23.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.635.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	900.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	583.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						583.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	583.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	9.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						900.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.635.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	3.635.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.400.000,00					-		19.864.000,00	
		-						9.400.000,00					-		19.864.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	17.864.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	400.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							17.864.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.864.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						400.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.936.000,00					-		63.950.000,00	
		-						59.936.000,00					-		63.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	59.936.000,00						-	63.950.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						59.936.000,00							63.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	59.936.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	63.950.000,00	KECAMATAN LUAK
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.205.000,00**							**2.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.205.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.205.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.205.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.205.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.205.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.205.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN LUAK
260.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	12.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						12.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	12.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						12.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN LUAK
261.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.103.000,00**							**5.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	5.103.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.103.000,00					-		5.000.000,00	
		-						5.103.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	5.103.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.103.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	12 Laporan	5.103.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN LUAK
		KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN						**1.775.360.269,00**							**2.796.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.775.360.269,00**							**2.796.350.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.775.360.269,00**							**2.796.350.000,00**	
262.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.726.345.269,00**							**2.074.750.000,00**	
			Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	-		-	100% undefined	1.653.087.395,00						-	1.467.863.042,00	
			Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	-		-	100% -	72.220.374,00						-	526.886.958,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.209.000,00					Instansi		12.550.000,00	
		-						3.209.000,00					Instansi		12.550.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	2.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.134.000,00						-	2.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.037.500,00						-	2.300.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.037.500,00						-	2.250.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.134.000,00							2.650.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	1.134.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.650.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.037.500,00							2.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.037.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.250.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.037.500,00							2.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.037.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.300.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							2.350.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.350.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.650.915.895,00					Instansi		1.455.313.042,00	
		-						1.650.915.895,00					Instansi		1.455.313.042,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	3.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.650.915.895,00						-	1.452.063.042,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.650.915.895,00							1.452.063.042,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	1.650.915.895,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.452.063.042,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							3.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.250.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Instansi		2.750.000,00	
		-						0,00					Instansi		2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	2.750.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							2.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.750.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Instansi		5.000.000,00	
		-						0,00					Instansi		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.675.460,00					Instansi		256.500.000,00	
		-						29.675.460,00					Instansi		256.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	12.910.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.770.000,00						-	16.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.400.000,00						-	13.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.095.460,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	3.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.095.460,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.095.460,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	150.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	8.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.770.000,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	7.770.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	16.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.400.000,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	13.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.910.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	12.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	65.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.816.000,00					Instansi		160.886.958,00	
		-						3.816.000,00					Instansi		160.886.958,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	115.886.958,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	3.816.000,00						-	45.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							115.886.958,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	115.886.958,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.816.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	3.816.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.528.914,00					Instansi		95.250.000,00	
		-						4.528.914,00					Instansi		95.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	4.278.914,00						-	9.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	250.000,00						-	5.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						250.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.278.914,00							9.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	4.278.914,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.750.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34.200.000,00					Instansi		86.500.000,00	
		-						34.200.000,00					Instansi		86.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	34.200.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	6.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34.200.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	34.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	80.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
263.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**							**71.000.000,00**	
			Nilai IKM Nilai SAKIP	-		-	91% 66 undefined	0,00						-	31.000.000,00	
			Nilai IKM Nilai SAKIP	-		-	91% 66	0,00						-	40.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					MASYARAKAT		40.000.000,00	
		-						0,00					MASYARAKAT		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	-	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00					MASYARAKAT		31.000.000,00	
		-						0,00					MASYARAKAT		31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00							31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	31.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
264.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.790.000,00**							**152.000.000,00**	
			Nilai IKM Nilai SAKIP	-		-	91% 66 undefined	4.790.000,00						-	50.000.000,00	
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	-		-	66 undefined	9.790.000,00						-	152.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.790.000,00					MASYARAKAT		50.000.000,00	
		-						4.790.000,00					MASYARAKAT		50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	4.790.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4.790.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	50.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5.000.000,00					MASYARAKAT		102.000.000,00	
		-						5.000.000,00					MASYARAKAT		102.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	-	5.000.000,00						-	27.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	15.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	40.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	50 Keluarga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	27.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
265.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**163.700.000,00**	
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	-		-	66 undefined	0,00						-	98.700.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00					MASYARAKAT		130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					MASYARAKAT		130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	65.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	65.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					MASYARAKAT		33.700.000,00	
		-						0,00					MASYARAKAT		33.700.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	33.700.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							33.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	33.700.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
266.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**33.225.000,00**							**190.000.000,00**	
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-		-	66 undefined	33.225.000,00						-	190.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.225.000,00					MASYARAKAT		190.000.000,00	
		-						33.225.000,00					MASYARAKAT		190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	24.300.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	8.925.000,00						-	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						8.925.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	8.925.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	150.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						24.300.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	24.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		-	40.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
267.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**6.000.000,00**							**144.900.000,00**	
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-		-	66 undefined	6.000.000,00						-	48.300.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.000.000,00					MASYARAKAT		144.900.000,00	
		-						6.000.000,00					MASYARAKAT		144.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	0,00						-	48.300.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	48.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	6.000.000,00						-	48.300.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							48.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	-	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	48.300.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						0,00							48.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	48.300.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.000.000,00							48.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		-	48.300.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
		KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI						**1.654.119.829,00**							**1.920.429.352,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.654.119.829,00**							**1.920.429.352,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.654.119.829,00**							**1.920.429.352,00**	
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.623.204.829,00**							**1.633.429.352,00**	
		-	-	-		-	-	1.623.204.829,00					-	-	1.632.429.352,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.516.929.329,00					-		1.509.104.214,00	
		-						1.516.929.329,00					-		1.509.104.214,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	700.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.515.729.329,00						-	1.507.104.214,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.515.729.329,00							1.507.104.214,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	1.515.729.329,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	1.507.104.214,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						700.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.240.000,00					-		40.300.000,00	
		-						29.240.000,00					-		40.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	14.475.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.025.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.090.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	650.000,00						-	2.300.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						650.000,00							2.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.300.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.025.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.025.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.090.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.475.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	14.475.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	22.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.025.500,00					-		58.025.138,00	
		-						9.025.500,00					-		58.025.138,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	8.025.500,00						-	11.025.138,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	47.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.025.500,00							11.025.138,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	8.025.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	11.025.138,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000,00							47.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			47.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.010.000,00					-		26.000.000,00	
		-						68.010.000,00					-		26.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	66.140.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.870.000,00					-	-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.140.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	66.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	24.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.870.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	1.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	2.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
269.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**11.765.000,00**							**237.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	11.765.000,00					-	-	127.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						6.765.000,00					-		127.000.000,00	
		-	-					6.765.000,00					-	-	127.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.750.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.015.000,00						-	17.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.015.000,00							17.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	17.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.750.000,00							110.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	110.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	5.000.000,00						-	110.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						5.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	110.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
270.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.740.000,00**							**30.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	14.740.000,00					-	-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.740.000,00					-		30.000.000,00	
		-						14.740.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	14.740.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						14.740.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	14.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
271.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.410.000,00**							**20.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	4.410.000,00					-	-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.410.000,00					-		20.000.000,00	
		-						4.410.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	4.410.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.410.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	4.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
		KECAMATAN HARAU						**1.954.057.845,00**							**3.044.028.814,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.954.057.845,00**							**3.044.028.814,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.954.057.845,00**							**3.044.028.814,00**	
272.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.910.863.645,00**							**2.183.528.814,00**	
		-	-	-		-	-	1.909.675.645,00					-	-	2.161.528.814,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.669.600,00					-		87.253.687,00	
		-						8.669.600,00					-		87.253.687,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.264.000,00						-	10.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.213.000,00						-	10.003.687,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.209.000,00						-	12.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.188.000,00						-	10.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.182.000,00						-	9.650.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.268.300,00						-	18.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.345.300,00						-	14.450.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.213.000,00					-		10.003.687,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.213.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.003.687,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.182.000,00							9.650.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.182.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	9.650.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.188.000,00							10.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.188.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.750.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.264.000,00							10.850.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.264.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	10.850.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.209.000,00							12.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.209.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	12.750.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.268.300,00							18.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.268.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.800.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.345.300,00							14.450.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.345.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.450.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.775.264.645,00					-		1.630.125.127,00	
		-						1.775.264.645,00					-		1.630.125.127,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.076.000,00						-	16.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	916.000,00						-	6.235.700,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.188.000,00						-	17.900.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	688.000,00						-	14.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.771.396.645,00						-	1.575.189.427,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.771.396.645,00							1.575.189.427,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	1.771.396.645,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	1.575.189.427,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						916.000,00							6.235.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	916.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.235.700,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.188.000,00							17.900.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.188.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	17.900.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						688.000,00							14.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	15 Laporan	688.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	14.700.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.076.000,00							16.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.076.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	16.100.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						660.000,00					-		18.750.000,00	
		-						660.000,00					-		18.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	660.000,00						-	18.750.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						660.000,00							18.750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	7 Laporan	660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	18.750.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.202.000,00					-		30.500.000,00	
		-						10.202.000,00					-		30.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.202.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	9.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						9.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	18 Paket	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.202.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	16 Dokumen	1.202.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.876.000,00					-		198.000.000,00	
		-						29.876.000,00					-		198.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	2.280.000,00						-	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	9.650.000,00						-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.933.400,00						-	47.500.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.580.600,00						-	22.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	942.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.490.000,00						-	95.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					942.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	942.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	5.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.490.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.490.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	95.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.933.400,00							47.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.933.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	47.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.580.600,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.580.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	22.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.280.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	2.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.650.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	9.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	22.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.670.000,00					-		30.000.000,00	
		-	-					1.670.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	1.670.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.670.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.670.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	30.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.471.400,00					-		112.900.000,00	
		-	-					9.471.400,00					-		112.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	5.340.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.631.400,00					-	-	97.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00					-	-	900.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	900.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.340.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	5.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	15.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.631.400,00							97.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.631.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	97.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.050.000,00					-		76.000.000,00	
		-	-					75.050.000,00					-		76.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	73.630.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.420.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						73.630.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	73.630.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	70.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.420.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	1.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	6.000.000,00	KECAMATAN HARAU
273.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.661.000,00**							**206.000.000,00**	
		-	-					2.661.000,00							206.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.211.000,00					-		25.000.000,00	
		-	-					1.211.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	1.211.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.211.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	13 Dokumen	1.211.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						1.450.000,00					-		181.000.000,00	
		-	-					1.450.000,00					-		181.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	-	1.450.000,00						-	181.000.000,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						1.450.000,00							181.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	11 Dokumen	1.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	181.000.000,00	KECAMATAN HARAU
274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.489.000,00**							**124.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	7.489.000,00						-	124.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.026.000,00					-		30.300.000,00	
		-	-					5.026.000,00					-		30.300.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.066.000,00						-	21.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.960.000,00						-	8.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.960.000,00							8.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	8.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.066.000,00							21.800.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	13 Laporan	1.066.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	21.800.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						2.463.000,00					-		93.700.000,00	
		-	-					2.463.000,00					-		93.700.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	-	1.114.000,00						-	32.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-		-	-	1.349.000,00						-	61.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						1.349.000,00							61.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-		-	100 Keluarga	1.349.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	61.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						1.114.000,00							32.200.000,00	
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	110 Keluarga	1.114.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	32.200.000,00	KECAMATAN HARAU
275.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.104.000,00**							**115.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.104.000,00						-	115.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						990.000,00					-		55.000.000,00	
		-	-					990.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	990.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						990.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	4 Laporan	990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	55.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.114.000,00					-		60.000.000,00	
		-	-					1.114.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.114.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.114.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	1.114.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	60.000.000,00	KECAMATAN HARAU
276.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.140.000,00**							**151.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	25.140.000,00						-	151.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.140.000,00					-		151.500.000,00	
		-	-					25.140.000,00					-		151.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	24.000.000,00						-	81.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	1.140.000,00							70.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						1.140.000,00							70.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	52 Orang	1.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	70.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						24.000.000,00							81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	81.000.000,00	KECAMATAN HARAU
277.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.800.200,00**							**264.000.000,00**	
		-	-	-		-		5.800.200,00						-	264.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.800.200,00					-		264.000.000,00	
		-	-					5.800.200,00					-		264.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	1.057.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	1.205.200,00						-	72.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.169.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.090.000,00						-	36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	1.279.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.090.000,00							36.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	11 Dokumen	1.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	36.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.169.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	11 Dokumen	1.169.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	60.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						1.205.200,00							72.500.000,00	
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	11 Dokumen	1.205.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	72.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1.057.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	11 Dokumen	1.057.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	70.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						1.279.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	11 Laporan	1.279.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	25.000.000,00	KECAMATAN HARAU
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU						**1.768.770.562,00**							**2.209.858.705,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.768.770.562,00**							**2.209.858.705,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.768.770.562,00**							**2.209.858.705,00**	
278.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.741.769.562,00**							**1.885.439.005,00**	
		-	-	-		-	-	1.741.769.562,00						-	1.765.439.005,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.722.500,00					-		42.500.000,00	
		-	-					3.722.500,00					-		42.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.148.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	820.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.754.500,00						-	17.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.148.000,00							17.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.148.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						820.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	820.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.754.500,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	15 Laporan	1.754.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.619.294.762,00					-		1.445.439.005,00	
		-	-					1.619.294.762,00					-		1.445.439.005,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	1.836.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	848.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.616.610.762,00						-	1.425.439.005,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.616.610.762,00							1.425.439.005,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 Orang/bulan	1.616.610.762,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.425.439.005,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.836.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	1.836.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						848.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	848.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.290.000,00					-		10.000.000,00	
		-	-					1.290.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.290.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.290.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	6 Laporan	1.290.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.538.000,00							35.000.000,00	
		-						9.538.000,00							35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.538.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	8.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						8.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	16 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.538.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	16 Dokumen	1.538.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.067.400,00							131.000.000,00	
		-						33.067.400,00							131.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	24.035.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.138.200,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.378.200,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	516.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						516.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	516.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.138.200,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.138.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.378.200,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.378.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.035.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	24.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.036.900,00							55.000.000,00	
		-						3.036.900,00							55.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	3.036.900,00						-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.036.900,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	30 Unit	3.036.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.060.000,00							72.500.000,00	
		-						9.060.000,00							72.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.300.000,00						-	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.610.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	150.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						150.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	15 Laporan	150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.300.000,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	7.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.610.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.610.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.760.000,00							94.000.000,00	
		-						62.760.000,00							94.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	60.970.000,00						-	82.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.790.000,00						-	11.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.970.000,00							82.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	60.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	82.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.790.000,00							11.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	1.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
279.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.922.000,00**							**61.500.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	2.922.000,00						-	61.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.440.000,00							30.500.000,00	
		-						1.440.000,00							30.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.440.000,00						-	30.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.440.000,00							30.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	12 Laporan	1.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.482.000,00							31.000.000,00	
		-						1.482.000,00							31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.482.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.482.000,00							31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.482.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**6.110.000,00**							**85.919.700,00**	
				-		-	-	4.850.000,00						-	55.919.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.590.000,00					-		25.919.700,00	
		-	-					3.590.000,00					-		25.919.700,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.590.000,00						-	25.919.700,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.590.000,00							25.919.700,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.919.700,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						2.520.000,00					-		60.000.000,00	
		-	-					2.520.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	1.260.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	1.260.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						1.260.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	150 Keluarga	1.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1.260.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	200 Keluarga	1.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
281.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.365.000,00**							**57.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	1.365.000,00						-	57.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.365.000,00					-		57.500.000,00	
		-	-					1.365.000,00					-		57.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.365.000,00						-	57.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.365.000,00							57.500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	12 Laporan	1.365.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	57.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
282.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.000.000,00**							**60.000.000,00**	
				-		-	-	14.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.000.000,00					-		60.000.000,00	
		-	-					14.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	14.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						14.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
283.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.604.000,00**							**59.500.000,00**	
				-		-	-	2.604.000,00						-	59.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.604.000,00					-		59.500.000,00	
		-	-					2.604.000,00					-		59.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.488.000,00						-	32.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	1.116.000,00						-	27.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.488.000,00							32.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	12 Dokumen	1.488.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						1.116.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	12 Laporan	1.116.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	27.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
		KECAMATAN KAPUR IX						**2.334.172.031,00**							**2.157.937.062,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.334.172.031,00**							**2.157.937.062,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.334.172.031,00**							**2.157.937.062,00**	
284.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.304.672.031,00**							**2.062.437.062,00**	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	2.292.672.031,00						-	2.032.437.062,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00					-		14.000.000,00	
		-	-					2.500.000,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	500.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.153.958.031,00					-		1.621.372.062,00	
		-						2.153.958.031,00					-		1.621.372.062,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.151.958.031,00						-	1.615.872.062,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.151.958.031,00							1.615.872.062,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	2.151.958.031,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.615.872.062,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					-		3.000.000,00	
		-						500.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.500.000,00					-		74.500.000,00	
		-						50.500.000,00					-		74.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	38.000.000,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.000.000,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.214.000,00					-		50.000.000,00	
		-						18.214.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	18.214.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.214.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	18.214.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.000.000,00					-		45.000.000,00	
		-						23.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.500.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.000.000,00					-		253.565.000,00	
		-						55.000.000,00					-		253.565.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.000.000,00						-	185.365.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.000.000,00						-	58.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.000.000,00							58.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	6 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	58.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							185.365.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	185.365.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
285.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**4.000.000,00**							**3.000.000,00**	
			1. IKM 2.SAKIP	-		-	91 65 Nilai	3.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	2.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
286.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.000.000,00**							**60.000.000,00**	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	-		-	55 Nilai	4.000.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						4.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	1.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
287.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.000.000,00**							**500.000,00**	
			Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	-		-	53 Nilai	1.000.000,00						-	500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00					-		500.000,00	
		-						1.000.000,00					-		500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00						-	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
288.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						18.000.000,00							30.000.000,00	
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-		-	55 Nilai	18.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						18.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	18.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						18.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
289.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1.500.000,00							2.000.000,00	
			Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	-		-	55 Nilai	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00					-		2.000.000,00	
		-						1.500.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.500.000.000,00							6.256.500.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.500.000.000,00							6.256.500.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.500.000.000,00							6.256.500.000,00	
290.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.613.967.000,00							3.986.500.000,00	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 Persentase	3.473.967.000,00						-	3.836.500.000,00	
				-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		80.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	20 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.314.967.000,00					-		3.430.000.000,00	
		-						3.314.967.000,00					-		3.430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.294.967.000,00						-	3.400.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.294.967.000,00							3.400.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	3.294.967.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						128.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						128.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	3.000.000,00					-	-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00					-	-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00					-	-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00					-	-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00					-	-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	8 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		20.000.000,00	
		-						0,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.000.000,00					-		31.500.000,00	
		-						21.000.000,00					-		31.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-		20.000.000,00							30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	100.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	28 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
291	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**480.000.000,00**							**1.190.000.000,00**	
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		-	90 Persentase	460.000.000,00						-	1.090.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						480.000.000,00					ASN dan Penyelenggara Negara, Generasi Muda dan Dunia Pendidikan, Komponen Masyarakat		1.190.000.000,00	
		-						480.000.000,00					ASN dan Penyelenggara Negara, Generasi Muda dan Dunia Pendidikan, Komponen Masyarakat		1.190.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	300.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	200 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	650 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	100 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-		-	28 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						300.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	28 Orang	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
292.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**164.140.000,00**							**350.000.000,00**	
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	-		-	90 Persentase	164.140.000,00						-	350.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							164.140.000,00					Partai Politik, Masyarakat dan Generasi Muda, ASN dan Penyelenggara Negara		350.000.000,00	
		-						164.140.000,00					Partai Politik, Masyarakat dan Generasi Muda, ASN dan Penyelenggara Negara		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	-	80.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	64.140.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	100 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							64.140.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	100 Orang	64.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-		-	1 Kegiatan	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
293.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**25.893.000,00**							**30.000.000,00**	
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	-		-	90 Persentase	25.893.000,00						-	30.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						25.893.000,00					Organisasi Masyarakat yang bersekretariat di Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
		-						25.893.000,00					Organisasi Masyarakat yang bersekretariat di Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	25.893.000,00						-	30.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						25.893.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	1 Dokumen	25.893.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
294.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**68.500.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	-		-	85 Persentase	68.500.000,00						-	150.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						68.500.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
		-						68.500.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	43.725.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	24.775.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						24.775.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	60 Orang	24.775.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						43.725.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	75 Orang	43.725.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
295.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**147.500.000,00**							**550.000.000,00**	
			Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	-		-	90 Persentase	147.500.000,00						-	550.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						147.500.000,00					Masyarakat		550.000.000,00	
		-						147.500.000,00					Masyarakat		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	37.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	80.500.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	50 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						80.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	60 Orang	80.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						37.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	4 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.526.304.897,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.526.304.897,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.526.304.897,00**							**0,00**	
296.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.471.190.284,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	4.232.190.284,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						78.500.000,00					BPBD		0,00	
		-						78.500.000,00					BPBD		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	12.500.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.270.026.887,00					BPBD		0,00	
	-	-	-					3.270.026.887,00					BPBD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	11.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	11.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.223.026.887,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.223.026.887,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	65 Orang/bulan	3.223.026.887,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						243.500.000,00					BPBD		0,00	
		-						243.500.000,00					BPBD		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	142.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	49.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02.5002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						142.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	142.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.5003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						32.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.5009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						49.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	90 Orang	49.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.5011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.663.397,00					-		0,00	
		-						320.663.397,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	24.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	102.663.397,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	-		-	0 Paket	17.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.663.397,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	102.663.397,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00					BPBD		0,00	
		-	-					169.000.000,00					BPBD		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	13.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.500.000,00					BPBD		0,00	
		-						83.500.000,00					BPBD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00					-	-	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						37.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.000.000,00					-		0,00	
		-						306.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	20.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	75.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	160.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	15.000.000,00					-	-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	36.000.000,00					-	-	0,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						160.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
297.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.055.114.613,00**							**0,00**	
				-		-	-	1.445.114.613,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						100.000.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						922.614.613,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						922.614.613,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	92.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	86.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	89.614.613,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	6 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						80.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	100 Keluarga	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	45 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						92.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						86.000.000,00							0,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	12 laporan	86.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						89.614.613,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	100 Orang	89.614.613,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						433.000.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						433.000.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	-	68.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						68.000.000,00							0,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	89 Orang	68.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00							0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	100 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						90.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						599.500.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
		-	-					599.500.000,00					Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	93.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	98.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	-	88.000.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						88.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	90 Orang	88.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	90 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						98.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan keteresediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	98.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						93.500.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	93.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							1.374.402.392.540,00							1.670.520.617.275,47	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, serta indikator terkait IPM antara lain Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan di daerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2028 sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Lima Puluh Tahun 2026 – 2028

No	Indikator	Satuan	Target		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,68	6,87	6,99
2.	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp. Juta	63,53	70,68	78,29
3.	PDRB Per Kapita ADHK (Rp, Juta)	Rp. Juta	34,68	36,66	38,79
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,05	73,41	73,76
5.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,79	73,97	74,15
6.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,48	13,51	13,53
7.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,26	8,33	8,40
8.	Pengeluaran Per Kapita (Rp, Ribu)	Rp. Ribu	10.972	11.142	11.318
9.	Tingkat Pengangguran Tebuka (%)	%	3,65	3,57	3,49
10.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	24.141	23.001	22.421
11.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,88	5,54	5,34
12.	Rasio Gini	Indeks	0,218	0,217	0,216

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Daerah menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2026-2028 dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Satuan	Target		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,14	2,18	2,22
2.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100
3.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	100	100	100
4.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,3	63,6	64,8
5.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,12	3,14	3,16
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,04	72,40	72,84
7.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,05	74,11	76,16
8.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,30	4,31
9.	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	100%	100%
10.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,05	73,41	73,76
11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,26	8,33	8,40
12.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,48	13,51	13,53
13.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,79	73,97	74,15
14.	Rasio Gini	Rasio	0,218	0,217	0,216
15.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	62.871.993	64.374.937	65.877.881
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,65	3,57	3,49
17.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,68	6,87	6,99
18.	Proporsi jumlah IKM	%	3,51	3,59	3,66
19.	Rasio Kewirausahaan	%	7,23	7,36	7,5
20.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,904	0,946	0,988
21.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39,84	41,04	42,24
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	69,3	71,8	74,3
23.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan	%	10,21	10,19	10,16

No	Indikator	Satuan	Target		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
	pokok				
24.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,84%	14,11%	14,37%
25.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,24	0,26
26.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,925	5,4	5,875
27.	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,93	0,95	0,97
28.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Ribu orang	1,5	2	2,5
29.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi	%	1,651	1,690	1,730
30.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	%	33,24%	33,96%	34,68%
31.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,01	76,22	76,44
32.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	117,91 - 116,64	116,63 - 115,36	115,35 - 114,08
33.	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,33	11,46	13,60
34.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	15,5	17	18,5
35.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	54,04	56,93	59,82
36.	Indeks tutupan lahan	Indeks	75,46	75,53	75,59
37.	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	36,48	37,94	39,14
38.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	33,66	36,63	39,60
39.	Indeks Desa	Indeks	Mandiri	Mandiri	Mandiri
40.	Persentase Desa Mandiri (%)	%	88,61%	91,14%	93,67%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target Indikator Kinerja Daerah untuk tahun 2026-2028 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,59	84,09	84,59	
2.	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,73	5,35	4,97	
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	372	405	438	
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	78,96	80,46	82,06	
5.	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,036	0,042	0,054	
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,01	76,22	76,44	
7.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,33	11,46	13,60	
8.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	75,46	75,53	75,59	
9.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	36,48	37,94	39,14	
10.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	33,66	36,63	39,60	
11.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,91 - 116,64	116,63 - 115,36	115,35 - 114,08	
12.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41	0,46	0,52	
13.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	410,33	414,92	419,48	
14.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,11%	1,10%	1,09%	
15.	Rasio Penduduk	%	100,77%	100,85%	100,92%	
16.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	121,24	120,60	119,95	
17.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	15,5	17	18,5	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,68	6,87	6,99	
2.	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp, Juta	63,53	70,68	78,29	
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,88	5,54	5,34	
4.	Rasio Gini	Rasio	0,218	0,217	0,216	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,05	73,41	73,76	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,65	3,57	3,49	
7.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,79	73,97	74,15	
8.	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	83	83	83	
9.	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	22,65	21,40	20,15	
10.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	53	61	69	
11.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89	90	90	
12.	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	%	98,10%	98,20%	98,30%	
13.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,26	8,33	8,40	
14.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,48	13,51	13,53	
15.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	12,12	12,24	12,36	
16.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	70,41	70,89	71,36	
17.	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L: 54,99% N: 47,49%	L: 55,48% N: 47,98%	L: 55,97% N: 48,47%	
18.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	25,99	29,27	32,55	
19.	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	2,32	3,62	4,91	
20.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,14	2,18	2,22	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
21.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	
22.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,3	63,6	64,8	
23.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,423	0,408	0,393	
24.	Indeks perlindungan khusus anak	Indeks	81,7	81,8	81,9	
25.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,59	3,63	3,67	
26.	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab	Unit Layanan	-	-	-	
27.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	26	49	77	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	62.871.993	64.374.937	65.877.881	
2.	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/orang	70.006.474	71.224.927	72.443.380	
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,925	5,4	5,875	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,93	0,95	0,97	
5.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota	%	1,651	1,690	1,730	
6.	Rasio Kewirausahaan	%	7,23	7,36	7,5	
7.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39,84	41,04	42,24	
8.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	69,3	71,8	74,3	
9.	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	98,22%	98,22%	98,23%	
10.	Rasio PDRB sektor jasa keuangan	%	2	2,05	2,1	
11.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	33,24%	33,96%	34,68%	
12.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Ribu orang	1,5	2	2,5	
13.	Indeks digital masyarakat Indonesia	Indeks	51,57	53,39	55,21	
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	31,35%	31,50%	31,66%	
15.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,84%	14,11%	14,37%	
16.	Persentase Desa Mandiri (%)	%	88,61%	91,14%	93,67%	
17.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	54,04	56,93	59,82	
18.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	15,5	17	18,5	
19.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,24	0,26	
20.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,904	0,946	0,988	
21.	ROA BUMD	%	0,002	0,003	0,004	
22.	Proporsi jumlah IKM	%	3,51	3,59	3,66	
23.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,04	56,17	59,31	
24.	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10,21	10,19	10,16	
25.	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	9,79	12,58	15,37	
26.	Nilai Transaksi Saham per Kapita(Rupiah)	Rupiah	951.242	1.112.876	1.274.510	
27.	Total Kredit/PDRB	%	11,52	12,41	13,30	
28.	Persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	2.102	2.122	2.142	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,05	74,11	76,16	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)*	Indeks	1,3*	1,4*	1,5*	
3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	98,464	98,518	98,572	
4.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,12	3,14	3,16	
5.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,30	4,31	
6.	Persentase kerjasama wajib yang	%	76%	82%	88%	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
	dilaksanakan					
7.	Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Nilai	71,25 (rentan)	72,73 (rentan)	73,48 (waspada)	
8.	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	
9.	Angka Kriminalitas (per 100,000)	per 100.000	107,4	102,8	98,2	
10.	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	Indeks	47	49	51	
11.	Penyelesaian gangguan Kamtibmas	%	77,30%	77,89%	78,43%	
12.	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,74	0,75	0,76	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A.	PENDIDIKAN					
1.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	%	89,33	89,73	90,13	
2.	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	80,67	81,24	81,82	
3.	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	70,82	75,49	80,17	
4.	Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	97,05	98	98,5	
5.	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	100	100	
6.	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	80	80	
7.	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	80	80	
8.	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,66	0,68	0,7	
9.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,75	67,61	72,46	
10.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	100	100	
11.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	100	100	
12.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	100	100	
13.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,26	8,33	8,4	
14.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,48	13,51	13,53	
B.	KESEHATAN					
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,79	73,97	74,15	
2.	Jumlah kematian ibu	Orang	6	5	5	
3.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	85	90	93	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	22,65	21,40	20,15	
5.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
6.	Cakupan kepesertaan aktif jkn	%	82	84,5	87	
7.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	86	88	89	
8.	Jumlah kematian balita	Orang	72	71	71	
9.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	46	55	61	
10.	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	66,1	67,9	69,7	
11.	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	%	1,4	1,4	1,4	
12.	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	%	22,5	23	23,5	
13.	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	%	23.4	23.4	23.4	
14.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	59,1	65,6	72,1	
15.	Tingkat kepuasan pasien terhadap	%	83,81	84,23	84,65	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
	layanan kesehatan					
16.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	48,5	48,9	49,4	
17.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	
18.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	63,4	65,7	69	
19.	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	59,1	65,5	72,1	
20.	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	91	92	93	
21.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	11,4	10,4	9,4	
22.	Cakupan penemuan kasus TB	%	45	50	52	
23.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	100	100	100	
24.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100	100	100	
25.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	
26.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	64	65	67	
27.	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	64	65	67	
28.	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	55	58	60	
29.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan	%	100	100	100	
30.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	88	90	95	
31.	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	100%	100%	100%	
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Indeks Pembangunan IKK	%	0,91	14,28	28,14	
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	54,16	55,54	56,66	
D.	PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota kabupaten/kota	%	100	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	
3.	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	1,66	2,49	3,32	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	18,74	18,46	18,18	
5.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	30	45	62.5	
E.	KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	%	100	100	100	
2.	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100	
3.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	
4.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	
5.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	96	97	98	
7.	Waktu Tanggap *(Respone Time)* Penanganan Kebakaran	Menit	15 menit	15 menit	15 menit	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
F.	SOSIAL					
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	51,50	52,50	53,50	
2.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	80	82	84	
3.	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	
4.	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	95	95	95	
5.	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	%	100	100	100	
6.	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	
7.	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	
8.	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	
9.	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	
10.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	
11.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	
12.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	
13.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	
14.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	20	20	20	
15.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	
16.	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,67	0,67	0,67	
17.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	100	
18.	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,34	1,34	1,34	
19.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	
20.	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100	
21.	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	
22.	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	95	95	95	
G.	TENAGA KERJA					
1.	Proporsi Jumlah IKM	%	3,51	3,59	3,66	
2.	Rasio Kewirausahaan	%	7,23	7,36	7,5	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,65	3,57	3,49	
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	69,3	71,8	74,3	
5.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	40,98	42,90	44,81	
6.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	62.871.993	64.374.937	65.877.881	
7.	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Dokumen	0	1	1	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah					
8.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya.	%	60	70	80	
9.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	%	60	70	80	
10.	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	0	100	100	
H.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,3	63,6	64,8	
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,423	0,408	0,393	
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,88	94,9	94,93	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,7	64,7	64,9	
5.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	4.78%	5.00%	5.38%	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	69.30%	71.80%	74.30%	
7.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85,5	90	90,5	
8.	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	30	40	60	
9.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	75	75	75	
10.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,6	60,9	70	
11.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85,5	90	90,5	
12.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	81,7	81,8	81,9	
I.	PANGAN					
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,59	84,09	84,59	
2.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	100	100	100	
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,4	91,9	92,4	
4.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,59	6,39	5,06	
5.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	89,3	92	94,6	
J.	PERTANAHAN					
1.	Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	%	80	80	80	
K.	LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	76,01	76,22	76,44	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	%	31,38	34,66	37,95	
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	95	96	97	
L.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	95,96	96,46	96,96	
2.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.	%	10%	15%	20%	
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	55%	57%	59%	
4.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	96%	97%	98%	
6.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	100%	
7.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100%	100%	100%	
8.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	
9.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100%	100%	100%	
M.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	Persentase Desa Mandiri	%	88,61%	91,14%	93,67%	
2.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0%	4%	4%	
3.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0%	100%	100%	
4.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	80%	80%	85%	
5.	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	90%	90%	90%	
7.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	90%	90%	90%	
N.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2.34	2.33	2.33	
2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	13.6	12.9	12.3	
3.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	79.8	83.4	85.7	
4.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	%	65.82%	68.40%	71%	
5.	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12%	11%	10%	
6.	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern	%	82.50%	83.40%	84.20%	
7.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	69.60%	75.90%	82.30%	
8.	Persentase Kahamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	13.1%	12.3%	11.6%	
9.	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	70%	75%	80%	
10.	Indeks Lansia Berdaya	%	62	62.8	63.6	
11.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	85.1	86.3	87.5	
O.	PERHUBUNGAN					
1.	Rasio konektivitas	Rasio	50	51	52	
P.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	Indeks SPBE (Indeks Pemdi)*	Indeks	1,3* (Indeks Pemdi)	1,4* (Indeks Pemdi)	1,5* (Indeks Pemdi)	
2.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	82,80	82,90	83,00	
Q.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,953	1.044	1.135	
2.	Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	%	10,21	10,19	10,16	
3.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	%	13,84	14,11	14,37	
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,84	14,11	14,37	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,5	2,5	2,5	
6.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,8	2	2	
7.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0	1	1	
8.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	5	8	10	
9.	Persentase Koperasi Aktif	%	50	55	55	
10.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	1	3	5	
11.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	16	17	18	
12.	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,5	2,5	2,5	
R.	PENANAMAN MODAL					
1.	Persentase Peningkatan Investasi	%	12	12	12	
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	87,5	88	88,5	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	96	96	96	
4.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	96	96	96	
5.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	90	90	90	
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	
7.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	15	20	20	
S.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,12	0,13	0,14	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	31,34	35,35	39,36	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	orang	53	64	75	
4	Rasio Wira Usaha Pemuda	%	14	16	18	
5	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	15	17	19	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	14	16	18	
T.	STATISTIK					
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,66	2,7	2,75	
U.	PERSANDIAN					
1.	Indeks KAMI	Indeks	15	15,5	16	
2.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	38,50	39,00	39,50	
V.	KEBUDAYAAN					
1.	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	75,35	79,55	89,65	
2.	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	69,59	79,85	80,3	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	0	65,65	70,65	
4.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	
5.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	100	100	100	
6.	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	%	69,25	75,35	80,5	
W.	PERPUSTAKAAN					
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,25	80,75	81,15	
2.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100	100	
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	90,6	91,48	92,47	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
X.	KEARSIPAN					
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	55,41	55,91	56,41	
2.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	23,97	23,97	40,64	
3.	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	100	100	
4.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	49,04	50,18	51,54	
5.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	23,97	23,97	40,64	
Y.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	33,24	33,96	34,68	
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	45.034,77	46.403,61	47.862,73	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.314,57	4.412,94	4.515,76	
4.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	40.720,20	41.990,67	43.346,97	
5.	Luas Kawasan Konservasi	Ha	0	4220,45	4220,45	
6.	Angka Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	41,24	41,82	42,57	
7.	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	400	405	410	
Z.	PARIWISATA					
1.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	1,5	2	2,5	
2.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1,651	1,690	1,730	
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	0,95	0,99	1,03	
4.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	15	17	19	
5.	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	20	20	20	
6.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	14	16	
7.	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	16	17	18	
AA.	PERTANIAN					
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	33,24	33,96	34,68	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	2	2	
3	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2	2	2	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	2	2	2	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	
6	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	%	1,2	1,2	1,2	
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	95,00	96,00	97,00	
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	95,00	96,00	97,00	
9	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	100	100	100	
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	2	2	2	
11	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	3	3	3	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
1.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	33,24	33,96	34,68	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	7	7	7	
3.	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas	%	2	2	2	
4.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	2	2	2	
5.	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	2	2	2	
6.	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	2	2	2	
7.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	2	2	2	
8.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	2	2	2	
AB.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	%	0	0	0	
AC.	PERDAGANGAN					
1.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	36	37	38	
2.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100	100	100	
3.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10,21	10,19	10,16	
4.	Nilai Ekspor Barang	%	0	14,11	14,37	
5.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	10,5	11	11,5	
6.	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	%	0	15	15	
AD.	PERINDUSTRIAN					
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,01	7,39	7,77	
2.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	7,01	7,39	7,77	
3.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	10	12	14	
4.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100	100	
AE.	PERENCANAAN					
1.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	
2.	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	
3.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	%	100	100	100	
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	81	82	83	
AE.	KEUANGAN					
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,21	0,23	0,25	
2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	
3.	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	%	47	30	30	
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	22	40	40	
5.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	97,3	97,8	98,3	
6.	Persentase Penurunan SILPA	%	2,8	2,2	1,7	
7.	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	100	100	100	
8.	Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap	%	5,75	6,25	6,55	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	11,65	13,15	14,65	
10.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Nagari	79	79	79	
11.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	40	55	70	
AF.	PENGADAAN					
1.	Persentase jumlah totalproyek konstruksi yangdibawa ke tahunberikutnya yangditandatangani padakuartal pertama	%	0	0	0	
2.	Persentase jumlahpengadaan yangdilakukan denganmetode kompetitif	%	100	100	100	
3.	Rasio nilai belanja yangdilakukan melaluipengadaan	%	21,97	26,14	30,31	
AG.	KEPEGAWAIAN					
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	80	83	
2.	Indeks Sistem Merit	Indeks	260	270	280	
AH.	TRANSPARANSI DANPARTISIPASI PUBLIK					
1.	Informasi tentangsumber daya yangtersedia untuk pelayanan	%	98,94	98,99	99,04	
2.	Akses publik terhadapInformasi keuangandaerah	%	75,76	80,31	84,86	
AI.	TRANSMIGRASI					
1.	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang.	%	0	25	30	
2.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan.	%	8	8,5	9,3	
AJ.	SEKRETARIAT DAERAH					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	64,28	65,78	66,71	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Nilai	90	90	90	
3.	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	Nilai	95	95	95	
4.	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	%	81	82	83	
5.	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	%	100	100	100	
6.	Indeks Tata Kelola pengadaan	Nilai	81,5	82,5	84,5	
7.	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	
8.	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	%	100	100	100	
AK.	SEKRETARIAT DPRD					
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	80	80	
2.	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N	Nilai	9	9	9	
3.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	80	80	
4.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	
5.	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	
AL.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	32	35	37	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
AM.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	15	20	
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	10	12	14	
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	10	12	14	
4.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,04	56,17	59,31	
AN.	PEMERINTAHAN UMUM					
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani	%	93	94	95	
2.	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	55	60	65	
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	%	65,3	65,3	65,3	
4.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	90	90	
5.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	%	90	91	92	
6.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	90	90	90	
7.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	85	85	85	
AO.	PENGAWASAN					
1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2.	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	%	85,55	85,75	85,8	
3.	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	%	85,55	85,75	85,8	
4.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	
5.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
AP.	KECAMATAN BUKIK BARISAN					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	67	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	91	92	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	60	65	70	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	80	85	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	60	65	70	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	65	70	
AQ.	KECAMATAN SULIKI					
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	83	66	67	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	66	85	90	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	65	66	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	66	66	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	66	66	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	66	67	
AR.	KECAMATAN GUGUAK					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	66	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	90	90	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	66	70	75	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	50	55	60	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	90	90	90	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	50	65	70	
AS.	KECAMATAN MUNGKA					
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	50	55	60	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Nilai	85	89	90	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	73	73	73	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	73	73	73	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	50	55	60	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	50	55	60	
AT.	KECAMATAN AKABILURU					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72,1	72,2	72,3	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,6	89,7	89,8	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	50	55	60	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	55	60	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	50	55	60	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	50	55	60	
AU.	KECAMATAN PAYAKUMBUH					
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	71	71	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	82	83	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	81	81	82	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	61	62	62	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	66	66	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	65	66	
AV.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	67	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	91	91	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	65	66	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	66	66	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	66	66	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	66	67	
AW.	KECAMATAN HARAU					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	71	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	95	95	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	75	75	75	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	75	75	75	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	75	75	75	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	75	75	75	

No.	Indikator	Satuan	Target			Ket
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
AX.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	67	68	69	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,3	91,5	91,75	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Angka	81	82	83	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	60	70	75	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	60	70	75	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	60	70	75	
AY.	KECAMATAN KAPUR IX					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	60	65	68	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,5	91	91,5	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	53	55	58	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	53	55	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	53	55	58	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	53	55	58	
AZ.	KECAMATAN LUAK					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	67	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	86	87	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	85	86	87	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	86	87	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	85	86	87	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	86	87	
BA.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI					
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75	75	75	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	80	80	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	60	75	80	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	80	80	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	80	80	80	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	100	100	
BB.	KECAMATAN GUNUANG OMEH					
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	82	83	
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	66	66	67	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	76	76	77	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	77	77	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	80	80	80	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	78	78	

*Mulai tahun 2026-2030, Indeks SPBE tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Indeks Pemdi
Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 adalah rencana kerja tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, dimana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari RPJMD dan Renstra PD untuk tahun 2027. Program dan Kegiatan ini tidak saja merupakan rencana teknokratik dari masing-masing PD tetapi juga diperkaya dengan usulan dan masukan dari masyarakat melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta reses DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 diharapkan dapat memenuhi amanat RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka RKPD Tahun 2027 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, pedoman bagi perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, serta pedoman bagi *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2027.

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi.

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1) Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

   Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja,konsistensi

kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang di implementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran.
d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2) Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang mencakup:

a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah.
b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal di atas serta untuk menjamin terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2027 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati (Kepala Daerah) dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi terhadap penjabaran RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2027.
5. Seluruh PD dan *stakeholders* dan/atau pelaku pembangunan lainnya berkewajiban melaksanakan program-program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 secara terintegrasi dan dengan mewujudkan sinergitas antar *stakeholder* terkait.
6. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.
7. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap PD berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dilakukan secara berkala setiap triwulan dan pada akhir tahun pelaksanaan RKPD terhadap indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari PD dan lembaga resmi lainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi RKPD juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing PD dan dilaporkan sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan perundangan.

Di samping beberapa kaidah yang dirumuskan di atas, maka untuk kesuksesan pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, maka diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk dukungan dari lembaga legislatif, Pemerintah Nagari dan masyarakat, serta seluruh *stakeholders* yang merasa berkepentingan dan memiliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

LAMPIRAN

Tabel
Manajemen Risiko Strategis

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
1	sv11		PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target sehingga PDRB per kapita tidak tercapai.		1. Pertumbuhan sektor unggulan melambat. 2. Investasi daerah tidak berkembang optimal. 3. Produktivitas UMKM dan sektor pertanian rendah. 4. Bencana alam yang mengganggu aktivitas ekonomi. 5. Inflasi tinggi yang tidak diikuti peningkatan produksi.		Target PDRB per kapita tidak tercapai; Daya saing daerah menurun; dan Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara optimal.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
2	sv12	4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	- Daya saing daerah menurun akibat daya tarik investor menurun - Rendahnya serapan tenaga kerja dari industri pengolahan		- Penurunan aktifitas produksi akibat terbatasnya kemampuan menciptakan nilai tambah - Rendahnya kontribusi industri pengolahan menyebabkan sedikitnya tenaga kerja yang terserap		- Menurunnya pendapatan daerah dari sektor industri pengolahan - Naiknya angka pengangguran - Ketergantungan daerah pada ekspor bahan mentah dimana harga cenderung fluktuatif	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
3	sv21		Tingkat Kemiskinan (%)						
4	sv22	3	Rasio Gini	Ketimpangan pendapatan meningkat		Konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu Kurangnya pemerataan program pemberdayaan		Kesenjangan sosial semakin besar Potensi konflik sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
5	sv23	4	Pertumbuhan ekonomi	Terganggunya stabilitas perekonomian dengan naiknya angka inflasi dan angka pengangguran		Krisis ekonomi dunia berdampak pada krisis nasional dan daerah dengan jatuhnya harga komoditas		- Pertumbuhan perekonomian daerah cenderung melambat - Terjadinya inflasi - Meningkatnya angka kemiskinan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
6	sv3	2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penurunan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	1.	Capaian indikator kinerja rendah		Menurunnya kualitas tata kelola daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Monitoring dan evaluasi internal tidak berjalan efektif			
					3.	Rendahnya koordinasi antar OPD dalam penyusunan data kinerja			
					4.	Perubahan regulasi pusat terkait penilaian kinerja daerah			
7	sv4	3	Indeks Pembangunan Manusia	Rendahnya nilai IPM	1. 2. 3.	Rendahnya rata-rata lama sekolah Akses layanan kesehatan belum merata Tingkat pengangguran tinggi	1. 2. 3.	Angka kemiskinan meningkat Daya saing SDM rendah Ketimpangan sosial semakin melebar	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
				Ketimpangan capaian IPW antar wilayah	1. 2.	Infrastruktur dasar tidak merata Distribusi program pembangunan belum optimal	1. 2.	Daerah tertinggal semakin tertinggal Tingkat migrasi ke kota meningkat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
				Penurunan usia harapan hidup	1. 2.	Pola Hidup tidak sehat Kurangnya fasilitas kesehatan primer	1. 2.	Angka kematian meningkat Produktivitas penduduk menurun	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
8	1	3	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rendahnya usia harapan hidup	1. 2.	Ketersediaan layanan kesehatan terbatas Pola hidup tidak tidak sehat	1. 2.	Angka kematian tinggi Beban ekonomi keluarga bertambah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
9	2	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rendahnya produktifitas tenaga kerja	1. 2.	Rendahnya keterampilan dan kompetensi pekerja Minimnya pelatihan berbasis industri		Daya saing tenaga kerja lemah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
				Rendahnya serapan tenaga kerja		Terbatasnya peluang kerja formal	1. 2.	Tingkat pengangguran terbuka meningkat Pendapatan rumah tangga rendah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
10	2a		Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Tingginya angka kematian ibu sehingga target AKI tidak tercapai	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Keterlambatan deteksi komplikasi kehamilan Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu Kurangnya akses ke fasilitas kesehatan Keterbatasan tenaga kesehatan Rendahnya kepatuhan pemeriksaan ANC (Antenatal Care) Faktor sosial dan ekonomi	1. 2. 3. 4.	Meningkatnya kematian ibu Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Tidak tercapainya target pembangunan kesehatan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
11	2b		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	- Target penurunan prevalensi stunting pada balita tidak tercapai. - Meningkatnya jumlah balita yang mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi. - Tingginya kasus stunting pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.		- Rendahnya pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. - Belum optimalnya akses terhadap sanitasi dan air minum layak. - Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola asuh dan pemberian makanan bergizi.		- Menurunnya kualitas kesehatan dan tumbuh kembang balita. - Menurunnya kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. - Tidak tercapainya target pembangunan daerah di bidang kesehatan.	Balita dan Keluarga; Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
12	3a		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Kasus Tuberkulosis yang tidak tertangani meningkat dan dapat memicu meningkatnya risiko penularan dan pelonjakan angka kematian akibat keterlambatan penanganan	1. 2.	Lemahnya pemantauan dan pelaporan kasus Rendahnya literasi kesehatan masyarakat	1. 2.	Terjadinya ledakan kasus tuberkulosis baru di masyarakat Angka kematian akibat tuberkulosis meningkat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
13	3b		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis target tidak tercapai		1. Pasien putus berobat (loss to follow up). 2. Kepatuhan minum obat rendah. 3. Keterlambatan diagnosis dan pengobatan. 4. Efek samping obat menyebabkan pasien menghentikan pengobatan. 5. Keterbatasan pengawasan oleh PMO (Pengawas Menelan Obat). 6. Stigma masyarakat terhadap penderita TB. 7. Mobilitas pasien tinggi sehingga sulit dipantau. 8. Keterbatasan pelaporan dan pencatatan kasus TB.		1. Penguatan penemuan dan pelacakan kasus TB. 2. Penguatan peran PMO dan kader kesehatan. 3. Monitoring kepatuhan pengobatan secara berkala. 4. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan. 5. Pemanfaatan aplikasi SITB dan pemantauan digital. 6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana TB. 7. Penguatan jejaring layanan TB di puskesmas, rumah sakit dan klinik.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
14	4		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	- Rendahnya perlindungan masyarakat terhadap resiko penyakit dan pembiayaan akibat sakit- - Naiknya angka penderita penyakit-penyakit kronis sebagai dampak dari rendahnya angka kepesertaan jaminan kesehatan		- Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar premi iuran kesehatan dan besarnya angka tunggakan iuran masyarakat sebagai dampak dari tingginya angka kemiskinan - Masyarakat tidak/belum paham tentang pentingnya asuransi kesehatan - Perlindungan biaya belum menyeluruh		- Tingginya angka kematian akibat tidak ada biaya dalam berobat - Bertambahnya jumlah masyarakat miskin yang terdampak akibat pembiayaaan berobat yang tidak dibantu oleh asuransi kesehatan	

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
15	5a		Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional tidak mencapai target yang ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik Kualitas pembelajaran yang belum optimal Keterbatasan kompetensi pendidik Sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memadai Rendahnya pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran Ketidakhadiran peserta didik saat asesmen	1. 2. 3. 4.	Menurunnya capaian mutu pendidikan Tidak tercapainya target kinerja sektor pendidikan Rendahnya daya saing peserta didik Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
16	5b	3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Banyak anak putus sekolah	1. 2.	Keterbatasan ekonomi keluarga Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan	1. 2.	Rata-rata lama sekolah menurun Kompetensi SDM rendah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
17	5c	3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Harapan lama sekolah stagnan	1. 2.	Akses pendidikan tidak merata Infrastruktur pendidikan belum memadai		Kesempatan pendidikan jangka panjang menurun	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
18	6		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	- Target proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi tidak tercapai. - Rendahnya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. - Meningkatnya kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat.		- Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. - Rendahnya minat dan motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. - Terbatasnya akses terhadap perguruan tinggi, beasiswa, dan bantuan pendidikan.		- Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. - Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tinggi. - Tidak tercapainya target pembangunan daerah di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Masyarakat usia 15 tahun ke atas; dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
19	7		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Jumlah lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang bekerja di bidang yang lebih rendah dari bidang keahlian menengah tinggi meningkat, dan terjadinya ketidaksesuaian keterampilan di dunia kerja	1. 2. 3.	Ketersediaan lapangan kerja formal dan berkualitas tidak mengimbangi pertumbuhan jumlah lulusan pendidikan menengah tinggi Kesenjangan kompetensi kurikulum Perlambatan ekonomi yang menyebabkan efisiensi perusahaan	1. 2. 3.	Lulusan pendidikan menengahtinggi terpaksan mengambil pekerjaan berkeahlian rendah dengan pendapatan lebih rendah dari seharusnya Terjadi pergeseran tenaga kerja lapisan bawah dimana lulusan menengah tinggi akan menggeser tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih rendah Memperparah angka pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
20	9		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Belum optimalnya perluasan kepesertaan pekerja sektor informal dan pekerja rentan.	1. 2. 3. 4.	Basis data pekerja rentan belum akurat; Rendahnya kemampuan membayar iuran; Sosialisasi program belum menjangkau seluruh nagari; Tingginya jumlah pekerja mandiri dan usaha mikro.		Target cakupan kepesertaan tidak tercapai sehingga perlindungan sosial tenaga kerja belum optimal; dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan hari tua.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
21	10		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Rendahnya tingkat partisipasi kerja terhadap pekerja disabilitas pada sektor formal yang berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan		- Belum tersedianya fasilitas prasarana yang ramah terhadap disabilitas di lingkungan kerja formal - Kualitas SDM disabilitas yang masih rendah karena masih minimnya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas - Instansi/lembaga/ perusahaan belum memberikan formasi kerja yang cukup bagi pencari kerja disabilitas		- Tingginya angka disabilitas yang berkerja di sektor informal sebagai dampak kurangnya formasi kerja di sektor formal - Tingginya angka pengangguran sebagai dampak sulitnya disabilitas bekerja di sektor formal - Rendahnya perlindungan terhadap pekerja disabilitas yaitu tanpa adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan karena bekerja pada sektor informal - Rentannya pekerja disabiltas mengalami eksploitasi yaitu dibayar dengan upah yang minim	
22	11	4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	- Daya saing daerah menurun akibat daya tarik investor menurun - Rendahnya serapan tenaga kerja dari industri pengolahan		- Penurunan aktifitas produksi akibat terbatasnya kemampuan menciptakan nilai tambah - Rendahnya kontribusi industri pengolahan menyebabkan sedikitnya tenaga kerja yang terserap		- Menurunnya pendapatan daerah dari sektor industri pengolahan - Naiknya angka pengangguran - Ketergantungan daerah pada ekspor bahan mentah dimana harga cenderung fluktuatif	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
23	12a	4	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah 2. Sektor hotel dan kuliner tidak berkembang sesuai target ekonomi daerah.		1. Rendahnya investasi di sektor perhotelan dan kuliner 2. Fasilitas akomodasi tidak memenuhi standar sehingga menurunkan minat wisatawan 3. Kurangnya promosi pariwisata secara nasional maupun internasional 4. Gangguan pada rantai pasok bahan baku yang mempengaruhi sektor kuliner 5. Keterbatasan SDM terlatih di sektor perhotelan dan pelayanan wisata		1. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat 2. Pendapatan UMKM kuliner menurun 3. Lapangan kerja sektor pariwisata berkurang	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
24	12b	4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	- Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata - Bertambahnya jumlah pengangguran		1. Akses jalan menuju destinasi wisata yang belum memadai 2. Promosi pariwisata ke pasar luar negeri kurang efektif 3. Bencana alam atau faktor keamanan 4. Kualitas layanan dan fasilitas wisata yang tidak memenuhi standar internasional		1. Tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata 2. Hotel, restoran, dan usaha pendukung pariwisata mengalami penurunan omset 3. Daya saing destinasi wisata daerah menurun dibandingkan daerah lain di tingkat nasional maupun internasional 4. Berkurangnya peluang investasi di sektor pariwisata karena pasar wisatawan asing dianggap kurang potensial	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
25	13	4	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi	Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional		1. Minimnya pelatihan dan pendampingan SDM untuk inovasi produk kreatif 2. Kurangnya platform pemasaran digital untuk produk ekonomi kreatif daerah 3. Kolaborasi antar pelaku industri kreatif masih lemah, sehingga inovasi kurang berkembang 4. Infrastruktur pendukung ekonomi kreatif (pusat desain, inkubator bisnis) belum optimal		1. Produk ekonomi kreatif daerah sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional 2. Kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif terbatas, meningkatkan tekanan pada sektor lain 3. Daya tarik investasi di sektor kreatif rendah, sehingga pertumbuhan jangka panjang terhambat 4. Pendapatan daerah dari subsektor kreatif menurun, mempengaruhi target pembangunan ekonomi berbasis UMKM	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
26	14a		Proporsi jumlah UKM non pertanian	Proporsi jumlah UKM non-pertanian tidak mencapai target yang ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha di sektor non-pertanian Keterbatasan akses permodalan Rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pelaku usaha Terbatasnya akses pasar Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital Kondisi ekonomi yang kurang mendukung perkembangan usaha	1. 2. 3. 4.	Pertumbuhan sektor ekonomi non-pertanian menjadi lambat Berkurangnya kesempatan kerja Rendahnya diversifikasi ekonomi daerah Tidak tercapainya target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
27	14b	4	Proporsi jumlah IKM	;- Lambatnya pembangunan ekonomi daerah - Meningkatnya angka pengangguran - Menurunnya daya saing IKM		- Pelaku usaha IKM kurang mendapatkan akses untuk berkembang karena kurangnya modal dan lemahnya daya saing - Kurangnya penyerapan tenaga kerja oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah - Rendahnya kualitas dan inovasi produk IKM		- Rendahnya IKM menyebabkan potensi daerah dalam sektor pertanian, kerajinan tidak termanfaatkan dengan maksimal - Bertambahnya angka pengangguran - Terhambatnya perluasan akses pasar domestik maupun ekspor	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
28	14c	4	Rasio Kewirausahaan	1. Minimnya pelaku usaha baru berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja 2. Kurangnya wirausaha baru membuat perekonomian daerah rmelambat		1. Terbatasnya permodalan untuk pelaku usaha baru 2. Minimnya pendampingan dan pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi 3. Ketidakpastian kondisi ekonomi menyebabkan calon pelaku usaha takut memulai usaha 4. Regulasi dan perizinan usaha yang kurang sederhana, membuat calon pengusaha kesulitan memulai bisnis		1. Pertumbuhan UMKM melambat karena rendahnya angka wirausaha baru 2. Lapangan kerja baru terbatas, meningkatkan naiknya angka pengangguran 3. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB stagnan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan 4. Inovasi bisnis daerah lemah, membuat daerah kurang menarik untuk investasi	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
29	14d	4	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	- Menurunnya pembiayaan koperasi kepada anggotanya menyebabkan melambatnya aktivitas ekonomi lokal - Kurangnya daya serap koperasi terhadap tenaga kerja dan produksi lokal		-Terjadinya kegagalan usaha, kredit macet menurunkan kepercayan anggota kepada koperasi - Berkurangnya aktivitas ekonomi lokal			Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
30	14e		ROA BUMD	- Target ROA BUMD tidak tercapai. - Menurunnya kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. - Menurunnya kinerja keuangan dan profitabilitas BUMD.		- Pemanfaatan aset BUMD belum optimal. - Tingginya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. - Rendahnya efisiensi pengelolaan usaha dan tata kelola BUMD.		- Menurunnya laba dan kesehatan keuangan BUMD. - Berkurangnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). - Terhambatnya pengembangan usaha dan peningkatan layanan BUMD.	BUMD beserta manajemen dan pegawainya; Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan BUMD.
31	15	4	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Pendapatan masyarakat menurun 2. Menurunnya daya beli masyarakat 3. Meningkatnya angka kemiskinan		- Pendapatan masyarakat menurun karena tidak bekerja - Turunnya daya beli masyarakat karena konsumsi masyarakat yang turun - Tingginya angka pengangguran sebagai salah saru penyebab meningkatnya angka kemiskinan		- Pertumbuhan ekonomi melambat - Besarnya alokasi anggaran daerah untuk menanggani dampak pengganggguran sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain menjadi berkurang (pendidikan, infrasturktur, kesehatan)	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
32	15a	4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	- Rendahnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kerja informal - Tidak ada jaminan kesehatan, pensiun dan upah UMR - Penyusunan kebijakan yang tidak matang karena tidak tersedianya data tenaga kerja yang resmi		- Tidak tersedianya data resmi terhadap tenaga kerja informal sehingga mereka akan rentan terhadap eksploitasi kerja - Pekerjaan informal yang tersedia cenderung tidak menentu dan bersifat sementara		- Semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat akibat rendahnya proporsi tenaga kerja formal - Rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor tenaga kerja	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
33	16	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	- Masih rendahnya kontribusi tenaga kerja perempuan yang berkualitas - Rendahnya angka kesetaraan gender terhadap perempuan -		- Kurangnya pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja perempuan - Terjadinya diskriminasi gender didunia kerja terhadap perempuan - Kebijakan yang belum maksimal berpihak pada perempuan (pemberian cuti, gaji yang setara UMR, rasa aman dalam bekerja)		- Kemandirian ekonomi perempuan cenderung rendah terutama perempuan sebagai kepala keluarga - Perempuan sebagai potensi tenaga kerja tidak termanfaatkan secara baik sehingga akan menghambat pembangunan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
34	17		Indeks Inovasi Daerah	Kualitas layanan publik stagnan dan dapat menyebabkan penurunan daya saing daerah	1. 2.	Kurang/tidak lengkapnya kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung inovasi Keterbatasan sumber daya dan pendampingan terhadap pelaksanaan inovasi	1. 2.	Daerah memperoleh predikat penilaian inovasi yang lebih rendah dari yang ditargetkan Stagnasi kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
35	18a1	5	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	Bencana alam dan dampak penomena iklim		Perubahan cuaca yang tidak menentu		Menurun produksi pertanian dan perikanan	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota / Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
				Fluktuasi harga komoditi pertanian dan perikanan, serta inflasi		Perubahan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan provinsi		Menurunnya daya saing komoditas pertanian dan perikanan di pasar	
						Meningkatnya inflasi			
				Ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk, pakan, alsintan, pestisida/obat-obatan)		Kebijakan anggaran daerah		Tengganggunya kuantitas dan kualitas produksi	
36	18a2		Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga target indikator tidak tercapai.		1. Penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian masih terbatas. 2. Kualitas SDM petani, nelayan dan pelaku usaha kehutanan masih rendah. 3. Alih fungsi lahan produktif. 4. Serangan hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan. 5. Perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi. 6. Keterbatasan akses permodalan dan sarana produksi. 7. Rendahnya nilai tambah hasil produksi karena minimnya pengolahan pascapanen.		Produktivitas tenaga kerja tidak meningkat; Pendapatan petani dan nelayan stagnan; Pertumbuhan ekonomi sektor primer melambat; serta target pembangunan ekonomi daerah tidak tercapai.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota / Masyarakat
37	19		Indeks digital masyarakat Indonesia	Makin lebarnya kesenjangan kompetensi digital antar masyarakat dalam pilar infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, pekerjaan		Rendahnya kualitas SDM di bidang digital, literasi dan pemanfaatan teknologi internet		- Rendahnya inovasi masyarakat digital Indonesia - Rendahnya daya saing masyarakat dengan masyarakat global	

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
38	20		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok tidak mencapai target yang ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Gangguan distribusi dan rantai pasok Keterbatasan pasokan dari produsen atau daerah pemasok Cuaca ekstrem dan bencana alam Kenaikan biaya transportasi dan logistik Praktik penimbunan barang Lemahnya pengawasan pasar	1. 2. 3. 4. 5.	Terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok Kenaikan harga yang tidak terkendali Menurunnya daya beli masyarakat Meningkatnya inflasi daerah Terganggunya stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
39	21		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	- Target kontribusi PMTB terhadap PDRB tidak tercapai. - Menurunnya realisasi investasi yang mendukung pembentukan modal tetap. - Melambatnya pertumbuhan aset produktif yang mendukung kegiatan ekonomi daerah.		- Rendahnya minat investasi akibat kurang kondusifnya iklim usaha. - Keterbatasan pembangunan infrastruktur pendukung investasi dan produksi. - Ketidakpastian kondisi ekonomi yang memengaruhi keputusan investasi.		- Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. - Menurunnya kapasitas produksi dan daya saing daerah. - Berkurangnya penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru.	Pelaku usaha dan investor; Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
40	22	4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Hasil sumber daya alam dan hasil produk unggulan daerah yang tidak termanfaatkan secara maksimal		- Kualitas produk daerah dan jasa yang belum memenuhi standar pasar luar negari		- Penurunan Pendapatan Daerah - Berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan	Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
41	23a	6	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	-Gagal Mencapai Target SDGs (Sustainable Development Goals) 11, 12 dan 13 -Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat -menurunkan daya saing daerah - meningkatnya kawasan kumuh		Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal		terjadinya pencemaran lingkungan, resiko terjadinya banjir, ancaman terhadap kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
42	23b	7	Persentase Desa Mandiri (%)	Penurunan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	1.	Capaian indikator kinerja rendah		Menurunnya kualitas tata kelola daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Monitoring dan evaluasi internal tidak berjalan efektif			
					3.	Rendahnya koordinasi antar OPD dalam penyusunan data kinerja			
					4.	Perubahan regulasi pusat terkait penilaian kinerja daerah			
				Penurunan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Komitmen pimpinan dan OPD terhadap reformasi birokrasi masih rendah		Birokrasi lamban dan tidak responsif	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Keterlambatan pelaksanaan aksi perubahan dan inovasi layanan			
					3.	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap indikator penilaian RB			
					4.	Perubahan regulasi penilaian RB dari pusat yang memengaruhi capaian daerah			

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
				Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan	1.	Tingginya harapan masyarakat tidak diiringi peningkatan kualitas layanan		Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Kompetensi dan integritas petugas pelayanan rendah			
					3.	Fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik tidak memadai			
				Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum	1.	Produk hukum daerah belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang baik (tidak partisipatif, transparan, akuntabel)		Penegakan hukum yang lemah sehingga layanan ke masyarakat menjadi terganggu	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Harmonisasi antar-regulasi daerah dan pusat tidak optimal			
				Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak ditindaklanjuti	1.	Keterbatasan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan		Ketidaktertiban sosial meningkat	Masyarakat
					2.	Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perda			
43	24	2	Indeks Reformasi Hukum	Penurunan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Komitmen pimpinan dan OPD terhadap reformasi birokrasi masih rendah		Birokrasi lamban dan tidak responsif	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Keterlambatan pelaksanaan aksi perubahan dan inovasi layanan			
					3.	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap indikator penilaian RB			
					4.	Perubahan regulasi penilaian RB dari pusat yang memengaruhi capaian daerah			

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
44	25		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)*	Penurunan penilaian integritas instansi dan menurunnya kepercayaan publik	1. 2. 3.	Perencanaan yang kurang maksimal Regulasi yang belum memadai Kompetensi Digital ASN		Terhambatnya pelayanan publik	Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
45	26	2	Indeks Pelayanan Publik	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan	1.	Tingginya harapan masyarakat tidak diiringi peningkatan kualitas layanan		Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat
					2.	Kompetensi dan integritas petugas pelayanan rendah			
					3.	Fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik tidak memadai			
46	27a		Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Rendahnya efektivitas penerapan sistem pencegahan korupsi dan penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah sehingga nilai SPI tidak mencapai target.		1. Belum optimalnya implementasi budaya integritas dan anti korupsi. 2. Masih terdapat potensi konflik kepentingan dalam pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa. 3. Pengendalian gratifikasi belum berjalan optimal. 4. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi masih rendah. 5. Pengawasan internal belum efektif. 6. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik belum optimal. 7. Tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi APIP belum sepenuhnya diselesaikan.		Nilai SPI menurun atau tidak mencapai target; Menurunnya kepercayaan masyarakat; Meningkatnya risiko fraud dan korupsi; serta menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
47	27b		Indeks Persepsi Anti Korupsi	- Rusaknya stabilitas politik , sosial dan ekonomi		- Lemahnya tata kelola birokrasi penegak hukum kepada pejabat publik dan penegak hukum yang korup - Lemahnya pengawasan dari lembaga terkait dan tidak adanya transparasi dalam pengawasan tersebut		- Mengancam keselamatan, keamanan dan perdamaian negara secara luas - Korupsi mampu menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir, terorisme bahkan perang melalui pejabat-pejabat yang korup	
48	28	2	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak ditindaklanjuti	1.	Keterbatasan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan		Ketidaktertiban sosial meningkat	Masyarakat
					2.	Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perda			
49	29		Angka Kriminalitas (per 100,000)	Angka kriminalitas per 100.000 penduduk tidak mencapai target penurunan yang telah ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Lemahnya upaya pencegahan dan penegakan hukum Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Tingginya tingkat pengangguran dan masalah sosial ekonomi Penyalahgunaan narkotika dan minuman keras Kurangnya sarana keamanan lingkungan Terbatasnya koordinasi antarinstansi terkait	1. 2. 3. 4. 5.	Menurunnya rasa aman masyarakat Terganggunya ketertiban umum Menurunnya iklim investasi dan kegiatan ekonomi Meningkatnya kerugian materiil dan sosial Tidak tercapainya target pembangunan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
50	30		Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	- Target Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat tidak tercapai. - Rendahnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi masyarakat. - Menurunnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah.		- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia pengelola organisasi masyarakat. - Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap organisasi masyarakat. - Rendahnya komitmen organisasi dalam menerapkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.		- Menurunnya efektivitas peran organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. - Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. - Tidak tercapainya target pembangunan daerah yang memerlukan dukungan organisasi masyarakat.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
51	31	4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	- Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat - Lemahnya kemandirian fiskal daerah		- Pendapatan daerah yang terbatas karena masih rendahnya kepatuhan objek pajak - Kualitas SDM pajak yang masih rendah - Sistem pajak yang belum terdigitalisasi dengan baik - Regulasi pajak yang belum berazazkan keadilan dan tidak menghambat pelaku usaha - Rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap Pajak		- Pembangunan daerah tidak optimal karena terbatasnya anggaran - Rendahnya tingkat investasi sebagai dampak infrastruktur yang tidak memadai - Daerah dengan rasio pajak yang rendah akan tertinggal dibanding daerah lain yang lebih mandiri secara fiskal	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
52	33a		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. Modal produktif terbatas 2. Ketergantungan pendanaan eksternal 3. Kemandirian ekonomi daerah rendah	1. 2. 3.	Sektor informal lebih banyak Literasi keuangan yang rendah Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah	1. 2. 3.	Melambatnya pertumbuhan ekonomi Pengangguran dan kemiskinan meningkat Ketergantungan pada dana pusat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
53	33c		Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	Rendahnya partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam investasi pasar modal sehingga nilai transaksi saham per kapita tidak mencapai target.		1. Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih rendah. 2. Minat investasi masyarakat masih terbatas pada instrumen konvensional. 3. Pendapatan masyarakat belum memadai untuk berinvestasi. 4. Kurangnya edukasi pasar modal kepada generasi muda dan pelaku usaha. 5. Tingginya volatilitas pasar saham yang menurunkan minat investor. 6. Akses terhadap layanan pasar modal di daerah masih terbatas.		Nilai transaksi saham per kapita tidak mencapai target; Rendahnya inklusi keuangan; Terbatasnya alternatif investasi masyarakat; dan kurang berkembangnya ekosistem investasi daerah.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
54	33d		Total Kredit/PDRB						
55	34		Rasio PDRB sektor jasa keuangan	Rasio kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB tidak mencapai target yang telah ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Rendahnya pertumbuhan aktivitas sektor jasa keuangan Terbatasnya akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan Perlambatan investasi dan penyaluran kredit Terbatasnya inovasi layanan keuangan Kondisi ekonomi yang kurang kondusif.	1. 2. 3. 4.	Menurunnya kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah Terhambatnya pertumbuhan investasi dan usaha Rendahnya akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
56	35		Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	- Target persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan tidak tercapai. - Tertundanya pelaksanaan kerja sama wajib dengan pemerintah daerah atau pihak terkait. - Tidak terlaksananya sebagian kerja sama wajib yang telah direncanakan.		- Belum optimalnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kerja sama. - Keterbatasan sumber daya dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerja sama. - Keterlambatan penyelesaian dokumen dan persyaratan administrasi kerja sama.		- Menurunnya efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memerlukan kerja sama. - Terhambatnya pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik. - Tidak optimalnya pemanfaatan potensi dan sumber daya antar daerah atau antar pihak yang bekerja sama.	Perangkat Daerah terkait; dan Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan dan pembangunan.
57	36		Penyelesaian gangguan Kamtibmas	1. Peningkatan pelanggaran kamtibmas 2. Kepercayaan publik menurun 3. Meningkatnya kerentanan wilayah	1. 2. 3.	Keterbatasan anggaran dan logistik Kesadaran hukum publik yang masih rendah Kesenjangan sosial	1. 2. 3. 4.	Pelanggaran kamtibmas meningkat Pelayanan publik terganggu Terjadinya disintegrasi sosial Terganggunya keamanan daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
58	37	1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Semakin berkurangnya cagar budaya yang dilestarikan		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya		Hilangnya Identitas dan Warisan Budaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						Cagar budaya yang ada tidak terjaga dengan baik		Hilangnya Potensi Wisata Budaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
59	38	1	Indeks ABS-SBK	Rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat yang ditandai dengan rendahnya nilai Indeks ABS-SBK. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00-1,00), sedang (>1,00-2,00) dan tinggi (>2,00-3,00).		1. Modernisasi dan Globalisasi Arus modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai adat, seperti individualisme dan hedonisme. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.		1. Pelemahan Identitas Budaya Nilai-nilai Minangkabau yang tercermin dalam ABS-SBK seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap orang tua, bisa tergerus oleh budaya lain atau gaya hidup individualis. Hal ini menyebabkan hilangnya kebanggaan terhadap identitas budaya Minangkabau.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						2. Perkembangan Teknologi Kemudahan akses informasi dan teknologi juga turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Mereka cenderung lebih memilih jalan pintas dan mengabaikan prosesi adat yang dianggap rumit.		2. Pergeseran Norma Sosial ABS-SBK menjadi dasar norma dan aturan dalam masyarakat Minangkabau. Jika nilai-nilainya melemah, norma-norma sosial yang ada juga bisa terpengaruh, menyebabkan ketidakteraturan dan konflik dalam masyarakat.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						3. Kurangnya Pemahaman Generasi Muda Banyak generasi muda Minangkabau yang kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pembinaan dan transfer pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda.		3. Moralitas yang Menurun ABS-SBK menekankan pentingnya akhlak dan perilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Jika nilai-nilai ini tidak diterapkan, moralitas masyarakat bisa menurun, ditandai dengan meningkatnya perilaku negatif seperti korupsi, ketidakjujuran, dan pelanggaran norma agama.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
						4. Peran Ninik Mamak Ninik mamak sebagai tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai ABS-SBK. Namun, kesibukan ninik mamak dalam urusan pekerjaan dan keluarga, serta kurangnya sanksi moral dari masyarakat terhadap ninik mamak yang tidak menjalankan tugasnya, menjadi kendala dalam implementasi ABS-SBK.		4. Konflik Sosial Perbedaan pemahaman atau penerapan ABS-SBK bisa memicu konflik antarindividu, keluarga, atau bahkan antar nagari.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						5. Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan Sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai ABS-SBK kepada masyarakat, terutama generasi muda, masih belum optimal. Kurangnya lembaga atau wadah yang fokus pada pembinaan nilai-nilai adat juga menjadi kendala.		5. Keretakan Hubungan Sosial Nilai-nilai ABS-SBK seperti kebersamaan dan gotong royong, jika melemah, dapat menyebabkan renggangnya hubungan sosial dalam masyarakat.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						6. Perbedaan Pemahaman Terdapat perbedaan pemahaman mengenai ABS-SBK di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kesetaraan gender dan interpretasi nilai-nilai adat dalam konteks modern.		6. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan ABS-SBK memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Jika nilai-nilainya tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, bisa menjadi lebih sulit.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
						7. Faktor Ekonomi Adanya anggapan bahwa pelaksanaan adat membutuhkan biaya yang besar juga menjadi faktor yang membuat sebagian masyarakat enggan menjalankan adat.		7. Kualitas Pembangunan yang Menurun Nilai-nilai ABS-SBK yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kerja keras, jika tidak diterapkan, dapat menghambat pembangunan yang berkualitas	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
60	39	1	Indeks Pembangunan Keluarga	Keluarga tidak mencapai kondisi ideal yang diharapkan (tentram, mandiri dan bahagia)		1.Kurang harmonisnya hubungan antar anggota keluarga		1. Terhambatnya tumbuh-kembang anak	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						2. Rendahnya pendapatan keluarga		2. Tingkat kemiskinan meningkat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat
						3. Rendahnya moralitas anggota keluarga		3. Tingkat kriminalitas meningkat	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
61	40a		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan masih tinggi sehingga target penurunan IKG tidak tercapai.		1. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambil keputusan dan lembaga politik. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. 3. Akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi belum optimal. 4. Masih terdapat perkawinan usia anak dan kehamilan usia remaja. 5. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah. 6. Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap.		Target IKG tidak tercapai; Kualitas pembangunan manusia menurun; Kesenjangan sosial-ekonomi meningkat; serta manfaat pembangunan tidak dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Masyarakat

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
62	40b		Indeks perlindungan khusus anak	Tidak terpenuhinya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan serta hak pendidikan bagi anak		- Terjadinya kekerasan pada anak pada lingkungan keluarga - Eksploitasi anak dalam bekerja sehingga anak kehilangan kebebasan dan hak sebagai anak serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak - Anak/ remaja menikah pada usia dini dan berdampak pada reproduksi anak - Faktor sosial ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan anak		- Meningkatnya kerentanan terhadap keselamatan anak-anak yang memicu resiko kekerasan dan eksploitasi pada anak - Meningkatnya angka putus sekolah pada anak yang menghambat perkembangan kognitif pada anak - Meningktnya kenakalan pada anak dan remaja maupun pada tingkat kriminalitas - Meningkatnya persentase angka perkawinan pada anak - Menurunnya kualitas udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan daya tarik destinasi pariwisata.	
63	41	6	Indeks tutupan lahan	- gagal mencapai target SDGs 13, SDGs 6 dan SDGs 15 - menghambat pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup - peningkatan Risiko Lingkungan dan Bencana -Mengganggu Pembangunan Berkelanjutan Wilayah		adanya alih fungsi lahan secara masif untuk permukiman, adanya aktivitas penebangan liar, terjadinya bencana alam kebakaran hutan dan lahan		terjadinya peningkatan risiko bencana alam, menurunnya keanekaragaman hayati, terganggunya kesejahteraan masyarakat	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
64	42a	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- degradasi lingkungan -Gagal Mencapai Target SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDGs 6 (Air bersih dan sanitasi), SDGs 11 (Kota dan permukiman berkelanjutan), SDGs 13 dan 15 (iklim dan ekosistem daratan) -Ancaman Terhadap Kesehatan dan Produktivitas Penduduk -Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Praktik pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Rendahnya pengawasan terhadap limbah industri dan kontruksi , Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan, meningkatnya emisi kendaraan bermotor.		Menurunnya kualitas udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan daya tarik destinasi pariwisata.	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
65	42b	6	RT dengan Akses Sanitasi Aman	-Kegagalan Mencapai Target SDGs (Sustainable Development Goals) Khususnya Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. '-Penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Degradasi Lingkungan Hidup		tidak adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Lima Puluh Kota		menurunnya angka kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
66	42c1	6	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	-Gagal Mencapai Target SDGs (Sustainable Development Goals) 11, 12 dan 13 -Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat -menurunkan daya saing daerah		minimnya infrastruktur pengolahan sampah seperti tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle)		Terjadinya penumpukan sampah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, terjadinya Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah Secara Menyeluruh	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
67	42c2	6	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	-Gagal Mencapai Target SDGs (Sustainable Development Goals) 11, 12 dan 13 -Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat -menurunkan daya saing daerah - meningkatnya kawasan kumuh		Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal		terjadinya pencemaran lingkungan, resiko terjadinya banjir, ancaman terhadap kesehatan masyarakat	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
68	43a		Konsumsi Listrik Per Kapita	Konsumsi listrik per kapita tidak mencapai target yang telah ditetapkan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Keterbatasan akses dan jaringan listrik Rendahnya pertumbuhan sektor industri dan usaha Rendahnya daya beli masyarakat Gangguan pasokan listrik Lambatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Rendahnya tingkat elektrifikasi di wilayah tertentu.	1. 2. 3. 4.	Terhambatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat Rendahnya kualitas hidup masyarakat Lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa Tidak tercapainya target pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
69	43c1		Kapasitas Air Baku	- Target kapasitas air baku tidak tercapai. - Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. - Terganggunya kontinuitas penyediaan air baku akibat penurunan debit sumber air.		- Kerusakan daerah tangkapan air dan menurunnya kualitas lingkungan. - Perubahan iklim yang menyebabkan penurunan debit sumber air. - Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku.		- Berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi. - Menurunnya kualitas pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat. - Terhambatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan air.	Perusahaan penyedia layanan air minum; dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
70	43c2		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	1. Kesehatan rumah tangga yang tidak mendapatkan akses air minum perpipaan berisiko terganggu 2. Meningkatnya beban ekonomi rumah tangga 3. Terjadi kesenjangan sosial 4. Terhambatnya pembangunan daerah	1. 2. 3.	Keterbatasan anggaran dan pembiayaan Topografi yang sulit Kondisi sumber air wilayah	1. 2. 3.	Terganggunya kesehatan masyarakat Meningkatnya biaya hidup Terjadinya kasus kesulitan air bersih di beberapa wilayah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
71	44	6	Indeks Risiko Bencana Daerah	-Gagal Mencapai Target SDGs 11, SDGs 13, SDGs 1 dan 2 - Kerugian Ekonomi dan Terhambatnya Pertumbuhan Daerah - Peningkatan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial - Penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Minimnya investasi pada infrastruktur mitigasi bencana,Kurangnya integrasi tata ruang berbasis risiko bencana, Lemahnya Kapasitas kelembagaan dalam penangulangan bencana.		Tingkat kerentanan terhadap bencana meningkat, yang dapat memperbesar kerusakan infrastruktur dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta keselamatan masyarakat.	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	IUP	MR	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab		Dampak		
							Uraian		Pihak yang Terkena
1			2	3	32	4	42	5	6
72	45	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- degradasi lingkungan -Gagal Mencapai Target SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDGs 6 (Air bersih dan sanitasi), SDGs 11 (Kota dan permukiman berkelanjutan), SDGs 13 dan 15 (iklim dan ekosistem daratan) -Ancaman Terhadap Kesehatan dan Produktivitas Penduduk -Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Praktik pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Rendahnya pengawasan terhadap limbah industri dan kontruksi , Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan, meningkatnya emisi kendaraan bermotor.		Menurunnya kualitas udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan daya tarik destinasi pariwisata.	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. H. AZIZ HAILY, MA, SARILAMAK

KODE POS 262710, TELP. 0752-740700

EMAIL : bapelitbang50kota@gmail.com